



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan mengenai Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya;
 - c. bab III tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V penutup.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 2 Desember 2022

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022 NOMOR 17

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 17 TAHUN
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan akhir Renja PD untuk Tahun Anggaran 2023 Perangkat Daerah merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh suatu instansi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan akhir Rencana Kerja Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan akhir Renja Program dan kegiatan PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan akhir Renja PD merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Rancangan akhir Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini merupakan tahun ke dua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Adapun program/kegiatan serta kebijakan PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dan kebudayaan serta RKPD Kota Tomohon

Tahun 2023. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon turut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan dan kebudayaan di daerah. Pencapaian visi pendidikan nasional *“mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”*

Sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan pendidikan nasional jangka panjang (2005-2025), harus diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah lewat berbagai perencanaan program yang sinergis sesuai dengan kondisi lokal.

Rancangan akhir Rencana Kerja Renja PD ini merupakan salah satu instrument penting dalam perencanaan pendidikan dan kebudayaan di Kota Tomohon, yang berisi program/kegiatan untuk dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Awal Renja ini akan menjadi tolak ukur pencapaian target Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Renja PD Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodevikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tomohon Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013 – 2033;
33. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon;
34. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pejabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Renja PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini untuk dijadikan acuan dalam kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta pelaksanaan program kegiatan di tahun anggaran 2023 yang akan tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang maksud penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Awal Renja PD, keterkaitan Renja PD dan dokumen RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa saja yang menjadi landasan hukum penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Awal Renja PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Awal Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DIKBUD

2.1. Evaluasi Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

2.4. Review Terhadap Rancangan akhir Rencana Kerja Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.6. Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tomohon

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA BAPPEDA

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

4.1. TABEL PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

BAB V. PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

4.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA RENJA PD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON

2.1 Evaluasi Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi. Evaluasi dilaksanakan terhadap kinerja PD pada capaian Renja Tahun lalu.

Untuk melakukan evaluasi tersebut maka digunakan beberapa indikator, diantaranya Program/Kegiatan beserta indikatornya, target RPJMD dan RKPD untuk pelaksanaan Tahun 2023 yang dibandingkan dengan tingkat realisasinya.

Evaluasi pelaksanaan Rancangan akhir Rencana Kerja Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon tahun 2022 dan pencapaian kinerja RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi untuk merencanakan pembangunan yang transparan, efektif dan efisien.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon pada tahun 2023 melaksanakan 6 program 18 kegiatan 153 Sub kegiatan.

Adapun pelaksanaan Rancangan akhir Rencana Kerja Renja PD dan capaian RENSTRA PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon diuraikan melalui Tabel II.1 berikut:

Tabel 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN CAPAIAN RENSTRA PD S.D TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/RESTR A SKPD TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISAI (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2022 (TI)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON										
I A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100%	95.30	100%	95.30	100%	99.80	100%	95.30
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100%	79.27	100%	79.27	100%	100	100%	79.27
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah rapat/koordinasi dalam daerah yang diikuti	2 Dokumen	99.99	2 Dokumen	99.99	2 Dokumen	99.99	2 Dokumen	99.99
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	1 Tahun	100.00	1 Tahun	100.00	1 Tahun	100.00	1 Tahun	100.00
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen DPA	1 Dokumen	99.99	1 Dokumen	99.99	1 Dokumen	99.99	1 Dokumen	99.99
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	99.99	1 Dokumen	99.99	1 Dokumen	99.99	1 Dokumen	99.99
	5 Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah laporan	1	70.33	1	70.33	1	70.3	1	70.33

	Perubahan DPA-SKPD	kinerja SKPD yang tersusun dan kegiatan pengelolaan Keuangan	Dokumen		Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi Renja yang diadakan	2 Dokumen	53.43	2 Dokumen	53.43	2 Dokumen	53.43	2 Dokumen	53.43
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	2 Dokumen	95.49	2 Dokumen	95.49	2 Dokumen	95.49	2 Dokumen	95.49
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100%	95.49	100%	95.49	100%	95.49	100%	95.49
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	99.99	1 Kegiatan	99.99	1 Kegiatan	99.99	1 Kegiatan	99.99
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	99.99	1 Dokumen	99.99	1 Dokumen	99.99	1 Dokumen	99.99
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 Dokumen	95.81	2 Dokumen	95.81	2 Dokumen	95.81	2 Dokumen	95.81
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	100 Pasang	99.95	100 Pasang	99.95	100 Pasang	99.95	100 Pasang	99.95
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	94.18	2 Kegiatan	94.18	2 Kegiatan	94.18	2 Kegiatan	94.18
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	96.15	3 Kegiatan	96.15	3 Kegiatan	96.15	3 Kegiatan	96.15
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	98.67	3 Kegiatan	98.67	3 Kegiatan	98.67	3 Kegiatan	98.67
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100%	93.75	100%	93.75	100%	93.75	100%	93.75
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	10 Jenis	99.64	10 Jenis	99.64	10 Jenis	99.64	10 Jenis	99.64
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang	45 Jenis & 10	96.37	45 Jenis	96.37	45 Jenis	96.37	45 Jenis	96.37

		diadakan & Jumlah peralatan/perengkapan kantor yang diadakan	Jenis		s & 10 Jenis		is & 10 Jenis		is & 10 Jenis	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan/minum peserta kegiatan/rapat yang diadakan	7000 Orang	98.91	7000 Orang	98.91	7000 Orang	98.91	7000 Orang	98.91
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang diadakan	3 Jenis	91.58	3 Jenis	91.58	3 Jenis	91.58	3 Jenis	91.58
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan pegawai yang diadakan	5500 Eksemplar	82.72	5500 Eksemplar	82.72	5500 Eksemplar	82.72	5500 Eksemplar	82.72
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat/koordinasi luar daerah yang diikuti	1 Tahun	88.04	1 Tahun	88.04	1 Tahun	88.04	1 Tahun	88.04
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100%	85.54	100%	85.54	100%	85.54	100%	85.54
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan/perengkapan gedung kantor	5 Jenis	82.37	2 Jenis	82.37	2 Jenis	82.37	2 Jenis	82.37
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100%	77.59	100%	77.59	100%	77.59	100%	77.59
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos/keperluan surat menyurat yang diadakan	2900 Lembar	76.27	2900 Lembar	76.27	2900 Lembar	76.27	2900 Lembar	76.27
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, air, jasa komunikasi kantor yang terbayarkan	3 Jenis Tagihan	100.00	3 Jenis Tagihan	100.00	3 Jenis Tagihan	100.00	3 Jenis Tagihan	100.00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi yang menerima honor	55 Orang	95.30	55 Orang	95.30	55 Orang	95.30	55 Orang	95.30
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100%	79.27	30 Unit	79.27	30 Unit	79.27	30 Unit	79.27
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayar administrasi suratnya	30 Unit	99.99	30 Unit	99.99	30 Unit	99.99	30 Unit	99.99
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan/service	30 Unit	100.00	30 Unit	100.00	30 Unit	100.00	30 Unit	100.00

		kendaraan								
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/perengkapan kerja yang terawatt	25 Unit	99.99	25 Unit	99.99	25 Unit	99.99	25 Unit	99.99
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			92.66		92.66		92.66		92.66
A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	87	93.33	100 %	93.33	100 %	93.33	100 %	93.33
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	48.57	3 Paket	48.57	3 Paket	48.57	3 Paket	48.57
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	97.94	15 Ruang	97.94	15 Ruang	97.94	15 Ruang	97.94
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	98.00	3 Ruang	98.00	3 Ruang	98.00	3 Ruang	98.00
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	99.79	1 Ruang	99.79	1 Ruang	99.79	1 Ruang	99.79
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Unit	98.41	5 Paket	98.41	5 Paket	98.41	5 Paket	98.41
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	100.00	3 Paket & 9 Paket	100.00	3 Paket & 9 Paket	100.00	3 Paket & 9 Paket	100.00
7	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	64 Satuan Pendidikan	87.23	1 Kegiatan	87.23	1 Kegiatan	87.23	1 Kegiatan	87.23
8	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	64 Satuan Pendidikan	83.76	4 Kegiatan	83.76	4 Kegiatan	83.76	4 Kegiatan	83.76
9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti	100 Peserta didik	62.18	8 kegiatan	62.18	8 kegiatan	62.18	8 kegiatan	62.18

		Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					n		n	
10	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	226 orang	99.51	1 Kegiatan	99.51	1 Kegiatan	99.51	1 Kegiatan	99.51
11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	66 orang	84.06	3 Kegiatan	84.06	3 Kegiatan	84.06	3 Kegiatan	84.06
12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	64 Satuan Pendidik an	72.92	1 Kegiatan	72.92	1 Kegiatan	72.92	1 Kegiatan	72.92
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	64 Satuan Pendidik an	97.46	2 Kegiatan & 8 Standar	97.46	2 Kegiatan & 8 Standar	97.46	2 Kegiatan & 8 Standar	97.46
14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	64 orang	89.33	64 Orang	89.33	64 Orang	89.33	64 Orang	89.33
B	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMP LB/Sederajat	100%	94.22	100 %	94.22	100 %	94.22	100 %	94.22
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	95.78	1 Sekolah	95.78	1 Sekolah	95.78	1 Sekolah	95.78
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan	2 Ruang	99.87	1 Seko	99.87	1 Sek	99.87	1 Sek	99.87

		Sekolah yang			lah		olah		olah	
		Telah Dibangun								
3	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	96.84	1 Sekolah	96.84	1 Sekolah	96.84	1 Sekolah	96.84
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	99.73	2 Sekolah	99.73	2 Sekolah	99.73	2 Sekolah	99.73
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	98.09	2 Ruang	98.09	2 Ruang	98.09	2 Ruang	98.09
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/Berat	2 Ruang	99.26	1 Sekolah	99.26	1 Sekolah	99.26	1 Sekolah	99.26
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	99.36	3 Sekolah	99.36	3 Sekolah	99.36	3 Sekolah	99.36
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	99.99	5 Paket & 5 Paket	99.99	5 Paket & 5 Paket	99.99	5 Paket & 5 Paket	99.99
9	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	5295 Peserta Didik	78.58	1 Kegiatan	78.58	1 Kegiatan	78.58	1 Kegiatan	78.58
10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	58.64	8 Kegiatan	58.64	8 Kegiatan	58.64	8 Kegiatan	58.64
11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan	125 orang	97.28	1 Kegiatan	97.28	1 Kegiatan	97.28	1 Kegiatan	97.28

		Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
1 2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	24 orang	78.09	3 Kegiatan	78.09	3 Kegiatan	78.09	3 Kegiatan	78.09
1 3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	22 Satuan Pendidikan	74.64	2 Kegiatan & 8 Standar	74.64	2 Kegiatan & 8 Standar	74.64	2 Kegiatan & 8 Standar	74.64
1 4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	4 Satuan Pendidikan	99.80	8 Standar	99.80	8 Standar	99.80	8 Standar	99.80
1 5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta kegiatan	24 orang	90.29	24 Orang	90.29	24 Orang	90.29	24 Orang	90.29
C	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	50	89.43	100 %	89.43	100 %	89.43	100 %	89.43
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	70.43	100 %	70.43	100 %	70.43	100 %	70.43
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	98.76	1 Lembaga	98.76	1 Lembaga	98.76	1 Lembaga	98.76
3	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	87.63	1 Paket	87.63	1 Paket	87.63	1 Paket	87.63
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan	2 Paket	83.99	2 Paket	83.99	2 Paket	83.99	2 Paket	83.99

		Peraga PAUD yang Tersedia								
5	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	50 Peserta Didik	83.64	1 Lembaga	83.64	1 Lembaga	83.64	1 Lembaga	83.64
6	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	66 Satuan Pendidikan	96.07	3 Kegiatan	96.07	3 Kegiatan	96.07	3 Kegiatan	96.07
7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	105 Orang	95.00	1 Kegiatan	95.00	1 Kegiatan	95.00	1 Kegiatan	95.00
8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	66 Orang	94.10	3 Kegiatan	94.10	3 Kegiatan	94.10	3 Kegiatan	94.10
9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	66 Satuan Pendidikan	62.77	1 Kegiatan	62.77	1 Kegiatan	62.77	1 Kegiatan	62.77
10	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	66 Satuan Pendidikan	65.14	1 Kegiatan	65.14	1 Kegiatan	65.14	1 Kegiatan	65.14
D	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	APK Pendidikan Kesetaraan	70%	91.50	100 %	91.50	100 %	91.50	100 %	91.50
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	1 Unit	91.50	1 Paket	91.50	1 Paket	91.50	1 Paket	91.50
2	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan	1 Paket	91.50	1 Paket	91.50	1 Paket	91.50	1 Paket	91.50

		Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia								
3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	100.00	1 Paket	100.00	1 Paket	100.00	1 Paket	100.00
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	4 Satuan Pendidikan	100.00	3 Kegiatan	100.00	3 Kegiatan	100.00	3 Kegiatan	100.00
5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4 Satuan Pendidikan	100.00	2 Kegiatan	100.00	2 Kegiatan	100.00	2 Kegiatan	100.00
II	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			72.51		72.51		72.51		72.51
A	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			72.51	100%	72.51	100%	72.51	100%	72.51
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru /pendidik berkualifikasi minimal S1	85	72.51	1 Kegiatan	72.51	1 Kegiatan	72.51	1 Kegiatan	72.51
		Persentase guru bersertifikasi profesional	70	99.88		99.88		99.88		99.88
2	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3 Dokumen	99.88	100%	99.88	100%	99.88	100%	99.88
I	PROGRAM PENGENDALIAN	Presentase	100%	99.88	3 Kegi	99.88	3 Keg	99.88	3 Keg	99.88

	PERIZINAN PENDIDIKAN	Perijinan pendidikan			atan		iata n		iata n	
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan PAUD dan Non Formal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat	100%	92.66		92.66		92.66		92.66
	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	93.33		93.33		93.33		93.33
V	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Presentase pelaksanaan bahasa dan sastra	100%	48.57		48.57		48.57		48.57
1	Pembinaan, Pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam daerah kabupaten/ kota	Cakupan seluruh kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	97.94		97.94		97.94		97.94
V I	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Seni Budaya yang dibina	100%	98.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan yang dilaksanakan	100	99.79	100	100%	100%	100%	100%	100%
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 Orang	98.41	100 Orang	100	100	100	100	100
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok seni yang dilestarikan	15	100.00	15	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang
3	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan	15 Objek	87.23	15 Objek	15	15	15	15	15

[illegible]

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk periode 2020-2025 memiliki visi “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan 5 misi, yaitu:

- 1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
- 2. Mewujudkan akses yang meluas dan merata
- 3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
- 4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
- 5. Mewujudkan penguatan tata kelola sertapeningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Untuk mencapai misi-misi tersebut maka ditetapkan tujuan-tujuan strategis, yaitu:

- 1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini
- 2. Perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu
- 3. Peningkatan kepastian akses pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
- 4. Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat
- 5. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada pembentukan karakter
- 6. Peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
- 7. Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestrian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian Bahasa sebagai pengantar pendidikan.
- 8. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategisnya masing-masing. Untuk Tujuan 1 “Peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini”, memiliki sasaran dan indicator kinerja sasaran strategis seperti yang ditunjukkan Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Sasaran Strategis Tujuan 1 Kemedikbud 2020-2024

SasaranStrategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD	APK PAUD usia 4-6 tahun sekurang-kurangnya 78,7%
Meningkatnya mutu layanan PAUD	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 75 % lembaga

Sumber:Renstra Kemedikbud RI 2020-2024

Untuk Tujuan 2 “Perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu”, memiliki sasaran dan indicator kinerja sasaran strategis seperti yang ditunjukkan Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Sasaran Strategis Tujuan 2 Kemedikbud 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (7-15 tahun) yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
	APM SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 85,2%
	APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%
	APM SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 73,72%
	Rasio APK SMP/SMPLB/Paket B antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkayase besar 0,9

Sumber:RenstraKemdikbud RI 2020-2024

Untuk Tujuan 3 “Peningkatan kepastian akses pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat”, memiliki sasaran dan indicator kinerja sasaran strategis seperti yang ditunjukkan Tabel 3.3.

Untuk Tujuan 4 “Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat”, memiliki sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis seperti yang ditunjukkan Tabel 3.4.

Tabel 3. 3 Sasaran Strategis Tujuan 4 Kemedikbud 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Menurunnya penduduk niraksara usia dewasa di atas 15 tahun	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,1%
Meningkatnya program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNi	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi sebanyak 71,38%
Meningkatnya jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga
	Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang

Sumber : Renstra Kemdikbud RI 2020-2024

Untuk Tujuan 5 “Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada pembentukan karakter”, memiliki sasaran dan indicator kinerja sasaran strategis seperti yang ditunjukkan Tabel 3.5.

Tabel 3. 4 Sasaran Strategis Tujuan 5 Kemedikbud 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah	Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6,5
	Rata-rata nilai ujian sekolah SMP/SMPLB minimal 6,5
	Persentase SM yang memenuhi SPM sebanyak 75%
Meningkatnya karakter/perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan menengah	Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SD/SMP minimal baik
Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,2%
	Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%
	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81%
	Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
	Persentase SMA berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 85%
	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%
Meningkatnya penerapan KKNi dalam bidang kejuruan di SMK	Jumlah kompetensi keahlian SMK yang merapkan KKNi minimal sebanyak 70%

Sumber : Renstra Kemedikbud RI 2020-2024

Untuk Tujuan 6 “Peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan”, memiliki sasaran dan indicator kinerja sasaran strategis seperti yang ditunjukkan Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Sasaran Strategis Tujuan 6 Kemedikbud 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Meningkatnya jumlah guru dan tendik PAUD dan Dikmas profesional	Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37%
	Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%
Meningkatnya jumlah guru profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah guru profesional di SD/SDLB minimal sebanyak 95% dan SMP/SMPLB minimal sebanyak 95%
Meningkatnya jumlah kepala sekolah profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah kepala sekolah di SD/SDLB minimal sebanyak 95% dan SMP/SMPLB minimal sebanyak 95%
Meningkatnya jumlah pengawas profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah pengawas profesional di SD/SDLB minimal sebanyak 95% dan SMP/SMPLB minimal sebanyak 95%
Menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah SD memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM sebesar 71%
	Jumlah SMP memiliki jumlah guru sesuai SPM sebesar 83%

Sumber : Renstra Kemedikbud RI 2020-2024

Untuk Tujuan 7 “Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian Bahasa sebagai pengantar pendidikan”, memiliki sasaran dan indicator kinerja sasaran strategis seperti yang ditunjukkan Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Sasaran Strategis Tujuan 7 Kemedikbud 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Meningkatnya kesadaran dan	Indeks gotong royong di atas 0,55

pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebinekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks toleransi di atas 0,49
Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing SDM Indonesia	Skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012)
	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra menjadi 254.529 orang (dari 31.529 orang pada tahun 2014)
Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN	Jumlah pemelajar BIPA di kawasan ASEAN sebanyak 1.000 orang
	Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang
Meningkatnya penutur non-Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia	Jumlah penutur non Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia sebanyak 1.500 orang

Sumber : Renstra Kemdikbud RI 2020-2024

Untuk Tujuan 8 “Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik”, memiliki sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis seperti yang ditunjukkan Tabel 3.7

Tabel 3. 7 Sasaran Strategis Tujuan 8 Kemedikbud 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan PAUD dan Dikmas	Sejumlah minimal 54,6% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu Pembina holistik integrative
	Sejumlah minimal 15,6% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan dasar dan menengah	Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SMP pendidikan dasar sebesar 1
	Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1
Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa	Laporan keuangan Kemendikbud mendapat opini

Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP minimal sebesar 80

Sejalan dengan itu, Perubahan RENJA ini kemudian disinkronkan dengan mengacu dalam Visi Kota Tomohon adalah **“TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING dan SEJAHTERA”**. Kemudian Visi tersebut diuraikan dalam misi sebagai berikut.

3. TOMOHON MAJU

Mempunyai maksud bahwa pembangunan di kota Tomohon harus lebih baik dari pembangunan yang sudah dilaksanakan selama periode pembangunan sebelumnya. Orientasi pembangunan harus MAJU dalam bidang:

- a. Pembangunan Sosial
 - b. Pembangunan Ekonomi
 - c. Pembangunan Lingkungan
 - d. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
- a. Maju dalam Pembangunan Sosial:
 - Kota Tomohon harus terentaskan dan mampu menurunkan secara signifikan angka kemiskinan penduduk.
 - Kota Tomohon harus mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari kualitas kesehatan, kualitas Pendidikan dan kualitas ekonomi. IPM Kota Tomohon tertinggi nomor dua setelah kota Manado dengan besaran indeks 75,78, yang ditunjang oleh harapan lama sekolah sebesar 14,17 tahun, yang artinya penduduk usia sekolah di kota Tomohon lama sekolahnya sampai SMA dan masuk perguruan tinggi. Selain itu juga angka harapan nhidup penduduk kota Tomohon berada pada rata-rata usia 71,43 tahun, serta indeks pengeluaran per kapita sebesar 11.647.
 - Mampu meningkatkan kualitas pembangunan Pendidikan bagi semua di semua jenjang Pendidikan dari PUAD, TK, SD sampai Perguruan Tinggi.
 - Memperkuat kesetaraan gender bagi semua daalam rangka memperoleh kesamaan hak di semua sektor pembangunan.
- b. Maju dalam Pembangunan Ekonomi
 - Penduduk angkatan kerja di kota Tomohon harus meningkat dan mampu menurunkan angka pengangguran.
 - Mampu meningkatkan lapangan kerja khususnya sektor pariwisata, ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi UMKM, peningkatan ekonomi sektor pertanian.
 - Mampu membuka akses jalur ekonomi antar wilayah dengan memperhatikan sentra-sentra ekonomi di kota Tomohon yang terhubung dengan sektra ekonomi tingkat kecamatan serta hubungan antar daerah interface seperti Manado, Minahasa.

- Mampu meningkatkan jalur akses perhubungan transportasi dalam rangka mempermudah akses mobilitas penduduk di sektor pemenuhan ekonomi.
 - Mempermudah investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur yang memperkuat pembangunan jasa kepariwisataan di kota Tomohon.
- c. Maju dalam Pembangunan Lingkungan
- Pembangunan di kota Tomohon harus berbasis pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek meminimalisasi pencemaran lingkungan, pengurangan limbah, keberlangsungan ekologis, mempertahankan kawasan hutan lindung, pemanfaatan energi terbarukan, menerapkan manajemen lingkungan dalam rangka mengurangi dampak penting terhadap pembangunan infrastruktur dasar.
 - Mengembangkan pembangunan pemukiman yang berbasis pada pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- d. Maju dalam Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan
- Pengelolaan pemerintahan yang berbasis pada peningkatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan pada sinkronisasi peraturan dan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kota Tomohon.
 - Memperkuat Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kinerja.
 - Mengembangkan mekanisme pengelolaan pemerintahan berbasis pada pelayanan digital (DILAN), khususnya bersentuhan dengan pelayanan publik.
 - Pengendalian kinerja ASN berbasis pada e-kinerja.
 - Menjadikan Kota Tomohon sebagai Smart City yang pengawasannya dilakukan melalui Command Center.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menentukan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan: Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, dan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Nonformal mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus membentuk karakter dan pengenalan lingkungan sekitar. Karenanya, peningkatan akses PAUD, pemenuhan standar pelayanan PAUD dan pemberdayaan swasta dalam penyelenggaraan PAUD secara keseluruhan dan terintegrasi penting untuk diagendakan pada periode pembangunan pendidikan kedepan. Sementara peningkatan akses pendidikan non formal bermanfaat bagi masyarakat (remaja/orang dewasa) yang belum lulus pendidikan menengah memperoleh kualifikasi setara pendidikan dasar dan menengah dan juga memperoleh kecakapan hidup/keahlian untuk kemandirian hidup.

Sasaran:

- a. Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD

b. Meningkatkan mutu layanan pendidikan non formal

2. Tujuan: Peningkatan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu dan Pembelajaran yang Berkarakter

Pendidikan dasar merupakan jembatan menuju pendidikan menengah. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar menjadi penting untuk difokuskan pada penguatan pelaku pendidikan yaitu siswa, guru, kepala sekolah, orang tua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan termasuk didalamnya peningkatan dari segi sarana dan prasarana guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagai salah satu indikator dari terwujudnya pendidikan dasar yang bermutu. Peningkatan mutu pembelajaran dicirikan oleh penguatan pelaku pendidikan seperti : kompeten siswa, profesionalisme guru dan kepala sekolah, peningkatan peran orang tua serta komitmen pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Peningkatan mutu pembelajaran didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pengembangan dan penerapan kurikulum yang baik terkait dengan pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan (budi pekerti, watak dan kepribadian) maka akan meningkatkan wawasan kebangsaan dikalangan anak usia sekolah sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya masyarakat yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, sikap toleransi dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

Sasaran:

- a. Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (7-15 tahun)
- b. Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar
- c. Meningkatnya perilaku positif siswa

3. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Penguatan Peran Orangtua dan Aparatur Institusi Pendidikan

Penguatan peran guru dan tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada meningkatnya kualitas sikap mereka dalam hal kepribadian dan moral sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap melakukan upaya peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru yang antara lain dihasilkan oleh: penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta pengembangan profesional berkesinambungan bagi guru dalam jabatan. Guru sebagai teladan bagi siswa dan masyarakat harus meminimalisasi angka ketidakhadiran di kelas dalam lima tahun kedepan.

Penguatan peran orang tua dicirikan antara lain dalam bentuk peningkatan partisipasi aktif mereka dalam proses pendidikan. Sejak awal, para orang tua diupayakan memahami beberapa aspek pendidikan, seperti kurikulum dan proses pengelolaan pendidikan. Mereka dilibatkan dalam sebagian pengambilan

keputusan tentang pengelolaan yang penting. Penguatan peran aparatur institusi pendidikan antara lain dicirikan oleh perbaikan layanan birokrasi, kesesuaian regulasi, dan sinkronisasi yang optimal dengan pelaku pendidikan lainnya. Aparatur institusi pendidikan diarahkan untuk tidak sekadar menjalankan tugas kerja, melainkan juga menjadi pendukung utama pembangunan pendidikan.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial
 - b. Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan
 - c. Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan
4. Mewujudkan penggalan dan pemeliharaan potensi kebudayaan serta peningkatan pengelolaan keragaman budaya lokal.

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Meningkatkan peran serta masyarakat dan siswa serta satuan pendidikan dalam pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal, sejarah dan adat-istiadat, diantaranya lewat fasilitasi penyelenggaraan festival seni dan budaya, pembangunan sarana seni dan budaya serta pelestarian bangunan cagar budaya.

Sasaran:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal
5. Peningkatan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

Meningkatkan kinerja birokrasi Dinas Pendidikan Daerah melalui tata kelola yang bersih, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal mutu laporan keuangan Dinas Pendidikan, tingkat pencapaian pengelolaan kinerja kategori Baik, dan proses layanan Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon kepada masyarakat yang semakin baik.

Sasaran:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dirumuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :

1. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Selaras dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi Sulawesi Utara.
3. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon.

Tabel 3.8
Program dan kegiatan Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 dapat dilihat dalam lampiran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Su mber Dana			Target Capaian Kinerja		
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiatan	Ha sil Kegiatan						T a rget	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								119,185,950,794					137,998,825,886	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								99,481,412,390					115,379,049,784	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								19,619,100					201,130,080	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	8,865,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	159,810,390	

														Umu m				
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya kegiatan perencanaan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	1,000,000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	N H	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	5,630,130
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya kegiatan perencanaan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	5,886,045
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Terlaksananya kegiatan perencanaan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	5,886,045

							DPA-SKPD							Umu m				
1	0 1	01	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan Penunja ng Pelayan an Peranga kat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksanan ya kegiatan perencanaa n perangkat daerah	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Dokume n	100 %	2,000,000	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m		Cakupan Penunjan g Pelayana n Perangak at daerah	100 %	5,886,04 5
1	0 1	01	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Penunja ng Pelayan an Peranga kat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanan ya kegiatan perencanaa n perangkat daerah	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	2 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m		Cakupan Penunjan g Pelayana n Perangak at daerah	100 %	13,081,2 50

1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	3,753,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	4,950,175
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								96,339,975,208				111,121,636,775
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	800 Orang/b	100 %	96,335,375,208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	111,113,040,985
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	2,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	4,297,895

						Akhir Tahun SKPD												
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	2,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	4,297,895
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								337,582,500					1,456,014,991
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	90,000,000

1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Administrasi Kepegawaian	Tersediannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	138,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	279,979,796
1	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersediannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	84 Orang	100 %	195,582,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	816,863,377
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersediannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	84 Orang	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	269,171,818
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								493,842,270				1,024,294,038

1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	10 Paket	100 %	25,043,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	38,483,400
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	0 Paket	100 %	55,472,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	254,097,080

1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerahCakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%100%	7000 Paket	100%	123,356,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerahCakupan Pelayann administrasi perkantoran	100%100%	298,803,458
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%100%	3 Paket	100%	45,726,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah Cakupan Pelayann administrasi perkantoran	100%100%	45,726,800

1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	5500 Dokum	en100 %	22,623,300	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m		0Cakupa n Penunjan g Pelayana n Perangkat daerah Cakupan Pelayann administr asi perkanto ran	100 % 100 %	22,623,300
1	01	01	2.06	09	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0Cakupa n Penunjan g Pelayan an Peranga kat daerah Cakupan Pelayan n administ rasi perkant oran	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan administrasi perkantora n	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan an, Semua Kelurahan n	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	221,620,000	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m		0Cakupa n Penunjan g Pelayana n Perangkat daerah Cakupan Pelayann administr asi perkanto ran	100 % 100 %	364,560,000
1	0	01	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,000,000	25,000,					

	1		7															000
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	25,000,000
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,169,513,812					1,410,973,900
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	225 Laporan	100 %	16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	16,800,000
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	99,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	103,785,000

1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	2,052,993,812	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1,290,388,900
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								119,879,500				140,000,000
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit	100 %	107,999,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	115,000,000
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit	100 %	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	10,000,000

					Operasional atau Lapangan		Perizinannya							m				
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	100 %	8,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	15,000,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								14,376,538,404				21,992,811,999	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								7,511,120,100				9,238,544,603	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	5 Unit	100 %	1,000,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	6,000,000

1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksanaan ya pengelolaa n pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	10 Ruang	100 %	1,615,000,000	DAK Fisik-Bidan g Pendi dikan-Regul er-SD		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	960,000,000
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksanaan ya pengelolaa n pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	7 Ruang	100 %	1,000,000,000	DAK Fisik-Bidan g Pendi dikan-Regul er-SD		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	350,000,000
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksanaan ya pengelolaa n pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	5 Ruang	100 %	95,000,000	DAK Fisik-Bidan g Pendi dikan-Regul er-SD		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	600,000,000
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Terlaksanaan ya pengelolaa n pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	10 Unit	100 %	250,000,000	DAK Fisik-Bidan g Pendi dikan-Regul er-SD		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	320,000,000

1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	0 Paket 10 Paket	100 %	2,803,600,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	1,350,000,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	64 Satuan Pendidikan	100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	122,078,270
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	64 Satuan Pendidikan	100 %	23,284,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	75,000,000

1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Peserta Didik	100 %	313,073,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	647,647,200
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	226 Orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	2,394,236,326

1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	0 Orang 66 Orang	100 %	87,641,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	234,200,000
---	----	----	------	----	--	-------------------------	---	--	--	------	---------------------	-------	------------	--------------------------------------	-------------------------	------	-------------

1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	64 Satuan Pendidikan	100 %	51,585,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	143,782,657
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	64 Satuan Pendidikan	100 %	192,000,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	1,911,835,159
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	64 Orang	100 %	50,934,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	123,764,991
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								4,136,641,734				8,006,724,946	

1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Ruang	100%	300,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100%	347,287,500
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Ruang	100%	200,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100%	231,525,000
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Ruang	100%	450,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100%	520,931,250
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Unit	100%	150,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-		APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100%	496,125,000

							Menengah pertama	Kelurahan					Reguler-SMP					
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Ruang	100%	95,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100%	892,500,000
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Ruang	100%	234,722,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100%	271,720,055
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	8 Unit	100%	1,780,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100%	306,770,625

1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Paket	100%	70,705,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100%	1,079,371,125
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5295 Peserta Didik	100%	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100%	83,541,397
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APKSMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 Peserta Didik	100%	409,215,534	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APKSMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100%	880,511,341

1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SMP/MTs /SMPLB/ Sederajat	100 %	1,900,000,000
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Orang	100 %	74,001,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SMP/MTs /SMPLB/ Sederajat	100 %	220,000,000
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 Satuan Pendidikan	100 %	85,745,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-	APK SMP/MTs /SMPLB/ Sederajat	100 %	241,639,170

														SMP				
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Satuan Pendidikan	100 %	240,000,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	428,000,000
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Orang	100 %	28,252,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	106,802,483
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								2,470,956,570					3,154,817,450
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	2 Unit	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase PAUD terakreditasi minimal B	50 %	125,000,000

									n					si Umu m				
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Unit	100 %	150,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		Persentase PAUD terakreditasi minimal B	50 %	120,000,000
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Paket	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PAUD terakreditasi minimal B	50 %	57,000,000
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	2 Paket	100 %	174,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase PAUD terakreditasi minimal B	50 %	136,500,000

														Umu m				
1	0 1	02	2.0 3	1 3	Penyelengga raan Proses Belajar PAUD	Persenta se PAUD terakred itasi minimal B	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Terlaksanan ya pengelolaa n pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	50 %	50 Peserta Didik	100 %	50,000,000	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m		Persentas e PAUD terakredi tasi minimal B	50 %	18,417,4 50
1	0 1	02	2.0 3	1 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Persenta se PAUD terakred itasi minimal B	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Terlaksanan ya pengelolaa n pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	50 %	66 Satuan Pendidik an	100 %	50,000,000	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m		Persentas e PAUD terakredi tasi minimal B	50 %	200,000, 000
1	0 1	02	2.0 3	1 5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidika n bagi Satuan PAUD	Persenta se PAUD terakred itasi minimal B	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Terlaksanan ya pengelolaa n pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha	50 %	66 Orang	100 %	50,000,000	Dana Transf er Umu m- Dana Aloka		Persentas e PAUD terakredi tasi minimal B	50 %	985,100, 000

								n					si Umu m					
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	66 Orang	100 %	142,586,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PAUD terakreditasi minimal B	50 %	221,100,000
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	66 Satuan Pendidik an	100 %	261,615,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PAUD terakreditasi minimal B	50 %	70,100,000

1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	66 Satuan Pendidikan	100 %	1,292,480,000	DAK Non Fisik-BOP PAUD		Persentase PAUD terakreditasi minimal B	50 %	1,221,600,000
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								257,820,000					1,592,725,000
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Terlaksananya pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Unit	100 %	10,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		APK Pendidikan Kesetaraan	70 %	539,725,000
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	APK Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Terlaksananya pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Paket	100 %	10,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		APK Pendidikan Kesetaraan	70 %	106,000,000

1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	APK Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Terlaksananya pengelolaan pendidikan nonformal/ kesetaraan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Paket	100 %	10,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		APK Pendidikan Kesetaraan	70 %	302,300,000
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Terlaksananya pengelolaan pendidikan nonformal/ kesetaraan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	4 Satuan Pendidikan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK Pendidikan Kesetaraan	70 %	80,500,000
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Terlaksananya pengelolaan pendidikan nonformal/ kesetaraan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	4 Satuan Pendidikan	100 %	217,820,000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	N H	APK Pendidikan Kesetaraan	70 %	564,200,000
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								2,000,000				69,113,047	
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								2,000,000				69,113,047	

1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Presentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Terlaksana Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal	100 %	69,113,047
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								5,320,000,000				452,663,267
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								5,320,000,000				452,663,267
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketersediaan pendidik berkualitas minimal S1	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	5,320,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan pendidik berkualitas minimal S1	100 %	452,663,267
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								3,000,000				14,915,026

1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								3,000,000					14,915,026
1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase Perijinan pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tersedianya n pelayanan perijinan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Perijinan pendidikan	100 %	14,915,026
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA								3,000,000					90,272,763
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								3,000,000					90,272,763
1	01	06	2.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan bahasa dan sastra	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Terlaksananya penyusunan modul dan bahan ajar bahasa daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	2 Dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pelaksanaan bahasa dan sastra	50 %	90,272,763
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								523,642,206					778,338,654
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								310,143,806					526,324,747

2	2	02	2.0		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								134,817,200					122,463,873
2	2	02	2.0	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Presentase Seni Budaya yang dibina	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	134,817,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Seni Budaya yang dibina	100 %	122,463,873
2	2	02	2.0		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								139,457,806					303,860,874
2	2	02	2.0	0	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Terlaksananya pelestarian kesenian tradisional	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Objek	100 %	84,055,206	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	100 %	172,860,874
2	2	02	2.0	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya pelestarian kesenian tradisional	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	38,584,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan	100 %	56,000,000

						daerah yang dikelola								Umu m		daerah yang dikelola		
2	2 2	02	2.0 2	0 3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	Jumlah Orang/Lemba ga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya pelestarian kesenian tradisional	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Sertifikat	100 %	16,817,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	100 %	75,000,000
2	2 2	02	2.0 3		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								35,868,800					100,000,000
2	2 2	02	2.0 3	0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	0Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	100 %	35,868,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang	100 %	100,000,000

						dikelola										dikelola		
2	2 2	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								20,000,000					60,000,000
2	2 2	03	2.0 1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								20,000,000					60,000,000
2	2 2	03	2.0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Presentase Komunitas / sanggar kesenian yang dibina	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya pembinaan kesenian dalam daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Lembaga	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Komunitas / sanggar kesenian yang dibina	100 %	60,000,000
2	2 2	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								27,703,400					113,807,908
2	2 2	04	2.0 1		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								27,703,400					113,807,908
2	2 2	04	2.0 1	0 1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan Pelestarian Sejarah	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Terlaksananya pembinaan sejarah lokal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	27,703,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Pembinaan Pelestarian Sejarah	100 %	113,807,908

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	118,080,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	120,960,000
TOTAL													118,080,000					120,960,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogram	Keluara n Sub Kegiatan	Ha sil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								97,920,000					99,792,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								97,920,000					99,792,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								97,920,000					99,792,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	97,920,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	99,792,000
TOTAL													97,920,000					99,792,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								99,840,000					101,808,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								99,840,000					101,808,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								99,840,000					101,808,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	99,840,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	101,808,000
TOTAL													99,840,000					101,808,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								79,680,000					80,640,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								79,680,000					80,640,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								79,680,000					80,640,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	79,680,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	80,640,000
TOTAL													79,680,000					80,640,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								70,080,000					70,560,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								70,080,000					70,560,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								70,080,000					70,560,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	70,080,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	70,560,000
TOTAL													70,080,000					70,560,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								196,800,000					203,616,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								196,800,000					203,616,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								196,800,000					203,616,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	196,800,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	203,616,000
TOTAL													196,800,000					203,616,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								277,440,000	288,288,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								277,440,000	288,288,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								277,440,000	288,288,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	277,440,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	288,288,000
TOTAL													277,440,000					288,288,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr og ra m	Kelu a r a n S u b K e g i a t a n	H a s i l K e g i a t a n						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								93,120,000					94,752,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								93,120,000					94,752,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								93,120,000					94,752,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	93,120,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	94,752,000
TOTAL													93,120,000					94,752,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								115,200,000					117,936,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								115,200,000					117,936,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								115,200,000					117,936,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	115,200,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	117,936,000
TOTAL													115,200,000					117,936,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								75,840,000					76,608,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								75,840,000					76,608,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								75,840,000					76,608,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	75,840,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	76,608,000
TOTAL													75,840,000					76,608,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								145,920,000	150,192,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								145,920,000	150,192,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								145,920,000	150,192,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	145,920,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	150,192,000
TOTAL													145,920,000					150,192,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								156,480,000					161,280,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								156,480,000					161,280,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								156,480,000					161,280,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	156,480,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	161,280,000
TOTAL													156,480,000					161,280,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogram	Keluara n Sub Kegiatan	Ha sil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								93,120,000	94,752,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								93,120,000	94,752,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								93,120,000	94,752,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	93,120,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	94,752,000
TOTAL													93,120,000					94,752,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								335,040,000	348,768,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								335,040,000	348,768,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								335,040,000	348,768,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	335,040,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	348,768,000
TOTAL													335,040,000					348,768,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								189,120,000					195,552,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								189,120,000					195,552,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								189,120,000					195,552,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	189,120,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	195,552,000
TOTAL													189,120,000					195,552,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr og ra m	Kelu ar an Sub Kegi at an	Ha sil Kegi at an						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								111,360,000					113,904,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								111,360,000					113,904,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								111,360,000					113,904,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	111,360,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	113,904,000
TOTAL													111,360,000					113,904,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								531,840,000	555,408,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								531,840,000	555,408,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								531,840,000	555,408,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	531,840,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	555,408,000
TOTAL													531,840,000					555,408,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								121,920,000					124,992,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								121,920,000					124,992,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								121,920,000					124,992,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	121,920,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	124,992,000
TOTAL													121,920,000					124,992,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								55,680,000					55,440,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								55,680,000					55,440,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								55,680,000					55,440,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	55,680,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	55,440,000
TOTAL													55,680,000					55,440,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								140,160,000					144,144,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								140,160,000					144,144,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								140,160,000					144,144,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	140,160,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	144,144,000
TOTAL													140,160,000					144,144,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								97,920,000	99,792,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								97,920,000	99,792,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								97,920,000	99,792,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	97,920,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	99,792,000
TOTAL													97,920,000					99,792,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								120,960,000	123,984,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								120,960,000	123,984,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								120,960,000	123,984,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	120,960,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	123,984,000
TOTAL													120,960,000					123,984,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								91,200,000	92,736,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								91,200,000	92,736,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								91,200,000	92,736,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	91,200,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	92,736,000
TOTAL													91,200,000					92,736,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								126,720,000					130,032,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								126,720,000					130,032,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								126,720,000					130,032,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	126,720,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	130,032,000
TOTAL													126,720,000					130,032,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								115,200,000					117,936,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								115,200,000					117,936,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								115,200,000					117,936,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	115,200,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	117,936,000
TOTAL													115,200,000					117,936,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								108,480,000					110,880,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								108,480,000					110,880,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								108,480,000					110,880,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	108,480,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	110,880,000
TOTAL													108,480,000					110,880,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								118,080,000					120,960,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								118,080,000					120,960,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								118,080,000					120,960,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	118,080,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	120,960,000
TOTAL													118,080,000					120,960,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								87,360,000	88,704,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								87,360,000	88,704,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								87,360,000	88,704,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	87,360,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	88,704,000
TOTAL													87,360,000					88,704,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								205,440,000	212,688,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								205,440,000	212,688,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								205,440,000	212,688,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	205,440,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/SLDLB/Sederajat	87 %	212,688,000
TOTAL													205,440,000					212,688,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								34,560,000					33,264,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								34,560,000					33,264,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								34,560,000					33,264,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	34,560,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	33,264,000
TOTAL													34,560,000					33,264,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								72,960,000	73,584,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								72,960,000	73,584,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								72,960,000	73,584,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	72,960,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	73,584,000
TOTAL													72,960,000					73,584,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								112,320,000					114,912,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								112,320,000					114,912,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								112,320,000					114,912,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	112,320,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	114,912,000
TOTAL													112,320,000					114,912,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								48,960,000	48,384,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								48,960,000	48,384,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								48,960,000	48,384,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	48,960,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	48,384,000
TOTAL													48,960,000					48,384,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								40,320,000					39,312,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								40,320,000					39,312,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								40,320,000					39,312,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	40,320,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	39,312,000
TOTAL													40,320,000					39,312,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								86,400,000					87,696,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								86,400,000					87,696,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								86,400,000					87,696,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	86,400,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	87,696,000
TOTAL													86,400,000					87,696,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								51,840,000					51,408,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								51,840,000					51,408,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								51,840,000					51,408,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	51,840,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	51,408,000
TOTAL													51,840,000					51,408,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								61,440,000	61,488,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								61,440,000	61,488,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								61,440,000	61,488,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	61,440,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	61,488,000
TOTAL													61,440,000					61,488,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								53,760,000	53,424,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								53,760,000	53,424,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								53,760,000	53,424,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	53,760,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/SLB/Sederajat	87 %	53,424,000
TOTAL													53,760,000					53,424,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								59,520,000					59,472,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								59,520,000					59,472,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								59,520,000					59,472,000

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	59,520,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	59,472,000
TOTAL													59,520,000					59,472,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								70,080,000	70,560,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								70,080,000	70,560,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								70,080,000	70,560,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	70,080,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	70,560,000
TOTAL													70,080,000					70,560,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								78,720,000	79,632,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								78,720,000	79,632,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								78,720,000	79,632,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	78,720,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	79,632,000
TOTAL													78,720,000					79,632,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								48,000,000	47,376,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								48,000,000	47,376,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								48,000,000	47,376,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	48,000,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	47,376,000
TOTAL													48,000,000				47,376,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								80,640,000				81,648,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								80,640,000				81,648,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								80,640,000				81,648,000	

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	80,640,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	81,648,000
TOTAL													80,640,000				81,648,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								69,120,000				69,552,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								69,120,000				69,552,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								69,120,000				69,552,000	

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	69,120,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	69,552,000
TOTAL													69,120,000					69,552,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								61,440,000	61,488,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								61,440,000	61,488,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								61,440,000	61,488,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	61,440,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	61,488,000
TOTAL													61,440,000					61,488,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								151,680,000	156,240,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								151,680,000	156,240,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								151,680,000	156,240,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	151,680,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	156,240,000
TOTAL													151,680,000					156,240,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								98,880,000	100,800,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								98,880,000	100,800,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								98,880,000	100,800,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	98,880,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	100,800,000
TOTAL													98,880,000					100,800,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								97,920,000	99,792,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								97,920,000	99,792,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								97,920,000	99,792,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	97,920,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	99,792,000
TOTAL													97,920,000				99,792,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								91,200,000				92,736,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								91,200,000				92,736,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								91,200,000				92,736,000	

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	91,200,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	92,736,000
TOTAL													91,200,000				92,736,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								177,600,000				183,456,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								177,600,000				183,456,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								177,600,000				183,456,000	

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	177,600,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	183,456,000
TOTAL													177,600,000					183,456,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								104,640,000	106,848,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								104,640,000	106,848,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								104,640,000	106,848,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	104,640,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	106,848,000
TOTAL													104,640,000					106,848,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogram	Keluara n Sub Kegiatan n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								137,280,000	141,120,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								137,280,000	141,120,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								137,280,000	141,120,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	137,280,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	141,120,000
TOTAL													137,280,000					141,120,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								64,320,000	64,512,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								64,320,000	64,512,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								64,320,000	64,512,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	64,320,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	64,512,000
TOTAL													64,320,000					64,512,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								72,960,000	73,584,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								72,960,000	73,584,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								72,960,000	73,584,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	72,960,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	73,584,000
TOTAL													72,960,000					73,584,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								48,960,000	46,080,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								48,960,000	46,080,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								48,960,000	46,080,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	48,960,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	46,080,000
TOTAL													48,960,000					46,080,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								68,160,000	68,544,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								68,160,000	68,544,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								68,160,000	68,544,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	68,160,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	68,544,000
TOTAL													68,160,000					68,544,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Su mber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikati f (Rp.)
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								435,840,000	454,608,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								435,840,000	454,608,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								435,840,000	454,608,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	435,840,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	454,608,000
TOTAL													435,840,000				454,608,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								220,800,000				228,816,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								220,800,000				228,816,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								220,800,000				228,816,000	

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	220,800,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	228,816,000
TOTAL													220,800,000					228,816,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Su mber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikati f (Rp.)
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								167,040,000	172,368,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								167,040,000	172,368,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								167,040,000	172,368,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	167,040,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	172,368,000
TOTAL													167,040,000				172,368,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								97,920,000				99,792,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								97,920,000				99,792,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								97,920,000				99,792,000	

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	97,920,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	99,792,000
TOTAL													97,920,000				99,792,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								281,280,000				292,320,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								281,280,000				292,320,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								281,280,000				292,320,000	

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	281,280,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	292,320,000
TOTAL													281,280,000				292,320,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								77,760,000				78,624,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								77,760,000				78,624,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								77,760,000				78,624,000	

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanaan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	77,760,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	78,624,000
TOTAL													77,760,000				78,624,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								92,160,000				93,744,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								92,160,000				93,744,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								92,160,000				93,744,000	

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksanan ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	92,160,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	93,744,000
TOTAL													92,160,000					93,744,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								63,360,000	63,504,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								63,360,000	63,504,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								63,360,000	63,504,000				

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksana ya Pengelolaa n Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	63,360,000	DAK Non Fisik-BOS Regul er		APK SD/MI/S DLB/Sed erajat	87 %	63,504,000
TOTAL													63,360,000					63,504,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Cap aian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi l Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Pr ogra m	Keluara n Sub Kegiata n	Ha sil Kegi atan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								43,290,000	41,769,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								43,290,000	41,769,000				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								43,290,000	41,769,000				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	43,290,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SMP/MTs /SMPLB/ Sederajat	100 %	41,769,000
TOTAL													43,290,000					41,769,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								203,580,000	210,073,500				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								203,580,000	210,073,500				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								203,580,000	210,073,500				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	203,580,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SMP/MTs /SMPLB/ Sederajat	100 %	210,073,500
TOTAL													203,580,000					210,073,500
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								485,550,000	506,142,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								485,550,000	506,142,000				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								485,550,000	506,142,000				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APKSMP/MTs/SMP LB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	485,550,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APKSMP/MTs/SMP LB/Sederajat	100%	506,142,000
TOTAL													485,550,000					506,142,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								102,960,000	104,422,500				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								102,960,000	104,422,500				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								102,960,000	104,422,500				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	102,960,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SMP/MTs /SMPLB/ Sederajat	100 %	104,422,500
TOTAL													102,960,000					104,422,500
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Target Ukuran	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								238,680,000	246,928,500				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								238,680,000	246,928,500				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								238,680,000	246,928,500				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	238,680,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		0APK SMP/MTs /SMPLB/ Sederajat	100%	246,928,500
TOTAL													238,680,000					246,928,500
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								159,120,000	163,390,500				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								159,120,000	163,390,500				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								159,120,000	163,390,500				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APKSMP/MTs/SMP LB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	159,120,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APKSMP/MTs/SMP LB/Sederajat	100%	163,390,500
TOTAL													159,120,000					163,390,500
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								148,590,000	152,334,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								148,590,000	152,334,000				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								148,590,000	152,334,000				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	148,590,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SMP/MTs /SMPLB/ Sederajat	100 %	152,334,000
TOTAL													148,590,000					152,334,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								345,150,000	358,722,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								345,150,000	358,722,000				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								345,150,000	358,722,000				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	345,150,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100%	358,722,000
TOTAL													345,150,000					358,722,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								59,670,000	58,968,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								59,670,000	58,968,000				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								59,670,000	58,968,000				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APKSMP/MTs/SMP LB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	59,670,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APKSMP/MTs/SMP LB/Sederajat	100%	58,968,000
TOTAL													59,670,000					58,968,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								219,960,000	227,272,500				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								219,960,000	227,272,500				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								219,960,000	227,272,500				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	219,960,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SMP/MTs /SMPLB/ Sederajat	100 %	227,272,500
TOTAL													219,960,000				227,272,500	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								108,810,000				110,565,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								108,810,000				110,565,000	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								108,810,000				110,565,000	

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	108,810,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SMP/MTs /SMPLB/ Sederajat	100 %	110,565,000
TOTAL													108,810,000					110,565,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								684,450,000	714,987,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								684,450,000	714,987,000				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								684,450,000	714,987,000				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APKSMP/MTs/SMP LB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	684,450,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APKSMP/MTs/SMP LB/Sederajat	100%	714,987,000
TOTAL													684,450,000					714,987,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								255,060,000	264,127,500				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								255,060,000	264,127,500				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								255,060,000	264,127,500				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	255,060,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100%	264,127,500
TOTAL													255,060,000					264,127,500
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,144,110,000	1,077,394,500				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1,144,110,000	1,077,394,500				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1,144,110,000	1,077,394,500				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	1,144,110,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SMP/MTs /SMPLB/ Sederajat	100 %	1,077,394,500
TOTAL													1,144,110,000				1,077,394,500	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								422,370,000				493,803,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								422,370,000				493,803,000	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								422,370,000				493,803,000	

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APKSMP/MTs/SMP LB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	422,370,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APKSMP/MTs/SMP LB/Sederajat	100%	493,803,000
TOTAL													422,370,000					493,803,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								542,880,000	566,338,500				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								542,880,000	566,338,500				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								542,880,000	566,338,500				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	542,880,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SMP/MTs /SMPLB/ Sederajat	100 %	566,338,500
TOTAL													542,880,000					566,338,500
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								253,890,000	262,899,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								253,890,000	262,899,000				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								253,890,000	262,899,000				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	253,890,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SMP/MTs /SMPLB/ Sederajat	100 %	262,899,000
TOTAL													253,890,000					262,899,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								100,620,000	101,965,500				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								100,620,000	101,965,500				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								100,620,000	101,965,500				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APKSMP/MTs/SMP LB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	100,620,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APKSMP/MTs/SMP LB/Sederajat	100%	101,965,500
TOTAL													100,620,000					101,965,500
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								73,710,000	73,710,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								73,710,000	73,710,000				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								73,710,000	73,710,000				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	73,710,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SMP/MTs /SMPLB/ Sederajat	100 %	73,710,000
TOTAL													73,710,000					73,710,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								99,450,000	100,737,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								99,450,000	100,737,000				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								99,450,000	100,737,000				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	99,450,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100%	100,737,000
TOTAL													99,450,000					100,737,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								274,950,000	285,012,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								274,950,000	285,012,000				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								274,950,000	285,012,000				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APKSMP/MTs/SMP LB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	274,950,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APKSMP/MTs/SMP LB/Sederajat	100%	285,012,000
TOTAL													274,950,000					285,012,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								345,150,000	358,722,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								345,150,000	358,722,000				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								345,150,000	358,722,000				

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Satuan Pendidikan	100%	345,150,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100%	358,722,000
TOTAL													345,150,000					358,722,000

BAB IV

RENCANA KERJA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

**TABEL 4.1.
RUMUSAN RANCANGAN AKHIR RENJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON**

Rincian program/kegiatan dan dana/pagu indikatif tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								119,185,950, 794			
1	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								99,481,412,3 90			
1	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								19,619,100			
1	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan perangkat daerah	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	2 Dokume n	100 %	8,865,300	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		
1	0 1	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Terlaksananya kegiatan perencanaan perangkat daerah	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua	100 %	2 Dokume n	100 %	1,000,000	PENDA PATA ASLI DAERA (PAD)	N H	

							SKPD		Keluraha n						
1	0 1	0 1	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya kegiatan perencanaan perangkat daerah	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Dokume n	100 %	1,000,000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Terlaksananya kegiatan perencanaan perangkat daerah	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Dokume n	100 %	1,000,000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya kegiatan perencanaan perangkat daerah	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Dokume n	100 %	2,000,000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	

1	0 1	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya kegiatan perencanaan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	3,753,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								96,339,975,208		
1	0 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	800 Orang/b	100 %	96,335,375,208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	0 1	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	2,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	2,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								337,582,500		
1	0 1	0 1	2.0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersediannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	0 1	0 1	2.0 5	0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersediannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	138,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersediannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	84 Orang	100 %	195,582,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersediannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	84 Orang	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								493,842,270		
1	0 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah Cakupan Pelayann	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	10 Paket	100 %	25,043,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

						administrasi perkantoran			n						
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah Cakupan Pelayann administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	0 Paket	100 %	55,472,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerahCakupan Pelayann administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	7000 Paket	100 %	123,356,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah Cakupan Pelayann administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	3 Paket	100 %	45,726,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	0 1	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah Cakupan Pelayann administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	5500 Dokum	en100 %	22,623,300	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah Cakupan Pelayann administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	221,620,000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,000,000		
1	0 1	0 1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	1,000,000	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,169,513,812		

1	0 1	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	225 Laporan	100 %	16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	99,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	2,052,993,812	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								119,879,500		
1	0 1	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit	100 %	107,999,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

					atau Kendaraan Dinas Jabatan				n						
1	0 1	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit	100 %	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	100 %	8,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								14,376,538,404		
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								7,511,120,100		
1	0 1	0 2	2.0 1	0 6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	87 %	5 Unit	100 %	1,000,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler	

									Kelurahan					-SD	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	10 Ruang	100 %	1,615,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	7 Ruang	100 %	1,000,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	5 Ruang	100 %	95,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	

1	0 1	0 2	2.0 1	1 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	10 Unit	100 %	250,000,000	DAK Fisik- Bidang Pendi kan- Reguler -SD	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	0 Paket 10 Paket	100 %	2,803,600,000	DAK Fisik- Bidang Pendi kan- Reguler -SD	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggara n Proses Belajar dan Ujian	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	64 Satuan Pendidik an	100 %	9,000,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	64 Satuan Pendidik an	100 %	23,284,900	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	

1	0 1	0 2	2.0 1	2 5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Peserta Didik	100 %	313,073,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	226 Orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	0 Orang 66 Orang	100 %	87,641,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

							Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi								
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	64 Satuan Pendidikan	100 %	51,585,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	64 Satuan Pendidikan	100 %	192,000,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	

1	0 1	0 2	2.0 1	3 0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	64 Orang	100 %	50,934,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 2	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								4,136,641,734		
1	0 1	0 2	2.0 2	0 3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Ruang	100 %	300,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler - SMP	
1	0 1	0 2	2.0 2	0 4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Ruang	100 %	200,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler - SMP	
1	0 1	0 2	2.0 2	0 6	Pembangunan Laboratorium	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Ruang	100 %	450,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler - SMP	

									n						
1	0 1	0 2	2.0 2	1 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	150,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler - SMP	
1	0 1	0 2	2.0 2	1 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Ruang	100 %	95,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler - SMP	
1	0 1	0 2	2.0 2	1 7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Ruang	100 %	234,722,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler - SMP	

1	0 1	0 2	2.0 2	2 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	8 Unit	100 %	1,780,000,000	DAK Fisik- Bidang Pendi kan- Reguler - SMP	
1	0 1	0 2	2.0 2	3 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	5 Paket	100 %	70,705,000	DAK Fisik- Bidang Pendi kan- Reguler - SMP	
1	0 1	0 2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	5295 Peserta Didik	100 %	9,000,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 2	2.0 2	3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APKSMP/MTs/SM PLB/Sederajat	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	100 Peserta Didik	100 %	409,215,534	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	

1	0 1	0 2	2.0 2	3 9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 2	2.0 2	4 0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Orang	100 %	74,001,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 2	2.0 2	4 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 Satuan Pendidikan	100 %	85,745,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler - SMP	

1	0 1	0 2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Satuan Pendidikan	100 %	240,000,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	
1	0 1	0 2	2.0 2	4 3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Orang	100 %	28,252,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 2	2.0 3		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								2,470,956,570		
1	0 1	0 2	2.0 3	0 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	2 Unit	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 2	2.0 3	0 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Unit	100 %	150,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler - PAUD	

									n						
1	0 1	0 2	2.0 3	0 7	Pengadaan Mebel PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Paket	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 2	2.0 3	1 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	2 Paket	100 %	174,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 2	2.0 3	1 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	50 Peserta Didik	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	0 1	0 2	2.0 3	1 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	66 Satuan Pendidikan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 2	2.0 3	1 5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	66 Orang	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 2	2.0 3	1 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	66 Orang	100 %	142,586,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	66 Satuan Pendidikan	100 %	261,615,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	66 Satuan Pendidikan	100 %	1,292,480,000	DAK Non Fisik-BOP PAUD	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								257,820,000		
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Terlaksananya pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Unit	100 %	10,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler - SKB	
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	APK Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Terlaksananya pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Paket	100 %	10,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler - SKB	

									n						
1	0 1	0 2	2.0 4	1 1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	APK Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Terlaksananya pengelolaan pendidikan nonformal/keseta raan	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	70 %	1 Paket	100 %	10,000,000	DAK Fisik- Bidang Pendi kan- Reguler - SKB	
1	0 1	0 2	2.0 4	1 6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keset araan	APK Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Keseta raan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Terlaksananya pengelolaan pendidikan nonformal/keseta raan	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	70 %	4 Satuan Pendidik an	100 %	10,000,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 2	2.0 4	1 7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keset araan	APK Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Keseta raan yang Mengelola Dana BOP	Terlaksananya pengelolaan pendidikan nonformal/keseta raan	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	70 %	4 Satuan Pendidik an	100 %	217,820,000	PENDA PATA ASLI DAERA (PAD)	N H
1	0 1	0 3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								2,000,000		
1	0	0	2.0		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								2,000,000		

	1	3	2														
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Presentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Terlaksana Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										5,320,000,000		
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										5,320,000,000		
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketersediaan pendidik berkualifikasi minimal S1	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	5,320,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN										3,000,000		
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										3,000,000		

1	0 1	0 5	2.0 2	0 3	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase Perijinan pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tersedianya pelayanan perijinan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	0 1	0 6			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA								3,000,000		
1	0 1	0 6	2.0 1		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								3,000,000		
1	0 1	0 6	2.0 1	0 7	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan bahasa dan sastra	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Terlaksananya penyusunan modul dan bahan ajar bahasa daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	2 Dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	2 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								523,642,206		
2	2 2	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								310,143,806		
2	2 2	0 2	2.0 1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								134,817,200		
2	2 2	0 2	2.0 1	0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Presentase Seni Budaya yang dibina	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	Terlaksananya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 Orang	100 %	134,817,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	

							Kebudayaan		Kelurahan					Umum	
2	2	0	2.0		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								139,457,806		
2	2	0	2.0	0	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Terlaksanannya pelestarian kesenian tradisional	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Objek	100 %	84,055,206	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	2	0	2.0	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksanannya pelestarian kesenian tradisional	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	38,584,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	2	0	2.0	0	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya	Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Terlaksanannya pelestarian kesenian tradisional	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Sertifikat	100 %	16,817,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

					dalam Pemajuan Kebudayaan											
2	2	0	2.0		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								35,868,800			
2	2	0	2.0	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	0Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	100 %	35,868,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								20,000,000			
2	2	0	2.0		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								20,000,000			
2	2	0	2.0	0	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Presentase Komunitas / sanggar kesenian yang dibina	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya pembinaan kesenian dalam daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Lembaga	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	2	0			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								27,703,400			
2	2	0	2.0		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								27,703,400			

2	2 2	0 4	2.0 1	0 1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan Pelestarian Sejarah	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Terlaksananya pembinaan sejarah lokal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	27,703,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	2 2	0 5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								165,795,000	
2	2 2	0 5	2.0 2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								165,795,000	
2	2 2	0 5	2.0 2	0 1	Pelindungan Cagar Budaya	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Terlaksananya pengelolaan cagar budaya kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Objek	100 %	165,795,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL													119,709,593,000	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								118,080,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								118,080,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								118,080,000	

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	118,080,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													118,080,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								97,920,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								97,920,000			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								97,920,000			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	97,920,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

												n				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									79,680,000		
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									79,680,000		
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									79,680,000		
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	79,680,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													79,680,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									70,080,000		
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									70,080,000		

1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								70,080,000			
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	70,080,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													70,080,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								196,800,000			
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								196,800,000			
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								196,800,000			
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	196,800,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

										Keluraha n							
TOTAL													196,800,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana			
										Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								277,440,000				
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								277,440,000				
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								277,440,000				
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	277,440,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler			
TOTAL													277,440,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting		

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Kinerja						
										Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										93,120,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										93,120,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										93,120,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	93,120,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler		
TOTAL													93,120,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										115,200,000	

	1															
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									115,200,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									115,200,000		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	115,200,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													115,200,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									75,840,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									75,840,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									75,840,000		

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	75,840,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													75,840,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								145,920,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								145,920,000			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								145,920,000			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	145,920,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

										TOTAL	145,920,000					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								156,480,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								156,480,000			
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								156,480,000			
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	156,480,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler		
										TOTAL	156,480,000					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				

											n					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								93,120,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								93,120,000			
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								93,120,000			
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	93,120,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL												93,120,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								335,040,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								335,040,000			

1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								335,040,000			
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	335,040,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													335,040,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								189,120,000			
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								189,120,000			
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								189,120,000			
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	189,120,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

										Keluraha n						
TOTAL													189,120,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										111,360,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										111,360,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										111,360,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	111,360,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler		
TOTAL													111,360,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
										Progr am						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										531,840,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										531,840,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										531,840,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	531,840,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler		
TOTAL													531,840,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
										Progr am						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										121,920,000	

	1															
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										121,920,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										121,920,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	121,920,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													121,920,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	
										Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										55,680,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										55,680,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										55,680,000	

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	55,680,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													55,680,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								140,160,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								140,160,000			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								140,160,000			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	140,160,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

											n					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								120,960,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								120,960,000			
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								120,960,000			
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	120,960,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL												120,960,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								91,200,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								91,200,000			

1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								91,200,000			
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	91,200,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													91,200,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								126,720,000			
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								126,720,000			
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								126,720,000			
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	126,720,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

										Keluraha n							
TOTAL													126,720,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana			
										Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								115,200,000				
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								115,200,000				
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								115,200,000				
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	115,200,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler			
TOTAL													115,200,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting			

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana			
										Kinerja							
										Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										108,480,000		
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										108,480,000		
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										108,480,000		
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	108,480,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler			
TOTAL													108,480,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										118,080,000		

	1														
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								118,080,000		
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								118,080,000		
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	118,080,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	
TOTAL												118,080,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								87,360,000		
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								87,360,000		
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								87,360,000		

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	87,360,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													87,360,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								205,440,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								205,440,000			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								205,440,000			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	205,440,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

TOTAL										205,440,000								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana				
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											34,560,000		
1	0	1	0	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											34,560,000	
1	0	1	0	2	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											34,560,000	
1	0	1	0	2	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	34,560,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	
TOTAL										34,560,000								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana				
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an						

											n				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								72,960,000		
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								72,960,000		
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								72,960,000		
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	72,960,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	
TOTAL												72,960,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								112,320,000		
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								112,320,000		

1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								112,320,000			
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	112,320,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													112,320,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								48,960,000			
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								48,960,000			
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								48,960,000			
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	48,960,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

										Keluraha n							
TOTAL													48,960,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana			
										Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								40,320,000				
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								40,320,000				
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								40,320,000				
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kab/Kota , Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	40,320,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler			
TOTAL													40,320,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	

	1														
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								51,840,000		
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								51,840,000		
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	51,840,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	
TOTAL													51,840,000		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	
										Progr am	Keluara n Sub Kegiat an				Hasil Kegiat an
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								61,440,000		
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								61,440,000		
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								61,440,000		

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	61,440,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													61,440,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								53,760,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								53,760,000			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								53,760,000			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	53,760,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

TOTAL										53,760,000							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana			
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											59,520,000	
1	0	0	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											59,520,000	
1	0	0	2	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											59,520,000	
1	0	0	2	2.0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	59,520,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler			
TOTAL													59,520,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana			
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an					
										Progr am							

											n					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								70,080,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								70,080,000			
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								70,080,000			
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	70,080,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL												70,080,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								78,720,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								78,720,000			

1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								78,720,000			
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	78,720,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													78,720,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								48,000,000			
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								48,000,000			
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								48,000,000			
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	48,000,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

										Keluraha n							
TOTAL													48,000,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										80,640,000		
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										80,640,000		
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										80,640,000		
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	80,640,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler			
TOTAL													80,640,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting		

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Kinerja						
										Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								69,120,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								69,120,000			
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								69,120,000			
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	69,120,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler		
TOTAL													69,120,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								61,440,000			

	1															
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										61,440,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										61,440,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	61,440,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													61,440,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Progr am	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										151,680,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										151,680,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										151,680,000	

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	151,680,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													151,680,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								98,880,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								98,880,000			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								98,880,000			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	98,880,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

											n					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								91,200,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								91,200,000			
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								91,200,000			
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	91,200,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL												91,200,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								177,600,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								177,600,000			

1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								177,600,000			
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	177,600,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													177,600,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								104,640,000			
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								104,640,000			
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								104,640,000			
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	104,640,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

										Keluraha n									
TOTAL													104,640,000						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana					
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													137,280,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													137,280,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													137,280,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	137,280,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler					
TOTAL													137,280,000						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting			

	1															
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										72,960,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										72,960,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	72,960,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													72,960,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Progr am	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										48,960,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										48,960,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										48,960,000	

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	48,960,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													48,960,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								68,160,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								68,160,000			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								68,160,000			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	68,160,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

TOTAL										68,160,000						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								435,840,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								435,840,000			
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								435,840,000			
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	435,840,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler		
TOTAL										435,840,000						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				

											n					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								220,800,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								220,800,000			
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								220,800,000			
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	220,800,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL												220,800,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian				Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana	
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								167,040,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								167,040,000			

1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								167,040,000			
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	167,040,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													167,040,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								97,920,000			
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								97,920,000			
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								97,920,000			
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	97,920,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

									Keluraha n								
TOTAL													97,920,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana		
										Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								281,280,000				
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								281,280,000				
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								281,280,000				
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	281,280,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler			
TOTAL													281,280,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting			

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										77,760,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										77,760,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										77,760,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	77,760,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler		
TOTAL													77,760,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian				Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana	
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										92,160,000	

	1															
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										92,160,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										92,160,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sed erajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	87 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	92,160,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													92,160,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				
										Progr am						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										63,360,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										63,360,000	
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										63,360,000	

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	63,360,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													63,360,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								43,290,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								43,290,000			
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								43,290,000			
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	43,290,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

TOTAL										43,290,000						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								203,580,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								203,580,000			
1	0 1	0 2	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								203,580,000			
1	0 1	0 2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	203,580,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler		
TOTAL										203,580,000						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				

												n				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									485,550,000		
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									485,550,000		
1	0 1	0 2	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									485,550,000		
1	0 1	0 2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APKSMP/MTs/SM PLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	485,550,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													485,550,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									102,960,000		
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									102,960,000		

1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								102,960,000			
1	0	0	2.0	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	102,960,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													102,960,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								238,680,000			
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								238,680,000			
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								238,680,000			
1	0	0	2.0	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	OAPK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	238,680,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

										Keluraha n							
TOTAL													238,680,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana			
										Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								159,120,000				
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								159,120,000				
1	0 1	0 2	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								159,120,000				
1	0 1	0 2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APKSMP/MTs/SM PLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	159,120,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler			
TOTAL													159,120,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting		

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
										Progr am						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								148,590,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								148,590,000			
1	0 1	0 2	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								148,590,000			
1	0 1	0 2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	148,590,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler		
TOTAL													148,590,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
										Progr am						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								345,150,000			

	1															
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										345,150,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										345,150,000	
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	345,150,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													345,150,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Progr am	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										59,670,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										59,670,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										59,670,000	

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APKSMP/MTs/SM PLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	59,670,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													59,670,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								219,960,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								219,960,000			
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								219,960,000			
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	219,960,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

TOTAL										219,960,000								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana				
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								108,810,000					
1	0	1	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								108,810,000					
1	0	1	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								108,810,000					
1	0	1	0	2	2.0	4	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	108,810,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	
TOTAL										108,810,000								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana				
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an						

											n					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								684,450,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								684,450,000			
1	0 1	0 2	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								684,450,000			
1	0 1	0 2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APKSMP/MTs/SM PLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	684,450,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL												684,450,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian				Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana	
										Kinerja Program	Keluara n Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								255,060,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								255,060,000			

1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								255,060,000			
1	0	0	2.0	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	255,060,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													255,060,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Progr am	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,144,110,000			
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1,144,110,000			
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1,144,110,000			
1	0	0	2.0	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	1,144,110,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan									Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								542,880,000			
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								542,880,000			
1	0 1	0 2	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								542,880,000			
1	0 1	0 2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	542,880,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler		
TOTAL													542,880,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											

1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									253,890,000		
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									253,890,000		
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									253,890,000		
1	0	0	2.0	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	253,890,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													253,890,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Progr am	Keluara n Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									100,620,000		
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									100,620,000		
1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									100,620,000		

1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APKSMP/MTs/SM PLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	100,620,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		
TOTAL													100,620,000			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								73,710,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								73,710,000			
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								73,710,000			
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	73,710,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		

TOTAL										73,710,000						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				
Progr am																
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										99,450,000	
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										99,450,000	
1	0 1	0 2	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										99,450,000	
1	0 1	0 2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 Satuan Pendidik an	100 %	99,450,000	DAK Non Fisik- BOS Reguler		
TOTAL										99,450,000						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				
Progr am																

												n					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										274,950,000		
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										274,950,000		
1	0 1	0 2	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										274,950,000		
1	0 1	0 2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APKSMP/MTs/SM PLB/Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	274,950,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler			
TOTAL													274,950,000				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana			
										Kinerja	Keluara n Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										345,150,000		
1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										345,150,000		

1	0	0	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								345,150,000		
1	0	0	2.0	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB /Sederajat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah Menengah pertama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	345,150,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	
TOTAL													345,150,000		

BAB V PENUTUP

Rancangan Renja PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Renja PD Kota Tomohon Tahun 2023. Oleh karenanya, Rancangan Renja PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap evaluasi terhadap pelaksanaan Renja terdahulu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon tahun sebelumnya terhadap pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon.

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan kebudayaan di Kota Tomohon, maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Renja PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023. Harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bidang/bagian. Rancangan Renja PD Tahun 2023 ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rancangan Renja PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rancangan Renja PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Tomohon, RPJMD Kota Tomohon, RKPD Kota Tomohon dan Renstra PD).
- b. Rancangan Renja PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Tentunya seluruh program dan kegiatan yang tercakup dalam Rancangan Renja PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon merupakan bagian dalam daya dan upaya kami menjadikan Kota Tomohon semakin unggul dan berbudaya. Renja ini akan dibahas dalam Pembahasan bersama dengan TAPD Kota Tomohon dan DPRD Kota Tomohon untuk kemudian menjadi RKA dan DPA APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon evaluasi pelaksanaan Dinas Kesehatan Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Tomohon

Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Badan / Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon bertujuan :

- Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon tahun 2023.
- Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
- Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon, proses penyusunan Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon, keterkaitan antara Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenaga Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahunberjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahun Lalu dan Renstra Dinas/Badan Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon

2.4. .Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA
TOMOHONTAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Rencana kerja Tahun ini merupakan salah satu dokumen penting dalam merencanakan berbagai upaya kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon, dimana dalam dokumen rencana kerja ini memuat semua program. Kegiatan, indikator output dan outcome, perincian biaya serta lokasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk menentukan target keberhasilan Dinas Kesehatan Kota Tomohon. Rencana Strategis Dinas Kesehatan mengacu pada RPJMD Kota Tomohon serta merupakan penjabarandari visi dan misi kepala daerah terpilih dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Untuk mewujudkan visi dan misi daerahsebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD maka perencanaan strategik Dinas KesehatanKota Tomohon dituangkan dalam Misi ke 1 yaitu Mewujudkan masyarakat berahklak mulia, bermoral, beretika melalui pendidikan yang unggul. Mengukur kinerja pada hakikatnyamelakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil ataugagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Pencapaian sasaran yang dilakukanberdasarkan realisasi anggaran dan realisasi fisk kinerja yang dapat dikategorikan dengan; berhasil (85 – 100 %), cukup berhasil (70-84 %), Kurang berhasil (55-69 %), Tidak Berhasil (0 – 54 %).

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Dinas Kesehatan Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN DAERAH				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	60%
		2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	60%
		3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	60%

	4. Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	60%
2. Administrasi Keuangan	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	60%
	2. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	60%
	3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	60%
	4. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	60%
	5. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	60%
3. Administrasi Umum	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	60%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	60%
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	60%
	4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	60%
	5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	60%

6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	65%
7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	65%
8. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	65%
9. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	65%
10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	65%
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	65%
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	65%
13. Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	65%
14. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	65%
15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	65%
16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	65%
17. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	65%
18. Pengadaan Mebeleur	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	65%

B. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	62%
		20. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	60%
		21. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	40%
		22. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	10%
		23. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	10%
		24. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	10%
		25. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	10%
		26. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	10%
		27. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi umum	10%
		1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	20%

	2. Pembangunan Puskesmas	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	30%
	3. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	10%
	4. Pengembangan Rumah Sakit	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	20%
	5. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	40%
	6. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	40%
	7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	45%

8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	45%
9. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	35%
10. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	50%
11. Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	50%
12. Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	50%
13. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	50%

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	50%
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	70%
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	70%
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita	70%
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	70%
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	70%
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	70%
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	70%
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	70%
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	70%

11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	70%
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	70%
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	70%
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	70%
15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70%
16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	70%
17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	65%

18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	65%
19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Surveilans Kesehatan	65%
20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	65%
21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	65%
22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	70%
23. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pemenuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat	70%
24. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Cakupan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	70%

		25. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	70%
		26. Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pelayanan Rumah Sakit	70%
		27. Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelayanan Puskesmas	70%
		28. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	70%
	2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	a. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Pengelolaan data dan sistim informasi kesehatan	45%
		b. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Pengelolaan data dan sistim informasi kesehatan	45%
	3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	a. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	45%
C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	65%

	2. Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kelulusan tenaga kesehatan dalam uji kompetensi	65%
		b. Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Persentase kelulusan tenaga kesehatan dalam uji kompetensi	65%
		c. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kelulusan tenaga kesehatan dalam uji kompetensi	65%
	3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	65%
		b. Sertifikasi Tenaga Kesehatan	Cakupan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	65%
	4. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	a. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	65%

	untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	b. Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	65%
--	---	---	--	-----

D. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	65%
		b. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	65%
	2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	a. Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	65%

	b. Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	65%
3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	a. Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	65%
4. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	65%

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	65%
	2. Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	b. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	65%
	3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	c. Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	65%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO,1981). Sedangkan menurut Wilson dan Sapanuchart (1993), menyatakan indicator adalah suatu ukuran tidak langsung dansuatu kejadian atau kondisi.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi,dan misi organisasi (LAN,1993). Menurut Kane dan Johnson (1995) kinerja adlah outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan strategis yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

Fungsi indikator kinerja adalan memperjelas tentang What, how, who dan when suatu kegiatan dilaksanakan, menciptakan konsesus yang dibangun oleh stake holders, membangun dasar pengukuran, analisi dan evaluasi kinerja program pembangunan.

Tujuan penetapan indikatif kinerja utama di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tomohon adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Jenis Pelayanan Sesuai dengan Sistem Pelayanan Kesehatan bahwa Upaya kesehatan dikategorikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya Kesehatan Masyarakat diselenggarakan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dimasyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat wajib memberikan program pelayanan kesehatan secara komprehensif.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Daerah

NO	INDIKATOR SPM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (%)				REALISASI CAPAIAN (%)		PROYEKSI (%)		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	2020	2021	2023	202	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	105	102	100	100	
2	pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100	100	100	98	97	100	100	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	103	99	100	100	
4	Pelayanan kesehatan balita	100	100	100	100	96	101	100	100	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	95	91	100	100	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100	100	100	68	53	75	100	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	100	103	92	100	100	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100	100	2.65	106	50	100	

9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	100	100	100	0.55	165	50	100	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	100	100	98	100	100	
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	100	100	100	147	111	100	100	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	100	100	100	91	69	100	100	

2.3 Isu Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam merumuskan perencanaan strategis, maka dilakukan analisis keadaan Dinas Kesehatan Kota Tomohon melalui analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat), sehingga Dinas Kesehatan dapat menetapkan strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Analisis tantangan dan peluang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel.2.3.

Tantangan dan Peluang Dinas Kesehatan Kota Tomohon

	PELUANG (OPPORTUNITY)	TANTANGAN (THREAT)
MAN/SDM	<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan/pendidikan dan Bimtek terbuka untuk pegawai.• Adanya kebijakan prioritas peningkatan kemampuanSDM.• Pemanfaatan tenaga trampil untuk pengembangan/inovasikegiatan.• Pendidikan masyarakat makin meningkat, terlihat dari tingginya angka melek huruf, partisipasi murni sekolah anak-anak berusia 7-12 tahun serta makin meningkatnya anak-anak yang dapat menamatkan pendidikan tingkat SD, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) dan Akademi/Universitas.	<ul style="list-style-type: none">• Banyaknya tenaga yang akan pensiun dan tidak ada penggantinya (negative growth)• Tenaga Kesehatan yang belum tersertifikasi

MONEY	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya dana bersumber dari APBN dan APBD• Adanya peluang untuk meningkatkan pendapatan, mengingat meningkatnya kunjungan pasien diPuskesmas,• Makin meningkatnya pendapatan perkapita penduduk..	<ul style="list-style-type: none">• Belum adanya kewenangan untuk menggunakan pendapatan fungsionalnya secara langsung
METHOD	<ul style="list-style-type: none">• Program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan sosial) yang merupakan penjabaran dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)• Kemajuan di bidang teknologi pertanian berupa penerapan bioteknologi pertanianditunjang dengan peningkatanupaya pertanian lainnya diharapkan dapat mempertahankan swasembada panganmeningkatkan kuantitas dankualitas bahan makanan sehingga dapat meningkatkanstatus gizi masyarakat.• Adanya hasil dari berbagai deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi di bidang kesehatan . Dengan demikian maka penanggulanganmasalah akan lebih spesifik untuk setiap propinsi atau wilayah tertentu sehingga akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi	<ul style="list-style-type: none">• Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembanganSDM Aparatur)

	setempat.	
MARKET	<ul style="list-style-type: none">• Animo masyarakat untuk mencari pengobatan cukup tinggi.• Lokasi tempat pelayanan kesehatan yang strategis• Transportasi mudah.• Kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas tinggi.• Pembangunan RS Daerah• Meningkatnya peran serta Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Banyaknya pesaing.• Letak sarana pelayanan kesehatan berdekatan dengan RS Gunung Maria dan satu RS Bethesda (jarak relatif dekat).
LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none">• Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pelayanan kesehatan.• Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup yang sehat dan terus berkembangnya kewaspadaan dini terhadap bahaya dan dampak perubahan lingkungan terhadap kesehatan akan sangat menunjang pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal.• Komunikasi, Informasi dan transportasi yang makin membaik juga memberi peluang untuk mempercepat pencapaian pemerataan pelayanan kesehatan.	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kasus- kasus penyakit yang berhubungan dengan lingkungan.• Peningkatan kasus kasus berbasis penyakit tidak menular

2.3.2 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Dalam kurun waktu ke depan di Kota Tomohon akan mengalami perkembangan yang kemudian disesuaikan dengan visi Pemerintah Kota Tomohon yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kota Tomohon Yang Religius, Mandiri, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dan Mendunia” akan berdampak kepada pembangunan pengembangan dibidang kesehatan.

Berdasarkan analisis perkembangan masalah pembangunan kesehatan peran Dinas Kesehatan Daerah dalam pembangunan kesehatan peningkatan kesejahteraan dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang ada dewasa ini, maka issue strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan daerah Kota Tomohon adalah :

1. Menurunkan Angka Kematian Ibu
2. Menurunkan Angka Kematian Bayi dan Balita
3. Menurunkan Prevalensi Stunting
4. Peningkatan Kapasitas Bidan
5. Peningkatan Sarana Prasarana dan Farmasi
6. Perluasan Imunisasi dasar Lengkap untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita
7. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
8. Peningkatan Pengendalian Penyakit
9. Perhatian Khusus pada Penyakit tidak menular dan penyakit menular, penyakit yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa dan penyakit jiwa
10. Penguatan GERMAS dengan mengembangkan Kawasan Sehat, Sekolah Sehat, Lingkungan Kerja yang sehat
11. Penguatan Sistem dan Pengawasan Obat dan Makanan mencakup diantaranya focus pada efisiensi pengadaan obat dan vaksin dengan mempertimbangkan kualitas produk
12. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
13. Peningkatan Jumlah Peserta Jamkesmas. Jumlah penduduk miskin berdasarkan data yang ada berjumlah 29.198 jiwa. Hal ini member indikasi bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan penduduk miskin yang nantinya berdampak pada masalah kesehatan.
14. Terjadinya kecenderungan Gaya Hidup Yang Tidak Sehat Adanya Peningkatan kasus penyakit akhir-akhir ini seperti penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), TB Paru, Hipertensi, Diabetes Melitus, hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat akan kesehatan yang belum optimal serta gaya hidup yang cenderung konsumtif/ berpesta yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan dan masalah Kesehatan Menonjolnya Penyakit Penyakit Tertentu yang bukan hanya Penyakit Menular, melainkan Penyakit Tidak Menular lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon.

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)dan Kegiatan (output)	PAGU INDIKATIF(Rp)
URUSAN WAJIB		
TERKAIT PELAYANAN DASAR		101.685.622.723
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.527.517.602
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang UrusanPemerintahan	140.886.607
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan PD	6.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan PD	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan PD	2.886.607
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan PD	15.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan PD	7.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan PD	5.000.000
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan PD	55.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang UrusanPemerintahan	42.795.892.400
Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	42.650.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	55.892.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Persentase ketersediaan dokumenPelaporan Kinerja danKeuangan	45.000.000

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/SemesteranSKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan PerangkatDaerah	45.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang UrusanPemerintahan	50.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	50.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang UrusanPemerintahan	666.000.000
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	15.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	350.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	6.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	5.500.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	35.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	4.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	250.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang UrusanPemerintahan	100.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang UrusanPemerintahan	10.828.755.555
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	125.000.000
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	617.887.123
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	185.868.432
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	9.900.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	945.983.040
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	324.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	436.026.240
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	35.956.800
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	150.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	36.704.582.529
<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</i>	<i>Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat</i>	10.216.763.169
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	1.000.000.000
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Presentase pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pustu)	200.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Cakupan Rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit)	200.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Cakupan Rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas)	400.000.000
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	600.000.000
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	1.476.763.169
Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan ketersediaan obat, vaksin untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	3.000.000.000
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan ketersediaan Bahan Habis Pakai	3.000.000.000
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	240.000.000
<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat</i>	26.357.819.360
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	50.000.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan	Presentase bayi baru lahir	
Kesehatan Bayi Baru Lahir	mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Presentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balitasesuai standar	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pesentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Presentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Presentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Presentasi penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Presentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Presentase ODGJ berat yang mendapkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Presentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang yang beresiko terinfeksi HIV mendaptnkan pemeriksaan HIV sesuai standar	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa(KLB)	cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	75.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	3.000.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Presentase jumlah siswa tingkat SD/ sederajat kelas 1-6 yang mendapatkan pelayanan kesehatan berkala sesuai standar minimal	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12.000.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Rumah Sehat, Akses Sanitasi, Fasilitas Umum dan Pangan	22.419.360
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Pelayanan Promosi Kesehatan	12.000.000
Pengelolaan Pelayanan	"Cakupan Pelayanan Kesehatan	
Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya"	12.000.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Surveilans Kesehatan	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Peningkatan Pengetahuan Petugas Tentang Perawatan Kesehatan Masyarakat	12.000.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular"	50.000.000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKN, Jamkesmas, DII)	10.000.000.000
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Cakupan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	60.000.000
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terselenggaranya penilaian Kota Sehat	80.400.000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pelayanan Rumah Sakit	9.000.000.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelayanan puskesmas	3.000.000.000
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30.000.000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	280.000.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100.000.000
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan	50.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan	50.000.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	30.000.000
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	30.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	7.913.514.320
<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</i>	30.000.000
Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Presentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik TenagaKesehatan	30.000.000
<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</i>	7.786.400.000
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar	50.000.000
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar	Presentase Pemenuhan Kebutuhan SDM	7.664.400.000
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase SDM yang dilakukan pembinaan	72.000.000
<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</i>	97.114.320
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Cakupan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan"	97.114.320
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	390.793.440
<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	<i>Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma</i>	90.793.440
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pengawasan Obat dan Makanan	87.625.440
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pengawasan Obat dan Makanan	3.168.000

<i>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga</i>	<i>Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma</i>	120.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	"Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"	60.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	"Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"	60.000.000
<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	<i>Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma</i>	60.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	60.000.000
<i>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	<i>Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</i>	60.000.000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	60.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Upaya dan Media Promosi Kesehatan pada Masyarakat lewat Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Promotif Preventif serta Pengembangan UKBM yang ada, Presentase Kelurahan dan Kecamatan Sehat.	1.149.214.832
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keluarahan siagaaktif	1.056.000.000
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.056.000.000
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarahan siagaaktif	50.000.000
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarahan siagaaktif	43.214.832
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	43.214.832

Disamping itu juga Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon mengakomodir usulan program dan kegiatan yang di usulkan masyarakat, LSM dan pihak Akademisi pada saat pelaksanaan musrembang. Program dan kegiatan usulan musrembang dapat dijabarkan sebagai berikut;

Tabel 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	Program perbaikan gizi masyarakat	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Kader yang mendapatkan insentif	440 oran kader kesehatan	Peningkatan honor kader

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2019-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWACITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat

Dalam rangka menunjang pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon tahun 2016 – 2023 maka Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon menetapkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Daerah sebagai berikut;

VISI : **Terwujudnya Masyarakat Kota Tomohon Yang Sehat Dengan Pelayanan Kesehatan Yang Merata Serta Mandiri Untuk Hidup Yang lebih Berkualitas**

MISI :

- 1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau disegala lapisan masyarakat
- 2. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan kesehatan
- 3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui upaya promosi kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat
- 4. Meningkatkan manajemen dan informasi kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan visi dan misi diatas tujuan dan sasaran dari perangkat daerah bisa ditetapkan dengan selalu berpatokan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Peningkatan Pelayanan Kesehatan terhadap Ibu Hamil, Bayi, Balita, dan Ibu pasca melahirkan
	Pencegahan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
	Skrining kesehatan bagi masarakat Kota Tomohon

3.3 Program dan Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Ha sil Ke gia tan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							102.810.841.357		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							61.415.338.824		
1	02	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							126.870.356		

1	2	1	2. 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Fasilitas yang Representatif	Persentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		5.709.960	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)
1	2	1	2. 0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		47.000.200	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)
1	2	1	2. 0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		6.175.700	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)
1	2	1	2. 0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		5.645.700	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)

							daerah							
1	2	1	2. 0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		1.596.500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	1	2. 0 1	7	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		60.742.296	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	0 0 1	2. 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								40.519.235.049	
1	2	1	2. 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		40.411.411.049	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi

									Kelurahan					Umum
1	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		45.577.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		36.577.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	1	2.02	7	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		25.670.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								145.496.580	

1	02	001	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		37.453.800	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	001	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		73.042.780	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	001	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		35.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								748.694.040	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,	100 persen	100%		4.337.500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)

						Pemerintahan			Semua Kelurahan					
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		415.440.900	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		5.500.540	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		7.500.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,	100 persen	100%		35.911.600	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)

						Pemerintahan			Semua Kelurahan					
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan dan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		3.423.500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/ Material	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		1.425.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		56.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,	100 persen	100%		219.155.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)

						Pemerintahan			Semua Kelurahan					
1	02	001	2.007		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								260.000.000	
1	2	1	2.007	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		-	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)
1	2	1	2.007	5	Pengadaan Mebel	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		250.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)
1	2	1	2.007	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		23.361.400	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)

1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		55.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								18.308.027.195	
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		78.500.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		17.999.148	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,	100 persen	100%		20.339.350	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)

						Pemerintahan			Semua Kelurahan					
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		10.330.567.108	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	001	2.09		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							408.705.750		
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		250.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		87.516.250	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)

1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		6.189.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		65.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								39.866.508.633	
1	02	002	2.001		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota								6.040.547.880	

1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		6.890.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
1	2	2	2.01	5	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase penambahan fasilitas Rumah Sakit sesuai standar	Persentase Penambahan Fasilitas Rumah Sakit sesuai standar		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		6.890.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
1	2	2	2.01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase penambahan fasilitas dan perbaikan sarana penunjang pelayanan (rumah dinas)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		945.540.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Perbaikan dan Pemeliharaan rumah sakit		Semua Kabupaten/ Kota, Semua	100 persen	100%		12.000.000	Dana Transfer Khusus

									Kecamatan, Semua Kelurahan					- Dana Alokasi Khusus Fisik
1	2	2	2. 0 1	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Presentase Perbaikan dan Pemeliharaan Puskesmas		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		743.844.175	Dana Transfe r Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
1	2	2	2. 0 1	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Puskesmas, Cakupan Pembantu Puskesmas, Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		819.172.000	Dana Transfe r Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
1	2	2	2. 0 1	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Tersedianya Prasaran pendukung fasilitas pelayanan kesehatan pada masyarakat		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		600.000.000	Dana Transfe r Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		720.302.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Tersedianya Obat dan vaksin untuk pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		895.725.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Tersedianya Bahan Habis Pakai untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		1.258.090.505	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Tersedianya alat kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		35.094.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

							yang ditetapkan							
1	02	0 0 2	2. 0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								33.655.960.753	
1	2	2	2. 0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Presentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		72.702.050	DANA ALOKA SI KHUSU S (DAK)
1	2	2	2. 0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		95.820.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)
1	2	2	2. 0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		45.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)

1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		34.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		29.202.360	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase orang dengan usia 15-59 Tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		25.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		32.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)

1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat bagi	Presentasi penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		97.995.200	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat bagi	Presentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		74.986.800	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat bagi	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		88.800.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat bagi	Presentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		54.750.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)

1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terinfeksi HIV	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Presentase orang yang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		229.516.700	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		2.700.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		15.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Balita Buruk Gizi mendapat perawatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua	100 persen	100%		163.405.950	DAK

							Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		Kecamatan, Semua Kelurahan					
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		12.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Rumah Sehat, Akses Sanitasi, air minum, Fasilitas Umum dan Pangan, industri rumah tangga		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		382.312.525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Pelayanan Promosi Kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat bagi	"Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya"		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat bagi	Cakupan Surveilans Kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		85.100.700	DAK
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat bagi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		35.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat bagi	Persentase Peningkatan Pengetahuan Petugas Tentang Perawatan Kesehatan Masyarakat		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat bagi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular"		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		462.205.750	DANA BAGI HASIL (DBH), HIBAH
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat bagi	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKN, Jamkesmas, DII)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		18.334.096.068	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat bagi	Cakupan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

							nal							
1	2	2	2. 0 2	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Terselenggara nya penilaian Kota Sehat		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		100.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)
1	2	2	2. 0 2	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Tersedianya Belanja Operasional Rumah Sakit		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		10.000.000.00 0	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)
1	2	2	2. 0 2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Tersedianya Belanja Operasional Puskesmas		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		4.707.321.000	Dana Transfe r Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2. 0 2	34	Operasioanal Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan pelayanan kesehatan bagi	Tersedianya Belanja Operasional		Semua Kabupaten/ Kota,	100 persen	100%		-	Dana Transfer

						masyarakat	Fasilitas Kesehatan Lainnya		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Presentase Puskesmas dan Rs yang terakreditasi		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		279.650.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase kejadian ikutan pasca pemberian imunisasi		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Tersedianya bahan pelindung diri dan deteksi dini wabah		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat bagi	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		105.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	002	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								145.000.000	
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat bagi	Cakupan Pengelolaan data dan sistim informasi kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		35.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat bagi	Cakupan Pengelolaan data dan sistim informasi kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		260.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	002	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat DaerahKabupaen/Kota								25.000.000	

1	2	2	2. 0 4	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		25.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								304.037.000	
1	02	0 0 3	2. 0 1		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota								6.060.100	
1	2	3	2. 0 1	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Presentase Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		6.060.100	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	0 0 3	2. 0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								121.202.000	

1	2	3	2. 0 2	1	Perencanaan dan Distribusi Pemerataan Daya Kesehatan serta Sumber Manusia	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Presentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		120.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	3	2. 0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio Ketersediaan Dokter dan Tenaga Medis		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		1.202.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	3	2. 0 2	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Presentase SDM yang dilakukan Pembinaan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		-	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	003	2. 0 3		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Presentase SDM yang dilakukan Pembinaan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		176.340.000	

1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	"Cakupan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan"		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		176.340.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	003	2.05		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								50.000.000	
1	2	3	2.05	1	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	"Cakupan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan"		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								135.956.900	
1	02	004	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT)								92.530.500	

1	2	4	2. 0 1	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma	Presentase Pengawasan Obat dan Makanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		68.573.000	DAK
1	2	4	2. 0 1	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma	Presentase Pengawasan Obat dan Makanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		23.957.500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	0 0 4	2. 0 2		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga								1.426.400	

1	2	4	2. 0 2	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma	"Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		775.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)
1	2	4	2. 0 2	2	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan RumahTangga	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma	"Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		651.400	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)

							Perusahaan Rumah Tangga"							
1	02	0 0 4	2. 0 3		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								25.000.000	
1	2	4	2. 0 3	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		25.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)

1	02	004	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								15.000.000	
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								1.091.000.000	
1	02	005	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								1.056.000.000	

1	2	5	2. 0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraandan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Keluarahan siaga aktif	Jumlah Pelaksanaan Advokasi dan sosialisasi kebijakan/ peraturan terakit pemberdayaan , kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		1.056.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)
1	02	0 0 5	2. 0 2		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								35.000.000	
1	2	5	2. 0 2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatandan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Keluarahan siaga aktif	Jumlah Kegiatan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat Jumlah Kegiatan Kominikasi Informasi dan Edukasi Perilaku HidupBerdih dan Sehat		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%		35.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)

1	02	0 0 5	2. 0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota							-	
1	2	5	2. 0 3	1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Keluarahan siaga aktif	Cakupan Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Kelurahan yang mendapatkan bimbingan teknis dan supervisi UKBM Jumlah UKBM aktif di Puskesmas		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	PAGU INDIKATIF(Rp)	RENCANA PELAKSANAAN			
			TW 1	TW 2	TW3	TW4
URUSAN WAJIB						
TERKAIT PELAYANAN DASAR		102.772.798.573				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.527.517.602	v	v	v	v
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	140.886.607	v	v	v	v
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	v	v	v	v
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000	v	v	v	v
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.886.607	v	v	v	v
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15.000.000	v	v	v	v
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	5.000.000	v	v	v	v

Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	v	v	v	v
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	42.795.892.400	v	v	v	v
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42.650.000.000	v	v	v	v
Koordinasi dan Pelaksanaan AkuntansiSKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	55.892.400	v	v	v	v
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.000.000	v	v	v	v
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	45.000.000	v	v	v	v
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	50.000.000	v	v	v	v
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	50.000.000	v	v	v	v
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	666.000.000	v	v	v	v
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor Yang disediakan	15.000.000	v	v	v	v
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan	350.000.000	v	v	v	v

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6.500.000	v	v	v	v
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	5.500.000	v	v	v	v
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	35.000.000	v	v	v	v
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	4.000.000	v	v	v	v
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	250.000.000	v	v	v	v
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	100.000.000	v	v	v	v
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100.000.000	v	v	v	v
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	10.828.755.555	v	v	v	v
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	125.000.000	v	v	v	v
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	617.887.123	v	v	v	v
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	185.868.432	v	v	v	v
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	9.900.000.000	v	v	v	v
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	945.983.040	v	v	v	v

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	324.000.000	v	v	v	v
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	436.026.240	v	v	v	v
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	35.956.800	v	v	v	v
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	150.000.000	v	v	v	v
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	36.704.582.529	v	v	v	v
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	10.216.763.169	v	v	v	v
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	1.000.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Presentase pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pustu)	200.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Cakupan Rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit)	200.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Cakupan Rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas)	400.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengadaan Sarana Fasilitas	Rasio Puskesmas,		v	v	v	v

Pelayanan Kesehatan	Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	600.000.000	v	v	v	v
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	1.476.763.169	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan ketersediaan obat, vaksin untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	3.000.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan ketersediaan Bahan Habis Pakai	3.000.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	240.000.000	v	v	v	v
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	26.357.819.360	v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Presentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
	sesuai standar					

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Presentase warga negara usia 15-59 tahun mendaptkan skrining kesehatan sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Presentase warga negara usia 60 tahun keatas mendaptkan skrining kesehatan sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Presentasi penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Presentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Presentase ODGJ berat yang mendapkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Presentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang yang beresiko terinfeksi HIV mendaptkan pemeriksaan HIV sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	75.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	3.000.000.000	v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Presentase jumlah siswa tingkat SD/ sederajat kelas 1-6 yang mendapatkan pelayanan kesehatan	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
			v	v	v	v
berkala sesuai standar minimal			v	v	v	v

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Rumah Sehat, Akses Sanitasi, Fasilitas Umum dan Pangan	22.419.360	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Pelayanan Promosi Kesehatan	12.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	"Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya"	12.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Surveilans Kesehatan	50.000.000	v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Peningkatan Pengetahuan Petugas Tentang Perawatan Kesehatan Masyarakat	12.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKN, Jamkesda, DII)	10.000.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Cakupan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	60.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terselenggaranya penilaian Kota Sehat	80.400.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pelayanan Rumah Sakit	9.000.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelayanan puskesmas		v	v	v	v

		3.000.000.000	v	v	v	v
Operasioanal Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Presentase Puskesmas yang terakreditasi	280.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100.000.000	v	v	v	v
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Pengelolaan data dan sistim informasi kesehatan	50.000.000	v	v	v	v
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Pengelolaan data dan sistim informasi kesehatan	50.000.000	v	v	v	v
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	30.000.000	v	v	v	v
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	30.000.000	v	v	v	v
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	7.913.514.320	v	v	v	v
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	30.000.000	v	v	v	v
Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Presentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	30.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	7.786.400.000	v	v	v	v

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar	Presentase Pemenuhan KebutuhanSDMK	7.664.400.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase SDMk yang dilkukan pembinaan	72.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	97.114.320	v	v	v	v
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Cakupan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan"	97.114.320	v	v	v	v
			v	v	v	v
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANANMINUMAN	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	390.793.440	v	v	v	v
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma	90.793.440	v	v	v	v
Pengendalian dan Pengawasan sertaTindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pengawasan Obat dan Makanan	87.625.440	v	v	v	v

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pengawasan Obat dan Makanan	3.168.000	v	v	v	v
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma	120.000.000	v	v	v	v
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	"Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"	60.000.000	v	v	v	v
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	"Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"	60.000.000	v	v	v	v
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma	60.000.000	v	v	v	v

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	60.000.000	v	v	v	v
<i>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	<i>Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</i>	60.000.000	v	v	v	v
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	60.000.000	v	v	v	v
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Upaya dan Media Promosi Kesehatan pada Masyarakat lewat Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Promotif Preventif serta Pengembangan UKBM yang ada, Presentase Kelurahan dan Kecamatan Sehat.	1.149.214.832	v	v	v	v
<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Kelurahan siaga aktif</i>	1.056.000.000	v	v	v	v

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.056.000.000	v	v	v	v
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keluarahan siaga aktif	50.000.000	v	v	v	v
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000	v	v	v	v
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarahan siaga aktif	43.214.832	v	v	v	v
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	43.214.832	v	v	v	v

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 ini memuat program, kegiatan indikator output dan outcome serta perincian biaya dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon.

Rencana kerja (Renja) ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon dengan bidang-bidang yang ada serta Sekretariat untuk menyusun program dan rincian kegiatan.

Dengan tersusunnya renja ini, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh warga Kota Tomohon.

Demikian rencana kerja (Renja) ini dibuat, untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan pemberdayaan guna mencapai Tomohon Sehat dan Sulawesi Utara Hebat.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2022.

Tahapan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. penyusunan rancangan
- b. rancangan akhir; dan
- c. penetapan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon sebagai perangkat daerah menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan peneapan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023, dengan

tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Tahun 2023 Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2108 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
12. Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 12 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menyusun RKA Dinas Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 dan Renstra Badan / Dinas / Kecamatan Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat

ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program/kegiatan /Sub Kegiatan pada tahun 2023;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekrjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 Triwulan II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan tahun 2022 (Triwulan II) dan capaian Renstra perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Renja
- 2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan
- 3.3 Program, Kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah tahun 2023 didasarkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Tahun2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan rencana kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon selama Triwulan 2 Tahun Anggaran 2022 , maka dari 8 program ,17 kegiatan dan 44 sub kegiatan yang dari Pagu Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon pada APBDP Kota Tomohon T.A. 2022 sebesar Rp. 98.438.422.181,- Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah)	PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH									
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	12	6	5,252,774,60 5.00	2,169,535,68 2.00	41%	12		
1.03.01. 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	6	12,525,793.0 0	3,752,000.00	30%	12		

1.03.01. 2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	3	2,588,150.00	1,000,000.00	39%	4		
1.03.01. 2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TerKoordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	1	2,480,000.00	1,660,000.00	67%	2		
1.03.01. 2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TerKoordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2		2,303,200.00	0.00	0%	2		
1.03.01. 2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	TerKoordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1		1,888,800.00	0.00	0%	1		
1.03.01. 2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1		1,416,500.00	0.00	0%	1		
1.03.01. 2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TerEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2	1,849,143.00	1,092,000.00	59%	4		
1.03.01. 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	12	6	3,491,719,07 4.00	1,556,707,67 5.00	45%	12		
1.03.01. 2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	6	3,489,891,82 4.00	1,556,707,67 5.00	45%	14		

1.03.01. 2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1		1,827,250.00	0.00	0%	1		
1.03.01. 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12	6	163,201,550.00	42,824,000.00	26%	12		
1.03.01. 2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2		1,259,800.00	0.00	0%	2		
1.03.01. 2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	6	70,129,450.00	13,360,000.00	19%	12		
1.03.01. 2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	6	30,046,500.00	7,908,000.00	26%	12		
1.03.01. 2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan /Material	Tersedianya Bahan /Material	12	6	2,818,200.00	0.00	0%	12		
1.03.01. 2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12	6	24,767,600.00	6,530,000.00	26%	12		
1.03.01. 2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6	34,180,000.00	15,026,000.00	44%	12		
1.03.01. 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	6	1,357,863,288.00	543,888,807.00	40%	12		

1.03.01. 2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,600	263	26,000,000.0 0	2,637,000.00	10%	2,600		
1.03.01. 2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	6	77,727,288.0 0	23,744,507.0 0	31%	12		
1.03.01. 2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	6	40,130,000.0 0	13,500,000.0 0	34%	12		
1.03.01. 2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	6	1,214,006,00 0.00	504,007,300. 00	42%	12		
1.03.01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	6	227,464,900. 00	22,363,200.0 0	10%	12		
1.03.01. 2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	6	227,464,900. 00	22,363,200.0 0	10%	12		
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12	6	3,174,600,18 3.00	716,045,220. 00	23%	12		

1.03.02. 2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	12	6	2,624,600,250.00	716,045,220.00	27%	12		
1.03.02. 2.01.04	Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota	1		140,000,000.00	0.00	0%	1		
	; - Jasa Tenaga Ahli Penguatan Database Irigasi Epaksi dan IKSI				100,000,000.00	0.00	0%			
	- Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota				40,000,000.00	0.00	0%			
1.03.02. 2.01.46	Sub Kegiatan Normalisasi/ Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/ Restorasi Sungai	12	6	2,484,600,250.00	716,045,220.00	29%	12		
	- Jasa Konsultansi Pengawasan (Dokumen Lingkungan Hidup)				50,000,000.00	0.00	0%			
	- Normalisasi Bendungan dan Saluran Irigasi Ranowanko 4				500,000,250.00	0.00	0%			
	- Normalisasi Saluran Sungai Kayawu (PEN)				300,000,000.00	74,746,460.00	25%			

					00	0				
	- Normalisasi Saluran Sungai Lansot (PEN)				528,200,000.00	61,658,632.00	12%			
	- Normalisasi Saluran Sungai Pangolombian (PEN)				528,200,000.00	61,678,950.00	12%			
	- Normalisasi Saluran Sungai Rayon Walian - Kolongan (PEN)				578,200,000.00	517,961,178.00	90%			
1.03.02.2.02	<i>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	6	549,999,933.00	0.00	0%	12		
1.03.02.2.02.08	<i>Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan</i>	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	12	6	300,000,150.00	0.00	0%	12		
	- Pembangunan Jaringan Irigasi Perkebunan Kinota Taratara				300,000,150.00	0.00	0%			
1.03.02.2.02.21	<i>Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</i>	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	12	6	249,999,783.00	0.00	0%	12		
	- Operasi dan Pemeliharaan				249,999,783.	0.00	0%			

	Jaringan Irigasi				00					
1.03.03	<i>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12	6	26,483,124,678.00	3,510,774,700.00	13%	12		
1.03.03.2.01	<i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12	6	26,483,124,678.00	3,510,774,700.00	13%	12		
1.03.03.2.01.05	<i>Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan</i>	terlaksananya peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	12	6	26,233,124,840.00	3,510,774,700.00	13%	12		
	- Jasa Konsultan Perencanaan (Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tomohon				450,000,000.00	0.00	0%			
	- Jasa Konsultan Pengawasan (Dokumen Lingkungan Hidup)				100,000,000.00	0.00	0%			
	- Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK)				200,000,000.00	0.00	0%			

	; - Jasa Konsultan Pengawasan Optimalisasi Jaringan Air Minum Kota Tomohon (PEN)				400,000,000.00	94,856,250.00	24%			
	- Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air di Kelurahan Pangolombian (DAK)				4,129,832,000.00	0.00	0%			
	- Optimalisasi Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tomohon Tengah (PEN)				5,852,700,000.00	873,279,750.00	15%			
	- Optimalisasi Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tomohon Timur (PEN)				2,912,700,000.00	722,500,000.00	25%			
	- Optimalisasi Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tomohon Utara (PEN)				10,771,892,840.00	1,610,370,000.00	15%			
	- Pembangunan SPAM Mata Air Terlindungi RSUD Anugerah Tomohon (PEN)				1,416,000,000.00	209,768,700.00	15%			
1.03.03. 2.01.15	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan		12	6	249,999,838.00	0.00	0%	12		
	- Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kota Tomohon				249,999,838.00	0.00	0%			

1.03.04	<i>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</i>	Cakupan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	12	6	850,000,000.00	0.00	0%	12		
1.03.04.2.01	<i>Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	12	6	850,000,000.00	0.00	0%	12		
1.03.04.2.01.04	Sub Kegiatan RehabilitasiTPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	Terlaksananya RehabilitasiTPA/TPS T/SPA/TPS-3R/TPS	12	6	850,000,000.00	0.00	0%	12		
	- Jasa Tenaga Ahli Penilai Harga				50,000,000.00	0.00	0%			
	- Pengadaan Lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA)				800,000,000.00	0.00	0%			
1.03.05	<i>Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</i>	Cakupan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	12	6	3,229,331,000.00	0.00	0%	12		
1.03.05.2.01	<i>Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Terkelolanya dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	6	3,229,331,000.00	0.00	0%	12		

1.03.05. 2.01.12	Sub Kegiatan Pembangunan/Penye- diaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan/Peny- ediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	12	6	3,229,331,00 0.00	0.00	0%	12		
	- Jasa Pendamping/Fasilitat or Non ASN (DAK)				48,000,000.0 0	0.00	0%			
	- Pembangunan IPAL Skala Permukiman di Kelurahan Kayawu (DAK)				506,687,000. 00	0.00	0%			
	- Pembangunan IPAL Skala Permukiman di Kelurahan Tara - Tara Tiga (DAK)				506,687,000. 00	0.00	0%			
	- Pembangunan IPAL Skala Permukiman di Kelurahan Tinoor dan Lahendong (DAK)				1,122,583,00 0.00	0.00	0%			
	- Pembangunan IPAL Skala Permukiman di Kelurahan Wailan (DAK)				506,687,000. 00	0.00	0%			
	- Pembangunan IPAL Skala Permukiman di Kelurahan Pinaras (DAK)				506,687,000. 00	0.00	0%			
	- Perjalanan Dinas (DAK)				32,000,000.0 0	0.00	0%			
							#DIV/0!			
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan	12	6	1,200,000,00 0.00	0.00	0%	12		

		Sistem Drainase								
1.03.06. 2.01	<i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12	6	1,200,000,00 0.00	0.00	0%	12		
1.03.06. 2.01.05	<i>Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</i>	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan			900,000,000. 00	0.00	0%			
	- Pembangunan Saluran/Trotoar Kelurahan Lansot (Lanjutan)				200,000,000. 00	0.00	0%			
	- Pembangunan Saluran/Trotoar Kompleks SD GMIM 2				300,000,000. 00	0.00	0%			
	- Pembangunan Saluran/Trotoar Kompleks sekitar Kantor Kejaksaan				400,000,000. 00	0.00	0%			
1.03.06. 2.01.07	<i>Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase</i>	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			300,000,000. 00	0.00	0%			
	- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Tomohon				300,000,000. 00	0.00	0%			

1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Penataan Bangunan Gedung	12	6	215,150,000.00	15,235,800.00	7%	12		
1.03.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	12	6	215,150,000.00	15,235,800.00	7%	12		
1.03.08.2.01.02	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (ATK,Cetak,Mami,Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim, Jasa tenaga ahli, Perjalanan Dinas)	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12	6	215,150,000.00	15,235,800.00	7%	12		
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Cakupan Penyelenggaraan Jalan	12	6	56,778,284,459.00	34,384,325,826.00	61%	12		
1.03.10.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya jalan Kabupaten/Kota	12	6	56,778,284,459.00	34,384,325,826.00	61%	12		
1.03.10.2.01.04	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Dokumen Kondisi Jalan/Jembatan	1		250,000,000.00	0.00	0%	1		

	- Jasa konsultan Survey kondisi jalan dan jembatan (DAK)				100,000,000.00	0.00	0%			
	- Jasa Konsultan Pengawasan (Dokumen Lingkungan)				0.00	0.00	#DIV/0!			
	- Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Jalan				75,000,000.00	0.00	0%			
	- Dokumen Lingkungan Hidup Peningkatan Jalan				75,000,000.00	0.00	0%			
1.03.10.2.01.05	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	12	6	20,740,000,145.00	12,077,400,126.00	58%	12		
	- Jasa Tenaga Ahli (Tim Badan Pertanahan Nasional)				100,000,000.00	0.00	0%			
	- Jasa Tim Penilai Harga				100,000,000.00	0.00	0%			
	- Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan				3,000,000,000.00	0.00	0%			
	- Pembangunan Jalan Baru dari lokasi galian c ke perkebunan Goa Kelurahan Kinilow				900,000,000.00	0.00	0%			
	- Pembangunan Jalan Kelurahan Kumelembuai				300,000,000.00	0.00	0%			
	- Pembangunan Jalan Pekuburan Kinilow dan Kinilow 1				275,000,000.00	0.00	0%			

	- Pembangunan Jalan Perkerasan Kebun Liang, Belakang Pertamina, Kelurahan Tumatangtang				200,000,000.00	0.00	0%			
	- Pembangunan Jalan Perkerasan ke Perkebunan Tampusu Kelurahan Pangolombian				200,000,000.00	0.00	0%			
	- Pembangunan Jalan Perkerasan Lokasi Watutepe Kelurahan Taratara Satu				400,000,000.00	0.00	0%			
	- Pembangunan Jalan Perkerasan Pahkontaan, arah situs budaya Tulau, Kelurahan Tumatangtang				200,000,000.00	0.00	0%			
	- Pembangunan Jalan Perkerasan Perkebunan, Maamar Oki Taratara Satu				350,000,000.00	0.00	0%			
	- Pembangunan Jalan Perkerasan Sumumez Pongkor Kelurahan Woloan Satu Utara				540,000,000.00	0.00	0%			
	- Pembangunan Jalan Tintingon (PEN)				1,557,000,000.00	1,141,800,000.00	73%			
	- Pembangunan Jalan Wuntu - Wawa Jln. Aretes, Jln. Pasiwuren - Lingkar Barat dan Jln. Lelepowan -				5,085,000,145.00	4,407,000,126.00	87%			

	Tarumetor (PEN)									
	- Pembangunan Jalan Zake-Sinambetan dan Jalan Perkebunan Urow-Air Terjun Tumimperas (PEN)				3,056,250,00 0.00	2,648,750,00 0.00	87%			
	- Pembangunan Jalan Kina dan Jalan Lentera (lanjutan) (PEN)				2,331,750,00 0.00	2,020,850,00 0.00	87%			
	- Pembangunan Jalan Perkerasan Perkebunan Tondangow dan Jalan Perkerasan Zanoliri (PEN)				2,145,000,00 0.00	1,859,000,00 0.00	87%			
1.03.10. 2.01.08	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	TerRekonstruksi Jalan	12	6	28,800,461,8 14.00	17,501,049,6 00.00	61%	12		
	- Peningkatan Jalan Hotmix Gereja Baru-Hotel Makatembo, Tinoor (PEN)				1,660,941,00 0.00	996,564,600. 00	60%			
	- Peningkatan Jalan Hotmix Meras (PEN)				2,268,750,00 0.00	1,966,250,00 0.00	87%			
	- Peningkatan Jalan Hotmix Perkebunan Wailan (PEN)				3,435,000,00 0.00	2,839,600,00 0.00	83%			

- Peningkatan Jalan Kelurahan Lansot, Paslaten, Wailan Raya, Kakaskasen Raya, Woloan Perumahan dan Pinaras-Rambunan (PEN)				6,905,925,00 0.00	5,985,135,00 0.00	87%			
- Peningkatan Jalan Perkerasan Galangan, Tombeleen dan Eris Mahawu (PEN)				2,527,500,00 0.00	1,853,500,00 0.00	73%			
- Peningkatan Jalan Tumatangtang-Pangolombian (Toulangkow), Jalan Hotmix Lingkar Selatan dan Jalan Tu'wan (PEN)				5,790,000,00 0.00	3,860,000,00 0.00	67%			
- Peningkatan Jalan Hotmix Perkebunan Tumempok Kelurahan Kumelembuai				527,345,814. 00	0.00	0%			
- Peningkatan Jalan Kinilow Tinoor lanjut ke Kebun Patar				1,350,000,00 0.00	0.00	0%			
- Peningkatan Jalan Kupa Mo'mo, Kelurahan Taratara				1,350,000,00 0.00	0.00	0%			
- Peningkatan Jalan Pangi Kilapong, Lansot				1,200,000,00 0.00	0.00	0%			
- Peningkatan Jalan Perkebunan Taratara ke Kayongen, Kinilow				885,000,000. 00	0.00	0%			
- Peningkatan Pelebaran Jalan				900,000,000.	0.00	0%			

	Skentei				00					
1.03.10. 2.01.09	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	12	6	6,537,822,50 0.00	4,805,876,10 0.00	74%	12		
	- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kelurahan Paslaten 1 Belakang RPH				350,000,000. 00	0.00	0%			
	- Rehabilitasi Jalan Kakaskasen-Wailan dan Jalan Susuripen 1 (Wailan) (PEN)				4,099,434,75 0.00	3,552,843,45 0.00	87%			
	- Rehabilitasi Jalan Lingkar-Timur, Jalan Objek Wisata TWA, Jalan Ranozui, Jalan Wilizan dan Jalan Pinati (PEN)				2,088,387,75 0.00	1,253,032,65 0.00	60%			
1.03.10. 2.01.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	12	6	450,000,000. 00	0.00	0%	12		
	- Pemeliharaan Rutin Jalan				450,000,000. 00	0.00	0%			
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang	12	6	1,255,157,25 5.00	24,984,200.0 0	2%	12		
1.03.12. 2.01	Kegiatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	12	6	997,997,550. 00	24,984,200.0 0	3%	12		

1.03.12. 2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	12	6	961,180,550.00	24,984,200.00	3%	12		
1.03.12. 2.01.04	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	12	6	2,442,000.00	0.00	0%	12		
1.03.12. 2.01.04	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Tersosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	12	6	34,375,000.00	0.00	0%	12		
1.03.12. 2.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Terkoordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	12	6	33,894,300.00	0.00	0%	12		
1.03.12. 2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR	Terkoordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR	12	6	3,899,940.00	0.00	0%	12		
1.03.12. 2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Meningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	12	6	29,994,360.00	0.00	0%	12		
1.03.12. 2.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Terkoordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	12	6	54,118,680.00	0.00	0%	12		

1.03.12. 02.03.02	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersdianya Sistem Informasi Penataan Ruang	12	6	54,118,680.00	0.00	0%	12		
1.03.12. 2.04	Kegiatan dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	12	6	169,146,725.00	0.00	0%	12		
1.03.12. 2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	TerKoordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	12	6	3,808,750.00	0.00	0%	12		
1.03.12. 2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	TerKoordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	12	6	21,133,695.00	0.00	0%	12		
1.03.12. 2.04.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terkoordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12	6	144,204,280.00	0.00	0%	12		
	TOTAL				98,438,422,180.00	40,820,901,428.00	41%			

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada smester II Tahun 2022 walaupun belum dapat di capai dengan capaian 100 % sampai pada akhir periode di karenakan beberapa kendala administrasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Sebagaimana pada uraian diatas, telah tergambar akan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon selama tahun anggaran 2022 cukup baik meskipun belum maksimal sehinga berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik pada beberapa program dan kegiatan mengalami penyesuaian anggaran maupun waktu pelaksanaan.

Berikut di sajikan tabel kinerja pencapaian kinerja pelayanan terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 (Smes II)	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks infrastruktur	-		87	87.2	87.5	88	88.2	88.5	77.26	77.26	87.2	87.5	
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak		96	97	98	98.5	99	100	95.81	95.81	97	98	
3	Akses air minum layak	Akses air minum layak		90	92	93	95	95	95	54.37	54.37	92	93	

Dari Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon terdiri dari 3 indikator utama :

1. Indeks Infrastruktur dengan capaian 77.26 %

Indeks infrastruktur merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengukur layanan infrastruktur terhadap pembangunan di Kota Tomohon. Indeks infrastruktur yang adalah perbandingan panjang jalan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Indeks infrastruktur jalan Kota Tomohon dapat diukur melalui persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik diperoleh dari data survey kondisi jalan tahun 2021 yang merupakan akumulasi dari hasil kegiatan fisik baik itu melalui pekerjaan pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan jalan. Data kondisi jalan menyajikan panjang jalan total yang ada di Kota Tomohon, panjang jalan kota dalam kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat sepanjang 553,47 Km dengan rincian Baik sepanjang 437,01 Km, Sedang sepanjang 35,65 Km, Rusak sepanjang 36,58 Km, dan Rusak Berat sepanjang 44,23 Km. Adapun panjang jalan Kota Tomohon menurut jenis permukaan jalan pada tahun 2021 yakni Aspal sepanjang 471,72 Km, Kerikil sepanjang 35,11 Km dan Tanah/setapak sepanjang 46,64 Km.

2. Persentase rumah tinggal bersanitasi layak dengan capaian 95.81 %

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan saluran drainase yang memadai, terdapat akses air bersih, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon dalam menunjang pelaksanaan indikator Persentase Rumah Tinggal bersanitasi Layak melaksanakan indikator kinerja Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat dengan realisasi yang melebihi target yaitu realisasi 90% dari target 87%. Realiasi dan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2021

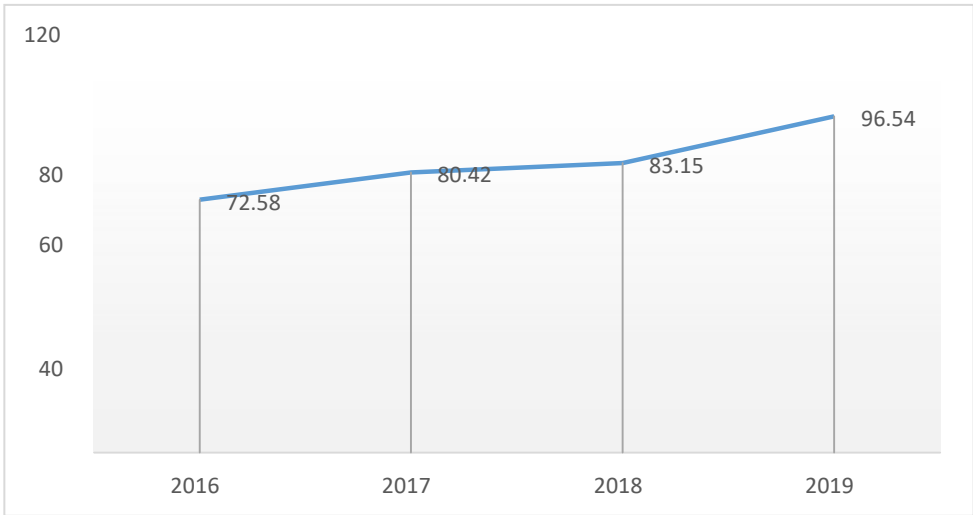
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air minum, sanitasi dan drainase/trotoar.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	87%	90%	103%	Sangat baik

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

3. Akses air minum layak dengan capaian 54.37 %

Persentase rumah tangga berakses sumber air minum dalam kurun waktu 2016-2019, persentase rumah tangga yang memiliki akses sumber air minum mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2016 persentase rumah tangga yang berakses air minum di Kota Tomohon sebesar 72,58%, kemudian mengalami peningkatan sebesar 33,01% menjadi 96,54% pada tahun 2019. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum di Kota Tomohon Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.1
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum di Kota Tomohon Tahun 2016-2019



Sumber: Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka Tahun 2020

Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon dalam pelaksanaan indikator Akses Air Minum Layak melalui kinerja Rumah Tangga Pengguna Air Bersih. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 nampak untuk indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan di akibatkan oleh besarnya tingkat kebocoran sehingga pekerjaan fisik diarahkan bagi peningkatan jaringan perpipaan. Realisasi kinerja Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Realisasi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2017 – 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian				Capaian 2021		
		2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	71,01	72.85	73	50.94%	100%	54.37%	54.37%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan. Sampai tahun 2022 ini pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah terlaksana dengan baik dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Adapun permasalahan-permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang antara lain :

1. Kondisi daerah Kota Tomohon yang rawan bencana
2. Lahan yang tidak/belum bebas sehingga menghambat pelaksanaan fisik di lapangan
3. Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan terutama di daerah pinggir kota yang belum memadai
4. Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan.
5. Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan pada rekanan yang bekerja untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Kota Tomohon, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tak terlepas dari permasalahan antara lain:

1. Jumlah personil/Sumber Daya Manusia khususnya SDM Teknis seperti tenaga pengawas lapangan yang masih kurang. Realita antara jumlah personel yang ada dengan besarnya tugas dan tanggung jawab sangat tidak seimbang. Belum terpenuhinya kebutuhan akan SDM dengan kompetensi personel sesuai kebutuhan bidang. Permasalahan yang harus dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang khususnya berkaitan dengan SDM adalah belum meratanya kemampuan/kompetensi personil, masih rendahnya komitmen, integritas, dedikasi dan daya dukung sebagian personel terhadap tujuan akhir organisasi, masih rendahnya penguasaan dan pemahaman terhadap regulasi pemerintah dan perlu ditingkatkannya koordinasi, integrasi maupun sinkronisasi dengan unit/organisasi lain.

2. Permintaan masyarakat bidang Ke PU-an cukup tinggi sementara dana terbatas.
3. Sarana dan prasarana (peralatan dan kendaraan) pendukung pelaksanaan tugas Ke PU-an masih minim.
4. Selain hal-hal tersebut keadaan geografis dapat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadi genangan pada beberapa bagian wilayah sungai karena faktor topografis dan pengaman daerah aliran sungai yang masih kurang memadai dan perilaku masyarakat dalam menjaga DAS. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga.
2. Kawasan genangan yang belum tuntas karena sistem drainase belum bekerja dengan baik, sehingga mengakibatkan beberapa kawasan masih ada genangan pada saat curah hujan tinggi.
3. Kondisi infrastruktur fisik di Kota padang tergolong masih belum memadai terutama yang menunjang kegiatan ekonomi kreatif dan kawasan pariwisata.
4. Tingkat kemandirian jalan masih perlu untuk ditingkatkan.
5. Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target/ amanat peraturan perundangan juga didukung dengan kurang pahamnya masyarakat akan peraturan perundangan terbaru yang berlaku.

2.4. Review Terhadap Renja Perubahan P- RKPD

Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tomohon secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Perubahan RKPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal PRKPD Tahun 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>		Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6.743282.204	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>		Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6.828.282.204
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Dinas PUPR	Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	94.094.000	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Dinas PUPR	Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	94.094.000
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Dinas PUPR	Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.226.485.753	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Dinas PUPR	Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.226.485.753
	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Dinas PUPR	Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	278,234.653	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Dinas PUPR	Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	278,234.653
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Dinas PUPR	Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	532.096.110	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Dinas PUPR	Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	532.096.110

	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Dinas PUPR	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.303.453.288	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Dinas PUPR	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.303.453.288
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Dinas PUPR	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	308.918.400	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Dinas PUPR	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	308.918.400
2	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</i>		Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		900.000.000	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</i>		Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		1.400.000.000
	<i>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	320.580.030	<i>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	820.580.030

	<i>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	579.419.970	<i>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	579.419.970
3	<i>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>		Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		4.479.832.000	<i>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>		Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		5.283.478.300
	<i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	4.479.832.000	<i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	5.283.478.300
4	<i>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</i>		Cakupan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			<i>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</i>		Cakupan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		11.353.700 -

	<i>Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan		<i>Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	11.353.700
5	<i>Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</i>		Cakupan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		3,229,331,000	<i>Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</i>		Cakupan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		3.279.331.000
	<i>Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Tomohon	Terkelolanya dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	3,229,331,000	<i>Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Tomohon	Terkelolanya dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	3.279.331.000
6	<i>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</i>		Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		110.000.000	<i>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</i>		Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		160.000.000
	<i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	110.000.000	<i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	160.000.000
7	<i>Program Pengembangan Permukiman</i>		Cakupan Pengembangan Permukiman			<i>Program Pengembangan Permukiman</i>		Cakupan Pengembangan Permukiman		700.000.000

	<i>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten / Kota</i>	Kota Tomohon	Terselenggaranya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten / Kota	12 Bulan		<i>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten / Kota</i>	Kota Tomohon	Terselenggaranya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten / Kota	12 Bulan	700.000.000
8	<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>		Cakupan Penataan Bangunan Gedung		200.000.000	<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>		Cakupan Penataan Bangunan Gedung		200.000.000
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	Kota Tomohon	Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	12 Bulan	200.000.000	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	Kota Tomohon	Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	12 Bulan	200.000.000
9	<i>Program Penyelenggaraan Jalan</i>		Cakupan Penyelenggaraan Jalan		32.109.315.778	<i>Program Penyelenggaraan Jalan</i>		Cakupan Penyelenggaraan Jalan		10.800.000.000
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	Kota Tomohon	Terselenggaranya jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	32.109.315.778	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	Kota Tomohon	Terselenggaranya jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	10.800.000.000
10	<i>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>		Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang		834.995.796	<i>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>		Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang		834.995.796

	<i>Kegiatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	Dinas PUPR	Terlaksananya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	12 Bulan	280.660.869	<i>Kegiatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	Dinas PUPR	Terlaksananya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	12 Bulan	280.660.869
	<i>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas PUPR	Terkoordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	125.185.245	<i>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas PUPR	Terkoordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	125.185.245
	<i>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas PUPR	Terkoordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	168.293.299	<i>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas PUPR	Terkoordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	168.293.299
	<i>Kegiatan dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas PUPR	Terlaksananya Kegiatan dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	260.856.383	<i>Kegiatan dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas PUPR	Terlaksananya Kegiatan dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	260.856.383
	TOTAL				48.606.756.778					29.497.441.000

Berdasarkan Pemaparan Tabel di atas memberikan perbandingan antara kesesuaian Rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Perangkat Daerah dimana terdapat perbedaan kebutuhan dan berorientasi pada prioritas program dan kegiatan serta ketersediaan pendanaan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota di rangkum dalam Tabel berikut ini:

Tabel. 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Tomohon

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</i>	Kota Tomohon	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 2.500.000.000	Gabungan Semua Usulan
2	<i>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>	Kota Tomohon	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 4.000.000.000	Gabungan Semua Usulan
3	<i>Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</i>	Kota Tomohon	Cakupan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp. 500.000.000	Gabungan Semua Usulan
4	<i>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</i>	Kota Tomohon	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 2.000.000.000	Gabungan Semua Usulan
5	<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>	Kota Tomohon	Cakupan Penataan Bangunan Gedung	Rp. 8.000.000.000	Gabungan Semua Usulan
6	<i>Program Penyelenggaraan Jalan</i>	Kota Tomohon	Cakupan Penyelenggaraan Jalan	Rp. 20.000.000.000	Gabungan Semua Usulan

Berdasarkan Tabel diatas merupakan rekapitulasi usulan kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah serta pihak pihak lain yang berkepentingan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah Kota Tomohon.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan selanjutnya melihat arah kebijakan Nasional sesuai RPJMN yang menekankan pada 7 (Tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional yang terdiri dari :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkadilang.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dari ketujuh prioritas pembangunan Nasional pada angka ke-5 yang lebih terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon, serta menukung pencapaian prioritas pembangunan lainnya. Maka untuk mendukung program pembangunan Nasional tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan infrastruktur ke-PU-an dan Penataan Ruang seperti : pembangunan jaringan irigasi, jalan, trotoar, air bersih, sanitasi, infrastruktur persampahan guna menopang perekonomian daerah pada khususnya dan secara umum telah mengambil bagian dalam ikut mewujudkan kedaulatan pangan maupun kemandirian ekonomi baik di tingkat provinsi maupun nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah tidak terlepas dari Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Dalam menetapkan Tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022 juga mempertimbangkan visi, misi pembangunan kepala daerah. Visi dan Misi Walikota Tomohon adalah:

“Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

1. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector
3. Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia

- 4. Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan
- 5. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sektor	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata	Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas lingkungan Permukiman	Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan agar tetap terjamin bagi kelangsungan kelancaran transportasi darat dengan skala prioritas sesuai kebutuhan dan fungsi jalan guna mendukung perekonomian daerah.
				Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif,adil dan merata	Melaksanakan Pembangunan, Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur air minum, sanitasi dan pedestrian/drainase/t rotoar, Gedung pemerintah dan sarana publik lainnya serta Melaksanakan perencanaan,pemanfa atan dan pengendalian penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan
				Meningkatnya kemampuan mitigasi dan penangulanga n bencana	Melaksanakan Pembangunan,Pening katan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi dan normalisasi sungai agar tetap terjamin ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi,pertanian / perkebunan, pengairan. dengan skala prioritas sesuai kebutuhan wilayah serta infrastruktur tangap bencana

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon adalah tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi 2 yakni Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sektor. Tujuan yang hendak di capai adalah Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata

3.3 Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022 Terdiri dari 9 program ,17 kegiatan dan 44 sub kegiatan Sebagaimana telah di jabarkan pada bab sebelumnya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini adalah:

- a) Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon
- b) Pencapaian SDGs
- c) Pengentasan Kemiskinan
- d) Pencapaian NSPK
- e) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tahun 2022 dan prakiraan tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TOMOHON

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	
								2023	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			29.497.441.000	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	6.828.282.204	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	94.094.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	24.712.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya RKA perangkat Daerah	1 Dokumen	13.528.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	2.552.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	2.562.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan	6.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Calk	1 Dokumen	42.108.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.02		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja	12 Bulan	2.531.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	1	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	1 Tahun	4.226.485.753	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.02	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	3.890.124.603	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.05		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	327.460.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.05	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Tahun	8.901.150	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	1	2.05	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Maningkatnya disiplin pegawai	1 Tahun	278.234.653	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.05	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Tahun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.05	11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	1 Tahun	80.544.153	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.06		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan	12 Bulan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	1	2.06	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek	1 Tahun	197.690.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.06	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	1 Tahun	532.096.110	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.06	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya Listrik Kantor	1 Tahun	4.891.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	1	2.06	5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tanga	1 Tahun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.06	7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logoistik Kantor	1 Tahun	76.933.900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.06	8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan pengandaan	1 Tahun	26.415.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.06	9	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Material	1 Tahun	203.293.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	1	2.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Tamu	12 Bulan	27.173.210	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.08	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat	1 Tahun	193.390.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.08	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	1 Tahun	85.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.08	3	Pengadaan Alat Besar	Tersediaanya Alat Besar	1 Tahun	35.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	1	2.08	4	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor	1 Tahun	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	12 Bulan	1.303.453.288	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	8 Kendaraan Dinas	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.5 persen	77,727.29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	2	2.01		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.5 persen	40,130,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	2	2.01	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Layanan Umum Kantor	1 Tahun	1,135.569.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	2	2.01	46	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	1 Tahun	308.918.400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	2	2.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	83 %	308.918.400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	2	2.02	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	1 Tahun	1.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	2	2.02	14	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	1 Tahun	820.580.030	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	2	2.02	21	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pola dan Rencana SDA	1 Tahun	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	3			Pembangunan embng dan penampung air lainnya	Terbangunnya embng dan penampung air lainnya	58 persen	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	3	2.01		Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi Sungai	58 Persen	220.580.030	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	3	2.01	5	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi Kondisi Baik	12 Bulan	579.419.970	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	3	2.01	15	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya pembangunan Jaringan Irigasi	12 Bulan	329.420.352	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	4			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	4	2.01		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Operasi Pemeliharaan	12 Bulan	249.999.618	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	4	2.01	4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses air minum	12 Bulan	5.283.478.300	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	5			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Berakses air minum	12 Bulan	5.283.478.300	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	5	2.01		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rumah tangga yang terlayani air minum	12 Bulan	3.157.646.300	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	5	2.01	12	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan	Sambungan rumah aktif kembali	12 Bulan	1.975.832.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	6			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Terselenggaranya OP SPAM	90 persen	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	6	2.01		PROGRAM PENGEMBANGAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan PENGEMBANGAN PERSAMPAHAN REGIONAL	90 persen	11.353.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	6	2.01	5	Pengebangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/Kota	Telaksananya Pengebangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/Kota	12 Bulan	11.353.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	6	2.01	7	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlaksananya Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	12 Bulan	11.353.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	6	2.01	9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	CakupanPENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12 Bulan	3,279.331.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	7			Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah - 384 -egara- 384 -c dalam daerah kabupaten /Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah - 384 -egara- 384 -c dalam daerah kabupaten /Kota	12 Bulan	3,279.331.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	7	2.01		Sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat terkait SPAL	Terlaksananya Sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat terkait SPAL	1 kegiatan	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	7	2.01	1	pembangunan/penyediaan sistem pengeolaan air limbah terpusat skala permukiman	pembangunan/penyediaan sistem pengeolaan air limbah terpusat skala permukiman	12 Bulan	3,229,331,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	8			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan air tidak tersumbat	12 Bulan	160.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	8	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan air tidak tersumbat	12 Bulan	160.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	8	2.01	2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	panjang saluran terbangun	12 Bulan	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	8	2.01	4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Saluran drainase yang berfungsi kembali	12 Bulan	110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	10			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jaringan Infrastruktur Pemukiman Yang terbangun	12 Bulan	700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan Infrastruktur Permukiman Yang terbangun	12 Bulan	700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	10	2.01	4	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan infrastruktur daerah pemukiman	12 Bulan	700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	10	2.01	5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan Gedung yang terbangun	12 Bulan	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	10	2.01	8	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	terbangunnya dan terehabilitasinya bangunan gedung negara	12 Bulan	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	10	2.01	9	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya perencanaan bangunan gedung - 388 -egara yang memenuhi spesifikasi teknis	1 Tahun	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	10	2.01	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik	1 Tahun	10.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	10	2.01	18	Pembebasan Lahan / Tanah	Terasedianya Lahan	1 Tahun	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	10	2.01	21	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik	1 Tahun	10.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	12			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data Kondisi jalan dan Jembatan	1 Dokumen	199.924.642	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	12	2.01		Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan	1 Dokumen	359.373.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	12	2.01	2	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	1 Tahun	7.143.895.626	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	12	2.01	3	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	1 Tahun	1.396.836.332	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	12	2.01	4	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan	1 Kegiatan	1.000.000.110	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	12	2.02		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Tanggap Bencana Infrastruktur jalan jembata	12 Bulan	199.969.590	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	12	2.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tersedianya Dokumen	2 Dokumen	834.995.796	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	12	2.02	3	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen	1 Kegiatan	280.660.869	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	12	2.03		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi	30 persen	208.609.515	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	12	2.03	2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Optimalnya proses penetapan kebijakan penataan ruang	1 Paket	4.107.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	12	2.04		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Optimalnya sosialisasi kebijakan dan peraturan penataan ruang	30 persen	67.944.354	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	12	2.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen	20 Kegiatan	125.185.245	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen rancangan RDTR	20 Kegiatan	75.189.180	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	12	2.04	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang	1 Orang	49.996.065	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1	3	12	2.04	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan Terhadap RTRW	28 Kegiatan	168.293.299	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya sarana informasi modern yang mendukung penataan ruang		68.293.299	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan Terhadap RTRW		260.856.383	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Optimalnya pemberian insentif dan disinsentif pada penataan ruang		49.909.929	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya peningkatan pengendalian dan penertiban di bidang penataan ruang		52.194.143	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Bulan	158.752.311	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan dengan pendanaanya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan jumlah Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 102.387.785.602 dapat diuraikan lebih lanjut sebagaimana tabel berikut : (lampiran)

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2022	Sumber Dana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.497.441.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.828.282.204	APBD Kota Tomohon Tahun 2022
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.094.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.712.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.528.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.552.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.562.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.100.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.108.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.531.500	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.226.485.753	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.890.124.603	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	327.460.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.901.150	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	278.234.653	

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.544.153	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	197.690.500	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.096.110	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.891.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.933.900	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.415.000	
Penyediaan Bahan/Material	203.293.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.173.210	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.390.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000	
Pengadaan Alat Besar	35.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.303.453.288	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77,727.288	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,130,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,135.569.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.918.400	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.918.400	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.400.000.000	APBD Kota Tomohon Tahun 2022

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	820.580.030	
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	
Pembangunan embng dan penampung air lainnya	500.000.000	
Normalisasi/Restorasi Sungai	220.580.030	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	579.419.970	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	329.420.352	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	249.999.618	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.283.478.300	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5.283.478.300	
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.157.646.300	
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan	1.975.832.000	
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	150.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11.353.700	
Pengebangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/Kota	11.353.700	
Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	11.353.700	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3,279.331.000	
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten /Kota	3,279.331.000	
Sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat terkait SPAL	50.000.000	
pembangunan/penyediaan sistem pengeolaan air limbah terpusat skala permukiman	3,229,331,000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	160.000.000	

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	50.000.000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	110.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	700.000.000	
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	200.000.000	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	200.000.000	
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	10.800.000.000	APBD Kota Tomohon Tahun 2022
Pembebasan Lahan / Tanah	50.000.000	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	10.800.000.000	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	199.924.642	
Pembangunan Jalan	359.373.700	
Rekonstruksi Jalan	7.143.895.626	
Rehabilitasi Jalan	1.396.836.332	
Pemeliharaan Rutin Jalan	1.000.000.110	
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	199.969.590	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	834.995.796	APBD Kota Tomohon Tahun 2022
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	280.660.869	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	208.609.515	
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	4.107.000	
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	67.944.354	

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	125.185.245	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	75.189.180	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	49.996.065	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	168.293.299	
Sistem Informasi Penataan Ruang	68.293.299	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	260.856.383	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	49.909.929	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	52.194.143	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	158.752.311	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Semoga Perubahan RENJA tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada Rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada Rencana kerja 2023 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas

pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah. antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2018 , maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Di dalam Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Propinsi Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota , RKPD Kota Tomohon dan Renstra Dinas).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
- b. Aparatur perencanaan yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
- c. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

Demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun, sebagai dokumen perencanaan

yang terukur untuk menghadapi pelaksanaan program , kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 1(satu) Tahun Anggaran.

Disadari Rencana Kerja (RENJA) ini tidak luput dari kekurangannya, namun dalam kekurangan inilah kedepan akan diperbaiki dengan harapan Rancangan Rencana Kerja ini pula dapat bermanfaat bagi kepentingan tugas agar setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kota Tomohon.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah, evaluasi pelaksanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 didasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon bertujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk

dokumen perencanaan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah tahun 2023.

2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon, proses penyusunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon, keterkaitan antara Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenanga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta

susunan garis besar isi dokumen.

- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon Tahun 2022
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon Tahun Lalu dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon
- 3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023 didasarkan pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Tahun2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon selama Triwulan 2 Tahun Anggaran 2022 , maka dari 6 program ,13 kegiatan dan 42 sub kegiatan yang dari Pagu Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon pada APBDP Kota Tomohon T.A. 2022 sebesar Rp. 11,322,436,000,- Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah	PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realiasai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH									
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12	6	5,252,774,60 5.00	2,169,535,68 2.00	41%	12		
1.03.01. 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	6	12,525,793.0 0	3,752,000.00	30%	12		

1.03.01. 2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	3	2,588,150.00	1,000,000.00	39%	4		
1.04.01. 2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TerKoordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12	1	1,318,800.00	936,00.00	87%	12		
1.04.01. 2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TerKoordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	12	1	616,800.00	0.00	0%	12		
1.04.01. 2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	TerKoordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12	1	1,396,200.00	0.00	0%	12		
1.04.01. 2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	1	2,122,200.00	0.00	0%	12		
1.04.01. 2.01.06	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TerEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	1	2,142,700.00	0.00	0%	12		
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD	12	1	2,199,000.00	1,174,000.00	53%	12		
1.04.01. 2.01.07	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	12	100	2.742,987,54 8.00	1,446,843,25 4.00	65%	12		

	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	20	1,920,995,324.00	1,041,829,804.00	55%	12		
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	1	2,902,500.00	1,801,000.00	75%	12		
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Laporan Bulanan Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	1	741,038,924.00	378,075,750.00	55%	12		
	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	Jumlah Kegiatan Pengelolaan daaaaaaaan Penyipn Tanggapan Pemeriksaan	12	1	1,705,500	1,636,500.00	95%	12		
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD</i>	Jumlah Laporan Bulanan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	12	1	3,329,800.00	0.00	0%	12		
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	1	68,200,00.00	0.00	0%	12		
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD</i>	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12	12	1,741,500.00	0.00	0%	12		

	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	Tersedianya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	1	3,074,000.00	0.00	0%	12		
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD</i>	Jumlah Laporan Bulanan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	12		3,329,800.00	0.00	0%	12		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	12	6,050,850.00	971,00.00	20%	12		
	<i>Sub Kegiatan PPrasarana dan Sarana Disiplin Pegawai</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang di adakan</i>	12	2	3,263,600.00	0.00	0%	12		
	<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Database Administrasi Kepegawaian</i>	12	1	928,800.00	0.00	0%	12		
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	12	6	887,750.00	0.00	0%	12		
	<i>Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	12	6	971,700 .00	871,00.00	92%	12		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12		399,487,892.00	131,720,269.00	15%	12		

	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Pket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	12	1	6,105,525.00	2,772,450.00	10%	12		
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	12	4	41,371,200.00	15,849,100.00	15%	12		
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Langganan Bulanan Bahan Bacaan</i>	12	12	3,420,000.00	300,000.00	27%	12		
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah jenis Bahan Material yang disediakan</i>	12	6	73,641,517.00	27,742,500.00	35%	1		
	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah tamu yang difasilitasi</i>	12	300	28,967,000.00	10,000,000.00	45%	1		
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	150	234,262,000.00	69,221,119.00	10%	1		
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor</i>	12	1	2,484,600,250.00	716,045,220.00	29%	12		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	100	2,685,336,200.00	1,325,811,657.00	55%	12		

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan Jasa Surat-Menyurat	12	2000	18,000,000.00	7,000,000.00	57%	12		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan langganan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	2,629,310,400.00	1,304,975,357.00	55%	12		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan untuk Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	38,025,800.00	13,836,300.00	15%	12		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	1	507,852,800.00	85,784,090.00	12%	12		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	12	1	73,442,800.00	13,955,857.00	13%	12		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	12	13	395,000,000.00	64,673,233.00	14%	12		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	12	11	39,410,000.00	7,155,000.00	10%	12		

	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	<i>Persentase Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Kab/Kota</i>			300,000,150.00	0.00	0%			
	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	12	6	249,999,783.00	0.00	0%	12		
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		12	6	26,483,124,678.00	3,510,774,700.00	13%	12		
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan rumah Khusus	Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	12	6	26,483,124,678.00	3,510,774,700.00	13%	12		
	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota	100	1	194,395,200.00	20,439,300.00	13%	12		
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi masyarkata Terdampak	100	1						

		Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota								
1.03.02.2.01	<i>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	6	2,624,600,250.00	716,045,220.00	27%	12		
1.03.02.2.01.04	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Tersedianya Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1		140,000,000.00	0.00	0%	1		
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data Penerima Rumah Nbagi korban Bencvana Alam atau Terkena Relokasi Program Kab/Kota	12	1	15,762,900.00	0.00	0%	12		
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan rumah Khusus	Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	12	1	36,000,000.00	7,182,500.00	7%	12		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Presentase Perumahan yang Mempunyai Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	12		62,892,900.00	5,545,000.00	5%	12		

	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Teintegrasi secara Elektronik	Persentase Permohonan izin Perumahan yang direkomendasikan	12	12	53,492,900.00	2,220,00.00	2%	12		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase stakeholder pengembang perumahan yang di fasilitasi	12	100	9,400,000.00	3,325,000.00	15%	12		
	Program Kawasan Permukiman	<i>Persentase pemukiman yang tertata</i>			876,030,380.00	.00	15%			
	Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	12	50	9,500,000.00	0.00	0%	12		
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	<i>Presentase Pengembang dan Stakeholder yang di Fasilitasi Untuk Pembangunan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh</i>	12	100	249,999,838.00	0.00	0%	12		
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	<i>Persentase lingkungan pemukiman kumuh</i>	12		636,530,380.00	0.00	0%	12		

	<i>dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha</i>									
	<i>Survei Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh</i>	<i>Jumlah Dokumen Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh yang di tetapkan</i>	12	1	18,882,730.00	0.00	0%	12		
	<i>Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</i>	<i>Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</i>	12	1	449,488,200.00	0.00	0%	12		
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi di kelurahan yang dilaksanakan Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh</i>	12	12	19,424,100.00	0.00	0%	12		
	<i>Penyusunan/Review/Lagalisasi Kebijakan Bidang PKP</i>	<i>Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang disusun/Review/Legalisasi</i>	12	1	149,735,350.00	0.00	0%	12		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	12		230,000,000.00	0,00	0%	12		
	Koordinasi dan	Jumlah Stakeholder yang	12	5		0.00	0%	12		

	Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran atau Peremajaan Permukiman Kumuh	terlibat dalam Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			30,000,000.00					
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang di Laksanakan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan	12	4	200,000,000.00	0.00	0%	12		
	Program Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	12		1,498,202,000.00	0.00	0%	12		
2	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kelurahan yang di Fasilitas dengan Pembangunan/Peningkatan Kualitas Bantuan Rumah Swadaya	12	60	1,498,202,000.00	0.00	0%	12		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki	12	50	1,145,000,000.00	0.00	0%	12		

	Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha									
	Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah PSU yang di Banguan/DiRehabilitasi	12	3	353,202,000 0.00	0.00	0%	12		
	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang di Dukung dengan PSU	12		2,482,729,02 0.0	0.00	0%	12		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Presentase Kelurahan Yang di Dukung dengan PSU	12	90	2,482,729,02 0.00	0.00	0%	12		
	Penyediaan Prasarana, Saranan, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dibangun	12 4		2,430,718,32 0.00	201,830,100. 00	20%	12		
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	12	4	52,010,700.0 0	17,200,000.0 0	17%	12		

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada smester II Tahun 2022 walaupun belum dapat di capai dengan capaian 100 % sampai pada akhir periode di karenakan beberapa kendala administrasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Sebagaimana pada uraian diatas, telah tergambar akan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon selama tahun anggaran 2022 cukup baik meskipun belum maksimal sehinga berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik pada beberapa program dan kegiatan mengalami penyesuaian anggaran maupun waktu pelaksanaan.

Berikut di sajikan tabel kinerja pencapaian kinerja pelayanan terhadap Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 (Smes II)	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH(Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah Unit RTLH -		3,35	3,34	3,30	2,80	2,50	2,30	3,21		97	98	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada Tahun N		100	100	100	100	100	100	NA	NA	30	29	
3	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program		100	100	100	100	100	100	NA	NA	0	0	

4	Jumlah Perumahan yang sudah diLengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU		0,71	0,71	0,90	1,2	1,4	1,5	8,11		14	15	
5	Presentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10Ha di Kabupaten/Kota yang Di Tangani	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha		35	50	20	10	5	5	77,81		94	95	

Dari Tabel Tc. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon terdiri dari 3 indikator utama:

4. Berkurangnya Jumlah Unit RTLH dengan capaian 96,11 %

Indikator Kinerja Berkurangnya Jumlah unit RTLH sifatnya Progresif Negatif yang artinya presentase realsisasinya semakin kecil berarti capaian kinerjanya semakin bagus. Pada Tahun 2021 capaian indikator kinerja ini adalah baik dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rumah Tidak Layak Huni di Kota Tomohon pada akhir Tahun 2021 adalah sebanyak 729, sedangkan jumlah total unit Rumah yang ada sebanyak 22.726. Dengan demikian Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni adalah sebesar 3,21%. Adapun target untuk indicator ini adalah 3,34. dengan demikian capaiannya adalah 96,11%

Tabel 2.3

Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpasu,Berkualitas Lingkungan dan Berkelanjutan	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH(Rumah Tidak Layak Huni)	3,35%	3,21%	96,11%	Sangat baik

2.Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

Realisasi 0% untuk indikator Jumlah Warga Negara bencana yang memperoleh rumah layak huni, dikarenakan pada Tahun 2021 dan tahun 2020, di Kota Tomohon tidak ada bencana dan tidak di keluarkannya Surat penetapan bencana dari Walikota.

Tabel 2.4

Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpasu,Berkualitas Lingkungan dan Berkelanjutan	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi nProgram	100	%	NA	

		Pemerintah Kab/Kota				
--	--	---------------------	--	--	--	--

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon

3.Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

- 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

“Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

Dalam pelaksanaan indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni ini tidak dilaksanakan sehubungan dengan tidak ada relokasi akibat program pemerintah Kota.

Begitu juga dengan Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” tidak ada kegiatan. Hal ini dikarenakan di Kota Tomohon tidak terdapat kawasaan perumahan yang berada di sempadan rel kereta api, dan permukiman di bawah jembatan. Begitu juga dengan perumahan yang berada di daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

Tabel 2.5

Penyediaan dan Rehabilitasi rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota

			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpasu,Berkualitas Lingkungan dan Berkelanjutan	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	100		NA	Sangat baik

4.Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Jumlah perumahan yang sudah di lengkapi PSU adalah Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU di bagi dengan jumlah unit rumah kota. Adapun jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU di Kota Tomohon adalah sebanyak 1.862, dan untuk jumlah unit rumah kota adalah 22.726 unit. Adapun realisasi jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU di Kota Tomohon pada Tahun 2021 adalah 8,11% dari target yang ditetapkan sebesar 0,80%. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah 1013,75%

Tabel.2.6

Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpasu,Berkualitas Lingkungan dan Berkelanjutan	Jumlah Perumahan yang sudah di lengkapi dengan PSU	0,71	0,11	1013,75	

5. Presentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha di Kabupaten/Kota yang di tangani

Adapun luas Kawasan permukiman kumuh yang ditangani (ha) di kota Tomohon pada tahun 2021 seluas 12,27 ha. Kawasan Kumuh yang ditangani di Kota Tomohon sampai dengan Tahun 2021 adalah Kawasan kumuh yang berada di Kelurahan Tinoor Satu, Tinoor Dua, Kayawu, Talete Satu, Kampung Jawa dan Lahendong. Dengan demikian Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani di Kota Tomohon Tahun 2021 adalah realisasinya sebesar 77,81%, dari target yang ditetapkan sebesar 26%. Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 299,27 %.

Tabel.2.7

Presentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha di Kabupaten/Kota yang di tangani

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
			Target	Realisasi	Csebesar 299,27 %. apaian	Kategori
1	Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpasu,Berkualitas Lingkungan dan Berkelanjutan	Presentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10Ha di kabupaten/Kota di tangani	35	77,61	299,27	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan. Sampai tahun 2022 ini pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah terlaksana dengan baik dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan. Sampai tahun 2022 ini pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari hasil

capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah terlaksana dengan baik dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Adapun permasalahan-permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain :

6. Kondisi daerah Kota Tomohon yang rawan bencana
7. Lahan yang tidak/belum bebas sehingga menghambat pelaksanaan fisik di lapangan
8. Masih banyaknya kualitas permukiman yang belum memenuhi kriteria layak huni.
9. Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan.
10. Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan pada rekanan yang bekerja untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11. Belum Maksimalnya Pembangunan Jalan setapak dan Jalan Lingkungan pada setiap Kecamatan.
12. Aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap perumahan beserta sarana prasarannya yang belum memadai
13. Tingginya perpindahan/urbanisasi yang semakin meningkat menyebabkan kesan kekumuhan di lokasi padat penduduk

Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Kota Tomohon, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tak terlepas dari permasalahan antara lain:

5. Jumlah personil/Sumber Daya Manusia khususnya SDM Teknis seperti tenaga pengawas lapangan yang masih kurang. Realita antara jumlah personel yang ada dengan besarnya tugas dan tanggung jawab sangat tidak seimbang. Belum terpenuhinya kebutuhan akan SDM dengan kompetensi personel sesuai kebutuhan bidang. Permasalahan yang harus dihadapi Dinas Perumahan Rakyat Kota Tomohon khususnya berkaitan dengan SDM adalah belum meratanya kemampuan/kompetensi personil, masih rendahnya komitmen, integritas, dedikasi dan daya dukung sebagian personel terhadap tujuan akhir organisasi, masih rendahnya penguasaan dan pemahaman terhadap regulasi pemerintah dan perlu ditingkatkannya koordinasi, integrasi maupun sinkronisasi dengan unit/organisasi lain.
6. Permintaan masyarakat bidang Ke Perumahan cukup tinggi sementara dana terbatas.
7. Sarana dan prasarana (peralatan dan kendaraan) pendukung pelaksanaan tugas Ke Perumahan masih minim.
8. Selain hal-hal tersebut keadaan geografis dapat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Menuntaskan rehabilitasi rumah layak huni yang tersebar di Kota Tomohon
- b) Melaksanakan pendataan rumah yang terkena relokasi bencana dan terdampak bencana
- c) Melakukan penataan terhadap perumahan dan permukiman di kawasan Kota Tomohon;
- d) Menyusun rencana penanganan kawasan kumuh atau wilayah yang membutuhkan perbaikan dalam hal infrastruktur yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Kota Tomohon;
- e) Menyusun rancangan program peningkatan akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau dengan dukungan prasarana-sarana dasar, utilitas yang memadai, dan memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim, serta peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan maupun sarana prasarana dasar permukiman;
- f) Meningkatkan kemandirian masyarakat dengan cara mengikutsertakan/memberdayakan masyarakat dalam kegiatankegiatan yang berkaitan dengan pengembangan lingkungan permukiman yang lebih baik.

2.4. Review Terhadap Renja Perubahan P- RKPD

Rancangan Perubahan RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tomohon secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Perubahan RKPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.8

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6.393.664.590	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6.3885.901.590
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Dinas PERKIM	Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	51,947.300	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Dinas PERKIM	Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	51,947.300
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Dinas PERKIM	Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2,742,987,648	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Dinas PERKIM	Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2,742,987,648
	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Dinas PUPR	Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	6,052,850	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Dinas PERKIM	Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	6,052,850

	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Dinas PERKIM	Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	399,487,892	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Dinas PERKIM	Pengadministrasi an Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	399,487,892
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Dinas PERKIM	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	507,852,800	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Dinas PERKIM	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	507,852,800
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota dan Fasilitas Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota		194,393,200	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota dan Fasilitas Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota		2
	<i>Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota</i>	Kota Tomohon	Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program kab/kot	12 Bulan	116.762.900	<i>Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota</i>	Kota Tomohon	Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program kab/kot	12 Bulan	
	<i>Kegiatan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	Kota Tomoho	Presentase Perumahan yang mem[unyai Izin Pembangunan dan Pengembangan	12 Bulan	62.892.900	<i>Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	Kota Tomoho	Presentase Perumahan yang mem[unyai Izin Pembangunan dan	12 Bulan	

								Pengembangan Perumahan		
3	PROGRAM KAWASAN PERUMUKIMAN		Presentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang di tangani		876.030.380	PROGRAM KAWASAN PERUMUKIMAN		Presentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang di tangani		792.455.380
	<i>Kegiatan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>	Kota Tomoho	Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang di tertibkan	12 Bulan	9.500.000	<i>Kegiatan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>	Kota Tomoho	Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang di tertibkan	12 Bulan	9.500.000
	<i>Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha</i>	Kota Tomoho	Presentase Lingkungan Permukiman Kumuh	12 Bulan	636.530.380	<i>Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha</i>	Kota Tomoho	Presentase Lingkungan Permukiman Kumuh	12 Bulan	563.905.380
	<i>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha</i>	Kota Tomoho	Presentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	12 Bulan	230.000.000	<i>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha</i>	Kota Tomoho	Presentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	12 Bulan	219.050.000
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Berkurangnya Jumlah Unit RTLH		1.449.202.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Berkurangnya Jumlah Unit RTLH		1.450.202.000

	KUMUH									
	<i>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kab/Kota</i>	Kota Tomohon	Presentase Kelurahan yang di fasilitasi dengan Pembnagunan/Peningkatan Kualitas Bantuan Rumah Swadaya	12 Bulan	1.449.202.000	<i>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kab/Kota</i>	Kota Tomoho	Presentase Kelurahan yang di fasilitasi dengan Pembnagunan/Peningkatan Kualitas Bantuan Rumah Swadaya	12 Bulan	1.450.202.00
5	PROGRAN PENINGKATAN PRASARANA,SARANA DAN UTILITAS UMUM(PSU)		Jumlah Perumahan yang sudah di lengkapi PSU		2.482.729.020	PROGRAN PENINGKATAN PRASARANA,SARANA DAN UTILITAS UMUM(PSU)		Jumlah Perumahan yang sudah di lengkapi PSU		1.563.176.387
	<i>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	Kota Tomoho	Presentase Kelurahan yang di lengkapi dengan PSU	12 Bulan	2.482.729.020	<i>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	Kota Tomoho	Presentase Kelurahan yang di lengkapi dengan PSU	12 Bulan	1.563.176.387
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi,Kualifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Tomoho	Presentase Pengembangan yang Memiliki sertifikasi dan teregistrasi		54,860,100	<i>Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi,Kualifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	Kota Tomoho	Presentase Pengembangan yang Memiliki sertifikasi dan teregistrasi		54,860,100

	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	579.419.970	<i>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	579.419.970
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil		Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan teregistrasi untuk perancangan Rumah dan PSU		54,860,100	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan teregistrasi untuk perancangan Rumah dan PSU		54,860,100
	<i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota</i>		Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil		54,860,100	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil		Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil		54,860,100

Berdasarkan Pemaparan Tabel di atas memberikan perbandingan antara kesesuaian Rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Perangkat Daerah dimana terdapat perbedaan kebutuhan dan berorientasi pada prioritas program dan kegiatan serta ketersediaan pendanaan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota di rangkum dalam Tabel berikut ini:

Tabel. 2.9

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Tomohon

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan teregistrasi untuk perancangan Rumah dan PSU		54,860,100	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
2.	Program Kawasan Permukiman	Kota Tomohon	Presentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang di tangani	Rp.876.030.380	Gabungan Semua Usulan
3.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Tomohon	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH	Rp.1.498.202.000	Gabungan Semua Usulan
4.	Program Peningkatan Prasarna,Sarana dan Utilitas Umum(PSU)	Kota Tomohon	Jumlah Perumahan yang sudah di lemgkapi	Rp.2.482.729.020	Gabungan Semua Usulan

			PSU		
5.	Program Peningkatan Pelayanan Serifikasi,Kualifikasi,dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Tomohon	Presentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan teregistrasi	Rp.54.860.100	Gabungan Semua Usulan

Berdasarkan Tabel diatas merupakan rekapitulasi usulan kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah serta pihak pihak lain yang berkepentingan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah Kota Tomohon.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan selanjutnya melihat arah kebijakan Nasional sesuai RPJMN yang menekankan pada 7 (Tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional yang terdiri dari :

8. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
9. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
10. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing
11. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
12. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar
13. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
14. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dari ketujuh prioritas pembangunan Nasional pada angka ke-5 yang lebih terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon, serta menugging pencapaian prioritas pembangunan lainnya. Maka untuk mendukung program pembangunan Nasional tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tomohon melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan infrastruktur ke-PU-an dan Penataan Ruang seperti : pembangunan PJU, jalan Setapak, infrastruktur RTLH guna menopang perekonomian daerah pada khususnya dan secara umum telah mengambil bagian dalam ikut mewujudkan kedaulatan pangan maupun kemandirian ekonomi baik di tingkat provinsi maupun nasional.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah tidak terlepas dari Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Dalam menetapkan Tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Perkim Tahun 2022 juga mempertimbangkan visi, misi pembangunan kepala daerah. Visi dan Misi Walikota Tomohon adalah:

“Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

6. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius
7. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector
8. Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia
9. Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan

10. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sektor	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata	Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Pembangunan dan Peningkatan kualitas RTLH menjadi Rumah layak huni dan didukung dengan ketersediaan PSUn	- Penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan
				Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif,adil dan merata	Peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan
				Penyediaan rumah yang layak huni untuk masyarakat korban bencana dan relokasi program pemerintah	- Melaksanakan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah dalam rangka mendukung Pengurangan Kawasan kumuh dan/atau Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon adalah tujuan dan sasaran dalam rangka

melaksanakan misi 2 yakni Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sektor. Tujuan yang hendak di capai adalah Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata

3.3 Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022 Terdiri dari 6 program ,13 kegiatan dan 41 sub kegiatan Sebagaimana telah di jabarkan pada bab sebelumnya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini adalah:

- f) Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon
- g) Pencapaian SDGs
- h) Pengentasan Kemiskinan
- i) Pencapaian SPM
- j) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tahun 2022 dan prakiraan tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KOTA TOMOHON

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	
								2023	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN			11,322,436.000	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang urusan pemerintah Daerah Yang dilaksanakan	12 Bulan	7,412,278,809	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di buat	12 Bulan	49.083.800	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dibuat	1 Dokumen	40.125.100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.299.10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	898.800	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.093.600	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan	1.522.400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2.144.800	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Cakupan Pelayanan Administrasi keuangan	12 Bulan	2.531.500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	3.231.978.847	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.02	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	2.205.026.243	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.05		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Bulanan kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	281.880.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.05	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Tahun	737.550.404	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	1	2.05	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Bulanan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Tahun	2.371.900	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.05	9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Tahun	3.173.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.05	11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Tahun	2.031.300	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.06		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	12 Bulan	145.400.837	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	1	2.06	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	1 Tahun	3.154.600	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.06	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Tahun	33.123.837	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.06	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	30.261.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.06	4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	78.861.400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	1	2.06	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	373.796.325	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.06	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Tahun	6.167.475	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.06	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Tahun	49.132.700	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.06	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	6.485.200	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	1	2.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Tamu	12 Bulan	31.341.600	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.08	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Langganan Bulanan Bahan Bacaan	1 Tahun	3.420.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Bahan Material	Jumlah jenis Bahan Material yang disediakan	1 Tahun	79.356.550	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.08	3	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1 Tahun	31.533.500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	1	2.08	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	215.492.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.09		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 Bulan	3.070.101.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah materai dan Jasa Surat-Menyurat	8 Kendaraan Dinas	20.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan langganan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.5 persen	3.004.780.800	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	2	2.01		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan untuk Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.5 persen	45.320.200	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	2	2.01	4	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Tahun	541.918.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	2	2.01	46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1 Tahun	106.008.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	2	2.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	83 %	395.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	2	2.02	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	1 Tahun	40.910.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	2	2.02	14	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kota	1 Tahun	58.938.100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	2	2.02	21	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	1 Tahun	37.026.600	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	3			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	58 persen	13.491.500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	3	2.01		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	58 Persen	13.082.500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	3	2.01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	12 Bulan	10.452.600	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	3	2.01	15	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	12 Bulan	30.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	4			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	<i>Persentase Perumahan yang mempunyai Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>		21.911.500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	4	2.01		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	12 Bulan	4.961.800	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	4	2.01	4	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	<i>Persentase lingkungan permukiman kumuh</i>	12 Bulan	<i>4.451.800</i>	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	5			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh yang di tetapkan	12 Bulan	3.971.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	5	2.01		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	12 Bulan	480.800	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	5	2.01	12	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	12 Bulan	510.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	6			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	90 persen	1.503.726.400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	6	2.01		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	90 persen	1.503.726.400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	6	2.01	5	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang di fasilitasi dengan Pembangunan / Peningkatan Kualitas Bantuan Rumah Swadaya	12 Bulan	1.503.726.400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	6	2.01	7	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki / ditingkatkan	12 Bulan	1.153.726.400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	6	2.01	9	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah PSU yang dibangun / rehabilitasi	12 Bulan	350.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	7			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	12 Bulan	3,279.331.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	7	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase kelurahan yang di lengkapi dengan PSU	1 kegiatan	1.260.364.991	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	7	2.01	1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dibangun	12 Bulan	1.260.364.991	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	8			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Bulan	1.167.976.131	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	8	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan air tidak tersumbat	12 Bulan	92.388.860	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	8	2.01	2	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan teregistrasi untuk perancangan Rumah dan PSU	12 Bulan	574.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	8	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil	12 Bulan	574.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	10			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jaringan Infrastruktur Pemukiman Yang terbangun	12 Bulan	700.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan Infrastruktur Pemukiman Yang terbangun	12 Bulan	700.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	10	2.01	4	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan infrastruktur daerah pemukiman	12 Bulan	700.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	10	2.01	5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan Gedung yang terbangun	12 Bulan	200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	10	2.01	8	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	terbangunnya dan terehabilitasinya bangunan gedung negara	12 Bulan	200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	10	2.01	9	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya perencanaan bangunan gedung negara yang memenuhi spesifikasi teknis	1 Tahun	200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	10	2.01	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik	1 Tahun	10.800.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	10	2.01	18	Pembebasan Lahan / Tanah	Terasedianya Lahan	1 Tahun	50.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	10	2.01	21	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik	1 Tahun	10.800.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	12			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data Kondisi jalan dan Jembatan	1 Dokumen	199.924.642	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	12	2.01		Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan	1 Dokumen	359.373.700	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	12	2.01	2	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	1 Tahun	7.143.895.626	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	12	2.01	3	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	1 Tahun	1.396.836.332	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	12	2.01	4	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan	1 Kegiatan	1.000.000.110	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	12	2.02		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Tanggap Bencana Infrastruktur jalan jembatan	12 Bulan	199.969.590	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	12	2.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tersedianya Dokumen	2 Dokumen	834.995.796	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	12	2.02	3	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen	1 Kegiatan	280.660.869	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	12	2.03		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi	30 persen	208.609.515	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	12	2.03	2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Optimalnya proses penetapan kebijakan penataan ruang	1 Paket	4.107.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	12	2.04		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Optimalnya sosialisasi kebijakan dan peraturan penataan ruang	30 persen	67.944.354	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	12	2.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen	20 Kegiatan	125.185.245	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen rancangan RDTR	20 Kegiatan	75.189.180	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	12	2.04	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang	1 Orang	49.996.065	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	12	2.04	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan Terhadap RTRW	28 Kegiatan	168.293.299	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya sarana informasi modern yang mendukung penataan ruang		68.293.299	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan Terhadap RTRW		260.856.383	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Optimalnya pemberian insentif dan disinsentif pada penataan ruang		49.909.929	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya peningkatan pengendalian dan penertiban di bidang penataan ruang		52.194.143	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Bulan	158.752.311	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan dengan pendanaanya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Maupun Dana Hibah) dengan jumlah Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 11,322,436,00 dapat diuraikan lebih lanjut sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2022	Sumber Dana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29.497.441.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.882.217.223	APBD Kota Tomohon Tahun 2022
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	51.547.300	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.751.600	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.318.800	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	616.800	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.199.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.396.200	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.142.700	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.231.940.181	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.179.447.957	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.200.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian/Verifikasi Keuangan SKPD	971.538.924	

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.329.800	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.902.500	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.705.500	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.124.050	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3.264.600	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	887.750	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	971.700	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.705.500	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.124.050	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3.264.600	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	887.750	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	971.700	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.487.892	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.105.525	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.105.525	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.420.000	
Penyediaan Bahan Material	73.641.517	
Fasilitas Kunjungan Tamu	28.967.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.262.000	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.720.650	
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.685.336.200	
Penyediaan jasa surat menyurat	18.000.000	APBD Kota Tomohon Tahun 2022
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.100.000.000	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	38.025.800	
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	507.862.800	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.442.800	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	395.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.410.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	172.089.100	
<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	94.456.800	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	26.753.900	
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	27.000.000	
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	15.762.900	
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat,Rumah Susun dan Rumah Khusus	33.750.000	
<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	62.892.900	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara elektronik	53.492.900	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	9.400.000	

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	680.072.540	
<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>	<i>9.500,000</i>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	9.500.000	
<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	<i>636.530.380</i>	
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	18.882.730	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	18.424.100	
Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	149.735.350	
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	449.488.200	
<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	<i>34.042.160</i>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	30.000.000	
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4.042.160	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.994.176.387	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.942.165.687	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	52.010.700	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	54.860.100	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.994.176.387	APBD Kota Tomohon Tahun 2022
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	250,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil	20,740,000,146	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.498.202.000	

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.498.202.000	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.498.202.000	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.145.000.000	
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	353.202.000	

Jumlah: 11,322,436,000

BAB V

P E N U T U P

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan RENJA Dinas Prumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Semoga Perubahan RENJA tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada Rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada Rencana kerja 2023 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan

keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah. antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2018 , maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 sebagai berikut:

- Di dalam Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Propinsi Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota , RKPD Kota Tomohon dan Renstra Dinas).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
- Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

- g. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

Demikian Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun, sebagai dokumen perencanaan yang terukur untuk menghadapi pelaksanaan program , kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 1(satu) Tahun Anggaran.

Disadari Rencana Kerja (RENJA) ini tidak luput dari kekurangannya, namun dalam kekurangan inilah kedepan akan diperbaiki dengan harapan Rancangan Rencana Kerja ini pula dapat bermanfaat bagi kepentingan tugas agar setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kota Tomohon.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Tomohon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Renstra BPBD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi dan bersifat indikatif.

Dokumen akhir dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Renja PD BPBD Kota Tomohon tahun 2023 disusun untuk lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya yang ada di lingkup Pemerintah Kota Tomohon.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6322);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - j. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 5).
 - k. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 4).
 - l. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 9).
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- Maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Tomohon Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Tomohon Tahun 2023.
 - b. Bahan penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah 2023.
 - c. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tomohon Tahun 2023.
 - d. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.

e. Acuan dalam penyusunan LAKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini adalah untuk:

- a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- e. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LAKIP, LPPD, dan LKPJ.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2022 anggaran kegiatan yang dikelola oleh BPBD Kota Tomohon adalah sebesar Rp. 4.159.789.172,- untuk mendanai gaji pengawai dan pelaksanaan 2 program 9 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang direncanakan dalam DPA 2022 dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.926.056.240,- atau sebesar 46,30 % dari target selama 1 tahun anggaran. Hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja BPBD dan pencapaian Renstra BPBD dari Tahun 2021 sampai Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Tomohon

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan.....									
1	01			Bidang Urusan...									
1	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
1	01	01	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah		5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	9 dokumen	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan		4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	6 laporan	

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	8 dokumen	
1	01	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah								
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS		3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	32 orang/ bulan	3 tahun 32 org/bulan	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan		27 orang	5 orang	5 orang	100%	150 dokumen	32 orang 150 dokumen	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikator keuangan		11 orang	1 orang	1 orang	100%	1 dokumen	12 orang 1 dokumen	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah kegiatan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 laporan	3 laporan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah kegiatan		5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 laporan	8 laporan	
1	01	01	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada PD								
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga administrasi barang milik daerah		18 orang	6 orang	6 orang	100%	48 laporan	24 orang 48 laporan	
1	01	01	04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas		40 orang	40 orang	- orang	0%	40 orang	80 orang	
1	01	01	05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Umum								

					Perangkat Daerah								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan		-	-	-	-	1 paket	1 paket
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor/ ATK	Jumlah alat tulis kantor		156 item	52 item	52 item	100%	1 paket	208 item 1 paket
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		44000 lembar	3500 lembar	3500 lembar	100%	35000 lembar	82500 lembar
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah, koran dan buku-buku perundang-undangan		2895 eksemplar	1800 eksemplar	1800 eksemplar	100%	1800 eksemplar	6495 eksemplar
					Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah peket bahan/ material yang disediakan		-	-	-	-	1 paket	1 paket
					Fasilitas Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan kegiatan rapat-rapat		60 paket	100 paket	100 paket	100%	200 paket	360 paket
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah		110 orarng	20 orang	20 orang	100%	30 orang	160 orang
1	01	01	06		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		6 unit	5 unit	5 unit	100%	7 unit	18 unit
1	01	01	07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Kegiatan Penyediaan Jasa							

				Daerah	Penunjang Urusan PD								
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai dan honor tenaga kontrak		2660 buah	1000 buah 3 orang/bln	1000 buah 3 orang/bln	100%	1000 laporan	4660 laporan	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		66 rekening	24 rekening	24 rekening	100%	24 rekening	114 rekening	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/Kebersihan	Jumlah tenaga kebersihan		1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	312 laporan 26 orang	2 tahun 312 laporan 26 orang	
1	01	01	08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorang-an dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		-	-	-	-	1 unit	1 unit	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		48 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	80 unit	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya		-	-	-	-	1 unit	1 unit	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		21 unit	15 unit	15 unit	100%	11 unit	48 unit	
1	01	02		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan								

					Informasi Rawan Bencana								
1	01	02	01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana								
				Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE Rawan Bencana		1 kegiatan	1 kegiatan	- kegiatan	0%	100 orang	100 orang	
1	01	02	02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
				Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		177 orang	150 orang	- orang	0%	150 orang	327 orang	
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		- orang	50 orang	- orang	0%	50 orang	50 orang	
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		- orang	- orang	- orang	0%	1200 orang	1200 kegiatan	
1	01	02	03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan								

					Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
				Pencarian, pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaeten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi per Jenis Kejadian Bencana		- orang	- orang	- orang	0%	100 orang	100 orang	
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		- kegiatan	- kegiatan	- kegiatan	0%	1 kegiatan	1 kegiatan	
1	01	02	04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
				Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota		-	-	-	0%	1 dokumen	1 dokumen	

Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang direncanakan disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Kurang optimalnya sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
2. Belum terpenuhinya sumber daya aparatur baik secara kuantitas dan kualitas yang memiliki kompetensi mumpuni dalam penanggulangan bencana;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja Program/kegiatan adalah :

1. Adanya peraturan perundang – undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;
2. Adanya kajian risiko bencana yang memetakan potensi bencana, kerentanan dan kapasitas daerah;
3. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan;
4. Semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat yang tinggi;
5. Kesadaran masyarakat akan ancaman bencana semakin tinggi sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menurunkan resiko bencana;
6. Antusias masyarakat yang tinggi dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat penanggulangan bencana;
7. Keberhasilan evakuasi bencana didukung adanya alat pelindung diri untuk Tim Reaksi Cepat yang melakukan asesment dan evakuasi korban;
8. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui program pemerintah daerah dan pusat;
9. Peningkatan kompetensi personil dan relawan baik melalui program internal pemerintah kota Tomohon maupun melalui kerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat dan pihak swasta;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, cc Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon dan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon mempunyai misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar
2. Pengurangagn risiko bencana
3. Melindungi masyarakat dari bencana

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja BPBD Kota Tomohon Tahun 2023, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang

menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra BPBD Kota Tomohon periode 2021-2026. Tabel 2.2 menggambarkan analisis pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sejak dibentuk pada tahun 2009 penanggulangan bencana di Kota Tomohon oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Walaupun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanganan bencana masih dengan keterbatasan sarana dan prasarana, institusi BPBD Kota Tomohon terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan kebencanaan. Berbagai peristiwa bencana yang terjadi seperti peristiwa kebakaran yang terjadi pada beberapa rumah penduduk maupun fasilitas publik berupa sarana peribadatan sejak tahun 2009 telah ditangani oleh pemerintah kota Tomohon dengan difasilitasi oleh BPBD kota Tomohon melalui program kesiapsiagaan dengan mengoptimalkan armada pemadam kebakaran beserta personil. Pada tahun 2009 juga, dalam rangka sinkronisasi pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Tomohon, maka telah diberikan bantuan berupa bangunan/hanggar untuk kendaraan/Unit pemadam kebakaran oleh pemerintah provinsi yang dibangun di kompleks terminal beriman kota Tomohon.

Seperti diketahui bahwa berdasarkan peta kemiringan lahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah, kota Tomohon terletak pada daerah berbukit dengan beberapa kawasan yang berada pada tingkat kemiringan yang berpotensi menimbulkan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor. Untuk itu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah kota Tomohon adalah membuat sistem infrastruktur berupa talud untuk penguatan tebing, pelebaran jalan, rasionalisasi tebing yang curam, pembuatan drainase dalam kota, serta pembuatan sarana irigasi dan normalisasi saluran sungai. Pada waktu terjadi bencana baik tanah longsor dan banjir, pemerintah kota Tomohon melalui BPBD melakukan inventarisasi kerusakan yang terjadi untuk kemudian difasilitasi dalam pemberian bantuan bagi korban serta koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan sesegera mungkin. Hal ini sesuai dengan amanat dalam UU nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Penanggulangan bencana alam akibat ancaman letusan gunung berapi, BPBD kota Tomohon secara berkala berkoordinasi dengan institusi vertikal yang ada di daerah seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melalui Pos Pengamatan Gunung Api Lokon dan Mahawu. Institusi vertikal ini merupakan mitra pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi secara berkala yaitu melaporkan aktivitas gunung berapi secara periodik. Berdasarkan kemitraan antara pemerintah kota dan instansi vertikal ini, maka pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang strategis guna mengantisipasi akibat yang akan terjadi.

2.3.1 Dampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, capaian program nasional dan *Hyogo Framework for Action (HFA)*

Hyogo Framework for Action (HFA) merupakan kesepakatan masyarakat global dalam mencapai tujuan pembangunan yang akan dicapai. Program penanganan penanggulangan bencana di kota Tomohon juga menunjang tujuan pembangunan dalam *Hyogo Framework for Action* (HFA), dimana pada tujuan pembangunan millennium tersebut sebagian besar bersesuaian dengan arah kebijakan penanganan bencana, seperti pengentasan kemiskinan dan kelaparan bencana, peningkatan pendidikan bagi masyarakat di daerah pasca bencana, pemberdayaan serta pengarusutamaan gender pada kawasan pasca bencana, peningkatan tingkat kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit pada kawasan rawan bencana, menjamin pembangunan yang berkelanjutan pada seluruh kawasan, menjamin kemitraan global dalam rangka antisipasi terhadap bencana.

Berdasarkan fakta kejadian bencana yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa paradigma penanganan bencana telah berubah dari pola penanganan pasca bencana ke pola kesiapan daerah dalam menghadapi bencana. *Lesson learned process* (proses pembelajaran) dari beberapa daerah bahkan negara yang mengalami bencana akhir-akhir ini yang diakibatkan oleh alam dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi kota Tomohon agar visi kedepan menjadikan kota Tomohon sebagai kota yang tanggap bencana dapat tercapai.

2.3.2 Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan SKPD

Beberapa tantangan serta peluang dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD BPBD adalah:

1. Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi yang efektif dan efisien;
2. Sosialisasi perubahan paradigma penanganan bencana dari penanganan pasca bencana kepada sikap kesiapsiagaan dan responsive, dalam bentuk penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM);
3. Pembuatan peta jalur evakuasi serta inventarisasi dan pembuatan data base bencana;
4. Pemberdayaan komunitas-komunitas lokal seperti Tagana, pembentukan TRC dan organisasi-organisasi lainnya, termasuk pelatihan-pelatihan, simulasi, dll;
5. Frekuensi bencana geologi yang terjadi pada beberapa Negara serta daerah-daerah di Indonesia semakin meningkat. Untuk potensi bencana gempa bumi (*earthquake*), Sulut termasuk dalam tingkat kerentanan relatif tinggi, mengingat dalam tahun 2015 ini telah terjadi beberapa kali kejadian gempa/gempa dirasakan. Hal ini menimbulkan kesadaran secara global pentingnya aspek respons dan tanggap terhadap bencana. Khusus untuk Indonesia, terletak pada tiga lempeng/kulit bumi yaitu lempeng Indo-Australia dibagian selatan, lempeng Euro-Asia di bagian Utara dan lempeng Pasifik dibagian Timur. Ketiga lempeng tersebut saling bergerak dan bertumbukan sehingga lempeng Indo-Australia menujam ke bawah lempeng Euro-Asia. Penujaman lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara dengan lempeng Euro-Asia yang bergerak ke selatan menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, belok ke

Utara ke Maluku dan Sulawesi Utara, sejajar dengan penujaman kedua lempeng (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dalam Renas BNPB). Hal ini menunjukkan data bahwa Indonesia termasuk di dalamnya Kota Tomohon berada pada sesar aktif yang berpotensi menimbulkan bencana geologi. Berdasarkan data di atas berbagai upaya dilaksanakan pemerintah untuk mengantisipasi jika terjadi bencana geologi. Hal ini dapat kategorikan sebagai ancaman bagi keberlangsungan kehidupan, sehingga dari ancaman tersebut dapat dijadikan sebagai peluang dalam rangka pengembangan pelayanan SKPD Penanggulangan Bencana. Beberapa aspek yang harus segera di tindak lanjuti oleh pemerintah Kota Tomohon adalah kesiapsiagaan serta respons terhadap potensi bencana geologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu melalui pengadaan sarana-prasarana kebencanaan, dan peningkatan kapasitas aparatur;

6. Perubahan iklim yang ekstrim juga dapat menimbulkan resiko bencana. Masyarakat semakin menyadari betapa rentannya kehidupan jika mengesampingkan berbagai aspek-aspek yang dapat menimbulkan bencana termasuk didalamnya perubahan iklim yang ekstrim. Komunitas masyarakat global telah mendeklarasikan 8 tujuan pembangunan secara global sebagaimana yang tercantum dalam *Hyogo Framework for Action* (HFA), dimana pada hakekatnya merupakan intisari dari pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan serta berketahanan bencana. Dari target pembangunan dalam *Hyogo Framework for Action* (HFA) tersebut terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan penanganan bencana antara lain; mengurangi kelaparan serta pengentasan kemiskinan, pendidikan dasar yang dikedepankan, mengurangi angka kematian bayi, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyakit, menjamin pembangunan yang berkelanjutan, serta mengembangkan kemitraan global. Dari berbagai aspek tersebut di atas, peluang penanganan kebencanaan merupakan isu global yang perlu dan penting untuk dikembangkan karena hal ini merupakan keharusan dari setiap daerah kabupaten/kota dalam sikap respons serta tanggap pada prabencana, tanggap darurat serta penanganan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Menyadari akan hal-hal tersebut di atas maka pentingnya perencanaan serta alokasi dana yang cukup signifikan dalam program penanganan kebencanaan demi untuk mengeliminasi dampak yang dapat ditimbulkan.
7. Pembangunan yang berwawasan lingkungan pada hakekatnya merupakan hal yang berhubungan erat dengan berbagai argumen diatas. Lingkungan berdasarkan kajian teoritis merupakan tempat manusia tinggal serta berinteraksi dan juga sangat bergantung terhadap lingkungan. Pemerintah sebagai aspek yang melindungi masyarakat berdasarkan amanat dalam UU Dasar 1945 mengatakan bahwa masyarakat adalah elemen yang harus dilindungi dari segala jenis ancaman. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development mainstreaming*) merupakan hal yang menjadi perhatian masyarakat global dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang mengesampingkan hal tersebut di atas dapat menimbulkan risiko bencana. Untuk itu perlunya suatu kajian lingkungan hidup strategis dalam setiap aspek pembangunan adalah hal yang

penting demi untuk mengimbangi laju pertumbuhan pembangunan yang semakin berbanding terbalik dengan daya dukung lingkungan. Diantaranya adalah deklarasi Kyoto Protocol dan bahkan dokumen tersebut telah diratifikasi yang substansinya adalah bagaimana peran serta Negara-negara industri untuk melakukan subsidi silang bagi Negara-negara yang mempunyai kawasan hutan yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Hal-hal diatas adalah gambaran betapa risiko bencana yang ditimbulkan oleh alam bahkan manusia dapat sewaktu-waktu terjadi sehingga perlunya sikap pro aktif terhadap bencana berupa respons serta tanggap terhadap segala jenis bencana.

8. Pendidikan kebencanaan melalui penerapan kurikulum mulai pada pendidikan dasar;

2.3.4 Formulasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Isu dalam manajemen serta penanggulangan bencana adalah kinerja yang belum optimal, baik pada instansi pemerintah, maupun pada institusi tingkat pemerintah daerah belum optimal. Penilaian secara umum pemerintah, masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan belum siap dalam menghadapi problematika bencana sehingga jika terjadi bencana mengakibatkan tingginya jumlah korban jiwa maupun kerugian material yang ditimbulkan. Keterpaduan dan koordinasi dalam menghadapi kondisi situasi tanggap darurat masih dalam ego sektoral.

Pada saat terjadi bencana upaya-upaya pemulihan pasca bencana masih belum maksimal. Pendataan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi serta media massa tidak terkoordinasi secara terpadu. Hal ini mengakibatkan proses penanganan pengungsi maupun proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terhambat secara keseluruhan. Isu lainnya adalah kelembagaan/institusi masih terarah pada penanganan pasca bencana. Paradigma yang diamanatkan dalam Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah dari penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pemulihan ke paradigma yang bersifat kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.

Faktor lainnya adalah besarnya peran pemerintah serta organisasi-organisasi non pemerintah (NGO's) yang memanfaatkan kejadian pascabencana, yang belum tentu memahami adat serta budaya lokal. Kondisi ini juga membutuhkan peran serta masyarakat lokal seperti Tagana (taruna tanggap bencana), TRC (tim reaksi cepat), dan berbagai elemen peduli bencana yang dibentuk pemerintah kota. Satuan-satuan penanggulangan bencana lokal ini perlu diberdayakan sehingga mudah dalam membina koordinasi serta kemitraan.

Isu lainnya adalah masih kurangnya kesadaran semua pihak termasuk pemerintah dalam penganggaran penggunaan teknologi terkini seperti fasilitas/perangkat *early warning system* dalam mengurangi resiko bencana. Kota Tomohon membutuhkan berbagai perangkat teknologi yang menunjang penyediaan data kebencanaan serta bersinergi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam tugas-tugas penanggulangan bencana.

Pengarusutamaan gender, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta kelompok masyarakat usia rentan perlu diberikan kesadaran akan dampak bencana serta potensi

bencana yang dapat timbul sewaktu-waktu. Umumnya kelompok ini pada saat terjadi peningkatan status bencana lebih memilih untuk tetap tidak mengungsi sehingga rentan terhadap bahaya yang ditimbulkan. Disamping itu, mengutamakan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus/disabilitas adalah hal yang utama dalam kegiatan Penanggulangan Bencana. Tahun 2012 dan 2013 lalu, BPBD kota Tomohon memfasilitasi sosialisasi dan simulasi terhadap Sekolah Luar Biasa yang ada di Kota Tomohon untuk kesiagaan terhadap bencana.

Tabel 2.3.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 oleh Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Total Belanja				4.734.695.000					4.734.695.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.641.042.100					4.641.042.100	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah Kegiatan	100%	11.815.800	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah Kegiatan	100%	11.815.800	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	5.319.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	5.319.200	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD	Jumlah dokumen Lkip	1 laporan	4.384.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD	Jumlah dokumen Lkip	1 laporan	4.384.200	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah dokumen evaluasi	1 laporan	2.076.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah dokumen evaluasi	1 laporan	2.076.400	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah Kegiatan		3.379.865.891	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah Kegiatan		3.379.865.891	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan	BPBD	Jumlah ASN	32 orang/bulan	3.329.865.991	Penyediaan gaji dan tunjangan	BPBD	Jumlah ASN	32 orang/bulan	3.329.865.991	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPBD	Jumlah Tenaga Administrasi	150 dokumen	33.240.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPBD	Jumlah Tenaga Administrasi	150 dokumen	33.240.000	

3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPB D	Jumlah verifikator	1 dokumen	10.560.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD	Jumlah verifikator	1 dokumen	10.560.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPB D	Jumlah laporan	1 laporan	4.043.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD	Jumlah laporan	1 laporan	4.043.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BPB D	Jumlah laporan	1 laporan	2.156.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BPBD	Jumlah laporan	1 laporan	2.156.600	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPB D	Jumlah Kegiatan	10 item	58.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah Kegiatan	10 item	58.000.000	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPB D	Jumlah tenaga penatausahaan barang	6 orang	58.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah tenaga penatausahaan barang	6 orang	58.000.000	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPB D	Jumlah Kegiatan	100%	201.060.750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah Kegiatan	100%	201.060.750	
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPB D	Jumlah ATK	1 paket	29.268.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD	Jumlah ATK	1 paket	29.268.250	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPB D	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	35.000 lbr	26.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	35.000 lbr	26.500.000	
3	Penyediaan Bahan Material	BPB D	Jumlah bahan material	1 paket	4.357.000	Penyediaan Bahan Material	BPBD	Jumlah bahan material	1 paket	4.357.000	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPB D	Jumlah Komponen instalasi listrik	1 paket	7.022.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	Jumlah Komponen instalasi listrik	1 paket	7.022.500	
5	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundangan	BPB D	Jumlah Bahan Bacaan	1800 dokumen	10.260.000	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundangan	BPBD	Jumlah Bahan Bacaan	1800 dokumen	10.260.000	

6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPB D	Jumlah Makan Minum	200 paket	8.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD	Jumlah Makan Minum	200 paket	8.000.000	
7	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPB D	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	115.653.000	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	115.653.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPB D	Jumlah Kegiatan		25.303.750	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Jumlah Kegiatan		25.303.750	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPB D	Jumlah unit peralatan dan mesin	7 unit	25.303.750	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah unit peralatan dan mesin	7 unit	25.303.750	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPB D			696.492.509	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD			696.492.509	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPB D	Jumlah Materai dan Tenaga Kontrak	1000 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	Jumlah Materai dan Tenaga Kontrak	1000 laporan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPB D	Jumlah rekening	24 rekening	23.124.176	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	Jumlah rekening	24 rekening	23.124.176	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPB D	Tersedianya, peralatan, bahan dan tenaga kebersihan	312 laporan 26 orang	663.386.333	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD	Tersedianya, peralatan, bahan dan tenaga kebersihan	312 laporan 26 orang	663.386.333	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				267.703.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kegiatan		267.703.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPB D	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	104.637.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	104.637.600	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPB D	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	16 unit	106.630.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	16 unit	106.630.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	BPB D	Jumlah Alat Berat	1 unit	48.605.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	BPBD	Jumlah Alat Berat	1 unit	48.605.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	BPB D	Terpeliharanya Peralatan Komputer dan Non Komputer	11 unit	7.830.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	BPBD	Terpeliharanya Peralatan Komputer dan Non Komputer	11 unit	7.830.000	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		PRESENTASE PELAYANAN PRA BENCANA,TANGGA P DARURAT DAN REHABILITASI PASCA BENCANA	100%	93.652.900	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		PRESENTASE PELAYANAN PRA BENCANA,TANGGAP DARURAT DAN REHABILITASI PASCA BENCANA	100%	93.652.900	
	Pelayanan Informasi rawan Bencana Kabupaten/Kota		Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	9.700.000	Pelayanan Informasi rawan Bencana Kabupaten/Kota		Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	9.700.000	
	Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPB D	Jumlah masyarakat yang paham tentang penanggulangan bencana	100 orang	9.700.000	Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah masyarakat yang paham tentang penanggulangan bencana	100 orang	9.700.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		42.527.100	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		42.527.100	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	BPB D	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi	50 orang	14.800.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi	50 orang	14.800.000	

	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	BPB D	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis manajerialnya	50 orang	6.800.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis manajerialnya	50 orang	6.800.000	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPB D	Jumlah peralatan	1200 orang	20.927.100	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Jumlah peralatan	1200 orang	20.927.100	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	25.561.900	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	25.561.900	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	BPB D	Jumlah korban yang berhasil ditangani per jenis bencana	100 orang	11.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah korban yang berhasil ditangani per jenis bencana	100 orang	11.000.000	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPB D	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi system komando penanganan darurat	1 kegiatan	14.561.900	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPBD	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi system komando penanganan darurat	1 kegiatan	14.561.900	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				15.863.900	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				15.863.900	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	BPB D	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana	1 dokumen	15.863.900	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana	1 dokumen	15.863.900	

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Kota Tomohon. Lampiran Tabel 2.3.(T-C.31)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan bencana dapat diakomodasi pada perencanaan program dan kegiatan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon tahun 2022, namun untuk tahun anggaran 2023 ini tidak ada usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia berdasarkan amanat dalam Undang-undang Dasar 1945, dimana tercantum dalam pendahuluan yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya dikatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah meliputi: pengurangan resiko bencana serta pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi terkena bencana secara adil dengan standar pelayanan minimum, pemulihan kondisi dari dampak bencana, alokasi pendanaan bencana yang memadai, alokasi dana penanggulangan bencana siap pakai, pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Strategi nasional untuk penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kerangka regulasi penanggulangan bencana, melalui penyusunan peraturan serta prosedur dan rencana penanggulangan secara nasional maupun daerah;
2. Pemaduan program pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan, program-program kebencanaan dipaduserasikan ke dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang, RPJM, Renstra RKPD, Renja SKPD sehingga terjadi integrasi penanganan bencana dengan program-program pembangunan;
3. Pemberdayaan perguruan tinggi, pengembangan kapasitas penanggulangan bencana melibatkan kajian-kajian akademis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan kearifan lokal (*local knowledge*) serta karakteristik masing-masing daerah.
4. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat, secara nasional mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau maka pemberdayaan masyarakat diperlukan peran serta dalam penanganan bencana;
5. Pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB);
6. Program pengurangan resiko untuk kelompok dengan kebutuhan khusus; lebih diutamakan pada pengurangan risiko bagi kaum perempuan dan anak-anak;
7. Peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah;
8. Peningkatan peran dunia usaha;
9. Tingkat kerentanan yang tinggi pada wilayah Republik Indonesia mengharuskan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah untuk senantiasa bersahabat dengan alam, hidup selaras dengan resiko bencana (*living harmony with risk*) dengan

mengedepankan keutuhan, ketangguhan. Untuk mencapai harapan tersebut dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dari aparaturnya pemerintah.

3.2 Tujuan, Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat.

3.2.2 Sasaran

Sasaran penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Terwujudnya penanggulangan bencana pada tahapan siaga bencana, tanggap darurat, pasca bencana dan penanggulangan bencana serta Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada bab sebelumnya Program kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon pada Rencana Kerja 2021 ditetapkan dengan mempertimbangkan dengan kebijakan Nasional dan isu-isu di wilayah kota Tomohon sebagai berikut

1. Terjadinya peningkatan status Gunung Lokon menjadi Normal pada Januari hingga level Awak pada Juli 2011, tindakan oleh pemerintah kota yaitu melaksanakan komando darurat bencana, dengan mengungsikan penduduk yang menghuni kawasan rawan bencana radius 2,5 Km termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan kebutuhan lainnya dan pemulihan ketika situasi kondusif.
2. Melaksanakan komando Siaga Darurat Bencana erupsi Gunung Lokon pada Agustus-September 2012 dengan rangkuman kegiatan berupa pelaksanaan apel kesiagaan dan simulasi pengungsian;
3. Terjadinya cuaca ekstrim pada bulan Januari 2014 yang mengakibatkan rusaknya beberapa titik pada beberapa ruas jalan yang cukup mengganggu arus transportasi di Kota Tomohon, dengan penanganan segera pada lokasi bersama dengan institusi terkait.
4. Terjadinya cuaca ekstrim yang mengakibatkan banjir, tanah longsor dan rusaknya beberapa lokasi pada jalan. Disamping itu juga merenggut korban sebanyak 7 jiwa akibat bencana dimaksud. Penanganan dilaksanakan secara terpadu oleh BPBD dan instansi terkait lainnya;
5. Terjadinya cuaca ekstrim kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan kebakaran hutan/lahan. Penanganan dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan PD/institusi terkait lainnya.
6. Terjadinya penyebaran secara meluas yakni pandemic covid-19 sehingga dibentuk gugus tugas Percepatan penanganan covid-19 di kota Tomohon
7. Visi Misi Walikota/Wakil Walikota Tomohon Tahun 2021 - 2024
8. Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Perubahan Daerah Tahun 2022

Sedangkan Program yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah KotaTomohon ada 2 Program 10 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan Yaitu:

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2.4. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik daerah
 - 3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyediaan barang Logistik Kantor
 - 4.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.3. Penyediaan Bahan bacaan dan Perundang-Undangan
 - 4.4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- II. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 1.1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1.2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - 1.3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 1.4 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 2.1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
 - 2.2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dan a		Target Capaian Kinerja		Kebut uhan Dana/ Pagu Indika tif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target		
										Sebelu m	Sesuda h	Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesud ah	Se belum	S esuda h			Tolak Ukur	Ta rget	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										4.159. 789.17 2	4.512. 125.5 97				5.331. 583.1 97		
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3.987. 614.17 2	4.408. 450.5 97				4.273. 333.1 97		
1	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										14.137 .800	14.13 7.800				23.05 5.000		
1	0	0	2 . 0 0 1	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			2 dokume n	2 dokume n	3 kegiat an	3 kegiat an	5.067.8 00	5.067. 800				14.000 .000	

1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LAKIP	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penga dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			1 dokumen	1 dokumen	3 kegiatan	3 kegiatan	3.672.500	3.672.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3.675.000
1	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen evaluasi renstra dan renja	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penga dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			2 dokumen	2 dokumen	3 kegiatan	3 kegiatan	5.397.500	5.397.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5.380.000
1	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3.166.075.880	3.267.067.833					3.339.628.197
1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun	5 kegiatan	5 kegiatan	3.118.397.280	3.219.389.233	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3.218.069.901

1	05	01	2002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		jumlah tenaga administrasi keuangan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 orang	5 orang	5 kegiatan	5 kegiatan	33.240.000	33.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105.178.296
1	05	01	20032		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah tenaga verifikator keuangan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			1 orang	1 orang	5 kegiatan	5 kegiatan	10.560.000	10.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11.880.000
1	05	01	20052		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen	5 kegiatan	5 kegiatan	2.845.000	2.845.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3.000.000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan			

					Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progr am	Kegiatan		Kegiatan n	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Dan a		Tolok Ukur	Target	Dana/ Pagu Indika tif (Rp.)
										Sebelu m	Sesuda h	Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah					
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semester an SKPD		jumlah laporan keuangan semester an yang disusun	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			2 dokumen	2 dokumen	5 kegiatan	5 kegiatan	1.033.600	1.033.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.500.000
1	0	0	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											58.800.000	38.910.000				76.100.000	
1	0	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah tenaga administrasi barang milik daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			6 orang	6 orang	1 kegiatan	1 kegiatan	58.800.000	38.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				76.100.000
1	0	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				25.750.000	

1	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			40 orang	40 orang	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	Pendapatan Bagi Hasil			25.750.000				
1	0	0	2	5	1	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah								210.103.600	178.645.500					305.050.000			
1	0	0	2	5	1	0	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah ATK	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			52 item	52 item	5 kegiatan	5 kegiatan	25.058.800	26.078.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				29.500.000
1	0	0	2	5	1	0	6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			3500 lembar	3500 lembar	5 kegiatan	5 kegiatan	26.670.000	28.236.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26.700.000

1	05	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang diadakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1800 eksempl	ar1800 eksempl	ar5 kegiatan	5 kegiatan	10.795.800	3.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10.850.000
1	05	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman tamu	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 paket	100 paket	5 kegiatan	5 kegiatan	7.500.000	5.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8.000.000
1	05	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rakor dan konsultasi Luar daerah dan dalam provinsi SULUT	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20 orang	20 orang	5 kegiatan	5 kegiatan	140.079.000	115.091.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				230.000.000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target						

					Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Indikator (Rp.)
1	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										21.451.700	0					43.500.000	
1	0	0	2		Pengadaan Mebel		jumlah kursi kerja	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 buah	12 buah	2 kegiatan	2 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27.500.000
1	0	0	2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah printer	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 unit	5 unit	2 kegiatan	2 kegiatan	21.451.700	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16.000.000
1	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										332.662.844	692.803.516					180.500.000	
1	0	0	2		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah materai jumlah tenaga kontrak	Cakupan Pelayanan Penyediaan jasa	Kota Tomohon, Tomohon			1000 buah 3 Orang/bulan	1000 buah 3 Orang/bulan	3 kegiatan	3 kegiatan	10.000.000	12.000.000	Dana Transfer Umum-				99.000.000

							Penunjan g Urusan Pemerint ahan	Selatan, Lansot										Dana Alok asi Umu m				
1	0 5	0 1	2 . 0 8	0 2	Penyediaa n Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening listrik dan internet	Cakupan Pelayana n Penyedia an jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan				24 rekening	24 rekening	3 kegiat an	3 kegiat an	19.929. 212	19.929 .212	Dana Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m				24.000 .000
1	0 5	0 1	2 . 0 8	0 4	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah/b ahan alat kebersiha n serta bahan material	Cakupan Pelayana n Penyedia an jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan	Kota Tomoho n, Tomoho n Selatan, Lansot			1 tahun	1 tahun	3 kegiat an	3 kegiat an	302.73 3.632	660.87 4.304	Dana Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m				57.500 .000
1	0 5	0 1	2 . 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											184.38 2.348	216.8 85.94 8				279.7 50.00 0	

1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpenuhi nya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			16 unit	16 unit	3 kegiatan	3 kegiatan	179.392.348	209.705.948	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				195.000.000
1	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 unit	15 unit	3 kegiatan	3 kegiatan	4.990.000	7.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9.750.000
1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah sarana gedung kantor yang direhabilitasi	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			1 unit	1 unit	3 kegiatan	3 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75.000.000
1	0	0			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											172.175.000	103.675.000					1.058.250.000

1	0	0	2		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota										0	0					110.000.000	
1	5	3	0	1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan sarana prasarana yang lengkap	Jumlah sarana informasi bencana	Cakupan pelayanan informasi rawan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 kegiatan	1 kegiatan	100 persen	100 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan sarana prasarana yang lengkap	100 persen	110.000.000
1	0	0	2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										41.050.000	41.050.000					553.250.000	
1	5	3	0	2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota		Jumlah koordinasi Penanganan bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 keg	1 keg	5 kegiatan	5 kegiatan	0	0	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan				8.500.000

								Bencana	an								Perk otaa n					
1	0	0	2	0	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten /Kota		Jumlah masyarakat/kelurahan tangguh bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			150 orang	150 orang	5 kegiatan	5 kegiatan	0	0	Pendapatan Bagi Hasil				260.000.000
1	0	0	2	0	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten /Kota		Jumlah sarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	41.050.000	41.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				54.750.000
1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jumlah sarana evakuasi penduduk	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			2 unit	2 unit	5 kegiatan	5 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45.000.000

1	05	03	2028		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah personil yang terlatih	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50 orang	50 orang	5 kegiatan	5 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				185.000.000
1	05	03	2023		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										131.125.000	62.625.000					395.000.000
1	05	03	2023		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	Tersedianya logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300.000.000
1	05	03	2023		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	terlaksananya kegiatan penanganan Covid	Cakupan Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	131.125.000	62.625.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				95.000.000
TOTAL															4.159.789.17	4.512.125.5					5.331.583.1

	2	97	97
--	---	----	----

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan dan Pendanaan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 disesuaikan dengan kebutuhan dan pagu indikatif. Pagu indikatif TA 2023 sebesar Rp. 4.734.695.000,-. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.512.125.597	
	5						
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.408.450.597	
	5	1					
1	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.137.800	
	5	1	1				
1	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.067.800	
	5	1	1	1			
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.672.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	5	1	1	6			
1	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.397.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	5	1	1	7			
1	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.267.067.833	
	5	1	2				
1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.219.389.233	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	1	2	1			
1	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	1	2	2			
1	0	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	1	2	3			
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.845.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	1	2	5			
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	1.033.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

	5	1	2	7	/Semesteran SKPD		
1	0	0	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.910.000	
	5	1	3				
1	0	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	1	3	6			
1	0	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	
	5	1	5				
1	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	Pendapatan Bagi Hasil
	5	1	5	2			
1	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.645.500	
	5	1	6				
1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.078.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	6	4			
1	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.236.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	6	5			
1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	6	6			
1	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	6	8			
1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.091.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	5	1	6	9			
1	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	
	5	1	7				
1	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	7	5			
1	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	7	6			
1	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	692.803.516	
	5	1	8				
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	1	8	1			
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.929.212	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	1	8	2			
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	660.874.304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	1	8	4			
1	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.885.948	
	5	1	9				

1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209.705.948	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	1	9	2			
1	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	9	6			
1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	9	9			
1	0	0			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	103.675.000	
	5	3					
1	0	0	2		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	
	5	3	1				
1	0	0	2	0	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	3	1	2			
1	0	0	2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	41.050.000	
	5	3	2				
1	0	0	2	0	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
	5	3	2	1			
1	0	0	2	0	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	0	Pendapatan Bagi Hasil
	5	3	2	2			
1	0	0	2	0	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	41.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	3	2	3			
1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	3	2	4			
1	0	0	2	0	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	3	2	8			
1	0	0	2		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	62.625.000	
	5	3	3				
1	0	0	2	0	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	3	3	4			
1	0	0	2	0	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	62.625.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	3	3	6			
TOTAL						4.512.125.597	

PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

Program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan fungsi BPBD Kota Tomohon sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di Kota Tomohon berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada. Secara objektif masih terdapat berbagai kelemahan-kelemahan kinerja BPBD Kota Tomohon terutama menyangkut masalah penganggaran, kendaraan operasional, serta jumlah personil. Hal ini membawa implikasi terhadap kinerja pelayanan kurang maksimal kepada masyarakat.

- 5.2. Kaidah kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan komitmen bersama BPBD Kota Tomohon dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil sesuai Visi, Misi, Kebijakan, tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan.

- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh *stakeholders* secara harmoni di semua tingkatan. Peran pemerintah Daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan. Demikian Rencana Kerja BPBD Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan

perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 didasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Tomohon tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah bertujuan :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tahun 2023.
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas/Badan.....Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas/Badan.....Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon, proses penyusunan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Kota Tomohon, keterkaitan antara Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenanga Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon Tahun Lalu dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas/Badan.....Kota Tomohon

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Renja Sat Pol PP Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satpol PP

Pelaksanaan Penyusunan Renja Satpol PP Kota Tomohon tahun 2023 dilakukan mengikuti sistem perencanaan pembangunan nasional. Landasan hukum yang digunakan dalam pengelolaan ini adalah Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam Tahun 2023 dan realisasinya. Program-program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2023 sebanyak 3 program dengan 11 kegiatan dan 1 Kegiatan

A. Realisasi Program yang memenuhi target kinerja pada tahun 2021 :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100%
- Program Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dengan target kinerja 100%
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan target kinerja 100%

B. Realisasi Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja :

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Tomohon																																					
NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA TOMOHON																																					
Kode				Urusan/ Bidang/ urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)				Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan												
																				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
1				2				3				4				5				6			7		8=7/6		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																	
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																																	
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah																																
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang pelayanan Perangkat Daerah																																
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60				Dokumen		6		Dokumen		2		Dokumen		-		Dokumen		0%		2		dokumen		8		13%	
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				120				Program/kegiatan		70		Program Kegiatan		1		Dokumen		-		Program/ Kegiatan		0%		1		dokumen		71		59%	
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				60				Dokumen		3		Dokumen		1		Dokumen		-		Dokumen		0%		1		dokumen		4		7%	
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				60				Dokumen		3		Dokumen		1		Dokumen		-		Dokumen		0%		1		dokumen		4		7%	
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				60				Dokumen		3		Dokumen		1		Dokumen		-		Dokumen		0%		1		dokumen		4		7%	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				72				Dokumen		9		laporan		3		Laporan		-		Dokumen		0%		3		laporan		12		17%	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah dan Laporan SPM				60				Dokumen		3		laporan		1		Laporan		-		Dokumen		0%		1		laporan		4		7%	

1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah													
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6	Tahun	3	Tahun	1	Tahun	12	Bulan	1200%	1	tahun	16	267%
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102	Orang	51	orang	1	Dokumen	17	Orang	1700%	1	dokumen	69	68%
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	72	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen	0%	1	dokumen	4	6%
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	72	Dokumen	25	Dokumen	1	Laporan	-	Dokumen	0%	1	laporan	26	36%
1	05	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	72	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen	0%	1	dokumen	4	6%
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	72	72 Dokumen	25	Dokumen	1	Laporan	-	Dokumen	0%	1	laporan	26	36%
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah													
1	05	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1615	Paket	240	Paket	-	Paket	-	Paket	-	310	paket	550	34%
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120	Orang	5	Orang	5	Orang	-	Orang	0%	5	Orang	10	8%
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6	Kegiatan		4	Kegiatan	1	Kegiatan	25%	1	Kegiatan			
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	12	Peserta		12	Peserta	-	Peserta	0%	2	Peserta			
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah													
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	30	Unit	10	unit	5	Paket	5	unit	100%	5	Unit	20	67%
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	210	Paket	122	Paket	52	Paket	30	Paket	58%	35	Paket	187	89%
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6000	Item	3000	item	3	Paket	750	Paket	25000%	3	Paket	3.753	63%
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Yang disediakan	6000	item	3000	Item	1.000	Dokumen	950	Eksempler	95%	1000	Dokumen	4.950	83%
1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	6	laporan	2	Laporan	850	Paket	42500%	2	Laporan	858	7150%
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	laporan	60	laporan	20	Laporan	-	Orang	0%	20	Laporan	80	67%
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan Yang Disediakan	48	unit	24	Unit	8	Unit	-	unit	0%	8	Unit	32	67%
					Pengadaan mebel	Jumlah Kursi Kerja Pejabat	28	Paket			2	Paket	2	Paket	100%	8	paket		
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Yang Disediakan	4	unit	1	Unit	1	Unit	-	Paket	0%	1	Unit	2	50%
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	78	Paket			13	Paket	13	Paket	100%	13	paket		
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Pelanyanan Perangkat Daerah													
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	3000	Buah			500	Buah	490	Buah	98%	500	Buah		
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	288	rekening	100	Rekening	4	Laporan	40	Rekening	1000%	4	Laporan	144	50%
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor		156	Unit			26	Unit	15	unit	58%	26	Unit		

1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umun Kantor yang disediakan	12	orang	7	Orang	3	Laporan	2	Orang	67%	3	Laporan	12	100%	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah														
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	192	unit	97	Unit	32	Unit	32	Unit	100%	32	Unit	161	83,85%	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	12	Paket	4	Paket	-	-	-	Paket	100%	-	-	4	33,33%	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Petugas Perlindungan masyarakat														
						Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, Keindahan)														
						Presentase Penegakan Perda														
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Petugas Perlindungan masyarakat														
						Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, Keindahan)														
						Cakupan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum yang di cegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12	kasus	6	kasus	2	Kasus	841	Orang	42050%	2	Kasus	849	7075,00%	
					Penindakan Atas Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Ujuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Ujuk Rasa dan Kerusuhan Masa Yang Dilakukan Penindakan	6	Kegiatan			1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1	Kegiatan			
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	6	kegiatan	3	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	758	Orang	762	12700,00%	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	6	kegiatan	750	orang	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	250	Orang	1.001	16683,33%	
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban umum yang Tersedia	12	tim	3	dokumen	1	Dokumen	2	Tim	200%	1	Dokumen	6	50,00%	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase Penegakan Perda														
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	1	laporan	1	Laporan	1	Laporan	-	Laporan	0%	1	Laporan	2	200,00%	

[illegible]

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :
 - a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ walikota
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan kegiatan :
 - a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.
 - b. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Daerah Kota Tomohon

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase penegakan perda			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time rate) Daerah Layanan Wilayah Managemen Keakaran (WMK)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sat Pol PP

Kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol PP Kota Tomohon adalah :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional rutin;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional penunjang pelaksanaan kegiatan kantrantibmas;
3. Terbatasnya sarana operasional penunjang pelaksanaan kegiatan Damkar;
4. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Pada Prinsipnya Rencana Kerja yang dibuat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk program antara lain :

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.1 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada

[illegible]

masyarakat, satpol-pp daerah Kota Tomohon memiliki tantangan dan peluang baik internal maupun eksternal. Peluang dan tantangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Internal

- Lemahnya tingkat kedisiplinan anggota/personil dalam menerapkan nilai-nilai positif budaya organisasi secara efektif dalam lingkup satuan polisi pamong praja daerah kota tomohon.
- Belum memadainya kompetensi aparatur penyuluh Kantrantibmas pada lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon
- Belum optimalnya kegiatan penegakan perda dan perwako pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon.
- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional.
- Terbatasnya anggaran operasional untuk kegiatan patroli pengawalan dan pengamanan serta penegakan perda dan perwako.

2. Eksternal

- Kurangnya peran serta masyarakat dalam pencegahan terhadap gangguan kantrantibmas
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perda dan perwako.
- Kurang pengawasan terhadap pendatang baru dan tamu yang tak dikenal.
- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya Kantrantibmas.
- Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam penegakan perda dan perwako.

2.3.2 Rekomendasi

Formulasi atas isu-isu penting perlu dibuatkan rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan sebagai strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan. Dalam pelaksanaan asistensi pemenuhan sarana dan prasarana Satpol-pp di daerah, atas Permendagri No 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, adapun

rekomendasi adalah Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan lainnya 1 Unit dan Pengadaan Kendaraan Dinas 8 Unit.

2.3.3.Strategi

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan program di bidang pencegahan gangguan Kantrantibmas.
- Menempatkan pejabat dan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kompetensi.
- Menempatkan pejabat struktural disetiap seksi yang belum memiliki pejabat definitif dan penambahan staf pelaksana sesuai kebutuhan (terutama di bidang administrasi & keuangan).
- Memanfaatkan perkembangan teknologi Informasi.
- Memanfaatkan motivasi yang ada untuk mendorong aparatur agar lebih banyak memahami peraturan-peraturan Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peningkatan kinerja aparatur ditunjang dengan penerapan system informasi yang berbasis IT.
- Peningkatan kinerja aparatur guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

2.3.4. Kebijakan

Semangat otonomi daerah yang menjadikan dasar Satpol-pp dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota maka satpol-pp dalam mengeluarkan kebijakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat mencerminkan semangat otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi dalam perumusan kebijakan dan implementasinya.

Kebijakan merupakan arahan/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan dalam hal mengelola pelaksanaan program-program pembangunan dan upaya mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengatur dan memfasilitasi pelayanan kepada publik, maka kebijakan Satpol-pp diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran serta non kebakaran;
3. Menyediakan fasilitas disiplin apartur satpol-pp;
4. Memberikan kesempatan yang adil kepada setiap personil untuk mengikuti diklat dan pendidikan;
5. Menyusun dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6. Memfasilitasi upaya pencegahan dan penindakan atas gangguan ketentraman ketertiban umum melalui mediasi dengan nuansa hak asasi manusia (Satpol-pp yang Humanise);
7. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Satpol-pp Kota Tomohon dan juga oleh PPNS serta oleh fungsional penegakan peraturan hukum terkait lainnya;
8. Mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
9. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan swadaya dan prakarsa masyarakat dalam memelihara ketentraman dan keamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat;
10. Mendorong dan memfasilitasi kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran bagi masyarakat melalui kegiatan edukasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran dan non kebakaran;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kota Tomohon tahun 2023 beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2024, program indikatif di tahun 2023 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kota Tomohon tahun 2021-2026, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026, telaah prioritas RPJMN 2020-2025, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Tomohon tahun 2021-2026 maka fungsi RKPD Tahun 2023 adalah sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun disusun menggunakan 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu:

1. Pendekatan Teknokratik (metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah)

2. Pendekatan Politik (pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik)
3. Pendekatan Partisipatif (perencanaan dengan melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stakeholder) yang difokuskan pada masyarakat luas)
4. Pendekatan Bottom-up (pendekatan perencanaan yang dimulai dari tingkat hirarkis paling rendah menuju keatas)
5. Pendekatan Top-down (Proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga/departemen/daerah dalam menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 DAERAH KOTA TOMOHON											
NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA TOMOHON											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TOMOHON	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	5.856.964.080	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TOMOHON	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	5.856.964.080	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TOMOHON	Cakupan Penunjang pelayanan Perangkat Daerah	100%	16.821.950	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TOMOHON	Cakupan Penunjang pelayanan Perangkat Daerah	100%	16.821.950	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TOMOHON	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.679.050	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TOMOHON	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.679.050	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TOMOHON	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.073.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TOMOHON	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.073.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.014.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.014.600	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	TOMOHON	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.014.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	TOMOHON	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.014.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.014.600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.014.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TOMOHON	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	1.538.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TOMOHON	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	1.538.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TOMOHON	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah dan Laporan SPM	1 laporan	1.487.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TOMOHON	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah dan Laporan SPM	1 laporan	1.487.300	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TOMOHON	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	4.944.644.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TOMOHON	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	4.944.644.400	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TOMOHON	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/Bulan	4.730.149.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TOMOHON	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/Bulan	4.730.149.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	TOMOHON	Jumlah Pengelola Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	202.046.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	TOMOHON	Jumlah Pengelola Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	202.046.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	TOMOHON	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.433.600	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	TOMOHON	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.433.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TOMOHON	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.557.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TOMOHON	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.557.300	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	TOMOHON	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.466.800	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	TOMOHON	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.466.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	TOMOHON	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 laporan	991.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	TOMOHON	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 laporan	991.700	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TOMOHON	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	340.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TOMOHON	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	340.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	TOMOHON	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	340.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	TOMOHON	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	340.000	

	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	TOMOHO	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100% 758 Orang	235.276.430 42.116.300	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	TOMOHO	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100% 758 Orang	235.276.430 42.116.300		
	Penyediaan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	TOMOHO	Jumlah Paket Komponen Instalasi	5 Paket	5.916.800	Penyediaan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	TOMOHO	Jumlah Paket Komponen Instalasi	5 Paket	5.916.800		
	Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	TOMOHO	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	250 Orang	78.114.800	Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	TOMOHO	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	250 Orang	78.114.800		
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan	TOMOHO	Tersedianya SOP Dalam Penegakan Perda	1 Dokumen	176.495.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan	TOMOHO	Tersedianya SOP Dalam Penegakan Perda	1 Dokumen	176.495.000		
	dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	TOMOHO	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	25.000.000	dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	TOMOHO	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	25.000.000		
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TOMOHO	Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%	43.070.800	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TOMOHO	Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%	43.070.800		
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	TOMOHO	Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	2 laporan 1 laporan	58.039.750 1.700.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	TOMOHO	Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	2 laporan 1 laporan	58.039.750 1.700.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	TOMOHO	Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	20 Laporan 1 laporan	80.470.000 41.370.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	TOMOHO	Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	20 Laporan 1 laporan	80.470.000 41.370.800		
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	TOMOHO	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	40.446.600	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	TOMOHO	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	40.446.600		
			Tingkat Waktu Tanggap (ResposeTime Rate) daerah layanan wilayah managemen Kebakaran (WMK)	100%				Tingkat Waktu Tanggap (ResposeTime Rate) daerah layanan wilayah managemen Kebakaran (WMK)	100%			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	TOMOHO	Jumlah Dan Jenis layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Oleh dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kabupaten/Kota	100%	19.560.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	TOMOHO	Jumlah Dan Jenis layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Oleh dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kabupaten/Kota	100%	19.560.000		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	TOMOHO	Jumlah Dan Jenis layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Oleh dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kabupaten/Kota	3 laporan 60 Orang	105.771.500 19.560.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	TOMOHO	Jumlah Dan Jenis layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Oleh dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kabupaten/Kota	3 laporan 60 Orang	105.771.500 19.560.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	TOMOHO		100%	501.592.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	TOMOHO		100%	501.592.300		
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	TOMOHO	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	100%	20.886.600	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	TOMOHO	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	100%	20.886.600		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	TOMOHO	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	10 Unit 100%	20.886.600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	TOMOHO	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	10 Unit 100%	20.886.600		
	DAN KETERTIBAN UMUM	TOMOHO	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, kemitraan)	100%	15.874.938.320	DAN KETERTIBAN UMUM	TOMOHO	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, kemitraan)	100%	15.874.938.320		
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	TOMOHO	Cakupan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	15.831.867.520	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	TOMOHO	Cakupan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	15.831.867.520		
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	TOMOHO	Jumlah Pelanggaran Dan Pengaduan Trantibum Dalam Kabupaten/Kota Yang Di Tangani	2 Kasus	15.535.141.420	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	TOMOHO	Jumlah Pelanggaran Dan Pengaduan Trantibum Dalam Kabupaten/Kota Yang Di Tangani	2 Kasus	15.535.141.420		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam renstra Direktorat Jendral Pemerintahan Umum (Dirjen PUM) pada Kementerian Dalam Negeri ada satu target terkait Satuan Polisi Pamong Praja yang memerlukan dukungan provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan yang ditarget pada tahun 2014 sejumlah 33 provinsi, pada kenyataannya masih banyak provinsi yang kapasitas kelembagaannya Satpol PP belum sesuai perundangan yang berlaku termasuk juga kabupaten/kota masih banyak kelembagaannya Satpol PP belum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.1

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Satpol PP Kota Tomohon	Sasaran pada Renstra Satpol PP Prov. Sulut
(1)	(2)	(3)	(4)
Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	Meningkatkan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
2	Persentase Penegakan Perda	100%	
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	100%	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP

1. Tujuan

- Terwujudnya Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kota Tahun 2023;
- Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- Terwujudnya konsistensi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan yang dicapai.
- Tercapainya pemanfaatan sumber daya manusia secara efisien, efektif yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Sasaran

- Meningkatnya kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat menangani resiko korban bencana
- Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

3.3 Program dan Kegiatan

a. Berdasarkan Visi Kota Tomohon :

“Tomohon Maju Berdaya Saing dan Sejahtera.”

Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan “Mewujudkan rasa aman dan tentram di masyarakat.”

Sedangkan Misi Satpol PP terdapat dalam Misi ke-1,2 dan 5 Kota Tomohon

“Menjaga dan Melestarikan Tomohon Sebagai Kota Religius.”

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Berbagai Sektor”

“Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan yang Bersih, efektif dan Berintegritas”

Satuan Polisi Pamong Praja membidangi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

b. Pencapaian SMP

c. Rekapitulasi program dan kegiatan :

Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dan penegakkan Perda. Maka program dan Kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21.772.349.000				29.474.547.780
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				21.772.349.000				29.474.547.780
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	100%	5.856.964.080			100%	11.727.067.400
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang pelayanan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	100%	16.821.950			100%	10.450.000
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	2 Dokumen	9.679.050	Pendapatan Asli Daerah(PAD)		2 Dokumen	2.750.000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	1 Dokumen	1.073.300	Pendapatan Asli Daerah(PAD)		1 Dokumen	1.100.000
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	1 Dokumen	1.014.600	Pendapatan Asli Daerah(PAD)		1 Dokumen	1.100.000
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	1 Dokumen	1.014.600	Pendapatan Asli Daerah(PAD)		1 Dokumen	1.100.000
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	1 Dokumen	1.014.600	Pendapatan Asli Daerah(PAD)		1 Dokumen	1.100.000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA TOMOHON	3 laporan	1.538.500	Pendapatan Asli Daerah(PAD)		3 laporan	1.650.000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah dan Laporan SPM	KOTA TOMOHON	1 laporan	1.487.300	Pendapatan Asli Daerah(PAD)		1 laporan	1.650.000

1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	KOTA TOMOHON	100%	4.944.644.400			100%	5.412.325.457
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KOTA TOMOHON	50 orang/Bulan	4.730.149.000	Pendapatan Asli Daerah(PAD) dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 orang/Bulan	5.203.163.900
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KOTA TOMOHON	1 Dokumen	202.046.000	Pendapatan Asli Daerah(PAD) dana Transfer Umum-Dana bagi hasil dana Tranfer umum-Dana Alokasi umum		1 Dokumen	195.411.557
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	KOTA TOMOHON	1 Dokumen	3.433.600	Pendapatan Asli Daerah(PAD)		1 Dokumen	3.850.000
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA TOMOHON	1 laporan	5.557.300	Pendapatan Asli Daerah(PAD)		1 laporan	6.050.000
1	05	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	KOTA TOMOHON	1 Dokumen	2.466.800	Pendapatan Asli Daerah(PAD)		1 Dokumen	2.750.000
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	KOTA TOMOHON	1 laporan	991.700	Pendapatan Asli Daerah(PAD)		1 laporan	1.100.000
1	05	01	2.02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	KOTA TOMOHON	100%	340.000			100%	200.000.000
1	05	01	2.02	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	KOTA TOMOHON	5 orang	340.000	Pendapatan Asli Daerah(PAD)		5 orang	200.000.000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	100%	235.276.430			100%	272.948.433
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	KOTA TOMOHON	5 Paket	5.916.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	6.600.000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KOTA TOMOHON	52 Paket	60.074.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52 Paket	66.304.908

1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KOTA TOMOHON	3 Paket	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	27.500.000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Yang disediakan	KOTA TOMOHON	1000 Dokumen	5.775.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1000 Dokumen	6.352.500
1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	KOTA TOMOHON	2 laporan	58.039.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 laporan	64.668.725
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA TOMOHON	20 Laporan	80.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		20 Laporan	101.522.300
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOTA TOMOHON	100%	17.508.300			100%	5.150.000.000
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	KOTA TOMOHON	8 Unit	16.508.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	3.500.000.000
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	KOTA TOMOHON	1 Unit	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	1.650.000.000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	100%	140.779.700			100%	154.857.670
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	KOTA TOMOHON	4 laporan	35.008.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 laporan	38.509.020
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	KOTA TOMOHON	3 laporan	105.771.500	Pendapatan Asli Daerah(PAD) dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 laporan	116.348.650
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	KOTA TOMOHON	100%	501.593.300			100%	526.485.840
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	KOTA TOMOHON	32 Unit	501.593.300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		32 Unit	526.485.840

1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	presentase penegakan Perda	KOTA TOMOHON	100%	15.874.938.320			100%	17.703.119.180
						Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,ketentraman,Keindahan)	KOTA TOMOHON	100%				100%	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kaupaten/Daerah	KOTA TOMOHON	100%	15.831.867.520			100%	17.483.019.180
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pelanggar Dan Pengaduan Trantibum Dalam Kaupatrn/Kota yang di tangani	KOTA TOMOHON	2 Kasus	15.535.141.420	Pendapatan Asli Daerah(PAD) dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kasus	17.167.920.000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	KOTA TOMOHON	758 Orang	42.116.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		758 Orang	46.726.680
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	KOTA TOMOHON	250 Orang	78.114.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250 Orang	66.000.000
1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban umum yang Tersedia	KOTA TOMOHON	1 Dokumen	176.495.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	202.372.500
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda Dan Perkada Yang di Tegakkan	KOTA TOMOHON	100%	43.070.800			100%	220.100.000
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Perda Dan Perkada Yang di Tegakkan	KOTA TOMOHON	1 laporan	1.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 laporan	175.000.000
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Perda Dan Perkada Yang di Tegakkan	KOTA TOMOHON	1 laporan	41.370.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 laporan	45.100.000

1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentasi Pelayanan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	KOTA TOMOHON	100%	40.446.600			100%	44.361.200
						Tingkat waktu Tanggap(Response Time Rate) Daerah Layanan wilayah Managemen Kebakaran	KOTA TOMOHON	100%				100%	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah dan Jenis layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan Manusia (operasidarurat non kebakaran) oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	100%	19.560.000			100%	22.361.200
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah dan Jenis layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan Manusia (operasidarurat non kebakaran) oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	60 Orang	19.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Orang	22.361.200
1	5	4	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi	KOTA TOMOHON	100%	20.886.600			100%	22.000.000
1	5	4	2.05	3	Pengadaan sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi	KOTA TOMOHON	10 Unit	20.886.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Unit	22.000.000

B A B I V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon, tertuang dalam table 4.1 di bawah ini

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Hasi l Kegi atan					Tolok Ukur	Tar get	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							21,772,3 49,000				29,474,54 7,780			
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,856,96 4,080				11,727,06 7,400			
1	5	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							16,821,9 50				10,450,00 0			
1	0 5	0 1	2 . 1 0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Cakupan penunjang pelayanan perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Cakupan Kegiatan Perencanaa n,	Kota Tomohon, Semua Kecamata	100 %	2 Dokum en	100 %	9,679,050	PEND APAT AN ASLI		Cakupa n penunj ang	100 %	2,750,000	

			1		Daerah	daerah	Daerah	Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n, Semua Kelurahan					DAER AH (PAD)		pelayan an perang kat daerah		
1	0 5	0 1	2 0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Kegiatan Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokum en	100 %	1,073,300	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Cakupa n penunj ang pelayan an perang kat daerah	100 %	1,100,000
1	0 5	0 1	2 0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Kegiatan Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokum en	100 %	1,014,600	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Cakupa n penunj ang pelayan an perang kat daerah	100 %	1,100,000

1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,014,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	1,100,000
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,014,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	1,100,000
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	1,538,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan penunjang pelayanan perang	100 %	1,650,000

					Realisasi Kinerja SKPD		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan				(PAD)		kat daerah			
1	05	01	20	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,487,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	1,650,000
1	5	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,944,644,400					5,412,325,457	
1	05	01	20	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan penunjang pelayanan perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	100 %	50 Orang/bu	lain 00 %	4,730,149,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan penunjang pelayanan	100 %	5,203,163,900

							daerah	ASN	Daerah	Semua Kelurahan						AH (PAD) Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m		an perang kat daerah		
--	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--------	--------------------	--	--	--	--	--	---	--	-------------------------------	--	--

1	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	202,046,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Dana Transf er Umu m- Dana Bagi Hasil Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m	Cakupa n penunj ang pelayan an perang kat daerah	100 %	195,411,557
---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	----------	--------------	----------	-------------	---	--	----------	-------------

1	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,433,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	3,850,000
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	5,557,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	6,050,000
1	0	0	2	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	100 %	1 Dokumen	100 %	2,466,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan penunjang pelayanan	100 %	2,750,000

					Pemeriksaan		Lanjut Pemeriksaan	Daerah	Kelurahan					(PAD)		perang kat daerah		
1	0 5	0 1	2 0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Tri w ulanan/Seme SKPD	orCaankup an Kegiatan pAodramni nistrasi Keuangan Perangkat Daerah steran	Kota Tomohon, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	1 Lapora n	100 %	991,700	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Cakupa n penunj ang pelayan an perang kat daerah	100 %	1,100,000
1	5	1	2 1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								340,000				200,000,000	
1	0 5	0 1	2 0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegaw ai Berdasarkan Tugas dan	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Pegaw ai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Cakupan Kegiatan Adminstras i Kepegaw aian	Kota Tomohon, Semua Kecamata n, Semua	100 %	5 Orang	100 %	340,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH		Cakupa n penunj ang pelayan an	100 %	200,000,000

					Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan	Perangkat Daerah	Kelurahan					(PAD)		perang kat daerah		
1	5	1	2	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah								235,276,430				272,948,433	
1	05	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	5,916,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	6,600,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

																		(Rp.)
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Hasi l Kegi atan				Tolok Ukur	Tar get	
1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	52 Paket	100 %	60,074,88 0	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Cakupa n penunj ang pelayan an perang kat daerah	100 %	66,304,908
1	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	25,000,00 0	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Cakupa n penunj ang pelayan an perang kat daerah	100 %	27,500,000

1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1000 Dokum	100 %	5,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	6,352,500
1	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	58,039,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	64,668,725
1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Laporan	100 %	80,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	101,522,300

1	5	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								17,508,300					5,150,000,000
1	05	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	16,508,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	3,500,000,000
1	05	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	1,650,000,000
1	5	1	2	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								140,779,700					154,857,670

1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	4 Lapora n	100 %	35,008,20 0	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Cakupa n penunj ang pelayan an perang kat daerah	100 %	38,509,020
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Hasi l Kegi atan			Tolok Ukur	Tar get		

1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	3 laporan	100 %	105,771,5 00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Dana Transf er Umu m- Dana Aloka si Umu m		Cakupa n penun jang pelayan an perang kat daerah	100 %	116,348,65 0
1	5	1	2	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								501,593, 300				526,485,8 40	
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Cakupan Kegiatan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Tomohon, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	32 Unit	100 %	501,593,3 00	Dana Transf er Umu m- Dana Bagi		Cakupa n penun jang pelayan an perang kat	100 %	526,485,84 0

					Dinas Operasional atau Lapangan		dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemerintah an Daerah						Hasil		daerah		
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							15,874,938,320					17,703,119,180	
1	5	2	2		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							15,831,867,520					17,483,019,180	
1	05	02	20101	0	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Penegakan Perda Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani	Cakupan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 Kasus	100 %	15,535,141,420	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 % 100 %	17,167,920,000

1	0	0	2	0	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegaka n Perda Tingkat Penyelesai an Pelanggar an K3 (Ketertiba n, Ketentram an, Keindaha n)	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Cakupan Kegiatan Penangana n Gangguan Ketenteram an dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Tomohon, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 % 100 %	758 orang	100 %	42,116,30 0	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Persent ase Penega kan Perda Tingkat Penyele saian Pelangg aran K3 (Keterti ban, Ketentr aman, Keinda han)	100 % 100 %	46,726,680
1	0	0	2	0	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan	Persentase Penegaka n Perda Tingkat Penyelesai an Pelanggar an K3 (Ketertiba n,	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Kegiatan Penangana n Gangguan Ketenteram an dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu)	Kota Tomohon, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 % 100 %	250 Orang	100 %	78,114,80 0	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Persent ase Penega kan Perda Tingkat Penyele saian Pelangg aran K3	100 % 100 %	66,000,000

					Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Ketentraman, Keindahan)		Daerah Kabupaten/ Kota							(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)			
1	05	02	20201	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Cakupan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100%	1 Dokumen	100%	176,495,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penegakan Perda Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100% 100%	202,372,500
1	5	2	2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							43,070,800					220,100,000	
Kode				Urusan/ Bidang		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana				

					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan								Penti ng	Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Hasi l Kegi atan					Tolok Ukur	Tar get	
1	0	0	2	0	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegaka n Perda Tingkat Penyelesai an Pelanggar an K3 (Ketertiba n, Ketentram an, Keindaha n)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang di tegakkan	Kota Tomohon, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Lapora n	1 lapo ran	1,700,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Persent ase Penega kan Perda Tingkat Penyele saian Pelangg aran K3 (Keterti ban, Ketentr aman, Keinda	100 % 100 %	175,000,00 0	

															han)		
1	0	0	2	0	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegaka n Perda Tingkat Penyelesai an Pelanggar an K3 (Ketertiba n, Ketentram an, Keindaha n)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang di tegakkan	Kota Tomohon, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Lapora n	1 lapo ran	41,370,80 0	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persent ase Penega kan Perda Tingkat Penyele saian Pelangg aran K3 (Keterti ban, Ketentr aman, Keinda han)	100 % 100 %	45,100,000
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								40,446,6 00				44,361,20 0
1	5	4	2		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								19,560,0 00				22,361,20 0

1	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di kabupaten/kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	60 Orang	60 orang	19,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100 % 100 %	22,361,200
1	5	4	2		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan								20,886,6	22,000,00			

				. 1	Manusia								00						0
1	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	10 Unit	10 Unit	20,886,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen	100 % 100 %	22,000,000	

																		kebaka ran		
TOTAL													21,772,3 49,000						29,474,54 7,780	

B A B V

P E N U T U P

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

Program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon sebagai penyelenggara Kantrantibmas di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dijalankan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran Berjalan.

Secara objektif masih terdapat berbagai kelemahan-kelemahan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terutama menyangkut masalah dana, kendaraan operasional serta jumlah personil, hal ini membawa implikasi terhadap kinerja pelayanan kurang maksimal kepada masyarakat.

5.2 Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja merupakan komitmen seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil sesuai Visi, Misi, Kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh konstribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh *stakeholders* secara harmoni di semua tingkatan. Peran pemerintah Daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon tahun 2023 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJMD Daerah Kota Tomohon 2021 – 2026 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun lalu. Perubahan Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon tahun 2023.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksanaan pemerintahan dan segenap pemangku kepentingan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS SOSIAL DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon

Selanjutnya Renja Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 didasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon bertujuan :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon tahun 2023.
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon, proses penyusunan Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon, keterkaitan antara Renja Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahunberjalan (tahun n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon Tahun Lalu dan Renstra Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon
- 2.4. .Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon
- 3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

II.1. **Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Sosial s/d Desember 2023 adalah:

- Program Rutin; 6 program dan 24 kegiatan, semua program dan kegiatan capaian kinerja sebesar 100%.
- Program prioritas; 7 program dan 41 kegiatan; Program dan kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2.1. **Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja s/d Tri Wulan II Tahun 2022 dan capaian Rencana Strategis Dinas Sosial**

1. *Program Pemberdayaan Sosial:*

Program ini merupakan peningkatan yang dimaksud dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (TKSK),kesejahteraan sosial KELUARGA dan KELEMBAGAAN adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam.

Capaian kinerja yang diperoleh adalah Cakupan Kelompok TKSK, KELUARGA dan KELEMBAGAAN yang mendapatkan Pelatihan dan Bantuan

2. *Program Rehabilitasi sosial*

Program Ini merupakan peningkatan yang dimaksud dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial pada DISABILITAS TERLANTAR,ANAK TERLANTAR,LANJUT USIA TERLANTAR serta GELANDANGAN Pengemis diluar panti Sosial

Capaian kinerja yang diperoleh adalah cakupan Kelompok *DISABILITAS TERLANTAR,ANAK TERLANTAR,LANJUT USIA TERLANTAR serta GELANDANGAN Pengemis diluar panti Sosial* yang Mendapatkan Pelatihan dan pengembangan bantuan

3. *Program Perlindungan dan Jaminan Sosial*

Program ini merupakan upaya mengembangkan bagi ANAK TERLANTAR, Pendataan FAKIR MISKIN

Capaian kinerja yang diperoleh adalah cakupan Kelompok *,ANAK TERLANTAR,FAKIR MISKIN* yang Mendapatkan Pelatihan dan Peningkatan kesejahteraan sosial dan bantuan Program Penanganan Bencana

Program ini merupakan upaya mengembangkan SIAGA BENCANA alam dan sosial

Capaian kinerja yang diperoleh adalah cakupan Kelompok TARUNA SIAGA BENCANA dan Penyediaan BANTUAN PERMAKINAN

4. *Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota*

Program kesekretariatan / rutin yang menunjang kinerja Bidang dalam upaya pencapaian target sasaran strategis.

- Capaian kinerja program ini adalah 100 % dan realisasi anggaran 48,71 %.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2022
DINAS SOSIAL KOTA TOMOHON

Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja capaian Program (Renstra PD 2021- 2026)	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD Thn 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Thn 2024	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ (9)	11=(10/4)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100	100
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos/keperluan surat-menyurat yang diadakan	100%	100%	65 Lembar	65 Lembar	100%	12 Bulan	100	100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sumber listrik	100%	100%	36 Rekening	36 Rekening	100%	12 Bulan	12 Bulan	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terjaminnya pemeliharaan kesehatan bagi petugas kebersihan; dan sopir	100%	100%	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	2 Orang	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan peijinan kendaraan dinas	100%	100%	3 unit	3 unit	100%	3 Unit	3 Unit	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang disusun	100%	100%	1 Dokum en	1 Dokum en	100%	1 Dok	4 Jenis	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	100%	100%	1 Dokum en	1 Dokum en	100%	1 Dok	4 Jenis	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	100%	1 Dokum en	1 Dokum en	100%	1 Dok	3 Unit	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan kegiatan Lintas perangkat SKPD	100%	100%	3 Dokum en	3 Dokum en	100%	3 Dok	3 Dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun	100%	100%	1 Dokum en	1 Dokum en	100%	1 Dok	1 Dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	100%	100%	1 Dokum en	1 Dokum en	100%	1 Dok	1 Dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang disusun	100%	100%	1 Dokum en	1 Dokum en	100%	1 Dok	1 Dokumen	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Buah	100

Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleurnya yang diadakan	100%	100%	4	Jenis	4	Jenis	100%	4	Jenis	4 Buah	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan/service kendaraan	100%	100%	3	unit	3	unit	100%	3	Unit	3 Orang	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa service kendaraan; jumlah pengurusan STNK kendaraan dinas/operasional; jumlah tenaga sopir; jumlah bulan terbayar	100%	100%	3	unit	3	unit	100%	3	Unit	3 Orang	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang diadakan	100%	100%	100000	Lembar	100000	Lembar	100%	100000	Lembar	1000 Lembar	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	1	Keg	1	Keg	100%	1	Keg	1 kegiatan	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kerja yang terawat	100%	100%	10	unit	10	unit	100%	10	unit	1 Dokumen	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan yang diadakan	100%	100%	10	Jenis	10	Jenis	100%	10	Jenis	10 Jenis	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas tamu	100%	100%	1	Keg	1	Keg	100%	1	Keg	1 kegiatan	100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	100%	100%	75	Keg	75	Keg	100%	75	Keg	75 Kegiatan	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	100%	100%	2	Media	2	Media	100%	2	Media	2 Media	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%		100%		100%	100%		5 Dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	100%	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1 Dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	100%	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1 Dokumen	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang menerima honor	100%	100%	15	Orang	15	Orang	100%	15	Orang	15 Orang	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tenaga administrasi yang menerima honor	100%	100%	28	Orang	28	Orang	100%	28	Orang	28 Orang	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%		100%		100%	100%		100%	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	100%	100%	1	Orang	1	Orang	100%	1	Orang	1 Orang	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan Kheki dan Putih Hitam	100%	100%	35	Orang	35	Orang	100%	35	Orang	35 Orang	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pejabat yang mengikuti PIM III / PIM IV	100%	100%	1	Orang	1	Orang	100%	1	Orang	1 Orang	100

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%		100%		100%	100%		100%	100
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kelompok KUBE dan Pelatihan serta bantuan RTLH	100%	100%	100 %		100 %		100%	100 %		100%	100
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Karang Taruna	100%	100%	100 %		100 %		100%	100 %		50 orang	100
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kelompok KUBE dan Pelatihan Peksos ; Terlaksananya kegiatan Pemerintahan	100%	100%	100 %		100 %		100%	100 %		2 KUBE; 64 Orang	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100
Penyediaan Permakanan	Jumlah Lanjut Usia Miskin Yang Mendapatkan Perbekalan Hidup	100%	100%	20 Orang		20 Orang		100%	20 Orang		20 Orang	100
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Jasa Tenaga Pendamping Asuransi Lanjut (ASLUT) dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	100%	100%	96 Orang		96 Orang		100%	96 Orang		96 Orang	100
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya Kegiatan Hari Lanjut Usia	100%	100%	1 Keg		1 Keg		100%	1 Keg		1 kegiatan	100
Pemberian Layanan Kedaruratan		100%	100%	1 Keg		1 Keg		100%	1 Keg		1 kegiatan	100

Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah eks trauma dan PMKS yang terbantu	100%	100%	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	15 Orang	100
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang menerima bantuan	100%	100%	4 Orang	4 Orang	100%	4 Orang	4 Orang	100
Penyediaan Sandang	Jumlah Gelandangan Eks Penyakit Kejiwaan Yang Dibantu	100%	100%	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	15 Orang	100
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Jasa Pendamping Disabilitas	100%	100%	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	10 Orang	100
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi Taman Makam Pahlawanan	100%	100%	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 kegiatan	100
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan	100%	100%	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	5 Orang	100
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawanan	100%	100%	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	10 Orang	100
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah pembentukan lokasi kampung siaga bencana	100%	100%	44 Kelurahan	44 Kelurahan	100%	44 Kelurahan	100	100

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Penyediaan Makanan	Jumlah bufferstock bahan pangan untuk korban bencana alam/bencana sosial	100%	100%	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 kegiatan	100
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		100%	100%	100	100	100%	100	100	100
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Jumlah Pembina Anak Terlantar Untuk Peningkatan Ketrampilan; Jumlah Bagi Remaja Putus Sekolah	100%	100%	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	10 Orang	100
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar Yang Mengikuti Pelatihan Ketrampilan Dan Praktek Belajar Kerja, Jumlah Anak Terlantar Yang Mengikuti Pengembangan Bakat Dan Ketrampilan	100%	100%	8 Orang	8 Orang	100%	8 Orang	8 Orang	100
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah jasa lansia yang dibantu	100%	100%	4000 Orang	4000 Orang	100%	4000 Orang	4000 Orang	100
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Jasa PKH	100%	100%	19 Orang	19 Orang	100%	19 Orang	19 Orang	100

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monev	100%	100%	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 kegiatan	100
-----------------------------------	------------------------------	------	-------------	------------	------------	------	------------	---------------	-----

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menunjang pencapaian Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon, *Penyediaan Rumah Sederhana Layak Huni* dan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia (lansia) Program Prioritas Daerah dan Rencana Aksi tersebut memfokuskan pada pencapaian *E-goverment* point II yaitu *Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran permasalahan Sosial Dan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat*. Dasar dalam pencapaian *E-goverment* point II tersebut, karena Dinas Sosial Kota Tomohon melihat permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang di hadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya kebutuhan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan dan kebutuhan sosial dasar lainnya.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL
KOTA TOMOHON

No	Indikator	SP M	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Anali sis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah jasa lansia yang dibantu			1632 Orang	1623 Orang	1623 Orang	1623 Orang	1632 Orang	1623 Oran g	1623 Orang	1623 Orang	
2	0			0	50 alat bantu; 100 Org; 1 Keg	50 alat bantu; 100 Org; 1 unit; 1 Keg	50 alat bantu; 50 Org; 1 unit; 1 Keg	0	222 Oran g	50 alat bantu; 100 Org; 1 unit; 1 Keg	50 alat bantu; 50 Org; 1 unit; 1 Keg	
3	0			0	1 Unit Gedun g; 60 anak terlant ar; 1 org sakti peksos ;1 Dok	60 anak terlantar ; 1 org sakti peksos; 1 Dok; 1 keg	60 anak terlantar; 1 org sakti peksos;1 Dok; 1 keg	0	10 Oran g	60 anak terlant ar; 1 org sakti peksos ;1 Dok; 1 keg	60 anak terlanta r; 1 org sakti peksos ;1 Dok; 1 keg	
4	0			1 Keg	15 orang cacat/e ks trauma	60 orang cacat/ek s trauma	70 orang cacat/ek s trauma	1 Keg	15 Oran g	60 orang cacat/ eks traum a	70 orang cacat/e ks trauma	

5	0			0	1 Keg; 50 orang	2 Unit; 2 Keg; 86 orang	2 Unit; 2 Keg; 90 orang	0	20 Oran g; 1 Keg	2 Unit; 2 Keg; 86 orang	2 Unit; 2 Keg; 90 orang	
6	0			0	15 Orang	70 Orang; 1 Unit	70 Orang; Keg; 1 Unit	0	15 Oran g	70 Orang ; 1 Unit	70 Orang; Keg; 1 Unit	
7	Pemeliha aan Anak- Anak Terlantar			40 Orang; 2 Keg	2 Keg; 5 org TKSK, 44 Kel; 44 Karang Taruna ; 15 Orsos; 44 Org	4 Keg; 5 org TKSK, 44 Kel; 44 Karang Taruna; 15 Orsos; 44 Org; 150 siswa; 150 guru	5 Keg; 5 org TKSK, 44 Kel; 44 Karang Taruna; 15 Orsos; 44 Org; 150 siswa; 150 guru	50 Orang; 2 Keg	2Keg ; 18 KT	4 Keg; 5 org TKSK , 44 Kel; 44 Karan g Tarun a; 15 Orsos ; 44 Org; 150 siswa; 150 guru	5 Keg; 5 org TKSK, 44 Kel; 44 Karang Taruna ; 15 Orsos; 44 Org; 150 siswa; 150 guru	
8	0			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
9	0			0	44 Kelura han	44 Kelurah an	44 Keluraha n	0	3 Dok	44 Kelur ahan	44 Kelura han	

II.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsi serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon memiliki permasalahan dan isu strategis untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu urusan sosial.

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan Kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

PMKS yang menjadi sasaran penanganan masalah kesejahteraan sosial dikelompokkan dalam 5 sasaran prioritas sebagai berikut :

- (i) Kemiskinan,
- (ii) Kecacatan,
- (iii) Ketelantaran,
- (iv) Tuna Sosial, dan
- (v) Korban Bencana Alam dan Sosial,

kemudian sasaran prioritas tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam menentukan Indikator Kinerja Utama.

II.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja) Dinas Sosial Kota Tomohon Tahun 2022 bahwa Dinas Sosial Kota Tomohon bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yakni penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Tomohon, dimana pada Ranwal Renja tersebut telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung pada Dinas Sosial Kota Tomohon Tahun 2023. Adapun pagu indikatif untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 14.121.619.000,-. Peruntukan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tersebut ialah untuk membiayai gaji dan tunjangan Pegawai, membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Urusan Wajib : Sosial) dan program prioritas. Apabila melihat usulan Dinas Sosial Kota Tomohon terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPJMD sementara Kota Tomohon Tahun 2020 dan usulan Musrenbang Kota Tomohon maka anggaran belum memadai.

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara Rancangan Awal Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dengan kebutuhan Dinas Sosial Kota Tomohon terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Sosial Kota Tomohon pada Tahun 2023. Mengenai perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Dinas Sosial Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KOTA TOMOHON

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon		100%	140,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon		100%	220,000,000	
a	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	Jumlah Benda Pos/keperluan surat-menyurat yang diadakan	650	15,000,000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	Jumlah Benda Pos/keperluan surat-menyurat yang diadakan	1300	30,000,000	
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Tomohon	Tersedianya sumber listrik	12 Bulan	25,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Tomohon	Tersedianya sumber listrik	12 Bulan	50,000,000	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terjaminnya pemeliharaan kesehatan bagi petugas kebersihan; dan sopir	2 Orang	50,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tomohon	Terjaminnya pemeliharaan kesehatan bagi petugas kebersihan; dan sopir	3 Orang	75,000,000	
d	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan peijinan	3 Unit	50,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan peijinan kendaraan dinas	3 Unit	65,000,000	

			kendaraan dinas								
e	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon		100	55,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon		100	55,000,000	
f	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang disusun	4 Jenis	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang disusun	4 Jenis	5,000,000	
g	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	4 Jenis	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	4 Jenis	3,000,000	
h	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 Unit	3,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 Unit	3,000,000	
i	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan kegiatan Lintas	3 Dokumen	35,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan kegiatan Lintas perangkat SKPD	3 Dokumen	35,000,000	

			perangkat SKPD								
j	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	
k	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	
l	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	
m	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon		100	95,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon		100	95,000,000	
n	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tomohon	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	4 Buah	35,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tomohon	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	4 Buah	35,000,000	

2	Pengadaan Mebel	Kota Tomohon	Jumlah meubeleur yang diadakan	4 Buah	60,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Tomohon	Jumlah meubeleur yang diadakan	4 Buah	60,000,000	
a	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon		100	150,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon		100	150,000,000	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tomohon	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan/service kendaraan	3 Orang	115,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tomohon	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan/service kendaraan	3 Orang	115,000,000	
c	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon	Jumlah jasa service kendaraan; jJumlah pengurusan STNK kendaraan dinas/operasional; Jumlah tenaga sopir; jumlah bulan terbayar	3 Orang	35,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon	Jumlah jasa service kendaraan; jJumlah pengurusan STNK kendaraan dinas/operasional; Jumlah tenaga sopir; jumlah bulan terbayar	3 Orang	35,000,000	
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon		100	350,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon		100	350,000,000	

e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tomohon	Jumlah barang cetakan yang diadakan	1000 Lembar	8,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tomohon	Jumlah barang cetakan yang diadakan	1000 Lembar	8,000,000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tomohon		1 kegiatan	35,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tomohon		1 kegiatan	35,000,000	
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah peralatan/perengkapan kerja yang terawat	1 Dokumen	6,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah peralatan/perengkapan kerja yang terawat	1 Dokumen	6,000,000	
b	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah alat listrik/penerangan yang diadakan	10 Jenis	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah alat listrik/penerangan yang diadakan	10 Jenis	6,000,000	
c	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya fasilitas tamu	1 kegiatan	10,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	Tersedianya fasilitas tamu	1 kegiatan	10,000,000	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	75 Kegiatan	280,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	75 Kegiatan	280,000,000	
a	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tomohon	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	2 Media	5,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tomohon	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	2 Media	5,000,000	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon		1	3,296,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon		100	3,296,000,000	

c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Tomohon	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Tomohon	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tomohon	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Jumlah tenaga Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang menerima honor	15 Orang	290,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Jumlah tenaga Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang menerima honor	15 Orang	290,000,000	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Jumlah tenaga adminisrtasi yang menerima honor	28 Orang	3,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Jumlah tenaga adminisrtasi yang menerima honor	28 Orang	3,000,000,000	
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon		100%	135,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon		100%	135,000,000	
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	1 Orang	20,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	1 Orang	20,000,000	

6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tomohon	Jumlah pakaian dinas yang diadakan Kheki dan Putih Hitam	35 Orang	75,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tomohon	Jumlah pakaian dinas yang diadakan Kheki dan Putih Hitam	35 Orang	75,000,000	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tomohon	Jumlah pejabat yang mengikuti PIM III / PIM IV	1 Orang	40,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tomohon	Jumlah pejabat yang mengikuti PIM III / PIM IV	1 Orang	40,000,000	
b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon		100%	1,406,000,000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon		100%	1,420,000,000	
c	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Cakupan Kelompok KUBE dan Pelatihan serta bantuan RTLH	100%	750,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Cakupan Kelompok KUBE dan Pelatihan serta bantuan RTLH	100%	755,000,000	
7	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Terlaksananya kegiatan Karang Taruna	100%	506,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Terlaksananya kegiatan Karang Taruna	50 orang	510,000,000	
a	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Cakupan Kelompok KUBE dan Pelatihan Peksos ; Terlaksananya kegiatan pemerintahan	100%	150,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Cakupan Kelompok KUBE dan Pelatihan Peksos ; Terlaksananya kegiatan pemerintahan	2 KUBE; 64 Orang	155,000,000	

<i>b</i>	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Tomohon		100%	717,250,000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Tomohon		100%	717,250,000	
<i>c</i>	Penyediaan Permakanan	Kota Tomohon	Jumlah Lanjut Usia Miskin Yang Mendapatkan Perbekalan Hidup	20 Orang	98,500,000	Penyediaan Permakanan	Kota Tomohon	Jumlah Lanjut Usia Miskin Yang Mendapatkan Perbekalan Hidup	20 Orang	98,500,000	
<i>d</i>	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Tomohon	Jumlah Jasa Tenaga Pendamping Asuransi Lanjut (ASLUT) dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	96 Orang	140,000,000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Tomohon	Jumlah Jasa Tenaga Pendamping Asuransi Lanjut (ASLUT) dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	96 Orang	140,000,000	
<i>e</i>	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Tomohon	Terlaksananya Kegiatan Hari Lanjut Usia	1 kegiatan	150,000,000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Tomohon	Terlaksananya Kegiatan Hari Lanjut Usia	1 kegiatan	150,000,000	
<i>f</i>	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Tomohon		1 kegiatan		Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Tomohon		1 kegiatan		

<i>g</i>	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah eks trauma dan PMKS yang terbantu	15 Orang	144,750,000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Tomohon	Jumlah eks trauma dan PMKS yang terbantu	15 Orang	144,750,000	
8	Penyediaan Alat Bantu	Kota Tomohon	Jumlah Alat Bantu yang menerima bantuan	4 Orang	85,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Tomohon	Jumlah Alat Bantu yang menerima bantuan	4 Orang	85,000,000	
<i>a</i>	Penyediaan Sandang	Kota Tomohon	Jumlah Gelandangan Eks Penyakit Kejiwaan Yang Dibantu	15 Orang	99,000,000	Penyediaan Sandang	Kota Tomohon	Jumlah Gelandangan Eks Penyakit Kejiwaan Yang Dibantu	15 Orang	99,000,000	
<i>b</i>	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Tomohon		100%	30,000,000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Tomohon		100%	30,000,000	
<i>c</i>	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Jumlah Jasa Pendamping Disabilitas	10 Orang	30,000,000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Jumlah Jasa Pendamping Disabilitas	10 Orang	30,000,000	
<i>d</i>	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Tomohon		100	225,000,000	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Tomohon		100	240,000,000	

e	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Tomohon	Terlaksananya Rehabilitasi Taman Makam Pahlawanan	1 kegiatan	75,000,000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Tomohon	Terlaksananya Rehabilitasi Taman Makam Pahlawanan	1 kegiatan	80,000,000	
f	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Tomohon	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan	5 Orang	75,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Tomohon	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan	5 Orang	80,000,000	
g	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawanan	10 Orang	75,000,000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawanan	10 Orang	80,000,000	
h	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			100	945,000,000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Tomohon		100	975,000,000	
9	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Tomohon	Jumlah pembentukan lokasi kampung siaga bencana	100	195,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Tomohon	Jumlah pembentukan lokasi kampung siaga bencana	100	200,000,000	
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Tomohon		100	750,000,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Tomohon		100	775,000,000	
b	Penyediaan Makanan	Kota Tomohon	Jumlah bufferstock bahan pangan untuk korban bencana	1 kegiatan	750,000,000	Penyediaan Makanan	Kota Tomohon	Jumlah bufferstock bahan pangan untuk korban bencana alam/bencana sosial	1 kegiatan	775,000,000	

			alam/bencana sosial								
c	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Tomohon		100	217,800,000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Tomohon		100	230,000,000	
d	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Tomohon	Terlaksananya Jumlah Pembina Anak Terlantar Untuk Peningkatan Ketrampilan; Jumlah Bagi Remaja Putus Sekolah	10 Orang	97,800,000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Tomohon	Terlaksananya Jumlah Pembina Anak Terlantar Untuk Peningkatan Ketrampilan; Jumlah Bagi Remaja Putus Sekolah	10 Orang	100,000,000	
e	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	70,000,000	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	80,000,000	
f	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar Yang Mengikuti Pelatihan Ketrampilan Dan Praktek Belajar Kerja, Jumlah Anak Terlantar Yang Mengikuti Pengembangan Bakat Dan Ketrampilan	8 Orang	50,000,000	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Tomohon	Jumlah Anak Terlantar Yang Mengikuti Pelatihan Ketrampilan Dan Praktek Belajar Kerja, Jumlah Anak Terlantar Yang Mengikuti Pengembangan Bakat Dan Ketrampilan	8 Orang	50,000,000	

10	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon		100	12,000,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon		100	12,000,000,000	
a	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Tomohon	Jumlah jasa lansia yang dibantu	4000 Orang	12,000,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Tomohon	Jumlah jasa lansia yang dibantu	4000 Orang	12,000,000,000	
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon		100	233,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon		100	233,000,000	
c	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Terlaksananya Jasa PKH	19 Orang	228,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Terlaksananya Jasa PKH	19 Orang	228,000,000	
d	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Kota Tomohon	Terlaksananya Kegiatan Monev	1 kegiatan	5,000,000	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Kota Tomohon	Terlaksananya Kegiatan Monev	1 kegiatan	5,000,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kemampuan kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan
- b. Ketelantaran
- c. Kecacatan
- d. Keterpencilan
- e. Ketunaan sosial
- f. Korban bencana
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi :

1. Rehabilitasi sosial;

Proses Refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat

2. Jaminan Sosial;

Skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak

3. Pemberdayaan Sosial;

Semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya

4. Perlindungan Sosial;

Semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari kerentanan sosial.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Walikota Tomohon dalam Misi **“Tomohon Maju, Berdaya Saing Dan Sejahtera”**. Visi : **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Berbagai Sektor”** Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai.

Visi dan misi pembangunan daerah Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 juga didukung dengan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon tahun 2021 – 2026 sebagaimana tersaji melalui program unggulan Bantuan sosial bagi lansia.

Bantuan sosial lansia sebagai wujud dari upaya untuk meningkatkan kualitas para lansia dan khususnya memberikan bantuan untuk memperkuat kesehatan para lansia.

Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam program prioritas daerah Kota Tomohon, bertanggung jawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Tomohon, oleh sebab itu Dinas Sosial Kota Tomohon mempunyai Motto : *“ Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Kota Tomohon ”*

Urusan Sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Urusan. Standar pelayanan minimal bidang sosial adalah:

- ✓ - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas
- ✓ - Rehabilitasi sosial anak terlantar
- ✓ - Rehabilitasi sosial lanjut usia
- ✓ - Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya pengemis dan gelandangan
- ✓ - Perlindungan sosial bagi korban bencana

SPM bidang sosial di atas pada dasarnya adalah untuk mempercepat suksesnya program pemerintah dalam hal penurunan angka kemiskinan, cakupan penduduk yang mendapatkan bantuan sosial melalui mekanisme pendataan yang akurat, bantuan sosial bagi rumah tangga miskin, serta Penerima Bantuan Iuran.

III.3 Program dan Kegiatan

Program-program pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Tomohon sesuai yang tertuang didalam Renja Dinas Sosial Kota Tomohon Tahun 2022 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Program Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 3. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Pealatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik
 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 5. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 7. Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kab/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota
 8. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis

- Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemberian Layanan Rujukan
9. Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- Pemberian Layanan Rujukan
 - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/Kota
10. Program Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
11. Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota
- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota
 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial Keluarga
12. Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota
- Penyediaan Makanan
 - Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota
 - Penyediaan Makanan
13. Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana/Kab Kota
- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota

TABEL 3.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2023
DINAS SOSIAL KOTA TOMOHON

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana		Targ et	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			14,121,619,000					16,863,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	4,211,019,560				100 %	4,725,000,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	30,301,100				100 %	38,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	17,351,200	Kota Tomohon, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan , Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	20,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	2,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	1 Laporan	2,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja Perangkat Daerah			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4,949,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3,488,913,410				100 %	3,542,000,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	2,959,435,810	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3,000,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	517,520,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	520,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,979,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	6,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	9,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5,968,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	6,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik	100 %	19,600				100 %	10,000,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik	1 Dokumen	5,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik	1 Laporan	5,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

				Kelurahan					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	106,352,200				100 %	165,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Korpri dan Pakaian Batik	1 Paket 45 Paket	96,989,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket 45 Paket	100,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Orang	35,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Orang	15,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	9,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Orang	15,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	201,428,350				100 %	280,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,557,950	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	10,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,310,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	10,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	30,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	35,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	6,637,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	10,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	3,420,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15 Paket	30,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	19,200,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	25,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	132,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	150,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	68,383,900				100 %	300,000,000	

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Bulan	68,381,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	150,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	141,347,400				100 %	155,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	15,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	20,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	25,589,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	30,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12,820,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	15,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	87,938,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	90,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	174,273,600				100 %	235,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Supir	4 Unit 1 Orang/bulan	34,000,000 ⁿ	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit 1 Orang/bulan	35,000,000 ⁿ	DINAS SOSIAL DAERAH

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat	3 Unit 1 Unit	140,270,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit 1 Unit	145,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Unit	10,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	30,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	15,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	187,548,690				100 %	300,000,000	

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 %	187,548,690				100 %	300,000,000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	60,464,690	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	18 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah Tenaga Pekerja Sosial dan Pendamping Sosial	5 Orang 7 orang	35,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	5 Orang 7 orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kelompok usaha bersama Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 kelompok 5 Keluarga	48,774,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	5 kelompok 5 Keluarga	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota karang taruna	10 Lembaga 44 kelurahan 3 unit	43,309,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	10 Lembaga 44 kelurahan 3 unit	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

	Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)								
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Terlantar yang Mendapat Fasilitas Pemulangan dari Kabupaten/kota	100 %	1,200				100 %	50,000,000	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1 orang	1,200				1 orang	50,000,000	
Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Yang Berasal Dari Luar Daerah/Luar Negeri	1 Orang	50,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	100 %	286,612,500				100 %	520,000,000	

	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pesentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 %	185,851,300				100 %	295,000,000	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	58,300,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	30 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	60,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	30 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	35,300,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	25 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	31,971,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	20 Orang	70,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 %	100,761,200				100 %	225,000,000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	10 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	40,920,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	100 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	59,840,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Penerima Manfaat Bantuan Sosial	25 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota	100 %	9,193,067,750				100 %	10,038,000,000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Ketepatan sasaran intervensi pemerintah melalui program bantuan sosial kepada masyarakat miskin Meningkatnya keakuratan pendataan fakir miskin di Kota Tomohon	100 % 100 %	9,193,067,750				100 % 100 %	10,038,000,000	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	75 Orang	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat miskin	75 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Tersedianya aplikasi data berbasis web Tersedianya data fakir miskin yang valid	100 % 100 % 100 %	187,112,750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat miskin	100 % 100 % 100 %	150,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Lanjut Usia yang mendapat Bantuan Sosial	1623 Orang	9,005,952,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat miskin	1623 Orang	9,738,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat miskin	5 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kota	100 %	213,366,900				100 %	1,175,000,000	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	memenuhi kebutuhan dasar pangan dan sandang bagi masyarakat yang terkena dampak bencana alam / sosial di Kota Tomohon	100 %	132,501,750				100 %	1,025,000,000	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Terselurnya kebutuhan dasar pangan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam/sosial	5000 Orang 100 %	72,670,750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	5000 Orang 100 %	650,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Tersalurnya kebutuhan dasar sandang kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam / sosial	100 Orang 100 %	59,827,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	100 Orang 100 %	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	10 Unit	150,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	50 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat	50 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	memantapkan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi bencana	30 orang	80,865,150				30 orang	150,000,000	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kampung	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	tagana / relawan aktif; dan unsur masyarakat	5 Kampung	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Memantapkan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi bencana	30 Orang	80,863,950	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	tagana / relawan aktif; dan unsur masyarakat	30 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Bulan	30,002,400				12 Bulan	55,000,000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Bulan	30,002,400				12 Bulan	55,000,000	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	30,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam	30,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	15,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH
			14,121,619,000					16,863,000,000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL DAERAH KOTA TOMOHON

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 adalah

MISI 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor

Misi ini memiliki tujuan **Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata**, dengan sasaran Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon, meningkatnya kualitas dan daya saing SDM, meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas, dan meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang diukur dari pencapaian laju pertumbuhan ekonomi, Indeks gini, Angka kemiskinan, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Gender, Menurunnya Angka Stunting dan Umur Harapan Hidup, Ketaatan terhadap RTRW, Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan, Indeks infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase RTH, Persentase rumah tinggal bersanitasi dan Akses air layak.

Adapun rumusan rencana kerja melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon tahun 2023 sesuai pagu indikatif yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023		
		Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		14,121,619,000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	4,211,019,560	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	30,301,100	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	17,351,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4,949,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3,488,913,410	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	2,959,435,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	517,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,979,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	9,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	5,968,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	19,600	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	106,352,200	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket 45 Paket	96,989,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	9,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	201,428,350	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	5,557,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	4,310,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	6,637,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	3,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.5.6	Penyediaan Bahan/Material	15 Paket	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	19,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	132,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.5.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	68,383,900	
1.6.1	Pengadaan Mebel	10 Unit	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	68,381,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 %	141,347,400	

	Pemerintahan Daerah			
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	25,589,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	87,938,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	174,273,600	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit 1 Orang/bula	34,000,000 ⁿ	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit 1 Unit	140,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100 %	187,548,690	
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 %	187,548,690	
2.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	60,464,690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang 7 orang	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 kelompok 5 Keluarga	48,774,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.1.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga 44 kelurahan 3 unit	43,309,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100 %	1,200	
3.1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1 orang	1,200	
3.1.1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke	1 Orang	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

	Desa/Kelurahan Asal			
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100 %	286,612,500	
4.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 %	185,851,300	
4.1.1	Penyediaan Permakanan	30 Orang	58,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4.1.2	Penyediaan Sandang	30 Orang	60,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4.1.3	Penyediaan Alat Bantu	25 Orang	35,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4.1.4	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	20 Orang	31,971,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4.2.1	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 %	100,761,200	
4.2.1	Pemberian Layanan Kedaruratan	10 Orang	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4.2.2	Penyediaan Permakanan	100 Orang	40,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4.2.3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	25 Orang	59,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100 %	9,193,067,750	
5.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	9,193,067,750	
5.1.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	75 Orang	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.1.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 % 100 %	187,112,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.1.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1623 Orang	9,005,952,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.1.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	5 Orang	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100 %	213,366,900	
6.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 %	132,501,750	
6.1.1	Penyediaan Makanan	5000 Orang 100 %	72,670,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

6.1.2	Penyediaan Sandang	100 Orang 100 %	59,827,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6.1.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10 Unit	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6.1.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50 Orang	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6.1.5	Pelayanan Dukungan Psikososial	50 Orang	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	30 orang	80,865,150	
6.2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	5 Kampung	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6.2.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	30 Orang	80,863,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	12 Bulan	30,002,400	
7.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Bulan	30,002,400	
7.1.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.1.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.1.3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
			14,121,619,000	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Dinas Sosial, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Dinas Sosial sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas Sosial Semoga RENJA tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2023 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Sosial, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah. antar pelaku

pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2018 , maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tomohon Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tomohon Tahun 2022 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Propinsi Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota , RKPD Kota Tomohon dan Renstra Dinas).

5.4 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
3. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
6. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Tenaga Kerja, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja

Selanjutnya Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

- 1.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
- 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5.Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6.Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7.Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 8.Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025;
- 9.Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon yang

akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon bertujuan :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon tahun 2023.
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon, proses penyusunan Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon, keterkaitan antara Renja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon Tahun Lalu dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Sampai 2021

Pelaksanaan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon dilaksanakan dengan memprioritaskan pemulihan perekonomian di Kota Tomohon selepas pandemi Covid-19. Setelah memperoleh capaian dari target-target yang ditetapkan yang baik pada tahun sebelumnya, fokus Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon untuk tahun 2023 adalah melanjutkan peningkatan perekonomian Kota Tomohon dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dalam mengelola urusan ketenagakerjaan terhadap pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan lapangan kerja, keahlian tenaga kerja yang harus sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja agar tingkat pengangguran di Kota Tomohon menurun.

Terkait fasilitasi kemudahan pelayanan, Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon telah melaksanakan Pelayanan berupa Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitas kesejahteraan (BPJS)

Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2021 juga telah dilakukan pemantapan birokrasi, dengan dilaksanakannya penancangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih dan melayani. Dilaksanakan juga penguatan reformasi birokrasi untuk mendukung terwujudnya pelayanan yang prima.

Secara keseluruhan, hasil capaian yang diperoleh Dinas Tenaga kerja Daerah Kota Tomohon sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2021 dipaparkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021
sampai dengan Triwulan 4 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (2021)

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatannya	Indikator Kinerja Program (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2021 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
							I	II	III	IV						
				5	6	7	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 *	15	16	

1	2	3	4																			100%											
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				K	Rp				
				Tar get	Sat uan		Ju mla uan h	Sat uan		Tar get	Satu an		Ju mla uan h	Sat uan		J m l	Satu an		Jml	Sat uan		Ju mla uan h	Sat uan					Ju mla uan h	Sat uan				
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					-				-				Dinas Tenaga Kerja a Daerah		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																					-				-				Dinas Tenaga Kerja a Daerah		

	PROGR AM PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHA N DAERA H KAB/K OTA	Persent ase Terlaksa nanya Penunja ng Urusan Pemer intahan	100	%	16,1 96,6 28,7 50	76	%	12,3 60,3 06,0 54	20	%	3,06 3,61 5,76 7	3.4 3	%	563 ,31 0,6 83	31. 3	%	975 ,74 0,2 14	3. 6	%	591 ,72 8,8 82	6.7	%	748 ,42 8,4 24	20	%	2,87 9,20 8,20 3		109 %	15,2 39,5 14,2 57		55 %	Dinas Ten aga Kerj a Dae rah		
	Perenca naan, Pengang garan dan Evaluas i Kinerja Perangki at Daerah	Cakupa n Perenca naan, Pengan ggaran dan Evaluas Kinerja Perang kat Daerah	38	Dok ume n	38,0 00,0 00	12	Dok ume n	14,4 00,0 00	26	Doku men	15,0 00,0 00	0	Dok um en	-	6	Dok ume n	-	1	Doku men	6,2 48, 500	25	Dok um en	2,8 23, 400	26	Dok um en	9,07 1,90 0		147 %	23,4 71,9 00		62 %	Dinas Ten aga Kerj a Dae rah		
	Penyus unan Dokume n Perenca naan	Jumlah Dokume n	10	Dok um en	10,0 00,0 00	4	Dok um en	4,95 5,00 0	6	Doku men	2,50 0,00 0	0	Dok um en	-	2	Dok um en	-	1	Doku men	1,5 76, 500	5	Dok um en	-	6	Dok um en	1,57 6,50 0		159 %	6,53 1,50 0		65 %	Dinas Ten aga Kerj a Dae		

		Perangkat Daerah																												rah					
		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	4	Dokumen	2,000,000	0	Dokumen	-	4	Dokumen	2,000,000	0	Dokumen	-	2	Dokumen	-	1	Dokumen	1,060,500	3	Dokumen	-	4	Dokumen	1,060,500		189%	1,060,500		53%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	2,000,000	0	Dokumen	-	3	Dokumen	2,000,000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	3	Dokumen	1,363,000	3	Dokumen	1,363,000		68%	1,363,000		68%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	2,000,000	0	Dokumen	-	3	Dokumen	2,000,000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1,060,500	2	Dokumen	-	3	Dokumen	1,060,500		189%	1,060,500		53%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		

	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	2,000,000	0	Dokumen	-	3	Dokumen	2,000,000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	3	Dokumen	1,460,400	3	Dokumen	1,460,400		73%	1,460,400		73%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	7	Dokumen	10,000,000	4	Dokumen	4,495,000	3	Dokumen	2,000,000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1,186,000	2	Dokumen		3	Dokumen	1,186,000		169%	5,681,000		57%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8	Dokumen	10,000,000	4	Dokumen	4,950,000	4	Dokumen	2,500,000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1,365,000	3	Dokumen		4	Dokumen	1,365,000		183%	6,315,000		63%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
	Administrasi Keuangan	Cakupan Pelaksanaan	100	%	13,18,1	79	%	10,429,8	20	%	2,320,87	3.9	%	496,35	29.	%	739,39	4	%	478,49	6.0	%	493,16	20	%	2,207,41		121	12,637,2		78	Dinas Tenaga		

	n Perangk at Daerah	aan Administ rasi Keuanga n Perangk at Daerah			73,3 50			13,3 77			7,60 7	7		6,7 35	56		9,2 69			7,6 81	3		5,9 49			9,63 4		%	33,0 11		%	Kerj a Dae rah		
	Penyedi aan Gaji Dan Tunjang an ASN	Tersedia nya Gaji dan Tunjang an ASN	70	Bul an	11,87 1,838 ,350	56	Bul an	9,313 ,538, 517	14	Bula n	2,215 ,257, 507	3	Bul an	496 ,35 6,7 35	5	Bul an	700 ,44 9,2 69	3	Bula n	460 ,24 3,1 81	3	Bul an	462 ,27 5,9 49	14	Bul an	2,119 ,325, 134		96 %	11,43 2,863 ,651		96 %	Dinas Ten aga Kerj a Dae rah		
	Pelaksan aan Penata usaha Dan Pengujia n/Verifik asi Keuang an SKPD	Jumlah Pengelol a Keuang an dan Aset	60	Bul an	1,226 ,335, 000	48	Bul an	1,107 ,287, 360	12	Bula n	100,3 20,00 0	0	Bul an	-	6	Bul an	38, 950 ,00 0	2	Bula n	15, 300 ,00 0	3	Bul an	30, 890 ,00 0	11	Bul an	85,14 0,000		85 %	1,192 ,427, 360		97 %	Dinas Ten aga Kerj a Dae rah		
	Koordin asi Dan Penyusu nan	Jumlah	5	Dok um	10,00	4	Dok um	4,492	1	Doku	2,983	0	Dok um	-	0	Dok um	-	0	Doku	1,2 93,	0	Dok um	-	1	Dok um	1,293		231	5,785		58	Dinas Ten aga Kerj		

		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan		en	0,000		en	,500		men	,000		en			en		men	000		en			en	,000		%	,500		%	a Daerah			
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan	60	Dokumen	10,000,000	48	Dokumen	4,495,000	12	Dokumen	2,317,100	0	Dokumen	-	3	Dokumen	-	1	Dokumen	1,661,500	8	Dokumen	-	12	Dokumen	1,661,500		72%	6,156,500		62%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	211	Pasang	220,500,000	106	Pasang	107,190,000	37	Pasang	56,478,000	0	Pasang	-	37	Pasang	55,800,000	0	Pasang	-	0	Pasang	-	37	Pasang	55,800,000		99%	162,990,000		0%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Pengadaan																													Dinas Ten				

		Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PDH dan Batik	211	Pas ang	220,500,000	106	Pas ang	107,190,000	37	Pasa ng	56,478,000	0	Pas ang	-	37	Pas ang	55,800,000	0	Pasa ng		0	Pas ang		37	Pas ang	55,800,000		99 %	162,900,000		74 %	aga Kerj a Dae rah		
		Adminis trasi Umum Perangk at Daerah	Cakupa n Pelaksan aan Adminis trasi Umum Perangk at Daerah	100	%	1,637,303,400	67.7	%	1,142,765,945	20	%	227,597,120	0	%	-	22	%	65,013,200	2	%	25,819,500	13.6	%	133,685,200	20	%	224,517,900		101 %	1,367,283,845		110 %	Dinas Tenaga Kerj a Dae rah		
		Penyedia an Kompon en Instalasi Listrik/P enerangan Bangun an Kantor	Jumlah Kompon en Instalasi Listrik/P enerangan kantor	45	Ite m	26,500,000	16	Ite m	10,565,722	5	Item	2,021,000	0	Ite m	-	1	Ite m	-	0	Item	-	5	Ite m	1,991,000	5	Ite m	1,991,000		99 %	12,556,722		47 %	Dinas Tenaga Kerj a Dae rah		
		Penyedi	Jumlah																													Dinas Ten			

		aan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan	23	Unit	245,010,000	15	Unit	155,542,000	3	Unit	49,535,160	0	Unit	-	0	Unit	-	1	Unit	-	2	Unit	48,656,000	3	Unit	48,656,000		98%	204,198,000		83%	aga Kerja Daerah		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	60	Bulan	150,000,000	48	Bulan	130,681,826	12	Bulan	35,625,760	0	Bulan	-	6	Bulan	5,429,500	3	Bulan	14,577,000	3	Bulan	15,618,900	12	Bulan	35,625,400		100%	166,307,226		111%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyediaan barang cetakan Dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	60	Bulan	90,000,000	48	Bulan	41,238,650	12	Bulan	17,517,500	0	Bulan	-	6	Bulan	5,783,800	3	Bulan	4,690,500	3	Bulan	6,805,700	12	Bulan	17,280,000		99%	58,518,650		65%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	5468	Bulan	32,240,000	3494	Bulan	17,550,000	1248	Bulan	6,156,000	0	Bulan	-	160	Bulan	800,000	440	Bulan	2,200,000	648	Bulan	3,000,000	1248	Bulan	6,000,000		97%	23,550,000		73%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		

		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bahan Material	25	Item	6,910,400	0	Item	-	29	Item	23,533,700	0	Item	-	10	Item	2,226,500	15	Item	3,982,000	4	Item	17,310,000	29	Item	23,518,500		100%	23,518,500		340%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah orang	3750	Orang	93,000,000	2806	Orang	73,115,165	285	Orang	14,625,000	0	Orang	-	10	Orang	-	143	Orang	-	127.75	Orang	12,916,000	271	Orang	12,916,000		113%	86,031,165		93%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat	145	Kali	989,138,000	69	Kali	714,072,582	8	Kali	74,078,000	0	Kali	-	5	Kali	50,773,400	0	Kali	370,000	4	Kali	22,934,600	8	Kali	74,078,000		100%	788,150,582		80%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah kegiatan	12	Bulan	4,505,000	0	Bulan	-	12	Bulan	4,505,000	0	Bulan	-	1	Bulan	-	9	Bulan	-	3	Bulan	4,453,000	12	Bulan	4,453,000		99%	4,453,000		99%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40	Unit	135,000,000	16	Unit	44,590,000	2	Unit	4,896,760	0	Unit	-	0	Unit	-	2	Unit	-	0	Unit	4,896,000	2	Unit	4,896,000		100%	49,486,000		83%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	40	Unit	135,000,000	16	Unit	44,590,000	2	Unit	4,896,760	0	Unit	-	0	Unit	-	2	Unit		0	Unit	4,896,000	2	Unit	4,896,000		100%	49,486,000		37%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	466,340,000	71	%	224,650,693	20	%	332,623,480	4	%	62,953,948	27	%	85,313,445	6	%	67,403,201	4.6	%	64,759,975	20	%	280,430,569		106%	505,081,262		108%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		

	Penyedi aan Jasa Surat Menyur at	Jumlah meterai	600 0	Bua h	36,00 0,000	315 2	Bua h	18,91 0,000	940	Buah	9,000 ,000	0	Bua h	-	160	Bua h	1,6 00, 000	23	Buah	2,5 00, 000	235	Bua h	4,9 00, 000	940	Bua h	9,000 ,000		100 %	27,91 0,000		78 %	Dinas Tenag a Kerja Daera h		
	Penyedi aan Jasa Komuni kasi,Su mber Daya Air Dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan internet	60	Bul an	128,4 00,00 0	47	Bul an	57,36 3,743	12	Bula n	14,83 2,000	0	Bul an	-	6	Bul an	7,3 05, 750	3	Bula n	1,0 66, 250	3	Bul an	6,1 90, 500	12	Bul an	14,56 2,500		98 %	71,92 6,243		56 %	Dinas Tenag a Kerja Daera h		
	Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor	Jumlah Jasa	60	Bul an	301,9 40,00 0	48	Bul an	148,3 76,95 0	12	Bula n	308,7 91,48 0	3	Bul an	62, 953 ,94 8	3	Bul an	76, 407 ,69 5	3	Bula n	63, 836 ,95 1	3	Bul an	53, 669 ,47 5	12	Bul an	256,8 68,06 9		120 %	405,2 45,01 9		134 %	Dinas Tenag a Kerja Daera h		
	Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan	Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan	60	Bul an	581, 312, 000	48	Bul an	396, 896, 039	12	Bula n	106, 142, 800	1	Bul an	4,0 00, 000	27. 4	%	30, 214 ,30 0	3	Bula n	13, 760 ,00 0		Bul an	49, 097 ,90 0	8	Bul an	97,0 72,2 00		91 %	493, 968, 239		0%	Dinas Tenag a Kerja Daera h		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		PROGRA M PENEMP ATAN TENAG A KERJA	Tenaga Kerja yang ditempa tkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanis me layanan antar kerja dalam wilayah kab/kot a	100	%	800, 000, 000	17. 7	%	141, 334, 000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	%	0	%	-	0		-		0%	141, 334, 000	18 %	Dinas Tenag a Kerja Daera h			
		Pengelol aan Informa si Pasar Kerja	Cakupa n Pengelol aan Informa si Pasar kerja	100 00	ora ng	400,0 00,00 0	600 0	ora ng	70,66 7,000	0	orang		0	ora ng	-	0	ora ng	-	0	Oran g	0	0	Ora ng		0	Ora ng	-		70,66 7,000	18 %	Dinas Tenag a Kerja Daera h		
		Job	Jumlah pencake	100	Ora	400,0	600	Ora	70,66		Oran			Ora			Ora			Oran			Ora			Ora			70,66	18	Dinas Tenag a Kerja		

	Peraturan Perusahaan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam (1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	200	Perusahaan	2,980,000	50	Perusahaan	2,980,000	50	Perusahaan	1,860,000	0	Perusahaan	-	10	Perusahaan	-	0	Perusahaan	50	Perusahaan	1,860,000	50	Perusahaan	1,860,000	100%	4,840,000	162%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industri dan	Jumlah Perusahaan	200	Perusahaan	2,980,000	50	Perusahaan	2,980,000	50	Perusahaan	1,860,000	0	Perusahaan	-	10	Perusahaan	-	0	Perusahaan	50	Perusahaan	1,860,000	50	Perusahaan	1,860,000	100%	4,840,000	162%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		

		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus	8	Kasus	94,138,200	5	Kasus	94,138,200	5	Kasus	1,860,000	0	Kasus	-	0	Kasus	-	0	Kasus	5	Kasus	1,860,000	5	Kasus	1,860,000	100%	95,998,200	102%	Dinas Tenaga Kerja Daerah		
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																						-			-			Dinas Tenaga Kerja Daerah		

		URUSAN PEMERINTAH BIDANG SENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

					%			%			
Predikat Kinerja											
			-			-					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas
Tenaga Kerja Daerah
Kota Tomohon

No.	Indikator	SPM/ stan dar nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catat an Analisis
				Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka			7,5%	7,02- 7,73%	6,55- 7,05%	97,87%	7,02- 7,73%	6,55- 7,05%	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon telah berupaya untuk menjawab beberapa isu-isu strategis yang ada. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut.

- Tingkat pengangguran yang cukup tinggi
- Output pendidikan dan pelatihan kurang memenuhi permintaan pasar
- Rendahnya minat investor asing/dalam negeri untuk perluasan usaha di Kota Tomohon
- Berkurangnya minat pemuda untuk bekerja di sektor pertanian
- Lowongan kerja relatif rendah

Untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon dalam menjawab isu-isu yang dihadapi, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung di luar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon menggunakan metode atau teknik analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)* atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.

1. Kekuatan (*Strengths*)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon dalam mencapai tujuan dan sasaran, adalah :

- a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan;
- b. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normatif dan taat aturan;
- c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi;
- d. Dukungan prangkat organisasi yang solid;
- e. Memiliki pola kerja yang baku.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis adalah :

- a. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim;
- b. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
- c. Alokasi dana oprasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;
- d. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran tugas Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

- a. Adanya Peraturan yang memberikan wewenang kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan tugasnya di bidang Ketenagakerjaan ;
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Dinas Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon yang professional dan handal;
- c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam mengkritisi kinerja Aparatur daerah, merupakan fakta yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon.

4. Tantangan (*Threats*)

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datangnya dari luar system organisasi/eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Bagaimana kita menciptakan Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon;
- b. Ketidak maksimalnya aparatur daerah dalam menjalankan tupoksinya, dan pemahaman tentang Ketenagakerjaan.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing-masing unsur guna menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan yang ada dan menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh organisasi, strategis tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Analisis Penetapan Strategi Organisasi
Matrik SWOT

	Kekuatan	Kelemahan
	<div>a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan;</div> <div>b. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normative dan taat aturan;</div> <div>c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi;</div> <div>d. Dukungan prangkat organisasi yang solid;</div> <div>e. Memiliki pola kerja yang baku.</div>	<div>a. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim;</div> <div>b. Kapasitas sumbe daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;</div> <div>c. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;</div> <div>d. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.</div>
Peluang	Startegi S-T	Startegi W-O
<div>a. Adanya Peraturan yang memberikan wewenang kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan tugasnya di bidang Ketenagakerjaan ;</div> <div>b. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam</div>	<div>1. Membangun system pelayanan prima;</div> <div>2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.</div>	<div>1. Membangun mekanisme prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien untuk mewujudkan pelayanan prima;</div> <div>2. Membekali SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;</div>

<p>penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon yang professional dan handal;</p> <p>c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam mengkritisi kinerja Aparatur daerah, merupakan fakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon.</p>		<p>3. Membangun profesionalisme aparatur Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon untuk mendorong peningkatan kinerja.</p>
Tantangan	Startegi S-T	Startegi W-O
<p>a. Bagaimana kita menciptakan Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon;</p> <p>b. Tidak maksimalnya aparatur daerah Dalam Menjalankan Tupoksinya, dan pemahaman tentang Ketenagakerjaan .</p>	<p>1. Melaksanakan Peningkatan kinerja</p> <p>2. Mendayagunakan system informasi dan mediasi antara aparat Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon dengan instansi terkait ;</p> <p>3. Meningkatkan komitmen dan kinerja aparatur.</p>	<p>1. Menerapkan pola kerja dan pola pembinaan aparat yang serasi dengan potensi yang ada.</p>

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon dengan melihat kebutuhan sepanjang sisa tahun 2022 ini, dilakukan perubahan terhadap anggaran program dan kegiatan yang ada berdasarkan alokasi pagu, tanpa ada pengurangan ataupun penambahan program atau kegiatan. Dilakukan analisa kebutuhan dengan membandingkan program dan kegiatan, indikator capaian, serta pagu anggaran Renja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon tahun 2023 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.3.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3

Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2023 Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah:Dinas Tenaga Kerja

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7,536,553,000					7,586,054,886	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100%	3,387,710,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100%	3,389,484,886	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	38,767,700	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	40,040,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,680,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	3,680,000	

						Daerah		Daerah			
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,755,000	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,500,000	
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,522,000	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11,000,000	
	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,250,700	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,300,000	
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	10,880,000	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	1 Dokumen	10,880,000	

			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA TOMOH ON	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lapo ran	2,970,000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA TOMOH ON	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lapora n	2,970,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOH ON	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lapo ran	3,710,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOH ON	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lapora n	3,710,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA TOMOH ON	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,430,884,7 00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA TOMOH ON	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,430,884,70 0	

	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	KOTA TOMOHON	Jumlah Gaji Dan Tunjangan	12 Bulan	2,324,309,000	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	KOTA TOMOHON	Jumlah Gaji Dan Tunjangan	12 Bulan	2,324,309,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang	12 Pengelola	99,960,000	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang	12 Pengelola	99,960,000	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	3,155,200	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	3,155,200	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen	18 Dokumen	3,460,500	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen	18 Dokumen	3,460,500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	320,439,170	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	320,439,170	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Item	4,042,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Item	4,042,000	

	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Unit	48,200,000	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Unit	48,200,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Bulan	1 Bulan	44,288,770	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Bulan	1 Bulan	44,288,770	
	Penyediaan barang cetakan Dan penggandaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Bulan	1 Bulan	20,800,000	Penyediaan barang cetakan Dan penggandaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Bulan	1 Bulan	20,800,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndan gan yang Disediakan	1040 Buah	6,019,200	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUnd an yang Disediakan	1040 Buah	6,019,200	
	Penyediaan Bahan/Material	KOTA TOMOHON	Jumlah Item Bahan/Material yang Disediakan	1 Item	31,379,200	Penyediaan Bahan/Material	KOTA TOMOHON	Jumlah Item Bahan/Materia l yang Disediakan	1 Item	31,379,200	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	KOTA TOMOHON	Jumlah Tamu	1100 Orang	28,700,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	KOTA TOMOHON	Jumlah Tamu	1100 Orang	28,700,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Kali	128,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Kali	128,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Bulan	1 Bulan	9,010,000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Bulan	1 Bulan	9,010,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOTA TOMOHON	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	481,634,930	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOTA TOMOHON	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	482,137,516	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,800,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,800,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14,422,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14,422,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	456,412,930	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	456,915,516	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOHON	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	115,983,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOHON	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	115,983,500	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	5 Unit 4 unit	105,983,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	5 Unit 4 unit	105,983,500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Gedung	10,000,000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	KOTA TOMOHON	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	40%	72,568,300	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	KOTA TOMOHON	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	40%	72,568,300	
		KOTA TOMOHON	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	61.50 %			KOTA TOMOHON	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	61.50%		
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	KOTA TOMOHON	Cakupan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100%	68,068,300	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	KOTA TOMOHON	Cakupan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100%	68,068,300	

	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	KOTA TOMOHON	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	66,568,300	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	KOTA TOMOHON	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	66,570,000	
	Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	KOTA TOMOHON	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Kali	1,500,000	Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	KOTA TOMOHON	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Kali	1,500,000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	KOTA TOMOHON	Cakupan pembinaan lembaga pelatihan kerja	100%	750,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	KOTA TOMOHON	Cakupan pembinaan lembaga pelatihan kerja	100%	750,000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	KOTA TOMOHON	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	6 Lembaga	750,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	KOTA TOMOHON	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	6 Lembaga	750,000	

	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	KOTA TOMOHON	Cakupan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan swasta	100%	750,000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	KOTA TOMOHON	Cakupan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan swasta	100%	750,000	
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	KOTA TOMOHON	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	6 Lembaga	750,000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	KOTA TOMOHON	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	6 Lembaga	750,000	
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	KOTA TOMOHON	Cakupan pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	100%	1,500,000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	KOTA TOMOHON	Cakupan pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	100%	1,500,000	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	KOTA TOMOHON	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	1,500,000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	KOTA TOMOHON	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	1,500,000	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Cakupan pelaksanaan pengukuran produktifitas tingkat daerah kabupaten/kota	100%	1,500,000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Cakupan pelaksanaan pengukuran produktifitas tingkat daerah kabupaten/ kota	100%	1,500,000	

	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	KOTA TOMOHON	Jumlah Tenaga Kerja pada Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100 Orang	1,500,000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	KOTA TOMOHON	Jumlah Tenaga Kerja pada Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100 Orang	1,500,000	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	KOTA TOMOHON	Persentase Tenaga kerja	100%	1,018,524,700	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	KOTA TOMOHON	Persentase Tenaga kerja	100%	1,060,000,000	
		KOTA TOMOHON	yang ditempatkan (dalam				KOTA TOMOHON	yang ditempatkan (dalam			
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	KOTA TOMOHON	Cakupan pengelolaan informasi pasar kerja	100%	18,524,700	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	KOTA TOMOHON	Cakupan pengelolaan informasi pasar kerja	100%	60,000,000	
	Job Fair/Bursa Kerja	KOTA TOMOHON	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	18,524,700	Job Fair/Bursa Kerja	KOTA TOMOHON	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	60,000,000	
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Cakupan perlindungan pekerja migran indonesia (PMI)	100%	1,000,000,000	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Cakupan perlindungan pekerja migran indonesia (PMI)	100%	1,000,000,000	

	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	KOTA TOMOHON	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	120 Orang	1,000,000,000	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	KOTA TOMOHON	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	120 Orang	1,000,000,000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	KOTA TOMOHON	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	100%	3,057,750,000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	KOTA TOMOHON	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	100%	3,064,000,000	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam(1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Cakupan Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	50 Perusahaan	29,280,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam(1 Satu) Daerah Kabupaten/Kot	KOTA TOMOHON	Cakupan Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	50 Perusahaan	32,500,000	

						a					
	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	27,720,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	30,000,000	
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	50 Perusahaan	1,560,000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	50 Perusahaan	2,500,000	

	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Cakupan tersedianya dokumen rencana tenaga kerja	100%	3,028,470,000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Cakupan tersedianya dokumen rencana tenaga kerja	100%	3,031,500,000	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu)Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Kali	1,490,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu)Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Kali	2,500,000	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah Kasus Perselisihan yang terselesaikan	4 Kasus	1,490,000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Kasus Perselisihan yang terselesaikan	4 Kasus	2,500,000	

						Kabupaten/Kota					
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	1,490,000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	2,500,000	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	KOTA TOMOHON	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1 Kali	3,024,000,000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	KOTA TOMOHON	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1 Kali	3,024,000,000	

	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN	KOTA TOMOHON				URUSAN PEMERINTAH PILIHAN	KOTA TOMOHON				
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KOTA TOMOHON			17,756,000	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KOTA TOMOHON			19,500,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	KOTA TOMOHON	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	17,756,000	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	KOTA TOMOHON	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	19,500,000	
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Cakupan penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/daerah	100%	17,756,000	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Cakupan penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/daerah	100%	19,500,000	
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas	KOTA TOMOHON	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung	1 Dokumen	14,162,000	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas	KOTA TOMOHON	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung	1 Dokumen	15,000,000	

	Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota		Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota		Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan langsung Panas bumi dalam daerah kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3,594,000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan langsung Panas bumi dalam daerah kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4,500,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional menyangkut kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada agenda dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Ketenagakerjaan - Pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan sasaran pembangunan nasional
Visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional. Berikut adalah visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan.
Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, "**Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**". Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 adalah;
 - a. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
 - b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
 - c. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
 - d. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 - e. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
 - f. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
 - g. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
 - h. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
 - i. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
2. Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden poin a, poin b, poin c, poin g, poin h dan poin i. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 tersebut yaitu:
 - a. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - b. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan, dan
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Ketenagakerjaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan:

- a. mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar kerja yang fleksibel;
- b. mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- c. meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
- d. meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;
- e. mewujudkan hubungan industrial dan dialog social ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
- f. mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
- g. mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

2. Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan

Dalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.
- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Govermental) yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program pembangunan dalam satu tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang diuraikan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Tomohon

Tahun 2023

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7,536,553,000				7,586,054,886				
2	0701					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,387,710,000				3,389,484,886				
2	0701	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					38,767,700				40,040,000				
2	0701	2.01	Penyusunan Dokumen	Cakupan Penunjang	Jumlah Dokumen	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	100	2	100	3,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Cakupan Penunjang Pelayanan	100	3,680,000				

			1		Perencanaan Perangkat Daerah	Pelayanan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan	persen	Dokumen	Persen		Umum		n Perangkat Daerah	persen	
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	3,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	4,500,000
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	10,522,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	11,000,000

2	07	01	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	3,250,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	3,300,000
2	07	01	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	10,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	10,880,000
2	07	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 Persen	2,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat	100 persen	2,970,000

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Daerah								t Daerah		
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 Persen	3,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	3,710,000
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,430,884,700					2,430,884,700
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	100 Persen	2,324,309,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	2,324,309,000

2	07	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Pengelola Keuangan	100 Persen	99,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	99,960,000
2	07	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	3,155,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	3,155,200
2	07	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	18 Dokumen	100 Persen	3,460,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat	100 persen	3,460,500

					SKPD											t Daerah		
2	07	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							320,439,170						320,439,170
2	07	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Item	100 Persen	4,042,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	4,042,000
2	07	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit	100 Persen	48,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	48,200,000

2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Bulan	100 Persen	44,288,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	44,288,770
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Bulan	100 Persen	20,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	20,800,000
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1040 Buah	100 Persen	6,019,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	6,019,200

2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1040 Buah	100 Persen	6,019,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	6,019,200
2	07	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Item Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Item	100 Persen	31,379,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	31,379,200
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Tamu	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1100 Orang	100 Persen	28,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	28,700,000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	25 Kali	100 Persen	128,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	128,000,000

2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Bulan	100 Persen	9,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	9,010,000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								481,634,930				482,137,516	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 Persen	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	10,800,000
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 Persen	14,422,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	14,422,000
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 Persen	456,412,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	456,915,516

2	07	01	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							115,983,500					115,983,500	
2	07	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	5 Unit 4 unit	100 Persen	105,983,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	105,983,500
2	07	01	2.0	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Gedung	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	10,000,000

2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								72,568,300					72,570,000
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								68,068,300					68,070,000
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Cakupan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 persen 62 persen	100 Orang	100 Persen	66,568,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	45 persen 62 persen	66,570,000
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan	Cakupan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 persen 62 persen	5 Kali	100 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat	45 persen 62 persen	1,500,000

					dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Produktivitas pada Tahun n									Produktivitas Tenaga Kerja		
2	0703	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									750,000					750,000
2	0703	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Cakupan pembinaan lembaga pelatihan kerja	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 persen 62 persen	6 Lembaga	100 Persen	750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	45 persen 62 persen	750,000	
2	0703	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja									750,000					750,000

2	07	03	2.0	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Cakupan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan swasta	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 persen 62 persen	6 Lembaga	100 Persen	750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	45 persen 62 persen	750,000
2	07	03	2.0	4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil								1,500,000					1,500,000
2	07	03	2.0	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Cakupan pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 persen	50 Perusahaan	n100 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	45 persen	1,500,000
2	07	03	2.0	5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,500,000					1,500,000

2	07	03	2.0	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja pada Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Cakupan pelaksanaan pengukuran produktifitas tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 persen 62 persen	100 Orang 100 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	45 persen 62 persen	1,500,000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							1,018,524,700				1,060,000,000
2	07	04	2.0		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							18,524,700				60,000,000
2	07	04	2.0	03	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	Jumlah kegiatan	Cakupan pengelolaan informasi pasar kerja	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,50 persen	1 kegiatan 100 Persen	18,524,700		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme	80,50 persen	60,000,000

						kab/kota										layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota		
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								1,000,000,000					1,000,000,000
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Cakupan perlindungan pekerja migran indonesia (PMI)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,50 persen	120 Orang	100 Persen	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	80,50 persen	1,000,000,000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								3,057,750,000					3,064,000,000
2	07	05	2.0		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan								29,280,00					32,500,00

				1		yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0					0	
2	07	05	2.0	01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Cakupan pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,50 persen	50 Perusaha	n100 Persen	27,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	80,50 persen	30,000,000
2	07	05	2.0	02	1	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja	Cakupan pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,50 persen	50 Perusaha	n100 Persen	1,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja	80,50 persen	2,500,000

					Perusahaan	Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Bersama	perjanjian kerja bersama							yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)		
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							3,028,470,000				3,031,500,000	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Be rdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerja an)	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Cakupan tersedianya dokumen rencana tenaga kerja	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,50 persen	1 Kali	100 Persen	1,490,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas e Perusahaan yang menerap kan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala	80,50 persen	2,500,000

					ota										Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)		
2	07	05	2.0 2	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Be rdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerja an)	Jumlah Kasus Perselisihan yang Terselesaikan	Cakupan tersedianya dokumen rencana tenaga kerja	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	80,50 persen	4 Kasus	100 Persen	1,490,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas e Perusaha an yang menerap kan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)	80,50 persen	2,500,000

2	07	05	2.0 2	03	Penyelenggara an Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Dokumen	Cakupan tersedianya dokumen rencana tenaga kerja	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,50 persen	5 Dokumen	100 Persen	1,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	80,50 persen	2,500,000
2	07	05	2.0 2	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	Cakupan tersedianya dokumen rencana tenaga kerja	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,50 persen	1 Kali	100 Persen	3,024,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	80,50 persen	3,024,000,000

						Pekerja	Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Pekerja									(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)				
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	29					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL												17,756,000			19,500,000
3	2905					PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN												17,756,000			19,500,000
3	2905	2.01				Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota												17,756,000			19,500,000
3	2905	2.01	01		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan IzinPemanfaatan LangsungPanas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Cakupan penatausahaan izin pemanfaatan langsungpanas bumi dalam daerah kabupaten/dae	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	14,162,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentas e perusahaan pemanfaatan panas bumi	100 persen	15,000,000			

					Kabupaten/Kota			rah							yang memiliki ijin di kab/kota		
3	29052.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penatausahaan izin pemanfaatan langsungpanas bumi dalam daerah kabupaten/daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 persen	2 Dokumen	100 Persen	3,594,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100 persen	4,500,000	
TOTAL											7,554,309,000	7,605,554,886					

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini:

Tabel. 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu indikatif	Sumber Dana
2				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7,536,553,000	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		3,387,710,000	APBD
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		38,767,000	APBD
	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,680,000	APBD
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,755,000	APBD
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,522,000	APBD
	d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,250,700	APBD
	e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10,880,000	APBD
	f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,970,000	APBD
	g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,710,000	APBD
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,430,884,700	APBD
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,324,309,000	APBD
	b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99,960,000	APBD
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3,155,200	APBD
	d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3,460,500	APBD
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		320,439,170	APBD
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,042,000	APBD
	b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,200,000	APBD
	c.	Penyediaan bahan Logistik Kantor	44,288,770	APBD
	d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,800,000	APBD

	e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,091,200	APBD
	f.	Penyediaan Bahan Material	31,379,200	APBD
	g.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28,700,000	APBD
	h.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128,000,000	APBD
	i.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9,010,000	APBD
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		418,634,930	APBD
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,800,000	APBD
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	14,422,000	APBD
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456,412,930	APBD
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		115,983,500	APBD
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105,983,500	APBD
	b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000	APBD
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		72,568,300	APBD
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		68,068,300	APBD
	a.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	66,568,300	APBD
	b.	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Swasta	1,500,000	APBD
2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		750,000	APBD
	a.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	750,000	APBD
3.	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		750,000	APBD
	a.	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	750,000	APBD
4.	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		1,500,000	APBD
	a.	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	1,500,000	APBD
5.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1,500,000	APBD
	a.	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,500,000	APBD
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		1,018,524,700	APBD
1.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		18,524,700	APBD

	a.	Job Fair/Bursa Kerja	18,524,700	APBD
2.	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		1,000,000,000	APBD
	a.	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	1,000,000,000	APBD
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		3,057,750,000	APBD
1.	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 daerah Kab/Kota		29,280,000	APBD
	a.	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	27,720,000	APBD
	b.	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	1,560,000	APBD
2.	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		3,028,470,000	APBD
	a.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja,dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu)Daerah Kabupaten/Kota	1,490,000	APBD
	b.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,490,000	APBD
	c.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	1,490,000	APBD
	d.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3,024,000,000	APBD
5.	PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		17,756,000	APBD
1.	Kegiatan Penatausahaan izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kab/Kota		17,756,000	APBD
	a.	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	17,756,000	APBD
	c.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	17,756,000	APBD

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan dan keterbatasan anggaran, adalah sebagai berikut:

- Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas dan Daya saing SDM dan Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, adalah program yang ditujukan untuk mempercepat pengurangan tingkat Pengangguran. Program tersebut adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, dan Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.

Program-program tersebut merupakan program yang ditujukan untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran yang masih tinggi di Daerah Kota Tomohon.

- Jika keterbatasan atau ketidaktersediaan anggaran untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, dan Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, maka berpengaruh langsung pada Tingkat Pengangguran yang ada di Kota Tomohon
- Sebagian Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja ini diusulkan untuk dibiayai dengan DAU, maka mengacu pada pengalaman Tahun 2022 yang sementara dilaksanakan dimana operasional untuk kegiatan tersebut sangat terbatas, hendaknya dialokasikan dana penunjang operasional dari DAU.
- Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

- Dalam Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon Tahun 2023 telah ditetapkan Program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026.
- Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon Tahun 2023 harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan Rencana Kerja dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon.

- Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kota Tomohon, keberadaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon Tahun 2023 harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- Hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon Tahun 2023, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- Sehubungan dengan sebagian dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon, diusulkan untuk dibiayai oleh Pemerintah Pusat dalam Dana Alokasi Umum.
- Dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS sampai dalam P-ABPD harus mengacu pada Rencana Kerja ini agar terciptanya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi serta capaian kinerja Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana dalam Prioritas Unggulan Walikota dan wakil Walikota Tomohon yang akan dituangkan dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021- 2026.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA
TOMOHON

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Selanjutnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. **Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 didasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Maksud:

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1

(satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah bertujuan :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah tahun 2023.
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon, proses penyusunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon,

keterkaitan antara Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon Tahun Lalu dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Kota Tomohon.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022

2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu,

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut kami paparkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sbb;
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu kasus tindak kekerasan yang terjadi dan ditangani oleh P2TP2A sebanyak hampir 60 kasus dari rencana 25 kasus;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sbb;
 - Masih terdapat kendala di masyarakat yang tidak mau melaporkan kasus-kasus yang terjadi disebabkan berbagai faktor salah satunya tidak mau aib dikeluarkan diketahui oleh orang lain,
 - Koordinasi dari pihak terkait dalam hal perencanaan baik fisik maupun keuangan harus lebih ditingkatkan
 - Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin marak terjadi sehingga membutuhkan penanganan dan perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak;
 - Sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-undangan mengenai Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak harus lebih dioptimalkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sosial yang ditimbulkan akibat tindak kekerasan.
 - Terdapat program dan kegiatan yang belum secara spesifik dilaksanakan disebabkan Nomenklatur Dinas pada saat ini belum menyesuaikan dengan Nomenklatur Urusan Pemberdayaan yang update.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD;
 - Target capaian Renstra tidak semuanya tercapai karena anggaran yang tidak cukup menyebabkan Program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai prioritas kebutuhan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - Agar Tim APBD memberikan anggaran yang proposional kepada Dinas PP-PAD karena pembangunan manusia sangat penting untuk keberhasilan pembangunan daerah..

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2022 mengacu pada APBD Dinas PP-PAD yang sudah disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 7); dan sesuai Revisi RENSTRA PD adalah sebagai berikut

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPP-PAD dan Pencapaian Renstra DPP-PAD
sampai dengan Tahun 2022

SASARAN	BIDANG URUSAN PEMERI NTAHA N DAN PROGR AM PRIORI TAS PEMBA NGUNA N DAERA H	Indikato r Kinerja Program (Outcom e)Kegiat an/Kegi atan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022 yang dievaluasi			Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2022			cat ata n
			Targe t	Satu an	Rp.	Target	Satua n	Rp.	Targ et	Satu an	Rp.	Targ et		Rp.	Targ et	Sat uan	Rp.	
	PROGR AM PENGAR US UTAMA AN GENDE R DAN PEMBE RDYAA N PEREM PUAN	Persenta se ARG pada belanja langsung APBD	80%	%	172,63 9,293		%		75%	%	21,149, 000	75%	%	14,170, 350	76 %	%	35,319, 350	
		Indeks Pemban gunan Gender	99,41 %	%			%		99.2 9%	%		99,2 9	%		99. 91	%		
		Indeks Pemberd ayaan Gender (IDG)	87,32	%			%		85.1 7%	%		85,1 7	%		86. 59	%		
		Partisipa	37	%			%		37%	%		37%	%		37	%		

		si angkata n kerja perempu an																	
		Presenta se Partisipa si Perempu an di Lembaga Pemerin tah	17,06	%			%		17.0 1%	%			17,0 1 %		%			17, 01	%
		Proporsi Kursi yang diduduki perempu an di DPR	35	%			%		35%	%			35%		%			35 %	%
		Partisipa si Perempu an di Lembaga Swasta	77,01	%			%		76.7 0%	%			76,7 %		%			76, 7%	%
	KEGIAT AN PELEMB AGAAN PENGAR USUTA MAAN GENDE R (PUG) PADA	Jumlah lembaga pemerint ah tingkat daerah kabupate n/kota yang telah	170	lemb aga	143,95 9,262	lemba ga		71	lemb aga	3,400,00 0	71	lemb aga	14,170, 350	142	lem bag a	17,570, 350			

	LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	dilatih PUG																
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarus-tamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	5	Dokumen	143,959,262		Dokumen		5	Dokumen	3,400,000	1	Dokumen	14,170,350	6	Dokumen	17,570,350	
	KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK,	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang	5	lembaga	28,680,031		lembaga		1	lembaga	17,749,000		lembaga		1	lembaga	17,749,000	

	HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan																
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	5	dokumen	28,680,031		dokumen		1	dokumen	17,749,000	0	dokumen		1	dokumen	17,749,000	

	PROGR AM PERLIN DUNGA N PEREM PUAN	Rasio Kekeras an Terhada p Perempu an Termasu k TPPO	0.02 %	%	190,83 6,650		%			%	74,654, 500	0.03 %	%	306,00 3,171	-	%	380,657 ,671	
		Persenta se Perempu an Korban Kekeras an dan TPPO yang Mendap at Layanan Kompre hensif (SPHPN dan Simfoni)	100	%			%			%		100	%		-	%	-	
		Persenta se Lembaga Penyedi a layanan bagi perempu an korban kekerasa	100	%			%			%		100	%		-	%	-	

		n dan TPPO yang sesuai standar (%)																
	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PIHAK LINGKUP DAERAH PROPINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah kebijakan/program pencegahan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	kebijakan / program+E22	140,928,528		kebijakan / program+E22			kebijakan / program+E22	36,544,000	1	kebijakan / program+E22	68,181,642	1	kebijakan/program+E22	104,725,642	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan	5	dokumen	140,928,528		dokumen			dokumen	36,544,000	1	dokumen	68,181,642	100	dokumen	104,725,642	

	Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	n,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota																
	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	25	lembaga	464,697,513		lembaga			lembaga	38,110,500	25	lembaga	161,015,485	25	lembaga	199,125,985	

	T DAERA H PROVIN SI DAN LINTAS DAERA H KABUPA TEN/ KOTA																	
	Penyedia an Layanan Pengadu an Masyara kat bagi Perempu an Korban Kekeras an Kewena ngan Kabupat en/Kota	Jumlah Perempu an Korban Kekerasa n Tingkat Kabupat en/Kota Mendapa tkan Layanan Pengadu an	25	orang	195,62 7,346		orang			orang	38,110,5 00	25	orang		25	ora ng	38,110, 500	
	<u>Koordin</u> <u>asi dan</u> <u>Sinkroni</u> <u>sasi</u> <u>Pelaksan</u> <u>aan</u> <u>Penyedia</u> <u>an</u> <u>Layanan</u> <u>Rujukan</u>	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengadu an yang Memerlu kan Koordina si dan	1	layan an	269,07 0,167		layan an			layan an		1	layan an	161,01 5,485	1	laya nan	161,015 ,485	

<u>Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</u>	Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																
PENGUATAN DAN PEMBANGUNAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2	lemb sga	338,45 5,055		lemb sga			lemb sga	0	1	lemb sga	76,806, 044	1	lemb sga	76,806, 044	

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	100	orang	289,809,011		orang			orang		50	orang	76,806,044	50	orang	76,806,044	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar	1	dokumen	48,646,044		dokumen			dokumen		1	dokumen	-		dokumen	0	

	ngan Kabupat en/Kota																	
		Kabupat en/ Kota																
	PROGR AM PENING KATAN KUALIT AS KELUAR GA	Rasio Keluarga yang memaha mi Kesetara an dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)	30%	%	1,120, 635,43 0		%			%	320,689 ,850	15%	%	742,89 6,400	0	%	1,063,5 86,250	
	PENING KATAN KUALIT AS KELUAR GA DALAM MEWUJ UDKAN KESETA RAAN GENDE R (KG) DAN HAK ANAK TINGKA T DAERA	Jumlah kader perempu an tingkat kabupat en/kota yang sudah dilatih	355	oran g	799,94 5,580		orang			oran g	320,689 ,850		oran g	742,89 6,400	-	ora ng	1,063,5 86,250	

	H KABUPA TEN / KOTA																	
	Pengemb angan Kegiatan Masyara kat untuk Peningk atan Kualitas Keluarga Kewena ngan Kabupat en/Kota	Jumlah Laporan Pengemb angan Kegiatan Masyara kat untuk Peningka tan Kualitas Keluarga Kewenan gan Kabupat en/ Kota	13	lapor an	799,94 5,580		lapor an			lapor an	320,689 ,850	9	lapor an	742,89 6,400	4	lapo ran	1,063,5 86,250	
	Peningk atan Kapasita s Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningk atan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupat	Jumlah sumberd aya Lembaga Penyedia Layanan Peningka tan Kualitas Keluarga yang mendapa t Peningka tan Kapasita	100	orang			orang		0	orang		50	orang		50	ora ng	0	

	en/Kota	s Keluarga Kewenan gan Kabupat en/ Kota																
	PROGR AM PENGEL OLAAN SISTEM DATA GENDE R DAN ANAK	Persenta se Perangk at Daerah/ Lembaga Penyedi a Data Gender dan Anak yang diperbah arui secara berkala	100	%	17,180 ,000		%			%	11,698, 500	100 %	%	11,097, 550	1	%	22,796, 050	
	PENGU MPULA N, PENGOL AHAN ANALISI S DAN PENYAJ IAN DATA GENDE R DAN ANAK DALAM KELEM	Jumlah Dokume n Data Gender dan Anak Kabupat en/Kota yang Tersedia	2	doku men	17,180 ,000		doku men			doku men	11,698, 500	1	doku men	11,097, 550	1	dok um en	22,796, 050	

	BAGAAN DATA DI TINGKA T DAERA H KABUPA TEN / KOTA																	
	Penyedia an Data Gender dan Anak di Kewena ngan Kabupat en/Kota	Jumlah Dokume n DataGen der dan Anak Kabupat en/Kota yang Tersedia	2	doku men	17,180, 000		doku men			doku men	11,698,5 00	1	doku men	11,097, 550	1	dok ume n	22,796, 050	
	PROGR AM PEMEN UHAN HAK ANAK (PHA)	Persenta se Perangk at Daerah/ Lembaga yang difasilita si untuk mendap atkan Kota Layak Anak	100%	%	1,090, 944,44 1		%			%	845,255 ,341	100 %	%	164,11 7,820	1	%	1,009,3 73,161	
		Proporsi perempu an usia	28%	%			%			%		33%	%		0	%	-	

		20-24 tahun menikah < usia 18 tahun																
	PELEMBAGAAN PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	54	lembaga	172,91 9,200		lembaga		54	lembaga	471,345 ,641	27	lembaga	127,30 8,690	81	lembaga	598,654 ,331	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	5	dokumen	172,91 9,200		dokumen			dokumen	471,345, 641	1	dokumen	127,30 8,690	1	dokumen	598,654 ,331	

	en/Kota	Kewenan gan Kabupat en/Kota																
	PENGUA TAN DAN PENGE MBANG AN LEMB GA PENYED IA LAYANA N PENING KATAN KUALIT AS HIDUP ANAK KEWEN ANGAN KABUPA TEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan anak yang mendap at pelatiha n	3	lemb aga	72,769 ,900		lemb aga			lemb aga	373,909 ,700	1	lemb aga	36,809, 130	2	lem bag a	410,718 ,830	
	Penyedia an Layanan Peningk atan Kualitas Hidup Anak Kewena ngan	Jumlah Anak yang Mendapa tkan Layanan Peningka tan Kualitas Hidup	264	anak	72,769, 900		anak			anak	373,909, 700	132	anak	36,809, 130	132	ana k	410,718 ,830	

	Kabupat en/Kota	Anak Kewenan gan Kabupat en/Kota																
	PROGR AM PERLIN DUNGA N KHUSUS ANAK	Persenta se anak korban kekerasa n yang ditangan i instansi terkait Kota	100%	%			%		100 %	%	197,317 ,700	100 %	%	145,76 7,534	2	%	343,085 ,234	
	Pencega han Kekeras an Terhada p Anak yang melibat kan para Pihak Lingkup Daerah Kabupat en / Kota	Jumlah media massa (cetak, elektron ik) yang bekerja sama dengan pembka b /kota (dinas pppa) untuk melakuk an KIE pencega han kekerasa n terhadap anak	20	medi a	-		medi a			medi a		1	medi a	44,746, 934	1	me dia	44,746, 934	

	<u>Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</u>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	dokumen			dokumen			dokumen		1	dokumen	44,746,934	1	dokumen	44,746,934	
	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	10	%	389,256,080		%			%	197,317,700	5	%	101,020,600	5	%	298,338,300	

	H KABUPA TEN / KOTA																	
	Penyedia an Layanan Pengadu an Masyara kat bagi Anak yang Memerlu kan Perlindu ngan Khusus Tingkat Daerah Kabupat en/Kota	Jumlah Anak yang Memerlu kan Perlindu ngan Khusus Mendapa tkan Layanan Pengadu an Kewenan gan Kabupat en/Kota	50	orang	389,25 6,080		orang			orang	197,317, 700	25	orang		25	ora ng	197,317 ,700	
	Koordin asi dan Sinkroni sasi Pelaksan aan Pendam pingan Anak yang Memerlu kan Perlindu ngan Khusus	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengadu an yang dan Sinkroni sasi bagi Anak yang Memerlu kanPerlindungan Khusus	50	orang			orang			orang		25	orang	101,02 0,600	25	ora ng	101,020 ,600	

	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota																
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring AntarLembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen			dokumen			dokumen		0	dokumen		1	dokumen		0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	%	5,134,711,380		%			%	8,791,274,579	100%	%	2,742,085,620	1	%	11,533,360,199	

	TEN/KOTA																	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	10	dokumen	-		dokumen			dokumen	5,233,000	2	dokumen	10,835,160	1	dokumen	16,068,160	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen			dokumen			dokumen	5,233,000	2	dokumen	7,229,290	2	dokumen	12,462,290	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	koordinasi/laporan			koordinasi/laporan			koordinasi/laporan		8	koordinasi/laporan	3,605,870	2	koordinasi/laporan	3,605,870	

	Adminis- trasi Keuang- an Perangk- at Daerah	Terlaks- nanya Adminis- trasi Keuanga- n Perangk- at Daerah	60	Bula- n	3,601, 382,16 6		Bula- n			Bula- n	6,894,2 70,515	12	Bula- n	2,132,9 99,674	6	Bul- an	9,027,2 70,189	
	Penyedia- an Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,200	orang	3,439,2 98,966		orang			orang	6,741,24 6,115	240	orang	2,075,9 12,649	120	orang	8,817,1 58,764	
	<u>Penyedia- an Administ- rasi Pelaksanaan Tugas ASN</u>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administ- rasi Pelaksanaan Tugas ASN	180	doku- men	162,08 3,200		doku- men			doku- men	143,833, 200	36	doku- men	55,203, 275	18	dok- ume- n	199,036 ,475	
	Koordin- asi dan Penyusu- nan Laporan Keuanga- n Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuanga- n Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	10	lapor- an			lapor- an			lapor- an	6,701,70 0	2	lapor- an	1,883,7 50	2	lapo- ran	8,585,4 50	

		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20	dokumen			dokumen			dokumen	2,489,500	4	dokumen		4	dokumen	2,489,500	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	35,880,000		%			%	-		%	35,880,000	-	%	#VALUE!	
	<u>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</u>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	60	laporan	35,880,000		laporan			laporan		12	laporan	35,880,000	12	laporan	35,880,000	

		pada SKPD																
	Adminis- trasi Kepega- waian Perangk- at Daerah	Terlaksa- nanya kegiatan dalam rangka peningk- atan kompete- nsi ASN	100	%	129,77 0,000		%			%	129,770 ,000		%	57,243, 500	-	%	187,013 ,500	
	<u>Pengada- an Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengk- apannya</u>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengka- pan	150	paket	129,77 0,000		paket			paket	129,770, 000	30	paket	37,089, 500	-	pak- et	166,859 ,500	
	<u>Pendidik- an dan Pelatiha- n Pegawai Berdasa- rkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut- i Pendidik- an dan Pelatihan</u>	Jumlah Pegawai Berdasar- kan Tugas dan Fungsi yang Mengikut- i Pendidik- an dan Pelatihan	1	orang			orang			orang		1	orang	8,468,0 00	-	ora- ng	8,468,0 00	
	<u>Bimbing- an Teknis Impleme- ntasi</u>	Jumlah aparatur yang mengiku- ti bimtek	3	orang	-		orang			orang		3	orang	11,686, 000	-	ora- ng	11,686, 000	

	<u>Peraturan Perundang- Undangan</u>																	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	58,898,900		%			%	424,475,350		%	126,683,450	-	%	551,158,800	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Pengerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pengerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40	paket	10,676,000		paket			paket	10,676,000	8	paket	3,505,350	4	paket	14,181,350	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	paket			paket			paket	125,595,000	10	paket	14,336,000	-	paket	139,931,000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	paket	18,794,900		paket			paket	18,794,900	5	paket	6,563,800	5	paket	25,358,700	
	<u>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</u>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	dokumen			dokumen			dokumen	6,150,000	1	dokumen	1,418,800	1	dokumen	7,568,800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	29,428,000		Laporan			Laporan	29,428,000	12	Laporan	12,599,500	12	Laporan	42,027,500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	laporan			laporan			laporan	233,831,450	24	laporan	88,260,000	1	laporan	322,091,450	

	Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediak an	6	pake t	11,697 ,600		paket			pake t	74,915, 000	3	pake t	11,953, 000	-	pak et	86,868, 000	
	Pengada an Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediak an	15	paket	11,697, 600		paket			paket	74,915,0 00	3	paket	11,953, 000	-	pak et	86,868, 000	
	Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	Tersedia nya jasa yang menduk ung pelaksan aan pemerin tahan di perangk at daerah	100	oran g	1,297, 082,71 4		orang			oran g	740,185 ,950	100	oran g	258,05 4,997	-	ora ng	998,240 ,947	
	Penyedia an Jasa Surat Menyura t	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyura t	100	lapor an	447,59 8,324		lapor an			lapor an	19,741,0 00	12	lapor an	10,200, 000	12	lapo ran	29,941, 000	

	Penyedia an Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedi ak an	100	lapor an	2,975,000		lapor an			lapor an	2,975,000	12	lapor an	11,683,468	12	lapo ran	14,658,468	
	Penyedia an Jasa Peralata n dan Perlengk apan Kantor	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedi ak an	100	lapor an	-		lapor an			lapor an	4,245,000	12	lapor an	4,820,000	12	lapo ran	9,065,000	
	Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disedi ak an	100	lapor an	846,509,390		lapor an			lapor an	713,224,950	12	lapor an	231,351,529	12	lapo ran	944,576,479	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang ada di Perangkat Daerah	100	%			%			%	522,424,764	100	%	108,435,839	-	%	630,860,603	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	unit			unit			unit	261,212,382	1	unit	65,005,839	6	unit	326,218,221	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	15	unit			unit			unit	261,212,382	3	unit	43,430,000	3	unit	304,642,382	

	Perizina n Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n	dibayark an Pajak dan Perizinan nya																
					5,134, 711,38 0						8,791,2 74,579			2,742,0 85,620			10,047, 489,718	
					2,592, 235,81 4						1,470,7 64,891			1,384,0 52,825			2,070,7 64,891	
					7,726, 947,19 4						10,262, 039,470			4,126,1 38,445			12,118, 254,60 9	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan PD memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja DPP-PAD dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kota Tomohon menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian provinsi Sulawesi Utara dan nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :

Gambar 2.1

IPG Menurut Kab/kota Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (Persen)				
	2021	2020	2019	2018	2017
Bolaang Mongondow	88.41	88,29	88,36	88,03	87,72
Minahasa	96.02	96,53	96,76	96,48	96,22
Kepulauan Sangihe	95.94	95,23	95,35	96,10	96,10
Kepulauan Talaud	98.09	97,90	97,67	97,64	97,18
Minahasa Selatan	88.78	88,74	88,81	89,31	88,53
Minahasa Utara	96.24	96,40	96,42	96,80	96,26
Bolaang Mongondow Utara	87.02	86,77	86,92	86,19	85,46
Kepulauan Sitaro	88.87	88,40	88,43	88,28	87,64
Minahasa Tenggara	92.08	91,88	91,87	92,21	91,81
Bolaang Mongondow Selatan	80.09	79,70	79,87	79,39	78,34
Bolaang Mongondow Timur	90.98	90,84	90,75	90,51	90,50
Kota Manado	96.41	96,23	96,28	96,07	95,96
Kota Bitung	94.56	94,19	94,23	95,01	94,87
Kota Tomohon	98.95	98,94	98,98	99,20	98,98
Kota Kotamobagu	95.38	95,37	95,42	95,13	94,78
Sulawesi Utara	94.61	94,42	94,53	94,79	94,78
Indonesia	91.27	91.06	91,07	90,99	90,96

Dihitung berdasarkan komponen pembentuk :

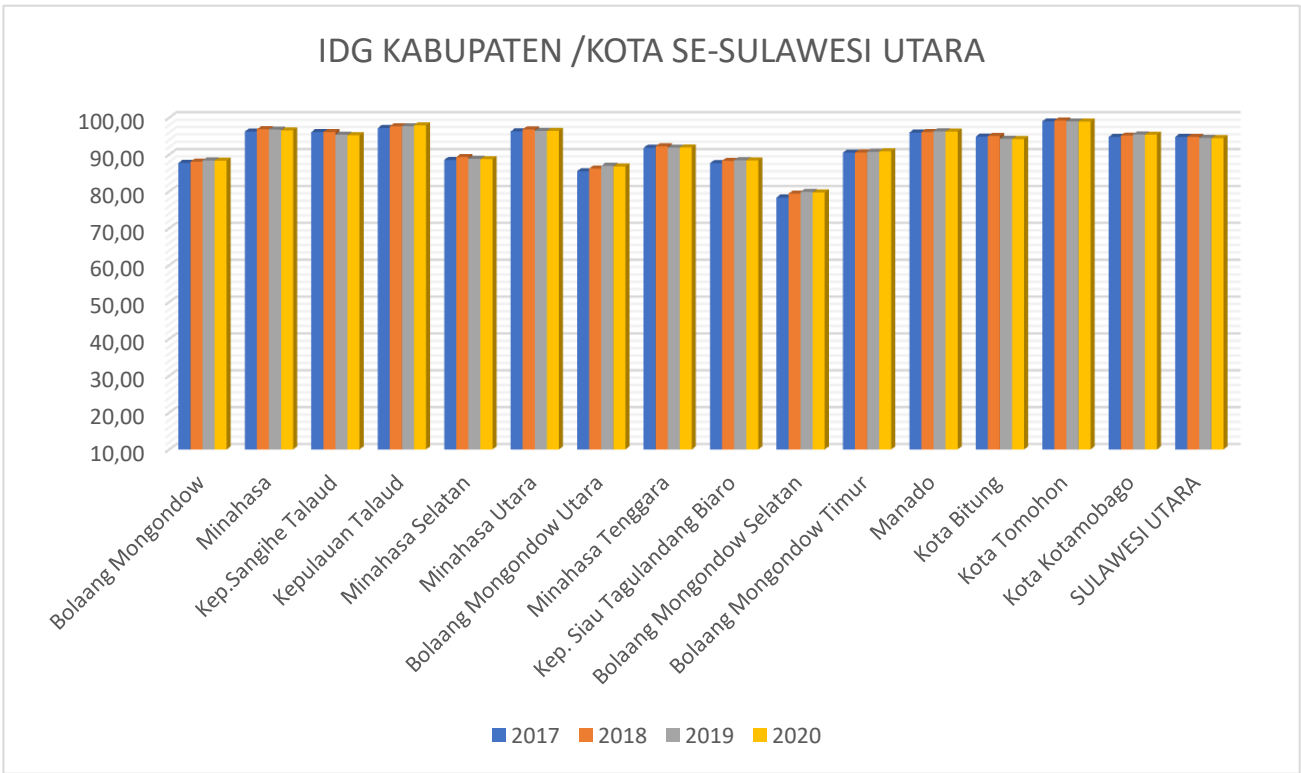
- Angka Harapan Hidup
- Harapan Lama Sekolah
- Rata rata lama sekolah
- Pengeluaran Per Kapita

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2019

Dilihat capaian IPG Kota se Sulawesi Utara, menunjukan terdapat kesenjangan antar kota. Kota Tomohon merupakan kota dengan IPG tertinggi sedangkan Bolaang Mongondow Selatan capaian IPGnya rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2

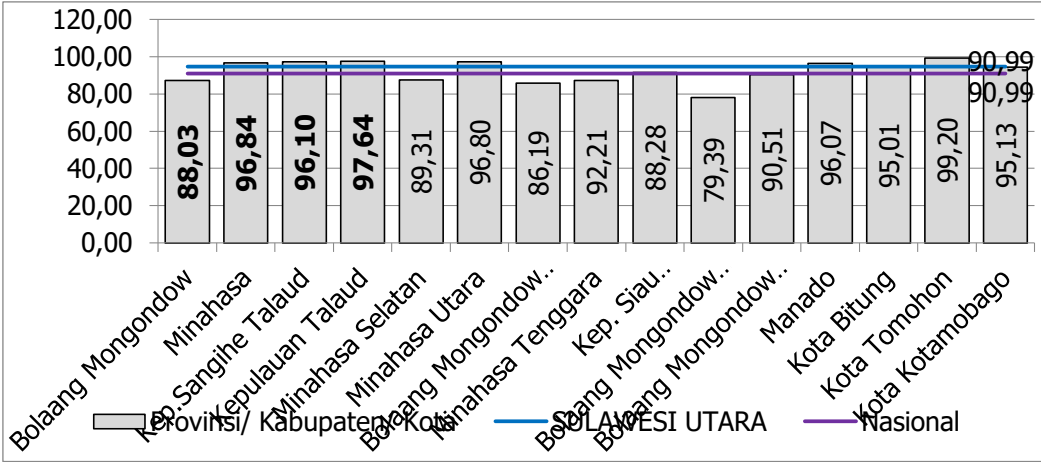
Grafik Persandingan capaian IPG Kota se Provinsi Sulawesi Utara dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional.



Jika diperbandingkan dengan provinsi lain di sekitar Sulawesi Utara menunjukan capaian Provinsi Sulawesi Utara paling baik. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :

Gambar 2.3

Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Sulut dengan IPG Provinsi Lainnya dan IPG Nasional.



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2019.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Sulawesi Utara pada tingkat provinsi paling tinggi atau ranking 1, berada di atas rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan yang baik naik dari tahun 2014. Kenaikan ini antara lain dikarenakan makin terbukanya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang cukup tinggi ranking 4 nasional. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.4

IDG Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/kota 2018-2021

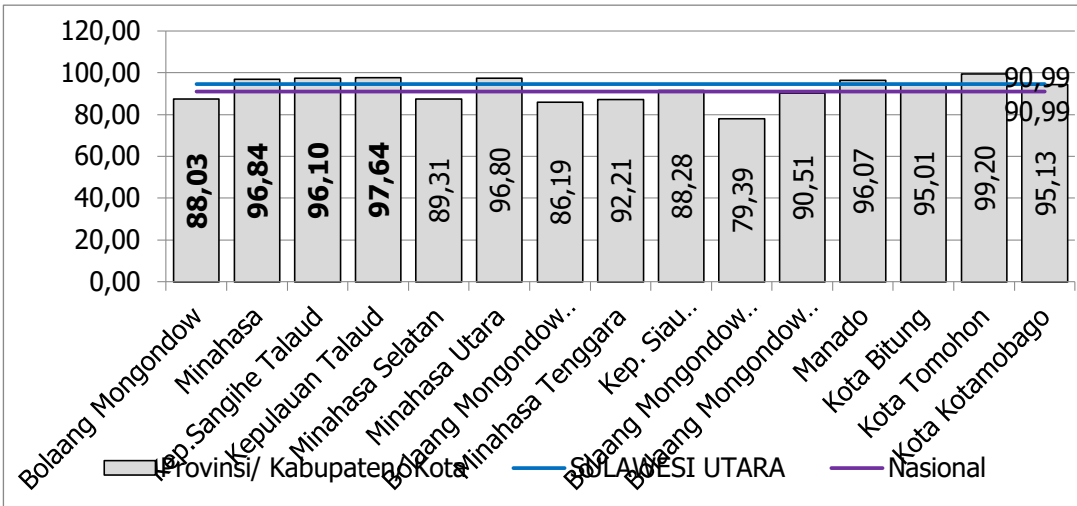
Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (Persen)				
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2021	2020	2019	2018	2017
Bolaang Mongondow	77.36	77,77	78,05	70,64	69,91
Minahasa	87.29	87,05	87,63	82,96	82,42
Kepulauan Sangihe	61.32	59,91	61,38	66,00	73,01
Kepulauan Talaud	68.46	68,44	68,59	58,86	52,11
Minahasa Selatan	77.59	78,34	76,20	76,53	75,10
Minahasa Utara	63.95	64,60	67,40	76,74	77,48
Bolaang Mongondow Utara	60.61	63,79	61,99	64,90	64,93
Kepulauan Sitaro	74.47	74,89	74,53	73,90	73,05
Minahasa Tenggara	80.11	79,92	78,46	79,86	79,28
Bolaang Mongondow Selatan	71.51	68,16	72,22	67,98	67,86
Bolaang Mongondow Timur	70.59	72,48	73,06	66,08	64,41
Kota Manado	84.29	84,67	83,96	83,18	81,00
Kota Bitung	68.84	68,84	65,15	73,00	73,25
Kota Tomohon	83.70	82,91	81,86	83,23	82,32
Kota Kotamobagu	66.79	66,42	66,93	69,33	57,48

Sulawesi Utara	79.07	78,98	79,10	80,91	82,37
INDONESIA	76.26	75.57	75,24	72,10	71,74

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2019.

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Utara, maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak tidak jauh berbeda. Kabupaten Minahasa, Kota Manado dan Kota Tomohon memiliki angka di atas provinsi, hanya Bolaang Mongondow Utara iyang memiliki angka dibawah terendah, Beberapa penyebab yangnampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

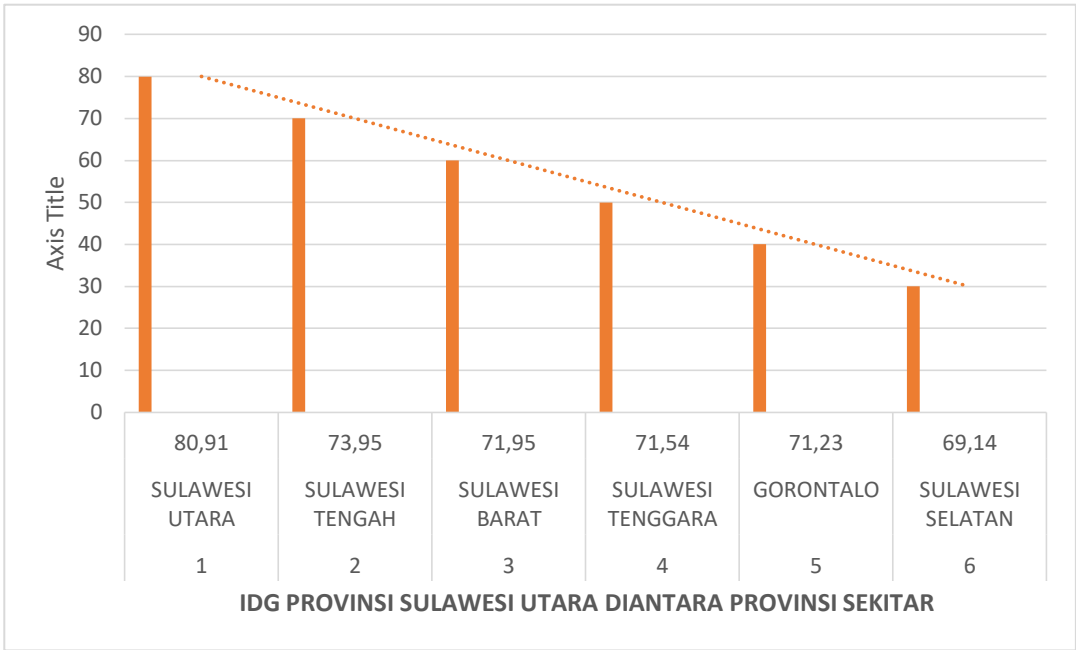
Gambar 2.5
IDG Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten Kota 2019



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2019

Jika diperbandingkan dengan provinsi sekitar Sulawesi Utara (Pulau Sulawesi), maka nampak posisi provinsi Sulawesi Utara berada paling atas bahkan lebih tinggi dari IDG Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.6
IDG Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sekitar 2020 dan 2021



PROVINSI / KAB / KOTA	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)		RANGKING IDG	
	2020	2021	2020	2021
KALIMANTAN TENGAH	82.41	82.08	1	1
SULAWESI UTARA	78.98	79.07	2	2
MALUKU UTARA	77.28	78.59	3	3
INDONESIA	75.57	76.26		

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2019

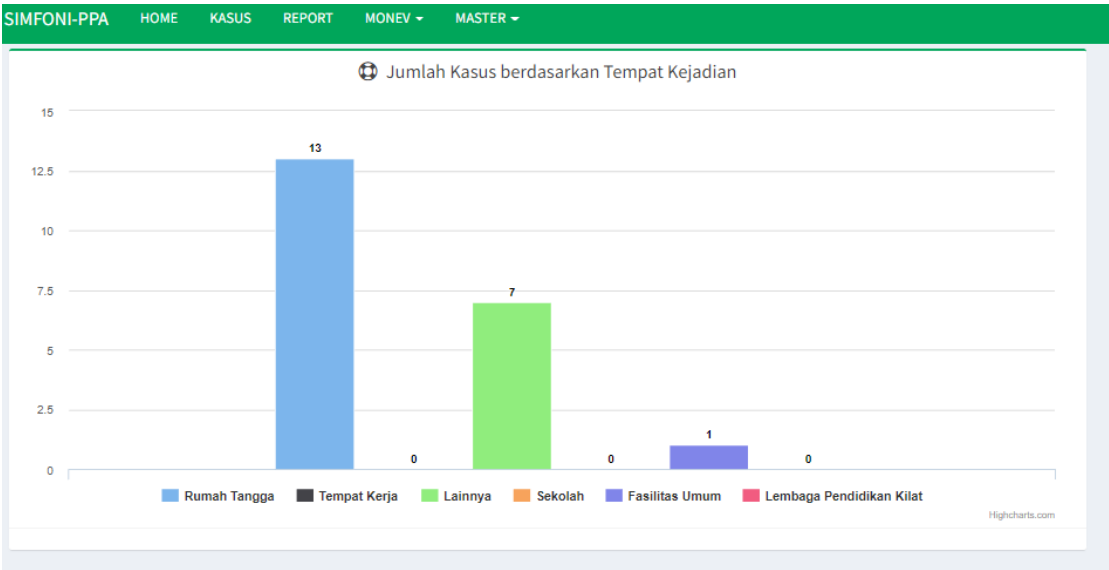
2. Perlindungan Hak Perempuan

Dibentuk dan difungsikannya lembaga *ad hoc*, seperti Kelompok Kerja (Pokja) PUG serta Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPO), mempercepat (akselerasi) pelaksanaan PUG/PPRG pada Dinas PPP-AD Kota Tomohon dan merupakan capaian perlindungan terhadap hak perempuan.

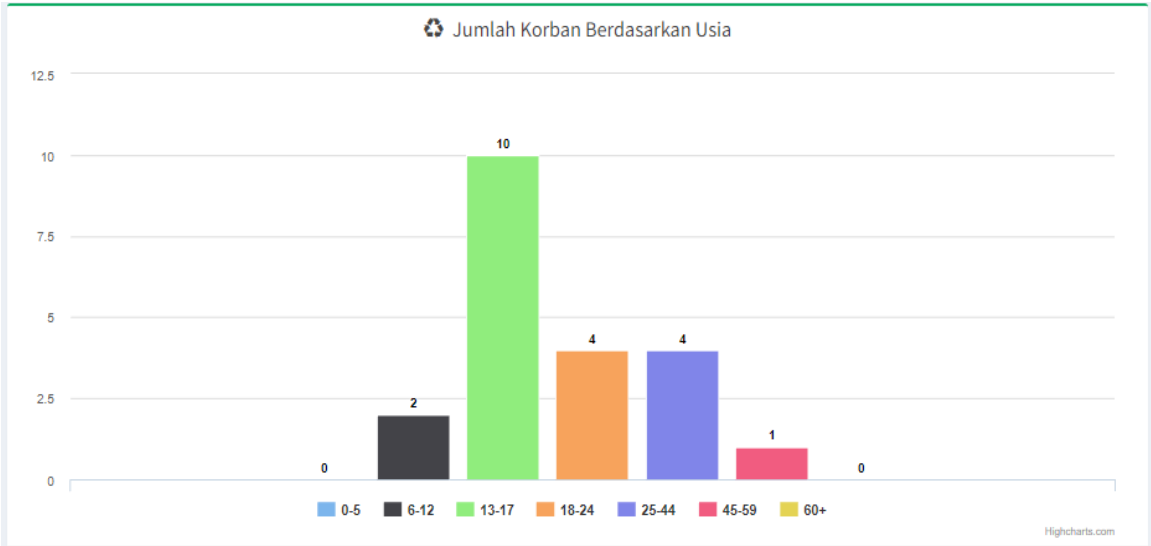
3. Perlindungan Anak

Dibentuk dan difungsikannya lembaga-lembaga pelayanan korban kekerasan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan ANAK (P2TP2A), Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Anak disebabkan karena masih terdapat kekerasan terhadap anak dan berdasarkan data Kepolisian bagian UPPA maupun Polsek se-Kota Tomohon dan P2TP2A Kota Tomohon terdapat 21 kasus terhadap anak yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual selain kekerasan fisik yang juga marak terjadi

Gambar 2.7
Statistik Kekerasan pada Anak Tahun 2021

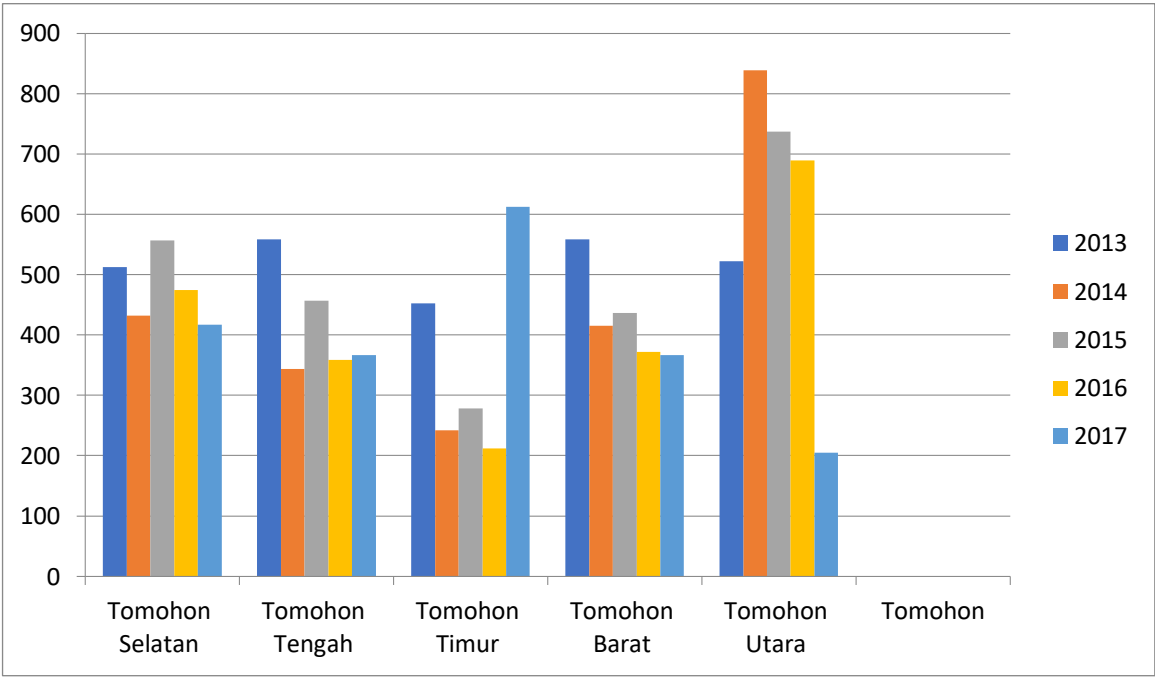


4. Tumbuh Kembang Anak



Capaian tumbuh kembang anak ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup dimana pemenuhan hak identitas anak dapat dilihat dari meningkatnya akte kelahiran anak yang diterbitkan setiap tahun lebih tinggi dari jumlah kelahiran. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.8
Jumlah Akte Kelahiran Yang Dikeluarkan 2013-2017



Sumber : BPS Kota Tomohon/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, telah dilakukan upaya penarikan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Untuk memenuhi hak anak maka pemerintah Kota Tomohon juga telah mengeluarkan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dan dalam rangka memenuhi hak

dan melindungi anak di lembaga pendidikan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, perubahan cara pikir pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, peningkatan partisipasi anak, pengembangan karakter anak, pencegahan pangan jajanan anak sekolah yang berbahaya, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Di bidang kesehatan penurunan Angka Kematian Bayi dan anak merupakan capaian pemenuhan hak kesehatan anak.

5. Partisipasi Masyarakat

Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha di Kota Tomohon selain badan usaha seperti CSR Geothermal Panas Bumi Lahendong di bidang pendidikan dan kesehatan anak, bantuan peralatan usaha untuk ibu – ibu wilayah sekitar, PT Bank Sulut-Go juga telah berpartisipasi melalui Bantuan Alat Bermain Anak, dan akan terus didorong agar partisipasi masyarakat dunia usaha semakin meningkat.

Rincian indikator pelayanan merupakan indikator kinerja yang wajib dijabarkan oleh PD dalam bentuk program dan kegiatan untuk memperoleh capaian indikator hasil dan manfaat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah melakukan serangkaian strategi organisasi untuk melaksanakan kewajiban dan upaya peningkatan fungsi dalam bentuk kreatifitas dan upaya inovatif menjangkau dan memperluas jangkauan sasaran program dan kegiatan untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi. Peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dalam mencapai target kinerjanya guna mewujudkan sekaligus sebagai penggerak pembangunan di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya reformasi diri dengan ethos dan produktivitas yang tinggi. Dengan mengacu pada visi dan misi pemerintah pusat dan daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota Tomohon sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan menggunakan sumber daya aparatur, keuangan dan aset serta kewenangan yang dimandatkan melalui prosedur, tata kerja dan mekanisme melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program/kegiatan;
- b. Perencanaan strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama dengan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya dibidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program/kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. pelaksanaan program atau kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan mendorong kemajuan kelembagaan perempuan serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- i. Penyelenggaraan pengembangan partisipasi perempuan;
- j. Penyelenggaraan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- k. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender;.
- m. Penyelenggaraan koordinasi dan pengembangan jejaring kerja (*networking*) kelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Penyelenggaraan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan *gender* ;
- o. Penyelenggaraan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin, dan inventarisasi lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak;
- p. Pelaksanaan sarasehan/forum komunikasi/*workshop* antar lembaga/organisasi dan Instansi terkait bidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- q. Pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

[illegible]

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Daerah mempunyai tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Tomohon dan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kota Tomohon.
- b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kota Tomohon.
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah Kota Tomohon.
- d. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kota Tomohon.
- e. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kota Tomohon.
- f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kota Tomohon.
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kota Tomohon.
- h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kota Tomohon.
- i. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kota Tomohon.
- j. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kota Tomohon
- k. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah dan non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah Kota Tomohon.
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kota Tomohon.
- m. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kota Tomohon.
- n. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kota Tomohon.
- o. dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kota Tomohon.
- p. Melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan.

Gambaran pelayanan Dinas PP-PAD Kota Tomohon tahun 2023 dan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD dapat ditinjau dari;

1. *Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah.*
 - a. Membentuk Kota Layak Anak dengan score 700
 - b. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- c. Menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi perempuan dan anak dalam berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Meningkatkan peran kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan
- e. Menyusun berbagai kebijakan dalam mendukung pelaksanaan dan perencanaan anggaran yang Responsif Gender.

2. *Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;*

Permasalahan dicantumkan agar terjadi kesinambungan dengan rencana program/ kegiatan, karena pada dasarnya program/ kegiatan yang direncanakan merupakan langkah dalam pemecahan masalah yang telah/ sedang dan akan dihadapi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - ✓ Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - ✓ Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PP-PAD karena pagu anggaran yang ditetapkan sangat minim dan tidak proposional.
 - ✓ Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas PP-PAD.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - ✓ Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - ✓ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - ✓ Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - ✓ Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
 - ✓ Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak dibawah 18 tahun (masih sekolah), dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - ✓ Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

- ✓ Masih ada anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - ✓ Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - ✓ Masih ada kematian pada bayi dan balita.
 - ✓ Masih kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti.
 - ✓ Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - ✓ Minimnya Puskesmas yang masuk kategori Puskesmas ramah anak
 - ✓ Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- ✓ Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - ✓ Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PP-PA masih belum optimal.
3. *Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,*
- ✓ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon masih belum optimal dalam melakukan pelayanan hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana operasional .
 - ✓ Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah secara tidak langsung akan berdampak terhadap pencapaian program , untuk mengantisipasi supaya program dan kegiatan ini tercapai secara optimal perlunya di lengkapi sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan DPPPAD serta perlu disetujui Program-program yang telah direncanakan.
4. *Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;*
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas PP-PAD adalah sebagai berikut:
- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
 - b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
 - c. Masih ada perempuan kepala keluarga yang miskin menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
 - d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
 - e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki

smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

5. *Formulasi Isu- Isu Penting;*

Isu – isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang perlu penanganan cepat antara lain sebagai berikut :

- ✓ Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga baik itu terhadap anak maupun perempuan termasuk trafficking (masih terselubung)
- ✓ Maraknya perkawinan pada usia anak.
- ✓ Darurat anak (atas tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan)
- ✓ Anak-anak korban era digitalisasi.

4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Program dan Kegiatan yang dibuat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon untuk program/kegiatan public tidak ada yang berubah hanya besaran pembiayaan/anggaran yang berbeda berdasarkan kebutuhan. Kecuali untuk program/kegiatan pelayanan dinas/kantor ada penambahan sesuai kebutuhan. Oleh karena Program dan Kegiatan yang disampaikan tidak sama dengan rancangan berikut kami lampirkan penambahan program dan kegiatan dimaksud yang tetap mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai table dibawah ini;

Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2023
Dinas PP-PAD Kota Tomohon

Kode	Rancangan RKPD				Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2 08 02 .2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		77.00%	18,500,000	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		77.00 %	37,000,000	
		Indeks Pembangunan Gender		99.91%			Indeks Pembangunan Gender		99.91 %		
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		85.59%			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		85.59 %		
		Partisipasi angkatan kerja perempuan		37%			Partisipasi angkatan kerja perempuan		37%		
		Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah		17.02%			Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah		17.02 %		
		Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR		35%			Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR		35%		

Kode	Rancangan RKPD				Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
		Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta		76.8%			Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta		76.8%		
2 08 02 .2 .01	KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		34 lembaga	18,500,000	KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		34 lembaga	18,500,000	
2 08 02 .2 .01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	18,500,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	18,500,000	

Kode	Rancangan RKPD				Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2 08 02 .2 .02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta		6 lembaga	-	KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta		6 lembaga	18,500, 000	
2 08 02 2. 02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	18,500,0 00	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap		0,02%	360,934,9 10	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap		0,02%	360,934 ,910	

Kode	Rancangan RKPD				Kebutu han Dana / Pagu indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					CATATA N PENTIN G
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKA SI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaia n	Kebutuh an Dana / Pagu indikatif	
		Perempuan Termasuk TPPO					Perempuan Termasuk TPPO				
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (SPHPN dan Simfoni)		100%			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (SPHPN dan Simfoni)		100%		
		Persentase Lembaga Penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)		100%			Persentase Lembaga Penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)		100%		

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2 08 03 2.01	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROPINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		1 kebijakan/program	68,181,641	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROPINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		1 kebijakan/program	68,181,641	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	68,181,641	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	68,181,641	

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
							a				
2 08 03 2.02	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		17 lembaga	191,865,025	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		17 lembaga	191,865,025	
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/	Kota Tomohon	25 kasus	30,849,540	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/	Kota Tomohon	25 kasus	30,849,540	

Kode	Rancangan RKPD				Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				Kabupaten/Kota	Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	25 Layanan	161,015,485	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	25 Layanan	161,015,485	
2 08 03 2.03	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		17 lembaga	100,888,244	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		17 lembaga	100,888,244	

Kode	Rancangan RKPD				Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kota Tomohon	50 orang	76,806,044	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kota Tomohon	50 orang	76,806,044	
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	24,082,200	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	24,082,200	

Kode	Rancangan RKPD				Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2 08 04	PRORAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio Keluarga yang memahami Kesenjangan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)			1,268,100,200	PRORAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio Keluarga yang memahami Kesenjangan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)			1,268,100,200	
2 08 04 2 01	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah keluarga dan anak		15%	1,250,011,150	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah keluarga dan anak		15%	1,250,011,150	

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	10 Laporan	1,250,011,150	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	10 Laporan	1,250,011,150	
2 08 04 2 02	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		6 lembaga	18,089,050	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		6 lembaga	18,089,050	

Kode	Rancangan RKPD				Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2 08 04 2 02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	50 orang	18,089,050	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	50 orang	18,089,050	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala		100%	11,097,597	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala		100%	11,097,597	

Kode	Rancangan RKPD				Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2 08 05 2.01	PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen	11,097,597	PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen	11,097,597	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Tomohon	1 dokumen	11,097,597	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Tomohon	1 dokumen	11,097,597	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak		100%	247,698,430	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak		100%	247,698,430	

Kode	Rancangan RKPD				Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
		Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun		31%			Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun		31%		
2 08 06 2 01	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		55 lembaga	134,640,000	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		55 lembaga	134,640,000	
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	134,640,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	134,640,000	

Kode	Rancangan RKPD				Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2 08 06 2.02	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		55 lembaga	113,058,4 30.00	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		55 lembaga	113,058 ,430.00	
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	132 orang	113,058,4 30.00	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	132 orang	113,058, 430.00	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif			194,844,2 32.00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif			194,844 ,232.00	

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
		(SNPHAR dan Simfoni)					(SNPHAR dan Simfoni)				
		Persentase Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Khusus Anak yang melaksanakan layanan sesuai standar					Persentase Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Khusus Anak yang melaksanakan layanan sesuai standar				
2 08 07 2 01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		5 media	44,746,934.00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		5 media	44,746,934.00	

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	44,746,934	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	44,746,934	
2 08 07 2 02	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		100%	150,097,298.00	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		100%	150,097,298.00	
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan	Kota Tomohon	25 Orang	22,448,600	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan	Kota Tomohon	25 Orang	22,448,600	

Kode	Rancangan RKPD				Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	25 Layanan	101,020,600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	25 Layanan	101,020,600	

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	26,628,098	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	26,628,098	
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah		100%	2,990,247,631	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah		100%	2,990,247,635	
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah		100%	11,492,750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah		100%	11,492,748	

Kode	Rancangan RKPD				Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	2 Dokumen	11,492,750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	2 Dokumen	11,492,748	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		100%	2,223,134,429	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		100%	2,223,134,429	
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	12 bulan	2,212,292,679	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	12 bulan	2,212,292,679	
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tomohon	12 bulan	4,866,700	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tomohon	12 bulan	4,866,700	
2 08 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tomohon	2 laporan	5,455,870	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tomohon	2 laporan	5,455,870	

Kode	Rancangan RKPD				Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2 08 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Tomohon	4 Dokumen	519,180	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Tomohon	4 Dokumen	519,180	
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		100%	27,522,960	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		100%	27,522,966	
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya penatausahaan barang	Kota Tomohon	12 Laporan	27,522,960	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya penatausahaan barang	Kota Tomohon	12 Laporan	27,522,966	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan disiplin aparatur / Prosentase aparatur yang memiliki		100%	66,133,960	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan disiplin aparatur / Prosentase aparatur yang memiliki		100%	66,133,960	

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
		komptensi di bidangnya					komptensi di bidangnya				
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Tomohon	30 paket	37,089,500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Tomohon	30 paket	37,089,500	
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tomohon dan luar Kota Tomohon	1 orang	9,488,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tomohon dan luar Kota Tomohon	1 orang	9,488,000	
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon dan luar Kota Tomohon	3 orang	19,556,460	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon dan luar Kota Tomohon	3 orang	19,556,460	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana		100%	143,899,095	Administrasi Umum Perangkat Daerah	umlah sarana dan prasarana		100%	143,899,095	

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
		aparatur yang direncanakan					aparatur yang direncanakan				
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	8 paket	3,508,010	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	8 paket	3,508,010	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	10 paket	34,960,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	10 paket	34,960,000	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Tomohon	5 paket	6,398,670	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Tomohon	5 paket	6,398,670	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Kota Tomohon	1 dokumen	1,423,915	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Kota Tomohon	1 dokumen	1,423,915	

Kode	Rancangan RKPD				Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
	undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan					Perundang-Undangan yang Disediakan				
2.08.01.2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	12 laporan	12,599,500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	12 laporan	12,599,500	
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon dan luar Kota Tomohon	24 Laporan	85,009,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon dan luar Kota Tomohon	24 Laporan	85,009,000	
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11,953,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11,953,000	
2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Tomohon	3 unit	11,953,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Tomohon	3 unit	11,953,000	
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase meningkatnya pelayanan umum kantor		100%	388,061,437	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase meningkatnya pelayanan umum kantor		100%	388,061,437	

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	12 Laporan	10,200,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	12 Laporan	10,200,000	
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Tomohon	12 Laporan	13,255,468	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Tomohon	12 Laporan	13,255,468	
2 08 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	12 Laporan	3,970,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	12 Laporan	3,970,000	
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	12 Laporan	360,635,969	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	12 Laporan	360,635,969	

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah terpelihara dan siap pakai		100%	118,050,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah terpelihara dan siap pakai		100%	118,050,000	
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Tomohon	1 unit	41,480,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Tomohon	1 unit	41,480,000	
2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapat pemeliharaan/service kendaraan	Kota Tomohon	3 unit	76,570,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapat pemeliharaan/service kendaraan	Kota Tomohon	3 unit	76,570,000	
					2,101,175,369					2,119,675,369	

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
					2,990,247,631					2,990,247,635	
					5,091,423,000					5,109,923,004	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan didalamnya, guna pemnfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk mengharmonisasikan & mengintegrasikan program/kegiatan Dinas PP-PAD maka diadakan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan menghadirkan pemangku kepentingan yang merupakan perwakilan masyarakat kota baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Dinas PP-PAD Kota Tomohon. Beberapa usulan dari para pemangku kepentingan antara lain;

- Tersedianya tempat pengaduan korban KDRT
- Tersedianya taman bermain anak di setiap kelurahan
- Bantuan dana untuk pembangunan Pusat kreatifitas anak dibeberapa kelurahan
- Terbentuknya lembaga pengasuhan anak dan konsultasi keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga
- Bantuan hukum untuk anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum.
- Bantuan untuk anak dan perempuan disabilitas
- Bantuan untuk perempuan kepala rumah tangga (keluarga tidak mampu)
- Bantuan dana untuk anak putus sekolah (keluarga tidak mampu)
- Bantuan pelatihan, dana dan alat untuk perempuan yang tidak memiliki pekerjaan.

Usulan ini disinkronkan dengan dengan isu penting yang harus segera ditindaklanjuti yang terkait kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah serta pagu anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota maka beberapa usulan akan direalisasikan pada tahap ini dan yang lainnya akan direalisasikan tahap berikutnya.

Usulan masyarakat lewat pemangku kepentingan yang akan dilaksanakan tahun ini sbb;

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022
Dinas PP-PAD Kota Tomohon

NO.	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VO LU ME	SATU AN	CATATAN
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kakaskase n III Tomohon Utara	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pelatihan jahit menjahit	44	orang	Meningkatny a kapasitas SDM Perempuan Kepala Rumah Tangga
2	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	akaskasen III, Tomohon Utara	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pelatihan tata rias	44	Orang	Meningkatny a kapasitas SDM Perempuan Kepala Rumah Tangga
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
3	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kakaskase n Satu, Tomohon Utara	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan	1	buah	Meningkatny a kualitas layanan perempuan dan anak korban kekerasan
4	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Paslaten Satu Tomohon Timur	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan	1	buah	Meningkatny a kualitas layanan perempuan dan anak korban kekerasan
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Talete Satu Tomohon Tengah,	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan	1	buah	Meningkatny a kualitas layanan perempuan dan anak korban kekerasan
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Woloan Satu Tomohon Barat	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan	1	buah	Meningkatny a kualitas layanan perempuan dan anak korban

						kekerasan
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tumatang tang, Tomohon Selatan	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan	1	buah	Meningkatnya kualitas layanan perempuan dan anak korban kekerasan

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja PD tahun 2023 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah. Tujuan yang tertuang dalam visi DPPPAD harus dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat daerah ((PD)) sebagai berikut:

1. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan bagian dari Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon dalam upaya pencapaian kinerja selama 5 tahun.
2. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan kelanjutan daripada capaian kinerja tahun 2021
3. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 ini adalah alat ukur sekaligus pedoman pelaksanaan kegiatan yang sudah digariskan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah yang didasarkan kepada situasi, kondisi, dan potensi PD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PP-PAD

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DPPPAD) untuk tahun 2023, disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan dan sasaran strategis yang dirancang, selanjutnya akan diimplementasikan ke dalam Program dan Kegiatan tahunan PD, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi atau dimiliki.

Tujuan

Agar Visi dan Misi dapat dilaksanakan secara terorganisasi dan terencana, maka perlu ada jalur kerja yang jelas dan terprogram yang akan dilaksanakan, untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya penetapan tujuan yaitu Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Gini .

Sasaran Strategis

Penetapan sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintahan, sehingga tergambar tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk pencapaian tujuan.

Sasaran strategis merupakan pokok kegiatan dan program yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Strategis yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan PD, berisikan Program dan Kegiatan, dimana dalam setiap program kerja operasional selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Sebagai pedoman operasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan maka;

- a. faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas PP-PAD sbb;
 - ✓ Pencapaian Visi dan misi Walikota
Rencana kerja Dinas PP-PAD merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi **“TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA.”** dan misi Walikota Tomohon yaitu misi ke 2 yaitu **“Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sector**
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi;
 - ✓ Jumlah program dan jumlah kegiatan
Program dan kegiatan pelayanan public Dinas PP-PAD Tahun 2023 sesuai Revisi Renstra tahun 2021-2026 terdapat 7 program dan 20 kegiatan dan 38 sub kegiatan
 - ✓ Penyebaran lokasi program dan kegiatan Dinas PP-PAD memprioritaskan dan terfokus pada kelompok perempuan dan anak
 - ✓ Rencana kerja ini menggambarkan tentang Program dan kegiatan, Anggaran, sarana dan prasarana tempat dan waktu kegiatan serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon pada periode tahun 2023 adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran tahun 2023.
- c. Terdapat perbedaan Rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan RKPD karena sesuai temuan/fakta lapangan dan aturan berlaku maka dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.
- d. Berikut tabel 3.1. penjelasan masing-masing rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2023 dan prakiraan maju rencana tahun 2024 sbb :

TABEL 3.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PP-PAD TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Kode	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	2023		2024		PD PENANGGUNG JAWAB
			Tahun 0	Target	Rp.	Target	Rp.	
2 08 02 .2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		76%	77.00%	37,000,000	78	51,844,641	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK DAERAH KOTA TOMOHON
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD						
		Indeks Pembangunan Gender	99.29%	99.91%		99.35%		
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	85.17%	85.59%		86.02%		
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	37%	37%		37%		
		Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	17.01%	17.02%		17.03%		
		Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR	35%	35%		35%		
		Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	76.7%	76.8%		76.9%		

2 08 02 .2 .01	KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	34 lembaga	34 lembaga	18,500,000	34 lembaga	23,164,610	
2 08 02 .2 .01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	18,500,000	1 Dokumen	23,164,610	
2 08 02 .2 .02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	6 lembaga	6 lembaga	18,500,000	6 lembaga	28,680,031	
2 08 02 2. 02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	18,500,000	1 Dokumen	28,680,031	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	0.03 %	0.02%	360,934,910	0.02 %	321,744,480	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (SPHPN dan Simfoni)	100%	100%		100%		

		Persentase Lembaga Penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)	100%	100%		100%		
2 08 03 2.01	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROPINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 kebijakan/prog ram	1 kebijakan/pro gram	68,181,641	1 kebijakan/pr ogram	24,563,844	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	68,181,641	1 Dokumen	24,563,844	
2 08 03 2.02	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	17 lembaga	17 lembaga	191,865,02 5	17 lembaga	230,443,13 8	
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	25 kasus	25 kasus	30,849,540	25 kasus	31,466,534	

2.08.03.2.0 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Layanan	25 Layanan	161,015,48 5	25 Layanan	198,976,604	
2 08 03 2.03	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	17 lembaga	17 lembaga	100,888,24 4	17 lembaga	66,737,498	
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	50 orang	76,806,044	50 orang	42,173,654	
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	24,082,200	1 Dokumen	24,563,844	
2 08 04	PRORAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)			1,268,100, 200		974,029,37 8	

2 08 04 2 01	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah keluarga dan anak	15%	15%	1,250,011,150		954,081,789	
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	1,250,011,150	10 Laporan	954,081,789	
2 08 04 2 02	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	6 lembaga	6 lembaga	18,089,050	6 lembaga	19,947,589	
2 08 04 2 02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	18,089,050	50 orang	19,947,589	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	100%	100%	11.097.597	100%	51,844,641	

2 08 05 2.01	PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	11,097,597	1 Dokumen	51,844,641	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	1 dokumen	11,097,597	1 dokumen	51,844,641	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak	100%	100%	247,698,43 0	100%	252,652,40 1	
		Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun	32%	31%		30%		
2 08 06 2 01	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	55 lembaga	55 lembaga	134,640,00 0	55 lembaga	137,332,80 0	
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Ka\butanen/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	134,640,00 0	1 Dokumen	137,332,800	
2 08 06 2.02	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	55 lembaga	55 lembaga	113,058,43 0.00	55 lembaga	115,319,60 1	

2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	132 orang	132 orang	113,058,43 0.00	132 orang	115,319,600 .64	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif (SNPHAR dan Simfoni)			194,844,23 2.00		261,425,16 1.00	
		Persentase Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Khusus Anak yang melaksanakan layanan sesuai standar						
2 08 07 2 01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5 media	5 media	44,746,934 .00	5 media	44,746,934. 00	
2.08.07.2.0 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	44,746,934	1 Dokumen	44,746,934. 00	
2 08 07 2 02	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASITINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100%	150,097,29 8.00	100%	216,678,22 7.00	
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan	25 Orang	25 Orang	22,448,600	25 Orang	30,849,543	

	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota						
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Layanan	25 Layanan	101,020,600	25 Layanan	171,562,584	
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	26,628,098	1 Dokumen	14,266,100	
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	2,990,247,635	100%	3,131,272,699	
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	100%	11,492,748	100%	11,722,603	
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	11,492,748	2 Dokumen	11,722,602.96	
2.08.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	2,223,134,429	100%	2,199,596,203	
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	2,212,292,679	12 bulan	2,192,181,173.72	
2.08.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	4,866,700	12 bulan	4,964,034.00	

2 08 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	5,455,870	2 laporan	1,921,431.53	
2 08 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	519,180	4 Dokumen	529,563.60	
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	100%	27,522,966	100%	28,073,425	
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya penatausahaan barang	12 Laporan	12 Laporan	27,522,966	12 Laporan	28,073,425.32	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan disiplin aparatur / Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya	100%	100%	66,133,960	100%	67,345,612	
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	30 paket	37,089,500	30 paket	37,807,615.80	
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	1 orang	9,488,000	1 orang	9,590,407.20	
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	3 orang	3 orang	19,556,460	3 orang	19,947,589.20	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang direncanakan	100%	100%	143,899,095	100%	208,895,960	

2.08.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	3,508,010	8 paket	3,578,169.6 9	
2.08.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	34,960,000	10 paket	12,043,254. 24	
2.08.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	6,398,670	5 paket	6,526,637.2 8	
2.08.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1,423,915	1 dokumen	1,452,398.4 0	
2.08.01.2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12,599,500	12 laporan	12,871,048. 50	
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	85,009,000	24 Laporan	172,424,451 .60	
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang direncanakan	100%	100%	11,953,000	100%	12,170,183	
2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	3 unit	11,953,000	3 unit	12,170,183. 04	
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase meningkatnya pelayanan umum kantor	100%	100%	388,061,43 7	100%	451,898,18 7	
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10,200,000	12 Laporan	10,404,000	
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	12 Laporan	13,255,468	12 Laporan	12,728,324	

		Air dan Listrik yang Disediakan						
2 08 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3,970,000	12 Laporan	4,047,156	
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	360,635,969	12 Laporan	424,718,707	
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah terpelihara dan siap pakai	100%	100%	118,050,000	100%	151,570,526	
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	41,480,000	1 unit	66,320,150.26	
2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas opasional yang mendapat pemeliharaan/service kendaraan	3 unit	3 unit	76,570,000	3 unit	85,250,376.00	
					2.119.675.369		1,913,540,701	
					2,990,247,635		3,131,272,699	
					5,109.923.004		5,044,813,401	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PP-PAD

Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun Dinas PP-PAD berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Dinas PP-PAD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan di Kota Tomohon.

Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Rincian rencana kerja dan pendanaan Dinas PP-PAD dapat dilihat pada table.4.1 di bawah ini:

TABEL 4.1.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PP-PAD TAHUN 2023

Kode	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	2023		PD PENANGGUNG JAWAB
			Tahun 0	Target	Rp.	
2 08 02 .2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		76%	77.00%	37,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK DAERAH KOTA TOMOHON
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
		Indeks Pembangunan Gender	99.29%	99.91%		
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	85.17%	85.59%		
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	37%	37%		
		Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	17.01%	17.02%		
		Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR	35%	35%		
		Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	76.7%	76.8%		
2 08 02 .2 .01	KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	34 lembaga	34 lembaga	18,500,000	

	/ KOTA					
2 08 02 .2 .01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	18,500,000	
2 08 02 .2 .02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	6 lembaga	6 lembaga	18,500,000	
2 08 02 2. 02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	18,500,000	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	0.03 %	0.02%	360,934,910	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (SPHPN dan Simfoni)	100%	100%		
		Persentase Lembaga Penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang	100%	100%		

		sesuai standar (%)				
2 08 03 2.01	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROPINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 kebijakan/program	1 kebijakan/program	68,181,641	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	68,181,641	
2 08 03 2.02	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	17 lembaga	17 lembaga	191,865,025	
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	25 kasus	25 kasus	30,849,540	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	25 Layanan	25 Layanan	161,015,485	

	Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota				
2 08 03 2.03	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	17 lembaga	17 lembaga	100,888,244	
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	50 orang	76,806,044	
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	24,082,200	
2 08 04	PRORAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)			1,268,100,200	
2 08 04 2 01	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah keluarga dan anak	15%	15%	1,250,011,150	

2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	1,250,011,150	
2 08 04 2 02	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	6 lembaga	6 lembaga	18,089,050	
2 08 04 2 02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	18,089,050	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	100%	100%	11.097.597	
2 08 05 2.01	PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	11,097,597	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang	1 dokumen	1 dokumen	11,097,597	

		Tersedia				
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak	100%	100%	247,698,430	
		Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun	32%	31%		
2 08 06 2 01	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	55 lembaga	55 lembaga	134,640,000	
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	134,640,000	
2 08 06 2.02	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	55 lembaga	55 lembaga	113,058,430.00	
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	132 orang	132 orang	113,058,430.00	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif (SNPHAR dan Simfoni)			194,844,232.00	

		Persentase Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Khusus Anak yang melaksanakan layanan sesuai standar				
2 08 07 2 01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5 media	5 media	44,746,934.00	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	44,746,934	
2 08 07 2 02	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASITINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100%	150,097,298.00	
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	22,448,600	
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	25 Layanan	25 Layanan	101,020,600	

		Kabupaten/Kota				
2 08 07 2.02 04 2 08 01	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	26,628,098	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	2,990,247,635	
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	100%	11,492,748	
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	11,492,748	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	2,223,134,429	
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	2,212,292,679	
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	4,866,700	
2 08 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	5,455,870	

2 08 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	519,180	
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	100%	27,522,966	
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya penatausahaan barang	12 Laporan	12 Laporan	27,522,966	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan disiplin aparatur / Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya	100%	100%	66,133,960	
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	30 paket	37,089,500	
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	1 orang	9,488,000	
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	3 orang	3 orang	19,556,460	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang direncanakan	100%	100%	143,899,095	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	3,508,010	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	10 paket	10 paket	34,960,000	

		Disediakan				
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	6,398,670	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1,423,915	
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12,599,500	
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	85,009,000	
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang direncanakan	100%	100%	11,953,000	
2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	3 unit	11,953,000	
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase meningkatnya pelayanan umum kantor	100%	100%	388,061,437	
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10,200,000	
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13,255,468	
2 08 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3,970,000	
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan		

	Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			360,635,969	
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah terpelihara dan siap pakai	100%	100%	118,050,000	
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	41,480,000	
2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas opasional yang mendapat pemeliharaan/service kendaraan	3 unit	3 unit	76,570,000	
					2.119.675.369	
					2,990,247,635	
					5,109.923.004	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon. Semoga RENJA tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2023 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja

ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah. antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2018 , maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Provinsi Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota , RKPD Kota Tomohon dan Renstra Dinas).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
- b. Aparatur perencanaan yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
- c. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS PANGAN DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja dilakukan akibat adanya perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Renja Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Renstra Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. penyusunan rancangan
- b. rancangan akhir; dan
- c. penetapan.

Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon sebagai perangkat daerah menyusun Renja Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Renja Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap RKPD Kota Tomohon Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Renja Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
12. Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27);
 18. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Walikota Tomohon Nomor tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menyusun RKA Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program/kegiatan /Sub Kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PANGAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN LALU

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 Sampai dan capaian Renstra Dinas Pangan Daerah, analisis kinerja pelayanan Dinas Pangan Daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan Daerah, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN DAERAH KOTA TOMOHON

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PANGAN DAERAH KOTA TOMOHON

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Rencana Kerja Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon tahun 2023

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon tahun 2023 didasarkan pada Renstra Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Faktor - faktor yang mempengaruhi tercapainya kinerja pelayanan sesuai target perencanaan program dan kegiatan tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Adanya perencanaan yang matang terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing bidang dalam menjabarkan dan mengimplementasi antara kegiatan dan pelaksanaan fisik.
2. Perencanaan awal yang bersifat proses administrasi kegiatan dipersiapkan oleh masing-masing bidang dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi pada pihak-pihak terkait.
3. Memaksimalkan kerja tim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketersediaan anggaran pembiayaan kegiatan.
4. Fungsi pengawasan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dari aspek kuantitas dan kualitas pekerjaan sesuai bidang tugas dilaksanakan oleh masing-masing kepala bidang.
5. Monitoring dan evaluasi secara Perangkat Daerah ditangani langsung oleh Kepala Dinas sebagai penanggungjawab administrasi dan Pengguna Anggaran sebagaimana aturan dan mekanisme yang harus dilaksanakan. Dijelaskan lebih rinci pada Lampiran Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Tomohon

					T ar g e t	S a t u a n		J u m l a h	S a t u a n		T ar g e t	S a t u a n		J u m l a h	S a t u a n		J u m l a h	S a t u a n		J u m l a h	S a t u a n		J u m l a h	S a t u a n		J u m l a h	S a t u a n							
1	Meni ngka tnya Keta han an Pang an		URUSA N PEMER INTAHA N WAJIB YANG TIDAK BERKA ITAN DENG A N PELAY ANAN DASAR	URUS AN PEME RINTA HAN WABI B YANG TIDAK BERK AITAN DENG AN PELA YANA N DASA R																														
2			URUSA N PEMER INTAHA N BIDAN G PANGA N	URUS AN PEME RINTA HAN BIDA NG PANG AN	1 0 0	%	## ## ## #	2 7. 7 0 4	%	## ## ## #	1 0 0	%	## ## ## ##	1 0. 9 4	%	41 5,9 46, 68 1	1 1. 4 6	%	## ## ## ##							2 1. 1	%	## ## ## ##	2 9. 1	%	## ## ## ## #	2 9 %	1 7 %	Dina s Pang an Daer ah
3			PROGR AM PENUN JANG	Outco me : Caku pan	1 0 0	%	## ## ## ##	1 7. 1 4	%	## ## ## ##	1 0 0	%	## ## ## ##	4 4	%	41 5,9 46,	1 3	%	## ## ## ##							5 0. 8 9	%	## ## ## ##	3 0. 1 8	%	## ## ## ##	3 0 %	2 3 %	Dina s Pang an

			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kota			#		#		##			681		##								##		##			Daerah				
4			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersebutnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	80	Dokumen	### ### ### #	16	Dokumen	6,038,400	16	Dokumen	-	7	Dokumen	-	2	Dokumen	-						9	Dokumen	-	25	Dokumen	Rp 6,038,400	31%	3%	Dinas Pangan Daerah
5			Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	35	Dokumen	### ### ### #	7	Dokumen	2,270,000	7	Dokumen	-	2	Dokumen	-	2	Dokumen	-						4	Dokumen	-	11	Dokumen	Rp 2,270,000	31%	3%	Dinas Pangan Daerah

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				gkat Daera h, Jumla h Doku men Admi nistra si keuan gan Peran gkat Daera h		e n			e n			e n			e n									e n			e n							
1 3			Penyedi aan gaji dan Tunjan gan ASN	Jumla h penye diaan gaji dan tunja ngan ASN	5	T a h u n	## ## ## ## #	1	T a h u n	## ## ## ## #	1	T a h u n	## ## ## ## ##	0. 2 5	T a h u n	37 7,6 36, 18 1	0. 2 5	T a h u n	## ## ## ## ##							0. 5	T a h u n	## ## ## ## ##	1. 5 0	T a h u n	## ## ## ## ## #	3 0 %	2 5 %	Dina s Pang an Daer ah
1 4			Penyedi aan admini strasi Pelaksa naan tugas ASN	Jumla h penye diaan jasa tenag a admin istrasi keuan gan	5	or a n g	## ## ## ## #	1	or a n g	9,2 40, 00 0	1	or a n g	## ## ## ## ##	1	or a n g	-	1	or a n g	## ## ## ## ##							1	or a n g	3,8 50, 00 0	2	or a n g	Rp 13, 09 0,0 00	4 0 %	2 8 %	Dina s Pang an Daer ah

15			Pelaksanaan penataan usaha dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5	oran g	## ## ## #	1	oran g	## ## ## #	1	oran g	## ## ## ##	1	oran g	-	1	oran g	## ## ## ##							1	oran g	4,400,000	2	oran g	Rp 14,960,000	40%	28%	Dinas Pangan Daerah
16			Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dokumen	## ## ## #	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-							0	Dokumen	-	0	Dokumen	Rp -	0%	0%	Dinas Pangan Daerah
17			Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	Laporan	## ## ## #	1	Laporan	1,450,100	1	Laporan	-	1	Laporan	-	0	Laporan	-							1	Laporan	-	2	Laporan	Rp 1,450,100	40%	6%	Dinas Pangan Daerah

[illegible]

19			Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	90	Laporan	### ### ##	18	Laporan	1,925,000	18	Laporan	-	3	Laporan	-	5	Laporan	-									8	Laporan	-	26	Laporan	Rp 1,925,000	29%	5%	Dinas Pangan Daerah
20			Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelap	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-									0	Dokumen	-	0	Dokumen	Rp -	0%	0%	Dinas Pangan Daerah

			Prognosis Realisasi Anggaran	oran dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		en		en		en		en		en		en								en		en				ah		
21			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60	Bulan	#####	12	Bulan	#####	1	Bulan	23,950,000	3	Bulan	-	3	Bulan	-					6	Bulan	#####	18	Bulan	Rp 31,250,000	30%	18%	Dinas Pangan Daerah
22			Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0					0	Dokumen	-	0	Dokumen	Rp -	0%	0%	Dinas Pangan Daerah

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			Kepeg waian Perang kat Daerah	Penyel engga raan Admi nistra si Kepeg awaia n Peran gkat Daera h		a n	## ## #		a n			a n			a n									a n			a n		%		Pang an Daer ah		
3 0			Pening katan Sarana dan Prasara na Disiplin Pegawa i	Jumla h Unit Penin gkata n Saran a dan Prasa rana Disipli n Pegaw ai	3	u ni t	## ## ## ## #	0	u ni t	-	0	u ni t	-	0	u ni t	-	0	u ni t	-					0	u ni t	-	0	u ni t	-	Rp	0 %	0 %	Dina s Pang an Daer ah
3 1			Pengad aan Pakaia n Dinas beserta Atribut Kelengk apanny a	Jumla h Paket Pakai an Dinas besert a Atribu t	1 5 0	p a k et	## ## ## ## #	0	p a k et	-	0	p a k et	-	0	p a k et	-	0	p a k et	-					0	p a k et	-	0	p a k et	-	Rp	0 %	0 %	Dina s Pang an Daer ah

34			Monitoring, evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dokumen	5,000,000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-						0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	Rp	0%	0%	Dinas Pangan Daerah
35			Pemulaan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-						0	orang	-	0	orang	-	Rp	0%	0%	Dinas Pangan Daerah
36			Pemulaan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulaan Pegawai yang Menin	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-						0	Laporan	-	0	Laporan	-	Rp	0%	0%	Dinas Pangan Daerah

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			an Rumah Tangga	diaan Peralat an Ruma h Tangg a		n	## #		n	20 0		n	## ##		n			n	## ##							n	00 0		n	20 0			an Daer ah
4 5			Penyedi aan Bahan Logistik Kantor	Jumla h penye diaan bahan logisti k kanto r	6 0	b ul a n	## ## ## #	1 2	b ul a n	9,7 82, 00 0	1 2	b ul a n	## ## ## ##	3	b ul a n	-	3	b ul a n	## ## ## ##						6	b ul a n	7,7 26, 00 0	1 8	b ul a n	Rp 17, 50 8,0 00	3 0 %	1 8 %	Dina s Pang an Daer ah
4 6			Penyedi aan Barang Cetaka n dan Pengg ndaan	Jumla h Penye diaan Baran g Cetak an dan Pengg andaa n	6 0	b ul a n	## ## ## #	1 2	b ul a n	2,6 85, 90 0	1 2	b ul a n	## ## ## ##	3	b ul a n	-	3	b ul a n	## ## ## ##						6	b ul a n	5,1 23, 20 0	1 8	b ul a n	Rp 7,8 09, 10 0	3 0 %	2 0 %	Dina s Pang an Daer ah
4 7			Penyedi aan Bahan Bacaan dan Peratur an Perund	Jumla h Penye diaan Baha n Bacaa n dan	6 0	b ul a n	8,0 00, 00 0	1 2	b ul a n	1,3 20, 00 0	1 2	b ul a n	## ## ## ##	3	b ul a n	-	3	b ul a n	44 0,0 00. 00						6	b ul a n	44 0,0 00	1 8	b ul a n	Rp 1,7 60, 00 0	3 0 %	2 2 %	Dina s Pang an Daer ah

[illegible]

			s pada SKPD	raan penat ausah aan arsip dinam is pada SKPD			0																									Daer ah	
5 2			Dukun gan Pelaksa naan Sistem Pemer ntahan Berbasi s Elektro nik pada SKPD	Jumla h Doku men Duku ngan Pelaks anaan Siste m Pemer intaha n Berba sis Elekt ronik pada SKPD	5	D o k u m e n	## ## ## #		D o k u m e n	-		D o k u m e n	0	0	D o k u m e n	0								0	D o k u m e n	0	0	D o k u m e n	Rp -	0 %	0 %	Dina s Pang an Daer ah	
5 3			Penyedi aan Jasa Penunj ang Urusan Pemer ntahan	Jumla h penye diaan jasa penun jang urusa	6 0	B ul a n	## ## ## #	1 2	B ul a n	## ## ## #	1 2	B ul a n	## ## ## ##	3	B ul a n	38, 31 0,5 00. 00	3	B ul a n	## ## ## ##						6	B ul a n	## ## ## ##	1 8	B ul a n	## ## ## ## #	3 0 %	2 5 %	Dina s Pang an Daer ah

57			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	bulan	###	12	bulan	###	12	bulan	###	3	bulan	38,310,500.00	3	bulan	###							6	bulan	###	18	bulan	###	30%	26%	Dinas Pangan Daerah
58			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	bulan	###	12	bulan	###	12	bulan	97,473,200	3	bulan	-	3	bulan	###							6	bulan	###	18	bulan	Rp 78,859,314	30%	8%	Dinas Pangan Daerah

59			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendar aan Perorangan Dinas atau Kendar aan Dinas Jabatan	jumlah Penye diaan Jasa Pemel iharaa n, Biaya Pemel iharaa n, dan pajak Kenda raan Perora ngan Dinas atau Kenda raan Dinas Jabat an	60	bulan	###	12	bulan	###	12	bulan	###	3	bulan	-	3	bulan	###								6	bulan	###	18	bulan	###	30%	11%	Dinas Pangan Daerah
60			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan	Jumlah Penye diaan Jasa Pemel iharaa n, Biaya Pemel iharaa n,	60	bulan	###	12	bulan	39,164,891	12	bulan	###	3	bulan	-	3	bulan	###								6	bulan	###	18	bulan	Rp 51,887,070	30%	13%	Dinas Pangan Daerah

			kendar aan Dinas Operasi onal atau Lapang an	pajak dan perizi nan kenda raan Dinas Opera sional atau Lapan gan																														
6 1			Pemelih araan Mebel	Jumla h Mebel yang Dipeli hara	5	u ni t	## ## ## #	0	u ni t	-	0	u ni t	-	0	u ni t	-	0	u ni t	-							0	u ni t	-	0	u ni t	Rp	0 %	0 %	Dina s Pang an Daer ah
6 2			Pemelih araan peralat an dan mesin lainnya	Jumla h Peralat tan dan Mesin Lainn ya yang Dipeli hara	0	u ni t	-	0	u ni t	-	0	u ni t	-	0	u ni t	-	0	u ni t	-							0	u ni t	-	0	u ni t	Rp	0 %	0 %	Dina s Pang an Daer ah
6 3			Pemelih araan/ Rehabil itasi Gedung Kantor dan	Jumla h Gedu ng Kanto r dan Bang	1	u ni t	## ## ## #	0	u ni t	-	0	u ni t	-	0	u ni t	-	0	u ni t	-							0	u ni t	-	0	u ni t	Rp	0 %	0 %	Dina s Pang an Daer ah

[illegible]

[illegible]

67			PENYE DIAAN INFRAS TRUKT UR DAN SELUR UH PENDU KUNG KEMAN DIRIAN PANGA N SESUAI KEWEN ANGAN DAERA H KABUP ATEN/ KOTA	Output : JUMLAH INFRA STRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUN G KEMAN DIRIAN PANG AN SESU AI KEWEN ANGAN DAER AH KOTA	5	u ni t	## ## ## #	2	u ni t	4,0 98, 40 0	0	u ni t	-	0	u ni t	-	0	u ni t	-							0	u ni t	-	2	u ni t	Rp 4,0 98, 40 0	4 0 %	2 9 %	Dina s Pang an Daer ah
68			Penyedi aan Infrastr uktur Lumbu ng Pangan	Jumla h Infras trukt ur lumb ung panga n	5	u ni t	## ## ## #	2	u ni t	-	0	u ni t	-	0	u ni t	-	0	u ni t	-							0	u ni t	-	2	u ni t	Rp -	4 0 %	0 %	Dina s Pang an Daer ah

69			Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah infrastruktur lantai jemur	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-							0	unit	-	0	unit	-	Rp	0%	0%	Dinas Pangan Daerah
70			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	5	unit	#####	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-							0	unit	-	0	unit	-	Rp	0%	0%	Dinas Pangan Daerah
71			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	2	Laporan	#####	2	Laporan	4,098,400	0	Laporan	-	0	Laporan	-							0	Laporan	-	2	Laporan	Rp 4,098,400	100%	20%	Dinas Pangan Daerah	
72			Penyusunan rencana	Jumlah dokumen	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-							0	Dok	-	0	Dok	-	Rp	0%	0%	Dinas Pang

			a dan peta jalan kebutu han infrastr uktur penduk ung keman dirian pangan	men renca na dan peta jalan kebut uhan insfra strukt ur pendu kung kema ndiria n panga n		u m e n		u m e n		u m e n		u m e n		u m e n		u m e n								u m e n		u m e n					an Daer ah			
7 3			PROGR AM PENIN GKATA N DIVER SIFIKA SI DAN KETAH ANAN PANGA N MASYA RAKAT	Perse ntase keters ediaa n panga n (terse diany a cadan gan beras /jagu ng sesuai kebut uhan)	1 0 0	%	## ## ## ## #	3 3. 3 8	%	## ## ## ## #	1 0 0	%	66 9,2 15, 19 3	0	%	-	3 3. 3 3	%	-							3 3. 3 3	%	## ## ## ## ##	6 7	%	## ## ## ## #	6 7 %	7 %	Dina s Pang an Daer ah

74			PENYE DIAAN DAN PENYA LURAN PANGA N POKOK ATAU PANGA N LAINNY A SESUAI DENG N KEBUT UHAN DAERA H KABUP ATEN/ KOTA DALAM RANGK A STABIL ISASI PASOK AN DAN HARGA PANGA N	Tersal urkan nya panga n pokok dan panga n lainny a	1 0 0	%	## ## ## ## #	8	%	## ## ## ## #	2	%	61, 33 8,0 00	0	%	-	0	%	## ## ## ## ##						0	%	## ## ## ## ##	8	%	## ## ## ## #	8 %	7 %	Dina s Pang an Daer ah
75			Penyedi aan	Infor masi	1 0	L a	## ##	2	L a	3,1	2	L a	## ##	0	L a	-	0	L a	## ##						0	L a	## ##	2	L a	Rp 9,6	2 0	1 6	Dina s

			Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	harga pangan dan neraca bahan makanan		p o r a n	## ## #		p o r a n	22,000		p o r a n	## ## ##		p o r a n		p o r a n	## ## ##								p o r a n	## ## ##		p o r a n	59,200	%	%	Pangan Daerah
76			Penyediaan Pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	0	L a p o r a n	-	0	L a p o r a n	-	0	L a p o r a n	-	0	L a p o r a n	-	0	L a p o r a n	-						0	L a p o r a n	-	0	L a p o r a n	Rp -	0%	0%	Dinas Pangan Daerah
77			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan	5	L a p o r a n	## ## ## #	0	L a p o r a n	-	0	L a p o r a n	-	0	L a p o r a n	-	0	L a p o r a n	-						0	L a p o r a n	-	0	L a p o r a n	Rp -	0%	0%	Dinas Pangan Daerah

78			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan (CV Harga Pangan)	5	dokumen	###	1	dokumen	###	1	dokumen	###	0	dokumen	-	0	dokumen	###							0	dokumen	###	1	dokumen	###	20%	12%	Dinas Pangan Daerah
79			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	20	unit	###	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-							0	unit	-	0	unit	Rp	0%	0%	Dinas Pangan Daerah

80			Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-							0	unit	-	0	unit	-	Rp	0%	0%	Dinas Pangan Daerah
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	Keluarga	### ### ### #	0	Keluarga	-		Keluarga			Keluarga									Keluarga		0	Keluarga	-	Rp	0%	0%	

82			PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah penguatan cadangan pangan	37	Ton	## ## ## #	3.621	Ton	## ## ## #	1	Ton	## ## ## ##	0	Ton	-	0	Ton	## ## ## ##						0	Ton	## ## ## ##	3.621	Ton	## ## ## #	10%	3%	Dinas Pangan Daerah
83			Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kota	5	Laporan	## ## ## #	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-						0	Laporan	-	0	Laporan	Rp-	0%	0%	Dinas Pangan Daerah
84			Penyusunan rencana kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-						0	Dokumen	-	0	Dokumen	Rp-	0%	0%	Dinas Pangan Daerah

85			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan pangan pemerintah kota	37	Ton	## ## ## #	3.621	Ton	## ## ## #	3	Ton	## ## ## ##	0	Ton	-	0	Ton	## ## ## ##							0	Ton	## ## ## ##	3.621	Ton	## ## ## #	10%	5%	Dinas Pangan Daerah
86			Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Kota	Jumlah pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kota	0	Ton	-	0	Ton	-	0	Ton	-	0	Ton	-	0	Ton	-							0	Ton	-	0	Ton	Rp-	0%	0%	Dinas Pangan Daerah
87			PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL YANG TIDAK	Tersebutnya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan	3	Dokumen	## ## ## #	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-							0	Dokumen	-	0.000	Dokumen	Rp-	0%	0%	Dinas Pangan Daerah

			DITETA KAN OLEH PEMER INTAH PUSAT DAN PEMER INTAH PROVI NSI	Lokal																													
88			Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	3	Dokumen	#####	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-								0	Dokumen	-	0	Dokumen	Rp -	0%	0%	Dinas Pangan Daerah	
89			PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI	Output : Jumlah Dokumen analisis Konsumen	22	dokumen	#####	4	dokumen	#####	4	dokumen	#####	0	dokumen	-	1	dokumen	#####						1	dokumen	#####	5	Dokumen	#####	23%	15%	Dinas Pangan Daerah

[illegible]

			dalam Pengan ekaraga man Konsu msi Pangan Berbasi s Sumber Daya Lokal	aan kelom pok masya rakat dalam penga nekar agam an konsu msi panga n berba sis sumb er daya lokal		a n	#		a n	#		a n	##		a n									a n	##		a n	## #			Daer ah
9 2			Koordin asi dan sinkron isasi pemant auan dan evaluasi konsu msi per Kapita per tahun	Jumla h koordinasi dan sinkronisasi pema ntaua n dan evaluasi konsu msi per kapita	0	L a p o r a n	-	0	L a p o r a n	-	0	L a p o r a n	-	0	L a p o r a n	-							0	L a p o r a n	-	0	L a p o r a n	Rp -	0 %	0 %	Dina s Pang an Daer ah

[illegible]

[illegible]

[illegible]

101			PELAKSANA PENGAWASAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	Output : Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100	%	## ## ## #	8	%	## ## ## #	100	%	21,926,800	0	%	-	0	%	960,000.00						0	%	960,000.00	8	%	## ## ## #	8	%	7	%	Dinas Pangan Daerah
102			Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kota	Kelem bagaan keaman anan pangan segar daerah kota yang dibina	1	dokumen	## ## ## #	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-						0	dokumen	-	0	dokumen	Rp-	0	%	0	%	Dinas Pangan Daerah
103			Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar	4	dokumen	## ## ## #	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-						0	dokumen	-	0	dokumen	Rp-	0	%	0	%	Dinas Pangan Daerah

[illegible]

[illegible]

Berdasarkan hasil evaluasi capaian target kinerja Dinas Pangan Daerah sampai Triwulan II Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja kategori kurang baik, terlihat dari hasil evaluasi realisasi pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu sebesar 21,06%. Secara obyektif masih terdapat berbagai kelemahan kinerja organisasi terutama menyangkut masalah koordinasi baik dengan instansi vertikal terkait dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon belum sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini membawa implikasi terhadap kinerja pelayanan menjadi kurang maksimal. Di samping itu kurangnya data dan informasi terkait dengan bidang - bidang pembangunan Kota Tomohon maupun data - data dari dinas instansi terkait untuk kelengkapan perencanaan dan kebutuhan permintaan data dari lingkungan eksternal menyangkut program dan kegiatan ketahanan pangan daerah. Adapun pengaruh berkurangnya anggaran untuk kegiatan teknis karena adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan belum bisa dilaksanakan.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsultasi dan komunikasi dengan TAPD Kota Tomohon untuk penambahan anggaran dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai fungsi tugas Dinas Pangan
2. Konsultasi dan komunikasi masing-masing bidang sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan kinerja perencanaan perlu dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal dalam upaya memperkuat program ketahanan pangan daerah.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon dapat dilihat pada table di bawah ini dan tergambar dalam Lampiran Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PANGAN DAERAH KOTA TOMOHON

NO	INDIKATOR	SPM STANDAR NASIONAL	IKK	TAHUN RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (Tahun-n)	Tahun 2023 (Tahun n+1)	Tahun n 2020 (tahun n n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun n+1)	
	Cakupan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kota				100%	100%	100%		98,08%	50,89%	100%	
	Prosentasi tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100%	100%	100%		100%	50%	100%	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen		7 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	
	Prosentasi capaian penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah dan koordinasi penyusunan laporan keuangan perangkat daerah				100%	100%	100%		100%	50%	100%	
	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan		14 Bulan	7 Bulan	14 Bulan	
	Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi keuangan				1 Orang	1 Orang	1 Orang		1 Orang	1 Orang	1 Orang	
	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				1 Orang	1 Orang	1 Orang		1 Orang	1 Orang	1 Orang	

	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	--

Tabel 2.3.
INDIKATOR KINERJA SASARAN URUSAN PANGAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
				Capaian 2021 (n)	2022 (1)	2023 (2)	2024 (3)	2025 (4)	2026 (5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Untuk Mewujudnya Kedaulatan Pangan	Meningkatkannya Produksi Komoditas Pertanian Untuk Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi:						
			Konsumsi energi/kapita/hari	2183	2100	2100	2100	2100	2100
			Konsumsi protein/kapita/hari						
			PPH konsumsi (skor)	71,7	57	57	57	57	57
				87,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
			Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah:						
			Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	3,621	3	37	37	37	37

			Stabilitas Harga Pangan Pokok:						
			Koefisien Variasi (CV) harga pangan Target nasional (%):						
			Beras						
			Cabai Rawit						
			Bawang Merah	1,22	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
			Telur Ayam Ras	35,82	≤ 25	≤ 25	≤ 20	≤ 20	≤ 20
			Daging Ayam Ras	8,32	≤ 20	≤ 20	≤ 17	≤ 17	≤ 17
				5,21	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
				6,25	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
			Skor Pola Pangan Harapan						
			Ketersediaan:						
			Ketersediaan Energi/kap/hari	5651	2400	2400	2400	2400	2400
			Ketersediaan Protein/kap/hari						
			Analisis Skor PPH Ketersediaan	119,84	63	63	63	63	63
				89,74	88,8	87,1	87,6	88,6	89,1

2.3 . Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah kemandirian pangan masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan. Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut; pertambahan penduduk, semakin terbatas sumber daya alam, beralihnya fungsi lahan pertanian, terbatas prasarana dan sarana usaha di bidang pangan, ketatnya persaingan pasar dengan produk import, besarnya proporsi penduduk miskin, permintaan bahan pangan meningkat dipicu pendapatan, kesadaran, kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

Permasalahan urusan Pangan dalam Rancangan RPJMD Kota Tomohon Periode 2021–2026 hubungannya dengan Renstra Periode 2021–2026 Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian permasalahan, sebagai berikut :

I. Permasalahan Umum Pangan :

- Bencana (alam, ekonomi, sosial);
- Perubahan Iklim global;
- Alih fungsi lahan (lahan produktif;
- Transformasi teknologi dan budaya;
- Dukungan kebijakan (regulasi);
- Pertambahan penduduk (deret ukur);
- Gejolak harga (stabilitas harga pasar);
- Pasar pangan tidak menentu;
- Sumber daya manusia dan anggaran/modal usaha;
- Mutasi minat/alih profesi;
- Insentif menurun (penghasilan pekerja);
- Gangguan distribusi (pasokan bahan pangan)

II. Permasalahan Spesifik Pangan :

- Ketersediaan bahan pangan belum terpenuhi secara maksimal dan adanya penurunan produksi pangan utama (komoditas beras);

- Terjadi kelebihan konsumsi 278 kkal/kapita/hari, idealnya sebesar 2150 kkal/kapita/hari sedangkan capaian Kota Tomohon 2428 kkal/kapita/hari;
- Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi belum mencapai skor ideal nasional sebesar 100, capaian Kota Tomohon Tahun 2019 baru sebesar skor 93,2;
- Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat konsumen/produsen tentang pangan yang aman dan sehat untuk di konsumsi;
- Penguatan cadangan pangan belum maksimal dimana sesuai Permentan Nomor 11 Tahun 2018 untuk Kota Tomohon seharusnya tersedia sebesar 37,37 Ton/Tahun capaian s/d Tahun 2020 hanya sebesar 20,25 Ton;
- Jumlah lumbung pangan masyarakat baru tersedia 2 (dua) unit tetapi yang aktif/berfungsi hanya 1 (satu) unit;
- Belum tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan di Kota Tomohon;
- Masih terbatasnya dukungan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan pengelolaan pangan/pertanian.

III. Permasalahan Urusan Pangan Berdasarkan Tupoksi Bidang :

3.1.1. Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan

1. Dari aspek ketersediaan pangan masih tingginya ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap bahan pangan beras 94,608 kg/kapita/tahun (Hasil Analisis NBM Antap Tahun 2020), semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif ke sektor non pertanian menyebabkan menyempitnya lahan pertanian tanaman pangan selain itu untuk memenuhi ketersediaan dalam daerah maka Kota Tomohon masih tergantung pada daerah lain untuk pasokan pangan beras.
2. Masih terdapatnya penduduk miskin yang rentan rawan pangan, berdasarkan data BPS Kota Tomohon Tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Tomohon sampai dengan tahun 2020 mencapai 6,06% atau sebesar 6.359 ribu jiwa dari 104.932 jiwa dilihat dari [Garis Kemiskinan Non Makanan \(GKNM\)](#).
3. Peta Kerawanan Pangan belum tersedia untuk pemetaan wilayah tahan dan rentan terhadap ketersediaan pangan.

3.1.2. Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan

1. Cadangan pangan masyarakat perlu di tingkatkan untuk mengantisipasi musim-musim paceklik atau kondisi darurat akibat adanya bencana alam sampai Tahun 2020 cadangan pangan masyarakat belum terlihat ini didapat dari data lumbung pangan masyarakat (LPM) yang belum dioptimalkan di 2 (dua) Lumbung Pangan.

Artinya cadangan pangan perlu ditingkatkan dengan penguatan lumbungan pangan masyarakat.

2. Dari aspek distribusi pangan, tidak stabilnya harga pangan yang sangat mempengaruhi inflasi daerah dari data yang ada jenis pangan cabe dan bawang merah yang tidak stabil.

3.1.3 Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan

Dari hasil Skor PPH konsumsi tahun 2020 dengan Skor 93,2 sudah cukup tinggi, hal ini menggambarkan konsumsi masyarakat kota tomohon sudah beragam namun belum berimbang. Dari hasil PPH Konsumsi Kkal Kota Tomohon Sebesar 2428 Kkal, Skor tersebut melebihi Skor Ideal 2150 Kkal. dapat dilihat dari 9 kelompok pangan yang nilainya paling signifikan terdapat pada kelompok pangan padi-padian (beras), hal ini menunjukkan bahwa Konsumsi masyarakat kota tomohon masih didominasi jenis pangan beras (Sumber Data : Susenas Kota Tomohon Tahun 2019) Hasil Analisis Konsumsi Pangan Kota Tomohon.

Dari aspek keamanan pangan telah dilakukan pengawasan terhadap keamanan pangan segar di Kota Tomohon dari Tahun 2017–2020 pengawasan keamanan pangan segar berupa sayur dan buah sudah mencapai 100% berdasarkan sampel pangan segar yang diuji dengan rapid tes kit (Sumber Data Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon). Artinya Pengawasan Keamanan pangan selalu dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan dengan menggunakan uji test kit keamanan pangan berupa uji pestisida, boraks, formalin, rhodamin B, dan Metanil Yellow. Hasil Test kit menunjukkan masih terdapatnya cemaran biologis, kimia atau benda lain pada pangan segar yang beredar di masyarakat sehingga dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Hal ini disebabkan karena Pemahaman Petani dan Pelaku Usaha Pangan segar belum optimal dan Kerjasama Dinas dengan **SUCOFINDO** untuk uji lanjut laboratorium masih terbatas hal ini dilihat dari target RENSTRA 10 Komoditi tercapai 1 komoditi.

Tabel 2.4

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
DINAS PANGAN DAERAH KOTA TOMOHON

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR - FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	BIDANG URUSAN PANGAN			
II	INDIKATOR KINERJA			
1	PPH Ketersediaan	<	Konsumsi masyarakat masih tergantung pada bahan pangan beras sebagai makanan pokok	Penganekaragaman konsumsi jenis bahan pangan
2	Cadangan Beras Pemerintah Kota	<	Tercapai, tetapi belum mencukupi sesuai kebutuhan faktor penyebab adalah kemampuan ketersediaan anggaran daerah	Peningkatan kapasitas produksi dan optimalisasi pemanfaatan lahan sawah
3	Coefisien Variasi (CV) : - Beras	=	Tercapai, tetapi kondisi pasar terhadap harga sering mengalami perubahan (supply demand) – fleksibilitas dan elastisitas harga	Suplay beras dari luar daerah cukup terpenuhi dan pasokan berjalan lancar
	- Cabe Rawit	<	Penetapan harga jual masih dikendalikan oleh produsen dan pengecer di tingkat pedagang	Pengendalian melalui intervensi kebijakan pemerintah

	- Bawang Merah	<	Penetapan harga jual masih dikendalikan oleh produsen dan pengecer di tingkat pedagang	Pengendalian melalui intervensi kebijakan pemerintah
	- Daging Ayam Ras	<	Penetapan harga jual masih dikendalikan oleh produsen dan pengecer di tingkat pedagang	Pengendalian melalui intervensi kebijakan pemerintah
	- Telur Ayam Ras	=	Tercapai, tetapi dari aspek daya beli menjadi masalah karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan financial sama	Tomohon merupakan salah satu daerah produsen dan penyalur telur ayam ras
4	Jumlah pembinaan/koordinasi kelembagaan distribusi pangan	=	Tercapai, tetapi masih perlu peningkatan fungsi koordinasi dan pelibatan stakeholder dalam pengambilan keputusan bersama	Terbangunnya informasi dan komunikasi yang baik antar kelembagaan terkait
5	Jumlah angka ketersediaan energy dan protein per kapita	>	Pola makan masyarakat belum secara merata menerapkan diversifikasi konsumsi bahan pangan B2SA	Pengendalian melalui intervensi kebijakan pemerintah/himbauan
6	Jumlah Angka Konsumsi Energi/Kapita/hari	>	Pola makan masyarakat belum secara merata menerapkan diversifikasi konsumsi bahan pangan B2SA	Pengendalian melalui intervensi kebijakan pemerintah/himbauan
7	Konsumsi Protein/kapita/hari	>	Pola makan masyarakat belum secara merata menerapkan diversifikasi konsumsi bahan pangan B2SA	Pengendalian melalui intervensi kebijakan pemerintah/himbauan
8	Jumlah angka PPH Konsumsi	>	Pola makan masyarakat belum secara merata menerapkan diversifikasi konsumsi bahan pangan B2SA	Pengendalian melalui intervensi kebijakan pemerintah/himbauan

9	Jumlah dokumen laporan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local	=	Tercapai, tetapi kualitas dan kelengkapan dokumen laporan belum secara terperinci memenuhi standard kebutuhan laporan sebagaimana yang dibutuhkan	Terbangunnya informasi dan komunikasi yang baik antar kelembagaan terkait
10	Jumlah rekomendasi pangan segar yang memenuhi syarat	<	Penyediaan sarana pendukung untuk melakukan uji pestisida masih terbatas	Penambahan alat uji test kit untuk uji pestisida dan bahan kimia lainnya
11	Jumlah registrasi PSAT	<	Belum semua komoditi pangan segar yang diproduksi dari produsen telah memenuhi syarat	Penerapan standard operasional prosedur ditingkat lapangan/produsen
12	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	<	Belum tersedianya sumber daya aparatur yang akan menangani dan dukungan anggaran yang belum tertata	Penyiapan sumber daya aparatur dan ketersediaan anggaran kegiatan

**) Kolom.1 diisi nomor*

Kolom.2 diisi dengan bidang urusan/indiaktor

Kolom.3 Interpretasi (Belum Dicapai, Sesuai, Melampui)

Kolom.4 Permasalahan tidak tercapainya sesuai dengan target indicator

Kolom.5 diisi dengan faktor-faktor keberhasilan pencapaian target indikator

Tabel 2.5
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI TAHUN 2021 – 2026

VISI : TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA				
NO	MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PERMASALAHAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
MISI 4 : MEMAJUKAN SISTEM PERTANIAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN				
1	MISI : WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.	1. Aspek Ketersediaan Pangan Masih tingginya ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap pangan beras yaitu sekitar 94,9 kg/kapita/tahun Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif ke sektor non pertanian yang menyebabkan menyempitnya lahan pertanian tanaman pangan	- Koordinasi dan komunikasi - Data dan sumber data - Ketersediaan anggaran	- Perlu ada MOU/kerjasama - Fungsi tugas kerja DKP perlu di maksimalkan
2	PROGRAM JANJI POLITIK (POINT 20 PADA RPJMD) Mekanisasi alat-alat pertanian, penyediaan bibit dan pupuk yang terjangkau bagi petani.	Masih terdapatnya penduduk miskin yang rentan rawan pangan - Belum tersedia peta kerentanan dan ketahanan pangan		- Gerak cepat tanam di dimaksimalkan - Pelatihan penyusunan peta kerawanan pangan

3	PROGRAM PRIORITAS PERTANIAN/PANGAN Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Program penyuluhan pertanian. Program pengelolaan sumber daya air.	2. Aspek Distribusi dan Cadangan Pangan - Cadangan pangan masyarakat belum terlihat/terpenuhi (pemenuhan kapasitas produksi), sumber data di dapat dari kelembagaan lumbung pangan masyarakat (LPM) dan usaha/unit penggilingan padi masyarakat - Fluktuasi Harga bahan pangan terjadi pada komoditas Bawang Merah dan Cabe.	- Ketersediaan dana yang masih kurang - Kurangnya Pemahaman - Penentuan harga pemerintah yang belum ada (perda)	- Anggaran ditambah disesuaikan dengan Aturan Permentan No... - Perlu ada pelatihan/sosialisasi - Harus ada kajian pangan Lokal yang belum ditentukan batasan harga maksimum
		3. Aspek Konsumsi Pangan - Sudah beragam tapi belum berimbang - Konsumsi masih tergantung pada Beras - Pemahaman petani dan pelaku usaha pangan segar belum optimal - Kerjasama Dinas dengan SUCOFINDO untuk uji lanjut laboratorium masih terbatas	- Masyarakat belum paham - Sosialisasi yang msh kurang - Kerjasama masih terbatas - Ketersediaan anggaran	- Perlu adanya Sosialisasi - Peningkatan Lomba Cipta Menu Peningkatan Kelompok wanita Tani, P2L - Perlu adanya kerjasama MOU

Isu – Isu penting yang bersifat strategis terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi program peningkatan ketahanan pangan daerah, adalah :

1. Perubahan iklim global yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil produksi tanaman pangan;
2. Biaya produksi tinggi tidak diimbangi dengan kapasitas produksi dan harga jual serta penguasaan lahan petani relatif kecil;
3. Pertumbuhan penduduk tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan (kebutuhan pangan terus meningkat);
4. Luas lahan pertanian pangan terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian;
5. Pengelolaan/penanganan pasca panen kurang maksimal karena sebagian petani masih menggunakan cara tradisional sehingga tingkat kehilangan hasil besar.
6. Fluktuasi harga pangan dipengaruhi persaingan permintaan, produksi yang musiman dan tidak merata antar musim, dan ongkos angkut;
7. Kewaspadaan keamanan pangan yang disebabkan oleh factor kimiawi, biologis, manusia, dan fisik lainnya.

Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon berdasarkan kondisi nyata dan hasil analisis SWOT, sebagai berikut :

1. Adanya perdagangan bebas dengan terbukanya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebagai bagian dari perjanjian kerjasama perdagangan di tingkat Negara – Negara Asia daya saing semakin tinggi dan berkualitas;
2. Kebiasaan pola makan masyarakat untuk dirubah masih perlu waktu dan walaupun terus disosialisasikan;
3. Penyusutan lahan pertanian pangan produktif masih terus berlangsung sehingga mempengaruhi produksi dan ketersediaan bahan pangan;
4. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan;
5. Menurunnya debit air dan kualitas air tanah karena sumber daya air semakin berkurang dan kerusakan ekosistem.

Peluang pengembangan kinerja pelayanan dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan daerah di Kota Tomohon dari hasil kajian dan analisis SWOT, antara lain :

1. Munculnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, keamanan mutu dan gizi pangan;
2. Tomohon sebagai kota transit dan kota agribisnis terutama bahan kebutuhan pangan;
3. Perkembangan penduduk mempengaruhi tingkat kebutuhan dan harga jual terhadap produk pangan masyarakat petani dan pedagang;

4. Pangan lokal menunjang ketersediaan pangan masyarakat dan mendukung diversifikasi konsumsi pangan;
5. Perkembangan kota sebagai kota wisata, perdagangan, kota pendidikan, dan kota religius memberikan nilai tambah terhadap usaha produktif masyarakat.

Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi yang didalamnya memuat peta kerawanan pangan dan gizi yang dikarenakan kinerja SDM belum optimal sebagai faktor penghambat namun faktor pendorongnya adalah perlu adanya pelatihan yang terintegrasi sehingga ketahanan pangan masyarakat dapat terwujud. Selain itu pula sumber data yang tersedia belum begitu optimal yang disebabkan koordinasi antar sector yang belum terkoneksi secara baik. Sebab itu diperlukan adanya MoU dengan pihak lain yang merupakan sumber-sumber data yang dibutuhkan. Selain itu Dewan Ketahanan Pangan belum berjalan dengan maksimal sehingga perlu dilakukan optimalisasi terhadap kinerja Dewan Ketahanan Pangan yang telah dibentuk untuk menghasilkan rekomendasi penting di bidang pangan demi peningkatan ketahanan pangan daerah Kota Tomohon. Demikian juga dengan kegiatan Gerak Cepat Tanam (GCT) yang sangat perlu untuk dimaksimalkan pelaksanaannya dengan melibatkan keikutsertaan seluruh masyarakat Kota Tomohon. Harga bahan pangan sampai saat ini masih fluktuatif sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) namun HPP tersebut masih terbatas pada komoditas pangan tertentu, ini merupakan permasalahan dan faktor penghambat. Namun faktor pendorongnya adalah ketersediaan pangan di Kota Tomohon yang selalu surplus terutama pada 9 (Sembilan) bahan pangan pokok.

Dari aspek Cadangan Pangan pemerintah yang jumlahnya masih belum cukup dikarenakan ketersediaan anggaran yang masih kurang. Selain itu Lumbung Pangan Masyarakat belum berfungsi dengan maksimal karena SDM masyarakat pengelola lumbung pangan masih belum optimal sehingga diperlukan pelatihan bagi pengelola-pengelola lumbung pangan masyarakat.

Permasalahan karena pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (Tahun 2020 Skor PPH 93,2) sudah cukup tinggi. Hal ini menggambarkan konsumsi masyarakat Kota Tomohon sudah beragam namun belum berimbang. Dari hasil PPH Konsumsi Kkal Kota Tomohon Sebesar 2428 Kkal, Skor tersebut melebihi Skor Ideal 2150 Kkal. dapat dilihat dari 9 kelompok pangan yang nilainya paling signifikan terdapat pada kelompok pangan padi-padian (beras), faktor penghambat dalam hal ini menunjukkan bahwa Konsumsi masyarakat kota tomohon masih didominasi, jenis pangan beras (Sumber Data : Hasil Susenas Pola Konsumsi Pangan Kota Tomohon Tahun 2019).

Identifikasi terhadap isu-isu yang berkembang dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan daerah dilakukan identifikasi secara bertingkat/berjenjang sebelum dijadikan sebagai bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, hal ini dilakukan untuk melihat keterkaitan dan korelasi terhadap pembangunan ketahanan pangan secara global, nasional, dan daerah yang saling bersinergis dan terintegrasi juga terkait dengan Penilaian Indeks Ketahanan Pangan Nasional dan Internasional, serta keterkaitannya antara rencana strategis kementerian/lembaga, provinsi, dan daerah dijabarkan menjadi program prioritas pelayanan perangkat daerah.

2.4. Review Terhadap Perubahan Rkpd

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon berdasarkan RKPD.

Proses review terhadap RKPD diperlukan untuk :

1. Perbaikan indicator pada program/kegiatan/sub kegiatan agar lebih tajam dan tepat sasaran, terutama untuk kegiatan-kegiatan teknis;
2. Penambahan atau pengurangan pagu anggaran, penambahan atau pengurangan target kinerja dan kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Review terhadap RKPD tahun 2022 tergambar pada Lampiran Tabel 2.5

Hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan, antara rencana kerja (RENJA) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 beberapa Program/kegiatan/sub kegiatan dari target kinerja yang terdapat dalam Dokumen RKPD tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran akibat Pandemi Covid 19.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kota Tomohon

Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
					5,716,313,223					3,919,637,116	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Cakupan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kota	100%	3,360,793,873	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Cakupan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kota	100%	3,287,506,576	
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	31,823,900	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%		
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	14,146,500	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		

	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	KOTA TOMOH ON	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,315,800	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	KOTA TOMOH ON	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	KOTA TOMOH ON	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,067,600	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	KOTA TOMOH ON	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	KOTA TOMOH ON	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,167,600	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	KOTA TOMOH ON	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KOTA TOMOH ON	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,087,600	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KOTA TOMOH ON	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		

	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2,500,000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	6,538,800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen		
	Administrasi keuangan perangkat daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi capaian penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah dan koordinasi penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	100%	2,361,862,970	Administrasi keuangan perangkat daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi capaian penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah dan koordinasi penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	100%	2,385,357,691	

	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	KOTA TOMOH ON	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2,324,181,970	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	KOTA TOMOH ON	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2,365,557,691	
	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	KOTA TOMOH ON	Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi keuangan	1 Orang	9,240,000	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	KOTA TOMOH ON	Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi keuangan	1 Orang	9,240,000	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	KOTA TOMOH ON	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3 orang	19,560,000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	KOTA TOMOH ON	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 orang	10,560,000	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA TOMOH ON	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,302,400	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA TOMOH ON	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	KOTA TOMOH ON	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	KOTA TOMOH ON	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		

	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Dokumen	2,578,600	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Dokumen		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KOTA TOMOHON				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KOTA TOMOHON				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi meningkatnya penatausahaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	31,190,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi meningkatnya penatausahaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	23,950,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Orang	31,190,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Orang	23,950,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi meningkatnya administrasi kepegawaian	100%	70,792,200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi meningkatnya administrasi kepegawaian			

			perangkat daerah					perangkat daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KOTA TOMOH ON	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Pasang	59,418,200	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KOTA TOMOH ON	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	KOTA TOMOH ON	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	11,374,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	KOTA TOMOH ON	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA TOMOH ON	Prosentasi terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	162,412,775	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA TOMOH ON	Prosentasi terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	96,713,925	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	4,674,750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	626,500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	40,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	19,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah	12 Bulan	1,759,275	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah	12 Bulan	2,293,725	

			Tangga					Tangga			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA TOMOH ON	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	31,333,450	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA TOMOH ON	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	22,796,700	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	6,011,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12,098,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	2,736,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	1,425,000	
	Penyediaan Bahan/Material	KOTA TOMOH ON	Jumlah penyediaan bahan/material	12 Bulan	8,491,800	Penyediaan Bahan/Material	KOTA TOMOH ON	Jumlah penyediaan bahan/material	12 Bulan		
	Fasilitas Kunjungan Tamu	KOTA TOMOH ON	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	7,500,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	KOTA TOMOH ON	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	2,500,000	
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA TOMOH ON DAN LUAR KOTA TOMOH ON	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	59,906,000	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA TOMOH ON DAN LUAR KOTA TOMOH ON	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	35,974,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOH ON	Prosentasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	502,478,628	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOH ON	Prosentasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	673,784,960	

			daerah					daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOTA TOMOH ON	Jumlah meterai	350 Lembar	3,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOTA TOMOH ON	Jumlah meterai	1000 lembar	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	51,978,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	16,202,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	447,000,628	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	647,582,960	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOH ON	Prosentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	200,233,400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOH ON	Prosentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	107,700,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KOTA TOMOH ON	jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	86,806,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KOTA TOMOH ON	jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	68,130,000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	113,426,600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOTA TOMOH ON	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	39,570,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	KOTA TOMOH ON	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan kemandirian pangan	100%	98,677,800	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	KOTA TOMOH ON	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan kemandirian pangan	0,4		
	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOH ON	Prosentasi tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kota	100%	98,677,800	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOH ON	Prosentasi tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kota	100%		
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	KOTA TOMOH ON	Jumlah Infrastruktur lumbung pangan	-		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	KOTA TOMOH ON	Jumlah Infrastruktur lumbung pangan			
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	KOTA TOMOH ON	Jumlah infrastruktur lantai jemur			Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	KOTA TOMOH ON	Jumlah infrastruktur lantai jemur			

	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	KOTA TOMOH ON	Jumlah insfratraktur pendukung kemandirian pangan lainnya	2 Unit	78,177,800	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	KOTA TOMOH ON	Jumlah insfratraktur pendukung kemandirian pangan lainnya	2 LPM		
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	KOTA TOMOH ON	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	2 Laporan	20,500,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	KOTA TOMOH ON	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	2 Laporan		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	KOTA TOMOH ON	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	94%	2,055,067,100	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	KOTA TOMOH ON	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	100%	631,390,540	
	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	KOTA TOMOH ON	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100%	131,033,000	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	KOTA TOMOH ON	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100%	39,490,150	

	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	KOTA TOMOHON	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	2 Dokumen	31,033,000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	KOTA TOMOHON	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	2 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	4 Laporan	10,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya			
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan (CV Harga Pangan)	1 Dokumen	80,000,000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan (CV Harga Pangan)	1 Dokumen	29,490,150	
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	KOTA TOMOHON	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	6 Lembaga	10,000,000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	KOTA TOMOHON	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan			
	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Jumlah penguatan cadangan pangan	3 Ton	1,571,498,000	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Meningkatnya kedaulatan (ketersediaan) pangan beras	3 Ton	190,989,700	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah kota	3 Ton	1,571,498,000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah kota	3 Ton	190,090,700	

	PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL YANG TIDAK DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI	KOTA TOMOHON	Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	-		PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL YANG TIDAK DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI	KOTA TOMOHON	Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal			
	Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	KOTA TOMOHON	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	-		Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	KOTA TOMOHON	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal			
	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	KOTA TOMOHON	Prosentasi tercapainya target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	100%	352,536,100	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	KOTA TOMOHON	Prosentasi tercapainya target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	100%	400,910,690	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen analisis Konsumsi Energi, Konsumsi Protein dan Skor PPH Konsumsi	1 Dokumen	29,273,100	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen analisis Konsumsi Energi, Konsumsi Protein dan Skor PPH Konsumsi	1 Dokumen		

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KOTA TOMOHON	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	4 Laporan	323,263,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KOTA TOMOHON	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2 Laporan	400,910,690	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	KOTA TOMOHON	Persentase Penanganan Angka Kerawanan Pangan	100%	60,000,000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	KOTA TOMOHON	Persentase Penanganan Angka Kerawanan Pangan	100%		
	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	KOTA TOMOHON	Prosentasi teridentifikasinya wilayah rentan dan tahan pangan	100%	40,000,000	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	KOTA TOMOHON	Prosentasi teridentifikasinya wilayah rentan dan tahan pangan	100%		
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	KOTA TOMOHON	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahirkan	1 Peta	40,000,000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	KOTA TOMOHON	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahirkan			
	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Tertanganinya kerawanan pangan	100%	20,000,000	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Tertanganinya kerawanan pangan			

Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kota	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kota			
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	KOTA TOMOHON	Cakupan pengawasan pangan segar asal tumbuhan	100%	141,774,450	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	KOTA TOMOHON	Cakupan pengawasan pangan segar asal tumbuhan	100%	740,000	
PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Prosentasi tersedianya dokumen hasil pengawasan keamanan pangan, sertifikat keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah dan pengadaan sarana prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan	100%	141,774,450	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Prosentasi tersedianya dokumen hasil pengawasan keamanan pangan, sertifikat keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah dan pengadaan sarana prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan	100%	740,000	
Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kota	KOTA TOMOHON	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah kota yang dibina	1 Dokumen	7,500,000	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kota	KOTA TOMOHON	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah kota yang dibina			
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kota	1 Sertifikat	12,500,000	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan			

					Kabupaten/Kota		daerah kota			
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kota	1 Dokumen	60,119,950	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kota	1 Dokumen	740,000	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kota	1 Dokumen	6,654,500	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kota			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen pengadaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kota	1 Dokumen	55,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen pengadaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kota			

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Mekanisme penerimaan usulan program/kegiatan dari masyarakat di Dinas Pangan Daerah dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang dan penerimaan proposal yang langsung ditujukan ke SKPD.

Namun secara kuantitas, proporsi usulan yang masuk lebih banyak melalui pengajuan langsung ke SKPD, dibandingkan pada saat forum Musrenbang. Hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon lebih banyak merupakan bantuan stimulant, bersifat inisiasi, karena secara struktur kelembagaan, Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon lebih cenderung kepada fungsi koordinatif.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 mengacu pada program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Pusat/Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan merujuk pada Buku Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024, masuk pada tujuh agenda pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Kedaulatan Pangan memberikan semangat dan kekuatan untuk mencapai pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat perseorangan yang dicerminkan dengan :

1. Menentukan kebijakan pangan secara mandiri;
2. Membangun kemampuan memproduksi beranekaragam pangan dari dalam negeri;
3. Melindungi hak pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk menentukan system pangan yang sesuai potensi sumber daya lokal.

Arah kebijakan umum Badan Ketahanan Pangan Tahun 2022-2024 adalah Pemantapan Ketahanan Pangan, meliputi aspek: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Arah kebijakan dan strategi Kelembagaan Badan Ketahanan Pangan Nasional, dengan memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, arah kebijakan adalah pemantapan ketahanan pangan yang meliputi :

1. Aspek Ketersediaan Pangan;
2. Keterjangkauan Pangan dan;
3. Pemanfaatan Pangan.

Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional, diarahkan pada Aspek Ketersediaan Pangan, difokuskan pada ;

- (a) peningkatan ketersediaan pangan berbasis pangan lokal;
- (b) penanganan akses pangan secara fisik dan ekonomi; dan
- (c) penanganan daerah rentan rawan pangan.

Aspek Keterjangkauan Pangan, difokuskan pada :

- (a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
- (b) penguatan cadangan pangan.

Aspek Pemanfaatan Pangan, difokuskan pada :

- (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan local; dan
- (b) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

Implementasi yang diperlukan adalah dukungan kebijakan, antara lain :

1. Peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sector dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan;

2. Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan;
3. Peningkatan kerjasama internasional;
4. Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
5. Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan, dan;
6. Dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

Berdasarkan arah kebijakan Tahun 2023 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan memperhatikan isu strategis dan permasalahan yang ada serta Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota, maka tema tahun 2023 adalah : **"Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, kualitas SDM, serta Pemulihan Ekonomi"**.

Dalam upaya mendukung tema pembangunan tersebut, maka Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon mendukung program prioritas pembangunan pada tahun 2023 diarahkan pada program prioritas Meningkatkan pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Terpilih Periode 2022– 2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera

Misi :

1. Menjaga dan Melestarikan Tomohon Sebagai Kota Religius;
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Berbagai Sektor ;
3. Menjadikan Tomohon Sebagai Kota Wisata Dunia;
4. Memajukan Sistem Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan;
5. Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berintegritas.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Tomohon, Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pangan pada pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 telah menetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

Tujuan :

Terwujudnya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan.

SASARAN :

Tabel. 3.1.

Target Indikator Sasaran Tahun 2022 dan 2023 serta Capaian Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET 2023
	Terwujudnya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Untuk Mewujudnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi:			
			Konsumsi energi/kapita/hari	2183	2100	2100
			Konsumsi protein/kapita/hari	71,7	57	57
			PPH konsumsi (skor)	87,5	92,5	92,5
			Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah:			
			Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	3,621 Ton	3 Ton	37 Ton
			Stabilitas Harga Pangan Pokok:			
			Koefisien Variasi (CV) harga pangan	1,22	≤ 5	≤ 5
			Target nasional (%): Beras	35,82	≤ 25	≤ 25
			Cabai Rawit	8,32	≤ 20	≤ 20
			Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan:	5651 Kkal	2400	2400
			Ketersediaan Energi/kap/hari	119,84 Gram		
			Ketersediaan Protein/kap/hari	89,74	63	63
			Analisis Skor PPH Ketersediaan		88,8	87,1

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pangan Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Renja Tahun 2023 sebanyak 5 Program, 11 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan teknis seperti kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang pada tahun 2022 anggarannya bersumber dari DAK Non fisik, terfokus pada Kelompok Tani Tahap Penumbuhan di 4 Kelurahan yaitu Tinoor Dua, Kinilow Satu, Woloan Tiga dan Walian Dua. Untuk tahun 2023 kelompok-kelompok ini akan beralih ke Tahap Pengembangan sehingga demi kelanjutan Program Kegiatan ini yang juga merupakan penunjang indicator kegiatan dalam pelaksanaan pencegahan stunting daerah Kota Tomohon, sangat diperlukan alokasi anggaran yang cukup untuk

4 kelompok Tahap Pengembangan. Selain itu juga perlu dianggarkan lagi untuk 4 kelompok Tahap Penumbuhan yang baru yang direncanakan akan difokuskan di 4 Kelurahan yaitu Kayawu, Taratara Dua, Rurukan Satu dan Pangolombian. Selain itu kegiatan yang bersifat analisis dilaksanakan di Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon dengan dukungan data dari instansi terkait dan juga masyarakat seperti petani, pengusaha, pedagang dll. Untuk kegiatan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan dilaksanakan di pasar tradisional, pasar modern dan penggilingan. Sedangkan untuk kegiatan pengawasan keamanan pangan berfokus pada pedagang pangan segar di pasar tradisional.

Terdapat beberapa kegiatan yang di rencanakan dalam rancangan awal RKPD 2023 yang tidak akan dilaksanakan lagi karena kekurangan anggaran. Masih ada beberapa kegiatan teknis yang membutuhkan tambahan anggaran seperti kegiatan Pekarangan Pangan Lestari dan Kegiatan Lomba Cipta Menu/Festival Kuliner yang di tahun 2022 pelaksanaannya dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan pendukung Tomohon Internasional Flower Festival (TIFF) 2022, sehingga kemungkinan besar juga untuk dilaksanakan di tahun 2023 sebagai pendukung TIFF 2023.

Berkaitan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan akan menjawab Visi dan Misi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya pada Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan dan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan ketika terlaksana akan menjawab visi dan misi Kepala Daerah yaitu visi berdaya saing, mandiri dan misi mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) terkait urusan pangan adalah bahwa salah satu target pemerintah adalah pencapaian pada tahun 2030 bahwa masyarakat kurang mampu memperoleh pangan yang aman dan bergizi dalam jumlah yang cukup. Berhubungan dengan itu, ada kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang menunjang pencapaian SDGs, yang dilakukan adalah analisis mutu dan gizi produk pangan dan pengujian bahan kimia berbahaya pada pangan segar dan olahan serta kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon tidak ada karena walaupun urusan Pangan adalah Wajib tetapi Non Pelayanan Dasar. Untuk semua kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan banyak memberdayakan potensi ekonomi daerah contohnya potensi sumber daya manusia pertanian di Kota Tomohon yang terus diberi perhatian lebih, baik kelompok tani (termasuk KWT) yang menggarap (lewat bantuan saprodi dan alsintan pasca produksi) maupun yang berusaha dan berbisnis di bidang pertanian pangan (cat : 22,51 % dari penduduk Kota Tomohon). Lebih jelas pada Lampiran Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Rencana Tahun 2024		
										Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program		Tolok Ukur	Targ et															
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								4,241,476,000			6,086,538,374		
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,229,846,650			3,784,887,203		
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,384,281,922			2,656,540,539		
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Orang/bulan	100 Persen	2,364,481,922	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,624,377,474
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	19,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0

														m				
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								23,950,000					35,166,725
2	09	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	23,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	35,166,725
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								90,368,800					183,122,660
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	30,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	61,500,000
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	990,600	Dana Transfer Umum-Dana		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	5,903,257

								perangka t daerah	Keluraha n					Aloka si Umu m				
2	0 9	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penunjang urusan pemerinta han daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksan aan administ rasi umum perangka t daerah	Kota Tomohon , Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 Perse n	1 Paket	100 Persen	14,512,40 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m		Cakupan penunjan g urusan pemerinta han daerah	100 Pers en	15,375,00 0
2	0 9	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan penunjang urusan pemerinta han daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksan aan administ rasi umum perangka t daerah	Kota Tomohon , Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 Perse n	1 Paket	100 Persen	6,457,800	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m		Cakupan penunjan g urusan pemerinta han daerah	100 Pers en	8,200,000
2	0 9	0 1	2.0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan penunjang urusan pemerinta han daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksan aan administ rasi umum perangka t daerah	Kota Tomohon , Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 Perse n	1 Laporan	100 Persen	4,000,000	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m		Cakupan penunjan g urusan pemerinta han daerah	100 Pers en	10,250,00 0

2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	12 Laporan	100 Persen	34,348,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	61,494,289
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								672,036,628				566,544,560	
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	10,250,000
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	12,936,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	43,794,560

2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	647,100,628	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	512,500,000
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								59,209,300				205,263,066
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 Persen	28,361,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	78,730,045
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Unit	100 Persen	30,848,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	126,533,021

								urusan pemerint ahan daerah										
2	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN							2,000,000						404,779,934
2	0	0	2.		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							2,000,000						404,779,934
2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaualatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,4 Rasio	2 Laporan	2 LPM	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaualatan dan Kemandirian Pangan	0,4 Rasio	20,500,000
2	0	0			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							954,000,000						1,697,955,114
2	0	0	2.		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							60,000,000						104,689,708

2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase Ketersediaan pangan (tersedian ya cadangan beras/jagung sesuai kebutuha n)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersalur kannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Tomohon , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	2 Laporan	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan pangan (tersedian ya cadangan beras/jagung sesuai kebutuha n)	94 Persen	32,939,708
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketersediaan pangan (tersedian ya cadangan beras/jagung sesuai kebutuha n)	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersalur kannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Tomohon , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	1 Dokumen	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan pangan (tersedian ya cadangan beras/jagung sesuai kebutuha n)	94 Persen	71,750,000
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								494,000,000	1,175,280,953			

2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	Kota Tomohon , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	37 Ton	100 Persen	494,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	94 Persen	1,165,030,953
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								400,000,000				397,484,453	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang	Kota Tomohon , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	3 Laporan	100 Persen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	94 Persen	358,750,000

							Beragam dan Bergizi Seimbang											
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							17,230,000					59,150,043	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							17,230,000					45,100,051	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Prosentasi Penanganan Angka Kerawanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	17,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Penanganan Angka Kerawanan Pangan	100 Persen	45,100,051
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							38,399,350					139,766,080	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							38,399,350					139,766,080	
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100 Persen	53,502,592

2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	26,399,350	Dana Transfer Umum-Dana Aloka si Umum		Cakupan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100 Persen	56,375,000
---	----	----	------	----	--	---	--	--	--	------------	-----------	------------	------------	---------------------------------------	--	---	------------	------------

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Implementasi dari Rencana Program dan Kegiatan yang telah tersusun Tahun 2023 seperti yang tertuang pada Lampiran Tabel 3.2, akan terlaksana dengan baik dan dapat menjawab setiap indicator yang telah menjadi Target Kinerja Sasaran yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ketika didukung oleh perencanaan, waktu pelaksanaan yang tepat dan anggaran yang sesuai kebutuhan. Menentukan Waktu Pelaksanaan Rencana Kerja tiap kegiatan tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana sampai Tahun 2022 sesuai jadwal. Sehingga beberapa kegiatan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat pelaksanaan yaitu saat tahap pergeseran anggaran.

Pendanaan semua Program dan Kegiatan Tahun 2023 untuk Perangkat Daerah Dinas Pangan bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.364.481.022	DAU
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	19.800.000	DAU
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.950.000	DAU
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30.060.000	DAU
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	990.600	DAU
			Penyediaan Bahan logistic kantor	14.512.400	DAU
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.457.800	DAU
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	DAU
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34.348.000	DAU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	DAU
			Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.936.000	DAU
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	647.100.628	DAU

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	28.361.300	DAU
			Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.848.000	DAU
2	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kota	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistic	2.000.000	DAU

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
3	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan Makanan	10.000.000	DAU
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	50.000.000	DAU
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota	494.000.000	DAU
		Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local	400.000.000	DAK NF DAU
4	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	17.230.000	DAU
5	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kota	Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kota	12.000.000	DAU
			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah	26.399.350	DAU

			Kab/Kota		
--	--	--	----------	--	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon. Semoga RENJA tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon.

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2023 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi,

dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah. antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Rencana Kerja Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Propinsi Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota , RKPD Kota Tomohon dan Renstra Dinas).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
- c. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah.

Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon adalah

dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah bertujuan :

- Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Daerah tahun 2023.
- Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
- Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah

BAB II

**HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kota Tomohon Tahun 2021.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat	Target Kinerja	Perkiraan Realisasi	Tingkat
			Tahun 2021	Tahun 2021	Realisasi (%)	Tahun 2022	Kinerja Tahun 2022	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(64)	7	8	(9) = (8)/(7)
2	Urusan Wajib Bukan							
	Pelayanan Dasar							
2.05	Bidang Urusan							
	Lingkungan Hidup							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kaupaten/kota	100	100	100%	100	100	100%
36	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	prosentase kegiatan perencanaan yang dilaksanakan	2	2	100%	2	2	100%
		penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2	2	100%	2	2	100%
		koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	100%	1	1	100%
		evaluasi kinerja perangkat						

		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	100%	1	1	100%
		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1	1	100%	1	1	100%
		penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	0	0%	1	1	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase kegiatan administrasi kepegawaian daerah	100	100	100%	100	100	100%
		pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	50	50	100%	50	50	100%
		pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1	0	0%	1	1	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6	6	100%	6	6	100%
		penyediaan peralatan perkantoran	5	1	20%	5	5	100%

		penyediaan peralatan rumah tangga	1	0	0%	1	1	100%
		penyediaan barang cetakan dan panggandaan	10	4	40%	10	10	100%
		penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	0	0%	1	1	100%

		fasilitas kunjungan tamu	12		0%	12	12	100%
		penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50	42	84%	60	60	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	0	0%	1	1	100%
		pengadaan meubel	0	0	#DIV/0!	1	1	100%
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1	1	100%	1	1	100%
		penyediaan jasa surat menyurat	2222	1441	65%	2500	2500	100%
		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	10	83%	12	12	100%
		penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	100%	1	1	100%
		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	100%	12	12	100%

	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	1	100%	1	1	100%
		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12	9	75%	12	12	100%

	PROGRAM RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	jumlah kegiatan RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	100%	1	1	100%
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	100%	1	1	100%
		penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	1	1	100%	1	1	100%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1	1	100%	1	1	100%
	pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	jumlah kegiatan pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota	2	2	100%	2	2	100%

		koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media, tanah, air, udara dan laut	1	1	100%	1	1	100%
--	--	---	---	---	------	---	---	------

	penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	jumlah kegiatan penanggulangan dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	1	1	100%	1	1	100%
		pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1	1	100%	1	1	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati	1	1	100%	1	1	100%
	pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati	1	1	100%	1	1	100%
		jumlah lokasi RTH	1	1	100%	1	1	100%

	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	cakupan kegiatan penghargaan LH untuk masyarakat	1	1	100%	1	1	100%
--	--	--	---	---	------	---	---	------

	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemberian penghargaan LH tingkat Kabupaten/Kota	1	1	100%	1	1	100%
		Penilaian kinerja masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	1	100%	1	1	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	prosentase kegiatan persampahan yang dilaksanakan	100	100	100%	100	100	100%
	pengelolaan sampah	jumlah kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan	3	3	100%	3	3	100%
		koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	12	11	92%	12	12	100%

		peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1	1	100%	1	1	100%
		pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	12	12	100%	12	12	100%
	pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	prosentase kegiatan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	100	100	100%	100	100	100%
		monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	1	1	100%	1	1	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja
yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No.	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ul style="list-style-type: none">- Penilaian Kinerja pada Unsur Pelaporan belum dilaksanakan secara optimal sehingga berdampak terhadap capaian Nilai LAKIP- Keterbatasan SDM dalam Pengelolaan Data dan Informasi Kinerja berdampak terhadap Evaluasi Kinerja yang tidak optimal
2.	PROGRAM RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	Pengurangan mobilitas kendaraan dan aktivitas perkantoran sebagai dampak dari kondisi Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya keterlambatan dalam pembahasan dan penetapan RPPLH
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kinerja Program Tercapai
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	Kinerja Program Tercapai
5.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Keterbatasan SDM dalam Pengelolaan Data dan Informasi Kinerja berdampak terhadap Evaluasi Kinerja yang tidak optimal
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya Armada pengangkut sampah- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan

		sampah - Belum adanya pemilahan dan pengolahan sampah secara optimal
--	--	---

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

**Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan**

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	PROGRAM RENCANA PERLINDUNGAN DAN	

	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kerjasama yang baik serta ketersediaan data serta informasi yang lengkap
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Meningkatnya kualitas air sungai yang berdampak terhadap meningkatnya nilai IKLH
	penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Sarana, prasarana dan SDM yang cukup memadai
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	
	pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ketersediaan dan kesediaan lahan, serta dukungan masyarakat yang sangat tinggi terkait penghijauan lingkungan
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi aktif dari masyarakat
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
	pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu- penyediaan sarana dan prasarana yang masih kurang
	pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Dukungan optimal dari Stakeholder terkait dalam kerjasama pengelolaan persampahan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh

kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan sampah Rumah Tangga dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait,
2. Optimalisasi kebersihan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat secara masif dan komprehensif,
3. Penguatan regulasi pelayanan pengendalian pencemaran lingkungan,
4. Peningkatan pelayanan dan pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan berbasis industri,
6. Penguatan peran aktif masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan,
7. Pemenuhan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan,
8. Peningkatan peran dan kerjasama stakeholder dalam pengelolaan keanekaragaman hayati,
9. Peningkatan pelayanan penyusunan dokumen lingkungan dan optimalisasi fungsi pengawasan,
10. Peningkatan pelayanan persampahan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Daerah Kota Tomohon

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2021		Tahun 2022**)	Catatan Analisis
		Target	Realisasi		
1.	Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia	1	1	-	
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78	62.57	78	
3.	Persentase lokasi kehati yang dikelola	100%	100%	100%	
4.	Presentase terlaksananya program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	100%	100%	100%	
5.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, PPLH, dan PULH yang diterbitkan pemerintah daerah kota	100%	100%	100%	
6.	Presentase terlaksananya program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dan masyarakat	100%	100%	100%	
7.	Presentase terlaksananya program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	100%	100%	
8.	Presentase terlaksananya program penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	100%	
9.	Presentase pengelolaan persampahan	70%	70%	80%	
10.	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100%	100%	100%	

Keterangan:

*) Tahun 2021 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2022 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Dinas Lingkungan Hidup semuanya dapat memenuhi target, yaitu:

- a. Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia
- b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- c. Persentase lokasi kehati yang dikelola
- d. Presentase terlaksananya program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
- e. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, PPLH, dan PULH yang diterbitkan pemerintah daerah kota
- f. Presentase terlaksananya program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dan masyarakat
- g. Presentase terlaksananya program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
- h. Presentase terlaksananya program penanganan pengaduan lingkungan hidup
- i. Presentase pengelolaan persampahan
- j. Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan rata rata kualitas air sungai yang dipengaruhi meningkatnya kualitas pengelolaan limbah aktivitas usaha/industri, pengelolaan limbah RT yang semakin membaik. dan meningkatnya ketaatan usaha/industri dalam pengelolaan limbah yang dibuang ke sungai. Selain itu juga didukung dengan optimalisasi konservasi lahan khususnya pada sempadan sungai serta penguatan kerjasama dengan komunitas pengelola sungai.
- b. Peningkatan Indeks Tutupan Lahan didukung dengan penambahan lahan hijau melalui pembangunan RTH dan konservasi lingkungan pada kawasan mangrove, lahan kritis, lahan pekarangan serta kawasan sempadan.
- c. Pada aspek kualitas udara mencapai kategori baik yang dipengaruhi oleh semakin berkurangnya emisi gas buang kendaraan dan industri, peningkatan penghijauan sempadan dan lingkungan jalan, serta keterlibatan para pihak dan masyarakat dalam pengelolaan LH yang semakin meningkat dan membaik.
- d. Optimalisasi pengelolaan persampahan melalui pemenuhan sarana prasarana, penguatan regulasi/kebijakan, peningkatan kerjasama dan kemitraan pengelolaan persampahan dan pemberdayaan masyarakat.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon merupakan Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Daerah menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen SDM yang tinggi terhadap pengelolaan lingkungan	Regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung optimalisasi kinerja pengelolaan lingkungan
Kerjasama tim cukup baik	Fungsi monitoring dan evaluasi belum optimal
Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran cukup memadai	Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan (persampahan, pengelolaan RTH dan konservasi lingkungan) masih terbatas
	Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi pengendalian pencemaran lingkungan belum optimal
	Tingkat pelayanan penanganan sampah masih rendah

Selain itu, selama Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Dukungan stakeholder terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kebijakan Nasional terkait Target Kinerja Pengelolaan Persampahan
Integrasi pelayanan perijinan berbasis IT	Pengendalian lingkungan ditengah Pandemi Covid-19
Lingkungan hidup menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Kinerja pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan komitmen SDM dalam pengelolaan lingkungan

2. Sinkronisasi regulasi terkait kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan
3. Pelayanan perijinan serta monitoring dan evaluasi pengendalian berbasis teknologi informasi
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan (persampahan, pengelolaan RTH dan konservasi lingkungan).

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023*

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tomohon Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
00	Dinas Lingkungan Hidup					Dinas Lingkungan Hidup					
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					

1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Prosentase kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	4.275.252.840	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Prosentase kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	4.275.252.840	
2.0	Kegiatan	Kota Tomohon	Prosentase kegiatan perencanaan yang dilaksanakan	100 Persen	29.673.660	Kegiatan	Kota Tomohon	Prosentase kegiatan perencanaan yang dilaksanakan	100 Persen	29.673.660	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Prosentase kegiatan perencanaan yang dilaksanakan	100 Persen	29.673.660	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Prosentase kegiatan perencanaan yang dilaksanakan	100 Persen	29.673.660	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	15.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen capaian laporan kinerja yang tersusun	1 Dokumen	6.549.660	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen capaian laporan kinerja yang tersusun	1 Dokumen	6.549.660	

						Kinerja SKPD					
2.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	8.124.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	8.124.000	
2											
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.221.154.793	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.221.154.793	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	60 bulan	2.210.082.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	60 bulan	2.210.082.000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	12 Bulan	967.783.293	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	12 Bulan	967.783.293	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tomohon	Jumlah dokumen capaian laporan kinerja akhir tahun	1 Dokumen	33.688.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tomohon	Jumlah dokumen capaian laporan kinerja akhir tahun	1 Dokumen	33.688.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Tomohon	Jumlah laporan yang disusun	1 Dokumen	4.142.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Tomohon	Jumlah laporan yang disusun	1 Dokumen	4.142.500	
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen pelaporan dan prognosis realisasi anggaran	5 Dokumen	5.459.000	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen pelaporan dan prognosis realisasi anggaran	5 Dokumen	5.459.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Prosentase kegiatan administrasi kepegawaian daerah	100%	140.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Prosentase kegiatan administrasi kepegawaian daerah	100%	140.000.000	

	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Kota Tomohon	Jumlah sarana yang tersedia	60 org	70.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Kota Tomohon	Jumlah sarana yang tersedia	60 org	70.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Tomohon	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 org	70.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Tomohon	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 org	70.000.000	
2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6 Kegiatan	350.188.607	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6 Kegiatan	350.188.607	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan administrasi umum	25 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan administrasi umum	25 Paket	20.000.000	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tomohon	Penyediaan alat rumah tangga	1 Paket	66.643.760	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tomohon	Penyediaan alat rumah tangga	1 Paket	66.643.760	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tomohon	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 Paket	11.135.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tomohon	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 Paket	11.135.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tomohon	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	1 paket	4.998.900	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tomohon	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	1 paket	4.998.900	
	Fasilitas kunjungan tamu	Kota Tomohon	Jumlah kunjungan tamu	1 paket	20.570.000	Fasilitas kunjungan tamu	Kota Tomohon	Jumlah kunjungan tamu	1 paket	20.570.000	
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	75 kali	150.000.000	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	75 kali	150.000.000	
1	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Tomohon	Jumlah bahan logistik	10 Jenis	76.840.947	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Tomohon	Jumlah bahan logistik	10 Jenis	76.840.947	

2.0	Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	1 kegiatan	50.000.000	Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	1 kegiatan	50.000.000	
7											
	Pengadaan Meubel	Kota Tomohon	Jumlah pengadaan meubel	5 unit	50.000.000	Pengadaan Meubel	Kota Tomohon	Jumlah pengadaan meubel	5 unit	50.000.000	
2.0	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	4 kegiatan	234.262.580	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	4 kegiatan	234.262.580	
8											
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	7000 lembar	22.220.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	7000 lembar	22.220.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kota Tomohon	Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	25.226.784	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kota Tomohon	Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	25.226.784	

[illegible]

	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tomohon	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan dinas	60 bulan	249.973.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tomohon	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan dinas	60 bulan	249.973.200	
	2	Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kot a	Kota Tomohon	Capaian Kinerja Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen	54.564.400	Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kot a	Kota Tomohon	Capaian Kinerja Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen	54.564.400	
	2.0 1	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan yang dilaksanakna	1 kegiata n	54.564.400	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kot a	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan yang dilaksanakna	1 kegiata n	54.564.400	

	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Tomohon	Cakupan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	1 kegiatan	138.220.400	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Tomohon	Cakupan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	1 kegiatan	138.220.400	
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	2 kegiatan	118.220.400	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	2 kegiatan	118.220.400	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan koordinasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, dan udara	5 kegiatan	118.220.400	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan koordinasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, dan udara	5 kegiatan	118.220.400	
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 kegiatan	20.000.000	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 kegiatan	20.000.000	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan laporan masyarakat	1 kegiatan	20.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan laporan masyarakat	1 kegiatan	20.000.000	

	Masyarakat					Masyarakat					
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota	5 kegiatan	71.595.470	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota	5 kegiatan	71.595.470	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Tomohon	Jumlah lokasi RTH	5 lokasi	71.595.470	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Tomohon	Jumlah lokasi RTH	5 lokasi	71.595.470	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Kota Tomohon	Cakupan kegiatan penghargaan LH untuk masyarakat	5 kegiatan	30.000.000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Kota Tomohon	Cakupan kegiatan penghargaan LH untuk masyarakat	5 kegiatan	30.000.000	
	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati	1 kegiatan	30.000.000	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati	1 kegiatan	30.000.000	

	Penilaian kinerja masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi/ dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan penilaian kinerja masyarakat/ Lembaga masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan LH	5 kegiatan	30.000.000	Penilaian kinerja masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi/ dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan penilaian kinerja masyarakat/ Lembaga masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan LH	5 kegiatan	30.000.000	
	Program Pengelolaan Persampahan	Kota Tomohon	Persentase Jumlah sampah yang Tertangani	100 persen	4.372.448.890	Program Pengelolaan Persampahan	Kota Tomohon	Persentase Jumlah sampah yang Tertangani	100 persen	4.372.448.890	
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kota Tomohon	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurang	11 Kegiatan	4.342.448.890	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kota Tomohon	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurang	11 Kegiatan	4.342.448.890	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Tomohon	Jumlah sarana dan prasarana pengelola sampah yang terpelihara	520 unit	1.200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Tomohon	Jumlah sarana dan prasarana pengelola sampah yang terpelihara	520 unit	1.200.000.000	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	5 kegiatan	42.448.890	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	5 kegiatan	42.448.890	
	Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Kota Tomohon	Jumlah petugas yang menerima honorarium	60 bulan	3.100.000.000	Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Kota Tomohon	Jumlah petugas yang menerima honorarium	60 bulan	3.100.000.000	

	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Kota Tomohon	Prosentase kegiatan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	100 persen	30.000.000	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Kota Tomohon	Prosentase kegiatan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	100 persen	30.000.000	
	Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan monev pelayanan pengelolaan	5 kegiatan	30.000.000	Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan monev pelayanan pengelolaan	5 kegiatan	30.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

- PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2023 disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022



Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2023 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:

Gambar 3.1 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2023



Sumber: Bappenas RI, 2021

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2023 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2023

Prioritas Nasional	Major Project
PN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan industri dan smelter• Peningkatan peran UMKM• Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi• <i>Food Estate</i>• Destinasi wisata
PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none">• <i>Major project</i> di wilayah Papua• Ibu Kota Negara
PN 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none">• Reformasi sistem perlindungan sosial• Sistem Kesehatan Nasional• Reformasi Pendidikan keterampilan

PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none">• Jaringan utama Pelabuhan terpadu• Transformasi digital
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2023 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan sasaran strategis 1 (SS-1) yakni terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup:
 - a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu:
 - Mengendalikan pencemaran udara
 - Mengendalikan pencemaran air
 - Mengendalikan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut
 - Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lahan gambut
 - Mengendalikan kerusakan lahan akses terbuka
 - b. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan strategi yaitu:
 - Meningkatkan penanganan sampah
 - Melakukan pengurangan timbulan sampah sekitar 30 % dari proyeksi timbulan sampah
 - Melaksanakan pengurangan tingkat kebocoran sampah ke laut melalui penanganan sampah di kab/kota, kawasan konservasi dan destinasi wisata prioritas pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu
 - Meningkatkan pengelolaan B3
 - Melakukan Verifikasi pengelolaan limbah B3 dan Non B3
 - Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non-B3
 - Meningkatkan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dari

kegiatan institusi dan non-institusi serta menerapkan sistem tanggap darurat limbah B3 di seluruh provinsi di Indonesia

- c. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu:
 - Pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti lahan terlantar/lahan bekas tambang rakyat dan lahan terkontaminasi limbah B3
- d. Peningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sector pembangunan dan di daerah, dilaksanakan dengan strategi yaitu:
 - Pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan/atau kegiatan melalui penetapan RPPLH, DDDT Lingkungan Hidup nasional, KLHS dan peta ekoregion nasional yang menjadi acuan pemerintah
 - Peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah
 - Peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, AMDAL dan UKL/UPL
 - Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup
 - Pencegahan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan melalui penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan
 - Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi
- e. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu:
 - Adaptasi perubahan iklim
 - Mitigasi perubahan iklim
 - Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca serta monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional
 - Penyiapan kerangka kebijakan dalam rangka mobilisasi sumber daya (termasuk skema insentif dan pembiayaan) untuk perubahan iklim dan untuk forum perundingan perubahan iklim di forum internasional
 - Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan sains perubahan iklim, dan informasi teknologi rendah karbon serta penyebarluasan mengenai pentingnya pembangunan rendah karbon dalam mengatasi perubahan iklim

kepada masyarakat

- f. Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air, yang diupayakan dengan strategi, yaitu:
- Mengurangi risiko bencana hidrologi (banjir, longsor, erosi dan sedimentasi) melalui konservasi tanah dan air secara sipil teknis dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan
 - Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan perlindungan hulu DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas serta kapasitas sumber daya air
 - Mengendalikan kerusakan perairan darat sekaligus penyelamatan danau dan mata air beserta ekosistemnya pada DAS prioritas
 - Meningkatkan tutupan lahan melalui penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam reboisasi/penghijauan serta rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang dan lahan-lahan terlantar lainnya
 - Meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan DAS, dan meningkatkan kapasitas lembaga/forum peduli DAS serta lembaga/komunitas peduli danau maupun kelembagaan forum perbenihan tanaman hutan

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem
2. Konservasi satwa dan tumbuhan endemik untuk pemulihan keseimbangan ekosistem
3. Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
4. Pengurangan dan penanganan sampah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kota Tomohon Tahun 2023, Tema Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2023 **“Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang Berwasasan Lingkungan, Kualitas SDM, serta Pemulihan Ekonomi.”**

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kota Tomohon Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas (Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Target 2022: 62,75)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	87 angka
			Indeks kualitas air (IKA)	40 angka
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	57 angka
			Persentase ketaatan kegiatan/ usaha	55 persen
		Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Capaian pengelolaan sampah	62 persen

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan Renja tahun 2023 beserta indicator capaiannya dapat dilihat di table berikut:

Table 3.3.

Rencana Program dan Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.275.252.840				4.702.778.812	
2	11	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								29.673.660				32.641.026	
2	11	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan dan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Tomohon	83 Nilai	1 dokumen	100 persen	15.000.000	APBD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Nilai	16.500.000

																(AKIP)		
2	11	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Tomohon	83 Nilai	1 dokumen	100 persen	6.549.660	APBD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	7.204.626
					Evaluasi Kinerja Keuangan perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan perangkat daerah	Dokumen hasil evaluasi	Capaian evaluasi kinerja keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon		1 dokumen	100 persen	8.124.000	APBD				8.936.400
2	11	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.221.154.793					3.543.270.272
2	11	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kota Tomohon	83 Nilai	60 bulan	100 persen	2.210.082.000	APBD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	2.431.090.200

2	11	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Honor Pengelo la Keuang an dan BMD	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Keuangan	Kota Tomoh on	83 Nilai	12 Bulan	100 persen	967.783.293	APBD		Capaian Nilai Akuntab ilit as Kinerja Instansi Pemerint a h (AKIP)	83 Nilai	1.064.561.62 2
					Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD								33.688.000	APBD				37.056.800
2	11	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ul anan/Semeste r an SKPD	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Lapora n keuang an	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Keuangan	Kota Tomoh on	83 Nilai	1 dokume n	100 persen	4.142.500	APBD		Capaian Nilai Akuntab ilit as Kinerja Instansi Pemerint a h (AKIP)	83 Nilai	4.556.750
					Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi								5.459.000	APBD				6.004.900

					anggaran													
2	11	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							140.000.000						154.000.000
2	11	1	2	1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya				Kota Tomohon	83 Nilai	9 jenis	100 persen	70.000.000	APBD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	77.000.000
					Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan							70.000.000	APBD				77.000.000
2	11	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah							350.188.60						385.207.467

			1									7						
2	11	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor (ATK)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kota Tomohon	83 Nilai	30 jenis	100 persen	20.000.000	APBD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	22,000,000
2	11	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kota Tomohon	83 Nilai	1 paket	100 persen	66.643.760	APBD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	73.308.136
2	11	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kota Tomohon	83 Nilai	10 paket	100 persen	11.135.000	APBD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	12.248.500

2	11	1	2 · 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kota Tomohon	83 Nilai	1 paket	100 persen	4.998.900	APBD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	5.498.790
					Fasilitas kunjungan tamu				Kota Tomohon				20.570.000	APBD				22.627.000
2	11	1	2 · 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kota Tomohon	83 Nilai	75 kali	100 persen	150.000.000	APBD Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	165.000.000
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia			Kota Tomohon				76.840.947	APBD				84.525.041
2	11	1	2 ·		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50.000.000					55.000.000

			1															
2	11	1	2	6	Pengadaan Meubel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah pengadaan meubel	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kota Tomohon	83 Nilai	5 unit	100 persen	50.000.000	APBD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	55.000.000
2	11	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								234.262.580	257.688.838				
					Penyediaan jasa surat menyurat				Kota Tomohon		7000 lembar		22.220.000	APBD				24.442.000
2	11	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening Listrik dan rekening telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Tomohon	83 Nilai	12 bulan	100 persen	25.226.784	APBD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	27.749.462
2	11	1	2	4	Penyediaan Jasa	Capaian Nilai	Laporan	Capaian Kinerja	Kota Tomoh	83	12	100	136.815	APBD		Capaian Nilai	83	150.497.

			08		Pelayanan Umum Kantor	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang	on	Nilai	bulan	persen	.796			Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	375
2	11	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								249.973.200				274.970.520	
2	11	1	2.1.9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kota Tomohon	83 Nilai	60 bulan	100 persen	249.973.200	APBD		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	274.970.520
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								54.564.400				60.020.840	
2	11	2	2		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								54.564.400				60.020.840	
2	11	2	2.1	1	Penyusunan dan Penetapan	Capaian Kinerja	Dokumen	Capaian Penyusunan	Kota Tomoh	100%	1 dokume	100	54.564.400	APBD		Capaian Kinerja	100%	60.020.840

			01		RPPLH Kabupaten/Kota	Perencanaan Lingkungan Hidup	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	n Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	on		n	persen				Perencanaan Lingkungan Hidup		
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								138.220.400					152.042.440
2	11	3	2		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								118.220.400					152.042.440
2	11	3	201	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Cakupan Penangan an Sumber Pencemar a n Air dan Udara	Pemant aua n kualita s air sungai	Cakupan Pencegaha n Pencemara n Lingkunga n	Kota Tomoh on	100%	5 kegiatan	100 Persen	118.220.400	APBD		Cakupa n Penanga na n Sumber Pencema ra n Air dan Udara	100%	152.042.440

2	11	3	2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								20.000.000					22.000.000
2	11	3	2	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Cakupan Penangan an Sumber Pencemar a n Air dan Udara	Cetak Inform asi Peringa tan Pencem ara n Lingku nga n	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemara n dan/atau Kerusakan Lingkung a n Hidup	Kota Tomoh on	100%	1 Jenis	25 Persen	20.000.000	APBD		Cakupa n Penanga na n Sumber Pencema ra n Air dan Udara	100%	22,000,000
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								71.595.470					78.755.017
2	11	4	2		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								71.595.470					78.755.017
2	11	4	2	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruh an	Lapora n Pelaksa naa n Tugas Tenaga Ahli Konsul tan Perenc anaan	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kota Tomoh on	100%	5 lokasi	100 persen	71.595.470	APBD		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluru ha n	30%	78.755.017
2	11	4			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								30.000.000					33.000.000
2	11	4	2		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								30.000.000					33.000.000

2	11	9	2	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Laporan Evaluasi Kinerja Masyarakat t/Lembaga Kemasyarakatan/ Dunia Pendidikan (Kalpataru, Sekolah Adiwiyata, Titik Pantau Adipura)	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Kota Tomohon	1 Penghargaan	5 kegiatan	100 Persen	30.000.000	APBD		Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	1 Penghargaan	33.000.000
2	11	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								4.372.448.890				4.809.693.779	
2	11	1	2		Pengelolaan Sampah								4.342.448.8				23,400,000,	

													90					000
2	11	1	2	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	laporan data pengelolaan sampah, layanan limbah dan peningkatan kapasitas	Persentase jumlah sampah yang berkurang	Kota Tomohon	100%	520 unit	100 persen	1.200.000.000	APBD		Persentase jumlah sampah yang tertangani	100%	20,000,000,000
2	11	1	2	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Laporan bersih lingkungan	Persentase jumlah sampah yang berkurang	Kota Tomohon	100%	5 kegiatan	100 persen	42.448.890	APBD		Persentase jumlah sampah yang tertangani	100%	1,900,000,000
					Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan								3.100.000.000	APBD				

					sampah													
					Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta								30.000. 000	APBD				

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				20,138,674,213		
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.275.252.840		
2	11	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.673.660		
2	11	1	2. 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	83 Nilai	1 dokumen	100 persen	15.000.000	APBD

2	11	1	2.	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	83 Nilai	1 dokumen	100 persen	6.549.660	APBD
			0 1								
					Evaluasi Kinerja Keuangan perangkat Daerah	Kota Tomohon		1 dokumen	100 persen	8.124.000	APBD
2	11	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.221.154.793	
2	11	1	2.	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	83 Nilai	60 bulan	100 persen	2.210.082.000	APBD
			0 2								
2	11	1	2.	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	83 Nilai	12 Bulan	100 persen	967.783.293	APBD
			0 2								

					Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD					33.688.000	APBD
2	11	1	2.	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Kota Tomohon	83 Nilai	1 dokumen	100 persen	4.142.500	APBD
			0 2								
					Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran					5.459.000	APBD
2	11	1	2. 1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					140.000.000	
2	11	1	2.	1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Kota Tomohon	83 Nilai	9 jenis	100 persen	70.000.000	APBD
			0 6								
					Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi					70.000.000	APBD
2	11	1	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah					350.188.607	

			1								
2	11	1	2. 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	83 Nilai	30 jenis	100 persen	20.000.000	APBD
2	11	1	2. 0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tomohon	83 Nilai	1 paket	100 persen	66.643.760	APBD
2	11	1	2. 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Kota Tomohon	83 Nilai	10 paket	100 persen	11.135.000	APBD
2	11	1	2. 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Tomohon	83 Nilai	1 paket	100 persen	4.998.900	APBD
					Fasilitas kunjungan tamu	Kota Tomohon				20.570.000	APBD

2	11	1	2. 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	83 Nilai	75 kali	100 persen	150.000.000	APBD Umum
					Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Tomohon				76.840.947	APBD
2	11	1	2. 1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000	
2	11	1	2. 0 7	6	Pengadaan Meubel	Kota Tomohon	83 Nilai	5 unit	100 persen	50.000.000	APBD
2	11	1	2. 1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					234.262.580	
					Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Tomohon		7000 lembar		22.220.000	APBD
2	11	1	2. 0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	83 Nilai	12 bulan	100 persen	25.226.784	APBD

			8								
2	11	1	2. 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tomohon	83 Nilai	12 bulan	100 persen	136.815.796	APBD
2	11	1	2. 1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					249.973.200	
2	11	1	2. 0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tomohon	83 Nilai	60 bulan	100 persen	249.973.200	APBD
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					54.564.400	
2	11	2	2		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					54.564.400	
2	11	2	2. 0	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	100%	1 dokumen	100 persen	54.564.400	APBD

			1								
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					138.220.400	
2	11	3	2		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					118.220.400	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Tomohon	100%	5 kegiatan	100 Persen	118.220.400	APBD
2	11	3	2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					20.000.000	
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Tomohon	100%	1 Jenis	25 Persen	20.000.000	APBD
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					71.595.470	

2	11	4	2		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					71.595.470	
2	11	4	2.	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Tomohon	100%	5 lokasi	100 persen	71.595.470	APBD
			0 1								
2	11	4			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					30.000.000	
2	11	4	2		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000	
2	11	9	2.	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Le mbaga Masyarakat/Du nia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Tomohon	1 Pengha rgaan	5 kegiatan	100 Persen	30.000.000	APBD
			0								

			1								
2	11	1 1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.372.448.890	
2	11	1 1	2		Pengelolaan Sampah					4.342.448.890	
2	11	1 1	2. 0 1	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Tomohon	100%	520 unit	100 persen	1.200.000.000	APBD
2	11	1 1	2. 0 1	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Tomohon	100%	5 kegiatan	100 persen	42.448.890	APBD

					Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah					3.100.000.000	APBD
					Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta					30.000.000	APBD

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan mengacu pada Peraturan

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 akan menjadi pedoman Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun RKA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023. Selain itu Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonom dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan rencana kerja disusun sesuai prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tahun 2023 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

Tahapan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. penyusunan rancangan
- b. rancangan akhir; dan
- c. penetapan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon sebagai perangkat daerah menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tahun 2021-2026, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2108 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
- 12) Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 16) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 17) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27);
 - 18) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
 - 19) Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menyusun RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 dan Renstra Badan / Dinas / Kecamatan Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program/kegiatan /Sub Kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan / Dinas / Kecamatan Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan/Dinas/Kecamatan, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA TOMOHON

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA TOMOHON

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tahun 2023

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja tahunan ini merupakan salah satu dokumen penting dalam merencanakan berbagai upaya pelayanan kepada masyarakat di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dimana dalam dokumen Rencana Kerja ini memuat semua program, kegiatan, indikator output serta outcome, perincian biaya dan lokasi pelaksanaan program.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2022	Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		
													I				II				III										IV	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 * 100%		15	16				
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp						
				Ta rg et	Satu an		J u m l a h	Satu an		T a r g e t	Satu an		Ju ml ah	Satu an		Ju ml ah	Satu an		Ju ml ah	Satu an		Ju ml ah	Satu an		Ju ml ah	Satu an				Ju ml ah	Satu an	
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100	%	3.803.405.895	100	%	2.997.439.935,00	100	%	3.337.415.649,00	30	%	599.225.142,00	0		-					30	%	599.225.142,00	130	%	3.596.665.077,00	130	95%		

2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	dokumen	104.089.536	3	dokumen	66.775.735,00	3	dokumen	48.348.627,00	0	dokumen	-	1	dokumen	10.000.000							1	dokumen	10.000.000,00	4	dokumen	76.775.735,00	133%	74%		
3		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pengelolaan dokumen administrasi keuangan	12	bulan	3.798.855.981	12	bulan	2.126.294,00	12	bulan	2.452.432.988,00	3	bulan	505.540.142,00	2	bulan	1.231.437,058							5	bulan	1.736.977.200,00	17	bulan	3.863.271.286,00	142%	102%		
4		Administrasi Barang Perangkat Daerah	Jumlah bulan pengelolaan administrasi barang milik daerah	12	bulan	72.594.895	12	bulan	50.850,00	12	bulan	46.770.000,00	0	bulan	-	5	bulan	364.311.450							5	bulan	364.311.450,00	17	bulan	415.161.450,00	142%	572%		
5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	12	bulan	51.371.724	0	bulan	-	12	bulan	6.774.500,00	0	bulan	-	0		-									-			-		0%		
6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pengelolaan administrasi umum	12	bulan	315.313.815	12	bulan	161.916.345,00	12	bulan	109.601.200,00	0	bulan	-	5	bulan	37.865.900							5	bulan	37.865.900,00	17	bulan	199.782.245,00	142%	63%		

7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Jumlah paket pengada an barang milik daerah penunja ng urusan pemerint ahan daerah	1	pake t	27.453 .736	1	pake t	9.1 12. 40 0,0 0	1	pake t	2.602 .600, 00	1	pake t	-	0	-							1	pake t	-	2	pake t	9.112 .400, 00	2 0 0 %	33 %		
8		Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Jumlah bulan tersedia nya jasa penunja ng urusan pemerint ahan daerah	12	bula n	826.03 9.189	1 2	bula n	52 2.9 20. 96 9,0 0	1 2	bula n	592.4 00.63 4,00	3	bula n	89.6 85.0 00,0 0	2	bula n	202 .03 9.7 00						5	bula n	291.7 24.70 0,00	17	bula n	814.6 45.66 9,00	1 4 2 %	99 %		
9		Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Jumlah kegiatan pemeliha raan barang milik daerah penunja ng urusan pemerint ahan daerah	1	kali	117.91 6.330	1	kali	59. 57 0.4 00, 00	1	kali	78.48 5.100 ,00	0	kali	4.00 0.00 0,00	1	kali	10. 000 .00 0						1	kali	14.00 0.000 ,00	2	kali	73.57 0.400 ,00	2 0 0 %	62 %		
10		Program Pendaftara n Penduduk	Kepemili kan KTP elektroni k	99 ,6	%	478.32 5.460	9 8	%	40 1.3 61. 82 5,0 0	9 8, 4	%	378.8 71.43 8,00	98	%	-	0	-						98	%	-	19 6	%	401.3 61.82 5,00	1 9 7 %	84 %			
11		Pelayanan Pendaftara n Penduduk	Jumlah kegiatan pelayana n pendafta ran pendudu k	1	kali	315.27 4.072	1	kali	23 0.4 27. 82 5,0 0	1	kali	331.3 31.43 8,00	0	kali	-	1	kali	-						1	kali	-	2	kali	230.4 27.82 5,00	2 0 0 %	73 %		

2		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	1	kali	187.613.390	1	kali	170.934.000,00	1	kali	47.500.000,00	0	kali	-	1	kali	15.794.000,00							1	kali	15.794.000,00	2	kali	186.728.000,00	200%	100%		
13		Program Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	99	%	236.894.151	98	%	225.761.745	98,2	%	230.449.707	98	%	-	0		-							98	%	-	196	%	225.761.745,00	198%	95%		
14		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil	1	kali	233.022.779	1	kali	225.761.745,00	1	kali	171.195.767,00	0	kali	-	1	kali	23.959.850							1	kali	23.959.850,00	2	kali	249.721.595,00	200%	107%		
15		Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	1	kali	25.833.241	1	kali	-	1	kali	59.253.940,00	0	tahun	-	0		-									-		-		0%			
16		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100	%	183.750.460	6,81	%	142.331.485,00	40,9	%	253.376.649,00	6,81	%	-	0		-							6,81	%	-	14	%	142.331.485,00	14%	77%		

7		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	1	kali	43.025.892	1	kali	47.450.360,00	1	kali	73.025.884,00	0	kali	-	1	kali	60.000.000,00							1	kali	60.000.000,00	2	kali	107.450.360,00	200%	250%		
18		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1	kali	128.704.904	1	kali	94.881.125,00	1	kali	180.350.765,00	0	kali	-	1	kali	14.652.000,00							1	kali	14.652.000,00	2	kali	109.533.125,00	200%	85%		
19		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Ketersediaan profil kependudukan Kota Tomohon	ada	ada	19.687.544	ada	ada	11.954.600,00	ada	ada	17.698.574,00	ada	ada	-	ada	ada	-						ada	ada	-	ada	ada	11.954.600,00		61%	ewge		
20		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya profil kependudukan	1	Profil Kependudukan	21.512.728	1	Profil Kependudukan	11.954.600,00	1	Profil Kependudukan	17.689.574,00	0	Profil Kependudukan	-	1	Profil Kependudukan	-						1	Profil Kependudukan	-	1	Profil Kependudukan	11.954.600,00	100%	56%			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan. Indikator kinerja dari kedua sasaran strategis tersebut adalah :

I. Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan

a. Kepemilikan KTP-el

Jumlah Penduduk di atas 17 Tahun yang ber KTP - el di Kota Tomohon sampai dengan tahun 2021 adalah 100.788 Jiwa, sedangkan Penduduk di atas 17 Tahun/ Telah Menikah adalah 98.580 dengan persentase sebesar 97.54 %. Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon adalah sebesar 97%, maka berdasarkan hasil tersebut telah mencapai target.

b. Persentase kepemilikan KIA

Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tahun 2021 adalah sebesar 57.98% dan realisasi 60%, maka berdasarkan hasil tersebut telah melampaui target tahun 2021.

c. Penerapan KTP nasional berbasis NIK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerapkan KTP nasional berbasis NIK bersamaan dengan penggunaan KTP elektronik.

d. Rasio kepemilikan akta kelahiran

Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun Kota Tomohon sampai dengan tahun 2021 adalah 100.788, sedangkan jumlah penduduk yang memiliki akta adalah 57.466 dengan persentase diperoleh sebesar 97.01%. Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tahun 2021 adalah sebesar 95%, maka berdasarkan hasil tersebut tersebut telah melampaui target tahun 2021.

e. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian

Target pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100% dimana permohonan masyarakat yang masuk terproses.

f. Persentase cakupan kepemilikan akta nikah

Target pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100% dimana permohonan masyarakat yang masuk terproses.

g. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan

Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 adalah 6,81% dengan capaian 6,81%. Maka berdasarkan hasil tersebut telah mencapai target.

h. Ketersediaan profil kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah membuat profil kependudukan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Kota Tomohon

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	SPM Standar d Nasiona l	IK K	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Kinerja						Proyeksi						catatan analisis
				2021			2022			2021			2022			2023			2024			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	7			8			11			12			11			12			13
1	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah			100	%	2.997.439.935	100	%	3.376.896.238	100	%	2.997.439.935	30	%	599.225.142	100	%	4.545.741.049	100	%	4.773.030.100	
1	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah			3	dokumen	66.775.735	3	dokumen	85.634.719	3	dokumen	66.775.735	0	dokumen	-	3	dokumen	89.916.455	3	dokumen	94.412.278	
2	Jumlah bulan pengelolaan dokumen administrasi keuangan			12	bulan	2.126.294.086	12	bulan	2.172.947.265	12	bulan	2.126.294.086	3	bulan	505.540.142	12	bulan	3.281.594.628	12	bulan	3.445.674.359	

3	Jumlah bulan pengelolaan administrasi barang milik daerah			12	bulan	50.850.000	12	bulan	59.724.000	12	bulan	50.850.000	0	bulan	-	12	bulan	62.710.200	12	bulan	65.847.710	
4	Jumlah bulan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur			0	bulan	-	-	-	-	0	bulan	-	0	bulan	-	-	-	-	-	-	-	
5	Jumlah bulan pengelolaan administrasi umum			12	bulan	161.916.345	12	bulan	259.409.456	12	bulan	161.916.345	0	bulan	-	12	bulan	272.379.929	12	bulan	285.998.925	
6	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			1	paket	9.112.400	1	paket	22.586.256	1	paket	9.112.400	1	paket	-	1	paket	23.715.569	1	paket	24.901.347	

7	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			1	bulan	522.920.969	12	bulan	679.584.485	1	bulan	522.920.969	0,25	tahun	89.685.000	12	bulan	713.563.709	12	bulan	749.241.894	
8	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			1	kali	59.570.400	1	kali	97.010.057	1	kali	59.570.400	0,25	tahun	4.000.000	1	kali	101.860.559	1	kali	106.953.587	
2	Kepemilikan KTP Elektronik			98	%	401.361.825	98,4	%	413.726.759	98	%	401.361.825	98	%		98,8	%	434.413.097	99,2	%	456.133.752	
1	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk			1	kali	230.427.825	1	kali	259.376.759	1	kali	230.427.825	0	tahun	-	1	kali	272.345.597	1	kali	285.962.877	

2	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk			1	kali	170.934.000	1	kali	154.350.000	1	kali	170.934.000	0	tahun	-	1	kali	162.067.500	1	kali	170.170.875	
3	Jumlah bimbingan teknis pendaftaran penduduk			3	kali	16.275.000	-	-	-	3	kali	16.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Rasio kepemilikan akta kelahiran (0-18 Tahun)			98	%	225.761.745	98,2	%	212.961.488	98	%	225.761.745	98	%		98,4	%	223.609.563	98,6	%	234.790.041	
1	Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil			1	kali	225.761.745	1	kali	191.708.417	1	kali	225.761.745	0	tahun	-	1	kali	201.293.838	1	kali	211.358.530	

2	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil			1	kali	-	1	kali	21.253.071	1	kali	-	0	tahun		1	kali	22.315.725	1	kali	23.431.511	
4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama			1	%	142.331.485	8	%	151.063.030	1	%	142.331.485	0	unit instalasi		40,9	%	158.616.181	54	%	166.546.990	
1	Jumlah kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan			1	kali	47.450.360	1	kali	45.177.187	1	kali	47.450.360	0	tahun	-	1	kali	47.436.046	1	kali	49.807.848	

2	Jumlah kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan			1	kali	94.881.125	1	kali	105.885.843	1	kali	94.881.125	0	tahun	-	1	kali	111.180.135	1	kali	116.739.142	
3	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan			1	kali	16.275.000	-	-	-	1	kali	16.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Ketersediaan profil kependudukan Kota Tomohon			ada	ada	11.954.600	ada	ada	17.698.574	ada	ada	11.954.600	ada	ada	-	ada	ada	18.583.503	ada	ada	19.512.678	
1	Tersusunnya profil kependudukan			1	Profil Kependudukan	11.954.600	1	Profil Kependudukan	17.698.574	1	Profil Kependudukan	11.954.600	0	Profil Kependudukan	-	1	Profil Kependudukan	18.583.503	1	Profil Kependudukan	19.512.678	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Peran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tomohon dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka pemberian dukungan bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Tugas dan fungsi sebagaimana dikemukakan diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tomohon memiliki sumber daya berupa sarana dan prasarana, teknologi informasi dan didukung dengan sumber daya aparatur yang mempunyai kemampuan pendidikan formal setara sarjana Strata 2 dan Strata 1 yang juga dibekali dengan ketrampilan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kependudukan dan Pencatatan sipil melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti baik ditingkat Provinsi Sulawesi Utara maupun ditingkat Nasional yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri RI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sesuai amanat / kewenangan yang diberikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini, dimana dalam pelaksanaannya disamping keberhasilan yang telah dicapai terdapat juga permasalahan yang dihadapi.

Capaian-capaian penting yang telah dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon melalui Renstra tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Jemput Bola yaitu perekaman KTP-el dan Fasilitasi Pembuatan Akta Pencatatan Sipil di 44 Kelurahan yang ada di Kota Tomohon.
2. Pencatatan Masal untuk masyarakat Kota Tomohon Tahun 2021-2022 terlaksanakan
3. Peluncuran Aplikasi SLOATH CSWL yang memudahkan masyarakat untuk langsung bisa mengurus administrasi kependudukan dari mana saja.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat dengan skor 91,47
5. Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon mendapatkan penghargaan dari Gubernur Provinsi Sulut terkait capaian penerbitan KIA
6. Mendapatkan penghargaan penerapan ECO Office

Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi SKPD.

Dalam penyelenggaraan Tugas dan fungsi sebagaimana dikemukakan diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon sesuai amanat / kewenangan yang diberikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini, dimana dalam pelaksanaannya disamping keberhasilan yang telah dicapai terdapat juga permasalahan yang dihadapi.

Berkenaan dengan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tomohon terdapat beberapa permasalahan ke depan yang perlu disikapi. Permasalahan tersebut yakni :

- a. Kurangnya kepedulian penduduk atas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk KTP) menyebabkan masih belum terpenuhinya capaian rasio penduduk ber KTP bila dibandingkan dengan penduduk wajib KTP.
- b. Belum Optimalnya Kepemilikan KIA
- c. Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya kepemilikan akta pencatatan sipil termasuk kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun yang berpengaruh pada perlindungan hak-hak anak
- d. Masih belum optimalnya database kependudukan karena banyaknya sumber data kependudukan yang tidak sama menyebabkan belum tercapainya ketersediaan database kependudukan yang valid dan akurat.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun instansi layanan publik lainnya yang berpengaruh pada terselenggaranya penerapan KTP Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara optimal
- f. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan
- g. Keterbatasan pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Dampak Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon hadir untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga masyarakat dapat memperoleh hak atas kepastian hukum mereka. Jelaslah bahwa tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tomohon sangat berkaitan erat dengan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon, yakni **“Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berintegritas”**. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka disusunlah program dan kegiatan-kegiatan tahun 2023 yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

- a. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang dialami.
- b. Belum profesionalnya petugas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat
- c. Tidak seimbang antara jumlah penduduk yang dilayani dengan jumlah pegawai, jenis dan jumlah pelayanan.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

- a. Tersedianya teknologi informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan pusat
- b. Adanya peralatan layanan keliling (mobile) untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat
- c. Perhatian pemerintah dalam menunjang program kegiatan melalui APBD dan APBN

- d. Penyediaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara terus menerus guna mendukung pelaksanaan program kegiatan
- e. Kondisi wilayah yang mudah dijangkau untuk pelaksanaan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada, maka ditetapkan prioritas strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu :

- a. Belum sempurnanya teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan pencatatan sipil
- b. Belum adanya peraturan yang menindaklanjuti peraturan Administrasi Kependudukan di atasnya serta selalu diikuti dengan sosialisasi intern dan ekstern
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil telah melaksanakan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dan mendapatkan hasil yang dengan capaian dan target kinerja yang direncanakan seperti di uraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Tomohon

Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Pagu Indikatif	Penting
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana Administrasi Perkantoran	3.517.117.339	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana Administrasi Perkantoran	4.121.724.104	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.280.410	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.280.410	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.528.650	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.528.650	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Provinsi Sulut	Terkoordinasi dan tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	10.795.123	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	DKI Jakarta	Terkoordinasi dan tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	10.795.123	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	Terkoordinasi dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.680.979	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	Terkoordinasi dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.680.979	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.275.658	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.275.658	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Keuangan	2.483.793.054	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Keuangan	2.483.793.054	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.425.925.985	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.425.925.985	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.847.891	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.847.891	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sulut	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.019.178	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indonesian	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.019.178	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Teradministrasinya Barang Milik Daerah	46.770.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Teradministrasinya Barang Milik Daerah	46.770.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tomohon	Tertatanya Barang Milik Daerah Pada SKPD	46.770.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tomohon	Tertatanya Barang Milik Daerah Pada SKPD	46.770.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Umum	256.473.320	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Umum	390.457.280	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.016.040	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.000.000	Pengadaan Peralatan KTP el
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kota Tomohon	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.161.280	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kota Tomohon	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.161.280	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	Terfasilitasi Kunjungan Tamu	8.275.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	Terfasilitasi Kunjungan Tamu	8.275.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.021.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.021.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemenrintahan Daerah	2.626.260	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemenrintahan Daerah	2.626.260	
	Pengadaan Mebel	Kota Tomohon	Tersediannya Mebel	2.626.260	Pengadaan Mebel	Kota Tomohon	Tersediannya Mebel	2.626.260	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	600.689.195	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1.071.312.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.312.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.312.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	579.377.195	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.050.000.000	Honorarium Tenaga Kontrak
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.485.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.485.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.162.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.162.300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.222.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	28.222.800	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase Kepemilikan KTP - E1 Persentase Kepemilikan KIA	381.074.956	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase Kepemilikan KTP - E1 Persentase Kepemilikan KIA	381.074.956	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	333.574.956	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	333.574.956	

	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Tomohon	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	87.694.083	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Tomohon	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	87.694.083	
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Tomohon	Terbitnya Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	245.880.873	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Tomohon	Terbitnya Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	245.880.873	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	47.500.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	47.500.000	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Tomohon	Terlaksananya Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	47.500.000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Tomohon	Terlaksananya Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	47.500.000	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun) 'Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian 'Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	242.456.603	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun) 'Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian 'Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	242.456.603	
	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Bulan Pelayanan Pencatatan Sipil	172.457.896	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Bulan Pelayanan Pencatatan Sipil	172.457.896	
	Pencatatan dan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Tomohon	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	98.102.429	Pencatatan dan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Tomohon	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	98.102.429	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Tomohon	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	15.324.779	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Tomohon	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	15.324.779	

	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kota Tomohon	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	59.030.688	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kota Tomohon	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	59.030.688	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah Bulan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	69.998.707	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah Bulan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	69.998.707	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kota Tomohon	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	53.394.007	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kota Tomohon	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	53.394.007	
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Sulut	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	16.604.700	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Pulau Jawa	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	16.604.700	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Jumlah Kerjasama antar Unit Instansi Se Kota Tomohon 'Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	253.502.921	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Jumlah Kerjasama antar Unit Instansi Se Kota Tomohon 'Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	253.502.921	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	73.187.622	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	73.187.622	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	62.115.405	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	62.115.405	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Tomohon	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	11.072.217	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Tomohon	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	11.072.217	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	180.315.299	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	180.315.299	

	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Tomohon	Terkoordinasinya Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23.418.934	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Tomohon	Terkoordinasinya Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23.418.934	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Tomohon	Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan	81.083.240	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Tomohon	Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan	81.083.240	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Tomohon	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.008.193	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Tomohon	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.008.193	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kota Tomohon	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	40.804.932	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kota Tomohon	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	40.804.932	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Tersedianya Pengelolaan Profil Kependudukan	18.357.181	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Tersedianya Pengelolaan Profil Kependudukan	18.357.181	
	Penyusunan Profil Kependudukan		Tersusunnya Profil Kependudukan	18.357.181	Penyusunan Profil Kependudukan		Tersusunnya Profil Kependudukan	18.357.181	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kota Tomohon	Buku Profil	18.357.181	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kota Tomohon	Buku Profil	18.357.181	
Total				4.412.509.000	Total				5.017.115.765

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan, tertib dokumen capil merupakan keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Pemerintah dengan dukungan DPR telah memprogramkan 3 (tiga) program strategis nasional, yaitu :

1. Pemutakhiran data kependudukan
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Penerapan KTP elektronik

Tujuan utama program strategis Nasional tersebut diatas adalah mereformasi administrasi kependudukan, yang meliputi :

1. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan administrasi kependudukan
2. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk
3. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan
4. Tersedianya regulasi daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang implementasinya harus disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selaras dengan Program Strategis Nasional, program Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Utara, RPJP Daerah Kota Tomohon 2006-2025, RPJM Daerah Kota Tomohon 2021-2026 dan Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tomohon 2022, sebagai berikut :

Visi :

“Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Misi :

”Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berintegritas”.

Tujuan :

Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien

Sasaran :

melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program :

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengelolaan administrasi kependudukan saat ini masih belum maksimal, yang dapat berakibat negative diberbagai bidang, maka diharapkan semuanya tertib administrasi kependudukan, memilki dokumen kependudukan dan tersedia database kependudukan yang akuntabel.

Indikator Program

1. Kepemilikan KTP Elektronik
2. Persentase Kepemilikan KIA
3. Perekaman KTP
4. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)
5. Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian
6. Persentase cakupan Kepemilikan Akta Nikah
7. Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
8. Profil Kependudukan Kota Tomohon

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
9. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
10. Pelayanan Pencatatan Sipil
11. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
12. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan
13. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14. Penyusunan Profil Kependudukan

Selanjutnya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kami sajikan rumusan rencana program.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikati f (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikati f (Rp.)						
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Targe t					
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							4,412,509,000				6,135,000,000				
2	1	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,517,117,339				5,214,000,000				
2	1	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							48,280,410				55,000,000				
	2	1	0	2	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	3 dokumen	28,528,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	30,000,000
	2	1	0	2	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 dokumen	10,795,123	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	15,000,000
	2	1	0	2	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 dokumen	4,680,979	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	5,000,000
	2	1	0	2	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 dokumen	4,275,658	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	5,000,000
2	2	0	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,483,793,054				3,075,000,000			
	2	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pengeluaran Administrasi Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang/bulan	12 bulan	2,425,925,985	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	3,000,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikati f (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikati f (Rp.)
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
2	1	0	2.	0	Pelaksanaa n Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pengelola an Administ rasi Keuanga n	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	100 %	12 Dok umen	12 bula n	49,847, 891	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	100 %	65,000, 000
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Bulan Pengelola an Administ rasi Keuanga n	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	100 %	1 Lapo ran	12 bula n	8,019,1 78	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	100 %	10,000, 000
2	1	0	2.	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								46,770, 000	55,000, 000				
2	1	0	2.	0	Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	Jumlah Laporan Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Bulan Pengelola an Administ rasinya Barang Milik Daerah	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	100 %	1 Lapo ran	12 bula n	46,770, 000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	100 %	55,000, 000
2	1	0	2.	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah								256,47 3,320	271,00 0,000				
2	1	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perengkap an Kantor	Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkap an Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Pengelola an Administ rasi Umum	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	100 %	1 Paket	12 bula n	166,016 ,040	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	100 %	70,000, 000
2	1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Bulan Pengelola an Administ rasi Umum	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	100 %	1 Doku men	12 bula n	3,161,2 80	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	100 %	4,000,0 00
2	1	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan TamU	Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah Bulan Pengelola an Administ rasi Umum	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	100 %	1 Lapo ran	12 bula n	8,275,0 00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	100 %	15,000, 000
2	1	0	2.	0	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan	Cakupa n penunja ng pelayan	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat	Jumlah Bulan Pengelola an Administ	Semu a Kab/K ota, Semu	100 %	1 Lapo ran	12 bula n	79,021, 000	Dana Transfe r Umum- Dana		Cakupa n penunja ng pelayan	100 %	182,000 ,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikati f (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikati f (Rp.)
									Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
				Konsultasi SKPD	an perangk at daerah	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rasi Umum	a Keca matan , Semu a Kelura han					Alokasi Umum		an perangk at daerah		
2	1	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2,626,260				8,000,000	
					Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemenri ntahan Daerah	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	100 %	1 Paket	1 paket	2,626,260	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	100 %	8,000,000
2	1	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							600,689,195				1,622,000,000	
					Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersediany a Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyedia an Jasa Penunja ng Urusan Pemerint ahan	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	100 %	12 Lapo ran 12 Bula n	12 bula n	21,312,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	100 %	22,000,000
					Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersediany a Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyedia an Jasa Penunja ng Urusan Pemerint ahan	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	100 %	1 Lapo ran 12 Bula n	12 bula n	579,377,195	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	100 %	1,600,000,000
2	1	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							78,485,100				128,000,000	
					Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyajia n Data Kependu dikan	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	100 %	1 Unit	80 %	43,162,300	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	100 %	70,000,000
					Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinann ya	Penyajia n Data Kependu dikan	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	100 %	9 Unit	80 %	28,222,800	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Cakupa n penunja ng pelayan an perangk at daerah	100 %	50,000,000
2	1	0	2.		Cakupa n penunja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyajia n Data Kependu	Semu a Kab/K	100 %	5 Unit 12 Bula n	80 %	7,100,000	PENDA PATAN ASLI		Cakupa n penunja	100 %	8,000,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikati f (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikati f (Rp.)
									Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
				Lainnya	ng pelayan an perangk at daerah	yang Dipelihara nya Terpelihara nya Peralatan dan Mesin Lainnya	dukan	ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han					DAERA H (PAD)		ng pelayan an perangk at daerah		
2	1	0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						381,07 4,956				390,00 0,000		
2	1	0	2.		Pelayanan Pendaftaran Penduduk						333,57 4,956				340,00 0,000		
					Peningkata n Pelayanan Pendaftara n Penduduk	Kepemil ikan KTP Elektro nik Pereka man KTP Elektro nik Persent ase Kepemil ikan KIA	"Jumlah Laporan Hasil Peningkata n Pelayanan Pendaftara n Penduduk"	Jumlah kegiatan pelayana n pendaftara n pendudu k	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	98.8 % 62 % 98.8 %	1 Lapo ran	1 kali	87,694, 083	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Kepemil ikan KTP Elektro nik Pereka man KTP Elektro nik Persent ase Kepemil ikan KIA	98.8 % 62 % 98.8 %	90,000, 000
					Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudu kan	Kepemil ikan KTP Elektro nik Pereka man KTP Elektro nik Persent ase Kepemil ikan KIA	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudu kan	Jumlah kegiatan pelayana n pendaftara n pendudu k	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	98.8 % 62 % 98.8 %	1 Lapo ran	1 kali	245,880 ,873	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Kepemil ikan KTP Elektro nik Pereka man KTP Elektro nik Persent ase Kepemil ikan KIA	98.8 % 62 % 98.8 %	250,000 ,000
2	1	0	2.		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						47,500, 000				50,000, 000		
					Pelayanan Secara Aktif Pendaftara n Peristiwa Kependudu kan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftara n Penduduk	Kepemil ikan KTP Elektro nik Pereka man KTP Elektro nik Persent ase Kepemil ikan KIA	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftara n Peristiwa Kependudu kan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftara n Peristiwa Kependudu kan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftara n Penduduk	Jumlah kegiatan penyelen ggaraan pendaftara n pendudu k	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	98.8 % 62 % 98.8 %	0 Doku men 12 Bula n	1 kali	47,500, 000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Kepemil ikan KTP Elektro nik Pereka man KTP Elektro nik Persent ase Kepemil ikan KIA	98.8 % 62 % 98.8 %	50,000, 000
2	1	0			PROGRAM PENCATATAN SIPIL						242,45 6,603				238,00 0,000		
2	1	0	2.		Pelayanan Pencatatan Sipil						172,45 7,896				176,00 0,000		
2	1	0	2.	0	Pencatatan , Penatausa haan dan	Persent ase cakupa n	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan	Penerbita n Akta Perkawin	Semu a Kab/K	100 % 100	0 Doku men 12 Bula	100 %	98,102, 429	Dana Transfe r	Persent ase cakupa n	100 % 100	100,000 ,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikati f (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikati f (Rp.)	
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t		
					Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	kepemili kan Akta Kematia n Persent ase cakupa n Kepemil ikan Akta Nikah Rasio Kepemil ikan Akta Kelahira n (0-18 Tahun)	, Penatausa haan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Terlaksana nya Pencatatan , Penatausa haan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	an	ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	% 98,4 %	n			Umum- Dana Alokasi Umum		kepemili kan Akta Kematia n Persent ase cakupa n Kepemil ikan Akta Nikah Rasio Kepemil ikan Akta Kelahira n (0-18 Tahun)	% 98,4 %		
	2	1	0	2		Peningkata n dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persent ase cakupa n kepemili kan Akta Kematia n Persent ase cakupa n Kepemil ikan Akta Nikah Rasio Kepemil ikan Akta Kelahira n (0-18 Tahun)	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatk an Meningkat nya Pelayanan Pencatatan Sipil	Penerbita n Akta Perkawin an	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	100 % 100 % 98,4 %	0 Layan an 12 Bula n	100 %	15,324, 779	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase cakupa n kepemili kan Akta Kematia n Persent ase cakupa n Kepemil ikan Akta Nikah Rasio Kepemil ikan Akta Kelahira n (0-18 Tahun)	100 % 100 % 98,4 %	16,000, 000
	2	1	0	2		Pengadaa n Dokumen Kependudu kan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Persent ase cakupa n kepemili kan Akta Kematia n Persent ase cakupa n Kepemil ikan Akta Nikah Rasio Kepemil ikan Akta Kelahira n (0-18 Tahun)	Jumlah Dokumen Kependudu kan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia a Dokumen Kependudu kan Selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai Dengan Kebutuhan	Penerbita n Akta Perkawin an	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	100 % 100 % 98,4 %	0 Paket 12 Bula n	100 %	59,030, 688	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase cakupa n kepemili kan Akta Kematia n Persent ase cakupa n Kepemil ikan Akta Nikah Rasio Kepemil ikan Akta Kelahira n (0-18 Tahun)	100 % 100 % 98,4 %	60,000, 000
2	1	2	0	3	2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								69,998, 707			62,000, 000		
	2	1	0	3		Pembinaan dan Pengawasa n Terkait Pencatatan Sipil	Persent ase cakupa n kepemili kan Akta Kematia n Persent ase cakupa n	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasa n Pencatatan Sipil yang Telah Dilaksana nya	Penerbita n Akta Kematia n	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	100 % 100 % 98,4 %	0 Lapo ran 1 Kali	100 %	53,394, 007	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase cakupa n kepemili kan Akta Kematia n Persent ase cakupa n	100 % 100 % 98,4 %	45,000, 000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikati f (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikati f (Rp.)	
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t		
						Kepemil ikan Akta Nikah Rasio Kepemil ikan Akta Kelahira n (0-18 Tahun)	Pembinaan dan Pengawasa n Terkait Pencatatan Sipil									Kepemil ikan Akta Nikah Rasio Kepemil ikan Akta Kelahira n (0-18 Tahun)			
2	1	0	2	0		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Persent ase cakupa n kepemili kan Akta Kematia n Persent ase cakupa n Kepemil ikan Akta Nikah Rasio Kepemil ikan Akta Kelahira n (0-18 Tahun)	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Terlaksana nya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Penerbita n Akta Kematia n	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	100 % 100 % 98.4 %	0 Lapor an 1 Kali	100 %	16,604, 700	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase cakupa n kepemili kan Akta Kematia n Persent ase cakupa n Kepemil ikan Akta Nikah Rasio Kepemil ikan Akta Kelahira n (0-18 Tahun)	100 % 100 % 98.4 %	17,000, 000
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								253,50 2,921			273,00 0,000		
2	1	0	2	0		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								73,187, 622			81,000, 000		
2	1	0	2	0		Pengolaha n dan Penyajian Data Kependudu kan	Persent ase OPD yang telah memanf aatkan data kepend udukan berdasa rkan perjanji an kerja sama	Jumlah Dokumen Data Kependudu kan yang Diolah dan Disajikan Terlaksana nya Pengolaha n dan Penyajian Data Kependudu kan	Penyajia n Data Kependu dukan	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	40.9 %	0 Doku men 12 Bula n	40.9 %	62,115, 405	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase OPD yang telah memanf aatkan data kepend udukan berdasa rkan perjanji an kerja sama	40.9 %	70,000, 000
2	1	0	2	0		Kerja Sama Pemanfaat an Data Kependudu kan	Persent ase OPD yang telah memanf aatkan data kepend udukan berdasa rkan perjanji an kerja sama	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaat an Data Kependudu kan Terlaksana nya Kerjasama Pemanfaat an Data Kependudu kan	Penyajia n Data Kependu dukan	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	40.9 %	0 Doku men 2 Kali	40.9 %	11,072, 217	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase OPD yang telah memanf aatkan data kepend udukan berdasa rkan perjanji an kerja sama	40.9 %	11,000, 000
2	1	0				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								180,31 5,299			192,00 0,000		
2	1	0	2	0		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penertiban Pengelolaa n Informasi Administra si Kependudu kan	Persent ase OPD yang telah memanf aatkan data kepend udukan berdasa rkan perjanji an kerja sama	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penertiban Pengelolaa n Informasi Administra	jumlah kegiatan pengelelo aan informasi admonist rasi kependu dukan	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	40.9 %	0 Lapor an 12 Bula n	1 kali	23,418, 934	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase OPD yang telah memanf aatkan data kepend udukan berdasa rkan perjanji an kerja sama	40.9 %	25,000, 000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikati f (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikati f (Rp.)
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
						si Kependudu kan Terkoordin asinya Penertiban Pengelolaa n Informasi Administra si Kependudu kan												
2	1	0	2.	0	Penyelengg araan Pemanfaat an Data Kependudu kan	Persent ase OPD yang telah memanf aatkan data kepend udukan berdasa rkan perjanji an kerja sama	Jumlah Dokumen Penyelengg araan Pemanfaat an Data Kependudu kan Terseleng garanya Pemanfaat an Data Kependudu kan	jumlah kegiatan pengelelo aan informasi admonist rasi kependu dukan	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	40.9 %	0 Doku men 12 Bula n	1 kali	81,083, 240	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase OPD yang telah memanf aatkan data kepend udukan berdasa rkan perjanji an kerja sama	40.9 %	82,000, 000
2	2	4	03	4														
2	1	0	2.	0	Sosialisasi Terkait Pengelolaa n Informasi Administra si Kependudu kan	Persent ase OPD yang telah memanf aatkan data kepend udukan berdasa rkan perjanji an kerja sama	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaa n Informasi Administra si Kependudu kan Terlaksana nya Sosialisasi Terkait Pengelolaa n Informasi Administra si Kependudu kan	jumlah kegiatan pengelelo aan informasi admonist rasi kependu dukan	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	40.9 %	0 Lapo ran 1 Kali	1 kali	35,008, 193	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase OPD yang telah memanf aatkan data kepend udukan berdasa rkan perjanji an kerja sama	40.9 %	40,000, 000
2	2	4	03	5														
2	1	0	2.	0	Komunikas i, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentinga n dan Masyaraka t	Persent ase OPD yang telah memanf aatkan data kepend udukan berdasa rkan perjanji an kerja sama	Jumlah Dokumen Hasil Komunikas i, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentinga n dan Masyaraka t Terlaksana nya Komunikas i, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentinga n dan Masyaraka t	jumlah kegiatan pengelelo aan informasi admonist rasi kependu dukan	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	40.9 %	0 Lapo ran 12 Bula n	1 kali	40,804, 932	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase OPD yang telah memanf aatkan data kepend udukan berdasa rkan perjanji an kerja sama	40.9 %	45,000, 000
2	2	4	03	7														
2	2	0	5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								18,357, 181					20,000, 000
2	2	0	5	2.	Penyusunan Profil Kependudukan								18,357, 181					20,000, 000
2	1	0	2.	0	Penyusuna n Profil Data Perkemban gan dan Proyeksi Kependudu kan serta Kebutuhan yang Lain	Keterse diaan profil kepend udukan Kota Tomoho n	Jumlah Dokumen Profil Data Perkemban gan dan Proyeksi Kependudu kan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Tersusun nya profil kependu dukan	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	ada ada	1 Doku men	1 profil kepend udukan	18,357, 181	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Keterse diaan profil kepend udukan Kota Tomoho n	ada ada	20,000, 000
2	2	5	01	2														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									TOTAL					4,412,509,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan Kegiatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2023 ini terdiri dari 5 Program dan 14 Kegiatan Dan untuk Pendanaan bersumber dari APBD dengan total :

BELANJA : 4,412,509,000

Berikut Keseluruhan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pendaftaran Penduduk

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

- a. Pelayanan Pencatatan Sipil
- b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- a. Penyusunan Profil Kependudukan

Tabel 3.1
Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	1	2	3	4		5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana Administrasi Perkantoran	100	%	3.517.117.339	
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	48.280.410	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	28.528.650	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Provinsi Sulut	Terkoordinasi dan tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	10.795.123	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	Terkoordinasi dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	4.680.979	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	4.275.658	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Keuangan	12	Bulan	2.483.793.054	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	2.425.925.985	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	49.847.891	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sulut	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	8.019.178	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Teradministrasinya Barang Milik Daerah	12	Bulan	46.770.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tomohon	Tertatanya Barang Milik Daerah Pada SKPD	12	Bulan	46.770.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Umum	12	Bulan	256.473.320	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	166.016.040	Pengadaan Peralatan KTP el
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kota Tomohon	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	3.161.280	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	Terfasilitasi Kunjungan Tamu	12	Bulan	8.275.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	79.021.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Paket	2.626.260	
	Pengadaan Mebel	Kota Tomohon	Tersediannya Mebel	2	Paket	2.626.260	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12	Bulan	600.689.195	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	21.312.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	579.377.195	Honorarium Tenaga Kontrak
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	unit	78.485.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	unit	43.162.300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	unit	28.222.800	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan	7.100.000	

2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase Kepemilikan KTP - El Persentase Kepemilikan KIA	94	Persen	381.074.956	
	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>		Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk			333.574.956	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Tomohon	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	Bulan	87.694.083	
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Tomohon	Terbitnya Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12	Bulan	245.880.873	
	<i>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>		Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			47.500.000	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Tomohon	Terlaksananya Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12	Bulan	47.500.000	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun) 'Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian 'Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	98,2	Persen	242.456.603	
	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>		Jumlah Bulan Pelayanan Pencatatan Sipil			172.457.896	

	Pencatatan dan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Tomohon	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	12	Bulan	98.102.429	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Tomohon	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	12	Bulan	15.324.779	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kota Tomohon	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	12	Bulan	59.030.688	
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>		Jumlah Bulan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			69.998.707	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kota Tomohon	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	1	Dokumen	53.394.007	
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Sulut	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	12	Bulan	16.604.700	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Jumlah Kerjasama antar Unit Instansi Se Kota Tomohon 'Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	32	Persen	253.502.921	
	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>		Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			73.187.622	

	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1	Dokumen	62.115.405	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Tomohon	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	1	Dokumen	11.072.217	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			180.315.299	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Tomohon	Terkoordinasinya Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	Bulan	23.418.934	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Tomohon	Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan	12	Bulan	81.083.240	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Tomohon	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Kegiatan	35.008.193	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kota Tomohon	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12	Bulan	40.804.932	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Tersedianya Pengelolaan Profil Kependudukan	ada	ada	18.357.181	
	Penyusunan Profil Kependudukan		Tersusunnya Profil Kependudukan			18.357.181	

	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kota Tomohon	Buku Profil	1	Buku Profil	18.357.181	
--	--	--------------	-------------	---	-------------	------------	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tomohon tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tomohon, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tomohon sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tomohon. Semoga RENJA tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tomohon.

5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tomohon, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2023 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tomohon, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar

kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah. antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2018 , maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tomohon Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Di dalam Penyusunan Perubahan Renja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tomohon Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Rencana Kerja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tomohon Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Propinsi Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota , RKPD Kota Tomohon dan Renstra Dinas).

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
- b. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku

Semoga Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tomohon ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KOTA
TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanan Daerah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon evaluasi pelaksanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon

Selanjutnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon bertujuan :

- Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon tahun 2023.
- Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
- Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon, proses penyusunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon, keterkaitan antara Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahunberjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Tahun Lalu dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon

2.2. .Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon

3.2. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7 / 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	BELANJA			98,54	5.909.753.450	5.419.821.421	91,71	5.272.740.217	5.272.740.217	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			92,58	2.577.086.138	2.457.008.349	95,34			#DIV/0!
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			99,92						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	1 dok evaluasi Renja 1 dok Renja 1 dok Rancangan Renja 1 dok Renja perubahan 1 Keg Forum	99,92	3.799.400	3.769.800	99,22	20.000.000	20.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA	1 dokumen RKA		0	0		2.000.000	2.000.000	100

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA Perubahan	1 dok RKA Perubahan		0	0		2.000.000	2.000.000	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA	1 dok DPA		0	0		2.000.000	2.000.000	100
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA Perubahan	1 dok DPA Perubahan		0	0		2.000.000	2.000.000	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LKJip dan dokumen realisasi Kinerja	1 dok LKJip, 4 dok realisasi kinerja		0	0		6.000.000	6.000.000	100
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan evaluasi perangkat daerah	4 laporan		0	0		6.000.000	6.000.000	100
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									#DIV/0!
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		96,83	1.853.707.572	1.794.858.616	96,83	2.326.041.635	2.326.041.635	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN		95	258.713.184	245.551.308	94,91	296.000.000	296.000.000	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	1 PPK 1 Bendahara 1 Opr. SIPD	61,86	58.200.000	36.000.000	61,86	52.800.000	52.800.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 dok LKPD		0	0		2.000.000	2.000.000	100
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			100						
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen PKBMD	2 laporan					3.000.000	3.000.000	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan BMD	5 orang pengelola barang 12 bulan	100	60.320.000	60.320.000	100	58.000.000	58.000.000	100
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0				
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya sarana disiplin pegawai	1 mesin sidik		0	0		5.511.400	5.511.400	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	27 PDH		0	0		24.954.500	24.954.500	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Tersedianya laporan monev dan penilaian	12 laporan		0	0		4.000.000	4.000.000	

				Pegawai	kinerja pegawai								
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya kegiatan PIM	1 orang PIM III		0	0		23.875.000	23.875.000	100
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan			0	0				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			99,97						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis, 20bh/unit					2.500.000	2.500.000	100
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis, 15 bh/unit	100	40.916.300	40.915.600	100	55.000.000	55.000.000	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	6 jenis,20 bh/unit,12 bulan	99,92	26.722.150	26.700.000	99,92	45.000.000	45.000.000	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20.000 lbr					16.307.682	16.307.682	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 exemplar,12 bulan		0	0		6.000.000	6.000.000	100
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12 bln					3.000.000	3.000.000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	100	18.890.000	18.890.000	100	270.000.000	270.000.000	
				Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Terlaksananya penataan arsip	12 bln		0	0		2.000.000	2.000.000	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Terlaksananya SIPD	12 bln		0	0		5.000.000	5.000.000	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 jenis,6 bh/unit					40.000.000	40.000.000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65,38						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	12 bln	100	20.300.000	20.300.000	100	10.000.000	10.000.000	100

				Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan									
				Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga									
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK			99,32	29.260.000	29.060.000	9,3			
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			92,95						
				Perumusan Parameter Kependudukan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan									
				Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Pemetaan Kependudukan									
				Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan									
				Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan									
				Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)									
				Membentuk Rumah data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Terbentuknya Ruma Data	6 Rumah Dataku, 6					60.000.000	60.000.000	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Kampung KB	100	151.233.500	151.228.000	100			
				Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga									
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Terlaksananya Koordinasi dan						60.000.000	60.000.000	
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Data Kependudukan	3 Kegiatan	100	926.400.000	926.400.000	100	926.400.000	926.400.000	

				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pendataan KB	386 PPKBD/Sub PPKBD	31,36	126.000.000	39.511.212	31,36		
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Terlaksananya Pencatatan dan Pelaporan	12 Laporan	100	22.950.000	22.950.000	100	10.000.000	10.000.000
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA					1.958.123.812	1.674.973.860	85,54	
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pendudk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				98,14				
				Advokasi Program kkbpk Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja								
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
				Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK								
				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang				83,42	30.161.200	25.161.200	83,42	
				Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK								
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melaluio Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya								
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tersedianya Sarana dan	5 Balai Penyuluhan	98,53	1.139.512.350	1.122.738.260	98,53	40.000.000	40.000.000
				Pengendalian Program KKBPK	Prasarana							
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								

				Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lapangan Oleh PKB/PLKB			79,52						
				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Terlaksananya Orientasi Lini Lapangan	44 Kelurahan	79,52	22.950.000	18.250.000	79,52	-	-	
				Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)									
				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB									
				Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)									
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Kegiatan	44 Kelurahan							
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Pelayanan KB	27 Faskes 5 Kecamatan							
				Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayan KB									
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan MKJP	9 Keg 27 Faskes					45.000.000	45.000.000	

				Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Terlaksananya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5 Kecamatan					30.250.000	30.250.000	
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Pendistribusian Kebutuhan Alokon Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 Kegiatan di 27 Faskes dan Pengadaan KIE Kit/Implant Kit	59,43	44.967.000	26.724.000	59,43	43.500.000	43.500.000	
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			99,92	148.631.150	148.519.000	99,92			
				Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan	5 Kecamatan					33.000.000	33.000.000	
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			99,58	13.200.000	13.145.000	99,58			
				Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan									
				Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	5 Orang	64,44	211.200.000	136.096.400	64,44	20.000.000	20.000.000	
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan KB Bergerak	27 Faskes 44 Kelurahan					32.000.000	32.000.000	
				Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB	5 Kecamatan	19,54	196.036.996	38.300.000	19,54	24.000.000	24.000.000	
				Peningkatan Kesertaan KB Pria	Terlaksananya MOP	5 Kecamatan	0	4.765.116		0	15.000.000	15.000.000	
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah			99,55						

				Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
				Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							-	-	
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			99,55	73.350.000	73.020.000	99,55			
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya Program KKBPK	6 Kegiatan 6 Kampung KB	99,55	73.350.000	73.020.000	99,55	50.000.000	50.000.000	
				Pembinaan Terpadu Kampung KB									
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				118.700.000	118.690.000	99,99			
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			99,99	118.700.000	118.690.000	99,99			
				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Perndapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Terbentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di 44 Kelurahan	44 Kelompok BKB;44 Kelompok BKR;44 Kelompok BKL					60.000.000	60.000.000	
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Ke3sejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Sarana Untuk Kelompok Kegiatan	44 Kelompok BKB;44 Kelompok BKR;44 Kelompok BKL					75.000.000	75.000.000	
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan	Terlaksananya Pelatihan	2 Kegiatan					50.000.000	50.000.000	

				Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS									
				Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Biaya Operasional Pengelola Tribina (BKB,BKR.BKL)	396 Orang 12 Bulan					137.600.000	137.600.000	
				Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			99,99	118.700.000	118.690.000	99,99			
				Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Ketahanan dan Kesejahteraan Kelanjutuisaan Serta Pengelolaan Keuanganmenjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Keluarga									
				Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK									
				Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Tersedianya Laporan	1 dokumen					12.000.000	12.000.000	
				Advokasi dan Promosi IPK Sosialisasi IPK	Terlaksananya Advokasi	1 kegiatan					25.000.000	25.000.000	

				Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK									
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka	Terlaksananya Kegiatan Kelompok								
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan dan Kesejahteraan Keluarga BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0					
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	Terlaksananya Sosialisasi Program Keluarga								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2

Analisa SWOT pada pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tomohon

Eksternal/Internal	STRENGTH	WEAKNESS
	1. Komitmen Pemerintah 2. Kerjasama lintas sector 3. Sumber daya 4. Banyaknya Faskes 5. Penyaluran Alokon dari Perwakilan BKKBN Prov Sulut 6. Fasilitas Pelayanan KB Mobile 7. Sumber Dana dari DAK Fisik dan Non Fisik	1. Kurangnya Advokasi KIE 2. Masih kurangnya SDM 3. Data Keluarga yang tidak selalu diupdate 4. KB pria masih rendah 5. Kurangnya sosialisasi tentang KRR 6. Masih adanya Faskes yang belum bekerjasama dengan BPJS 7. Kurangnya pembinaan Catur Bina 8. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga 9. Masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan bidang KBKR 10. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
	SO	WO
OPPORTUNITIES		
1. Komitmen Pimpinan Daerah 2. Pembinaan Ketahanan Keluarga menjadi Prioritas lintas sektor 3. Kapasitas Teknis Stakeholder	Sumber daya manusia pada dinas terkait, lintas sektor, komitmen mitra kerja dan masih	Kurangnya sumber daya manusia pada dinas terkait dan sarana prasarana yang belum terpenuhi dalam menunjang program KKBPK serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan Reproduksi

4. Komitmen DPR	kurangnya	
5. Komitmen mitra kerja	pembinaan	
6. Bonus Demografi	ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	
THREATH	ST	WT
1. Kurangnya ASN, PKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan.	Sumber daya manusia yang baik dan terlatih namun masih kurang	Dengan kurangnya SDM dan dukungan anggaran sehingga menjadi kendala dalam pencapaian Program KKBPK secara keseluruhan yaitu penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
2. Kurangnya tenaga Penyuluh	untuk memenuhi kebutuhan, serta	
3. Masih rendahnya pengetahuan tentang KRR bagi remaja di luar sekolah	belum tersedianya Dana Operasional yang memadai untuk IMP sehingga	
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan	pencapaian target Program KKBPK belum maksimal serta angka	
5. Masih terjadi disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga lintas sektor	kelahiran masih tinggi	
6. Belum terbangunnya mekanisme penjangkaran partisipasi dan peran serta aktif masyarakat secara efektif dalam		

<p>advokasi, KIE dan</p> <p>Penggerakan program</p> <p>Bangga Kencana</p> <p>7. Kurangnya kualitas data</p> <p>basis program Bangga</p> <p>Kencana</p> <p>8. Kurang optimalnya</p> <p>pemanfaatan hasil</p> <p>penelitian dan</p> <p>pengembangan Program</p> <p>Bangga Kencana baik</p> <p>oleh internal DPPKBD</p> <p>maupun oleh mitra kerja</p> <p>dan pemangku</p> <p>kepentingan</p> <p>(<i>stakeholders</i>)</p>		
---	--	--

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan perangkat daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tomohon baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tomohon.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Beberapa faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Tabel 2.3
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
<p>Kepala Dinas</p> <p>Tugas:</p> <p>Membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Tomohon</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;f. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;g. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;h. Pelaksanaan pelayanan KBi. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan	

<p>peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;</p> <p>j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;</p> <p>k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional</p>	
<p>Sekretaris</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tomohon</p> <p>Fungsi:</p> <p>a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tomohon;</p> <p>b. Penyusunan rencana program dan anggaran;</p> <p>c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;</p> <p>d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.</p>	

<p>Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Membimbing dan mengontrol pelaksanaan administrasi surat menyurat, tata naskah dan kearsipanb. Membimbing dan mengontrol penyelenggaraan administrasi perjalanan dinasc. Mengatur urusan kehumasan dan keprotokolan internal kantord. Menyiapkan dan menyusun jadwal acara kedinasan lingkup kantore. Mengatur pelayanan keprotokolan pada kegiatan rapat lingkup kantorf. Mengatur dan memberi petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanang. Mengontrol penyusunan data dan laporan kepegawaianh. Mengontrol dan member petunjuk pelaksanaan proses administrasi kepegawaiani. Mengevaluasi data dan informasi kepegawaian di lingkup kantor sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaianj. Mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan non formal, dalam bentuk sekolah, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang dan sebagainyak. Membagi tugas, member arahan dan motivasi, melakukan penilaian serta melakukan	<ul style="list-style-type: none">1) Kurangnya ASN2) Kurangya sarana dan prasarana penunjang
--	---

<p>pengembangan kompetensi kepada bawahan sesuai bidang tugasnya</p> <p>l. Melakukan penyusunan standar pelayanan dan regulasi teknis ketatalaksanaan khusus internal kantor sesuai kewenangan utama SKPD</p> <p>m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan umum, perencanaan, kepegawaian dan hukum;</p> <p>n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>	
<p>Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset dan Pelaporan</p> <p>Fungsi:</p> <p>a. Memutuskan program kerja dan kegiatan sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>b. Menyusun laporan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan sekretariat sesuai dengan lingkup kerjanya;</p> <p>c. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan;</p> <p>d. Menyelenggarakan urusan anggaran;</p> <p>e. Menyelenggarakan dan pengorganisasian urusan verifikasi dan perbendaharaan;</p> <p>f. Menyelenggarakan urusan akuntasnsi dan pelaporan;</p> <p>g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p> <p>h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p>	<p>1) Kurangnya ASN</p> <p>2) Kurangnya diklat tentang pengelolaan keuangan</p>

<p>Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di Kota Tomohon</p> <p>Fungsi:</p> <p>a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>d. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;</p> <p>e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kota Tomohon;</p> <p>f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat</p>	<p>1) Kurangnya kualitas dan kuantitas Penyuluh KB</p> <p>2) Pendataan berbasis keluarga yang belum kontinu untuk pembuatan parameter kependudukan</p>
--	--

<p>ditingkat Kota Tomohon dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);</p> <p>h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;;</p> <p>k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;</p> <p>l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;</p>	
<p>Kepala Seksi Advokasi, Pergerakan, Penyuluhan, dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB</p> <p>Fungsi:</p> <p>a. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan pergerakan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,</p>	<p>Terhambatnya advokasi dan pergerakan akibat kurangnya tenaga lapangan</p>

<p>standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;</p> <p>d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya;</p>	
<p>Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga</p> <p>Fungsi:</p> <p>a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.</p> <p>b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;</p> <p>c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya</p>	<p>Perlunya pemutakhiran data yang akurat setiap tahun</p>
<p>Kepala Bidang Keluarga Berencana</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana di Kota Tomohon</p> <p>Fungsi:</p> <p>a. Perumusan kebijakan teknis daerah di keluarga berencana;</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di keluarga berencana;</p>	<p>1) Rendahnya penggunaan Metode Kotrasepsi Jangka Panjang</p> <p>2) <i>Unmet need</i> yang masih tinggi</p> <p>3) Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya Kesehatan Reproduksi</p>

<p>c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana;</p> <p>d. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kota Tomohon;</p> <p>e. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota Tomohon;</p> <p>f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kota Tomohon;</p> <p>g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;</p> <p>h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;</p> <p>i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.</p> <p>j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dina sesuai tugas dan fungsinya</p>	
<p>Kepala Seksi Pengendalian & Pendistribusian Alkon, Serta Jaminan Pelayanan KB</p> <p>Fungsi:</p> <p>a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di Kota Tomohon;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di Kota Tomohon</p>	<p>1) Masih adanya Faskes yang belum bekerjasama dengan BPJS</p>

<p>Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB</p> <p>Fungsi:</p> <p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan ber-KB</p>	<p>1) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia PPKBD dan Sub PPKBD untuk peningkatan kesertaan ber-KB</p>
<p>Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>Fungsi:</p> <p>a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;</p> <p>b. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;</p> <p>c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;</p> <p>d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;</p> <p>e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;</p> <p>f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;</p> <p>g. Pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;</p>	<p>1) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya BKB, BKR, BKL dan UPPKS</p> <p>2) Pembinaan di poktan terhambat pandemi covid19</p>

<p>h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;</p> <p>i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.</p> <p>j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;</p> <p>k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya</p>	
<p>Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera</p> <p>Fungsi:</p> <p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera</p>	<p>1) Rendahnya pemberdayaan keluarga sejahtera</p>
<p>Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Remaja, dan Lansia</p> <p>Fungsi:</p> <p>a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja;</p>	<p>1) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya BKB, BKR, BKL dan UPPKS</p> <p>2) Pembinaan poktan terhalang pandemi covid19</p>

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bina ketahanan keluarga balita, anak, remaja, dan lansia;	
d. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya	

Tabel 2.4

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Laju Pertumbuhan Penduduk masih tinggi	Angka kelahiran masih tinggi	Keikutsertaan ber-KB masih rendah
		Kurangnya pemahaman tentang kesehatan Reproduksi	Perlunya pemahaman tentang kesehatan reproduksi
2	Meningkatnya ketahanan keluarga	Masih kurangnya Pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Belum optimalnya pemanfaatan kelompok kegiatan untuk peningkatan pembinaan dan kemandirian ber-KB

Tabel 2.5

Faktor yang mempengaruhi permasalahan

No	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi	
		Faktor penghambat	Faktor pendorong
1	Angka kelahiran masih tinggi	Rendahnya pemahaman tentang manfaat penggunaan alat	- Adanya kelembagaan pengelolaan program KB yang kuat

		kontrasepsi	- Permintaan masyarakat terhadap KB tinggi
		Masih terjadi rumor mengurangi ereksi dan masih ada yang memahami dilarang oleh keyakinan	Adanya motivator pria yang melakukan KIE
2	Kurangnya pemahaman tentang kesehatan Reproduksi	Pembentukan Pik – R yang masih rendah di sekolah / Masyarakat akibat pandemi covid19	Adanya dukungan dari Sekolah / Masyarakat dengan dibentuknya PIK-R di beberapa sekolah
		Partisipasi keluarga dalam BKB dan BKR masih rendah	Jumlah petugas kelurahan dan wilayah cukup
		Dukungan anggaran dalam pembentukan dan pembinaan operasional petugas lini lapangan dan kader masih rendah bahkan tidak ada	Adanya dukungan Toma / Toga dan kader cukup memadai
3	Masih kurangnya Pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Kelompok-kelompok sulit menemukan terobosan baru untuk mengajak para anggota UPPKS untuk ber - KB	Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kelompok
		- Keterbatasan Pengetahuan petugas - Keterbatasan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk pembinaan kelompok	Tingkat motivasi oleh pembantu Pembina yang tinggi tapi terkendala dengan dukungan dana

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tomohon 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon

No.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA				5.098.339.560	BELANJA				6.029.759.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen perencanaan	1 dok evaluasi Renja 1 dok Renja 1 dok Rancangan	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen perencanaan	1 dok evaluasi Renja 1 dok Renja 1 dok Rancangan	2.041.500	

				Renja 1 dok Renja perubahan 1 Keg Forum					Renja 1 dok Renja perubahan 1 Keg Forum		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen RKA	1 dokumen RKA	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen RKA	1 dokumen RKA	60.100	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen RKA Perubahan	1 dok RKA Perubahan	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen RKA Perubahan	1 dok RKA Perubahan	60.100	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen DPA	1 dok DPA	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen DPA	1 dok DPA	60.100	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen DPA Perubahan	1 dok DPA Perubahan	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen DPA Perubahan	1 dok DPA Perubahan	60.100	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen LKJip dan dokumen realisasi Kinerja	1 dok LKJip, 4 dok realisasi kinerja	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen LKJip dan dokumen realisasi Kinerja	1 dok LKJip, 4 dok realisasi kinerja	5.490.400	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Terlaksananya kegiatan evaluasi perangkat daerah	4 laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Terlaksananya kegiatan evaluasi perangkat daerah	4 laporan	60.100	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Tersedianya gaji			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Tersedianya gaji			

			dan tunjangan ASN		2.558.645.799			dan tunjangan ASN		2.477.325.000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tomohon	Tersedianya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN		325.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tomohon	Tersedianya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN		27.015.516	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	1 PPK 1 Bendahara 1 Opr. SIPD 1 Opr. Emonev 4 pengelola DAK 1 verifikator (12 bulan)	53.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	1 PPK 1 Bendahara 1 Opr. SIPD 1 Opr. Emonev 4 pengelola DAK 1 verifikator (12 bulan)	453.200.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 dok LKPD	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 dok LKPD	60.100	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	12 lap keuangan 4 lap triwulan 2 lap semester	4.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	12 lap keuangan 4 lap triwulan 2 lap semester	60.100	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat					

	Daerah					Daerah					
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen PKBMD	2 laporan	3.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen PKBMD	2 laporan	60.100	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya jasa penatausahaan BMD	5 orang pengelola barang 12 bulan	42.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya jasa penatausahaan BMD	5 orang pengelola barang 12 bulan	69.480.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Tomohon	Tersedianya sarana disiplin pegawai	1 mesin sidik	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Tomohon	Tersedianya sarana disiplin pegawai	1 mesin sidik	60.100	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tomohon	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	27 PDH	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tomohon	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	27 PDH	61.800	
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Tomohon	Tersedianya laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	12 laporan	4.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Tomohon	Tersedianya laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	12 laporan	60.100	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tomohon	Terlaksananya kegiatan PIM	1 orang PIM III	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tomohon	Terlaksananya kegiatan PIM	1 orang PIM III	60.100	
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Tomohon	Terlaksananya sosialisasi perundangundangan			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Tomohon	Terlaksananya sosialisasi perundangundangan		60.100	

6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Tomohon				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Tomohon			60.100	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kota Tomohon	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis, 20bh/unit	2.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kota Tomohon	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis, 20bh/unit	11.400	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis, 15 bh/unit	18.857.720	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis, 15 bh/unit	5.062.570	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tomohon	Tersedianya peralatan rumah tangga	6 jenis, 20 bh/unit, 12 bulan	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tomohon	Tersedianya peralatan rumah tangga	6 jenis, 20 bh/unit, 12 bulan	27.354.800	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tomohon	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20.000 lbr	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tomohon	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20.000 lbr	6.755.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	4 exemplar, 12 bulan	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	4 exemplar, 12 bulan	60.100	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12 bln	3.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12 bln	25.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya rapat koordinasi	12 bln	75.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya rapat koordinasi	12 bln	5.920.000	

			dan konsultasi					dan konsultasi			
8	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya penataan arsip	12 bln	2.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya penataan arsip	12 bln	60.100	
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya SIPD	12 bln	5.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya SIPD	12 bln	60.100	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Tomohon	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 jenis, 6 bh/unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Tomohon	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 jenis, 6 bh/unit	60.100	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	Tersedianya materai	12 bln	12.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	Tersedianya materai	12 bln	4.400.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	Tersedianya jasa sumberdaya air dan listrik	12 bln	6.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	Tersedianya jasa sumberdaya air dan listrik	12 bln	55.750	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Penunjang Untuk Urusan Pemerintahan Daerah	12 bln		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Penunjang Untuk Urusan Pemerintahan Daerah	12 bln	900.000	

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 orang, 12 bln	30.000.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 orang, 12 bln	50.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	5 unit roda 4, 16 unit roda 2	21.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	5 unit roda 4, 16 unit roda 2	18.516.364	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Tomohon	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12 bln	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Tomohon	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12 bln	58.540.000	

4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Tomohon	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	6 unit bangunan	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Tomohon	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	6 unit bangunan	42.200	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
9	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					PEMADUAN DAN Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					
1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota/Kota Terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Kota Tomohon			-	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota/Kota Terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Kota Tomohon			21.680.000	
2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Tomohon				Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				9.245.000	
3	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kota Tomohon				Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan					
4	Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Kota Tomohon				Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan					
5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kota Tomohon	Terlaksananya sosialisasi	1 Kegiatan 50	25.000.000	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		Terlaksananya sosialisasi	1 Kegiatan 50	48.800.000	

				Orang					Orang		
6	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan NonFormal	Kota Tomohon	Terlaksananya Sosialisasi	1 Kegiatan 50 Orang	-	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan NonFormal		Terlaksananya Sosialisasi	1 Kegiatan 50 Orang	31.436.000	
7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Terlaksananya Sosialisasi	1 Kegiatan 100 Orang	35.000.000	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		Terlaksananya Sosialisasi	1 Kegiatan 100 Orang	23.578.000	
8	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kota Tomohon				Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				30.548.000	
9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal	Kota Tomohon				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal				32.817.000	
10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kota Tomohon				Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal					
11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kota Tomohon				Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				32.817.000	
12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis	Kota Tomohon				Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis				10.939.000	

	Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan					Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan					
13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatn Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kota Tomohon				Sosialisasi Tentang Pemanfaatn Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan					
14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kota Tomohon			25.000.000	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				57.447.200	
15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kota Tomohon			15.000.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK				43.200.000	
10	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
1	Perumusan Parameter Kependudukan	Kota Tomohon			-	Perumusan Parameter Kependudukan	Kota Tomohon			-	
2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kota Tomohon				Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan					
3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kota Tomohon				Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				30.028.000	
4	Pemetaan Kependudukan	Kota Tomohon				Pemetaan Kependudukan					
5	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kota Tomohon				Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan					
6	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian	Kota Tomohon				Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian					

	Dampak Kependudukan					Dampak Kependudukan					
7	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Kota Tomohon				Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)					
8	Membentuk Rumah data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kota Tomohon	Terbentuknya Ruma Data	6 Rumah Dataku, 6 Kampung KB	20.000.000	Membentuk Rumah data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain		Terbentuknya Ruma Data	6 Rumah Dataku, 6 Kampung KB	165.135.840	
9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Tomohon				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				50.956.000	
10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kota Tomohon				Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				11.211.000	
11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Tomohon	Terlaksananya Koordinasi dan Data Kependudukan	3 Kegiatan	11.768.429	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Terlaksananya Koordinasi dan Data Kependudukan	3 Kegiatan	21.600.000	
12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Tomohon	Terlaksananya Pendataan KB	386 PPKBD/Sub PPKBD	926.400.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Terlaksananya Pendataan KB	386 PPKBD/Sub PPKBD	818.400.000	
13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Tomohon			20.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				25.200.000	
14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kota Tomohon	Terlaksananya Pencatatan dan	12 Laporan	10.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK		Terlaksananya Pencatatan dan	12 Laporan	21.143.800	

			Pelaporan					Pelaporan			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Kota Tomohon				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA					
11	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pendudk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pendudk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
1	Advokasi Program kkbpk Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Tomohon			-	Advokasi Program kkbpk Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Tomohon			72.000	
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Tomohon				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal				118.800.000	
3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Tomohon				Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK				5.775.000	
4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Kota Tomohon			30.000.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang				29.366.000	
5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Kota Tomohon				Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK					
6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	Kota Tomohon				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya				72.000	

7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Tomohon	Tersedianya Sarana dan Prasarana	5 Balai Penyuluhan	20.817.612	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Tersedianya Sarana dan Prasarana	5 Balai Penyuluhan	183.659.138	
8	Pengendalian Program KKBPK	Kota Tomohon				Pengendalian Program KKBPK				72.000	
12	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					
1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lapangan Oleh PKB/PLKB	Kota Tomohon			20.000.000	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lapangan Oleh PKB/PLKB	Kota Tomohon			72.000	
2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kota Tomohon				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB				72.000	
3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Tomohon				Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					
4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Tomohon			20.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Tomohon			72.000	
13	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					

1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Pelayanan KB	27 Faskes 5 Kecamatan	14.816.194	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Pelayanan KB	27 Faskes 5 Kecamatan	72.000	
2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayan KB	Kota Tomohon				Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayan KB					
3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan MKJP	9 Keg 27 Faskes	-	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan MKJP	9 Keg 27 Faskes	91.334.222	
4	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kota Tomohon	Terlaksananya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5 Kecamatan	30.250.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		Terlaksananya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5 Kecamatan	72.000	

5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Tomohon	Terlaksananya Pendistribusian Kebutuhan Alokon Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 Kegiatan di 27 Faskes dan Pengadaan KIE Kit/Implant Kit	20.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana Penunjang Pelayanan KB		Terlaksananya Pendistribusian Kebutuhan Alokon Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 Kegiatan di 27 Faskes dan Pengadaan KIE Kit/Implant Kit	9.000.000	
6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Tomohon				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB					
7	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Kota Tomohon	Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan	5 Kecamatan	-	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB		Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan	5 Kecamatan	15.500.000	
8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Tomohon			13.200.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				28.800.000	
9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kota Tomohon			12.000.000	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				11.625.000	
10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Tomohon	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	386 Orang	20.000.000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	386 Orang	96.997.800	

11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Tomohon	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan KB Bergerak	27 Faskes 44 Kelurahan	32.000.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Terlaksananya Kegiatan Pelayanan KB Bergerak	27 Faskes 44 Kelurahan	72.000	
12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kota Tomohon	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB	5 Kecamatan	24.000.000	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran		Terlaksananya Promosi dan Konseling KB	5 Kecamatan	75.600.000	
13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kota Tomohon	Terlaksananya MOP	5 Kecamatan	15.000.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria		Terlaksananya MOP	5 Kecamatan	72.000	
14	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Tomohon			-	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Tomohon			-	
2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Tomohon			2.500.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Tomohon			72.000	
3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Tomohon	Terlaksananya Program KKBPK	6 Kegiatan 6 Kampung KB	25.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Tomohon	Terlaksananya Program KKBPK	6 Kegiatan 6 Kampung KB	72.000	
4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kota Tomohon			73.350.000	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kota Tomohon			72.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Kota Tomohon				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN					

	PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
15	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kota Tomohon	Terbentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di 44 Kelurahan	44 Kelompok BKB;44 Kelompok BKR;44 Kelompok BKL	50.000.000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kota Tomohon	Terbentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di 44 Kelurahan	44 Kelompok BKB;44 Kelompok BKR;44 Kelompok BKL	2.400.000	
2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon	Tersedianya Sarana Untuk Kelompok Kegiatan	44 Kelompok BKB;44 Kelompok BKR;44 Kelompok BKL	50.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon	Tersedianya Sarana Untuk Kelompok Kegiatan	44 Kelompok BKB;44 Kelompok BKR;44 Kelompok BKL	12.869.700	
3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon	Terlaksananya Pelatihan	2 Kegiatan	75.000.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon	Terlaksananya Pelatihan	2 Kegiatan	106.414.800	
4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon			7.450.000	

5	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon	Tersedianya Biaya Operasional Pengelola Tribina (BKB,BKR.BKL)	396 Orang 12 Bulan	45.933.806	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon	Tersedianya Biaya Operasional Pengelola Tribina (BKB,BKR.BKL)	396 Orang 12 Bulan	277.200.000	
6	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon				Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon				
7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon			20.880.000	
8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Tomohon				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Tomohon			1.800.000	
9	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kota Tomohon				Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kota Tomohon			100.000	
10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Kota Tomohon	Tersedianya Laporan	1 Dokumen	12.000.000	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Kota Tomohon	Tersedianya Laporan	1 Dokumen	100.000	
11	Advokasi dan Promosi IPK	Kota Tomohon	Terlaksananya Advokasi	1 Kegiatan	15.000.000	Advokasi dan Promosi IPK	Kota Tomohon	Terlaksananya Advokasi	1 Kegiatan	108.000.000	
12	Sosialisasi IPK	Kota Tomohon				Sosialisasi IPK	Kota Tomohon			16.725.000	

13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Kota Tomohon				Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Kota Tomohon			2.960.000	
16	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon			75.000.000	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon			53.361.200	
2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon			-	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon			384.200	
3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon			3.136.100	
4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	Kota Tomohon			50.000.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	Kota Tomohon			49.184.000	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Tomohon

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
	Sub Kegiatan : Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tomohon	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan	44 Kelurahan	Mendorong Pendampingan Kepada Remaja Melalui Program Duta Genre di Setiap Kelurahan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Tomohon sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam RENSTRA Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tomohon sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2023–2026.

Visi Pembangunan Kota Tomohon:

“TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

Misi Pembangunan Kota Tomohon:

1. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota religius
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor
3. Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia
4. Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan
5. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas

Program Unggulan Pembangunan Kota Tomohon:

1. Pelayanan prima kepada masyarakat dari lahir sampai meninggal
2. Penyediaan akses air bersih kepada masyarakat secara merata
3. Penyediaan rumah sederhana layak huni
4. Penataan pasar Tomohon menjadi pasar tradisional modern
5. Peningkatan insentif bagi perangkat dan ASN
6. Insentif untuk rohaniawan
7. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan
8. Bantuan sosial bagi lansia
9. Peningkatan santunan duka
10. Memberikan beasiswa bagi siswa dan tenaga pendidik
11. Penyediaan sarana kesenian dan olahraga di setiap kecamatan
12. Membuka akses ekonomi dan pariwisata meliputi Kayawu-Koha Agotey sebagai penyangga KEK Likupang, mengingat Tomohon merupakan daerah terdekat ibukota Provinsi sehingga menjadi salah satu daerah berpotensi penyangga ekonomi
13. Pembuatan taman bunga Kota Tomohon
14. Pembuatan wisata air panas Lahendong
15. Pembuatan starting point wisata alam pegunungan
16. Melaksanakan event – event pariwisata lokal, regional, nasional dan internasional
17. Pembangunan akses perkebunan dan pariwisata
18. Mekanisasi alat – alat pertanian, penyediaan bibit dan pupuk yang terjangkau bagi petani

19. Tomohon Smart City

20. Sinergitas dengan Provinsi dan Pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Visi Pembangunan Kota Tomohon, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tomohon menitik beratkan pada isu "Peningkatan kesejahteraan masyarakat", dengan program pembangunan **"PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN, KUALITAS SDM SERTA PEMULIHAN EKONOMI"**.

Telaahan RENSTRA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Dalam rangka mendukung visi, misi, dan janji Presiden RI 2020-2024, BKKBN berkontribusi dalam upaya "Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang", dengan berfokus kepada:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integratif sesuai siklus hidup;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global;
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi;
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

BKKBN mendukung 2 agenda pembangunan/ Prioritas Nasional, yaitu "Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing", serta "Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas bangsa yang maju, Modern dan Berkarakter".

Berbagai tingkatan dalam penuangan Rencana Strategis (RENSTRA) BKKBN Tahun 2020-2024, baik pada level sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output), Indikator RPJMN, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), level komponen maupun pada level sub komponen sekalipun, harus dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitannya pada Visi dan Misi Pemerintah Tahun 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut, kemudian disusun tujuan dan sasaran strategis lembaga BKKBN yang mengerucut pada upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah.

Tujuan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 pada Misi Ke 2 yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Berbagai Sektor, adalah "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas, Adil dan Merata".

Kemudian ditetapkan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan Sasaran yang tertera pada RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu: "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Tomohon"

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN 2023
			INDIKATOR	RUMUS	
1	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas,Adil dan Merata	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Tomohon	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Definsi: 1. Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun) sumber: BPS, Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) 2. Jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya jika dapat melampaui masa melahirkan anak dengan mengikuti pola ASFR saat ini	0.87

				<p>(SDKI 2007, pp.49)</p> <p>Formula:</p> <p>Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun)</p> $TFR = 5 \times \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>i : Kelompok usia 15-19 tahun, 20- 24 tahun,..., 45-49 tahun;</p> <p>ASFRi : ASFR untuk wanita kelompok usia ke-i</p>	
			<p>Laju Pertumbuhan Penduduk</p>	<p>$r = (Pt/Po)^{1/t} - 1$</p> <p>r = Laju Pertumbuhan Penduduk</p> <p>Pt = Jumlah Penduduk Tahun t</p> <p>Po = Jumlah Penduduk Tahun Awal</p> <p>t = Periode Waktu antara Tahun Awal dan Tahun t</p>	1.52
			<p>Prevalensi</p>	<p>Definsi:</p>	88.18

		<div>kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)</div> <div>Banyaknya peserta KB aktif modern (PA) dibagi dengan banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS). Pengamatan pada wanita kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern.</div> <div>Adapun kontrasepsi modern terdiri dari peserta KB IUD, Implant, MOP, MOW, Suntik, Pil, Kondom dan MAL</div> <div>Formula:</div> <div>$mCPR = \frac{\sum PAModern}{100\% \sum PUS} \times$</div> <div>Keterangan:</div> <div>PA Modern : Peserta KB Aktif modern</div> <div>PUS : Pasangan Usia Subur usia 15 – 49 tahun</div>	
	<div>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak</div>	<div>Definsi:</div> <div>1. Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin</div>	7.64

		<p>terpenuhi (unmet need)</p> <p>menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB (Statistik Rutin)</p> <p>2. Wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) atau berhenti sama sekali (pembatasan) (SDKI 2007, pp.98)</p> <p>Formula:</p> <p>Statistik : Rutin Unmet Need =</p> $\frac{\text{PUS Bukan Peserta KB (IAT+TIAL)}}{\text{Total PUS}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>IAT : Ingin Anak Ditunda (Penjarangan)</p> <p>TIAL : Tidak Ingin Anak Lagi</p>	
--	--	---	--

			<p>(Pembatasan)</p> <p>Total PUS : Jumlah seluruh PUS</p> <p>SDKI : Unmet Need = UL + US</p> <p>Keterangan:</p> <p>UL : Persentase WUS yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan)</p> <p>US : Persentase WUS yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan berhenti sama sekali (pembatasan)</p>	
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-	Definsi: Angka kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur 15- 19 Tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas umur muda.	30		

			19)	<p>Formula:</p> $\frac{K}{ASFR/01/2 = P/0/011/2/2} \times 1000$ <p>Keterangan:</p> <p>P₁₅₋₁₉ : jumlah perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun</p> <p>K₁₅₋₁₉ : jumlah kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun</p>	
			Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	<p>Definsi:</p> <p>Umur yang merupakan median dari usia kawin pertama dari semua wanita kelompok umur 10-49 tahun yang sudah kawin.</p> <p>Formula:</p>	

	<p>Umur dimana median atau 50 persen dari semua wanita kelompok umur 10-49 tahun yang sudah kawin</p> $M_9 = \frac{F(X_0) - F(X_1)}{(X_0) - F(X_1)^+}$ <p>Keterangan:</p> <p>Md: median;</p> <p>X1: batas bawah UKP untuk kelompok dimana median terletak; F(x0): 50% dari total observasi (n); F(x1): Frekuensi kumulatif kelas di bawah kelas median; F(x2): Frekuensi kumulatif kelas di atas kelas median; i: Interval umur</p>	31
--	---	----

			<div><div>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</div><div>Definsi: Kualitas data dan informasi Program Bangsa Kencana merupakan data dan informasi yang memenuhi kriteria dari aspek Cakupan, Ketepatan Waktu, Keakuratan data dan Pemanfaatan data sesuai kaidah WHO dan Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Formula: Σ Indeks Komposit (Cakupan Data + Tepat Waktu Data + Akurasi Data + Pemanfaatan Data)</div></div>	52
--	--	--	--	----

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam mendukung Tujuan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 pada Misi Ke 2 yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Berbagai Sektor, adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas, Adil dan Merata”.

Kemudian ditetapkan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan Sasaran yang tertera pada RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu: “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Tomohon” yang berfokus kepada :

- (1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;
- (2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
- (3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integratif sesuai siklus hidup;
- (4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global;
- (5) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi;
- (6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Dituangkan dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon tahun 2022 yang terdiri dari :

4 Program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengendalian Penduduk
- Program Pembinaan Keluarga Berencana
- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

Yang di dalamnya terdapat Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas sesuai Indikator Kerja Utama dan Indikator SDGs yang untuk Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon tahun 2022 dianggarkan sejumlah Rp. 6.029.759.000,- diambil Sumber dana dari APBD dan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana serta Dana DAK Fisik

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6,029,759,000				11,465,944,495					
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,213,219,000				4,063,142,000					
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7,832,400				25,300,000					

2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	8 Dokumen	2,041,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	7,500,000
2	14	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	8 Dokumen	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	100 Persen	2,200,000

																Berencana		
2	14	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	8 Dokumen	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	2,200,000
2	14	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	1 Dokumen	8 Dokumen	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	2,200,000

						Keluarga Berencana	SKPD		Kelurahan							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	8 Dokumen	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	2,400,000	

Kode						Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	8 Dokumen	5,490,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	6,600,000

2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	8 Dokumen	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	2,200,000
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,957,660,716				3,325,120,000
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Orang/bul	an20 Orang	2,477,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan	100 Persen	2,900,000,000

																Keluarga Berencana		
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	20 Orang	27,015,516	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	360,000,000
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	12 Dokumen	20 Orang	453,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	58,300,000

							Keluarga Berencana			Kelurahan						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	20 Orang	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	2,200,000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	18 Laporan	20 Orang	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	4,620,000		

2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								69,540,100					49,500,000
2	14	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	12 Laporan	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	3,300,000
2	14	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	12 Laporan	69,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan	100 Persen	46,200,000

																Keluarga Berencana		
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							362,300					110,562,000	
2	14	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	12 Bulan	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	22,000,000

2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	35 Paket	12 Bulan	61,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	37,400,000
2	14	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	12 Bulan	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	4,400,000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Orang 1 Orang	12 Bulan	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjan g Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengenda lian Penduduk dan Keluarga Berencan a	100 Perse n	26,262,000

2	14	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Orang	12 Bulan	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	5,500,000
2	14	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Orang	12 Bulan	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian	100 Persen	15,000,000

																Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							45,309,070					123,060,000	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	12 Bulan	11,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	2,860,000	

2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	12 Bulan	5,062,570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	16,500,000
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	12 Bulan	27,354,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian	100 Persen	33,000,000

																Penduduk dan Keluarga Berencana		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	12 Bulan	6,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian	100 Person	5,500,000		

																Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	12 Bulan	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	2,200,000	

2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	12 Bulan	25,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	3,000,000
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	5,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian	100 Persen	33,000,000

															Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Perse n	3,000,000

2	14	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	24,000,000
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,100				44,000,000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	1 Unit	60,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	44,000,000
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5,355,750					50,600,000			

2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penunjang untuk Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	4,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	13,200,000
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Penunjang untuk Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	55,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	11,000,000

2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penunjang untuk Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	12 Bulan	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	26,400,000
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								127,098,564				335,000,000
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Jasa Supir Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas, Operasional dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Orang/Bulan 0 Unit 21 Unit	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	60,000,000

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas, Operasional dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	21 Unit	12 Bulan	18,516,364	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	110,000,000
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas, Operasional dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Unit 21 Unit	12 Bulan	58,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	110,000,000

2	14	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas, Operasional dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Unit	12 Bulan	42,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen	55,000,000
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								1,486,181,840				1,497,188,572
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								342,507,200				402,078,572

2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	0 Dokumen 3 Dokumen	44 Kelurahan	21,680,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0.87 Rasio	36,520,000
---	----	----	------	----	--	---	--	---	--	---------------------------	------------------------	-----------------	------------	-----------------------	---	---------------------------	------------

							Kependudukan, dan Keluarga Berencana)										
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	2 Dokumen	44 Kelurahan	9,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0.87 Rasio	53,845,000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	1 Dokumen	44 Kelurahan	48,800,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB		Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0.87 Rasio	28,093,572	

							Pengelolaan Program KKBPK											
2	14	02	2.01	06	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	5 Dokumen	44 Kelurahan	31,436,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0.87 Rasio	20,000,000
2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	2 Dokumen	44 Kelurahan	23,578,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0.87 Rasio	35,000,000

						Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kelurahan									
2	14	02	2.01	08		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	3 Dokumen	44 Kelurahan	30,548,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB		Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0.87 Rasio	59,455,000

2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	5 Satuan Pendidikan	44 Kelurahan	32,817,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0.87 Rasio	59,455,000
2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	3 Dokumen	44 Kelurahan	32,817,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0.87 Rasio	33,605,000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target
2	14	02	2.01	12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	2 Organisasi	44 Kelurahan	10,939,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB		Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0.87 Rasio	33,605,000	

2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	3 Laporan	44 Kelurahan	57,447,200	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0.87 Rasio	27,500,000
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Rapat Pengendalian	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	0 Laporan 2 Laporan	44 Kelurahan	43,200,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0.87 Rasio	15,000,000

							Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)											
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							1,143,674,640				1,095,110,000		
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0,87 Rasio	3 Dokumen	100 Persen	30,028,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB		Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0,87 Rasio	45,000,000
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0,87 Rasio	6 Unit	100 Persen	165,135,840	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KBReguler-KB		Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0,87 Rasio	30,000,000

						Sektor Lain		Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk										
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0,87 Rasio	12 Laporan	100 Persen	50,956,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB		Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0,87 Rasio	25,355,000

Kode	Urusan/ Bidang	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023	Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
------	----------------	-------------------	--------------------	---------	-----------------------------------

						Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	02	2.02	10		Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0,87 Rasio	12 Dokumen 6 Unit	100 Persen	11,211,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0,87 Rasio	25,355,000

							Sektor Lain yang Dibentuk											
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0,87 Rasio	12 Dokumen	100 Persen	21,600,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0,87 Rasio	13,000,000
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0,87 Rasio	386 Laporan	100 Persen	818,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0,87 Rasio	926,400,000

2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0,87 Rasio	2 Dokumen	100 Persen	25,200,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0,87 Rasio	20,000,000
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0,87 Rasio	12 Laporan	100 Persen	21,143,800	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	1,52 Persen 0,87 Rasio	10,000,000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								667,393,160				4,348,613,923
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								337,816,138				2,103,310,000
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	8 Organisasi	44 Kelurahan	72,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi	7.64 Persen 88.18 Persen	12,000,000

						Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kelurahan								(Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)		
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	44 Dokumen	44 Kelurahan	118,800,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	7.64 Persen 88.18 Persen	12,000,000
---	----	----	------	----	--	--	---	--	--	--------------------------	------------	--------------	-------------	-----------------------	--	--------------------------	------------

2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	0 Unit 11 Unit	44 Kelurahan	5,775,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	7.64 Persen 88.18 Persen	20,000,000
---	----	----	------	----	--	---	--	--	--	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------	-----------------------	---	-----------------------------	------------

2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	4 Dokumen	44 Kelurahan	29,366,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	7.64 Persen 88.18 Persen	726,000,000
---	----	----	------	----	--	--	--	--	---	-----------------------------	-----------	--------------	------------	-----------------------	--	-----------------------------	-------------

2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyrakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	5 Laporan	44 Kelurahan	72,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	7.64 Persen 88.18 Persen	1,092,410,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	

											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	0 Laporan 30 Laporan	44 Kelurahan	183,659,138	DAK Non Fisik-BOKB-KB			Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	7.64 Persen 88.18 Persen	207,900,000

2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Stakeholders/Pem angku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	3 Laporan	44 Kelurahan	72,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptiv e Prevalance Rate (mCPR)	7.64 Persen 88.18 Persen	33,000,000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								216,000				66,360,000

2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KBPK yang Efektif	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	6 Organisasi	5 Balai	72,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	7.64 Persen 88.18 Persen	22,000,000
---	----	----	------	----	---	--	---	--	---	-----------------------------	--------------	---------	--------	-----------------------	--	-----------------------------	------------

2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	5 Unit	5 Balai	72,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	7.64 Persen 88.18 Persen	25,000,000
---	----	----	------	----	--	---	--	--	--	-----------------------------	--------	---------	--------	-----------------------	---	-----------------------------	------------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
------	------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	-----------------------------------

						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.02	04		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	88 Orang	5 Balai	72,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate	7.64 Persen 88.18 Persen	19,360,000

															(mCPR)		
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							329,145,022					1,928,823,923
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	5 Laporan	100 Persen	72,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KBRegulerPelayanan Kesehatan Dasar DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern	7.64 Persen 88.18 Persen	3,300,000

															Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)		
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	616 Orang	100 Persen	91,334,222	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance	7.64 Persen 88.18 Persen	1,491,948,923

															Rate (mCPR)		
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	44 Laporan	100 Persen	72,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance	7.64 Persen 88.18 Persen	33,275,000

2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	200 Dokumen	100 Persen	9,000,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	7.64 Persen 88.18 Persen	16,500,000
---	----	----	------	----	--	--	---	--	--	-----------------------------	----------------	------------	-----------	------------------------------	---	-----------------------------------	------------

2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	30 Orang	100 Persen	15,500,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	7.64 Persen 88.18 Persen	46,200,000
---	----	----	------	----	---	--	--	--	--	-----------------------------	----------	------------	------------	--------------------------------------	---	-----------------------------------	------------

2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	4 Laporan	100 Persen	28,800,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	7.64 Persen 88.18 Persen	62,700,000
---	----	----	------	----	---	--	--	--	--	-----------------------------	-----------	------------	------------	------------------------------	---	-----------------------------------	------------

2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak- Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	75 Orang	100 Persen	11,625,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	7.64 Persen 88.18 Persen	13,200,000
---	----	----	------	----	---	--	---	--	--	-----------------------------	----------	------------	------------	--------------------------------------	---	-----------------------------------	------------

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	386 Orang 100 Persen	96,997,800	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance	7.64 Persen 88.18 Persen	176,000,000			

															Rate (mCPR)		
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	2 Laporan	100 Persen	72,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance	7.64 Persen 88.18 Persen	35,200,000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

															Rate (mCPR)		
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	5 Orang	100 Persen	72,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance	7.64 Persen 88.18 Persen	16,500,000

[illegible]

2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	10 Dokumen	6 Kampung KB	72,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate	7.64 Persen 88.18 Persen	88,385,000
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	6 Kampung	6 Kampung KB	72,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	7.64 Persen 88.18 Persen	88,385,000

						Contraceptive Prevelance Rate	Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Pengelolaan Program KKBPK								Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate		
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	3 Laporan	6 Kampung KB	72,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance	7.64 Persen 88.18 Persen	73,350,000	

[illegible]

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPk (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	44 Unit	44 Kelurahan	12,869,700	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	30 Persen 52 Persen 31 Persen	150,000,000
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPk (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	0 Laporan 12 Laporan 44 Kelurahan	44 Kelurahan	106,414,800	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	30 Persen 52 Persen 31 Persen	160,000,000

							Jumlah Laporan Hasil										
							Orientasi dan Pelatihan										
							Teknis Pengelola										
							Ketahanan dan										
							Kesejahteraan Keluarga										
							(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-										
							R dan Pemberdayaan										
							Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
							Jumlah Peserta										
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Kader Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	44 Orang 0 Orang	44 Kelurahan	7,450,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama	30 Persen 52 Persen 31 Persen	150,000,000

							(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									wanita			
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

2	14	04	2.01	05	<p>Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19)</p> <p>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</p> <p>Rata-rata usia kawin pertama wanita</p>	<p>Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPk (Advokasi dan KIE)</p>	<p>Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p>	<p>30 Persen</p> <p>52 Persen</p> <p>31 Persen</p>	<p>44 Orang</p>	<p>44 Kelurahan</p>	<p>277,200,000</p>	<p>DAK Non Fisik-BOKB-KB</p>	<p>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19)</p> <p>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</p> <p>Rata-rata usia kawin pertama wanita</p>	<p>30 Persen</p> <p>52 Persen</p> <p>31 Persen</p>	<p>150,000,000</p>
2	14	04	2.01	07	<p>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19)</p> <p>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</p> <p>Rata-rata usia kawin pertama wanita</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPk (Advokasi dan KIE)</p>	<p>Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p>	<p>30 Persen</p> <p>52 Persen</p> <p>31 Persen</p>	<p>12 Laporan</p>	<p>44 Kelurahan</p>	<p>20,880,000</p>	<p>DAK Non Fisik-BOKB-KB</p>	<p>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19)</p> <p>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</p> <p>Rata-rata usia kawin pertama wanita</p>	<p>30 Persen</p> <p>52 Persen</p> <p>31 Persen</p>	<p>150,000,000</p>

2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPk (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	12 Laporan	44 Kelurahan	1,800,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	30 Persen 52 Persen 31 Persen	150,000,000	

2	14	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	12 Dokumen	44 Kelurahan	100,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	30 Persen 52 Persen 31 Persen	30,000,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	14	04	2.01	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	12 Dokumen	44 Kelurahan	100,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR	30 Persen 52 Persen 31 Persen	12,000,000

							Rata-rata usia kawin pertama wanita	Keluarga)		Kelurahan							15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita		
2	14	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	0 Orang 44 Kelurahan	44 Kelurahan	108,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	30 Persen 52 Persen 31 Persen	175,000,000		

2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK	<p>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19)</p> <p>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</p> <p>Rata-rata usia kawin pertama wanita</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)</p>	<p>Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)</p>	<p>Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p>	<p>30 Persen</p> <p>52 Persen</p> <p>31 Persen</p>	<p>0 Orang</p> <p>44 Kelurahan</p>	<p>44 Kelurahan</p>	<p>16,725,000</p>	<p>DAK Non Fisik-BOKB-KB</p>	<p>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19)</p> <p>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</p> <p>Rata-rata usia kawin pertama wanita</p>	<p>30 Persen</p> <p>52 Persen</p> <p>31 Persen</p>	<p>55,000,000</p>
2	14	04	2.01	13	<p>Pelaksanaan Koordinasi</p> <p>Evaluasi Pencapaian IPK</p>	<p>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19)</p> <p>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</p> <p>Rata-rata usia kawin pertama wanita</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)</p>	<p>Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)</p>	<p>Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p>	<p>30 Persen</p> <p>52 Persen</p> <p>31 Persen</p>	<p>12 Laporan</p>	<p>44 Kelurahan</p>	<p>2,960,000</p>	<p>DAK Non Fisik-BOKB-KB</p>	<p>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19)</p> <p>Indeks Pembangunan Keluarga</p>	<p>30 Persen</p> <p>52 Persen</p> <p>31 Persen</p>	<p>30,000,000</p>

															(iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita		
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							106,065,500				290,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

2	14	04	2.02	01	<p>Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) ndeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita</p>	<p>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK</p>	<p>Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p>	<p>30 Persen 52 Persen 31 Persen</p>	<p>44 Organisasi</p>	<p>44 Kelurahan</p>	<p>53,361,200</p>	<p>DAK Non Fisik-BOKB-KB</p>	<p>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) ndeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita</p>	<p>30 Persen 52 Persen 31 Persen</p>	<p>55,000,000</p>
---	----	----	------	----	---	---	--	--	---	--	----------------------	---------------------	-------------------	------------------------------	--	--	-------------------

2	14	04	2.02	02	<p>Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam</p> <p>Penggerakan Operasional</p> <p>Pembinaan Program</p> <p>Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) ndeks</p> <p>Pembangunan Keluarga (iBangga)</p> <p>Rata-rata usia kawin pertama wanita</p>	<p>Jumlah Laporan</p> <p>Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam</p> <p>Penggerakan Operasional</p> <p>Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Jumlah Stakeholders/Pemangku</p> <p>Kepentingan dan Mitra</p> <p>Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam</p> <p>Pengelolaan Program</p> <p>KKBPK</p>	<p>Kota Tomohon,</p> <p>Semua Kecamatan,</p> <p>Semua Kelurahan</p>	<p>30 Persen</p> <p>52 Persen</p> <p>31 Persen</p>	12 Laporan	44 Kelurahan	384,200	<p>DAK Non Fisik-BOKB-KB</p>	<p>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) ndeks</p> <p>Pembangunan Keluarga (iBangga)</p> <p>Rata-rata usia kawin pertama wanita</p>	<p>30 Persen</p> <p>52 Persen</p> <p>31 Persen</p>	30,000,000
2	14	04	2.02	03	<p>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam</p> <p>Pengelolaan Program</p> <p>Ketahanan dan Kesejahteraan</p>	<p>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) ndeks</p> <p>Pembangunan Keluarga (iBangga)</p> <p>Rata-rata usia kawin pertama wanita</p>	<p>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam</p> <p>Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>(BKB, BKR, BKL, PPPKS,</p>	<p>Jumlah Stakeholders/Pemangku</p> <p>Kepentingan dan Mitra</p> <p>Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta</p>	<p>Kota Tomohon,</p> <p>Semua Kecamatan,</p> <p>Semua Kelurahan</p>	<p>30 Persen</p> <p>52 Persen</p> <p>31 Persen</p>	44 Organisasi	44 Kelurahan	3,136,100	<p>DAK Non Fisik-BOKB-KB</p>	<p>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) ndeks</p>	<p>30 Persen</p> <p>52 Persen</p> <p>31 Persen</p>	150,000,000

						Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	aktif dalam Pengelolaan Program KKBP							Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita		
2	14	04	2.02	04		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) ndeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBP	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	12 Laporan	44 Kelurahan	49,184,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) ndeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	30 Persen 52 Persen 31 Persen	55,000,000

TOTAL		6,029,759,000		11,465,944,495
-------	--	---------------	--	----------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

(terlampir)

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							6.029.759.000			
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.213.219.000			
2	14	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							7.832.400			
2	14	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	2 Dokumen	8 Dokumen	2.041.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	

						Keluarga Berencana			Kelurahan					Umum	
2	14	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	8 Dokumen	60.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	8 Dokumen	60.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	8 Dokumen	60.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	14	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	8 Dokumen	60.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								69.540.100		
2	14	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	12 Laporan	60.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	12 Laporan	69.480.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								362.300		

2	14	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	12 Bulan	60.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	35 Paket	12 Bulan	61.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	12 Bulan	60.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	14	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	0 Orang 1 Orang	12 Bulan	60.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	
---	----	----	------	----	---	--	---	---	--------------------------------------	------------	--------------------	----------	--------	---------------------------------	--

						Keluarga Berencana	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti		Kelurahan					Umum	
2	14	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Orang	12 Bulan	60.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Orang	12 Bulan	60.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								45.309.070		
2	14	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	12 Bulan	11.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	14	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	12 Bulan	5.062.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	12 Bulan	27.354.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	14	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	12 Bulan	6.755.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	4 Dokumen	12 Bulan	60.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	

						Keluarga Berencana			Kelurahan					Umum	
2	14	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	12 Bulan	25.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	5.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	60.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	14	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	60.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60.100		

2	14	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	1 Unit	60.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5.355.750		
2	14	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penunjang untuk Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	4.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	14	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Penunjang untuk Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	55.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penunjang untuk Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	12 Bulan	900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								127.098.564		
2	14	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Jasa Supir Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas, Operasional dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Orang/Bulan 0 Unit 21 Unit	12 Bulan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

							Dipelihara dan										
--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	14	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas, Operasional dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	21 Unit	12 Bulan	18.516.364	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas, Operasional dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Unit 21 Unit	12 Bulan	58.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	14	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas, Operasional dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Unit	12 Bulan	42.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								1.486.181.840		
2	14	02	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								342.507.200		
2	14	02	2,01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	0 Dokumen 3 Dokumen	44 Kelurahan	21.680.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

							Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,							
2	14	02	2,01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	2 Dokumen	44 Kelurahan	9.245.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	14	02	2,01	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	1 Dokumen	44 Kelurahan	48.800.000	DAK Non Fisik-BOKB- KB
---	----	----	------	----	--	--	--	---	---	------------------------------	--------------	-----------------	------------	------------------------------

2	14	02	2,01	06	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	5 Dokumen	44 Kelurahan	31.436.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	02	2,01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	2 Dokumen	44 Kelurahan	23.578.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	02	2,01	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	3 Dokumen	44 Kelurahan	30.548.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

2	14	02	2,01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	5 Satuan Pendidikan	44 Kelurahan	32.817.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	02	2,01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	3 Dokumen	44 Kelurahan	32.817.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

2	14	02	2,01	12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku	- 1204 - Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	2 Organisasi	44 Kelurahan	10.939.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	02	2,01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	3 Laporan	44 Kelurahan	57.447.200	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	02	2,01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0.87 Rasio	0 Laporan 2 Laporan	44 Kelurahan	43.200.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

						Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program	dalam Pengelolaan Program KKBPK								
						Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan									
2	14	02	2,02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							1.143.674.640			
2	14	02	2,02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0,87 Rasio	3 Dokumen	100 Persen	30.028.000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	
2	14	02	2,02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0,87 Rasio	6 Unit	100 Persen	165.135.840	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	

							Keluarga Berencana) di								
2	14	02	2,02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	1,52 Persen 0,87 Rasio	12 Laporan	100 Persen	50.956.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

Informasi Keluarga

Kelurahan

2	14	02	2,02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0,87 Rasio	12 Dokumen 6 Unit	100 Persen	11.211.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
---	----	----	------	----	---	---	--	---	--	---------------------------	----------------------	------------	------------	-----------------------	--

							Kependudukan, dan								
2	14	02	2,02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Keluarga Berencana) di Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0,87 Rasio	12 Dokumen	100 Persen	21.600.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	02	2,02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0,87 Rasio	386 Laporan	100 Persen	818.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	02	2,02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	1,52 Persen 0,87 Rasio	2 Dokumen	100 Persen	25.200.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

							Pelayanan KB		Kelurahan							
2	14	02	2,02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52 Persen 0,87 Rasio	12 Laporan	100 Persen	21.143.800	DAK Non Fisik-BOKB-KB		
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								667.393.160			
2	14	03	2,01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								337.816.138			
2	14	03	2,01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	8 Organisasi	44 Kelurahan	72.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		

2	14	03	2,01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	- 1209 - Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	44 Dokumen	44 Kelurahan	118.800.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	03	2,01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	0 Unit 11 Unit	44 Kelurahan	5.775.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

							(Pembangunan Keluarga,							
2	14	03	2,01	04	Promosi dan KIE Program KKBP melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Kependudukan, dan Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBP	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	4 Dokumen	44 Kelurahan	29.366.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB

2	14	03	2,01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	5 Laporan	44 Kelurahan	72.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
---	----	----	------	----	--	--	---	---	--	-----------------------------	-----------	--------------	--------	-----------------------	--

Lokakarya (Minilok)

2	14	03	2,01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	0 Laporan 30 Laporan	44 Kelurahan	183.659.138	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
---	----	----	------	----	--	---	---	---	--	-----------------------------	-------------------------	--------------	-------------	-----------------------	--

						Prevelance Rate (mCPR)	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan	Program KKBPK								
2	14	03	2,01	08	Pengendalian Program KKBPK	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	Keluarga, Kependudukan, Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	3 Laporan	44 Kelurahan	72.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		
2	14	03	2,02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								216.000			

2	14	03	2,02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	6 Organisasi	5 Balai	72.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	03	2,02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	5 Unit	5 Balai	72.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

2	14	03	2,02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	88 Orang	5 Balai	72.000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	
2	14	03	2,03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								329.145.022		
2	14	03	2,03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	5 Laporan	100 Persen	72.000	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Non Fisik-BOKB- KB	

2	14	03	2,03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	616 Orang	100 Persen	91.334.222	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	03	2,03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	44 Laporan	100 Persen	72.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

2	14	03	2,03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	200 Dokumen	100 Persen	9.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	03	2,03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	30 Orang	100 Persen	15.500.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

2	14	03	2,03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	4 Laporan	100 Persen	28.800.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	03	2,03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	75 Orang	100 Persen	11.625.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

2	14	03	2,03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	386 Orang	100 Persen	96.997.800	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	03	2,03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	2 Laporan	100 Persen	72.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

2	14	03	2,03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	44 Orang	100 Persen	75.600.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	03	2,03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	5 Orang	100 Persen	72.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	03	2,04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB								216.000		

2	14	03	2,04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	10 Dokumen	6 Kampung KB	72.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	03	2,04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	6 Kampung	6 Kampung KB	72.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

2	14	03	2,04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase Kebutuhan ber- KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Prevalance Rate	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.64 Persen 88.18 Persen	3 Laporan	6 Kampung KB	72.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								662.965.000		
2	14	04	2,01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								556.899.500		
2	14	04	2,01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	44 Kelompok	44 Kelurahan	2.400.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

					Pendapatan Keluarga											
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sejahtera (UPPKS) dan

Sejahtera (UPPKS) dan

2	14	04	2,01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	44 Unit	44 Kelurahan	12.869.700	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
---	----	----	------	----	---	---	---	--	--	-------------------------------------	---------	--------------	------------	-----------------------	--

2	14	04	2,01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	0 Laporan 12 Laporan 44 Kelurahan	44 Kelurahan	106.414.800	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	04	2,01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah Kader Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	44 Orang 0 Orang	44 Kelurahan	7.450.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

						dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi								
2	14	04	2,01	05		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	44 Orang	44 Kelurahan	277.200.000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	

2	14	04	2,01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	12 Laporan	44 Kelurahan	20.880.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	04	2,01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	12 Laporan	44 Kelurahan	1.800.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

2	14	04	2,01	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	12 Dokumen	44 Kelurahan	100.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
---	----	----	------	----	--	---	---	--	--	-------------------------------------	------------	--------------	---------	-----------------------	--

2	14	04	2,01	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	12 Dokumen	44 Kelurahan	100.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
---	----	----	------	----	--	---	---	--	--	-------------------------------------	------------	--------------	---------	-----------------------	--

2	14	04	2,01	11	Advokasi dan Promosi IPK	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	0 Orang 44 Kelurahan	44 Kelurahan	108.000.000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	
2	14	04	2,01	12	Sosialisasi IPK	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	0 Orang 44 Kelurahan	44 Kelurahan	16.725.000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	

2	14	04	2,01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	12 Laporan	44 Kelurahan	2.960.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	04	2,02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								106.065.500		

2	14	04	2,02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	44 Organisasi	44 Kelurahan	53.361.200	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
---	----	----	------	----	--	--	---	---	--	-------------------------------------	---------------	--------------	------------	-----------------------	--

					Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,		dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
2	14	04	2,02	02	PIK-R Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) ndeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	(BKB, BKR, BKL, PPPKS, Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	12 Laporan	44 Kelurahan	384.200	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

2	14	04	2,02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) ndeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	44 Organisasi	44 Kelurahan	3.136.100	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	04	2,02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) ndeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen 52 Persen 31 Persen	12 Laporan	44 Kelurahan	49.184.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
TOTAL													6.029.759.000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon. Semoga RENJA tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon.

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2022 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh

optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah. antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2018 , maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Propinsi Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota , RKPD Kota Tomohon dan Renstra Dinas).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
- c. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokument perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menuangkan langkah dan kebijakan yang responsif terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan external . selain itu Renja Perangkat Daerah merupakan Dokument yang Mengacu pada Dokument Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). yang merupakan salah satu dokumen yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kota Tomohon untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan -perubahan kearah perbaiki Perubahan Tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana , konsisten, dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat .

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Daerah Tahun 2023 Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2108 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
12. Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dinas Perhubungan Perangkat Daerah (PD) dan berkewajiban untuk membuat Renja PD untuk periode1 Tahun (2023,) yang merupakan tahun ke,-3 dan memuat tentang tujuan , Strategi, Kebijakan, dan Program serta Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tomohon Serta berpedoman Kepada RPJMD, RKPD Kota Tomohon dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tomohon Tahun 2021- 2026

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja agar mampu exsis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dan semakin berubah dengan akselerasi yang tinggi dan kompleks sebagai akibat adanya globalisasi seperti dewasa ini, maka Dinas Perhubungan Kota Tomohon secara kontinyu melakukan perubahan – perubahan kearah yang lebih baik . Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan ,konsistensi, dan berkelanjutan , sehingga dapat optimal dalam melakukan kinerja yang berorientasi kepada pembangunan masyarakat kota Tomohon.

Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka langkah awal yang harus dilakukan Adalah menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis yang secara hirarkis akan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perencanaan Kerja sangat Penting bagi upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan karena hal yang akan diungkapkan dalam Rencana Kerja (Renja) pada dasarnya adalah apakah indikator sasaran (outcomes) pada setiap kegiatan akan dapat mendukung pencapaian sasaran atau apakah outcomes sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Apabila sudah sesuai maka langkah selanjutnya adalah penetapan besarnya target sasaran dan anggaran yang diperlukan pada tahu berjalan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana (Renja) Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 Sampai dengan Triwulan 2 dan capaian Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, dan perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta penjelasan mengenai program dan kegiatan Tahun Rencana (Tahun 2022)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON

Bab ini berisi rencana kerja berupa rencana P;rogram dan kegiatan beserta Indikator Kinerja , kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tiddak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022

Dalam rencana jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2021-2026 dan pada tahu kedua (2022) atau tahun berjalan , telah dilaksanakan kegiatan- kegiatan pembangunan berdasarkan program program strategis untuk mencapai VISI dan MISI Pemerintah Kota Tomohon dalam pembangunan bidang Perhubungan . Kegiatan – kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis serta program yang dilaksanakan pada 2022 tahun berjalan (n1) yaitu sebagaimana berikut;

1. Sasaran **Peningkatan Kesejahteraan masyarakat di berbagai sector**

Program **Penyelenggaraan program lalulintas dan angkutan jalan**

Kegiatan
 - Penetapan rencan Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota
 - Penyediaan perlengkapan jalandi jalan kabupaten / kota
 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe c
 - Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
 - Pengujian berkala kendaraan bermotor
 - Pelaksanaan Manajemendan Rekayasa Lalulintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota
 - Persetujuan hasil analisis dampak lalulintas (Andalalin)untuk jalan kabupaten/kota
 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten kota
 - Penetapan Rencana Umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu)daerah kabupatenkota
 - Penetapan rencana umum jaringan trayekpedesaan dalam 1 (satu)daerah kabupaten kota

- Penetapan wilayah operasi Angkutan Orang dengan menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1(satu) daerah kabupaten kota
- Penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota
- Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota

2. Sasaran **Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih, efektif,dan berintegritas**

Program **Penyelenggaraan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**

- Kegiatan
- Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Adminstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Admistrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 beberapa hal yang perlu di evaluasi adalah :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kineja hasil/keluaran yang direncanakan , dikarenakan adanya pengurangan anggaran
2. Realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dikarenakan program dan kegiatan yamng harus di laksanakan karena menyangkut pelayanan publik
3. Realisasi program kegiatan yang melampaui target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan dikarenakan capaian kinerja program dan kegiatan tidak ada yang melebihi target karena harus dilaksanakan

4. Factor penyebab tidak tercapainya , terpenuhinya target kinerja adalah karena adanya pengurangan anggaran untuk pemulihan penanganan covid
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah yaitu adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pemotongan dan pengurangan anggaran seperti pengadaan kendaraan operasional roda dua , pengadaan alat uji pada pengujian berkala kendaraan bermotor
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi factor factor penyebab tidak tercapainya program dan kegiatan adalah untuk di tahun selanjutnya yaitu 2023 untuk di adakan kembali

Adapun secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan kota Tomohon dapat dilihat pada table 2.1.

		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				n		n								n			n		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	20,080,000	4 Laporan	-	4 Laporan	2,000,000	-						Laporan	-	-	Laporan	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	17,745,382,252		2,751,453,252		2,904,112,171	445,635,531	750,363,403						1,195,998,934	3,947,452,186		22.24	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100	16,676,818,174	14 bulan	2,606,453,252	14 bln	2,752,615,171	3 bulan	445,635,531	683,763,403				14 bln	1,129,398,934	3,735,852,186	14 bln	22.40	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100	41,415,000		-	2 Dokumen	-			-				Dokumen	-	-	Dokumen	-	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100	920,223,077	12 bulan	145,000,000	210 dokumen	151,497,000	-	-	66,600,000				60 dokumen	66,600,000	211,600,000	60 dokumen	22.99	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100	27,610,000			12 Dokumen	-							Dokumen	-	-	Dokumen	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100	27,610,000			5 Laporan	-							Laporan	-	-	Laporan	-	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		100	20,080,000			5 Dokumen	-							Dokumen	-	-	Dokumen	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	a n a n r a n	100	16,566,000			16 Laporan	-							Laporan	-	-	Laporan	-	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100	15,060,000			1 Dokumen	-							Dokumen	-	-	Dokumen	-	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100	615,954,000			-	-								-	-		-	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		100	41,415,000			1 Dokumen	-							Dokumen	-	-	Dokumen	-	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		100	276,100,000			1 Dokumen	-							Dokumen	-	-	Dokumen	-	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		100	27,610,000			12 Laporan	-							Laporan	-	-	Laporan	-	

		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		100	27,610,000			2 Lapora n	-							Lapora n	-		-	Lapora n	-	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100	27,610,000			12 Lapora n	-							Lapora n	-		-	Lapora n	-	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100	174,194,000			12 Lapora n	-							Lapora n	-		-	Lapora n	-	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		100	41,415,000			1 Doku men	-							Doku men	-		-	Doku men	-	
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				100	234,685,000			-		-						-		-		-	
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		100	55,220,000			1 Doku men	-		-					Doku men	-		-	Doku men	-	
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		100	41,415,000			1 Doku men	-		-					Doku men	-		-	Doku men	-	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		100	38,654,000			1 Lapora n	-		-					Lapora n	-		-	Lapora n	-	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		100	27,610,000			1 Doku men	-		-					Doku men	-		-	Doku men	-	
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		100	27,610,000			1 Lapora n	-		-					Lapora n	-		-	Lapora n	-	
		Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		100	16,566,000			1 Doku men	-		-					Doku men	-		-	Doku men	-	
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		100	27,610,000			12 Doku men	-		-					Doku men	-		-	Doku men	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100	1,244,081,000			-		-						-		-		24.98	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		100	165,660,000			5 Unit	-							Unit	-		-	Unit	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		100	552,200,000			1 Paket	-							Paket	-		-	Paket	-	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100	27,610,000			3 Doku men	-							Doku men	-		-	Doku men	-	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		100	50,200,000			10 Doku men	-							Doku men	-		-	Doku men	-	

		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100	30,371,000			4 Dokumen	-								Dokumen	-		-	Dokumen	-	
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		100	82,830,000			3 Orang	-								Orang	-		-	Orang	-	
		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan		100	82,830,000			2 Orang	-								Orang	-		-	Orang	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100	165,660,000			2 Orang	-								Orang	-		-	Orang	-	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100	55,220,000			2 Orang	-								Orang	-		-	Orang	-	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100	31,500,000			2 Orang	-								Orang	-		-	Orang	24.98	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	2,757,486,000			136,591,650		130,483,145		15,280,200	37,241,500					52,521,700		189,113,350		6.86	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100	66,264,000		3,069,000	1 Paket	9,374,700		1,336,000	-					Paket	1,336,000		4,405,000	Paket	6.65	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100	380,265,000		-	1 Paket	-		-	-					Paket	-		-	Paket	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100	331,320,000		28,339,800	1 Paket	25,660,445		6,075,300	-					1 Paket	6,075,300		34,415,100	1 Paket	10.39	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100	22,088,000		18,423,400	1 Paket	26,477,000		1,973,900	-					1 Paket	1,973,900		20,397,300	1 Paket	92.35	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		100	60,742,000		6,000,000	24 Dokumen	5,839,000		600,000	1,805,000					6 Dokumen	2,405,000		8,405,000	6 Dokumen	13.84	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		100	82,830,000		-	1 Paket	-		-	-					Paket	-		-	Paket	-	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100	82,830,000		11,541,350	25 Laporan	12,625,000		5,295,000	3,000,000					10 Laporan	8,295,000		19,836,350	10 Laporan	23.95	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	1,656,600,000		69,218,100	20 Laporan	50,507,000		-	32,436,500					9 Laporan	32,436,500		101,654,600	9 Laporan	6.14	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100	38,654,000			1 Dokumen	-								Dokumen	-		-	Dokumen	-	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100	35,893,000			1 Dokumen	-								Dokumen	-		-	Dokumen	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	3,649,540,0		17,247,20		197,865,7		-	-					-			17,247,20		0.47	

					00			0		93									0			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		100	2,510,000,00			Unit	197,865,793							Unit	-	-	Unit	-	
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		100	220,880,000			Unit	-							Unit	-	-	Unit	-	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100	276,100,000			Unit	-							Unit	-	-	Unit	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		100	55,220,000			Unit	-							Unit	-	-	Unit	-	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		100	27,610,000			Unit	-							Unit	-	-	Unit	-	
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		100	82,830,000			Unit	-							Unit	-	-	Unit	-	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100	200,800,000			Unit	-							Unit	-	-	Unit	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100	276,100,000	2 unit	17,247,200	Unit	-							Unit	-	17,247,200	Unit	6.25	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	2,827,264,000		652,954,944		598,424,800		67,705,106	156,835,004					224,540,110	877,495,054		31.04	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100	66,264,000	12 bulan	8,300,000	12 Laporan	9,000,000		1,500,000	3,000,000				5 Laporan	4,500,000	12,800,000	5 Laporan	19.32	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100	2,761,000,000	12 bulan	644,654,944	12 Laporan	589,424,800		66,205,106	153,835,004				5 Laporan	220,040,110	864,695,054	5 Laporan	31.32	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	3,802,650,000		223,594,061		154,704,200		38,255,395	38,719,221					76,974,616	300,568,677		7.90	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		100	552,200,000			1 Unit	23,187,200		5,849,235	5,839,453				1 Unit	11,688,688	11,688,688	1 Unit	2.12	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100	2,374,460,000		223,594,061	17 Unit	110,377,000		25,406,160	32,879,768				17 Unit	58,285,928	281,879,989	17 Unit	11.87	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		100	55,220,000		-	1 Unit	9,140,000							Unit	-	-	Unit	-	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		100	82,830,000			7 Unit	-		7,000,000	-				Unit	-	-	Unit	-	

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100	55,220,000			4 Unit	12,000,000				-				7 Unit	7,000,000		7,000,000	7 Unit	12.68		
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		100	75,300,000			3 Unit	-				-				Unit	-		-	Unit	-		
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		100	82,830,000			1 Unit	-				-				Unit	-		-	Unit	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100	82,830,000			1 Unit	-				-				Unit	-		-	Unit	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100	165,660,000			1 Unit	-				-				Unit	-		-	Unit	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100	276,100,000			1 Unit	-				-				Unit	-		-	Unit	-		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							2,182,516,050				1,774,090,300		114,880,000		636,473,300			751,353,300		2,933,869,350		#DIV/0!	
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota			100	491,210,762			20,710,000				2,500,000		-					-		20,710,000		4.22	
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota		100	234,515,500	10 dokumen	10,990,000	1 Dokumen	-			-					Dokumen	-		10,990,000	Dokumen	4.69		
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota		100	128,184,562			1 Dokumen	2,500,000			-					Dokumen	-		-	Dokumen	-		
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota		100	128,510,700	11 laporan	9,720,000	12 Laporan	-			-					Laporan	-		9,720,000	Laporan	7.56		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota			100	1,636,515,068			198,923,950		-		-							-		198,923,950		12.16	
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun		100	395,428,099			1 Unit	-			-					Unit	-		-	Unit	-		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia		100	1,049,216,470		198,923,950	1 Unit	-			-					Unit	-		198,923,950	Unit	18.96		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		100	150,000,000			1 Unit	-			-					Unit	-		-	Unit	-		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		100	41,870,500			1 Unit	-			-					Unit	-		-	Unit	-		
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			10	829,050,00			-		-		-						-		-		-		

					0	0																
		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun		100	209,550,000			1 Dokumen	-							Dokumen	-		-	Dokumen	-
		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun		100	150,000,000			1 Unit	-							Unit	-		-	Unit	-
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		100	165,660,000			1 Unit	-							Unit	-		-	Unit	-
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		100	193,400,000			1 Unit	-							Unit	-		-	Unit	-
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100	110,440,000			1 Orang	-							Orang	-		-	Orang	-
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			100	80,320,000		-		2,713,900	-							-		-		-
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		100	55,220,000			1 Dokumen	-		-					Dokumen	-		-	Dokumen	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		100	25,100,000		-	1 2 Laporan	2,713,900	-						Laporan	-		-	Laporan	-
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			100	1,662,911,872		675,666,000		227,073,000	-							-		675,666,000		40.63
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		100	688,733,872		506,176,000	2 Unit	225,323,000	-						Unit	-		506,176,000	Unit	73.49
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100	121,484,000			1 Orang	-	-						Orang	-		-	Orang	-
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar		100	136,100,000			3000 Unit	-	-						Unit	-		-	Unit	-
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100	271,920,000		50,000,000	2000 Dokumen	1,750,000	-						Dokumen	-		50,000,000	Dokumen	18.39

		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100	58,800,000			1 Laporan	-	-						Laporan	-	-	Laporan	-	
		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		100	27,610,000			1 Laporan	-	-						Laporan	-	-	Laporan	-	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		100	171,000,000	119,490,000		10 Unit	-	-						Unit	-	119,490,000	Unit	69.88	
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100	127,050,000			12 Laporan	-	-						Laporan	-	-	Laporan	-	
		Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100	38,654,000			1 Laporan	-	-						Laporan	-	-	Laporan	-	
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100	21,560,000			4 Laporan	-	-						Laporan	-	-	Laporan	-	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			100	1,248,565,000	5,485,000		2,750,000		-							-	5,485,000		0.44	
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100	276,100,000			1 Laporan	-	-						Laporan	-	-	Laporan	-	
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		100	364,325,000			1 Unit	-	-						Unit	-	-	Unit	-	
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100	83,820,000	6 Dokumen5,485,000		4 Dokumen	-	-						Dokumen	-	5,485,000	Dokumen	6.54	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		100	55,220,000			12 Laporan	-	-						Laporan	-	-	Laporan	-	
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100	469,100,000			4 Laporan	2,750,000	-						Laporan	-	-	Laporan	-	
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			100	264,770,000	-		-		-							-	5,335,151,467		24.98	

		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan		100	62,865,000		-	1 Dokumen	-	-						Dokumen	-	-	Dokumen	-	
		Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100	83,820,000		-	1 Orang	-	-						Orang	-	-	Orang	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		100	62,865,000		-	8 Laporan	-	-						Laporan	-	-	Laporan	-	
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		100	55,220,000		-	12 Laporan	-	-						Laporan	-	-	Laporan	-	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			100	395,175,000		66,000,000		67,750,000	-	18,000,000						18,000,000	84,000,000		21.26	
		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100	83,820,000			1 Orang	-							Orang	-	-	Orang	-	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		100	110,440,000			12 Laporan	-							Laporan	-	-	Laporan	-	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		100	82,830,000	11 bulan	66,000,000	12 Laporan	67,750,000		18,000,000					3 Laporan	18,000,000	84,000,000	3 Laporan	101.41	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		100	55,220,000			12 Laporan	-							Laporan	-	-	Laporan	-	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		100	62,865,000			12 Laporan	-							Laporan	-	-	Laporan	-	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100	9,472,342,981		1,215,731,100	1,471,303,400	114,880,000	618,473,300							612,428,300	1,828,159,400		19.30	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		100	138,050,000			1 Unit	-							Unit	-	-	Unit	-	
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		100	9,334,292,981	11 bulan	1,215,731,100	12 Laporan	1,471,303,400	114,880,000	618,473,300					5 Laporan	612,428,300	1,828,159,400	5 Laporan	19.59	
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah			100	134,130,000			-	-								-	-		-	

		Kabupaten/Kota																				
		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		100	51,300,000			1 Dokumen	-	-						Dokumen	-	-	Dokumen	-	
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		100	82,830,000			1 Dokumen	-	-						Dokumen	-	-	Dokumen	-	
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100	231,870,000		-	-	-							-	-	-		-	
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	82,830,000		-	1 Dokumen	-	-						Dokumen	-	-	Dokumen	-	
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	93,820,000		-	1 Dokumen	-	-						Dokumen	-	-	Dokumen	-	
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	55,220,000		-	1 Dokumen	-	-						Dokumen	-	-	Dokumen	-	
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100	81,730,000		-	-	-							-	-	-		-	
		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		100	47,410,000		-	1 Dokumen	-	-						Dokumen	-	-	Dokumen	-	
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		100	34,320,000		-	1 Dokumen	-	-						Dokumen	-	-	Dokumen	-	
		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			100	57,310,000		-	-	-							-	-	-		-	
		Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		100	57,310,000		-	1 Dokumen	-	-						Dokumen	-	-	Dokumen	-	

		Kabupaten/Kota																					
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100	100,292,500		-	-	-						-		-				
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		100	57,310,000		-	1 Laporan	-	-					Laporan	-	-	Laporan	-			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		100	42,982,500		-	1 Laporan	-	-					Laporan	-	-	Laporan	-			
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100	36,410,000		-	-	-						-		-				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota		100	36,410,000		-	1 Laporan	-	-					Laporan	-	-	Laporan	-			
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100	121,900,000		-	-	-						-		-				
		Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	47,000,000		-	1 Dokumen	-						Dokumen	-	-	Dokumen	-			
		Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	38,000,000		-	1 Dokumen	-						Dokumen	-	-	Dokumen	-			
		Pengendalian Data danTarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	36,900,000		-	1 Dokumen	-						Dokumen	-	-	Dokumen	-			
		TOTAL				49,988,910,435		5,967,632,157		5,802,180,409		681,756,232		1,619,632,428		-		2,301,388,660			24.98		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon

	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	SPM/Standard nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021		2022		2023		2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
PERHUBUNGAN																
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kota		100%	100%		100%		100%		100%	0.36%	100%		100%		
	Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota		0,65	< 0,65		< 0,65		< 0,65		< 0,65	0,87	< 0,65		< 0,65		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah		100%	100%		100%		100%		100%	100%	100%		100		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan kota Tomohon di masa yang datang . Analisa isu strategis telah dituangkan didalam Rencana Strategis dinas Perhubungan daerah Kota Tomohon yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif badan perkembangan yang terjadi , serta mempertimbangkan isu isu dinamika internasional , nasional maupun regional isu strategis juga tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi beberapa isu strategis yang ada serta kondisi yang ada pada Dinas Perhubungan daerah Kota Tomohon di tuangkan dalam bentuk tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta permasalahan di bidang perhubungan , yang kemudian dituangkan sebagai kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon

2.3.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon dalam pengembangan pelayanan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas di perkotaan menjadi isu strategis. Penanganan kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan multi facet (level macro= tata ruang , level Mezzo= transport demand, dan level mikro =street level) serta dinamika kota Tomohon semakin berkembang dan merupakan kota yang berada di tengah tengah empat kabupaten yang menjadi lintasan pertemuan dari empat kabupaten kota sehingga tidak lepas dari lonjakan pertambahan jumlah kendaraan setiap hari/bulan/tahun serta pengguna jalan yang semakin meningkat
2. Rendahnya kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan berlalu lintas sehingga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan , kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas serta melakukan upaya yang intensif dalam hal pengawasan dan penertiban lalu lintas serta pembinaan kepada masyarakat Selain itu perlu adanya pengembangan dan inovasi dalam upaya pembinaan dan pengawasan lalu lintas.
3. Meningkatnya Pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan serta meningkatnya pertumbuhan kendaraan , sehingga perlu melakukan penataan , pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap juru parkir , pemilik usaha serta pengguna jasa dalam upaya penertiban perparkiran . selain itu perlu adanya penataan pada lokasi perparkiran serta sistem pengelolaan perparkiran
4. Pesatnya Perkembangan Pemukiman , perdagangan dan lainnya serta semakin marak angkutan online sehingga perlu adanya kajian dalam hal penataan kembali aturan untuk taksi online . serta penataan kembali trayek angkutan umum serta pola angkutan umum agar dapat memberikankemudahan , kenyamanan

,keamanan dan kelancaran , sehingga dapat menarik bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

- 5. Semakinmeningkatkan teknologi yang diterapkan pada sistem transportasi sehingga perlu adanya penyesuaian dan peningkatan pendidikan Aparatur Dishub sesuai kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia
Perluadanya pengembanagan penerapan teknologi pada jenis kendaraan sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap peralatan pengujian kendaraan , dimana kondisi yang ada saat ini masih dalam tahap pengembangan walaupun belum maksimal

2.3.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Faktor peluang pengembangan pelayanan merupakan factor yang menjadi fariabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mewujudkan visi dan misi .

Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberi pengaru keberhasilan pencapaian visi dan misi. Adapun factor factor yang dimaksud adalah

- 1. Adanya undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- 2. Adanya potensi retribusi yang belum tergali seperti lokasi belum tersentunya lokasi lokasi parkir . dan maksimalnya sistem pengelolaan terminal
- 3. Adanya kerja sama yang baik dukungan instansi terkait , Aparatur kepolisian
- 4. Berkembangnya teknologi dan media informasi, mempermudah dalam diseminasi dan pendistribusiaan informasi pembangunan daerah dan nasional.
- 5. Perubahan paradigma kewenangan terkait perubahan perundangundangan
(UU NO 14 Tahun 1992sebagai dasar hukum penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah dilakukan perubahan pada bulan juni 2009 menjadi UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ.). Dengan Adanya perubahan substansi undang undang tersebut sangat berpengaruh terhadap koridor penanganan dan penyelenggaraan LLAJ di daerah Khususnya adanya perubahan paradigma yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perubahan Paradigma Kewenangan Terkait Perubahan Perundangundangan

No	UU LAMA (No .14 Tahun 1992)	UU BARU (No 22 Tahun 2009)
1.	Lebih banyak penangana Lapangan	Lebih Banyak Melakukan Manajemen Transportasi
2.	Bertanggung jawab terhadap operasionalnya danmanajemen	Difokuskan terhadap manajemen dan penyusunan Kebijakan
3.		Perumusan Mnajemen Kebijakan LL

4.		Penyusunan Rencana Induk Transportasi
5.		Penataan Dan Manajemen Perrparkiran
6.		Penyediaan Prasarana LLAJ
7.		Melakukan Monitiring dan evaluasi kinerrja Transportasi

Berdasarkan Paradigma Pada Table di atas , dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa paradigma Perhubungan saat ini sangat berkonsentrasi dengan tanggung jawab dalam melakukan perumusan kebijakan dan kegiatan manajemen lalulintas serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan prasarana LLAJ di wilayah. Adapun kewenangana yang telah dibagi antara Perhubungan dan Instansi Kepolisian Repoblik Indonesia adalah sebagai berikut

Tabel 2.3
Pembagian kewenangan Kepolisian RI dan Perhubungan Sesuai
UU No 22 Tahun 2009

POLRI betrtanggung jawab Terhadap Lalulintas dan Angkutan Jalan meliputi	PEMERINTAH Bertanggung jawab Terhadap Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan
Program Nasional Keamanan	Program Nasional Kegiatan Keselamatan
Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan	
Pelaksanaan Pendidikan, pelatihan	

2.3.3 Permasalahan Dibidang Perhubungan

Adapun Permasalahan Dinas Perhubungan Kota Tomohon secara umum yang perlu menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan Bidang Perhubungan , sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Perhubungan untuk mendukung terwujudnya , sistem perkotaan sesuai hirarkhi rencana tataruang masih belum optimal.
2. Masih lemahnya penataan angkutan umum
3. Masih kurangnya penataan dan pengolahan Terminal dan Perparkiran
4. Peningkatan fungsi Terminal perluh dilakukan untuk memberikan kenyamanan, kemudahan, keamanan dan kelancaran dalam menuju

lokasi tempat tujuan

5. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa bahan perencanaan umum bidang transportasi dan pemuktahirkan data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal antara lain masterplan transportasi, (Rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan , tatanan rencana transportasi lokal)
6. Berkembangnya usaha jasa ekonomi yang begitu pesat , perlu adanya penataan terpadukaitan dengan perparkiran melalui pengembangan sistem dan manajemen perparkiran secara terpadu dan terintegrasi
7. Perlu adanya kajian kembali tentang angkutan umum di kota Tomohon tentang keinginan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum mulai berkurang lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dan angkutan online
8. Peralatan pengujian kendaraan bermotor perlu dikembangkan , peningkatan SDM sebagai upaya peningkatan pelayanan yang profesional
9. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati peraturan lalu lintas sehingga perlu adanya pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan , peraturan lalu lintas dan perparkiran yang dapat mempengaruhi kenyamanan dalam berlalu lintas
10. Masih kurangnya personil dan tenaga /SDM yang mempunyai ketrampilan khusus bidang pengolahan pengaturan lalu lintas ,perparkiran/ terminal ,penguji kendaraan bermotor yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan
11. Perlu adanya Koordinasi antar instansi terkait
12. Terbatasnya anggaran yang menjadi pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Tomohon menyebabkan kurang optimalnya dalam menalokasikan untuk kegiatan rutin , kegiatan operasional dan kegiatan fisik sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat

2.3.4 Kekuatan dan Kelemahan Dinas Perhubungan

Kekuatan dan Kelemahan yang merupakan factor internal yang ada dan dihadapi oleh Dinas Perhubungan kota Tomohon

1. Kekuatan Dinas Perhubungan
 - Adanya Tujuan dan sasaran Dinas yang jelas sebagai arah yang ingin dicapai oleh dinas
 - Sarana dan Prasarana kerja yang cukup memadai
 - Adanya kode etik pegawai yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan Budaya Kerja yang baik

- Adanya SOP dan SP , sebagai acuan pelaksanaan tugas
- 2. Kelemahan Dinas Perhubungan
 - Rendanya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima di bidang perhubungan
 - Belum tersedianya database yang memadai serta terbatasnya bahan kebijakan transportasi,
 - Belum optimalnya koordinasi baik internal maupun eksternal
 - Kurang optimal anggaran yang di alokasikan untuk pelayanan bidang Perhubungan
 - Kurang optimalnya Srana dan Prasarana Transportasi serta kurangnya penyesuaian terhadap kemajuan teknologi , sehingga fasilitas peralatan khususnya peralatan pengujian kendaraan bermotor perlu ada peningkatan dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang ada

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Renja Perangkat Daerah yang merupakan penuangan dari Renstra Perangkat Daerah atau sebagai turunan dari RKPD yang merupakan penuangan dari RPJMD kota , adalah sebuah runtutan proses dan alurmekanisme perencanaan yang harus disusun sebagai sebua Dokumen Perencanaan. Berdasarkan uraian tersebut, berarti rancangan awal RKPD sesuai dengan apa yang di tuangkan di dalam RPJMD kota.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							9,062,554,682	5,802,180,409	5,884,942,393						9,968,809,750	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persen		persen	100 persen	100 persen	5,715,704,682	4,028,090,109	4,110,867,693						100 persen	6,287,274,750
2	15	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persen		persen	100 persen	100 persen	42,500,000	42,500,000	23,434,628						100 persen	46,750,000
2	15	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah				1 buah	1 buah	15,000,000	15,000,000	2,422,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum ,Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 buah	16,500,000
2	15	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD				1 dokume n	1 dokumen	10,000,000	10,000,000	1,891,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - ,Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 dokumen	11,000,000
2	15	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokume n	1 dokumen	2,500,000	2,500,000	3,559,428		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 dokumen	2,750,000
2	15	01	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD				1 dokume n	1 dokumen	6,000,000	6,000,000	2,543,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 dokumen	6,600,000
2	15	01	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokume n	1 dokumen	2,000,000	2,000,000	5,725,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 dokumen	2,200,000
2	15	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terjalinnya koordinasi dalam penyusunan laporan capaian ikhtisar kinerja SKPD				1 kegiata n	1 kegiatan	5,000,000	5,000,000	2,119,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 kegiatan	5,500,000
2	15	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya evaluasi kinerja perangkat daerah				1 dokume n	1 dokumen	2,000,000	2,000,000	5,175,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi			Perangkat Daerah	1 dokumen	2,200,000

																Umum						
2	15	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi keuangan	persen		persen	100 persen	100 persen	3,028,008,689	2,904,112,171	2,866,745,033							100 persen	3,330,809 ,558
2	15	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	2,786,508,689	2,752,615,171	2,706,478,033	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar		Perangkat Daerah	1 tahun	3,065,159, 558	
2	15	01	2.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya data administrasi pelaksanaan tugas ASN				1 dokume n	1 dokumen	50,000,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar		Perangkat Daerah	1 dokumen	55,000,00 0	
2	15	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bahan verifikasi keuangan Terbayarnya Honorarium Administrasi keuangan				1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	170,000,000	151,497,000	160,267,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar		Perangkat Daerah	1 tahun 1 tahun	187,000,0 00	
2	15	01	2.0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 kegiata n	1 kegiatan	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	6,600,000	
2	15	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 dokume n	1 dokumen	4,500,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar		Perangkat Daerah	1 dokumen	4,950,000	
2	15	01	2.0 2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya bahan tanggapn pemeriksaan				1 kegiata n	1 kegiatan	2,500,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	2,750,000	

2	15	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan bulanan/triwulan/ semest	eran			1 tahun	1 tahun	6,000,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar		Perangkat Daerah	1 tahun	6,600,000
2	15	01	2.0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran				1 dokume n	1 dokumen	2,500,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar		Perangkat Daerah	1 dokumen	2,750,000
2	15	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dokumen Persentase	persen dokum persen	en	persen dokumen persen	100 persen 1 dokume n 100 persen	100 persen 1 dokumen 100 persen	26,500,000	0	0						100 persen 1 dokumen 100 persen	29,150,000
2	15	01	2.0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terselenggaranya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah				1 kegiata n	1 kegiatan	4,000,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	4,400,000
2	15	01	2.0 3	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah				1 kegiata n	1 kegiatan	5,000,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	5,500,000
2	15	01	2.0 3	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah				1 kegiata n	1 kegiatan	2,500,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	2,750,000
2	15	01	2.0 3	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselenggaranya pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah				1 kegiata n	1 kegiatan	6,000,000	0	0			Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	6,600,000

2	15	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan barang milik daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	3,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	06. Pengembangan kota menuju smart city	Perangkat Daerah	1 kegiatan	3,300,000
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselenggaranya penatausahaan barang milik daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	3,500,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	3,850,000
2	15	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terselenggaranya pemanfaatan barang milik daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	2,500,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	2,750,000
2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	persen		persen	100 persen	100 persen	53,000,000	0	0						100 persen	58,300,000
2	15	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya perencanaan pengelolaan retribusi daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	10,000,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	11,000,000
2	15	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya data pengembangan retribusi daerah				1 dokumen	1 dokumen	7,500,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah	1 dokumen	8,250,000
2	15	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terselenggaranya penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	10,000,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	11,000,000

2	15	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Terselenggaranya pendataan dan pendaftaran objek retribusi				1 kegiatan	1 kegiatan	7,500,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	8,250,000
2	15	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Tersedianya Data retribusi daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	10,000,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	11,000,000
2	15	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya penetapan wajib retribusi daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	5,000,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	5,500,000
2	15	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan pengelolaan retribusi daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	3,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	3,300,000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	206,500,000	0	0						100 persen	227,150,000
2	15	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana disiplin pegawai				1 kegiatan	1 kegiatan	7,500,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	1 kegiatan	8,250,000
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas				1 paket	1 paket	90,000,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	1 paket	99,000,000
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data administrasi kepegawaian				1 dokumen	1 dokumen	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya		Perangkat Daerah	1 dokumen	16,500,000

																	Saing				
2	15	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya sistem informasi kepegawaian				1 kegiatan	1 kegiatan	15,000,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	1 kegiatan	16,500,000
2	15	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai				1 kegiatan	1 kegiatan	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	1 kegiatan	5,500,000
2	15	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tersedianya dana pemulangan pensiun Pegawai				1 kegiatan	1 kegiatan	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	1 kegiatan	11,000,000
2	15	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Tersedianya dana pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas				1 kegiatan	1 kegiatan	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	1 kegiatan	16,500,000
2	15	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Terselenggaranya pemindahan tugas ASN				1 kegiatan	1 kegiatan	10,000,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	1 kegiatan	11,000,000
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi				1 kegiatan	1 kegiatan	20,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	,Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	1 kegiatan	22,000,000
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan				1 kegiatan	1 kegiatan	15,000,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	1 kegiatan	16,500,000
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis				1 kegiatan	1 kegiatan	4,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Perangkat Daerah	1 kegiatan	4,400,000

																	Berdaya Saing					
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	562,304,000	130,483,145	185,483,145						100 persen	618,534,000	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan				1 tahun	1 tahun	17,000,000	9,374,700	9,374,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Perangkat Daerah	1 tahun	18,700,000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan				1 tahun	1 tahun	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Perangkat Daerah	1 tahun	33,000,000
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga				1 paket	1 paket	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Perangkat Daerah	1 paket	27,500,000
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				1 tahun	1 tahun	65,304,000	25,660,445	25,660,445		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Perangkat Daerah	1 tahun	71,834,000
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	40,000,000	26,477,000	46,477,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Perangkat Daerah	1 tahun	44,000,000
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1 tahun	1 tahun	10,000,000	5,839,000	5,839,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Perangkat Daerah	1 tahun	11,000,000
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu				1 tahun	1 tahun	30,000,000	12,625,000	22,625,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Perangkat Daerah	1 tahun	33,000,000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi SKPD				1 tahun	1 tahun	300,000,000	50,507,000	75,507,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum				Perangkat Daerah	1 tahun	330,000,000
2	15	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Arsip Dinamis SKPD				1 tahun	1 tahun	5,000,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum				Perangkat Daerah	1 tahun	5,500,000
2	15	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya sistem pemerintahan berbasis elektronik				1 paket	1 paket	40,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Perangkat Daerah	1 paket	44,000,000
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	589,291,993	197,865,793	0						100 persen	648,221,192	
2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan perorangan Dinas / kendaraan dinas jabatan				1 paket	1 paket	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Perangkat Daerah	1 paket	0
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional				1 paket	1 paket	449,291,993	197,865,793	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Perangkat Daerah	1 paket	494,221,192

2	15	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya alat besar				1 paket	1 paket	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	0
2	15	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya alat angkutan darat tak bermotor				1 paket	1 paket	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	0
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				1 paket	1 paket	40,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	44,000,000
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan mesin lainnya				1 paket	1 paket	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	110,000,000
2	15	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya				1 paket	1 paket	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	0
2	15	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud				1 paket	1 paket	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	0
2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung kantor atau bangunan lainnya				1 paket	1 paket	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	0
2	15	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 paket	1 paket	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	0
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				1 paket	1 paket	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	0
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	680,600,000	598,424,800	818,687,887						100 persen	748,660,000
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				1 tahun	1 tahun	15,000,000	9,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	16,500,000
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik				1 tahun	1 tahun	63,000,000	63,000,000	83,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	69,300,000
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 paket	1 paket	12,000,000	3,750,000	3,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	13,200,000
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya BPJS Tenaga Kontrak Tersedianya Honorarium Sopir Operasional, Petugas Halte dan Honorarium Petugas Kebersihan Tersedianya retribusi sampah, perpanjangan Pajak dan STNK, jasa service,				1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun	590,600,000	522,674,800	722,937,887		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun 1 tahun 1 tahun	649,660,000

2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	persen		persen	100 persen	100 persen	527,000,000	154,704,200	216,517,000						100 persen	579,700,000
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				1 tahun	1 tahun	50,000,000	23,187,200	45,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Perangkat Daerah	1 tahun	55,000,000
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				1 tahun	1 tahun	300,000,000	110,377,000	150,377,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	330,000,000
2	15	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				1 tahun	1 tahun	50,000,000	9,140,000	9,140,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	55,000,000
2	15	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar				1 tahun	1 tahun	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	0
2	15	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel				1 paket	1 paket	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	16,500,000
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya				1 paket	1 paket	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	13,200,000
2	15	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset tetap lainnya				1 paket	1 paket	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 paket	0
2	15	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya Aset tak berwujud				1 paket	1 paket	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	11,000,000
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				1 paket	1 paket	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	33,000,000
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor				1 paket	1 paket	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	27,500,000
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				1 paket	1 paket	35,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	38,500,000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dokum	en	dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3,346,850,000	1,774,090,300	1,774,074,700						3 dokumen	3,681,535,000
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dokum	en	dokumen	3 dokumen	3 dokumen	200,000,000	2,500,000	2,500,000						3 dokumen	220,000,000

					Kabupaten/Kota																
2	15	02	2.0 1	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kota			1 kegiatan	1 kegiatan	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 kegiatan	110,000,000	
2	15	02	2.0 1	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Adanya kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kota			1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 dokumen	55,000,000	
2	15	02	2.0 1	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Adanya pengendalian pelaksanaan rencanainduk jaringan LLAJ Kota			1 kegiatan	1 kegiatan	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 kegiatan	55,000,000	
2	15	02	2.0 2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	paket		paket	4 paket	4 paket	345,000,000	0	0					4 paket	379,500,000	
2	15	02	2.0 2	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana jalan kabupaten/kota			1 paket	1 paket	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	55,000,000	
2	15	02	2.0 2	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota			1 paket	1 paket	250,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	275,000,000	
2	15	02	2.0 2	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya prasarana jalan kabupaten/kota			1 paket	1 paket	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	22,000,000	
2	15	02	2.0 2	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan			1 paket	1 paket	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	27,500,000	
2	15	02	2.0 3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	persen		persen	100 persen	100 persen	155,000,000	0	0					100 persen	170,500,000	
2	15	02	2.0 3	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya Terminal Penumpang Tipe C			1 paket	1 paket	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	0	
2	15	02	2.0 3	02	Pembangunan Gedung Terminal	Tersedianya Gedung Terminal			1 paket	1 paket	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	0	
2	15	02	2.0 3	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Tersedianya Sarana dan Prasarana Terminal			1 paket	1 paket	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	110,000,000	
2	15	02	2.0 3	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal			1 paket	1 paket	35,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	38,500,000	
2	15	02	2.0 3	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pengelolaan Terminal			1 orang	1 orang	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 orang	22,000,000	
2	15	02	2.0 4		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan	kegiatan	n	kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	10,000,000	2,713,900	5,713,900					2 kegiatan	11,000,000	

2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir				1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 kegiatan	0
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terjalinnnya sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir				1 tahun	1 tahun	10,000,000	2,713,900	5,713,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	11,000,000
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Kegiatan	persen		persen	100 persen	100 persen	482,500,000	227,073,000	1,750,000						100 persen	530,750,000
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor				1 paket	1 paket	240,000,000	225,323,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	264,000,000
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor				1 orang	1 orang	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 orang	33,000,000
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Teregistrasikan kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor				1 tahun	1 tahun	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	5,500,000
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor				2200 buku	2200 buku	55,000,000	1,750,000	1,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	2200 buku	60,500,000
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 kegiatan	1 kegiatan	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 kegiatan	22,000,000
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Tersedianya jumlah kendaraan bermotor wajib uji				1 kegiatan	1 kegiatan	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 kegiatan	5,500,000
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor				1 paket	1 paket	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	110,000,000
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terjalinnnya hubungan yang baik antar Balai PKB				1 tahun	1 tahun	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	16,500,000
2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				1 tahun	1 tahun	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	5,500,000
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya Evaluasi penyelenggaraan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor				1 kegiatan	1 kegiatan	7,500,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 kegiatan	8,250,000

2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	persen		persen	100 persen	100 persen	700,000,000	2,750,000	12,750,000						100 persen	770,000,000
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota				1 kegiatan	1 kegiatan	165,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 kegiatan	181,500,000
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tersedianya perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas				1 paket	1 paket	250,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	275,000,000
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas				1 kegiatan	1 kegiatan	75,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 kegiatan	82,500,000
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Adanya pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalankota				1 kegiatan	1 kegiatan	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 kegiatan	11,000,000
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terjalin hubungan yang baik antar instansi terkait				1 tahun	1 tahun	200,000,000	2,750,000	12,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	220,000,000
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas	persen		persen	100 persen	100 persen	141,000,000	0	0						100 persen	155,100,000
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Tersedianya kebijakan Tata Kelola Andalalin				1 dok	1 dok	100,000,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 dok	110,000,000
2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Andalin				1 orang	1 orang	22,500,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 orang	24,750,000
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terjalinnnya koordinasi dan sinkronisasi penilaiaian hasil andalalin				1 tahun	1 tahun	3,500,000	0			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	3,850,000
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				1 kegiatan	1 kegiatan	15,000,000	0	0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 kegiatan	16,500,000
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	persen		persen	100 persen	100 persen	132,750,000	67,750,000	72,000,000						100 persen	146,025,000

2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan penyelenggaraan kompetensi kendaraan bermotor			1 kegiatan	1 kegiatan	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	16,500,000
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terselenggaranya pelaksanaan inspeksi, Audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan angkutan umum			1 kegiatan	1 kegiatan	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	16,500,000
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	persen	persen	100 persen	100 persen	1,110,600,000	1,471,303,400	1,607,360,800						100 persen	1,221,660,000
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 tahun	1 tahun	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	0
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terbayarnya Honorarium Tenaga Kontrak			1 tahun	1 tahun	1,110,600,000	1,471,303,400	1,607,360,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	1,221,660,000
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persen	persen	100 persen	100 persen	0	0	0						100 persen	0
2	15	02	2.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan			1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 kegiatan	0
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	n	3 kegiatan	3 kegiatan	45,000,000	0	0						3 kegiatan	49,500,000
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan			1 kegiatan	1 kegiatan	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 kegiatan	16,500,000

2	15	02	2.1 1	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan			1 dokume n	1 dokumen	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 dokumen	11,000,00 0
2	15	02	2.1 1	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya rencana umum jaringan trayek perkotaan			1 kegiata n	1 kegiatan	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 kegiatan	22,000,00 0
2	15	02	2.1 2		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kegiata	n	2 kegiata n	2 kegiatan	0	0	72000000						2 kegiatan	0
2	15	02	2.1 2	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Adanya kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan			1 dokume n	1 dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 dokumen	0
2	15	02	2.0 8	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah PNS yang mengikuti diklat Auditor dan Inspektur LLAJ			1 orang	1 orang	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memper kuat Infrastruktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar		Perangkat Daerah	1 orang	22,000,00 0
2	15	02	2.0 8	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor			1 kegiata n	1 kegiatan	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memper kuat Infrastruktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	16,500,00 0
2	15	02	2.0 8	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terselenggaranya pelaksanaan inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			1 kegiata n	1 kegiatan	67,750,000	67,750,000	72,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memper kuat Infrastruktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar		Perangkat Daerah	1 kegiatan	74,525,00 0
2	15	02	2.1 3		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan	kegiata	n	2 kegiata n	2 kegiatan	0	0	0						2 kegiatan	0
2	15	02	2.1 3	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan	Tersedianya Kebijakan Penetapan wilayah orang dengan menggunakan taxi			1 dokume n	1 dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 dokumen	0

					Kewenangan Kabupaten/Kota																	
2	15	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kegiata persen	n	kegiatan persen	2 kegiata n 0 persen	2 kegiatan 0 persen	0	0	0						2 kegiatan 0 persen	0	
2	15	02	2.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taxi				1 tahun	1 tahun	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	0	
2	15	02	2.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Adanya sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraann angkutan taksi				1 tahun	1 tahun	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	0	
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	25,000,000	0	0						100 persen	27,500,000	
2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya hasil data analisis tarif kelas Ekonomi angkutan orang				1 dokume n	1 dokumen	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 dokumen	16,500,000	
2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi Tarif kelas Ekonomi Angkutan Orang dan angkutan Perdesaan				1 dokume n	1 dokumen	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 dokumen	5,500,000	
2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertatanya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaandan perdesaan				1 tahun	1 tahun	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	5,500,000	
TOTAL												9,062,554,682	5,802,180,409	5,884,942,393						9,968,809,750		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Perhubungan Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota di rangkum dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah :Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020- 2025, merumuskan 4 pilar RPJMN IV Tahun 2020 - 2024. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Dari tujuh agenda prioritas pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan memfokuskan kepada seluruh agenda prioritas pemerintah tersebut dengan menitikberatkan pada 4 (empat) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024 yakni

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2015-2019 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan isu strategis dimaksud maka sasaran strategis pembangunan sektor perhubungan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional
2. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan
4. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Perhubungan
5. Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran
6. Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan
7. Terciptanya Reformasi Regulasi dan Penegakan Hukum Secara Konsisten
8. Meningkatnya SDM yang Kompeten dan Berintegritas
9. Meningkatnya Inovasi Terapan Bidang Perhubungan
10. Meningkatnya Pengelolaan Regulasi dan Layanan Hukum, Sarana, Prasarana dan Teknologi Informasi.

Adapun sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam 4 fokus yaitu

1. Konektivitas Poros Maritim;
2. Konektivitas Multimoda;
3. Keselamatan Transportasi;
4. Transportasi Perkotaan sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA PERUBAHAN SKPD

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Perhubungan, provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karenanya, substansi Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD Kota Tomohon.

Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota Tomohon, yang memiliki Visi lima tahun ke depan yakni

“Tomohon Maju , Berdaya Saing Dan Sejahtera”

Sementara Misionya adalah;

- 1. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius**
- 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor**
- 3. Menjadikan Tomohon sebagai kota Wisata Dunia.**
- 4. Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan**
- 5. Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih, efektif dan berintegritas**

Dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi dari Kota Tomohon, Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon yang merupakan bagian penting dalam pencapaian visi dan misi tersebut memfokuskan pada pencapaian Misi 2, dan 5.

Untuk mewujudkan Misi Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Perubahan Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon Tahun 2022, yaitu:

Tujuan:

- a. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Yang Adil dan Merata
- b. Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu , Berkualitas,

Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

- b. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon, dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yaitu dari Tahun 2021-2026 dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan, Program pada Dinas Perhubungan Kota Tomohon tentunya sesuai dan sebagai upaya dalam pencapaian Visi dan Misi Walikota yang ditetapkan, yang mengacu kepada apa yang di cita cita kan oleh Pemerintah kota Tomohon yang Dituangkan dalam visi dan misi Kepala daerah.

Dasar dalam menetapkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tentunya berdasarkan telaahan dan analisis dari visi misi kepala daerah serta telaan dari Renstra Kementrian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi utara.

Dengan adanya Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terjadi penyesuaian untuk penyelerasan kinerja pada tahun 2023 Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sub kegiatan ;

1. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan Daerah)
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja skpd
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi keuangan perangkat daerah

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan skpd
3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran

3. Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah

1. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
2. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD

4. Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah
 1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Monitoring , Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik kantor
 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
 5. Fasilitas kunjungan tamu
 6. Penyelenggaran Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
7. Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 1. Pengadaan Peralatan Dan Mesin lainnya
8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 1. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak , kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 2. Penyediaan jasa , pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 3. Pemeliharaan peralatan mesin lainnya

2. Program Penyelenggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaen kota
 1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten kota
 2. Pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten kota
2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten kota

1. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten kota
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana jalan
3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe c
 1. Penyusunan rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe c
 2. Pengembangan Sarana dan Prasaran Terminal
4. Penerbitan izin Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
 1. Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir Kewenangan kabupaten kota
5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 1. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 2. Penyediaan Bukti Lulus uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 3. Identifikasi dan analisis potensi jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
 4. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
 5. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penguji berkala kendaraan bermotor
- 6 . Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas
 1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten kota
 2. Ujicoba dan sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten kota
 3. Forum Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten kota
- 7 . Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 1. Pelaksanaan Inspeksi , Audit dan Pemantauan Terminal
8. Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten Kota
 1. Pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkuta Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1(Satu) kabupaten kota
9. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten kota
 1. Sosialisasi dan uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota
10. Penetapan Rencana Induk Jaringan Jalan Di Kabupaten Kota
 1. Pelaksanaan Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 daerah kabupaten kota
 2. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 daerah Kabupaten kota
11. Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah kabupaten kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan

Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten kota

12. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Yang Melayaani Trayek serta Angkutan Perkotaan Dan Pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota
 1. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang Dan Angkutan Perkotaan Dan Pedesaan dalam 1 (satu)daerah Kabupaten kota

Dengan Demikian Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Perhubungan daerah Kota Tomohon terdiri dari 2 (dua) program , 21 Kegiatan, 48 sub kegiatan dengan pagu Anggaran Rp. 6.073.993.000 Kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 dialokasikan untuk urusan kesekretariatan sebesar Rp. 4,428.640.050, dan urusan perhubungan sebesar Rp. 1,645,352,950 .

Tabel 3.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									6,073,993,000		8,312,337,097		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									4,428,640,050		5,416,587,097		
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									65,672,600		26,350,000		
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	2 Dokumen	100 %	16,241,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	18,150,000
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Pelaksanaan Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	1 Dokumen	100 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Cakupan Pelaksanaan Penyusunan dokumen perencanaan,	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan	100 %	1 Dokumen	100 %	12,772,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	0

					SKPD	perangkat daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Satu					Umum		kinerja perangkat daerah		
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Cakupan Pelaksanaan Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	1 Dokumen	100 %	12,594,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	6,000,000
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Pelaksanaan Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	1 Dokumen	100 %	11,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2,200,000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelaksanaan Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	1 Laporan	100 %	3,984,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	1 Laporan	100 %	4,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	0

								perangkat daerah										
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,034,290,871					3,732,537,097
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	32 Orang/bu 1	100%	2,816,493,171	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3,540,725,727
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	12 Dokumen	100 %	217,247,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	183,311,370
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	1 Laporan	100 %	275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5,500,000
2	15	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	2 Dokumen	100 %	275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3,000,000
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								2,773,600					13,750,000
2	15	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pelaksanaan Administrasi barang milik daerah pada	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	1 Dokumen	100 %	2,534,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan Administrasi barang milik daerah pada	100 %	8,250,000

						perangkat daerah									perangkat daerah			
2	15	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelaksanaan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan	100 %	12 Laporan	100 %	239,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	5,500,000
2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								1,907,200				11,000,000	
2	15	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,907,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Retribusi Daerah	100 %	11,000,000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								3,848,000				6,050,000	
2	15	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	1 Dokumen	100 %	3,848,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	6,050,000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								250,074,875				458,700,000	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	1 Paket	100 %	10,300,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	13,200,000
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	1 Paket	100 %	40,525,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	66,000,000

2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	27,297,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	4,400,000
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	3 Dokumen	100 %	6,187,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	12,100,000
2	15	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	3,133,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	16,500,000
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	12,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	16,500,000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	150,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	330,000,000
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								37,527,900				11,000,000	
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	37,527,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	11,000,000
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								654,611,604				563,200,000	

2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	100 %	13,200,000
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	643,611,604	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	100 %	550,000,000
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								377,933,400	594,000,000				
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	79,020,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	110,000,000
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 Unit	100 %	286,912,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	473,000,000
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11,000,000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								1,645,352,950	2,895,750,000				

2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								4,376,700					110,000,000
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,103,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rencana Induk Jaringan LLAJ	100 %	55,000,000
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,273,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rencana Induk Jaringan LLAJ	100 %	55,000,000
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								10,275,000					55,000,000
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah pelaksanaan penyediaan perlengkapan jalan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100 %	0
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah pelaksanaan penyediaan perlengkapan jalan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100 %	55,000,000
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								4,706,000					88,000,000
2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan Terminal Penumpang angkutan jalan Tipe C	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,431,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100 %	55,000,000
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Pengelolaan Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan Terminal	Kota Tomohon, Tomohon Timur,	100 %	1 Unit	100 %	275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Tersedianya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe	100 %	33,000,000

					Terminal	Penumpang Tipe C	Pengembangan	Penumpang angkutan jalan Tipe C	Paslaten Satu					Umum		C		
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								5,601,300					0
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	5,601,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	100 %	0
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								4,511,800					187,000,000
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Fasilitas Pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1300 Unit	100 %	275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Fasilitas Pengujian berkala kendaraan bermotor	100 %	55,000,000
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Fasilitas Pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	100 %	61 Dokumen	100 %	1,841,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Fasilitas Pengujian berkala kendaraan bermotor	100 %	66,000,000
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Tersedianya Fasilitas Pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Fasilitas Pengujian berkala kendaraan bermotor	100 %	5,500,000

2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Fasilitas Pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggara n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	1,570,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Fasilitas Pengujian berkala kendaraan bermotor	100 %	55,000,000
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Fasilitas Pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	100 %	1 Laporan	100 %	550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Fasilitas Pengujian berkala kendaraan bermotor	100 %	5,500,000
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								5,340,750	187,000,000				
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,805,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100 %	55,000,000
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,809,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100 %	22,000,000
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan	Persentase pelaksanaan dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,725,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Terlaksananya Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	100 %	110,000,000

						kabupaten/kota	Jalan Kabupaten/Kota	kabupaten/kota	Kelurahan					Umum		kabupaten/kota		
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								57,098,100					16,500,000
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Cakupan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan12	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	100 %	12 Laporan	100 %	57,098,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	100 %	16,500,000
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								1,552,000,000					2,178,000,000
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	12 Laporan	100 %	1,552,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,178,000,000
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								165,000					16,500,000
2	15	02	2.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	165,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	16,500,000

							a											
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								731,200				27,500,000	
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Umum Jaringan trayek Perkotaaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	1 Dokumen	100 %	390,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Rencana Umum Jaringan trayek Perkotaaan	100 %	16,500,000
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Umum Jaringan trayek Perkotaaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 %	1 Dokumen	100 %	340,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Rencana Umum Jaringan trayek Perkotaaan	100 %	11,000,000
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								110,000				8,250,000	
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	8,250,000

2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								437,100					22,000,000
2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedinay Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten , serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	437,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedinay Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	22,000,000
TOTAL													6,073,993,000					8,312,337,097

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON

Program Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan DISHUBDA kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dan kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaanya. Pencapaian target kinerja program sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dan APBD Kota Tomohon.

Rencana program dan kegiatan prioritas (utama) merupakan uraian rincian yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dan sumber dana/pagu indikatif, catatan penting, prakiraan maju Rencana Tahun 2023. Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan capaian Perubahan Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap RKPD Tahun 2020 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Selain itu juga diselaraskan dengan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional. Adapun Program Kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan daerah Kota Tomohon terdiri dari 2 Program dan 12 Kegiatan serta 31 Sub Kegiatan, rincian rencana program dan kegiatan prioritas dan pendukung yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Untuk program-program pendukung ini diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 6.073.993.000 (enam miliar tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Rupiah) dari Dana APBD Kota Tomohon Tahun 2023. Adapun rumusan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2023 pada Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6,073,993,000	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,428,640,050	
2	15	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65,672,600	
2	15	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,241,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	12,772,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12,594,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,984,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,034,290,871	
2	15	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,816,493,171	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	15	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	217,247,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2,773,600	
2	15	1	2	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,534,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	239,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,907,200	
2	15	1	2	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1,907,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,848,000	
2	15	1	2	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3,848,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	250,074,875	
2	15	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,300,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,525,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,297,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,187,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	15	1	2	7	Penyediaan Bahan/Material	3,133,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37,527,900	
2	15	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,527,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	654,611,604	
2	15	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	643,611,604	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377,933,400	
2	15	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79,020,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	286,912,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1,645,352,950	

2	15	2	2		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4,376,700	
2	15	2	2	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3,103,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1,273,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10,275,000	
2	15	2	2	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	4,706,000	
2	15	2	2	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	4,431,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	5,601,300	
2	15	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5,601,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4,511,800	
2	15	2	2	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,841,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	15	2	2	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,570,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5,340,750	
2	15	2	2	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,805,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,809,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1,725,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	57,098,100	
2	15	2	2	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	57,098,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,552,000,000	
2	15	2	2	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1,552,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	165,000	

2	15	2	2	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	165,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	731,200	
2	15	2	2	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	390,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	340,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	110,000	
2	15	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	2	2		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	437,100	
2	15	2	2	1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	437,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL						6,073,993,000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Tomohon dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan RKPD Tahun 2023. RKPD tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada Rencana pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kota Tomohon.

Rencana Kerja disusun menggambarkan program dan kegiatan prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Jika dalam perencanaan program dan kegiatan ada yang tidak sesuai baik ada tambahan atau berkurangnya kegiatan dan atau tidak sesuai jumlah pagu, maka akan dilakukan pembetulan pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di tahun yang akan datang. Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon merencanakan 2 program dan 21 kegiatan. Beberapa kegiatan akan digunakan untuk melaksanakan Kegiatan yang ada dilingkup Pemerintah Kota Tomohon .

Semoga Rencana Kerja Dinas Perhubuingan Daerah Kota Tomohon ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon pada Tahun 2023. Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparatur Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga/Perangkat Daerah pengelola Perhubungan Daerah Kota Tomohon

Demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon Manusia Tahun 2023, semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja (Renja) Perubahan merujuk pada perwujudan visi dan misi serta pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diatas maka yang dimaksud dengan Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

1. Penyusunan rancangan;
2. Rancangan akhir; dan
3. Penetapan.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2023 dilakukan dengan merujuk kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2021 – 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi keterkaitan antara target, indikator, anggaran serta substansi lainnya dalam setiap dokumen perencanaan yang telah disusun. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon tahun 2022, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 6065);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026
19. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 12 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon. Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon tahun 2023 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Tomohon dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Tomohon, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini terdiri atas:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DISKOMINFO KOTA TOMOHON TAHUN 2022, Bab ini terdiri atas:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENCANA KERJA sampai dengan Triwulan 2 tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Riview Terhadap RKPD (Lampiran III)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini terdiri atas:

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAANAAN PERANGKAT DAERAH (Lampiran IV),

Bab ini terdiri atas:

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Rencana Pendanaan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dilaksanakan guna mengetahui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan apa saja yang telah memenuhi, tidak memenuhi bahkan yang telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 didasarkan pada Renstra PD tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026, hal tersebut ditujukan untuk mengetahui :

- ❖ Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
- ❖ Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- ❖ Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 hingga triwulan II secara umum yang sudah mencapai target yang ditentukan adalah sebanyak 10 Sub kegiatan, yang belum mencapai target karena harus menunggu pencapaian 1 tahun kalender kerja yaitu sebanyak 19 Sub Kegiatan, dan yang belum terealisasi adalah 14 Sub Kegiatan.

Sub kegiatan yang sudah mencapai target yang ditetapkan adalah Sebagai berikut:

1. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDl;
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
5. Pelayanan Informasi Publik;
6. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi;
8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;

9. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
10. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Beberapa Sub kegiatan yang belum terlaksana akibat belum teranggarkan dalam APBD T.A 2022:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
3. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
4. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
5. Pengadaan Mebel;
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan;
8. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
9. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;
10. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
11. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
12. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
13. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Secara umum realisasi dari target – target yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik kendati ada beberapa target dari beberapa sub kegiatan yang tidak terealisasi akibat keterbatasan anggaran yang tersedia, tapi hal positif yang didapati yaitu ada beberapa sub kegiatan yang walaupun tidak dianggarkan tapi dapat terealisasi dan mencapai target yang ditetapkan dengan memaksimalkan setiap potensi yang ada di Perangkat Daerah.

Tabel dibawah ini menguraikan evaluasi pencapaian target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan baik Renja dan Renstra khususnya di tahun 2022 (tabel 2.1)

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 s/d Triwulan II			Target Program dan Kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =	11= (10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 %	20 %	100 %	51.4 %	51%	100 %	60 %	60%
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	20 %	100 %	75 %	75%	100 %	60 %	60%
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	2 dokumen	5	50%
2	16	01	2.01	06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 s/d Triwulan II			Target Program dan Kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =	11= (10/4)
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	20 %	100 %	66 %	66%	100 %	60 %	60%
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	5 tahun	1 tahun	1 tahun	0,5 tahun	50%	27 Orang/bulan	90 Org	1800%
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	60 bulan	12	12	6	50%	12 dokumen	30 Dokumen	50%
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100%	1 aporan	3 Dokumen	60%
2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	%	100 %	50 %	50%	100 %	60 %	60%
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	5 laporan 60 Bulan	Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	1 laporan	3 Lap ora	60%
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	0 %	100 %	0 %	0%	100 %	60 %	60%
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	0 Orang	65 Orang	0 Orang	-0%	2 Paket	2 Pa ket	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 s/d Triwulan II			Target Program dan Kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =	11= (10/4)
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	0 Orang	3 Orang	0 Orang	0%	2 Orang	2 Orang	13%
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	1 Paket	3 Paket	60%
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	1 Paket	3 Paket	60%
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	24 Dokumen	72 Dokumen	60%
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Bulan	Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Laporan	36 Laporan	60%
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	2 Paket	2 Paket	40%
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan Tahun	1 Tahun	1 Tahun	0,5 Tahun	50%	12 Laporan	36 Laporan	60%
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0 %	100 %	0 %	0%	100 %	50 %	50%
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 s/d Triwulan II			Target Program dan Kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =	11= (10/4)
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit Tahun	5 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	7 Unit	7 Unit	58%
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100% %	%	100 %	62 %	62%	100 %	60 %	60%
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan 10000 Lembar	2000 Lembar	1700 Lembar	85%	12 Laporan	36 Laporan	60%	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Bulan	Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Laporan	36 Laporan	60%
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya gaji tenaga kontrak, jaminan kesehatan tenaga kontrak	5 Laporan	Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	1 Laporan	3 Laporan	60%
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% %	15 %	100 %	57 %	57%	100 %	60 %	6000%
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 ahun 5 Unit	5 Unit	5 Unit	4 Unit	80%	2 Unit	3 Ta h	60%
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	55 Unit	1 Tahun	1 Tahun	0,5 Tahun	50%	11 Unit	33 Unit	60%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 s/d Triwulan II			Target Program dan Kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =	11= (10/4)
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 Paket	-	1 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0 Paket	0%
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100% %	15 %	100 %	83 %	83%	100 %	60 %	60%
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100% %	15 %	100 %	83 %	83%	100 %	60 %	60%
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terbentuknya Tim Pengelola Website dan Tim Monitoring Media Sosial	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	0 Kegiatan	2 Kegiatan	40%
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	60%
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	80 Layanan Tahun	5 1 Paket	1 Paket	0,5 Paket	50%	80 Layanan	240 Layanan	300%
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat,Media dan Komunitas dalam	5 Kegiatan	- Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Pengelolaan Aplikasi Informatika	100% %	17 %	100 %	63.5 %	64%	100 %	60 %	60%
2	16	03	2.01	01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	100 %	17 %	100 %	75 %	75%	100 %	60 %	60%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 s/d Triwulan II			Target Program dan Kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =	11= (10/4)
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Tahun 34 Domain /Sub	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	34 Domain/Sub domain	3 Tahun 34 Domain	60%
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 Tahun 2 Unit	1 Tahun	1 Tahun	0,5 Tahun	50%	2 Unit	3 Tahun 2 Unit	60%
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	100% %	17 %	100 %	52 %	52%	100 %	55 %	55%
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	- Unit	1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	5 Tahun 5	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	60%
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	15 Aplikasi Tahun	3 Aplikasi 5 Tahun	3 Aplikasi 1 Tahun	2 Aplikasi 0,5	67%	3 Aplikasi 1 Tahun	9 Aplikasi	60%
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	5 Tahun 1 Layanan	1 Layanan 1 Tahun	1 Layanan 1 Tahun	1 Layanan 1 Tahun	100%	1 Layanan	3 Tahun	60%
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang di implementasikan sesuai dengan masterplan Smart City	10 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	2 dokumen	6 dokumen	60%
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen pelaksanaan dan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan	10 Dokumen	2 Tenaga Ahli	2 Tenaga Ahli	2 Tenaga Ahli	100%	2 dokumen	6 dokumen	60%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 s/d Triwulan II			Target Program dan Kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =	11= (10/4)
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tersedianya Aparatur yang memiliki GCIO	5 Org ASN	- Org ASN	5 Org ASN	0 Org ASN	0%	0 Org ASN	0 Org ASN	0%
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	5 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	0,5 Tahun	50%	1 dokumen	3 dokumen	60%
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 %	%	100 %	100 %	100%	100 %	60 %	60%
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100 %	%	100 %	100 %	100%	100 %	60 %	60%
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan,An alis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 Dokumen	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Doku men	60%
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100 %	0 %	100 %	25 %	25%	100 %	50 %	50%
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	5 Laporan	0 -	1 Lapora n	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Lap ora n	60%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 s/d Triwulan II			Target Program dan Kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =	11= (10/4)
2	21	01	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	100 %	0 %	100 %	0 %	0%	0 %	0 %	0%
2	21	01	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	2 Kegiatan	0 -	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	100 %	0 %	100 %	50 %	50%	100 %	50 %	50%
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM Persandian yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah Keamanan sistem informasi dan Keamanan transaksi elektronik	1 Tenaga Ahli	0 -	1 Tenaga Ahli	0 Tenaga Ahli	0%	0 Tenaga Ahli	0 Tenaga Ahli	0%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat luas maka terdapat 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya akuntabilitas kinerja;
2. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik;
3. Belum Optimalnya penataan kelembagaan.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah, sebagai berikut :

1. Daya dukung anggaran yang minim dalam pencapaian target;
2. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah, sebagai berikut

1. Keterbatasan Sumber Daya aparatur yang menguasai Bidang Teknis;
2. Kuantitas SDM pada bagian / unit kerja masih kurang;
3. Masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan
4. Belum memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Dalam upaya pencapaian target kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika maka melalui renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah ditetapkan 6 Indikator Kinerja antara lain:

1. Jumlah ketersediaan layanan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo bagi masyarakat;
2. Cakupan Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3. Jumlah Aplikasi e-Government dan aplikasi layanan masyarakat yang terbangun;
4. Jumlah Ketersediaan layanan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Bagi Perangkat Daerah;
5. Cakupan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
6. Indeks SPBE.

Dalam rangka meningkatkan konsumsi informasi bagi seluruh lapisan masyarakat maka Pemerintah menargetkan untuk tersedianya fasilitas internet gratis bagi masyarakat dan hal itu telah terealisasi sejak tahun 2021 di hampir seluruh wilayah Kota Tomohon yaitu mencapai 43 Titik dari 44 titik yang ditargetkan demikian juga ditahun 2022 ini hampir di seluruh wilayah Kota Tomohon telah terfasilitasi dengan fasilitas internet gratis bagi

masyarakat sebagaimana tahun 2021 yaitu mencapai 43 titik, yang menjadi kendala yaitu terbatasnya ketersediaan anggaran yang menyebabkan perlu adanya perhatian khusus dari para pemangku kepentingan dalam hal ini Pimpinan Pemerintah Kota agar dapat menjamin ketersediaan anggaran dalam rangka untuk mencapai target dan indikator yang telah ditetapkan. Untuk mendukung terselenggaranya Smart City di Kota Tomohon maka di targetkan juga pengelolaan aplikasi informatika dan sebagaimana yang ditargetkan maka tingkat capaian di tahun 2022 sudah mencapai 64 %, demikian juga untuk pembangunan aplikasi resmi pemerintah telah dibangun 2 aplikasi Pemerintahan, cakupan penyediaan internet bagi PD telah menjangkau 23 PD demikian juga cakupan pengelolaan informasi telah mencapai 83%, dan untuk capaian indeks SPBE di Tahun 2022 ini masih menunggu hasil evaluasi dari Kemenpan RB.

Gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas melalui pencapaian indikator kinerja Program dan Kegiatan serta target dan realisasi capaian dan proyeksi Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah dapat dilihat sebagaimana Table 2.2.2 sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2.2

Pencapain Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon

NO	Indikator	SP M	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Analisis
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Jumlah ketersediaan layanan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo bagi masyarakat			44 Tititk	44 Titik	44 Titik	44 Titik	44 Titik	43 Titik`	43 Titik	44 Titik	44 Titik	
2	Cakupan Pengelolaan Aplikasi Informatika			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	64 %	100%	100%	
3	Jumlah Aplikasi e-Government dan aplikasi layanan masyarakat yang terbangun			3 aplik asi	3 aplik asi	4 aplik asi	4 aplik asi	4 apli kasi	3 aplikas i	2 aplika si	4 aplika si	4 aplika si	
4	Jumlah Ketersediaan layanan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Bagi Perangkat Daerah			23 PD	25 PD	30 PD	30 PD	34 PD	23 PD	23 PD	30 PD	34 PD	

5	Cakupan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	83%	100%	100%	
6	Indeks SPBE			2	2,5	3	3,25	3,5	1,67	-	2,5	3	

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon menghadapi beberapa permasalahan dan kendala antara lain :

1. Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Struktur Organisasi masing-masing Bidang akibat penyederhanaan Birokrasi berdampak pada ketidakpastian akan tugas dan fungsi aparatur;
2. Kualitas sumber daya aparatur yang masih belum memadai;
3. Etos kerja yang belum profesional;
4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral.
5. Masih adanya Pandemi Covid-19.

Sebagaimana berberapa pokok permasalahan diatas tentu hal ini berdampak pada tidak terlaksananya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara maksimal. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala tersebut, Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon terus melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Kebijakan dan penyesuaian system kerja disesuaikan dengan aturan yang ada serta keadaan berhubung masih adanya Pandemi Covid-19;
- b. Melaksanakan Penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan;
- c. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dengan memberikan *reward* kepada yang berprestasi dan *punishment* yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Menggalang koordinasi dengan baik dan seoptimal mungkin dengan instansi maupun aparat terkait.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dan hal tersebut telah dituangkan pada RPJMD serta Renstra PD dan diturunkan pada Rancangan Awal RKPD tahun 2023. Hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja sampai dengan triwulan II memperlihatkan bahwa dipandang perlu penyempurnaan terhadap rencana kerja agar sasaran dan tujuan rencana kerja tercapai.

Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Renja tahun 2023 ditemui sejumlah catatan penting yang menjadi kendala bagi pencapaian Renja tahun 2023. Keterbatasan anggaran yang tersedia belum dapat menjawab seluruh target yang telah ditetapkan terlebih dalam rangka untuk mencapai Visi Misi yang diembankan kepada PD khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah yaitu tercapainya Kota Tomohon sebagai Smart City;

Selanjutnya Review terhadap rancangan perubahan RKPD, dapat di lihat dalam lampiran table 2.3 dibawah ini

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023

KOTA TOMOHON

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Prioritas /Kegiatan Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS		CAKUPAN PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		CAKUPAN PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	100%		
			Prosentase Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah			Pegelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		Prosentase Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%		
			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pendaftaran Nama	1 Domain 34 PD	10.500	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten /Kota	Seluruh PD	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pendaftaran	1 Domain 34 PD	10.500	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Cat ata n Pen ting
	Program Prioritas /Kegiata n Prioritas	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indi katif (Rp. 000)	Prorgam/K egiatan/Su b Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Terget Capaia n	Kebu tuha n Dana (Rp.0 00)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Sub Domain Pemerinta h Kota					ran Nama Sub Domain Pemerint ah Kota			
			Jumlah PD yang terhubun g dengan Sistem Jaringan intra milik Pemerinta h Kota Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerinta h Daerah Tersedian ya fasilitas internet gratis bagi masyarak at	34 PD 2 unit 44 Titik	556. 324	Penyelengg araan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Tomo hon, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan	Jumlah PD yang terhubu ng dengan Sistem Jaringan intra milik Pemerint ah Kota Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerint ah Daerah Tersedia nya fasilitas internet gratis bagi masyara kat	34 PD 2 unit 44 Titik	556.3 24	
			Prosentas e Terlaksan anya Kegiatan Pengelola an e- Governme nt Di Lingkup Pemerinta h Daerah Kab/Kota			Pengelolaa n e- governme nt Di Lingkup Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota		Prosentase Terlaksana nya Kegiatan Pengelol aan e- Governm ent Di Lingkup Pemerint ah Daerah Kab/Kot a	100%		
			Jumlah Dokumen Hasil			Penatalaks anaan dan Pengawasa	Kota Tomo hon,	Jumlah Dokumen Hasil	1 Doku men	23.75 9,	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Cat ata n Pen ting
	Program Prioritas /Kegiata n Prioritas	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indi katif (Rp. 000)	Prorgam/K egiatan/Su b Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Terget Capaia n	Kebu tuha n Dana (Rp.0 00)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penatalaks anaan dan Pengawasa n E- Governmen t dalam Penyelengg araan Pemerintah an Daerah Kabupaten /Kota			n E- government dalam Penyelengg araan Pemerintah an Daerah Kabupaten /Kota	Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan	Penatalak sanaan dan Pengawas an E- Governme nt dalam Penyeleng garaan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota			
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubun g Layanan Pemerintah Daerah			Penyelengg araan Sistem Penghubun g Layanan Pemerintah	Kota Tomo hon, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubu ng Layanan Pemerinta h Daerah	1 Laya nan	222,0 00,	
	Peningk atan Tomoho n Smart City.		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplem entasikan Sesuai dengan Masterpla n Smart City Jumlah Kegiatan Smart City			Pengemban gan dan Pengelolaa n Ekosistem Kabupaten /Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Tomo hon, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan	Jumlah Dokume n Program Inovasi yang Diimple mentasik an Sesuai dengan Masterpl an Smart City Jumlah Kegiatan Smart City	1 Dok umen 2 Kegi atan	18.94 3,-	
			Jumlah Dokumen Pelaksana an			Pengemban gan dan Pengelolaa n Sumber Daya	Dina s Komi nfo	Jumlah Dokume n Pelaksan	1 Dok umen 2 oran	96,00 0	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat ata n Pen ting
	Program Prioritas /Kegiata n Prioritas	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indi katif (Rp. 000)	Prorgam/K egiatan/Su b Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Terget Capaia n	Kebu tuha n Dana (Rp.0 00)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pengemba ngan dan Pengelola an Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunika si Pemerinta h Daerah Jumlah Tenaga Ahli IT (Program mer dan Tenaga ahli Jaringan)			Teknologi Informasi dan Komunikas i Pemerintah Daerah		aan Pengemb angan dan Pengelol aan Sumber Daya Teknolog i Informas i dan Komunik asi Pemerint ah Daerah Jumlah Tenaga Ahli IT (Program mer dan Tenaga ahli Jaringan)	g		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelengg araan SPBE			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengemban gan Ekosistem SPBE	Dina s Komi nfo	Jumlah Dokumen Monitorin g,Evaluasi dan Pelaporan Penyeleng garaan SPBE	1 Doku men	11.07 5,-	
	PENING KATAN KUALITA S TATA KELOLA DAN PELAYA NAN PUBLIK					PROGRAM INFORMAS I DAN KOMUNIK ASI PUBLIK					
			Prosentas e Pengelola			Pengelolaa n Informasi		Prosentase Pengelol			

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat ata n Pen ting
	Program Prioritas /Kegiata n Prioritas	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indi katif (Rp. 000)	Prorgam/K egiatan/Su b Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Terget Capaia n	Kebu tuha n Dana (Rp.0 00)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			an Informasi dan Komunika si Publik Pemerinta h Daerah Kabupate n/Kota			dan Komunika si Publik Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota		aan Informas i dan Komunik asi Publik Pemerint ah Daerah Kabupate n/Kota			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Konten dan Perencanaa n Media Komunikas i Publik			Pengelolaa n Konten dan Perencanaa n Media Komunikas i Publik	Kota Tomo hon, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelola an Konten dan Perencana an Media Komunika si Publik	1 kegia tan	17.45 4	
			Jumlah Layanan Hubungan Media Jumlah media yang bekerja sama dalam pemberitaa n	1 La yana n 80 Medi a		Layanan Hubungan Media	Kota Tomo hon, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan	Jumlah Layanan Hubunga n Media Jumlah media yang bekerja sama dalam pemberita an	1 Laya nan 80 Me dia	2.497 .000	
	PENING KATAN KUALITA S TATA KELOLA DAN PELAYA NAN PUBLIK		CAKUPAN PENYELE NGGARAA N STATISTI K SEKTORA L			PROGRAM PENYELEN GGARAAN STATISTIK SEKTORA L					
			Prosentas e Terlaksan anya Kegiatan Penyeleng			Penyeleng garaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah		Prosentas e Terlaksa nanya Kegiatan Penyelen			

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Cat ata n Pen ting
	Program Prioritas /Kegiata n Prioritas	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indi katif (Rp. 000)	Prorgam/K egiatan/Su b Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Terget Capaia n	Kebu tuha n Dana (Rp.0 00)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			garaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota			Kabupaten /Kota		ggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kot a			
2			Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisas i, pengumpul an, pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			Koordinasi dan Sinkronisa si Pengumpul an, Pengolahan , Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Tomo hon, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan	Jumlah dokumen koordinas i dan sinkronis asi, pengump ulan, pengolaha n Analisis dan Disemina si Data Statistik Sektoral	1 kegia tan	11.00 0	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika diarahkan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- b. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah dituangkan dalam UU Nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu untuk menindaklanjuti UU Nomor 11 tahun 2008 tersebut Pemerintah Kota Tomohon berkewajiban untuk mengamankan informasi yang dikelola agar nantinya validasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terjaga.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan..

Adapun bentuk tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Kota Tomohon sebagaimana dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026

adalah **Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien** dengan **Sasaran Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam penjabaran program dan kegiatan tahun 2022 nanti mengacu pada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan mempertimbangkan pencapaian SDGs, termasuk program dan kegiatan yang mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik yang mempertimbangkan pendistribusian program dan kegiatan di sejumlah lokasi sesuai dengan kebutuhan danaa/pagu indikatif yang bersumber dari dana APBD kota Tomohon. Dalam penjabaran program dan kegiatan ini, ada beberapa diantaranya merupakan rumusan yang tidak sesuai dengan rancangan Awal Renja tahun sebelumnya karena kegiatan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Adapun tabel rencana program dan kegiatan perangkat daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon tahun 2023 dan prakiraan maju rencana tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,278,771,698			6,756,000,000	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22,855,700			26,500,000	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tomohon	2 Dokumen	5,031,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5,500,000
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tomohon	1 Dokumen	3,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4,000,000
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tomohon	1 Dokumen	3,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4,000,000
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tomohon	1 Dokumen	2,265,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3,000,000
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tomohon	1 Dokumen	2,265,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3,000,000

2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tomohon	1 Laporan	2,956,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	3,500,000
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tomohon	1 Laporan	3,008,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	3,500,000
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,625,488,937			2,900,500,000
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tomohon	27 Orang/bul	2,487,537,837	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27 Orang/bul	2,750,000,000
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tomohon	12 Dokumen	129,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	140,000,000
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tomohon	1 Laporan	4,403,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5,000,000
2	16	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tomohon	1 Dokumen	2,010,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,500,000
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	anProsentase Terlaksananya „Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ran	Tomohon	18 Laporan	2,057,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Laporan	3,000,000
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				31,196,200			33,000,000

2	16	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100` %	1 Dokumen	1,500,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,000,000
2	16	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100` %	12 Laporan	2,179,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	3,000,000
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100` %	1 Laporan	27,516,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	28,000,000
2	16	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				2,501,200			3,000,000
2	16	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Prosentase terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tomohon	1 Dokumen	2,501,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,000,000
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				168,057,000			223,000,000
2	16	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tomohon	1 Unit	4,440,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	5,000,000
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tomohon	2 Paket	117,761,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	150,000,000
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tomohon	2 Orang	45,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Orang	68,000,000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				279,815,400			407,000,000

2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tomohon	1 Paket	20,827,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	30,000,000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tomohon	1 Paket	25,009,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	30,000,000
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tomohon	1 Paket	28,729,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	30,000,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tomohon	1 Paket	18,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	25,000,000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tomohon	1 Dokumen	9,997,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12,000,000
2	16	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tomohon	12 Laporan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	30,000,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tomohon	12 Laporan	156,752,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	250,000,000
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				101,044,713			350,000,000
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tomohon	2 Paket	28,648,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	100,000,000
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tomohon	7 Unit	72,396,713	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	250,000,000

2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,854,742,548				2,433,000,000
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tomohon	12 Laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	33,000,000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tomohon	12 Laporan	209,496,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	250,000,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tomohon	1 Laporan	1,615,246,548	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2,150,000,000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				193,070,000				380,000,000
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tomohon	1 Unit	96,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	100,000,000
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tomohon	2 Unit	70,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	125,000,000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tomohon	11 Unit	26,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	55,000,000
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2,514,454,000				3,139,000,000
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Tomohon	5 Dokumen	17,454,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	19,000,000

2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Tomohon	80 Layanan	2,497,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Layanan	2,750,000,000
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				938,601,802				3,772,103,797
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				566,824,002				2,875,503,797
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Tomohon	34 Domain/S Domain	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Domain/S Domain	15,000,000
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Tomohon	2 Unit	556,324,002	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	2,810,503,797
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				371,777,800				896,600,000
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Tomohon	1 Dokumen	23,759,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	33,000,000
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Tomohon	1 Layanan	222,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Layanan	250,000,000

2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Tomohon	2 Dokumen	18,943,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	110,000,000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Tomohon	2 Dokumen	96,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	105,600,000
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Tomohon	1 Dokumen	11,075,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	33,000,000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				11,710,500			29,000,000
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				11,710,500			29,000,000
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				11,710,500			29,000,000
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya buku profil daerah	Tomohon	1 Dokumen	11,710,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	29,000,000
TOTAL									8,743,538,000			13,921,103,797

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 terfokus kepada sejumlah program kegiatan untuk menjawab visi dan misi Walikota dan Walikota yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi Pandemi Covid-19 yang melanda Dunia termasuk di wilayah Kota Tomohon khususnya.

Program Kegiatan yang tertuang dalam RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan Renja PD yang didalamnya berisi indikator target bahkan keluaran yang ditetapkan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Pada intinya indikator dan target Renja Dinas Kominfo tahun 2023 tidak berbeda dari indikator target yang tertuang dalam RPJMD/Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026 yang mengalami sedikit perubahan adalah target pagu anggaran yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Khusus untuk pendanaan masing-masing program dan kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah kota secara umum diharapkan dapat memberi dampak dalam pencapaian kinerja di masing-masing bidang sebagaimana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah Khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah dapat dilihat pada table 4. dibawah ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8,731,827,500	
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,278,771,698	
2	16	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,855,700	
2	16	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,031,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2,265,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,265,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,956,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,008,000	Dana Transfer

2	16	1	2	7			Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,625,488,937	
2	16	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,487,537,837	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,403,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2,010,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,057,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31,196,200	
2	16	1	2	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,500,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,179,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27,516,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	2,501,200	

					Daerah		
2	16	1	2	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2,501,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	168,057,000	
2	16	1	2	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4,440,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	117,761,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	279,815,400	
2	16	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,827,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,009,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28,729,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	9,997,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	16	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156,752,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101,044,713	
2	16	1	2	5	Pengadaan Mebel	28,648,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72,396,713	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,854,742,548	
2	16	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209,496,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,615,246,548	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193,070,000	
2	16	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	70,500,000	Dana Transfer Umum-Dana

2	16	1	2	2	Lapangan		Alokasi Umum
2	16	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,514,454,000	
2	16	2	2		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,514,454,000	
2	16	2	2	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	17,454,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	2	2	7	Layanan Hubungan Media	2,497,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	938,601,802	
2	16	3	2	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	3	2	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	556,324,002	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	3	2		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	371,777,800	
2	16	3	2	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23,759,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	3	2	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	222,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	3	2	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	18,943,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	3	2	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	96,000,000	Dana Transfer Umum-Dana

					Komunikasi Pemerintah Daerah		Alokasi Umum
2	16	3	2	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	11,075,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	11,710,500	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	11,710,500	
2	20	2	2		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	11,710,500	
2	20	2	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	11,710,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL						8,743,538,000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon Tahun 2023, disusun setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Tomohon sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan SKPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon untuk lima tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon ini dapat menjadi suatu dokumen sebagai acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peranserta dan partisipasi aktif dari semua *stakeholders* yang terkait didalam pengelolaan pendapatan asli daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah setiap tahun berjalan.

Dengan demikian, diharapkan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kota Tomohon dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon.

Disadari bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah ini masih perlu penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk memperbaikannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam mengemban misi ini.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KOTA TOMOHON

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja dilakukan sesuai dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Renja *Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon* Tahun 2022 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Renstra *Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon* Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

1. penyusunan rancangan
2. rancangan akhir; dan
3. penetapan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon sebagai perangkat daerah menyusun Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2022, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2022 dan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan review terhadap Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap RKPD Kota Tomohon Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Tahun 2023 Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
- l. Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27);
- r. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menyusun RKA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Tomohon Tahun 2022 dan Renstra Badan / Dinas / Kecamatan Kota Tomohon Tahun 2021-2026;

2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program/kegiatan /Sub Kegiatan pada tahun 2023;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan / Dinas / Kecamatan Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA TOMOHON TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 Sampai dengan Triwulan 1 dan capaian Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah, analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan/Dinas/Kecamatan, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon tahun 2023

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN IV TAHUN 2021

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon tahun 2023 didasarkan pada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan IV dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Faktor - faktor yang mempengaruhi tercapainya kinerja pelayanan sesuai target perencanaan program dan kegiatan sampai Triwulan 4 Tahun 2021 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perencanaan yang matang terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing bidang dalam menjabarkan dan mengimplementasi antara kegiatan dan pelaksanaan fisik.
- b. Perencanaan awal yang bersifat proses administrasi kegiatan dipersiapkan oleh masing-masing bidang dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi pada pihak-pihak terkait.
- c. Memaksimalkan kerja tim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketersediaan anggaran pembiayaan kegiatan.
- d. Fungsi pengawasan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dari aspek kuantitas dan kualitas pekerjaan sesuai bidang tugas dilaksanakan oleh masing-masing kepala bidang.
- e. Monitoring dan evaluasi secara Perangkat Daerah ditangani langsung oleh Kepala Dinas sebagai penanggungjawab administrasi dan Pengguna Anggaran sebagaimana aturan dan mekanisme yang harus dilaksanakan.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsultasi dan komunikasi dengan TAPD Kota Tomohon untuk penambahan anggaran dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai fungsi tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah.
2. Konsultasi dan komunikasi masing-masing bidang sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan kinerja perencanaan perlu dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal dalam upaya memperkuat program Koperasi dan UMKM.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	100%					100%	100%	
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang di awasi dan diberikan penghargaan karena berprestasi						15 Koperasi	15 Koperasi	
	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang di awasi dan diberikan penghargaan karena berprestasi	25 Koperasi					15 Koperasi	15 Koperasi	60.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota	jumlah koperasi yang di awasi dan diberikan penghargaan karena berprestasi	25 Koperasi					15 Koperasi	15 Koperasi	60.00%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	100%							
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan						58 Orang	58 Orang	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan	116 Pengurus Koperasi / Pengawas					58 Orang	58 Orang	50.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang berkualitas	100 Koperasi						
		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang meningkat produktifitas,nilai tambah,memperoleh akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen,standarisasi dan restrukturisasi usahanya					30 Koperasi	30 Koperasi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang meningkat produktifitas,nilai tambah,memperoleh akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen,standarisasi dan restrukturisasi usahanya	90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)					30 Koperasi	30 Koperasi	33.33%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha UMKM yang difasilitasi	50 UMKM					40 Pelaku UMKM	40 Pelaku UMKM	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perzinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang menerima bantuan untuk pengembangan usaha mikro; Jumlah peserta pelatihan; Jumlah Pameran yang diikuti						40 Pelaku UMKM	40 Pelaku UMKM	
	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM yang menerima bantuan untuk pengembangan usaha mikro	40 UMKM Penerima Bantuan Barang					40 Pelaku UMKM	40 Pelaku UMKM	100.00%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pameran yang diikuti untuk menjaring kemitraan dengan UMKM ;	3 Pameran					44 Pelaku UMKM	44 Pelaku UMKM	1466.67 %
	Sub Kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan usah mikro		0							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM yang mengikuti Pelatihan	90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi, terlaksananya kegiatan pemanfaatan fasilitasi untuk UKM	Koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan UMKM							
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat	180 Peserta							
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM yang usahanya Meningkat	180 Peserta					58 Orang	58 Orang	32.22%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan	180 Peserta Pelatihan (2 angkatan)				58 Orang	58 Orang	32.22%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	100%						
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang dihasilkan	2 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah									
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang dihasilkan	1 Dokumen							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dihasilkan	1 Dokumen							
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang dihasilkan	1 Dokumen							
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dihasilkan	1 Dokumen							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar	Jumlah laporan yang diadakan (LKIP dan LPPD)	2 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Realisasi Kinerja SKPD									
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi Renja dan evaluasi renstra yang dihasilkan	6 Dokumen					8 Dokumen	8 Dokumen	133.33%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN	1 Tahun					1 Tahun	1 Tahun	100.00%
	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya kegiatan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun							0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga administrasi yang menerima honor	20 Orang					20 orang	20 orang	100.00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan yang diadakan	1 Dokumen					1 Laporan	1 Laporan	100.00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan yang diadakan	3 Dokumen					18 laporan	18 laporan	600.00%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas pegawai dan perlengkapan, jumlah pakaian khusus pegawai	30 Orang					26 orang	26 orang	86.67%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan	1 Orang							0.00%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai/pejabat yang mengikuti bimtek/pelatihan	20 Orang					6 Orang	6 Orang	30.00%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan	1 Tahun					1 tahun	1 tahun	100.00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor	1 Tahun / 10 Paket					7 Jenis	7 Jenis	70.00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	1 Tahun					1 tahun	1 tahun	100.00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan yang diadakan	12 bulan					1 tahun	1 tahun	100.00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang diadakan	825 exemplar					825 exemplar	825 exemplar	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang diadakan	1 Tahun					1 tahun	1 tahun	100.00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah	1 Tahun					1 Tahun	1 Tahun	100.00%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah								
	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	0							
	Sub kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub kegiatan pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	0							
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos/keperluan surat menyurat yang diadakan	1550 lbr					1500 lbr	1500 lbr	96.77%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, air, jasa komunikasi kantor yang terbayarkan	1 Tahun					1 Tahun	1 Tahun	100.00%
	Sub kegiatan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun							0.00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan pembersih yang diadakan, jumlah tenaga kebersihan yang	1 Tahun					1 Tahun	1 Tahun	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		menerima honor								
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah honor sopir yang dibayarkan; Jumlah kendaraan dinas yang berfungsi baik	1 Tahun					1 tahun, 1 unit	1 tahun, 1 unit	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas operasional yang terpelihara; jumlah motor dinas operasional yang terpelihara	1 Tahun					1 unit, 7 unit	1 unit, 7 unit	100.00 %
	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Barang Mebel	1 Tahun							0.00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	1 Tahun					1 Tahun	1 Tahun	100.00 %
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 Tahun							0.00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Persentase koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian		Persentase koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	100%	100%	100%		100%	100%	
	jumlah koperasi yang di awasi dan diberikan penghargaan karena berprestasi		jumlah koperasi yang di awasi dan diberikan penghargaan karena berprestasi	50 Koperasi			0			
	jumlah koperasi yang di awasi dan diberikan penghargaan karena berprestasi		jumlah koperasi yang di awasi dan diberikan penghargaan karena berprestasi	25 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	15 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	jumlah koperasi yang di awasi dan diberikan penghargaan karena berprestasi		jumlah koperasi yang di awasi dan diberikan penghargaan karena berprestasi	25 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	0	25 Koperasi	25 Koperasi	
	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat		Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan		Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan	116 Pengurus Koperasi / Pengawas			58 Pengurus koperasi			
	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan		Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan	116 Pengurus Koperasi / Pengawas	116 Pengurus Koperasi / Pengawas	116 Pengurus Koperasi / Pengawas	58 Pengurus koperasi	116 Pengurus Koperasi / Pengawas	116 Pengurus Koperasi / Pengawas	
	Jumlah Koperasi yang berkualitas		Jumlah Koperasi yang berkualitas	90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)	100 Koperasi	100 Koperasi	9 Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Jumlah koperasi yang meningkat produktifitas,nilai tambah,memperoleh akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen,standarisa si dan restrukturisasi usahanya		Jumlah koperasi yang meningkat produktifitas,nilai tambah,memperoleh akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen,standarisa si dan restrukturisasi usahanya	90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)			0			
	Jumlah koperasi yang meningkat produktifitas,nilai tambah,memperoleh akses pasar,akses		Jumlah koperasi yang meningkat produktifitas,nilai tambah,memperoleh akses pasar,akses	90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)	90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)	90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)	0	90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)	90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen,standarisa si dan restrukturisasi usahanya		pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen,standarisa si dan restrukturisasi usahanya							
	Jumlah Usaha UMKM yang difasilitasi		Jumlah Usaha UMKM yang difasilitasi	40 UMKM, 3 Pameran, 90 Peserta	50 UMKM	50 UMKM	40 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	
	Jumlah UKM yang menerima bantuan untuk pengembangan usaha mikro; Jumlah peserta pelatihan; Jumlah Pameran yang diikuti		Jumlah UKM yang menerima bantuan untuk pengembangan usaha mikro; Jumlah peserta pelatihan; Jumlah Pameran yang diikuti	40 UMKM, 3 Pameran, 90 Peserta						

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Jumlah UKM yang menerima bantuan untuk pengembangan usaha mikro		Jumlah UKM yang menerima bantuan untuk pengembangan usaha mikro	40 UMKM Penerima Bantuan Barang	40 UMKM Penerima Bantuan Barang	40 UMKM Penerima Bantuan Barang	40 UMKM	40 UMKM Penerima Bantuan Barang	40 UMKM Penerima Bantuan Barang	
	Jumlah Pameran yang diikuti untuk menjaring kemitraan dengan UMKM ;		Jumlah Pameran yang diikuti untuk menjaring kemitraan dengan UMKM ;	3 Pameran	3 Pameran	3 Pameran	0	3 Pameran	3 Pameran	
				0	0	0		0	0	
	Jumlah UKM yang mengikuti Pelatihan		Jumlah UKM yang mengikuti Pelatihan	90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)	90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)	90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)	102 Peserta	90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)	90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi, terlaksananya kegiatan pemanfaatan fasilitasi untuk UKM		Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi, terlaksananya kegiatan pemanfaatan fasilitasi untuk UKM	Koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan UMKM	Koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan UMKM	Koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan UMKM	0	Koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan UMKM	Koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan UMKM	
	Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat		Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat	180 Peserta	180 Peserta	180 Peserta	102 Peserta	180 Peserta	180 Peserta	
	Jumlah UKM yang usahanya Meningkat		Jumlah UKM yang usahanya Meningkat	180 Peserta	180 Peserta	180 Peserta	102 Peserta	180 Peserta	180 Peserta	
	Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan		Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan	180 Peserta Pelatihan (2 angkatan)	180 Peserta Pelatihan (2 angkatan)	180 Peserta Pelatihan (2 angkatan)	102 Peserta	180 Peserta Pelatihan (2 angkatan)	180 Peserta Pelatihan (2 angkatan)	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang dihasilkan		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang dihasilkan	Dokumen / Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dihasilkan		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dihasilkan	1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah laporan yang diadakan (LKIP dan LPPD)		Jumlah laporan yang diadakan (LKIP dan LPPD)	20 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah dokumen evaluasi Renja dan evaluasi renstra yang dihasilkan		Jumlah dokumen evaluasi Renja dan evaluasi renstra yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN	51 Orang	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Terselenggaranya kegiatan administrasi pelaksanaan Tugas ASN		Terselenggaranya kegiatan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	30 Orang	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah tenaga administrasi yang menerima honor		Jumlah tenaga administrasi yang menerima honor	1 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	
	Jumlah laporan yang diadakan		Jumlah laporan yang diadakan	20 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah laporan yang diadakan		Jumlah laporan yang diadakan	1 Tahun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
	Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah							

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Jumlah Pakaian Dinas pegawai dan perlengkapan, jumlah pakaian khusus pegawai		Jumlah Pakaian Dinas pegawai dan perlengkapan, jumlah pakaian khusus pegawai	1 Tahun / 10 Paket	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	
	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan	1 Tahun	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	
	Jumlah pegawai/pejabat yang mengikuti bimtek/pelatihan		Jumlah pegawai/pejabat yang mengikuti bimtek/pelatihan	12 bulan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	
	Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Jumlah alat listrik yang diadakan		Jumlah alat listrik yang diadakan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah peralatan		Jumlah peralatan	1 Tahun	1 Tahun / 10	1 Tahun /	1 Tahun /	1 Tahun /	1 Tahun /	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah							
	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	0	1 unit	0	0	1 unit	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	0	0	0	0	0	
	Tersedianya mebel kantor		Tersedianya mebel kantor		0	5 set	0	0	5 set	
	Cakupan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan		Cakupan Kegiatan Jasa Penunjang							

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah							
	Jumlah benda pos/keperluan surat menyurat yang diadakan		Jumlah benda pos/keperluan surat menyurat yang diadakan		1550 lbr	1600 lbr	1600 lbr	1550 lbr	1600 lbr	
	Jumlah tagihan listrik, air, jasa komunikasi kantor yang terbayarkan		Jumlah tagihan listrik, air, jasa komunikasi kantor yang terbayarkan		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah bahan pembersih yang diadakan, jumlah tenaga kebersihan yang		Jumlah bahan pembersih yang diadakan, jumlah tenaga kebersihan		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	menerima honor		yang menerima honor							
	Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Jumlah honor sopir yang dibayarkan; Jumlah kendaraan dinas yang berfungsi baik		Jumlah honor sopir yang dibayarkan; Jumlah kendaraan dinas yang berfungsi baik		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah mobil dinas operasional yang terpelihara; jumlah motor dinas		Jumlah mobil dinas operasional yang terpelihara; jumlah motor dinas		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	operasional yang terpelihara		operasional yang terpelihara							
	Terpeliharanya Barang Mebel		Terpeliharanya Barang Mebel		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara		Jumlah peralatan kantor yang terpelihara		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	

Berdasarkan hasil evaluasi capaian target kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah sampai Triwulan IV Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja kategori kurang baik, terlihat dari hasil evaluasi realisasi pencapaian program. Secara obyektif masih terdapat berbagai kelemahan kinerja organisasi terutama menyangkut masalah

koordinasi baik dengan instansi vertikal terkait dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon belum sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini membawa implikasi terhadap kinerja pelayanan menjadi kurang maksimal. Di samping itu kurangnya data dan informasi terkait dengan bidang - bidang pembangunan Kota Tomohon maupun data - data dari dinas instansi terkait untuk kelengkapan perencanaan dan kebutuhan permintaan data dari lingkungan eksternal menyangkut program dan kegiatan Koperasi dan UMKM daerah. Adapun pengaruh masih adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat belum dapat dilaksanakan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta indikator yang terdapat dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yang menjadi target dari Kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon. sebagaimana berikut:

Jumlah Koperasi UKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja UKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja UKM tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan UKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi dan pasar.

Sehubungan dengan itu perlu ada analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal (analisa SWOT) yang berpengaruh terhadap keberlanjutan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tomohon. Faktor internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negative dianggap sebagai kelemahan.

Perkembangan Koperasi UKM di Kota Tomohon pada saat ini dipengaruhi oleh :

- **Rendahnya Inovasi.** Ketidakmampuan dari pelaku UKM untuk menciptakan 1 produk yang boleh menjadi produk khas dari kota Tomohon, misalnya belum adanya souvenir khas kota Tomohon yang bisa disajikan pada event Tomohon International Flower Festival .
- **Rendahnya produktifitas.** Produktifitas KUKM masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya . Rendahnya produktifitas ini juga didukung dengan lemahnya penguasaan dibidang manajemen, penguasaan teknologi dan pemasaran serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UKM
- **Terbatasnya akses permodalan.** Usaha Kecil dan Menengah menghadapi masalah dalam peningkatan kapasitas usahanya disebabkan kurang memperoleh pinjaman/pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan. Dengan demikian perlu dilakukan pendampingan dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut. Juga kurang terbukanya akses pembiayaan untuk UKM dari Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Koperasi
- **Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi.** Koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik. Hal ini disebabkan bahwa pendirian koperasi belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota, kurang memperhatikan prinsip koperasi, Kelembagaan dan organisasi belum dikelola secara system manajemen yang memadai, yaitu sebagian besar belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang
- **Kurang kondusifnya iklim usaha.** Pengembangan Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah memerlukan iklim yang kondusif. Di era modern ini begitu banyak pusat-pusat perbelanjaan modern, atau retail-retail modern yang masuk sampai ke kelurahan/desa, bahkan sudah banyak aplikasi yang memungkinkan orang untuk melakukan pembelian secara online. Hal ini mempengaruhi keberadaan KUKM bidang retail yang basisnya berada di kelurahan/kecamatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Dinas Koperasi UKM Kota Tomohon disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 dan membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kota Tomohon

dengan arahan Walikota terkait dengan program prioritas/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan.

Setelah melalui tahapan pembahasan Renja 2023, hasil pembahasan yang telah dilakukan tersebut terdapat beberapa perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan sebelumnya. Hasil analisis terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga menjadi renja yang siap difinalisasikan dalam RKPD tersaji pada table 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap RKPD tahun 2023 Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	1 Tahun	3,321,357,542	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	1 Tahun	2,388,765,730	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tomohon	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	2,075,617,542	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tomohon	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1,792,484,610	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tomohon	Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	21,150,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tomohon	Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	21,150,000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tomohon	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	125,500,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tomohon	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	71,381,800	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tomohon	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	299,020,000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tomohon	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	209,420,120	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tomohon	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	103,450,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tomohon	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	77,358,900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tomohon	Jumlah Aset yang di Pelihara	1 Tahun	236,620,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tomohon	Jumlah Aset yang di Pelihara	1 Tahun	199,164,000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah	Tomohon	Jumlah Aset yang dilakukan pengadaan	1 Tahun	460,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah	Tomohon	Jumlah Aset yang dilakukan pengadaan	1 Tahun	17,806,300	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN	Tomohon	Persentase SDM Koperasi yang Kualitasnya meningkat	10%	432,144,095	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN	Tomohon	Persentase SDM Koperasi yang Kualitasnya meningkat	10%	166,035,795	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Tomohon	Jumlah Koperasi Yang di Periksa dan Di Awasi Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	50 Koperasi 60 Orang	432,144,095	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Tomohon	Jumlah Koperasi Yang di Periksa dan Di Awasi Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	50 Koperasi 60 Orang	166,035,795	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tomohon	Persentase koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	100%	437,133,243	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tomohon	Persentase koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	100%	166,135,000	
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Tomohon	jumlah koperasi yang di awasi dan diberikan penghargaan karena berprestasi	50	437,133,243	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Tomohon	jumlah koperasi yang di awasi dan diberikan penghargaan karena berprestasi	50	166,135,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Tomohon	Jumlah Koperasi yang berkualitas	50	88,149,375	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Tomohon	Jumlah Koperasi yang berkualitas	50	88,149,375	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tomohon	Jumlah koperasi yang meningkat produktifitas, nilai tambah, memperoleh akses pasar, akses pembiayaan, pengujian kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan	50	88,149,375	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tomohon	Jumlah koperasi yang meningkat produktifitas, nilai tambah, memperoleh akses pasar, akses pembiayaan, pengujian kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan	50	88,149,375	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			restrukturisasi usahanya					restrukturisasi usahanya			
	PROGRAM PEMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Tomohon	Jumlah Usaha UMKM yang difasilitasi	50 UMKM	1,016,399, 607	PROGRAM PEMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Tomohon	Jumlah Usaha UMKM yang difasilitasi	50 UMKM	295,537,1 00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Tomohon	Jumlah UMKM yang Menerima Bantuan Untuk Pengembangan Usaha	50 UMKM	1,016,399,607	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Tomohon	Jumlah UMKM yang Menerima Bantuan Untuk Pengembangan Usaha	50 UMKM	295,537,100	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Tomohon	Jumlah Usaha Mikro Yang Usahanya Meningkat	60 UMKM	176,298,751	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Tomohon	Jumlah Usaha Mikro Yang Usahanya Meningkat	60 UMKM	29,643,000	
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	Tomohon	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapat Pelatihan	60 Orang	176,298,751	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	Tomohon	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapat Pelatihan	60 Orang	29,643,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	TARGET capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	TARGET capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					
TOTAL					5,471,482, 613	TOTAL				3,134,266, 000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah daerah Kota Tomohon maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota di rangkum dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Tomohon	Jumlah Usaha UMKM yang difasilitasi	Rp. 295,537,100	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Tomohon	Jumlah UMKM yang Menerima Bantuan Untuk Pengembangan Usaha	Rp. 295,537,100	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Tomohon	Jumlah Usaha Mikro Yang Usahanya Meningkat	Rp. 29,643,000	
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tomohon	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapat Pelatihan	Rp. 29,643,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan RPJPD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan daya saing UMKM yang berkaitan dengan misi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui perbaikan produktivitas dan nilai tambah produk khususnya bagi usaha mikro yang sebagian besar mencakup masyarakat berpendapatan rendah. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta perkembangan usahanya secara berkelanjutan.

Disisi lain peningkatan daya saing UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui fasilitasi bagi pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui fasilitasi bagi umkm untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Fasilitasi tersebut dapat mencakup peningkatan inovasi, penerapan standarisasi dan sertifikasi kualitas proses produksi dan produk, dan peningkatan jangkauan pasar, termasuk ekspor. UMKM juga dapat diperkuat perannya dipasar domestik melalui penurunan biaya transaksi dan promosi penggunaan produk dalam negeri.

Khusus untuk peningkatan daya saing koperasi, upaya-upaya perlu dilakukan yaitu mendorong koperasi menjadi lebih mandiri melalui peningkatan dan penguatan partisipasi anggota koperasi untuk mengembangkan usaha bersama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi sebagai wadah bagi penciptaan efisiensi usaha, peningkatan posisi tawar, dan peningkatan jangkauan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan kesejahteraan anggota koperasi baik secara ekonomi maupun sosial yang selanjutnya akan berkontribusi pada pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan. Selain itu, perbaikan kinerja usaha anggota koperasi juga diharapkan dapat mendorong kemandirian koperasi yang berlanjut pada peningkatan daya saing koperasi.

Selain peningkatan partisipasi anggota, koperasi juga perlu diperkuat kelembagaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi sehingga dapat merespon perubahan pasar dengan cepat. Perbaikan tata kelola dan kinerja kelembagaan Koperasi UKM menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan peluang pengembangan kemitraan, termasuk yang berbasis inovasi, investasi dan ekspor. Penanganan isu daya saing Koperasi UKM dapat diharapkan dapat berdampak pada perbaikan struktur pelaku usaha di Indonesia, terutama untuk mendorong pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal ini penting untuk mengoptimalkan pengembangan bidang-bidang usaha tertentu yang akan lebih efisien untuk dijalankan dalam skala kecil dan menengah. UKM juga memiliki kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan usaha mikro terutama dalam merespon peluang investasi, kemitraan atau kerjasama usaha dan perbaikan peraturan, serta perubahan pasar yang dinamis.

Penguatan UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya tenaga kerja yang ada secara optimal. Peningkatan kapasitas UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dunia usaha dalam menghadapi tantangan globalisasi yang ditandai dengan keterbukaan dan peningkatan persaingan pasar. Berbagai upaya penanganan isu daya saing UMKM dan Koperasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan RPJPD 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian daya saing kompetitif berdasarkan kemampuan sumber daya alam, SDM dan IPTEK.

Kerangka kebijakan yang digunakan dapat dirangkum dalam satu skenario peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM dalam lima tahun kedepan, seperti diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

1. Kebijakan pemberdayaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan skala UMKM dalam rangka penguatan pasar domestik dan pengembangan keunggulan global. Kebijakan difokuskan pada upaya-upaya :

- a. Peningkatan produktivitas UMKM terutama berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, serta penyediaan insentif fiskal dan non fiskal.
- b. Peningkatan inovasi dan penerapan standarisasi proses produksi dan produk/jasa UMKM.
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan kemitraan
- d. Peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa UMKM;

2. Kebijakan pemberdayaan koperasi diarahkan untuk meningkatkan tata kelola usaha koperasi yang difokuskan pada upaya-upaya :

- a. Peningkatan dan penguatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan
- b. Modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk berperan secara optimal dalam pasar domestik dan internasional.

Skenario kebijakan peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM kedepan juga disusun berdasarkan potensi yang dimiliki oleh UMKM dan Koperasi. Potensi terbesar UMKM saat ini yaitu populasinya yang besar, serta karakteristik organisasi dan usahanya yang fleksibel. Populasi UMKM yang besar merupakan modal untuk berkontribusi pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), Penciptaan lapangan kerja serta peningkatan skala produksi dan pemasaran, Fleksibilitas organisasi, tata kerja dan pengelolaan usaha juga memberi kemudahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, Kapasitas Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 UMKM umumnya dibangun dari sumber daya lokal (bahan baku, pengetahuan, ketrampilan dan tenaga kerja) juga menjadikan usahanya dapat menghasilkan produk yang terjangkau bagi masyarakat. Potensi tersebut menjadikan UMKM

dapat berkontribusi besar dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Sementara itu sebagai organisasi yang berbasis anggota, koperasi dapat menggunakan kekuatan partisipasi anggotanya untuk membangun kemandirian dan kemajuan usahanya. Koperasi juga dapat mengembangkan skala yang memadai untuk UMKM yang bergabung menjadi anggotanya. Cara ini akan memungkinkan koperasi untuk meningkatkan efisiensi usaha bersama mulai dari pengadaan, produksi sampai pemasaran. Dengan misi ekonomi dan sosialnya, koperasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan modal social masyarakat serta kesempatan kerja bagi masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Terpilih Periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera

Misi :

1. Menjaga dan Melestarikan Tomohon Sebagai Kota Religius;
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Berbagai Sektor ;
3. Menjadikan Tomohon Sebagai Kota Wisata Dunia;
4. Memajukan Sistem Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan;
5. Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berintegritas.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Tomohon, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Koperasi dan UKM pada pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, yaitu melaksanakan misi “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Berbagai Sektor”. Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

3.2.1. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Tomohon, Tujuan yang ingin dicapai adalah **Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata**. Dalam operasionalnya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tujuan yang ada dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dakan menumbuh kembangkan usaha koperasi dan UKM
2. Peningkatan produktivitas , daya saing UMKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha agar menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya

3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan perluasan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Memantapkan kelembagaan koperasi dengan meningkatkan jumlah koperasi yang sehat , kuat dan dipercaya
5. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif
6. Meningkatkan daya saing produk KUKM melalui peningkatan kualitas dalam mengembangkan produk-produk unggulan yang berkualitas dan berdaya saing.

3.2.2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah **“Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon”**. Secara umum sasaran tahunan dari Dinas Koperasi UKM Kota Tomohon ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan serta perubahan perbaikan kondisi koperasi UKM yang diakibatkan pada kebijakan tersebut.

Strategi sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kelembagaan Usaha Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2. Informasi bisnis , kewirausahaan dan kemitraan
3. Pengembangan pranata kelembagaan usaha kecil
4. Peningkatan kualitas SDM Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5. Dukungan perkuatan permodalan dan pembiayaan usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
6. Pemberian penghargaan bagi masyarakat/koperasi yang berperan dalam Pembangunan Perkoperasian di Kota Tomohon
7. Mengusulkan pemberian “Penghargaan Sebagai Tokoh Koperasi “ untuk para pejabat Pemerintah Daerah yang berperan aktif dalam pemberdayaan Koperasi , sesuai tingkatannya.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program dan rencana kegiatan merupakan representasi dari gerak dan langkah perangkat daerah dalam kontribusi terhadap pembangunan daerah. Untuk penyusunan rencana pelaksanaan program maupun kegiatan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain

- a. Pencapaian Visi dan Misi Kota Tomohon yaitu “ Tomohon Maju, Berdaya saing dan Sejahtera “
- b. Pencapaian target kinerja dan Indikator Kundi Kinerja (IKK) yaitu urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan capaian target yang telah ditentukan.
- c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah khususnya optimalisasi pengembangan produk lokal yang menjadi ciri khas dan merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat. Dengan pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mereduksi kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
- d. Peningkatan dan penguatan Stabilitas Ekonomi daerah tertinggal

Untuk RKPD Tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon menetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pangan Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 untuk mencapai target Indikator Sasaran sebanyak 4 Program, 8 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
(1 Kegiatan, 2 sub kegiatan)
2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (UMKM)
(1 kegiatan, 1 Sub Kegiatan)
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
(1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan)
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
(1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan)
5. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
(1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan)
6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
(7 Kegiatan, 34 Sub Kegiatan)

Seluruh kegiatan yang direncanakan ini akan menjawab Visi dan Misi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Koperasi dan Pemberdayaan UMKM ketika terlaksana akan menjawab visi dan misi Kepala Daerah yaitu visi Tomohon Maju, Berdaya saing dan Sejahtera dan misi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sektor.

Lebih jelas pada **Lampiran Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021.**

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang meningkat produktifitas,nilai tambah,memperoleh akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen,standarisasi dan restrukturisasi usahanya	Tomohon		-	APBD			91,497,006
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang meningkat produktifitas,nilai tambah,memperoleh akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen,standarisasi dan restrukturisasi usahanya	Tomohon		-	APBD		90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)	91,497,006

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha UMKM yang difasilitasi	Tomohon	40 UMKM	250,000,000	APBD		50 UMKM	1,054,999,201
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perzinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang menerima bantuan untuk pengembangan usaha mikro; Jumlah peserta pelatihan; Jumlah Pameran yang diikuti	Tomohon		250,000,000	APBD			1,054,999,201
	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM yang menerima bantuan untuk pengembangan usaha mikro	Tomohon	40 UMKM	250,000,000	APBD		40 UMKM Penerima Bantuan Barang	325,000,000
	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pameran yang diikuti untuk menjaring kemitraan dengan UMKM ;	Tomohon	0	-	APBD		3 Pameran	481,999,201
	Sub Kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan usah mikro		Tomohon	0	-	APBD		0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM yang mengikuti Pelatihan	Tomohon	0	-	APBD		90 Peserta Pelatihan (1 angkatan)	93,000,000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi, terlaksananya kegiatan pemanfaatan fasilitasi untuk UKM	Tomohon	0	-	APBD		Koordina si antar lembaga yang berkaitan dengan UMKM	155,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat	Tomohon	102 Peserta	177,536,200	DAK		180 Peserta	182,994,012
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM yang usahanya Meningkat	Tomohon		177,536,200	DAK		180 Peserta	182,994,012
	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan	Tomohon		177,536,200	DAK		180 Peserta Pelatihan (2 angkatan)	182,994,012

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Tomohon	1	2,480,066,000	APBD			3,447,492,037
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tomohon	3 Dokumen	-	APBD			27,150,000
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang dihasilkan	Tomohon	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	5,050,000
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang dihasilkan	Tomohon	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	3,000,000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dihasilkan	Tomohon	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	3,000,000
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang dihasilkan	Tomohon	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	3,000,000
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dihasilkan	Tomohon	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	3,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang diadakan (LKIP dan LPPD)	Tomohon	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	5,050,000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi Renja dan evaluasi renstra yang dihasilkan	Tomohon	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	5,050,000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tomohon	Dokumen / Tahun	2,058,057,550	APBD			2,219,760,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN	Tomohon	1 Tahun	1,670,266,000	APBD		1 Tahun	1,865,000,000
	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya kegiatan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Tomohon	1 Tahun	-	APBD		1 Tahun	150,000,000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga administrasi yang menerima honor	Tomohon	20 Orang	384,000,000	APBD		20 Orang	184,560,000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan yang diadakan	Tomohon	1 Dokumen	3,791,550	APBD		1 Dokumen	5,050,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan yang diadakan	Tomohon	3 Dokumen	-	APBD		3 Dokumen	15,150,000
	Kegiatan Administrasi Kepengawasan Perangkat daerah		Tomohon	51 Orang	30,500,000	APBD			159,287,000
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas pegawai dan perlengkapan, jumlah pakaian khusus pegawai	Tomohon	30 Orang	22,500,000	APBD		30 Orang	73,235,000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan	Tomohon	1 Orang	-	APBD		1 Orang	50,500,000
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai/pejabat yang mengikuti bimtek/pelatihan	Tomohon	20 Orang	8,000,000	APBD		20 Orang	35,552,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tomohon	1 Tahun	189,008,450	APBD			357,235,037

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan	Tomohon	1 Tahun	6,058,450	APBD		1 Tahun	10,100,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor	Tomohon	1 Tahun	28,000,000	APBD		1 Tahun / 10 Paket	68,950,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	Tomohon	1 Tahun	20,800,000	APBD		1 Tahun	55,550,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan yang diadakan	Tomohon	12 bulan	11,450,000	APBD		12 bulan	25,250,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang diadakan	Tomohon	1 Tahun	3,500,000	APBD		975 exemplar	5,050,000
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang diadakan	Tomohon	1 Tahun	16,500,000	APBD		1 Tahun	45,450,000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah	Tomohon	1 Tahun	102,700,000	APBD		1 Tahun	146,885,037

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah		Tomohon		-	APBD			332,500,000
	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	Tomohon	1 unit	-	APBD		0	-
	Sub kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tomohon	1 unit	-	APBD		1 unit	285,000,000
	Sub kegiatan pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	Tomohon	5 set	-	APBD		5 set	47,500,000
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tomohon	1 Tahun / 500 Lembar	62,000,000	APBD			104,450,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos/keperluan surat menyurat yang diadakan	Tomohon	500 lembar	7,500,000	APBD		1650 lbr	15,150,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, air, jasa komunikasi kantor yang terbayarkan	Tomohon	1 Tahun	8,000,000	APBD		1 Tahun	15,150,000
	Sub kegiatan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tomohon	1 Tahun	-	APBD		1 Tahun	8,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan pembersih yang diadakan, jumlah tenaga kebersihan yang menerima honor	Tomohon	1 Tahun	46,500,000	APBD		1 Tahun	65,650,000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tomohon	1 Tahun	140,500,000	APBD			247,110,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah honor sopir yang dibayarkan; Jumlah kendaraan dinas yang berfungsi baik	Tomohon	1 Tahun	75,500,000	APBD		1 Tahun	96,780,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas operasional yang terpelihara; jumlah motor dinas operasional yang terpelihara	Tomohon	1 Tahun	60,000,000	APBD		1 Tahun	96,780,000
	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Barang Mebel	Tomohon	1 Tahun	-	APBD		1 Tahun	8,500,000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Tomohon	1 Tahun	5,000,000	APBD		1 Tahun	5,050,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Tomohon	1 Tahun	-	APBD		1 Tahun	40,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Implementasi dari Rencana Program dan Kegiatan yang telah tersusun Tahun 2023 seperti yang tertuang pada Lampiran Tabel T-C.33, akan terlaksana dengan baik dan dapat menjawab setiap indicator yang telah menjadi Target Kinerja Sasaran yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ketika didukung oleh perencanaan, waktu pelaksanaan yang tepat dan anggaran yang sesuai kebutuhan. Menentukan Waktu Pelaksanaan Rencana Kerja tiap kegiatan tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana sampai Tahun 2022 sesuai jadwal. Sehingga beberapa kegiatan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat pelaksanaan yaitu saat tahap pergeseran anggaran.

Pendanaan semua Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2022 untuk Perangkat Daerah Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kerangka Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Tomohon Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,388,765,730	APBD
KegiatanAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,792,484,610	APBD
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,150,000	APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71,381,800	APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	209,420,120	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,358,900	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199,164,000	APBD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah	17,806,300	APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	166,035,795	DAK
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	166,035,795	DAK
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	166,135,000	APBD
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	166,135,000	APBD
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	88,149,375	APBD
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	88,149,375	APBD
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	295,537,100	APBD
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	295,537,100	APBD
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	29,643,000	DAK
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	29,643,000	DAK

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 adalah hasil rumusan yang telah berkesesuaian dengan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Periode 2021 – 2026 serta sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Tomohon, diharapkan perencanaan pembangunan Kota Tomohon akan semakin mengalami peningkatan terhadap Koperasi dan UMKM daerah dengan memaksimalkan semua potensi sumber daya yang ada pada internal kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya maupun eksternal melalui lintas kelembagaan terkait.

Akhirnya Penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersentuhan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi lebih efektif, efisien, dan ekonomis apabila sistem penganggaran Perangkat Daerah menggunakan asas keseimbangan dan kemanfaatan sesuai kebutuhan prioritas program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan pelayanan kelembagaan.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KOTA
TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, yaitu dengan upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berorientasi hasil, maka perlu untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi dari instansi pemerintah kedalam program dan kegiatan yang menjadi kerangka acuan pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah acuan pelaksanaan kinerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, serta kegiatan perangkat daerah berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan perangkat daerah yang telah disusun. Dokumen Renja menjadi dokumen operasional satu tahunan dari Renstra perangkat daerah.

Renja perangkat daerah disusun dengan menyesuaikan pada program kerja yang ada dalam Renstra perangkat daerah. Dari program ini kemudian ditentukan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator capaian sebagai ukuran dari kinerja yang ingin dicapai, serta anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan setiap sub kegiatan. Penentuan anggaran ini menyesuaikan pada belanja yang diperlukan dalam pelaksanaan sub kegiatan perangkat daerah. Perencanaan yang disusun dalam Renja perangkat daerah harus sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan.

Renja perangkat daerah bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah wajib untuk menyusun Renja untuk tahun berjalan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan. Renja inilah yang nantinya setelah diverifikasi dan disetujui, akan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah, dan nantinya akan menjadi bahan penyusunan APBD Kota Tomohon.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon dimaksudkan untuk menjadi pedoman DPMPSTSP Daerah Kota Tomohon dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon, sebagaimana dimaksud terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Berisikan latar belakang penyusunan, landasan hukum yang digunakan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Tahun 2021

Berisikan evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai Triwulan II, hasil analisis kinerja DPMPTSP Daerah Kota Tomohon, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan hasil usulan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Daerah Kota Tomohon, serta keterkaitan dengan rumusan program dan kegiatan Pemerintah Kota Tomohon.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan tentang rencana program dan kegiatan DPMPTSP Daerah Kota Tomohon, serta alokasi anggaran yang disediakan.

BAB V Penutup

Memuat catatan penting yang perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan selanjutnya, serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

Pelaksanaan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan DPMPTSP Daerah Kota Tomohon dilaksanakan dengan memprioritaskan pemulihan dan penguatan perekonomian di Kota Tomohon selepas pandemi Covid-19. Setelah memperoleh capaian dari target-target yang ditetapkan yang baik pada tahun sebelumnya, fokus DPMPTSP Daerah Kota Tomohon adalah melanjutkan peningkatan perekonomian Kota Tomohon pasca pandemi dengan meningkatkan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha di Kota Tomohon, serta peningkatan pelayanan perizinan.

Untuk peningkatan pelayanan perizinan, sampai dengan Tahun 2022 telah dilaksanakan lanjutan dari penyederhanaan pelayanan perizinan dengan memanfaatkan sistem informasi perizinan baik itu OSS-RBA maupun Simantaptom, penyediaan sarana dan prasarana khusus untuk layanan seperti pengaduan dan konsultasi, penyediaan informasi publik terkait pelayanan perizinan baik secara *offline* melalui loket informasi maupun secara *online* dengan memanfaatkan *website* dan media sosial.

Terkait fasilitasi kemudahan pelayanan perizinan, DPMPTSP Daerah Kota Tomohon telah merencanakan pemberian insentif penanaman modal bagi pelaku usaha di Kota Tomohon, namun belum terealisasi karena masih terkendala ketersediaan aturan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dilakukan juga pemantapan birokrasi, dengan dilaksanakannya pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih dan melayani. Dilaksanakan juga penguatan reformasi birokrasi untuk mendukung terwujudnya pelayanan yang prima.

Secara keseluruhan, hasil capaian yang diperoleh DPMPTSP Daerah Kota Tomohon sampai dengan tahun 2021 dipaparkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Tomohon

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
	BIDANG PENANAMAN MODAL								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100%	-	-	-	100%	40%	40
	Perencanaan,Penganggran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	-	-	-	100%	60%	60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	6 Bulan	50
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	100%	0%	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi	80%	-	-	-	75%	20%	25
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	100%	-	-	-	100%	60%	60
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah yang dapat menunjang operasional kantor	100%	-	-	-	100%	33%	33

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat, internet, listrik, air, perbaikan peralatan kerja, serta jasa pelayanan lainnya	100%	-	-	-	100%	60%	60
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan	100%	-	-	-	100%	60%	60
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Rp. 107.800.000.000	-	-	-	Rp. 102.700.000.000	Rp. 112.325.800.170	109,37
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	12 Pelaku Usaha	-	-	-	10 Pelaku Usaha	-	0
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya kajian/peta potensi	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	0
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional	185 PMDN/PM A	-	-	-	175 PMDN/PMA	241 PMDN/PMA	137,71
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan pada penyelenggaraan promosi dalam dan luar daerah	9 Kegiatan	-	-	-	5 Kegiatan	3 Kegiatan	33,33
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata lamanya pelayanan perizinan	4 Hari	-	-	-	4 Hari	4 Hari	100
					Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	91,5	-	-	-	91	90,51	98,9
				Pelayan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan serta pelayanan non perizinan dan non usaha	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	6 Bulan	50
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio daya serap tenaga kerja	17,3	-	-	-	16,2	16,69	96,47
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku penanaman modal di Kota Tomohon	3 Kegiatan	-	-	-	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33

				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase peningkatan investasi	5%	-	-	-	5%	-	-
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Teritegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan di Kota Tomohon	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	6 Bulan	50

Dari tabel ini terlihat bahwa sampai dengan tahun 2022 beberapa indikator telah tercapai sebesar 90% atau lebih, namun masih terdapat indikator yang tingkat capaiannya masih rendah atau terealisasi. Hal ini dikarenakan kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan di sisa Tahun 2022.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon Sampai dengan tahun 2022 dapat dikatakan sangat baik karena terdapat 4 indikator yang telah tercapai sebesar 100% atau lebih. Satu indikator tercapai dibawah 50%, dan 2 indikator yang belum dapat diukur karena nilai data yang diperlukan dalam pengukuran indikator diperoleh pada akhir tahun. Hasil capaian IKK DPMPSTP Daerah Kota Tomohon sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1			Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	-	100%	100%	100%	-	60%	100%	100%	
2			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	6 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
3			Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	100%	100%	100%	-	0%	100%	100%	
4			Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi	-	75%	80%	85%	-	20%	80%	85%	
5			Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	-	100%	100%	100%	-	60%	100%	100%	
6			Tersedianya barang milik daerah yang dapat menunjang operasional kantor	-	100%	100%	100%	-	33%	100%	100%	
7			Tersedianya jasa surat menyurat, internet, listrik, air, perbaikan peralatan kerja, serta jasa pelayanan lainnya	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	

8			Terpeliharanya barang milik daerah yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan	-	100%	100%	100%	-	60%	85%	85%	
9			Terlaksananya pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	10 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	-	-	12 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	Masih terdapat kendala terkait akun SIPD
10			Tersedianya kajian/peta potensi	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
11			Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan pada penyelenggaraan promosi dalam dan luar daerah	-	5 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	-	1 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	Penambahan rencana penyelenggaraan dan keikutsertaan kegiatan promosi
12			Terlaksananya pelayanan perizinan serta pelayanan non perizinan dan non usaha	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	6 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
13			Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku penanaman modal di Kota Tomohon	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	1 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
14			Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan di Kota Tomohon	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	6 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

Nilai capaian yang rendah dikarenakan pelaksanaan realisasi direncanakan pada sisa tahun 2022. Untuk indikator pemberian fasilitas/insentif penanaman modal, terdapat kendala dimana belum terdapat akun dalam sistem perencanaan yang mengakomodir pemberian stimulus penanaman modal kepada pelaku usaha dalam bentuk uang. Telah dilakukan pengajuan penambahan akun beserta dokumen hukum yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon telah berupaya untuk menjawab beberapa isu-isu strategis yang ada. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut.

1. Pemulihan perekonomian di Kota Tomohon

Pandemi Covid-19 yang berakibat pada pembatasan kegiatan masyarakat berdampak buruk pada perekonomian Kota Tomohon. Hal ini

terlihat dari nilai investasi di penghujung tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 54%. Pembatasan kegiatan masyarakat ini mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kerugian sehingga berdampak pada nilai investasi.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tomohon

Perbaikan pada sistem pelayanan publik menjadi salah satu bagian reformasi birokrasi guna menciptakan pelayanan publik yang mudah, cepat, serta bebas dari korupsi dan gratifikasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik ini meliputi peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan, serta peningkatan sistem pelayanan publik itu sendiri.

Untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon dalam menjawab isu-isu yang dihadapi, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung di luar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon menggunakan metode atau teknik analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)* atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.

1. Kekuatan (*Strengths*)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon dalam mencapai tujuan dan sasaran, adalah :

- a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Investasi dan penanaman Modal;
- b. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normatif dan taat aturan;
- c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi;
- d. Dukungan prangkat organisasi yang solid;
- e. Memiliki pola kerja yang baku.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis adalah :

- e. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim;
- f. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
- g. Alokasi dana oprasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;
- h. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

- d. Adanya Peraturan yang memberikan wewenang kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan tugasnya di bidang investasi dan penanaman modal ;
- e. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon yang professional dan handal;
- f. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam mengkritisi kinerja Aparatur daerah, merupakan fakta yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon.

4. Tantangan (*Threats*)

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datangnya dari luar system organisasi/eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan, diantaranya sebagai berikut :

- c. Bagaimana kita menciptakan Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon;
- d. Ketidak maksimalnya aparat daerah dalam menjalankan tupoksinya, dan pemahaman tentang investasi dan penanaman modal.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing-masing unsur guna menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan yang ada dan menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh organisasi, strategis tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Analisis Penetapan Strategi Organisasi
Matrik SWOT

	Kekuatan	Kelemahan
	<p>f. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Investasi dan penanaman Modal;</p> <p>g. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normative dan taat aturan;</p> <p>h. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi;</p> <p>i. Dukungan prangkat organisasi yang solid;</p> <p>j. Memiliki pola kerja yang baku.</p>	<p>e. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim;</p> <p>f. Kapasitas sumbe daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;</p> <p>g. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;</p> <p>h. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.</p>
Peluang	Startegi S-T	Startegi W-O
<p>d. Adanya Peraturan yang memberikan wewenang kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan tugasnya di bidang</p>	<p>3. Membangun system pelayanan prima;</p> <p>4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam TUPOKSI untuk</p>	<p>4. Membangun mekanisme prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien untuk mewujudkan</p>

<p>investasi dan penanaman modal ;</p> <p>e. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon yang professional dan handal;</p> <p>f. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam mengkritisi kinerja Aparatur daerah, merupakan fakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon.</p>	<p>mewujudkan akuntabilitas.</p>	<p>pelayanan prima;</p> <p>5. Membekali SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;</p> <p>6. Membangun profesionalisme aparatur DPMPTSP untuk mendorong peningkatan kinerja.</p>
Tantangan	Startegi S-T	Startegi W-O
<p>c. Bagaimana kita menciptakan Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu</p>	<p>4. Melaksanakan Peningkatan kinerja</p> <p>5. Mendayagunakan system informasi dan mediasi antara aparat DPMPTSP dengan instansi terkait ;</p> <p>6. Meningkatkan komitmen dan kinerja aparatur.</p>	<p>2. Menerapkan pola kerja dan pola pembinaan aparat yang serasi dengan potensi yang ada.</p>

Pintu Kota Tomohon; d. Tidak maksimalnya aparatur daerah Dalam Menjalankan Tupoksinya, dan pemahaman tentang Investasi dan penanaman modal .		
---	--	--

Berdasarkan hasil analisis *SWOT* sebagaimana tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi, di antaranya :

1. Rumusan permasalahan yang dihadapi masa kini
Adanya aturan yang mendukung peningkatan Investasi dan penanaman modal yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku, belum diikuti dengan pelaksanaan di lapangan sehingga mengakibatkan implementasi yang tidak baik, akan terjadinya kelemahan ditingkat aparatur. Selain itu adanya instrumen pendukung kinerja aparat belum tersedia secara maksimal sehingga mengakibatkan kegiatan investasi dan penanaman modal yang belum sesuai yang diharapkan.
2. Rumusan perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi.
3. Rumusan perubahan internal yang perlu dilakukan.
 - a. Penyusunan analisis kompetensi jabatan untuk penempatan jabatan struktural berstandar, sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi;
 - b. Penyusunan rencana pembagian tugas staf;
 - c. Penataan sistem dan prosedur;
 - d. Evaluasi dan peningkatan mutu penyelenggaraan Perjanjian Kinerja di lingkungan DPMPTSP Kota Tomohon;
 - e. Peningkatan kualitas aparatur DPMPTSP Kota Tomohon melalui peningkatan kualifikasi pendidikan maupun kompetensi;
 - f. Peningkatan pelayanan di bidang Investasi dan penanaman modal terhadap seluruh lapisan masyarakat.
 - g. Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan pelayanan investasi harus dimaksimalkan.

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan DPMPTSP Daerah Kota Tomohon dengan melihat kebutuhan sepanjang tahun 2023, dilakukan perubahan terhadap anggaran program dan kegiatan yang ada berdasarkan alokasi pagu, tanpa ada pengurangan ataupun penambahan program atau kegiatan. Dilakukan analisa kebutuhan dengan membandingkan program dan kegiatan, indikator capaian, serta pagu anggaran Renja DPMPTSP Daerah Kota Tomohon tahun 2022 dengan rencana Renja Tahun 2023 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2022

No.	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Pagu
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100%	4.925.189.750	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100%	4.729.096.873
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	128.317.039	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	27.565.700
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	100%	3.239.696.518	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	100%	3.443.004.800
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	64.431.324	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	17.320.400
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi	80%	75.308.872	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi	80%	1.355.800

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	100%	260.722.328	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	100%	201.611.877
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOTA TOMOHON	Tersedianya barang milik daerah yang dapat menunjang operasional kantor	100%	113.060.488	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOTA TOMOHON	Tersedianya barang milik daerah yang dapat menunjang operasional kantor	100%	35.905.700
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOHON	Tersedianya jasa surat menyurat, internet, listrik, air, perbaikan peralatan kerja, serta jasa pelayanan lainnya	100%	881.465.632	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOHON	Tersedianya jasa surat menyurat, internet, listrik, air, perbaikan peralatan kerja, serta jasa pelayanan lainnya	100%	906.737.196
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOHON	Terpeliharanya barang milik daerah yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan	100%	162.187.548	Terpeliharanya barang milik daerah yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan	KOTA TOMOHON	Terpeliharanya barang milik daerah yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan	100%	95.595.400
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	KOTA TOMOHON	Jumlah nilai investasi berskala nasional	107,7 M	853.107.120	Jumlah nilai investasi berskala nasional	KOTA TOMOHON	Jumlah nilai investasi berskala nasional	107,7 M	365.000.000
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Terlaksananya pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	12 Pelaku Usaha	600.000.000	Terlaksananya pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	KOTA TOMOHON	Terlaksananya pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	12 Pelaku Usaha	315.000.000
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Tersedianya kajian/peta potensi	1 Dokumen	253.107.120	Tersedianya kajian/peta potensi	KOTA TOMOHON	Tersedianya kajian/peta potensi	1 Dokumen	50.000.000
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DALAM DAN LUAR KOTA	Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional	185 PMDN	432.805.191	Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional	DALAM DAN LUAR KOTA	Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional	185 PMDN	195.187.127

1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DALAM DAN LUAR KOTA	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan pada penyelenggaraan promosi dalam dan luar daerah	9 Kegiatan	432.805.191	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan pada penyelenggaraan promosi dalam dan luar daerah	DALAM DAN LUAR KOTA	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan pada penyelenggaraan promosi dalam dan luar daerah	9 Kegiatan	195.187.127
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	KOTA TOMOHON	Rata-rata lamanya pelayanan perizinan	4 Hari	295.680.003	Rata-rata lamanya pelayanan perizinan	KOTA TOMOHON	Rata-rata lamanya pelayanan perizinan	4 Hari	179.650.700
		KOTA TOMOHON	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	91,5		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	KOTA TOMOHON	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	91,5	
1	Pelayan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Terlaksananya pelayanan perizinan serta pelayanan non perizinan dan non usaha	12 Bulan	295.680.003	Terlaksananya pelayanan perizinan serta pelayanan non perizinan dan non usaha	KOTA TOMOHON	Terlaksananya pelayanan perizinan serta pelayanan non perizinan dan non usaha	12 Bulan	179.650.700
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	KOTA TOMOHON	Rasio daya serap tenaga kerja	17,3	310.247.264	Rasio daya serap tenaga kerja	KOTA TOMOHON	Rasio daya serap tenaga kerja	17,3	230.565.300
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku penanaman modal di Kota Tomohon	50%	310.247.264	Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku penanaman modal di Kota Tomohon	KOTA TOMOHON	Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku penanaman modal di Kota Tomohon	50%	230.565.300
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	KOTA TOMOHON	Presentase peningkatan investasi	5%	105.691.874	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	KOTA TOMOHON	Presentase peningkatan investasi	5%	25.000.000

1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan di Kota Tomohon	12 Laporan	105.691.874	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan di Kota Tomohon	12 Laporan	25.000.000
---	---	--------------	--	------------	-------------	---	--------------	--	------------	------------

Dari hasil review yang telah dilakukan seperti yang terlihat pada tabel T-C.31, penyesuaian dilakukan pada alokasi anggaran dimana dilakukan pengurangan anggaran untuk menyesuaikan dengan pagu yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon untuk tahun 2023 dimana program yang menjadi prioritas adalah pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan penanaman modal.

2.5. Penelaahan Usulan Masyarakat

Usulan masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan forum konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon pada tahun 2022. Dari kegiatan ini diperoleh usulan yaitu pengembangan investasi menyesuaikan kondisi wilayah yang ada di Kota Tomohon serta memprioritaskan investor lokal dalam upaya peningkatan investasi di Kota Tomohon. Kedua usulan ini difasilitasi dalam program pengembangan iklim penanaman modal untuk kegiatan pembuatan peta potensi Kota Tomohon dan fasilitasi/pemberian insentif untuk pelaku usaha di Kota Tomohon.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Tomohon

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Tersedianya kajian/peta potensi	1 Dokumen	
2	Fasilitasi/pemberian insentif untuk pelaku usaha Kota Tomohon	Kota Tomohon	Terlaksananya pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	12 Pelaku Usaha	Diperlukan penyesuaian nama akun belanja di SIPD

Pengembangan investasi menyesuaikan kondisi wilayah yang ada di Kota Tomohon diakomodir di kegiatan pembuatan peta potensi dimana direncanakan akan dibuat kajian peta potensi yang bisa dijadikan acuan pengembangan iklim penanaman modal di Kota Tomohon. Untuk usulan memprioritaskan investor lokal dalam upaya peningkatan investasi di Kota Tomohon diakomodir dalam kegiatan fasilitasi/pemberian insentif untuk pelaku usaha Kota Tomohon dimana direncanakan akan diberikan stimulus penanaman modal untuk 12 investor lokal.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan penanaman modal dan pelayanan publik di Kota Tomohon, kinerja DPMPTSP Daerah Kota Tomohon juga menyesuaikan dengan kebijakan nasional Republik Indonesia. Kebijakan nasional yang menjadi fokus DPMPTSP Daerah Kota Tomohon adalah peningkatan perekonomian, transformasi pelayanan publik, dan penguatan akuntabilitas pemerintah.

1. Peningkatan Perekonomian

Kebijakan peningkatan perekonomian diupayakan dengan melaksanakan pengembangan iklim investasi, serta kemudahan perizinan berusaha di Kota Tomohon

2. Transformasi Pelayanan Publik

Transformasi pelayanan publik dilaksanakan DPMPTSP Daerah Kota Tomohon dengan melakukan perbaikan-perbaikan baik terkait sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan perizinan untuk kemudahan masyarakat, maupun penyederhanaan proses pengurusan perizinan.

3. Penguatan Akuntabilitas Pemerintah

Internalisasi budaya kerja prima dilaksanakan dengan penguatan reformasi birokrasi di DPMPTSP Daerah Kota Tomohon.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menggunakan rancangan rencana strategis tahun 2021 – 2026. Adapun Tujuan dari rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon Tahun 2023 ini telah menyesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata, dengan sasaran strategis yang ditetapkan adalah meningkatnya perekonomian di Kota Tomohon dengan strategi kebijakan yaitu meningkatkan promosi dan kerjasama investasi di Kota Tomohon. Penetapan tujuan dan sasaran ini diharapkan dapat menjawab isu-isu yang ada terkait pemulihan perekonomian pasca Covid-19 dan peningkatan kualitas pelayanan di DPMPTSP Daerah Kota Tomohon.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ditetapkan DPMPTSP Daerah Kota Tomohon dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Visi Kota Tomohon yaitu Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera melalui Misi 2 Kota Tomohon yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. Program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat memberikan kemudahan penanaman modal serta meningkatkan nilai investasi di Kota Tomohon sehingga secara langsung dapat meningkatkan nilai perekonomian Kota Tomohon. Penetapan rencana kerja DPMPTSP

Daerah Kota Tomohon juga mengacu pada program unggulan Kota Tomohon yaitu penyediaan pelayanan prima kepada masyarakat dari lahir sampai mati.

Penyusunan program dan kegiatan untuk Renja Tahun 2023 juga memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*). Investasi menjadi salah satu sarana signifikan yang dapat menggerakkan ekonomi, serta mendorong pemulihan perekonomian. Peningkatan nilai investasi secara langsung akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan PDB sehingga program dan kegiatan yang direncanakan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai investasi sebagai upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi (Target 8.1 *SDGs*).

Adapun program dan kegiatan Renja Tahun 2023 beserta indikator capaiannya dapat dilihat ditabel berikut ini.

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.724.500.000			9.031.328.759	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.729.096.873			6.413.760.794	
2	18	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27.565.700			67.500.000	
2	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	21.553.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	45.000.000
2	18	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	945.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.000.000
2	18	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.000.000
2	18	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	828.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.000.000

2	18	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	958.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.000.000
2	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.481.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	3.500.000
2	18	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	3.000.000
2	18	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.443.004.800				3.900.815.317
2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	3.385.284.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	3.747.815.317
2	18	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	11.875.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	30.000.000
2	18	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	41.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	100.000.000
2	18	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1.015.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	5.000.000

2	18	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.695.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5.000.000
2	18	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	120.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.000.000
2	18	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Laporan	990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	5.000.000
2	18	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	925.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.000.000
2	18	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				17.320.400				30.400.000
2	18	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.900.000
2	18	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	120.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.500.000
2	18	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	120.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	2.000.000

2	18	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	16.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	25.000.000
2	18	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.355.800				105.000.000
2	18	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	120.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	60.000.000
2	18	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	875.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.000.000
2	18	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	120.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.000.000
2	18	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	120.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.000.000
2	18	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	120.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	30.000.000
2	18	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				201.611.877				652.287.781
2	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	3.999.525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	20.000.000

2	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Paket	42.755.452	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Paket	110.000.000
2	18	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	2.482.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	5.500.000
2	18	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	2.169.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	55.000.000
2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	7.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	19.800.000
2	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.998.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.500.000
2	18	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	9.997.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	55.000.000
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	77.589.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	278.487.781
2	18	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	120.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.000.000

							Kelurahan						
2	18	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	52.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	100.000.000
2	18	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35.905.700				305.500.000
2	18	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	120.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0
2	18	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	4.724.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	115.500.000
2	18	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	31.060.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	190.000.000
2	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				906.737.196				1.200.257.696
2	18	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	7.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	15.000.000
2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	16.410.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	25.000.000

2	18	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	120.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	30.000.000
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	883.206.996	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1.130.257.696
2	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.595.400				152.000.000
2	18	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya aset penunjang pelaksanaan tugas kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	33.996.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	50.000.000
2	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya aset penunjang pelaksanaan tugas kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	56.608.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	90.000.000
2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya aset penunjang pelaksanaan tugas kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	4.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	12.000.000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				365.000.000				1.047.200.000
2	18	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				315.000.000				857.200.000
2	18	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	800.000.000

2	18	02	2,01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Kegiatan Usaha	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Kegiatan Usaha	57.200.000
2	18	02	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				50.000.000				190.000.000
2	18	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi Kota Tomohon	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	73.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	40.000.000
2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi Kota Tomohon	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	49.926.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	150.000.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				195.187.127				675.000.000
2	18	03	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				195.187.127				675.000.000
2	18	03	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jumlah investor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	13.585.852	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	75.000.000
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah investor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	181.601.275	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	600.000.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				179.650.700				360.000.000
2	18	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				179.650.700				360.000.000

2	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Pelaku Usaha	129.650.700	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		300 Pelaku Usaha	180.000.000
2	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Kegiatan Usaha	19.730.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350 Kegiatan Usaha	70.000.000
2	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Orang	23.155.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Orang	55.000.000
2	18	04	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Kegiatan Usaha	7.113.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Kegiatan Usaha	55.000.000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				230.565.300				402.400.000
2	18	05	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				230.565.300				402.400.000
2	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanaman modal pelaku usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Kegiatan Usaha.	66.728.300	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		220 Kegiatan Usaha.	141.100.000
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanaman modal pelaku usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Pelaku Usaha	70.458.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		165 Pelaku Usaha	141.300.000

2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanaman modal pelaku usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Kegiatan Usaha	93.379.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		230 Kegiatan Usaha	120.000.000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				25.000.000				132.967.965
2	18	06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000				132.967.965
2	18	06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan perizinan dan non perizinan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	132.967.965
TOTAL									5.724.500.000				9.031.328.759

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja DPMPTSP Daerah Kota Tomohon dapat dilihat dari Tabel Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

Tabel 4.1
Rencana kerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu	Sumber Dana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		5.724.500.000	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.729.096.873	
2	18	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		27.565.700	
2	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	21.553.500	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	945.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	800.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	828.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	958.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1.481.200	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1.000.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.443.004.800	
2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	3.385.284.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	11.875.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	41.100.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1.015.000	APBD Tahun 2023

2	18	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1.695.600	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	120.200	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	990.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	925.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		17.320.400	
2	18	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.000.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	120.200	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	120.200	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	16.080.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.355.800	
2	18	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi	120.200	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi	875.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi	120.200	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi	120.200	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi	120.200	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		201.611.877	
2	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	3.999.525	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	42.755.452	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	2.482.400	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	2.169.600	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	7.500.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	2.998.200	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	9.997.500	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	77.589.000	APBD Tahun 2023

2	18	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	120.200	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	52.000.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		35.905.700	
2	18	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor	120.200	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor	4.724.600	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor	31.060.900	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		906.737.196	
2	18	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	7.000.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	16.410.000	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	120.200	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	883.206.996	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95.595.400	
2	18	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya aset penunjang pelaksanaan tugas kantor	33.996.800	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya aset penunjang pelaksanaan tugas kantor	56.608.600	APBD Tahun 2023
2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya aset penunjang pelaksanaan tugas kantor	4.990.000	APBD Tahun 2023
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		365.000.000	
2	18	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		315.000.000	
2	18	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	300.000.000	APBD Tahun 2023
2	18	02	2,01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	15.000.000	APBD Tahun 2023
2	18	02	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		50.000.000	
2	18	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi Kota Tomohon	73.800	APBD Tahun 2023
2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi Kota Tomohon	49.926.200	APBD Tahun 2023

2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		195.187.127	
2	18	03	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		195.187.127	
2	18	03	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jumlah investor	13.585.852	APBD Tahun 2023
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah investor	181.601.275	APBD Tahun 2023
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		179.650.700	
2	18	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		179.650.700	
2	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	129.650.700	APBD Tahun 2023 (DAK Non Fisik)
2	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	19.730.900	APBD Tahun 2023
2	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	23.155.200	APBD Tahun 2023
2	18	04	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	7.113.900	APBD Tahun 2023
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		230.565.300	
2	18	05	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		230.565.300	
2	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanaman modal pelaku usaha	66.728.300	APBD Tahun 2023 (DAK Non Fisik)
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanaman modal pelaku usaha	70.458.000	APBD Tahun 2023 (DAK Non Fisik)
2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanaman modal pelaku usaha	93.379.000	APBD Tahun 2023 (DAK Non Fisik)
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		25.000.000	
2	18	06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		25.000.000	
2	18	06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan perizinan dan non perizinan	25.000.000	APBD Tahun 2023
TOTAL							5.724.500.000	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Kerja DPMPTSP Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi dan analisa kebutuhan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon yang telah dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tomohon, dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon periode 2021-2026.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon untuk tahun 2023.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renja Tahun 2023 dilaksanakan agar dapat terwujud optimalisasi kinerja, yang berujung pada peningkatan kualitas pembangunan di Kota Tomohon. Adapun kaidah pelaksanaan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 DPMPTSP Daerah Kota Tomohon adalah sebagai berikut.

1. Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan rancangan RKPD yang telah disetujui.
2. Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana berpedoman pada:
 - a. Rancangan RKPD
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota.
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah
5. Renja Perangkat Daerah yang telah disusun dan disetujui Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bapelitbangda Kota Tomohon untuk diverifikasi.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja DPMPTSP Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tomohon. Pelaksanaan kinerja untuk tahun 2023 diharapkan memperhatikan pencapaian indikator kinerja kunci dan indikator kegiatan.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA DAERAH KOTA TOMOHON

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kepemudaan dan Olahraga, evaluasi pelaksanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon.

Selanjutnya Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertujuan :

- Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023.
- Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
- Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon, proses penyusunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon, keterkaitan antara Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahunberjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun Lalu dan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon

3.3. Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon

3.4. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2021

Evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2021 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, adapun evaluasi kinerja secara garis besar sebagai berikut :

4.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan capaian Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1. *Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan :*

Program ini merupakan upaya meningkatkan kapasitas bagi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam upaya mewujudkan pemuda dan organisasi kepemudaan yang lebih kreatif, berprestasi, mandiri serta mempunyai daya saing dengan meliputi fasilitasi, pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta organisasi kepemudaan.

Capaian kinerja yang ditargetkan, antara lain pembinaan pemuda pelopor, pelaksanaan seleksi calon paskibraka dan drumband serta sosialisasi manajemen organisasi kepemudaan.

2. *Program Pengembangan kapasitas kepramukaan*

asilitasi dana hibah dalam bentuk kegiatan Kepramukaan

3. *Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan*

Program ini merupakan upaya mengembangkan kapasitas baik atlet, pelatih dan organisasi keolahragaan dengan melaksanakan fasilitasi dan pembinaan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan pemeliharaan infrastruktur olahraga.

4. *Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/ Kota*

Program kesekretariatan / rutin yang menunjang kinerja Bidang dalam upaya pencapaian target sasaran strategis.

Adapun evaluasi pelaksanaan rencana kerja s/d triwulan II secara rinci dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2023
Kota Tomohon**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19				Urusan pemerintahan Bidang kepemudaan dan olahraga						100%			
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	85.31%		63,60%		100%	67.42%	67.42%	
2	19	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja			8 dokumen	8 dokumen	100%	10	10	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	100%	42.46%	3 rekening	3 rekening	100%	3 rekening	3 rekening	
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen penyusunan DPA - SKPD	12 orang	42.46%	7 orang	7 orang	100%	8 orang	100%	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	26.54%	30 orang	30 orang	100%	30 orang	100%	
2	19	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Cakupan gaji dan tunjangan ASN	100%		12 bulan	12 bulan	100%		100%	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.02	08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersedianya penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	12 bulan		2 orang	2 orang	100%	2 orang	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Prosentase jumlah komponen instalasi listrik, peralatan perlengkapan kantor, bahan logistic, barang cetakan dan penggunaan, bahan bacaan, fasilitas kunjungan tamu dan rapat koordinasi/konsultasi	98,58%	100%	89,04%	89.04%	100%		89,04%	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor terpenuhi/ memadai	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.06	04	penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya jumlah bahan logistik kantor	12 bulan	84.86%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01	2.06	05	Penyediaan barang dan cetakan penggandaan	Tersedianya jumlah bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan	79.11%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	96.00%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.06	08	Fasilitas kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12 bulan	54.05%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	16 orang	99.89%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase penyediaan jasa dan penunjang urusan pemerintahan	68,09%		48%		100%		50,88%	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dan benda pos	12 bulan	98.48%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrisk	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	79.87%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	96.44%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	50,75%		38,16%		100%		36%	
2	19	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional / lapangan	50,75%	88.61%	38,16%		100%	40.45%	100%	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi					100%		100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, Dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelapor Kabupaten/ Kota, Wirausaha muda pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Prsentase Wirausaha Muda	17,27%		13,59%	100%	100%		100%	
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Terlaksananya pelaksanaan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	100%	96.02%	1 pasukan	1 pasukan	100%	1 pasukan	100%	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase OKP yang aktif dan mandiri	86,00%		81,00%		100%		100%	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	Jumlah wirausaha muda	100%	98.86%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase peningkatan prestasi olahraga			38,01		100%		100%	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Prosentase pembiaian atlit muda	53,00%		18,00%		100%		100%	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasaran olahraga kabupaten/kota	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	100%	-	100%	100	100%		100%	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota	Prosentase atlit berprestasi	40,05%		29,03%		100%		100%	
2	19	03	2.02	01	Kenyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan singel event tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya kejuaraan olahraga multi event dan single event	8 kegiatan	-	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 kegiatan	100%	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	Jumlah penyelenggaraan pekan olahraga	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	03	2.04		Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Prosentase organisasi olahraga	100%		78,00%		100%		100%	
2	19	03	2.04	04	Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan prestasi	Terlaksanya pemberian penghargaan bagi atlit dan pelatih olahraga yang berprestasi	20 orang	100%	5 orang	5 orang	100%	10 orang	100%	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Prosentase pembinaan cabang olahraga	48,00%		21,00%		100%		100%	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Terlaksananya penyelenggaraan pengembangan dan pemasalahan festival olahraga rekreasi	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	2 laporan	100%	
2	19	03	2.05	05	Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan	Terlaksanya olahraga wisata, tantangan dan petualangan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	4 laporan	100%	
2	19	04			PROGRAM PENGEMNBANGAN KAPASITAS KEPRAMUIKAAN	Prosentase organisasi pramuka yang aktif	106,39%		79,50%		100%		100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	04	2.01		Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Prosentase Pembina pramuka yang aktif	106,39%		79,50%		100%		100%	
2	19	03	2.01	03	Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	1 kegiatan	-		0	100%	1 kegiatan	100%	

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja diatas adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan dan evaluasi rencana kerja tahun 2021 dapat dilihat bahwa pelaksanaan program / kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis adalah :

- Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi Sosial Kemasyarakatan : 87,63 %
- Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi : 92,70%
- Meningkatnya prosentase organisasi pramuka yang aktif dan mandiri : 96,10 %
- Prosentase peningkatan prestasi olahraga : 81,93%

Dengan capaian realisasi anggaran 45,3 %, maka tingkat efisiensi kinerja dan anggaran 13,3 %, dengan kondisi capaian tersebut tentunya dalam pelaksanaan program kedepan untuk lebih meningkatkan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program / kegiatan serta bekerja sama baik antar unit kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga maupun pihak lain yang ikut mendukung pelaksanaan program / kegiatan, disamping itu upaya lain yang dilakukan dalam pencapaian kinerja bidang antara lain :

1. Bersinergi dengan KONI dan Perangkat Dinas terkait dalam peningkatan prestasi olahraga
2. Memaksimalkan pemeliharaan dan pembangunan serta publikasi sarana dan prasarana olahraga guna mendukung peningkatan prestasi olahraga
3. Pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan / sentralisasi aktifitas kepemudaan
4. Pembinaan dan Monev serta pemberian bantuan peralatan ke beberapa komunitas OR rekreasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dispora Kota Tomohon didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

TABEL 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/ standar nasional	IKK	Realisasi Capaian						Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			67,42%	71,47%	80.31%	67,42%	71,47%	75,76%	
1	Cakupan perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja			10	12	12	10	12	12	
2	Cakupan gaji dan tunjangan ASN			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Prosentase jumlah komponen instalasi listrik, peralatan perlengkapan kantor, bahan logistic, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, fasilitas kunjungan tamu dan rapat koordinasi/konsultasi			90%	92.70%	98.34	90%	92.70%	95,48%	

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/ standar nasional	IKK	Realisasi Capaian						Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Prosentase penyediaan jasa dan penunjang urusan pemerintahan			53.93%	57.17%	64.24%	53.93%	57.17%	60,60%	
5	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan			40.45%	42.48%	47.75%	40.45%	42.48%	45,05%	
B	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan			48.11%	48.96%	80.00%	48.11%	48.96%	78,50%	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi			48.11%	48.96%	50.79%	48.11%	48.96%	16,64%	
1	Prsentase Wirausaha Muda			14.22%	14.92%	16.45%	14.22%	14.92%	15,67%	
2	Prosentase OKP yang aktif dan mandiri			82.00%	83.00%	85.00%	82.00%	83.00%	84,00%	
C	Prosentase peningkatan prestasi olahraga			43.09%	46.66%	55.31%	43.09%	46.66%	50,74%	
1	Prosentase pembiaan atlit muda			29.00%	35.00%	47.00%	29.00%	35.00%	41,00%	

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/ standar nasional	IKK	Realisasi Capaian						Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Prosentase atlit berprestasi			31.34%	33.64%	38.25%	31.34%	33.64%	35,94%	
3	Prosentase organisasi olahraga			82.00%	86.00%	93.00%	82.00%	86.00%	89,00%	
4	Prosentase pembinaa cabang olaraga			27.00%	32.00%	43.00%	27.00%	32.00%	37,00%	
D	Prosentase organisasi pramuka yang aktif			84.27%	89.27%	100.37%	84.27%	89.27%	94,69%	
1	Prosentase Pembina pramuka yang aktif			84.27%	89.33%	100.37%	84.27%	89.33%	94,69%	

Dari Tabel tersebut dapat dilihat data Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon beserta angka target yang akan dicapai selama periode 1 (satu) tahun sesuai Rencana Kerja Tahunan. Target tahunan tersebut kemudian diakumulasi menjadi target perencanaan pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun. Adanya kenaikan target yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa dalam perencanaan pembangunan harus ada peningkatan. Peningkatan yang direncanakan dapat membarikan gambaran adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Dengan adanya Indikator Kinerja tersebut arah pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan hasil pembangunan berupa *outcome* dan *benefit* dapat diukur akuntabilitasnya. Dengan capaian kinerja yang akuntabel, maka diharapkan hasil kinerja benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Tomohon.

Poin penting dari keterkaitan Indikator Kinerja tersebut adalah lahirnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing untuk dapat memberikan dan mengembangkan potensinya sehingga dapat mengambil bagian penting dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Tomohon. Pemuda-pemuda yang berkarakter dan berdaya saing tersebut merupakan hasil jerih payah proses pembinaan terhadap pemuda yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon. Demikian juga dengan adanya peningkatan prestasi olahraga, yang sejauh ini menjadi acuan keberhasilan dari proses pembinaan olahraga di Kota Tomohon.

Dampak dari ditetapkannya target indikator kinerja tersebut mengharuskan strategi dan Arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon harus dapat menggambarkan bagaimana perencanaan ini mampu untuk mewujudkan tercapainya target yang telah ditetapkan. Pencapaian target ini berdampak pada tanggung jawab dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunannya nanti. Pertanggungjawaban yang diemban diwujudkan dengan melaksanakan seluruh rencana kegiatan sesuai Tupoksi, Juknis dan Juklak yang sudah ada. Dari seluruh target itu akan membawa pada terwujudnya cita-cita pembangunan Kota Tomohon yang tercermin pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon terpilih, yaitu fokus pada meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan (*Pro-poor dan Pro-growth*). Dengan melihat angka persentase capaian kinerja dari Indikator Kinerja yang ada, akan memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Capaian Indikator ini nantinya menjadi awal dari pengukuran akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah secara umum.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada Tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati *the window of opportunity* sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan *the window of opportunity*, yaitu dengan

menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas.

Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon, sebagai salah satu bagian dari Bangsa Indonesia harus mengambil peran penting, khususnya dalam pengembangan pemuda dan memajukan olahraga, guna memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang ada dan memberikan sumbangsih solusi terbaik untuk dapat menempatkan Bangsa Indoensia menjadi pemain utama didalam kawasan perdagangan bebas ASEAN. Untuk itu, dalam proses penyusunan Rencana Kerja perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Advokasi terhadap organisasi kepemudaan

Peran organisasi kepemudaan belum optimal dalam pelayanan kepemudaan. Sebagian besar organisasi kepemudaan fokus di bidang politik, sedangkan bidang lain belum banyak digarap, antara lain; kewirausahaan, kepedulian dan kepeloporan. Disamping itu banyak organisasi kepemudaan yang belum mencukupi syarat legalitas sesuai dengan UU No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga kondisi di Kota Tomohon

3. Masih lemahnya manajemen Keolahragaan

Manajemen keolahragaan masih relatif lemah, sehingga tidak mampu mendorong pengembangan aktivitas olahraga didalam masyarakat. Sistem dan manajemen keolahragaan masih terkotak-kotak, semua unsur yang terlibat dalam olahraga belum terpadu. Dana Pembinaan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat relatif terbatas, sumberdaya manusia (guru, pelatih, instruktur, manajer) juga masih lemah. Permasalahan lain yang menghambat pengembangan olahraga adalah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar latihan, belum adanya sistem informasi keolahragaan yang mutakhir dan dikelola secara profesional, serta belum berkembangnya jaringan kerja sama yang baik dalam Pembinaan dan pengembangan olahraga antar daerah, antar instansi dan antar perkumpulan/organisasi olahraga.

2.4. Review terhadap rancangan awal SKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator Program	Target Program
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil, berkualitas dan merata	1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan		. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	78,50%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	78,50%
					Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	48,96%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	48,96%
					Prosentase organisasi pramuka yang aktif	89,33%	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Prosentase organisasi pramuka yang aktif	89,33%
					Prosentase Peningkatan prestasi olahraga	46,66%	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Prosentase Peningkatan prestasi olahraga	46,66%

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon diperoleh dari hasil Musrenbang Kota Tomohon Tahun 2023, sebagai berikut;

Tabel 2.5
Penelaahan usulan pemangku kepentingan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
						Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								(Rp)				(Rp)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19	02										
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah wirausaha muda pemula	Kota Tomohon	150	5.050.000.000	APBD	150	5.050.000.000	APBD
					Persentase organisasi pemuda yang aktif	Kota Tomohon	90		APBD	90		APBD
					Persentase efektifitas koordinasi lintas sektor dibidang pelayanan kepemudaan	Kota Tomohon	70		APBD	70		APBD
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda kader Provinsi yang difasilitasi dalam kegiatan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	Kota Tomohon	1528	3.000.000.000	APBD	1528	3.000.000.000	APBD

				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	Kota Tomohon	160	250.000.000	APBD	160	250.000.000	APBD
--	--	--	--	---	---	--------------	-----	-------------	------	-----	-------------	------

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 serta rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2021-2026, untuk itu tema RKP 2023 adalah Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon mendukung Prioritas Nasional ketiga, yaitu **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**, dengan program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut;

- a. Program Prioritas 5 (kelima): Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kegiatan Prioritas ke 3 (ketiga), yaitu kualitas pemuda dengan Proyek Prioritas sebagai berikut:
 - 1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan;
 - 2) Pencegahan Perilaku Beresiko;
 - 3) Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda.
- b. Program Prioritas 7 (ketujuh): Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, Kegiatan Prioritas 4 (keempat), yaitu Prestasi Olahraga, dengan Proyek Prioritas sebagai berikut:
 - 1) Penguatan dan Penataan Regulasi Keolahragaan;
 - 2) Pengembangan Budaya Olahraga;
 - 3) Peningkatan Ketersediaan Tenaga Keolahragaan Berstandar Internasional; Penataan Kelembagaan Olahraga;
 - 4) Peningkatan Ketersediaan Tenaga Keolahragaan Berstandar Internasional;
 - 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional;
 - 6) Pengembangan Peran Dunia Usaha dalam Pendampingan dan Pembiayaan Keolahragaan.

Sedangkan Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023, yaitu;

1. Meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pembangunan melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
- c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda.

2. Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi melalui:

- a. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan Pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
- c. peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
- d. peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui Pengembangan industri olahraga; dan
- f. Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional tersebut dan dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu merumus dan melaksanakan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan, maka dukungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2023 adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemudaan dan Olahraga tidak lepas dari rencana strategi 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai ditahun 2023 adalah :

➤ Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas, Adil dan Merata;

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

➤ Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan

CODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Tahun 2023			Catatan penting	Rencana Tahun 2024			Catatan penting
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KERJA	PAGU INDIKATIF		LOKASI	TARGET CAPAIAN KERJA	PAGU INDIKATIF	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	DISPORA	10 dokumen	6.081.100		DISPORA	10 dokumen	5.720.400	
1.2	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD		DISPORA		2.827.000		DISPORA		1.552.540	
1.3	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISPORA	3 kegiatan	1.586.000		DISPORA	3 kegiatan	4.300.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan gaji dan tunjangan ASN	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPORA	- 22 ASN - 25 Nakan - 7 Petugas Kebersihan	2.052.306.526		DISPORA	- 22 ASN - 25 Nakan - 7 Petugas Kebersihan	2.356.585.279	
2.2	Penyusunan pelapor dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	DISPORA	12 Laporan	2.191.700		DISPORA	12 Laporan	7.407.221	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Aparatur	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakauian Dinas dan atribut kelengkapannya	DISPORA	- 53 pasang pakaian & sepatu olahraga 53 pasang pakaian	83.837.500		DISPORA	- 53 pasang pakaian & sepatu olahraga 53 pasang pakaian hitam/putih	126.068.000	

				hitam/putih						
3.2	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		DISPORA		23.875.000		DISPORA		20.000.000	
4	Administrasi umum perangkat daerah	Prosentase Jumlah komponen instalasi listrik, peralatan perlengkapan kantor, bahan logistik, barang cetakan, dan pengandaan, bahan bacaan, fasilitas kunjungan tamu dan rapat koordinasi /konsultasi	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	DISPORA	12 bulan	4.924.804		DISPORA	12 bulan	6.341.161	
4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhi/memadai	DISPORA	12 unit	7.453.000		DISPORA	12 unit	17.0740155	
4.3	penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya jumlah bahan logistik kantor	DISPORA	12 bulan	37.623.745		DISPORA	12 bulan	38.531.948	
4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya jumlah barang cetakan dan pengandaan	DISPORA	12 bulan	20.778.000		DISPORA	12 bulan	30.556.512	
4.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISPORA	12 bulan	7.997.100		DISPORA	12 bulan	11.000.715	
4.6	Fasilitas kunjungan Tamu	Tersediannya fasilitas kunjungan tamu	DISPORA	300 orang	20.092.700		DISPORA	300 orang	47.848.875	
4.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DISPORA	12 bulan	65.040.000		DISPORA	12 bulan	205.365.315	
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase Penyediaan Jasa penunjangn urusan pemerintahan	DISPORA		-		DISPORA	-	-	
5.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dan benda pos	DISPORA	1700 buah	15.000.000		DISPORA	1700 buah	16.221.570	
5.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, suberdaya air dan listrik	DISPORA	12 bulan	25.337.500		DISPORA	12 bulan	34.736.503	
5.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DISPORA	12 bulan	7.140.000		DISPORA	12 bulan	23.982.224	
5.4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	DISPORA	12 bulan	637.636.525		DISPORA	12 bulan	683.738.44.	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Prosentase Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	

	Daerah	Pemerintah daerah								
6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terbayarnya Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional / lapangan	DISPORA	2 unit kendaraan roda 4 1 unit kendaraan roda 2	179.335.100		DISPORA	2 unit kendaraan roda 4 1 unit kendaraan roda 2	212.962.631	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAIANG KEPEMUDAAN	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Partisipasi pemuda dlm Organisasi kepemudaan dan Organisasi social kemasyarakatan Tingkat Partisipasi pemuda dlm kegiatan ekonomi	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
1	Penyadaran, Pemberdayaan, Dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha muda pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Prosentase Wirausaha Muda	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
1.1	Koordinasi , Sinkronisasi dan penyelenggaraan kapasitas daya saing pemuda pelapor	Terlaksananya Penyelenggaraan kapasitas daya saing pemuda pelapor	DISPORA	1 kegiatan	8.147.400		DISPORA	1 kegiatan	197.474.360	
1.2	Koordinasi , Sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas daya saing Pemuda Kader	DISPORA	1 kegiatan	40.305.100		DISPORA	1 kegiatan	150.750.364	
1.3	Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/ atau berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan berprestasi	DISPORA	40 laporan	10.000.000		DISPORA	40 laporan	155.375.250	
1.4	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Terlaksananya Pelaksanaan Seleksi dan pelatihan Pasukan pengibar bendera	DISPORA	1 pasukan	1.202.974.500		DISPORA	1 pasukan	1.644.858.500	
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase OKP Yang Aktif & Mandiri	DISPORA		-		DISPORA		-	
2.1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia	Jumlah Wirausaha Mudah	DISPORA	1 kegiatan	43.944.500		DISPORA	1 kegiatan	286.050.000	

	usaha									
2.2	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Jumlah organisasi Kepemudaan	DISPORA	1 kegiatan	255.417.100		DISPORA	1 kegiatan	90.356.000	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentasi Peningkatan Prestasi Olahraga	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
1	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Prosentase Pembinaan Atlit Muda	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
1.1	Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Terlaksananaya Penyelenggaraan kompetisi olahraga	DISPORA	1 kegiatan	10.015.000		DISPORA	1 kegiatan	180.361.600	
1.2	Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksaasn penyediaan sarana dan prasaran olahraga kabupaten/kota	Tersediannya Sarana dan prasarana Olahraga	DISPORA	1 unit GOR, 10 unit meja tenis meja,8 bad, 10 buah net,20 buah bola volli, 5 buah net, 20 buah bola basket, 20 buah bola kaki, 20 buah reket badminton, 2 buah senapan	1.249.944.400		DISPORA	1 unit GOR, 10 unit meja tenis meja,8 bad, 10 buah net,20 buah bola volli, 5 buah net, 20 buah bola basket, 20 buah bola kaki, 20 buah reket badminton, 2 buah senapan	14.032.121.287	
2	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	Prosentase Atlit Berprestasi	DISPORA		-		DISPORA		-	
2.1	Kenyelengaraan kejuaraan olahraga multi event dan singel event tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya kejuaraan olahraga multi event dan singel event	DISPORA	10 kegiatan	279.999.000		DISPORA	10 kegiatan	630.015.574	
2.2	Penyelengaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	Jumlah penyelenggaraan pekan olahraga	DISPORA	15 OSKP	600.000.000		DISPORA	15 OSKP	701.311.240	
2.3	Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaran kejuaraan	Jumlah cabang orahraga dan atlit yang ikut dalam penyelenggaraan kejuaraan	DISPORA	1 kegiatan	14.346.000		DISPORA	1 kegiatan	121.436.238	

3	Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Prosentase Organisasi Olahraga	DISPORA	2 Regu	-		DISPORA	2 Regu	-	
3.1	Pengembangan organisasi keolahragaan	Menibngkatnya Organisasi Keolahragaan	DISPORA	1 kegiatan	20.624.950		DISPORA	1 kegiatan	130.300.300	
3.2	Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan prestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi Atlit dan pelatih olahraga yang berprestasi	DISPORA	40 atlit dan pelatih berprestasi	30.000.000		DISPORA	40 atlit dan pelatih berprestasi	79.322.560	
4	Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Prosentase pembinaan cabang olahraga	DISPORA		-		DISPORA		-	
4.1	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan pengembangan dan pemasaran festival olahraga rekreasi	DISPORA	1 kegiatan	30.706.700		DISPORA	1 kegiatan	82.765.000	
4.2	Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan	Terlaksananya olahraga wisata, tantangan dan petualangan	DISPORA	1 kegiatan	61.097.500		DISPORA	1 kegiatan	86.584.630	
4.3	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		DISPORA		32.125.000		DISPORA		75.645.141	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase organisasi pramuka yg aktif	DISPORA	2 kegiatan	-		DISPORA	2 kegiatan	-	
1	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Prosentase Pembina Pramuka yang Aktif	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
1.1	Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	Pengembangan Kapasitas SDM kepramukaan tibgkat daerah	DISPORA	100%	11.690.800		DISPORA	100%	125.721.220	
1.2	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	DISPORA		35.902.750		DISPORA		100.710.430	
1.3	Penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah	Tersedianya Prasarana dan Sarana Kepramukaan	DISPORA	4 unit tenda dan sarana lainnya	200.000.000		DISPORA	4 unit tenda dan sarana lainnya	40.150.310	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perubahan Tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kota Tomohon 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Awal Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengkoordinasi penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Tomohon.

Prioritas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 adalah mendukung pada sisi prioritas Peningkatan Pemuda Wirausaha dan Prestasi olahraga dengan indikator sebagaimana tabel berikut;

Tabel 4.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA TOMOHON TAHUN 2023

CODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KERJA	PAGU INDIKATIF
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah	DISPORA	100%	-
1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja	DISPORA	100%	-
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	DISPORA	10 dokumen	6.081.100
1.2	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD		DISPORA		2.827.000
1.3	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISPORA	3 kegiatan	1.586.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan gaji dan tunjangan ASN	DISPORA	100%	-
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPORA	- 22 ASN - 25 Nakon - 7 Petugas Kebersihan	2.052.306.526
2.2	Penyusunan pelapor dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	DISPORA	12 Laporan	2.191.700
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Aparatur	DISPORA	100%	
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakauian Dinas dan atribut kelengkapannya	DISPORA	- 53 pasang pakaian & sepatu olahraga 53 pasang pakaian hitam/putih	83.837.500

CODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KERJA	PAGU INDIKATIF
3.2	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		DISPORA		23.875.000
4	Administrasi umum perangkat daerah	Prosentase Jumlah komponen instalasi listrik, peralatan perlengkapan kantor, bahan logistik, barang cetakan, dan pengandaan, bahan bacaan, fasilitas kunjungan tamu dan rapat koordinasi /konsultasi	DISPORA	100%	-
4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	DISPORA	12 bulan	4.924.804
4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor kantor terpenuhi/memadai	DISPORA	12 unit	7.453.000
4.3	penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya jumlah bahan logistik kantor	DISPORA	12 bulan	37.623.745
4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya jumlah barang cetakan dan pengandaan	DISPORA	12 bulan	20.778.000
4.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISPORA	12 bulan	7.997.100
4.6	Fasilitas kunjungan Tamu	Tersediannya fasilitas kunjungan tamu	DISPORA	300 orang	20.092.700
4.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DISPORA	8 orang	65.040.000
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase Penyediaan Jasa penunjangn urusan pemerintahan	DISPORA		-
5.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dan benda pos	DISPORA	1700 buah	15.000.000

CODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KERJA	PAGU INDIKATIF
5.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, suberdaya air dan listrik	DISPORA	12 bulan	25.337.500
5.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DISPORA	12 bulan	7.140.000
5.4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	DISPORA	12 bulan	637.636.525
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintaha daerah	DISPORA	100%	-
6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terbayarnya Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional / lapangan	DISPORA	2 unit kendaraan roda 4 1 unit kendaraan roda 2	179.335.100
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAIANG KEPEMUDAAN	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Partisipasi pemuda dlm Organisasi kepemudaan dan Organisasi social kemasyarakatan Tingkat Partisipasi pemuda dlm kegiatan ekonomi	DISPORA	100%	-
1	Penyadaran, Pemberdayaan, Dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha muda pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Prosentase Wirausaha Muda	DISPORA	100%	-
1.1	Koordinasi , Sinkronisasi dan penyelenggaraan kapasitas daya saing pemuda pelapor	Terlaksananya Penyelenggaraan kapasitas daya saiang pemuda pelopor	DISPORA	1 kegiatan	8.147.400
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Terlaksananya Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas daya saing Pemuda Kader	DISPORA	1 kegiatan	40.305.100
1.3	Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/ atau berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang	DISPORA	40 laporan	10.000.000

CODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KERJA	PAGU INDIKATIF
		berjasa dan berprtestasi			
1.4	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Terlaksananya Pelaksanaan Seleksi dan pelatihan Pasukan pengibar bendera	DISPORA	1 pasukan	1.202.974.500
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase OKP Yang Aktif & Mandiri	DISPORA		-
2.1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	Jumlah Wirausaha Mudah	DISPORA	1 kegiatan	43.944.500
2.2	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Jumlah organisasi Kepemudaan	DISPORA	1 kegiatan	255.417.100
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentasi Peningkatan Prestasi Olahraga	DISPORA	100%	-
1	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Prosentase Pembinaan Atlit Muda	DISPORA	100%	-
1.1	Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Terlaksananaya Penyelenggaraan kompetisi olahraga	DISPORA	1 kegiatan	10.015.000
1.2	Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksaasn penyediaan sarana dan prasaran olahraga kabupaten/kota	Tersediannya Sarana dan prasarana Olahraga	DISPORA	1 unit GOR, 10 unit meja tenis meja,8 bad, 10 buah net,20 buah bola volli, 5 buah net, 20 buah bola basket, 20 buah bola kaki, 20 buah reket badminton, 2 buah senapan	1.249.944.400
2	Penyelenggaraan kejuarana olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	Prosentase Atlit Berprestasi	DISPORA		-

CODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KERJA	PAGU INDIKATIF
2.1	Kenyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan singel event tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya kejuaraan olahraga multi event dan singel event	DISPORA	10 kegiatan	279.999.000
2.2	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	Jumlah penyelenggaraan pekan olahraga	DISPORA	15 OSKP	600.000.000
2.3	Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	Jumlah cabang olahraga dan atlit yang ikut dalam penyelenggaraan kejuaraan	DISPORA	1 kegiatan	14.346.000
3	Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Prosentase Organisasi Olahraga	DISPORA	2 Regu	-
3.1	Pengembangan organisasi keolahragaan	Menibngkatnya Organisasi Keolahragaan	DISPORA	1 kegiatan	20.624.950
3.2	Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan prestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi Atlit dan pelatih olahraga yang berprestasi	DISPORA	40 atlit dan pelatih berprestasi	30.000.000
4	Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Prosentase pembinaan cabang olahraga	DISPORA		-
4.1	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan pengembangan dan pemasaran festival olahraga rekreasi	DISPORA	1 kegiatan	30.706.700
4.2	Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan	Terlaksananya olahraga wisata, tantangan dan petualangan	DISPORA	1 kegiatan	61.097.500
4.3	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		DISPORA		32.125.000
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase organisasi pramuka yg aktif	DISPORA	2 kegiatan	-
1	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Prosentase Pembina Pramuka yang Aktif	DISPORA	100%	-
1.1	Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	Pengembangan Kapasitas SDM kepramukaan tibgkat daerah	DISPORA	100%	11.690.800
1.2	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat	Terlaksananya Penyelenggaraan	DISPORA		35.902.750

CODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KERJA	PAGU INDIKATIF
	Daerah	Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			
1.3	Penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah	Tersedianya Prasarana dan Sarana Kepramukaan	DISPORA	4 unit tenda dan sarana lainnya	200.000.000
JUMLAH TOTAL					7.338.304.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon. Semoga RENJA Tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon Tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon.

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada rencana kerja awal tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup rencana kerja 2023 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh

optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah. antar pelaku pembangunan, agar program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2018, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun 2023 sebagai berikut:

- 3) Di dalam Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Propinsi Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota , RKPD Kota Tomohon dan Renstra Dinas).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah kota Tomohon, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah kota Tomohon

Selanjutnya Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 berdasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi , kodefikasi dan nomen klatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan

Tujuan:

Penyusunan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah kota Tomohon bertujuan :

- Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah tahun 2023.
- Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
- Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon, proses penyusunan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon, keterkaitan antara Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kearsipan Dan Daerah Kota Tomohon.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon Tahun Lalu dan Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Tomohon.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran DKPD Kota Tomohon

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PADA TAHUN 2021

Mencermati arah kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan Kota Tomohon yang memiliki daya saing lebih dititik beratkan pada pembangunan secara fisik maupun pembangunan Sumber Daya Manusia memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta peningkatan kesejahteraan masyarakat telah tertuang dalam visi dan misi secara kelembagaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Hal ini memberikan petunjuk bahwa arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia menjadi primadona dan perlu penataan manajemen yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sehingga bersinergi untuk semua harapan dan Masyarakat dan Objek Pelayanan.

2.1 Evaluasi Pencapaian Target Program dan Kegiatan Renstra

Berdasarkan Grand Strategi yang merupakan fokus kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 triwulan II, telah memprogramkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
- ❖ Program Pembinaan Perpustakaan
- ❖ Program Pengelolaan Kearsipan
- ❖ Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Evaluasi pelaksanaan Rencana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah kota Tomohon Tahun 2022 triwulan II dan Realisasi Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah kota Tomohon mengacu pada hasil Laporan Tahunan, atau Realisasi APBD untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon :

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan, karena situasi dan kondisi Pemerintah Kota Tomohon tentang Keuangan Daerah juga beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, program yang belum tertata dalam APBD 2022 triwulan II. Namun mampu dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tomohon dengan hasil yang memuaskan.
2. Selanjutnya digambarkan realisasi Program yang telah memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagai berikut:

- ❖ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**

Sebagai upaya peningkatan tata kelola administrasi Pemerintahan yang Dinamis pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan, kegiatan-kegiatan

yang sudah terealisasi meliputi Administrasi umum perangkat Daerah, Penyediaan Jasa penunjang Pemerintahan Pemeliharaan Barang Milik Daerah serta Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

❖ **Program Pembinaan Perpustakaan**

Dalam Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten /kota dengan sub kegiatan Pembinaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standard Nasional Perpustakaan

Kegiatan supervisitelah dilaksanakan pembinaan diseluruh perpustakaan sekolah dan kelurahan dan dilaksanakan pelatihan bagi pengelola perpustakaan sekolah dan kelurahan.

❖ **Program Pengelolaan Kearsipan**

Kegiatan telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi tentang sistim administrasi kearsipan kepada seluruh Desa dan Kelurahan.

❖ **Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah**

Untuk penyelamatan dan pelesarian arsip dokumen / arsip sangat membutuhkan sarana penyimpanan yang memadai dan berkualitas untuk menjaga agar dokumen arsip itu terjaga dan aman dalam penyimpanan.

Tabel 2.1

FORMULIR E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegi atan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab				
													I		II		III		IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 6 + 12			14 = 13/5 * 100%		15
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Target	Satuan		K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	4.357.886.034	131,77	%	4.239.252.204		%			%									33	%	-	131,77	%	4.239.252.204	131,77	97,28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
2	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Pos lainnya	565	surat	13.187.000	580	surat	35.765.000	12	Bulan	4.126.000		surat		22	surat	1.450.000		surat		22	surat	1.450.000	580	surat	37.215.000	102,65	282,21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			
3	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Terbayar;Jumlah bulan	60	bulan	57.094.337	72	bulan	69.334.076	12	bulan	12.900.100		bulan		6	bulan	5.648.940		bulan		6	bulan	5.648.940	72	bulan	74.983.016	120	131,33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			
4	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	bulan	15.000.000	24		9.600.000	12	bulan	4.800.000		bulan		0						0		-	24		9.600.000	50	64,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			
5	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan Kesehatan PNS/Non PNS	Tersediannya Jasa Pemeliharaan Kesehatan	60	bulan	2.930.445	60		61.276.790	192	Orang	25.426.368		bulan		0						0		-	60		61.276.790	100	2091,04	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			
6	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	60	bulan	198.415.750	60		466.386.939	12	bulan	101.960.000	3	bulan	40.000.000	3	bulan	13.065.911				6	bulan	53.065.911	60		519.452.850	100	261,80	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegi atan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab					
										I				II				III													IV				
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12					13 = 6 + 12			14 = 13/5 * 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
7	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga Administrasi Keuangan	60	bulan	2.604.878.280	72	bulan	2.772.712.316	12	bulan	650.010.018	3	bulan	49.893.967	3	bulan	300.198.519		bulan				6	bulan	350.092.486	72	bulan	3.122.804.802	120	119,88	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			
8	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga Kebersihan	60	bulan	164.242.435	60		146.517.697		bulan			bulan			bulan							0		-	60		146.517.697	100	89,21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			
9	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan alat tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bulan	144.510.698	72	bulan	190.266.190	12	bulan	44.792.486		bulan		6	bulan	11.269.000		bulan				6	bulan	11.269.000	72	bulan	201.535.190	120	139,46	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			
10	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	60	bulan	40.371.882	72	bulan	61.076.850	12	bulan	10.550.700		bulan		6	bulan	6.957.000		0				6	bulan	6.957.000	72	bulan	68.033.850	120	168,52	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			
11	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	60	bulan	23.802.626	72	bulan	27.954.344	12	bulan	15.425.650		bulan		6	bulan	2.503.000		0				6	bulan	2.503.000	72	bulan	30.457.344	120	127,96	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			
12	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tesediannya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	60	bulan	27.925.500	72	bulan	24.875.000	12	bulan	7.270.700		bulan		6	bulan	750.000		0				6	bulan	750.000	72	bulan	25.625.000	120	91,76	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			
13	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	60	bulan	23.000.000	0		0		bulan			bulan			bulan							0		-	0		0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegi atan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021	Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab						
								I	II	III	IV																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 * 100%		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
14	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	48	bulan	27.500.000	0		0	bulan			bulan		bulan			0	-	0		0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
15	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah Rapat dan Tamu	48	bulan	46.410.000	48	bulan	36.901.173	12	bulan	17.050.000		bulan	6	bulan	3.750.000		12	bulan	3.750.000	48	bulan	40.651.173	100	87,59	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
16	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	60	bulan	861.515.081	72	bulan	574.602.682	12	bulan	81.206.000		bulan	6	bulan	2.220.000		12	bulan	2.220.000	72	bulan	576.822.682	120	66,95	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
17	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60	bulan	122.102.000	60		93.323.800				bulan		0		0		0	-	60		93.323.800	100	76,43	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
18	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan Sarana dan prasarana aparatur	100	%	5.324.607.926	110	%	995.038.700	%		%		%				20	%	-	110	%	995.038.700	110	18,69	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
19	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	2	gedung	3.600.000.000	0		0	gedung			gedung		gedun			0	-	0		0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
20	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pengadaan Tanah	Tersedianya Tanah	300	meter	500.000.000	0		0	meter			meter		meter			0	-	0		0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12			14 = 13/5 * 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
21	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasio nal	7	kend araan	580.000.000	1	234.350.000	kenda raan			kendar aan		kenda raan				0	-	1	234.350.000	14,2857	40,41	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
22	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	30	unit	328.277.332	36	212.936.000	unit			unit		unit				0	-	36	212.936.000	120	64,86	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
23	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	12	bulan	300.100.000	0	0	0			0		0				0	-	0	0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
24	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	87	unit	99.000.000	0	0	unit			unit		unit				0	-	0	0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
25	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional	60	bulan	517.670.594	72	503.485.158	12	bulan	101.960.000	6	bulan	53.065.991	bulan		bulan	12	53.065.991	72	556.551.149	120	107,51	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
26	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	60	bulan	69.660.000	72	42.176.000	12	bulan	30.550.000	6	bulan	5.600.000	bulan		bulan	12	5.600.000	72	47.776.000	120	68,58	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
27	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	3	kali	130.000.000	2	73.100.000	kali			kali		kali				0	-	2	73.100.000	66,6667	56,23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegi atan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021				Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
										I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12				14 = 13/5 * 100%		15		
				K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp
28	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Program Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan mutu dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100	%	21.150.000	90		9.427.500		%			%							0		-	90		9.427.500	90	44,57	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah				
29	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	5	doku men	7.050.000	4		3.439.500	3	doku men	3.300.000		dokum en		doku men					0		-	4		3.439.500	80	48,79	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah				
30	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	5	doku men	7.050.000	4		3.444.000	1	doku men	1.160.000		dokum en		doku men					0		-	4		3.444.000	80	48,85	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah				
31	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyusunan evaluasi rencana strategis perangkat daerah	Jumlah Penyusunan Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah	5	doku men	7.050.000	4		2.544.000		doku men			dokum en		doku men					0		-	4		2.544.000	80	36,09	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah				
32	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	525	pasa ng	636.000.000	87	pasan g	58.045.000		pasan g			pasang		pasan g					37	pasang	-	87	pasang	58.045.000	16,57	9,13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah				
33	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas	175	pasa ng	216.000.000	63	pasan g	48.045.000		pasan g			pasang		pasan g					37	pasang	-	63	pasang	48.045.000	36	22,24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah				
34	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	175	pasa ng	210.000.000	0		0		pasan g			pasang		pasan g					0		-	0		0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021				Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
													I		II		III		IV																						
1	2	3	4	5			6			7			8				9				10				11				12					13 = 6 + 12				14 = 13/5 * 100%			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp						
35	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	175	pasang	210.000.000	25		10.000.000		pasang			pasang								0		-	25		10.000.000	14,29	4,76	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah											
36	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	%	159.721.000	0		0	%												0		-	0		0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah											
37	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	60	bulan	159.721.000	0		0	bulan												0		-	0		0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah											
38	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0		0	bulan		0		0								0		-	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah											
39	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0		0	bulan		0		0								0		-	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah											
40	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	%	2.239.000	0		0	%		%		%								0		-	0		0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah											
41	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10	laporan	11.110.000	0		0	laporan		laporan		laporan								0		-	0		0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah											

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12			14 = 13/5 * 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
42	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 laporan	11.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
43	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Program Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Cakupan Pelaksanaan kegiatan pemerintah	23 kegiatan	160.000.000	7	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	35.000.000	30,43	21,88	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
44	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Fasilitasi TIFF	Jumlah Kegiatan Fasilitas TIFF	4 kegiatan	40.000.000	2	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000	50	25,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
45	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Fasilitasi HUT Kota, HUT Provinsi, dan Hari Kemerdekaan RI	Jumlah kegiatan Fasilitas HUT Kota ,HUT Provinsi dan Hari Kemerdekaan	15 kegiatan	80.000.000	4	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22.500.000	26,67	28,13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
46	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Fasilitasi Christmas For All	Jumlah kegiatan Fasilitas Christmas For All	4 kegiatan	40.000.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000	25	25,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
47	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Presentasi arsip yang tersimpan secara elektronik	100 %	1.775.251.109	115 %	247.810.840	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	0	0	0	40 %	0	115 %	247.810.840	115	13,96	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
48	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pembangunan Database Informasi Kearsipan	Jumlah DataBase Informasi Kearsipan	3 kegiatan	200.000.000	2 kegiatan	86.661.236	1 kegiatan	84.107.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1 kegiatan	0	2 kegiatan	86.661.236	66,67	43,33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegi atan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12			14 = 13/5 * 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
49	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pengumpulan Data	Jumlah Pengumpulan Data Disetiap Unit Kerja	3500	arsip	52.251.109	3230		18.672.750	arsip			arsip					0		-	3230		18.672.750	92,2857	35,74	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
50	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pengklasifikasian Data	Jumlah Data /arsip yang diklasifikasikan	3700	arsip	50.000.000	3230		1.658.750	arsip			arsip					0		-	3230		1.658.750	87,2973	3,32	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
51	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyusunan Sistem Katalog Data	Jumlah Sistem Katalog Data	4	kegiatan	310.000.000	1	kegiatan	16.250.000	kegiatan			kegiatan			0		1	kegiatan	-	1	kegiatan	16.250.000	25	5,24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
52	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pengadaan Sarana Penyimpanan	Jumlah Sarana Penyimpanan	50	unit	653.000.000	0		0	unit			unit					0		-	0		0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
53	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah Kajian Sistim administrasi Kearsipan	5	kegiatan	280.000.000	2		140.818.104	1	kegiatan	85.000.000	kegiatan					0		-	2		140.818.104	40	50,29	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
54	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan	60	bulan	230.000.000	0		0	bulan			bulan					0		-	0		0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
55	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	18	kegiatan	1.583.038.500	6		111.599.327	kegiatan			kegiatan					0		-	6		111.599.327	33,33	7,05	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegi- atan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021				Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun- g Jawab
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12				13 = 6 + 12				14 = 13/5 * 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
56	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Tersediannya Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	4	kegiatan	1.250.000.000	1	52.100.827	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan					0	-	1	52.100.827	25	4,17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah				
57	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan sarana layanan Informasi Kearsipan	Jumlah Sarana Layanan Informasi Arsip	5	kegiatan	92.820.000	1	5.450.000	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan					0	-	1	5.450.000	20	5,87	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah				
58	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah swasta	Jumlah Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah	9	kegiatan	240.218.500	4	54.048.500	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan					0	-	4	54.048.500	44,44	22,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah				
59	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Cakupan SKPD Yang Naskah/dukumennnya tersimpan dengan baik	100	%	1.053.936.630	90	195.951.700	%	%	%	%	%					0	-	90	195.951.700	90	18,59	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah				
60	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	1002	buah	690.650.000	604	76.120.000	buah	buah	buah	buah	buah					0	-	604	76.120.000	60,28	11,02	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah				
61	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	8	kegiatan	230.000.000	4	59.177.500	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan					1	kegiatan	-	4	59.177.500	50	25,73	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			
62	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk Informatika	JumlahPenduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk Informatika	4	unit	28.286.630	7	73.556.700	unit	unit	unit	unit	unit					0	-	7	73.556.700	175	260,04	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegi atan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 * 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
63	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data	Tersedianya Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data	5 kegiatan	105.000.000	1	4.827.500	kegiatan		kegiatan		kegiatan				0		-	1	4.827.500	20	4,60	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
64	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	100 %	1.549.574.783	100	684.183.875	%		%		%				0		-	100	684.183.875	100	44,15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
65	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	Jumlah Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	432 kali	68.672.000	192	31.782.000	kali		kali		kali				0		-	192	31.782.000	44,44	46,28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
66	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pengembangan Minat Budaya Baca	Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	4 kegiatan	174.230.000	4 kegiatan	200.071.500	kegiatan		kegiatan		kegiatan		0		1 kegiatan		-	4 kegiatan	200.071.500	100	114,83	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
67	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Supervisi,Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan	Jumlah Supervisi,Pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Umum,khusus, sekolah dan masyarakat	750 perpustakaan	613.600.000	478	20.384.000	perpustakaan		perpustakaan		perpustakaan				0		-	478	20.384.000	63,73	3,32	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
68	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Jumlah Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	4 kegiatan	111.384.000	0	0	kegiatan		kegiatan		kegiatan				0		-	0	0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
69	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca	Tersediannya Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	44 kelurahan	250.000.000	26	88.614.000	1 kegiatan	70.000.000	kelurahan		kelurahan				0		-	26	88.614.000	59,0909	35,45	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021				Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 * 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
70	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	Jumlah Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	6	82.750.000	0	0	0	0	kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
71	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca	4	6.600.000	0	0	0	0	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
72	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	5	146.327.324	3	58.731.500	1	64.274.000	kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3	58.731.500	60	40,14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
73	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	9.Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	3000	377.308.209	3037	244.900.000	0	0	eksemplar	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3037	244.900.000	101,23	64,91	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
74	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	5	103.476.250	2	6.459.250	0	0	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	6.459.250	40	6,24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
75	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Fasilitasi Lomba Budaya Baca dan Ceritera Daerah/Rakyat	Jumlah Kegiatan Lomba Budaya Baca dan Cerita Rakyat	5	167.467.000	3	64.831.625	0	0	kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3	64.831.625	60	38,71	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
76	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	100	345.000.000	100	99.999.109	0	0	%	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100	99.999.109	100	28,99	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegi atan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12			14 = 13/5 * 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
77	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	60	bulan	70.000.000	36	11.678.039	1	kegiatan	129.484.800		bulan					0	-	36	11.678.039	60	16,68	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
78	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Pemeliharaan Rutin/berkala arsip Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala arsip Daerah	4	kegiatan	65.000.000	1	2.300.000		kegiatan			kegiatan					0	-	1	2.300.000	25	3,54	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		
										%	3,8	%	31.25									0				

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR		PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
URUSAN WAJIB															
TERKAIT PELAYANAN DASAR															
PERPUSTAKAAN															DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	0.36%	5%		15%		20%		25%		28		100%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0%	5%		5%		5%		5%		5%		25%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno	0%	1%		1%		1%		1%		1%		5%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KEARSIPAN															DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RP.IMP (Tahun 0)	2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR		PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		353,5	500		500		500		500		500		3000		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1.665,16	300		300		300		300		300		1800		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	0	20		20		20		20		20		100		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

2.2 Analisis Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon

Capaian kinerja secara keseluruhan berdasarkan program strategi realisasi sebesar 98,46% dari rencana kegiatan yang telah diprogramkan :

Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana yang telah diuraikan pada evaluasi kinerja diatas merupakan tolak ukur peningkatan kinerja aparatur yang diarahkan pada terciptanya sumber daya aparatur yang disiplin, efisien, dan efektif dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan yang memadai.

Secara umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, sudah maksimal melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan sesuai mekanisme serta prosedur yang berlaku hal ini terlihat dari sisi pelayanan teknis administrasi, baik kegiatan rutin maupun maupun operasional, sebagaimana yang telah diuraikan pada evaluasi kinerja.

Secara objektif masih terdapat berbagai kelemahan-kelemahan kinerja terutama menyangkut masalah sarana dan prasarana operasional, alokasi anggaran, kualitas sumber daya manusia dan koordinasi baik secara intern di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon maupun ekstern. Hal ini membawa implementasi terhadap kinerja pelayanan kurang maksimal bagi masyarakat, dimana belum semua wilayah Kota Tomohon tersentuh dengan Pelayanan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan visi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju yang ingin diwujudkan atau menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan pada waktu tertentu.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :

- ❖ Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan kuat akan sesuatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil.
- ❖ Jangkauan kedepan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih, sebagaimana ditetapkan oleh DKPD Kota Tomohon.
- ❖ Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.
- ❖ Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi yang berfokus pada tindakan dan alokasi dalam sumber daya atau aktivitas karakteristik dari

sasaran paling tidak terdiri dari SMART (Specific, Measureable, Acceptable, Result, Time Lines). Sasaran bersifat spesifik dan terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam waktu tertentu baik tahunan, sementara, triwulan atau bulanan.

Sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon, disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan internal yang ada dalam rangka mencapai tujuan melalui penyelenggaraan misi untuk mewujudkan visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon.

Sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon dalam Renstra 2021-2026 adalah :Membangun dan meningkatkan sistem Administrasi Kearsipan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Mengembangkan Budaya Baca bagi Masyarakat Kota Tomohon. Untuk mengetahui keberhasilan sasaran maka diperlukan suatu ukuran keberhasilan yaitu indikator kinerja sasaran. Indikator Kinerja Sasaran DKPD Kota Tomohon dalam Renstra 2021-2026 secara umum dirumuskan sebagai berikut :

- ❖ Prosentase Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan
- ❖ Prosentase PeningkatanKualitas Pelayanan Informasi
- ❖ Prosentase Budaya Baca bagi Masyarakat Kota Tomohon

Dalam rumusan Indikator kinerja sasaran secara khusus dapat dijabarkan secara rinci berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan kedalam tabelberikutini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Sasaran

NO	Sasaran	Indiktor Kinerja Sasaran
1.	<div>➤ Membangun dan meningkatkan sistem Administrasi Kearsipan</div> <div>➤ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi</div> <div>➤ Mengembangkan Budaya Baca bagi Masyarakat Kota Tomohon.</div>	<div>➤ Tersedianya fasilitas tempat penyimpanan Arsip</div> <div>➤ Tersedianyasarana dan Prasarana perkantoran</div> <div>➤ Jumlah kegiatan pengumpulan data</div> <div>➤ Tersedianya Mobil dan Motor Operasional</div> <div>➤ Tersedianya Tenaga fungsional Pustakawan dan Arsiparis.</div> <div>➤ Jumlah Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan</div> <div>➤ Tersedianya bahan Pustaka</div> <div>➤ Jumlah kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi</div> <div>➤ Jumlah Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi</div> <div>➤ Jumlah pengunjung Perpustakaan</div> <div>➤ Jumlah Kegiatan Lomba Budaya Baca dan Ceritera Rakya</div>

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tomohon

1. Kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi personilnya dan interaksinya dengan proses serta tujuan dari organisasi tersebut. Personil atau pegawai di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon berkembang sesuai dengan kondisi serta ruang lingkup kewenangan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Tomohon. Ketika Otonomi Daerah diimplementasikan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Kota Tomohon menjadi lebih luas dengan beberapa penyerahan baik dari Pemerintah Pusat secara langsung, maupun yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penyerahan kewenangan ini disertai pula dengan penyerahan personil. Penyerahan personil dalam rangka Otonomi Daerah ini serta penambahan sesuai Formasi CPNS Daerah inilah yang menyebabkan jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon bertambah dari tahun ke tahun.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon senantiasa mengupayakan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan sasaran-sasaran seperti kesiapan aparatur yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai PNS, terbangunnya kompetensi aparatur secara efektif dan efisien, serta tercapainya peningkatan kualitas, wawasan serta kapabilitas teknis aparatur sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang dihadapi saat ini.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana yang telah diuraikan pada evaluasi kinerja di atas merupakan tolok ukur peningkatan kinerja aparatur yang diarahkan pada terciptanya Sumber Daya Aparatur yang disiplin, efisien dan efektif dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan yang memadai secara umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon telah berjalan sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan sesuai mekanisme serta prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari sisi pelayanan teknis Administrasi baik kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan strategi yang secara rutin dilaksanakan pada setiap tahun sehingga berjalan dengan baik.

Secara obyektif masih terdapat berbagai kelemahan-kelemahan kinerja organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah terutama menyangkut masalah koordinasi baik dengan instansi terkait maupun Pemerintah Kota Tomohon. Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini membawa implikasi terhadap kinerja pelayanan kurang maksimal bagi masyarakat dimana belum seluruh wilayah di Kota Tomohon tersentuh dengan pelayanan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon.

2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan :
 - a. Terbatasnya penerapan nilai-nilai positif budaya organisasi secara efektif
 - b. Terbatasnya penyuluh Minat dan Gemar Membaca.

- c. Terbatasnya Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada
 - d. Terbatasnya Sarana dan Prasarana operasional penunjang pelaksanaan.
 - e. Terbatasnya anggaran operasional dalam pelaksanaan penyuluhan dan monitoring terhadap perpustakaan di Kota Tomohon
 - f. Belum adanya tenaga ahli Arsiparis dan Pustakawan
 - g. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Kearsipan dan Perpustakaan.
 - h. Kurangnya koordinasi baik instansi vertikal maupun instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi.
- Kelemahan-kelemahan kinerja organisasi terutama menyangkut masalah koordinasi baik dengan instansi terkait maupun Pemerintah Kota Tomohon serta unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang belum sesuai dengan yang diharapkan akan membawa dampak atau implikasi terhadap kinerja pelayanan kurang maksimal bagi masyarakat dimana belum seluruh wilayah di Kota Tomohon tersentuh dengan pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan sehingga dapat menghambat pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon adalah Keterbatasan dana operasional dlm pelaksanaan program dan kegiatan serta belum memadainya sarana dan prasarana kerja

dalam pelaksanaan program menjadi tantangan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.

Seperti diketahui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon menggunakan Gedung Kompleks Taman Kota, Paslaten 1 Kecamatan Tomohon Timur. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, mendapat dukungan sarana prasarana berupa ;

- a. Gedung kantor yang cukup representatif dalam pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan masyarakat.
- b. 2 (dua) unit kendaraan dinas operasional jabatan kepala kantor merk Terios Tahun pembuatan 2016 dan Avanza tahun pembuatan 2006.
- c. 1. Unit mobil perpustakaan keliling.
- d. 12 unit computer PC, 7 unit notebook, 3 Scanner, 6 printer
- e. 4 meja biro , 19 meja ½ biro , 4 meja baca , 11 rak buku, 1 meja sirkulasi, 4 lemari catalog, 1 lemari refrence , 5 Filling Kabinet
- f. 3 Rak besi , 10 Lemari arsip, 5 tabung pemadam, 1 lemari penyimpanan arsip, 50 kursi baca serta bahan pustaka berupa buku-buku serta prasarana kantor lainnya.

5. Anggaran yang bersumber dari APBD Kota Tomohon baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon senantiasa mengupayakan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan sasaran-sasaran seperti siapnya aparatur yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai PNS dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga terbangunnya kompetensi aparatur secara efektif dan efisien, serta tercapainya peningkatan kualitas, wawasan serta kapabilitas teknis aparatur DKP Kota Tomohon sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang dihadapi saat ini.

6. Catatan strategis untuk ditindaklanjuti demi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Gambaran pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon
Analisa Isu-Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tomohon periode 2016 – 2021 maka perlu diantisipasi dampak negatif yang juga menjadi isu strategis yang ada di Kota Tomohon berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia. Adapun isu-isu strategis aktual pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon, adalah sebagai berikut :

- a. Internal

- 1) Terbatasnya penerapan nilai-nilai positif budaya organisasi secara efektif.
- 2) Terbatasnya kompetensi aparatur.
- 3) Lemahnya kepedulian dari instansi terkait secara internal.
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional.
- 5) Belum efektifnya kinerja pelayanan diberbagai lapisan masyarakat.
- 6) Terbatasnya anggaran operasional untuk kegiatan di DKP Kota Tomohon.

- b. Eksternal

- 1) Kurangnya peran serta masyarakat dalam menumbuhkan minat gemar membaca
- 2) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	kondisi awal	Target Tahun Ke-												Target Akhir Periode	Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Misi 2			PERPUSTAKAAN																
	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat diberbagai Sektor	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas, adil dan Merata	meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	Program Pembinaan Perpustakaan															Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
				presentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	%	0,61%	5%	0,36	5%		15%		20%		25%		28%		100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	0	5%	0	5%		5%		5%		5%		5%		25%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno																
				Presentase Peningkatan Pelestarian Naskah Kuno	%	0	1%	0	1%		1%		1%		1%		1%		5%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT																Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100%	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				KEARSIPAN																
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT																
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100%	100	100%		100		100		100		100		100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Program Pengelolaan Arsip																
				Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntanbilitas Kinerja alatbukti yang sah dan Pertanggung jawaban Nasional	arsip	44,06%	500	353,5	500		500		500		500		3000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	kondisi awal	Target Tahun Ke-										Target Akhir Periode	Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025				2026	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			Target	Realisasi
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip																
				Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintah pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	arsip	1.519	300	1.665,16	300		300		300		300		300		1800	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Program Perizinan Penggunaan arsip																
				Persentase Kinerja Pelayanan izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup sesuai NSPK	arsip	0	20	0	20		20		20		20		20		100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon juga dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

VISI

"Tomohon Maju, Berdaya saing Dan Sejahterah"

MISI

1. Menjaga dan melestarikan kota tomohon sebagai koata religious
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat diberbagai sector
3. Menjadikan Kota Tomohon sebagai kota Wisata Dunia
4. Memajukan Sistem pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan
5. Mewujudkan Pelayanan Pemerintah yang bersih efektif dan berintergritas serta Program Unggulan Pembangunan Kota Tomohon utamanya menyangkut :
 - 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, jika kita hubungkan dengan sasaran pembangunan SDM sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Sisdiknas, adalah SDM yang utuh dalam arti manusia harus memiliki kecerdasan, intelektual, emosi, sosial, dan kinestetik. Yang dimaksud dengan kinestetik disini adalah manusia harus mampu memelihara/menjaga kesehatan;
 - 2) Penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik dimaksudkan agar melalui program yang dilaksanakan dapat memotivasi aparat, pejabat serta seluruh PNS kota Tomohon menjadi pola anutan.

Kaitan dengan itu maka salah satu tujuan penyusunan program kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon adalah terwujudnya kegiatan pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan secara maksimal sesuai aturan yang berlaku.

Untuk maksud tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

- a. Visi : Terwujudnya Sistem Kearsipan yang Komprenhensif Dan Terpadu serta Pelayanan Perpustakaan yang Optimal
- b. Misi : Meningkatkan Kualitas Sistem pengelolaan Arsip sesuai perkembangan teknologi dan informasi .
Mengoptimalkan Sistem Pengelolaan dan Pelayanan perpustakaan dalam meningkatkan Gemar membaca pada Masyarakat serta,
Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional

Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan , diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

Perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, sebagaimana analisis sebelumnya seperti:

- a. Kebijakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004), mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian/Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebanyakan program dan kegiatan pembangunan, (Ps 6 ayat 1). Rencana Kerja Kementerian/Lembaga atau RKKL disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian/Lembaga dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (Ps 6 ayat 2).
- b. Arah Kebijakan Pembangunan Penyelenggaraan Negara dalam RPJM 2011-2015 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010) : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi..

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan, pada kurun waktu tertentu.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :

1. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan kuat akan sesuatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil.
2. Jangkauan kedepan dicapai dalam jangka waktu 5(lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh DKPD Kota Tomohon.
3. Abstrak bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.
4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Menyamakan persepsi serta memperkuat sinkronisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program .
2. Memberikan arah kebijakan pembinaan program tahun 2023.
3. Menetapkan berbagai indikator dalam mengimplementasikan program dan kegiatan.
4. Mendapatkan bantuan dana baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Sedangkan Sasaran dan Indikator Kinerja adalah dengan ditetapkannya tujuan yang hendak dicapai, maka ditetapkan pula sasaran yang adalah penjabaran dari

tujuan yang hendak dihasilkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas SMART (*Specific, Measureable, Acceptable, Result, Time Lines*). Sasaran bersifat spesifik dan terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam waktu tertentu baik tahunan, sementara, triwulan atau bulanan.

Sasaran Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon juga disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan internal yang ada, dalam rangka mencapai tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon telah menetapkan sasaran Rencana Kerja sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana prasarana Kearsipan yang representative
2. Membangun system Pelayanan dan Pelestarian arsip dan Perpustakaan yang terpadu,efisien dan efektif.
3. Meningkatkan kualitas aparatur di bidang Arsip Perpustakaan,.

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam rumusan program dan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Kota Tomohon yang religius,mandiri,sejahtera,berwawasan lingkungan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan mendunia, serta untuk melaksanakan kesemuanya itu diperlukan sumberdaya manusia yang profesional.
- b. Uraian dan rekapitulasi Urusan,program dan kegiatan meliputi:
Jumlah urusan ,program/kegiatan sebanyak 2(Dua) Urusan, 4(Empat) program ,10 kegiatan adalah sebagai berikut :
Berdasarkan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada pembahasan sebelumnya, program dan kegiatan diatas dapat dikelompokkan menurut kelompok sasarannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Perpustakaan)

- 1). Penrencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6). Pengadaan Barang Milik Daerah
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 2. Program Pembinaan Perpustakaan**
 - 1). Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah
- 3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Kearsipan)**
 - 1). Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2). Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah
- 4. Program Pengelolaan Arsip**
 - 1). Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten /Kota
- 5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**
 - 1). Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa Kelurahan

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5									
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.969.225.000				8.485.718.386
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3.823.914.200				8.310.818.286
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	3.513.914.200			100%	5.110.818.286
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 dokumen	4.950.000			3 dokumen	5.950.000
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		2 Dokumen(RENJA Dan RENSTRA)	3.300.000			2 Dokumen(RENJA Dan RENSTRA)	4.300.000
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1.650.000			1 Laporan	1.650.000
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		24 orang	2.189.225.000			24 orang	3.225.315.289
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN		22 Orang ASN	2.189.225.000			22 Orang ASN	3.225.315.289
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	129.756.800			100%	285.123.000
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas		24 orang	17.379.800			35 orang	35.000.000
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi		12 bulan				12 bulan	120.177.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5									
2	23	01	2.05	10	Ssosialisasi Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Sosiliasi Peraturan perundang undangan		12 bulan	55.966.000			12 bulan	65.000.000
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perunfang undangan		12 bulan	56.411.000			12 bulan	64.946.000
2	23	01	2.06		Adninistrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Adninistrasi Umum Perangkat Daerah		100%	165.682.760			100%	407.975.670
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen instlasi Listrik / Penerangan Bangunan		12 bulan	15.425.650			12 bulan	12.000.000
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik kantor		12 bulan	44.796.410			12 bulan	45.000.000
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bacaan dan Perundang Undangan		12 bulan	7.270.700			12 bulan	8.000.000
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Kunjungan Tamu		12 bulan	17.050.000			12 bulan	17.050.000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 bulan	81.140.000			12 bulan	325.925.670
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 bulan	859.747.840			12 bulan	749.660.027
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		12 bulan	5.000.000			12 bulan	4.126.000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedinya Jasa Pelayanan umum kantor		12 bulan	854.747.840			12 bulan	745.534.027
2	23	01	2.10		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		13 item	32.881.800			13 item	436.794.300
					Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor		2 Printer dan 1Labtop	32.881.800			4 PC,4 Printer,4 Labtop	180.000.000
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	131.670.000			12 bulan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5									
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 bulan	101.120.000			12 bulan	231.754.300
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 bulan	30.550.000			12 bulan	25.040.000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase peningkatan kunjungan perpustakaan		15%	310.000.000			15%	3.200.000.000
						Nilai Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat		15%				15%	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan Yang dibentuk		2 perpustakaan	310.000.000			2 perpustakaan	100.000.000
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah kab/kota	Jumlah Perpustakaan yang di kembangkan di tingkat daerah kab/kota standar nasional perpustakaan		tanah	250.000.000			gerdung	3.000.000.000
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka		1 paket	60.000.000			1 paket	100.000.000
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				145.310.800				174.900.100
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		100%	25.310.800			100%	24.900.100
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	10.550.700			100%	12.000.000
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12 bulan	10.550.700			12 bulan	12.000.000
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 bulan	14.760.100			12 bulan	12.900.100
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	14.760.100			12 bulan	12.900.100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5									
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional		500 arsip	60.000.000			500 arsip	50.000.000
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola			60.000.000				50.000.000
2	24	02	2.02	02	Akuisisi,Pengelolaan Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah kegiatan Akuisisi,Pengelolaan Preservasi dan Akses Arsip Statis		1 kegiatan	60.000.000			1 kegiatan	50.000.000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PERNYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		300 arsip	60.000.000			300 arsip	100.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5									
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana		100 arsip	60.000.000			100 arsip	100.000.000
2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip		500arsip	60.000.000			500arsip	100.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah kota Tomohon harus konsisten selaras dengan prioritas , sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2022- 2026 dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tahun 2021 – 2026 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tomohon 2023

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									3,823,914,200	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									3,513,914,200	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									4,950,000	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah, Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisiaer reasilsasi kinerja SKPD	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	100 persentase	0 Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	3,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah, Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisiaer reasilsasi kinerja SKPD	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	1 Laporan	3 Dokumen	1,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2,189,225,000	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	24 Orang/bulan	84 ASN	2,189,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									129,756,800	
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	24 Paket	100 persentase	17,379,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	23	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	24 Orang	100 persentase	55,966,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	24 Orang	100 persentase	56,411,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									165,682,760	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	12 Paket	100 persentase	15,425,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	2 Paket	100 persentase	44,796,410	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	2 Dokumen	100 persentase	7,270,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	2 Laporan	100 persentase	17,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	2 Laporan	100 persentase	81,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								32,881,800	
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	8 Unit	3 item	32,881,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								859,747,840	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tesedinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	2 Laporan	12 bulan	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tesedinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	2 Laporan	12 bulan	854,747,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								131,670,000	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	4 Unit	12 bulan	101,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	8 Unit	12 bulan	30,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								310,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								310,000,000	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Presentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Bahan Pustaka	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 presentase 15 presentase	1 Perpustakaan	296 eksemplar	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Presentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	Jumlah Bahan Pustaka	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 presentase 15 presentase	600 Eksemplar	296 eksemplar	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								145,310,800	
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								25,310,800	
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								10,550,700	
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	2 Paket	100 presentase	10,550,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								14,760,100	
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tesedinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	100 persentase	2 Laporan	12 bulan	14,760,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								60,000,000	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								60,000,000	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Jumlah Arsip dinamis yang dikelola	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 arsip	500 Berkas	500 arsip	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								60,000,000	
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan								60,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									310,000,000	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Presentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Bahan Pustaka	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 presentase 15 presentase	1 Perpustakaan	296 eksemplar	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Presentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	Jumlah Bahan Pustaka	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 presentase 15 presentase	600 Eksemplar	296 eksemplar	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									145,310,800	
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									25,310,800	
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									10,550,700	
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talet Dua	100 persentase	2 Paket	100 presentase	10,550,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									14,760,100	
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tesedinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talet Dua	100 persentase	2 Laporan	12 bulan	14,760,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									60,000,000	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota									60,000,000	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang sah dan bertanggungjawab Nasional	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Jumlah Arsip dinamis yang dikelola	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 arsip	500 Berkas	500 arsip	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									60,000,000	
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan									60,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setaiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan nedgara pemerintahan, Pelayanan publik, dan kesejaterahan rakyat	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah arsip yang didata dan disusun karean penggabungan atau pemekaran daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 arsip	500 Arsip	22 arsip	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TOTAL													3,969,225,000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tomohon Tahun 2023 merupakan penjabaran dari berbagai hal dalam menunjang Visi, Misi, dan Program kebijakan Pembangunan Kota Tomohon. Sebagai media penjabaran tentunya memuat Prioritas pembangunan Daerah Kota Tomohon dengan mengacu pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon dan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026. Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan menjadi acuan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon dengan bidang-bidang yang ada untuk menyusun kegiatan prioritas dan rincian kegiatan. Dan tentunya tidak dapat melepaskan diri dari fungsi organisasi pemerintahan secara umum sebagai lembaga pelayanan masyarakat karena konsekwensi dari penerapan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pada masyarakat.

- a. Menjadi catatan penting yang harus mendapat perhatian adalah dengan tersusunnya Renja ini, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon menjadi catatan penting yang harus lebih diperhatikan untuk kepentingan dan kelangsungan kehidupan masyarakat Kota Tomohon kedepan.

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan upaya-upaya penyuluhan, sosialisasi tentang Kearsipan dan Perpustakaan, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Demikian Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tomohon Tahun 2023 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi setiap aparatur pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tomohon

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan dilaksanakan berdasarkan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2023 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. Penyusunan rancangan
- b. Rancangan Akhir; dan
- c. Penetapan

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon sebagai perangkat daerah menyusun Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2021-2026, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2023, sebagai

penyesuaian terhadap RKPD Kota Tomohon Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang nomor 10 tahun 2003, Tentang pembentukan Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011, Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025;
13. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
14. Peraturan daerah nomor 6 tahun 2016, Tentang pembentukan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon;
15. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2016, Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri, Nomor 90 Tahun 2019, Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 050-3708 Tahun 2020, Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Walikota Tomohon, Nomor 12 Tahun 2023, Tentang: Peraturan Walikota Tomohon 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menyusun RKA Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program/kegiatan /Sub Kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2023.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2021;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan;

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU (2021)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2023 didasarkan pada Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian renstra sampai dengan 2021, di dapati beberapa hal, sbb:

Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Respon yang tinggi dari kelompok penerima sasaran kegiatan (Petani) dalam mencapai tujuan kegiatan sesuai target; 2. Penguasaan materi kegiatan yang baik dari masing masing bidang yang dilaksanakan; 3. Kerjasama yang baik antara pihak PD dan stakeholder; 4. Adanya kerjasama yang baik lintas bidang PD dalam hal pelaksanaan kegiatan.

Faktor –faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Respon yang rendah dari kelompok penerima sasaran kegiatan (Petani) dalam mencapai tujuan kegiatan sesuai target; 2. Penguasaan materi kegiatan yang kurang baik dari masing masing bidang yang dilaksanakan; 3. Ketersediaan dan operasional kegiatan yang rendah; 4. Adanya Bencana Global Pandemi Covid-19.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dari gambaran factor penghambat pencapaian kinerja yang otomatis sangat berpengaruh dalam pencapaian target, maka dengan demikian proses evaluasi harus terus dilakukan dalam proses perencanaan lanjut untuk mendapatkan solusi yang benar benar benar tepat.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas, antara lain: 1. Melaksanakan perencanaan program kegiatan lintas bidang denga persetujuan kepala perangkat daerah; 2. Peningkatan fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 2.1
HASIL EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA TOMOHON TAHUN 2021

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021			Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2022			Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1	2	3	4	5			6			12= 8 + 9 + 10 + 11			13 = 6 + 12			14 = 13/5 * 100%		15	16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp			
				Target	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan						
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun)	100	Persen	1,278,226,250	0	Persen	863,757,229	0	Persen	-		0%	863,757,229		26%	DISTAKAN		Proses pembuatan Data Kontrak yang lambat
		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	4	Kegiatan	1,194,999,000	0	Persen	101,673,138	0	Persen	-			101,673,138		9%	DISTAKAN		Proses pembuatan Data Kontrak yang lambat
		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	4	Kegiatan	1,194,999,000	0	Persen	719,610,191	0	Persen	-			719,610,191		60%	DISTAKAN		Proses pembuatan Data Kontrak yang lambat

		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4	Kegiatan	83,227,250	0	Persen	-	0	Persen	-	0%	-	0%	DISTAKAN	Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	-	0	Persen	-	0	Persen	-	-	-	-	DISTAKAN	Proses Refocusing untuk C19
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	49,982,350	0	Persen	41,836,000	0	Persen	-	0%	41,836,000	84%	DISTAKAN	Proses Refocusing utk C19
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1	Kegiatan	33,244,900			637,900			-		637,900	2%	DISTAKAN	Proses Refocusing utk C19
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan	100	Persen	24,999,500	0	Persen	-	0	Persen	-	0%	-	0%	DISTAKAN	Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1	Kegiatan		0		-	0	Persen	-	0%	-		DISTAKAN	Proses Refocusing Anggaran untuk C19

		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	0	Persen	-	0	Persen	-	0%	-					DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Jenis	0	Persen	-	0	Persen	-		-					DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Jenis	24,999,500	0	Persen	-	0	Persen	-	-		0%			DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	11,053,297,396			13,066,857,506			4,412,988,061	23%	17,479,845,567		67%		DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen	7,270,000			6,161,450			3,261,950	25%	9,423,400		91%		DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	1,440,000			1,176,900			1,041,950	47%	2,218,850		154%		DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3,650,000	1	Dokumen	3,440,100	1	Dokumen	2,220,000	1	80%	5,660,100	100%	155%		DISTAKAN	

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	880,000			722,000			-		0%	722,000		82%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	1,300,000			822,450			-		0%	822,450		63%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Dokumen	-			-			-		0%	-			DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Jenis	10,408,391,290	5	Jenis	12,432,461,221	5	Jenis	4,276,236,972	9	12%	16,708,698,193	225%	44%	DISTAKAN		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	9,665,521,640	1	Tahun	11,495,548,221	1	Tahun	3,935,814,272	2	40%	15,431,362,493	200%	160%	DISTAKAN		
		Gaji Pokok PNS	Gaji Pokok PNS						-			-			-			DISTAKAN		
		Tunjangan Keluarga PNS	Tunjangan Keluarga PNS						-			-			-			DISTAKAN		
		Tunjangan Jabatan PNS	Tunjangan Jabatan PNS						-			-			-			DISTAKAN		
		Tunjangan Fungsional PNS	Tunjangan Fungsional PNS						-			-			-			DISTAKAN		
		Tunjangan Fungsional Umum PNS	Tunjangan Fungsional Umum PNS						-			-			-			DISTAKAN		
		Tunjangan Beras PNS	Tunjangan Beras PNS						-			-			-			DISTAKAN		
		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS						-			-			-			DISTAKAN		
		Pembulatan Gaji PNS	Pembulatan Gaji PNS						-			-			-			DISTAKAN		

		Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Iuran Jaminan Kesehatan PNS						-			-			-			DISTAKAN		
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS						-			-			-			DISTAKAN		
		Iuran Jaminan Kematian PNS	Iuran Jaminan Kematian PNS						-			-			-			DISTAKAN		
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS						-			-			-			DISTAKAN		
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Tahun	15,470,000	2E+07		17,730,000	10,611,800		10,611,800		63%	28,341,800		183%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41	Orang	723,750,000	30	Orang	916,375,000	30	Orang	328,637,400	71	42%	1,245,012,400	173%	172%	DISTAKAN		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	1,500,000			1,447,500			957,000		58%	2,404,500		160%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Jenis	2,149,650			1,360,500			216,500		4%	1,577,000		73%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Jenis	996,250			-			450,000		45%	450,000		0%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19

		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Jenis	996,250			-			450,000		45%	450,000		0%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Jenis	145,196,810	4	Jenis	145,654,450	4	Jenis	47,684,300	12	18%	193,338,750	150%	81%	DISTAKAN		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11	Komponen	4,996,900			4,727,000			2,400,000		44%	7,127,000		143%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Unit	-			-			-			-			DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54	Jenis	81,663,620	20	Jenis	99,669,250	20	Jenis	29,566,500	74	39%	129,235,750	137%	158%	DISTAKAN		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13255	Lembar	12,704,400	14	Lembar	12,450,200	14	Lembar	3,965,800	13264	26%	16,416,000	100%	129%	DISTAKAN		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	958	Buah	6,000,390	13	Buah	3,040,000	13	Buah	-	970	0%	3,040,000	101%	51%	DISTAKAN		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	Jenis	25,877,500	1	Jenis	25,768,000	1	Jenis	4,450,000	4	22%	30,218,000	133%	117%	DISTAKAN		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Tahun	13,954,000			-			7,302,000		10%	7,302,000		52%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Jenis	-			-			-			-			DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Jenis	309,588,316	6	Jenis	365,963,725	6	Jenis	69,012,343	10	34%	434,976,068	250%	163%	DISTAKAN		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,666	Lembar	11,496,000	40	Lembar	14,800,000	40	Lembar	5,971,000	1705	54%	20,771,000	102%	181%	DISTAKAN		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150	Rekening	41,800,500	28	Rekening	48,536,797	28	Rekening	16,860,843	178	19%	65,397,640	119%	156%	DISTAKAN		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Unit	6,292,000	2	Unit	6,075,000	2	Unit	5,300,000	8	45%	11,375,000	133%	181%	DISTAKAN		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	Jenis	249,999,816	2	Jenis	296,551,928	2	Jenis	40,880,500	6	18%	337,432,428	150%	135%	DISTAKAN		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Jenis	181,854,730	2	Jenis	116,616,660	2	Jenis	16,342,496	10	3%	132,959,156	125%	24%	DISTAKAN		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Jenis	181,854,730	2	Jenis	116,616,660	2	Jenis	16,342,496	7	9%	132,959,156	140%	73%	DISTAKAN		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	-			-			-			-			DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Tahun				-			-						DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	100	Persen	1,021,594,850	23	Persen	725,299,000	23	Persen	68,749,500	123	4%	794,048,500	123%	67%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5	Jenis	706,807,550	3	Jenis	363,349,000	3	Jenis	62,749,500	8	8%	426,098,500	160%	60%	DISTAKAN		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi	4	Jenis	669,961,550	2	Jenis	350,849,000	2	Jenis	62,749,500	6	20%	413,598,500	150%	62%	DISTAKAN		0
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	Jenis	36,846,000	1	Jenis	12,500,000	1	Jenis	-	2	0%	12,500,000	200%	34%	DISTAKAN		0
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Jenis	271,366,500	2	Jenis	95,052,000	2	Jenis	6,000,000	4	1%	101,052,000	200%	37%	DISTAKAN		0

		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	2	Jenis	271,366,500	2	Jenis	209,163,500	2	Jenis	6,000,000	4	1%	215,163,500	200%	79%	DISTAKAN		
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	50	Ekor	43,420,800			42,460,000			-			42,460,000		98%	DISTAKAN		Proses Refocusing utk C19
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	50	Ekor	43,420,800			42,460,000			-			42,460,000		98%	DISTAKAN		Proses Refocusing utk C19
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	100	Persen	1,101,746,694	14	Persen	476,390,000	14	Persen	-	79	0%	476,390,000	79%	25%	DISTAKAN		
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian		Jenis	825,247,840	2	Jenis	326,450,550	2	Jenis	-	6	0%	326,450,550	150%	40%	DISTAKAN		
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	2	Jenis	130,982,000			3,959,500			-		0%	3,959,500		3%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19

		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	2	Jenis	694,265,840	2	Jenis	322,491,050	2	Jenis	-	4	0%	322,491,050	200%	46%	DISTAKAN		
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	5	Jenis	276,498,854			30,195,000			-		0%	30,195,000		11%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1	Jenis	61,693,158			61,423,500			-		0%	61,423,500		100%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1	Jenis	24,999,996			-			-			-		0%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya		Jenis	-			-			-			-			DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3	Jenis	189,805,700			-			-			-		0%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner	100	Persen	64,986,913			88,234,500			-		0%	88,234,500		25%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19

		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	Jenis	60,000,000			29,000,000			-		0%	29,000,000		48%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3	Jenis	60,000,000			59,000,000			-		0%	59,000,000		98%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Jenis	4,986,913			-			-			-		0%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	1	Jenis	4,986,913			234,500			-			234,500		5%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	3	Jenis				-			-		0%	-			DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	3	Jenis				-			-		0%	-			DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian	100	Persen	64,992,200			66,517,500			-		0%	66,517,500		51%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19

		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	2	Jenis	64,992,200			24,000,000			-		0%	24,000,000		37%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2	Jenis	64,992,200			42,517,500			-		0%	42,517,500		65%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Keberhasilan Pendampingan Kelompok Tani	100	Persen	158,178,223	22	Persen	171,048,500	22	Persen	-	87	0%	171,048,500	87%	30%	DISTAKAN		
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3	Jenis	158,178,223	1	Jenis	62,000,000	1	Jenis	-	4	0%	62,000,000	133%	39%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1	Jenis	26,411,073			-			-		0%	-		0%	DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1	Jenis	131,767,150	1	Jenis	109,048,500	1	Jenis	-	2	0%	109,048,500	200%	83%	DISTAKAN		
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Yang terbentuk	1	Jenis				-			-			-			DISTAKAN		Proses Refocusing Anggaran untuk C19

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon di dukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, Pengelolaan anggaran program dan kegiatan. Pada Tahun 2023 Indikator Kinerja berbeda sama dengan tahun 2022, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021. Adapun hasil analisis capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, dapat dilihat pada tabel berikut :

(Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah).

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TOMOHON

NO.	INDIKATOR KINERJA	SPM / STANDAR NASIONAL (bila ada)	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	19
	IKU										
	Meningkatkan Produksi Komoditas Pertanian (IKU)										
	Produktivitas Bahan Pangan (Kw/Ha)			61	62	63	61	30			
	IKP										
	Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun)			90	92%	94%	90%	46%			
	Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan			90	92%	94%	90%	46%			
	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian			90	92%	93%	90%	46%			
	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna			90	92%	93%	90%	46%			

NO.	INDIKATOR KINERJA	SPM / STANDAR NASIONAL (bila ada)	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023	
	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner			90	92%	93%	90%				
	Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian			90	92%	93%	90%				
	Prosentase keberhasilan pendampingan kelompok Tani			91	91%	93%	91%				
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	100%	100%	100%				
			IKK								
			Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun				206 Orang				
			Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun				458.200 Ekor				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan				100%				
			Prasarana Pertanian yang digunakan				100%				
			Persentase prasarana yang digunakan				100%				

NO.	INDIKATOR KINERJA	SPM / STANDAR NASIONAL (bila ada)	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023	
			Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (Penurunan PHM)				15,90%				
			Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)				310.966 Ton				
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun				61 (Kw/Ha)				
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular				25%				

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Isu-isu strategis atau kondisi harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat. Pembangunan pertanian di Indonesia masih dianggap sebagai bagian terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi. Hal ini semakin disadari ketika bidang pertanian telah mampu menjadi penyelamat perekonomian nasional pada saat terjadi krisis ekonomi dimana pertumbuhannya meningkat sementara pada bidang/sector lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya bidang pertanian di Indonesia antara lain (1) potensi sumber daya alamnya yang besar dan beragam; (2) pangsa pasar pendapatan nasional cukup besar; (3) Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian dan (4) Merupakan basis pertumbuhan di wilayah pedesaan. Kondisi demikian juga nampak di kota Tomohon dimana sebagian besar penduduknya yaitu sekitar 70 % bergerak pada sektor pertanian.

Dalam arti luas pembangunan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan penyuluhan dan perikanan meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, penyuluhan dan perikanan budidaya, yang diarahkan pada terwujudnya perekonomian yang tangguh dan berdaya saing sehingga mampu mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, melalui pengembangan sumber daya lokal, peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian serta pengembangan agribisnis.

Dinas pertanian dan perikanan selaku penganggungjawab teknis program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi nya telah melakukan banyak hal untuk melaksanakan pembangunan disektor pertanian, perkebunan, peternakan penyuluhan dan perikanan. Hal-hal yang telah dilaksanakan yaitu: Penyediaan infrastruktur berupa penyediaan jalan usaha tani, jaringan irigasi baik yang mendukung pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura maupun jaringan irigasi untuk pengembangan budidaya perikanan; penyediaan sarana produksi pertanian, peternakan, penyuluhan dan perikanan; penyediaan sarana prasarana fisik untuk kegiatan budidaya dan penanganan paska panen, penyediaan alat dan mesin pertanian, penyediaan saran dan prasarana pemasaran hasil produksi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik petani maupun petugas melalui kegiatan magang dan pelatihan; promosi atas hasil pertanian unggulan daerah yang dalam hal ini adalah tanaman hias, serta pemberian bantuan sosial kepada petani.

Semuanya itu telah dilaksanakan dengan baik, yang pada saat ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat kota Tomohon secara khusus para petani, peternak dan pembudidaya ikan, serta pelaku-pelaku usaha lainnya yang bergerak dibidang usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi dalam proses pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan perikanan masih di temui permasalahan-permasalahan mendasar yang membutuhkan perhatian khusus dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Permasalahan-permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Dampak perubahan iklim terhadap turunnya produksi pertanian
- b. Keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana
- c. Terjadinya degradasi serta alih fungsi lahan pertanian
- d. Belum optimalnya system perbenihan daerah
- e. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan
- f. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
- g. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian, peternakan dan perikanan
- h. Belum adanya koordinasi kerja antar sektor dalam pembangunan pertanian, peternakan, penyuluhan dan perikanan

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan penyuluhan dan perikanan kedepan disamping sejumlah persoalan mendasar yang harus ditangani secara cermat dan tepat, masih ada juga sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai sasaran-sasaran produksi maupun sasaran-sasaran strategis lainnya menyangkut produksi dan produktivitas, penyediaan sarana produksi, pelestarian lingkungan, kelembagaan usaha dan sebagainya. Tantangan-tantangan tersebut adalah :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian perkebunan dan peternakan serta peningkatan produksi komoditi perikanan.
- b. Penggunaan pupuk kimia dan organik secara seimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah dengan menciptakan system pertanian yang ramah lingkungan.
- c. Memperbaiki dan membangun infrastruktur dan air serta perbenihan dan perbibitan.
- d. Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani dan pembudidaya ikan.
- e. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu: pertumbuhan ekonomi, inklusi social serta perlindungan terhadap lingkungan.
- f. Adanya persaingan dengan daerah lain dalam menghasilkan produk yang sama, sehingga dibutuhkan peningkatan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan perikanan.
- g. Belum optimalnya Pelayanan kesehatan hewan.
- h. Belum optimalnya pengawasan perdagangan ternak antar daerah sehingga sangat memungkinkan masuknya ternak dari daerah lain yang sudah terkontaminasi suatu penyakit.

- i. Berkurangnya tenaga kerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan karena pesatnya perkembangan kota yang menawarkan peluang lapangan kerja baru yang berorientasi pada penyediaan jasa dan perdagangan.
- j. Sistem penyuluhan pertanian yang belum efektif.
- k. Peranan kelembagaan petani belum berjalan maksimal sesuai dengan fungsi tugas.
- l. Peran bidang penyuluhan terhadap peningkatan sumber daya petani dan usaha taninya masih sangat diperlukan oleh petani/masyarakat.
- m. Penyuluh pertanian sebagai inovator, motivator, mediator, komunikator dan mitra dari petani/keompok tani, sangat berperan terhadap peningkatan produktivitas dan peningkatan usaha tani petani.

Sekalipun masih terdapat faktor-faktor penghambat dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan namun masih dibuka peluang-peluang berikut :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan masih berpeluang dilaksanakan melalui kegiatan intensifikasi dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI), peningkatan Index Pertanaman (IP), pemanfaatan lahan-lahan tidur, perluasan areal tanaman, pemanfaatan pekarangan, pelaksanaan inseminasi buatan, pembudidayaan ikan dengan system mina padi, dll.
- b. Kesenjangan antara produktivitas yang dicapai dengan produktivitas potensial yang terjadi masih bisa di atasi dengan penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan produksi.
- c. Peluang untuk pengembangan komoditas unggulan lokal terutama komoditas hortikultura dan florikultura masih sangat terbuka untuk memenuhi pasar lokal maupun pasar nasional.
- d. Komoditas hortikultura sayur-sayuran, ternak dan hasil-hasilnya mempunyai peluang yang cukup besar dikawasan timur Indonesia yaitu Kalimantan, Maluku dan Papua.
- e. Pemanfaatan sisa-sisa hasil kegiatan budidaya pertanian untuk dijadikan pupuk organik dengan menggunakan alat pengolahan pupuk organik, disamping untuk mengurangi jumlah sampah organik tapi juga untuk memperbaiki tingkat kesuburan tanah dengan menggunakan pupuk organik.
- f. Pemanfaatan Kotoran Ternak Segar (KTS) dari ternak sapi dan babi, melalui penerapan teknologi dapat digunakan untuk penyediaan energy non migas (Biogas). Dan sisa-sisa dari biogas tersebut dapat digunakan sebagai pupuk organik.
- g. Dengan adanya Balai Benih Pertanian (BBP) / Show Window dan Balai Benih Perikanan (BBI) maka terbuka peluang untuk pengembangan perbenihan untuk penyediaan bibit unggul baik untuk tanaman pangan, hortikultura, ternak dan bibit ikan.
- h. Dengan tersedianya Pos/Labolatorium Kesahetan Hewan, maka pelayanan kesehatan untuk hewan dikota Tomohon menjadi lebih intensif sehingga program pemerintah kota Tomohon bebas penyakit hewan menular dapat terwujud.

- i. Memantapkan Sistem Penyuluhan Pertanian yang terpadu dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, maka dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023 nanti, hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan khususnya padi, dalam rangka menunjang program pemerintah baik pusat maupun provinsi yaitu swasembada pangan berkelanjutan serta swasembada beras di tahun 2023.
- b. Ketersediaan pupuk organik dalam rangka perbaikan struktur dan kesuburan tanah lahan pertanian di kota Tomohon, dalam rangka menunjang dan mensukseskan salah satu misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon yaitu “Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.”
- c. Ketersediaan sarana produksi untuk pengembangan perbenihan, peningkatan produksi dan produktivitas organik, serta ketersediaan bibit florikultura dalam rangka menunjang program pemerintah Kota Tomohon yaitu Tournament Internasional Festifal Flower (TIFF) yang didalamnya ada Tournament Of Flower (TOF) tahun 2023.
- d. Beroperasinya Show Window di Balai Perbenihan Hortikultura sebagai salah satu perwujudan Kota Tomohon sebagai kota Bunga.
- e. Ketersediaan vaksin rabies dan obat-obatan hewan, serta optimalisasi kegiatan oprasional labolatorium/pos kesehatan hewan menuju Tomohon bebas rabies dan penyakit menular ternak.
- f. Ketersediaan sarana prasarana pembibitan ternak untuk peningkatan populasi ternak dalam rangka menunjang program pemerintah yaitu swasembada daging.
- g. Ketersediaan sarana prasarana pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan perikanan di kota Tomohon.
- h. Ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi perikanan, dalam rangka mendukung program dan kegiatan pengembangan budidaya perikanan, baik untuk peningkatan produksi benih ikan maupun ikan konsumsi.
- i. Peningkatan efektivitas penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan pertanian yang mencakup pelaku utama dan pelaku usaha; Penyuluh dan Petugas Tekhnis; dan Aparatur Pemerintah terkait pertanian lainnya, serta pemenuhan unsur daya saing tenaga kerja sektor pertanian, yang meliputi 2 hal yaitu Penguatan kelembagaan petani; dan penguatan dan peningkatan kapasitas SDM Pertanian.
- j. Peningkatan kapasitas SDM pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan perikanan, baik petani maupun ASN.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon menetapkan program prioritas, dengan terlebih dahulu memberi perbandingan, antara lain sebagai berikut: 1. Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terdapat perbedaan jumlah pagu yang cukup signifikan, diman hasil analisis memang lebih tinggi dibanding rancangan

awal karena memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan; 2. Proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dan analisis sesuai kebutuhan dilaksanakan supaya gambaran akan kebutuhan yang sebenarnya selalu nampak; 3. Adanya catatan penting terkait temuan dari perbandingan yang sudah dilaksanakan antara Rancangan Awal dan Analisis Kebutuhan Pagu, disebabkan oleh antara lain: - Prioritas Pembangunan pertanian yang memang membutuhkan dana yang cukup besar; - Kondisi pagu anggaran yang disesuaikan dengan keadaan keuangan pemerintah Kota yang ada. (Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD).

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TOMOHON

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
					14.644,476,000					18.076.093.495	
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Tomohon	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		11.837.740.528	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Kota Tomohon	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		13.473.684.529	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon			10,770,700	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon			23.353.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.220.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.840.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	2.760.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	6.050.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.220.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.840.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	929.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.573.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.640.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.050.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon			11,095,056,908	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon			12.195.771.529	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	10.170.976.608	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	10.964.926.529	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tomohon	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	17.030.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tomohon	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	22.385.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41 Orang	900.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41 Orang	1.201.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.622.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.815.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Jenis	4.928.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Jenis	5.445.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon			1,001,200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon			132.715.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tomohon	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	128 Pasang	1.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tomohon	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	128 Pasang	130.900.000	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kota Tomohon	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Jenis	1.000.200	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kota Tomohon	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Jenis	1.815.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon			193,233,900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon			442.760.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 Komponen	5.475.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 Komponen	6.050.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	19.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	18.150.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor / ATK	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54 Jenis	75.144.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor / ATK	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54 Jenis	140.800.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13254 Lembar	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13254 Lembar	18.150.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	957 Buah	6.594.900	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	957 Buah	7.260.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu / MAMI	Kota Tomohon	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Jenis	20.020.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu / MAMI	Kota Tomohon	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Jenis	36.300.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1 Tahun	51.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Tomohon	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1 Tahun	210.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Konsultasi SKPD			SKPD		dan Konsultasi SKPD			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Jenis	1.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Jenis	6.050.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon			1.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon			48.400.000	
	Pengadaan Mebel	Kota Tomohon	Jumlah Pengadaan Mebel	2 Jenis	1.000	Pengadaan Mebel	Kota Tomohon	Jumlah Pengadaan Mebel	2 Jenis	48.400.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon			337,675,620	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon			400.785.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1666 Lembar	11.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1666 Lembar	12.100.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150 Rekening	90.185.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150 Rekening	53.240.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	11.480.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	5.445.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BPJS & Kebersihan Kantor)	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Jenis	225.010.120	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BPJS & Kebersihan Kantor)	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Jenis	330.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon			200.001.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon			229.900.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Jenis	199.998.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Jenis	121.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	1.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	96.800.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	2.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	12.100.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kota Tomohon	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian		11.921.311.270	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kota Tomohon	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian		914.300.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kota Tomohon			819.906.600	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kota Tomohon			548.000.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Tomohon	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Jenis	320.047.800	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Tomohon	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Jenis	416.000.000	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Tomohon	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Kegiatan	499.858.8000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Tomohon	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Kegiatan	132.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon			1,101,404,540	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon			275.550.000	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kota Tomohon	Jumlah Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian Hewan/Tanaman	2 Jenis	1.101.404.540	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kota Tomohon	Jumlah Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian Hewan/Tanaman	2 Jenis	275.550.000	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Kota Tomohon			130	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Kota Tomohon			90.750.000	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi	Kota Tomohon	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya	50 Ekor	130	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya	50 Ekor	90.750.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Lain		dari Daerah Provinsi Lain			Provinsi Lain		dari Daerah Provinsi Lain			
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kota Tomohon	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna		335,497,300	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kota Tomohon	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna		1.321.003.966	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kota Tomohon			299,994,300	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kota Tomohon			934.353.966	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B	Kota Tomohon	Jumlah Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	1 Dokumen	150.000.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Kota Tomohon	Jumlah Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	1 Dokumen	220.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Kegiatan	149.994.300	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Kegiatan	714.353.966,30	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kota Tomohon			35.503.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kota Tomohon			386.650.000,00	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	I Unit	1.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	I Unit	193.050.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	I Unit	1.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	I Unit	30.250.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	4 Jenis	35.500.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	4 Jenis	72.600.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1 Unit	1.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1 Unit	90.750.000	
	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kota Tomohon	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner		79,421,700	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kota Tomohon	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner		156.105.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon			69,326,600	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon			131.300.000	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Tomohon	Jumlah Pengendalian dan Penanggulan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3 Jenis	69.326.600	Pengendalian dan Penanggulan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Tomohon	Jumlah Pengendalian dan Penanggulan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3 Jenis	131.300.000	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon			1,000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon			12.100.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Jenis	1.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Jenis	12.100.000	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Kota Tomohon			10,094,100	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Kota Tomohon			12.705.000	
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Kota Tomohon	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	3 Jenis	10.094.100	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Kota Tomohon	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	3 Jenis	12.705.000	
	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kota Tomohon	Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian		100,000,000	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kota Tomohon	Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian		92.950.000	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kota Tomohon			100,000,000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kota Tomohon			92.950.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Tomohon	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 Jenis	100.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Tomohon	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 Jenis	92.950.000	
	PENYULUHAN PERTANIAN	Kota Tomohon	Prosentase Keberhasilan pendampingan kelompok tani		315,001,205	PENYULUHAN PERTANIAN	Kota Tomohon	Prosentase Keberhasilan pendampingan kelompok tani		370.150.000	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kota Tomohon			315,001,205	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kota Tomohon			370.150.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Tomohon	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	1 Kegiatan	150.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Tomohon	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	1 Kegiatan	108.900.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Kegiatan	165.000.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Kegiatan	231.000.000	
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kota Tomohon	Jumlah Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	44 Kelurahan	1.000	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kota Tomohon	Jumlah Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	44 Kelurahan	30.250.000	
	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kota Tomohon	Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan		50,002,997	PENGELOLAA N PERIKANAN BUDIDAYA	Kota Tomohon	Prosentase Pertumbuha n Produksi Hasil Perikanan		1.651.600.000	
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kota Tomohon			1.000	Pemberdayaa n Pembudidaya Ikan Kecil	Kota Tomohon			1.554.800.000	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Tomohon	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	4 Kegiatan	1.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Tomohon	Jumlah Pengembang an Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	4 Kegiatan	1.554.800.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Tomohon			50,001,997	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Tomohon			96.800.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	1 Kegiatan	1.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	1 Kegiatan	6.050.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Jenis	49.999.997	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Jenis	60.500.000	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Tomohon	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1 Kegiatan	1.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Tomohon	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1 Kegiatan	30.250.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kota Tomohon	Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan		5,501,000	PENGELOLAA N DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kota Tomohon	Prosentase Pertumbuha n Produksi Hasil Perikanan		36.300.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kota Tomohon			5.500.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kota Tomohon			6.050.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	1 Kegiatan	5.500.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	1 Kegiatan	6.050.000	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Kota Tomohon			1,000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri	Kota Tomohon			30.250.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2023	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro	Kota Tomohon	Jumlah Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro	5 Jenis	1,000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro	Kota Tomohon	Jumlah Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro	5 Jenis	90.250.000	
					14,644,476,000					18.076.093.495	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut Hasil kajian terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Perikanan berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Pertanian dan Perikanan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota di rangkum dalam Tabel berikut ini. (Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023).

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA TOMOHON

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN/VOLUME	CATATAN PENTING
1	Pengadaaan Sarana Produksi Pertanian	Kota Tomohon	Tersedianya Sarana Produksi Pertanian	100 Paket	DJEMMY JERRY SUNDUH, SE
2	Pembagian Pupuk Bersubsidi	Kota Tomohon	Tersedianya Pupuk Bersubsidi	1 Kegiatan	Drs. JOHNY RUNTUWENE
3	Pembagian Pupuk Bersubsidi	Kota Tomohon	Tersedianya Pupuk Bersubsidi	5000 Zak	Ir. MIKY JUNITA LINDA WENUR, MAP
4	Perda yang mengatur tentang alih fungsi lahan sawah	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen perda LP2B	1 Perda	Ir. MIKY JUNITA LINDA WENUR, MAP
5	Perda yang mengatur kelembagaan kelompok tani	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen perda Kelembagaan Petani	1 Perda	Ir. MIKY JUNITA LINDA WENUR, MAP
6	Pengadaan Bibit Tanaman	Kota Tomohon	Tersedianya Bibit Tanaman	1000 Pak	Ir. MIKY JUNITA LINDA WENUR, MAP
7	Perda yang mengatur tentang alih fungsi lahan sawah	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen perda LP2B	10 Hektar	JAMES JOHANIS ENRICO KOJONGIAN
8	Pembagian Pupuk Bersubsidi	Kota Tomohon	Tersedianya Pupuk Bersubsidi	10 Ton	JAMES JOHANIS ENRICO KOJONGIAN
9	Pengadaan Bibit Tanaman	Kota Tomohon	Tersedianya Bibit Tanaman	1 Ton	JAMES JOHANIS ENRICO KOJONGIAN
10	Pembangunan Green House untuk pengembangan bibit krisan	Kota Tomohon	Terbangunnya Green House untuk pengembangan bibit krisan	5 Buah	JAMES JOHANIS ENRICO KOJONGIAN
11	Pembangunan Green House untuk pengembangan bibit krisan	Kota Tomohon	Terbangunnya Green House untuk pengembangan bibit krisan	5 Buah	JIMMY S. WEWENGKANG
12	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Kota Tomohon	Tersedianya Alat Mesin Pertanian	5 Unit	STANLY R. WUWUNG, ST
13	Bantuan Sarana Pertanian	Kota Tomohon	Tersedianya Bantuan Sarana Pertanian	5 Kelompok	STANLY R. WUWUNG, ST

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan tugas pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan perikanan, maka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pertanian dan Perikanan selaku penanggung jawab teknis di bidang-bidang tersebut secara Nasional terkait langsung dengan dua kementerian yaitu : Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam Renstra Kementerian Pertanian RI, yang menjadi prioritas utama pembangunan pertanian adalah peningkatan ketahanan dan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Dengan empat target utama yaitu :

- a. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.
- b. Peningkatan Diversifikasi Pangan
- c. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor.
- d. Peningkatan kesejahteraan petani

Sedangkan dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menjadi sasaran strategis adalah :

- A. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi.
- B. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.
- C. Memperluas akses pasar domestik dan internasional

Dengan memperhatikan sasaran-sasaran strategis serta target-target utama dari Renstra Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka yang menjadi target utama pembangunan pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon dalam Renja tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan perikanan.
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta
3. Peningkatan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan.

Uraian mengenai empat target utama di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perikanan.

Target Produksi komoditas unggulan nasional dikelompokkan menjadi empat kelompok komoditas subsector yaitu : tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian pada periode lima tahun kedepan (2021 - 2026), akan lebih difokuskan pada peningkatan produksi komoditas unggulan yang target pertumbuhannya lebih disesuaikan dengan kemampuan petani serta daya serap pasar. Semua komoditas tetap akan ditingkatkan produksinya, tetapi laju peningkatannya sangat bervariasi antar komoditas. Walaupun secara fisik potensi produksinya ada, tetapi peningkatan

produksi yang sangat tinggi dapat saja menimbulkan kerugian bagi petani apabila terjadi *over supply* di pasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka komoditas-komoditas yang dipacu pertumbuhannya secara cukup tinggi (lebih dari 5 persen) adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, telur ayam buras, daging sapi, daging babi, dan daging ayam buras serta komoditas perikanan. Sementara komoditas yang pertumbuhannya pada tingkat moderat (dibawah 5 Persen) adalah wortel dan jenis sayuran lainnya, tanaman hias, daging kambing, daging ayam pedaging, daging itik, telur ayam petelur dan telur itik.

2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing

Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada dua hal yakni peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing. Untuk meningkatkan kualitas produk pertanian (segar dan olahan) kota Tomohon menargetkan pengadaan berbagai peralatan pasca panen maupun unit pengolahan hasil baik tanaman pangan, hortikultura, maupun peternakan dan perikanan untuk meningkatkan jumlah produk pertanian dan perikanan.

Peningkatan daya saing akan difokuskan pada pengembangan produk berbasis sumberdaya lokal yang bisa meningkatkan pemenuhan permintaan untuk konsumsi pasar lokal dan regional.

3. Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pembudidaya ikan

Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan adalah tingkat pendapatan. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani dan pembudidaya ikan secara otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, karena kesejahteraan petani dan pembudidaya juga tergantung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan keluarga petani serat faktor-faktor non financial seperti factor sosial budaya. Walaupun demikian, sisi pendapatan petani dan pembudidaya ikan merupakan sisi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan. Oleh Karena itu dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan, prioritas utama adalah upaya peningkatan pendapatan petani dan pembudidaya ikan.

Nilai pendapatan petani dan pembudidaya ikan dapat bersumber dari usaha pertanian dan perikanan dan usaha non-pertanian perikanan. Nilai pendapatan yang bersumber dari usaha pertanian, peternakan dan perikanan akan diperoleh dari selisih nilai penjualan komoditas usaha tani dan usaha perikanan yang dihasilkan dengan biaya usaha tani dan usaha perikanan yang dikeluarkan. Nilai penjualan hasil usaha tani dan usah perikanan akan ditentukan oleh volume produksi yang dihasilkan semakin besar pula volume fisik yang dapat dijual, dimana upaya peningkatan volume produksi ini merupakan hal yang sudah banyak dipaparkan pada saat mengupayakan target peningkatan produksi. Sementara itu walaupun komoditas pertanian dan perikanan berhasil ditingkatkan produksinya, hal tersebut hanya akan secara nyata meningkatkan nilai penjualan manakala harga jual paling tidak konstan atau lebih baik lagi kalau juga meningkat. Oleh karena itu hal

fundamental yang perlu diupayakan dalam rangka peningkatan nilai jual adalah mempertahankan agar nilai harga jual tidak mengalami penurunan.

Agar harga jual tidak mengalami penurunan, maka pemerintah kota Tomohon perlu menempuh sejumlah aksi guna menjamin peningkatan pendapatan petani. Rencana aksi dimaksud antara lain : Menekan biaya produksi agar margin keuntungan petani dapat meningkat dengan peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur, yang dilakukan secara padat karya dengan melibatkan petani yang menjadi sasaran kegiatan, mengembangkan berbagai aktifitas off-farm yang mampu membangkitkan penghasilan bagi petani dengan berbasis kegiatan yang terkait usaha tani seperti wisata agro, industri rumah tangga berbahan baku hasil pertanian dan industri rumah tangga yang dapat menghasilkan peralatan pertanian sederhana. Dan untuk sektor perikanan yang menjadi rencana aksi adalah pembangunan sarana prasarana perbenihan dan pembudidayaan ikan serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan pembudidaya ikan.

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan

Berdasarkan arah kebijakan Tahun 2023 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan memperhatikan isu strategis dan permasalahan yang ada serta Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota, Maka Tema Tahun 2023, adalah:

“Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, Kualitas SDM, Serta Pemulihan Ekonomi”.

Dalam upaya mendukung tema pembangunan tersebut, maka Program prioritas pembangunan pada tahun 2023 diarahkan pada:

- 1). Pertumbuhan Pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi,
- 2). Pembangunan infrastruktur dan konektivitas,
- 3). Peningkatan kualitas SDM,
- 4). Mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran,
- 5). Meningkatkan pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DISTAKAN, sbb:

a. Tujuan

- a.1. Mewujudkan birokrasi dan aparatur yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi
- a.2. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- a.3. Meningkatkan modernisasi sarana pertanian serta penanganan pasca panen produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- a.4. Menurunkan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis.

b. Sasaran

- b.1. Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Tomohon.
- b.2. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian.
- b.3. Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan.
- b.4. Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan.

- b.5. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan.
- b.6. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan
- b.7. Meningkatnya infrastruktur Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Perikanan.
- b.8. Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan.
- b.9. Meningkatnya sarana ALSIN Pertanian/Perikanan.
- b.10 Menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis.
- b.11. Memperluas akses pasar domestik dan internasional

3.3 Program dan Kegiatan Serta Sub kegiatan

Dalam penentuan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perikanan dalam rangka pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berdasarkan beberapa factor yang menjadi pertimbangan terkait beberapa hal yang harus sinkron untuk pencapaian, adalah sebagai berikut:

- **Untuk Pencapaian** Visi dan Misi ke Empat (Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan) Kepala Daerah, adalah:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor / ATK
- 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- 1.4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu / MAMI
- 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5 **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.5.1 Pengadaan Mebel
- 1.6 **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BPJS & Kebersihan Kantor)
- 1.7 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan"
 - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Untuk Pencapaian Visi dan Misi ke Empat (Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan) Kepala Daerah, Pencapainya SDGs, serta Pengentasan Kemiskinan, adalah:

KEWENANGAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN

2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

2.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- 2.1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi"
- 2.1.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

2.2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

- 2.2.1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman"

2.3 Penyediaan Bneih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota lain

- 2.3.1 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain.

3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

3.1 Pengembangan Prasarana Pertanian

- 3.1.1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
- 3.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

3.2 Pembangunan Prasarana Pertanian

- 3.2.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- 3.2.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- 3.2.3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
- 3.2.4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

4.1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 4.1.1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

4.2 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota

- 4.2.1 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

4.3 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

- 4.3.1 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

5.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

- 5.1.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

6 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

6.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- 6.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- 6.1.2 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana P Penyuluhan Pertanian
- 6.1.3 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani.

KEWENANGAN URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

7 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

7.1 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

- 7.1.1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

7.2 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- 7.2.1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 7.2.2 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 7.2.3 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

8 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- 8.1 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

- 8.1.1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
- 8.1 **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- 8.1.1 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku usaha perikanan skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Rincian jumlah Program Kegiatan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon di Tahun 2023, terdiri dari: **8 Program; 21 Kegiatan; 52 Sub Kegiatan**. Adapun untuk penyebaran lokasi program disesuaikan dengan kawasan pengembangan masing masing komoditas yang ada dimasyarakat. Adanya ketidaksesuaian antara rumusan program dengan Rancangan Awal RKPD, antara lain disebabkan oleh Pembagian Pagu anggaran yang harus menyesuaikan dengan keadaan keuangan pemerintah Kota Tomohon. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan di Tahun 2023, yang dilengkapi dengan lokasi pelaksanaan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif, dapat dilihat pada **Tabel 3.3**, berikut ini:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									55,503,997				1,446,258,915	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									50,002,997				1,410,020,082	
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil									1,000				1,279,547,689	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/ Juta/ Ekor/ Tahun)	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah Pembudidaya Ikan Yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	6 Kelompok	1 Kegiatan	1,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/ Juta/ Ekor/ Ta hun)	94 Persen	1,279,547,689	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan									50,001,997				130,472,393	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/ Juta/ Ekor/ Tahun)	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	1 Dokumen	3 Kegiatan	1,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/ Juta/ Ekor/ Ta hun)	94 Persen	6,831,000	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/ Juta/ Ekor/ Tahun)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	1 Unit	3 Kegiatan	49,999,997	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/ Juta/ Ekor/ Ta hun)	94 Persen	67,650,000	
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/ Juta/ Ekor/ Tahun)	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	20 Orang	3 Kegiatan	1,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/ Juta/ Ekor/ Ta hun)	94 Persen	55,991,393	

3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								5,501,000					36,238,833
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil								5,500,000					11,713,532
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	5 Dokumen	1 Kegiatan	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan	94 Persen	11,713,532
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								1,000					24,525,301
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	5 Pelaku Usaha	1 Kegiatan	1,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan	94 Persen	24,525,301
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								14,588,972,003					26,264,052,884
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11,837,740,528					18,636,045,833
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,770,700					31,082,843
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	2 Dokumen	5 Kegiatan	2,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	7,524,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Dokumen	5 Kegiatan	2,760,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	6,655,000
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Dokumen	5 Kegiatan	2,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	7,418,543
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Laporan	5 Kegiatan	929,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	2,830,300
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Laporan	5 Kegiatan	2,640,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	6,655,000
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,095,056,908	15,889,972,505				
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	100 Orang/bulan	5 Kegiatan	10,170,976,008	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	14,810,806,505

3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Dokumen	5 Kegiatan	17,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	33,000,000
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	12 Dokumen	5 Kegiatan	900,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	1,038,180,000
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Laporan	5 Kegiatan	1,622,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	1,996,500

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Administrasi Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	18 Laporan	5 Kegiatan	4,928,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	5,989,500
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1,001,200			508,994,365		
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	128 Paket	2 Kegiatan	1,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	110,794,365
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Dokumen	2 Kegiatan	1,000,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	398,200,000
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								193,233,900			470,854,560		
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlag Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Paket	8 Kegiatan	5,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	6,655,000
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlag Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Paket	8 Kegiatan	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	19,965,000

3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlag Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Paket	8 Kegiatan	75,144,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	106,480,000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlag Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Paket	8 Kegiatan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	19,965,000
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlag Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	957 Dokumen	8 Kegiatan	6,594,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	7,986,000
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlag Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Laporan	8 Kegiatan	20,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	39,930,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlag Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Laporan	8 Kegiatan	51,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	263,218,560
3	27	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlag Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Dokumen	8 Kegiatan	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	6,655,000
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,000	64,420,400				
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	2 Unit	1 Kegiatan	1,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	64,420,400
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								337,675,620	416,316,835				
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Laporan	4 Kegiatan	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	13,310,000
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	3 Laporan	4 Kegiatan	90,185,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	58,564,000

3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	6 Laporan	4 Kegiatan	11,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	78,242,835
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	12 Laporan	4 Kegiatan	225,010,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	266,200,000
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								200,001,200					1,254,404,325
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	5 Unit	4 Kegiatan	199,998,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	243,100,000
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	2 Unit	4 Kegiatan	1,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	324,684,325

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang DiPelihara / Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Unit	4 Kegiatan	1,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	343,310,000	
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	1 Unit	4 Kegiatan	1,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 Persen	343,310,000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								1,921,311,270			5,912,091,210		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								819,906,600			1,613,200,246		
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sarana Pertanian yang digunakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	4 Laporan	2 Kegiatan	320,047,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	94 Persen	1,117,100,246	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Sarana Pertanian yang digunakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	1 Laporan	2 Kegiatan	499,858,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	94 Persen	496,100,000	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								1,101,404,540			4,188,990,787		

3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	5 VUB	1 Kegiatan	1,101,404,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	94 Persen	4,188,990,787
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain								130					109,900,177
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	50 Ekor	1 Kegiatan	130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	94 Persen	109,900,177
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								335,497,300					1,179,412,671
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian								299,994,300					734,290,823
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Prasarana Pertanian yang digunakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	1 Dokumen	2 Kegiatan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	94 Persen	230,786,600

Kode					Urusan / Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Prasarana Pertanian yang digunakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	4 Laporan	2 Kegiatan	149,994,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	94 Persen	503,504,223
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian								35,503,000				445,121,848	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UsahaTani	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Prasarana Pertanian yang digunakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	1 Unit	4 Kegiatan	1,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	94 Persen	177,474,000
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Prasarana Pertanian yang digunakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	1 Unit	4 Kegiatan	1,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	94 Persen	48,719,000
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Prasarana Pertanian yang digunakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	4 Unit	4 Kegiatan	35,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	94 Persen	119,103,848
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Prasarana Pertanian yang digunakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	1 Unit	4 Kegiatan	1,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	94 Persen	99,825,000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								79,421,700				135,675,997	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota								69,326,600				105,895,820	

3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam bidang Veteriner	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana PHM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	3 Laporan	94 Persen	69,326,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam bidang Veteriner	94 Persen	105,895,820
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								1,000					14,632,159
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam bidang Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	1 Laporan	1 Kegiatan	1,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam bidang Veteriner	94 Persen	14,632,159
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan								10,094,100					15,148,018
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam bidang Veteriner	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	3 Laporan	1 Kegiatan	10,094,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam bidang Veteriner	94 Persen	15,148,018
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								100,000,000					78,517,473

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							100,000,000				78,517,473		
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	10 Ha	1 Kegiatan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian	94 Persen	78,517,473	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							315,001,205				322,309,700		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							315,001,205				322,309,700		
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Prosentase Keberhasilan Pendampingan Kelompok Tani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	1 Unit	3 Kegiatan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Keberhasilan Pendampingan Kelompok Tani	94 Persen	119,790,000	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Prosentase Keberhasilan Pendampingan Kelompok Tani	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	1 Unit	3 Kegiatan	165,000,205	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Keberhasilan Pendampingan Kelompok Tani	94 Persen	110,660,000	
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Prosentase Keberhasilan Pendampingan Kelompok Tani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	44 Unit	3 Kegiatan	1,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Keberhasilan Pendampingan Kelompok Tani	94 Persen	91,859,700	
TOTAL													14,644,476,000				27,710,311,799	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke OPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan OPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra OPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, sebagaimana tabel Tabel.3.3.

4.2. Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2023

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4.2
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TOMOHON

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023	Sumber Dana
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	55,503,997	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	50,002,997	
3	25	04	2.0 2		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1,000	
3	25	04	2.0 2	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1,000	DAU
3	25	04	2.0 4		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	50,001,997	
3	25	04	2.0 4	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,000	DAU
3	25	04	2.0 4	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49,999,997	DAU
3	25	04	2.0 4	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1,000	DAU
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5,501,000	
3	25	06	2.0 1		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	5,500,000	
3	25	06	2.0 1	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,500,000	DAU
3	25	06	2.0 3		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1,000	
3	25	06	2.0 3	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,000	DAU
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	14,588,972,003	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,837,740,528	
3	27	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,770,700	
3	27	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,220,000	DAU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023	Sumber Dana
3	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,760,900	DAU
3	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2,220,000	DAU
3	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	929,400	DAU
3	2	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,640,400	DAU
3	2	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,095,056,908	
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,170,976,008	DAU
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17,030,000	DAU
3	2	0	2.0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	900,500,000	DAU
3	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,622,700	DAU
3	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,928,200	DAU
3	2	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,001,200	
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1,000	DAU
3	2	0	2.0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,000,200	DAU
3	2	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	193,233,900	
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,475,000	DAU
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,000,000	DAU
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75,144,000	DAU
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000	DAU
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6,594,900	DAU
3	2	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,020,000	DAU
3	2	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51,000,000	DAU
3	2	0	2.0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,000,000	DAU
3	2	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,000	
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	1,000	DAU
3	2	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337,675,620	
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,000,000	DAU
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,185,500	DAU

3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,480,000	DAU
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225,010,120	DAU
3	2	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	200,001,200	
7	1	9			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199,998,200	DAU
3	2	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,000	DAU
3	2	0	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,000	DAU
3	2	0	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,000	DAU
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,921,311,270	
7	2						
3	2	0	2.0		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	819,906,600	
7	2	1					
3	2	0	2.0	0	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	320,047,800	DAU
3	2	0	2.0	0	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	499,858,800	DAU
3	2	0	2.0		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1,101,404,540	
7	2	2					
3	2	0	2.0	0	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	1,101,404,540	DAU
3	2	0	2.0		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	130	
7	2	6					
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	130	DAU
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	335,497,300	
7	3						
3	2	0	2.0		Pengembangan Prasarana Pertanian	299,994,300	
7	3	1					
3	2	0	2.0	0	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	150,000,000	DAU
3	7	3	1	1			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
3	2	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	149,994,300	DAU
3	2	0	2.		Pembangunan Prasarana Pertanian	35,503,000	
7	3	02					
3	2	0	2.	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1,000	DAU
3	2	0	2.	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1,000	DAU
3	2	0	2.	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	35,500,000	DAU
3	7	3	02	8			

3	2	0	2.	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1,000	DAU
3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	79,421,700	
3	2	0	2.		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	69,326,600	
3	2	0	2.	0	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	69,326,600	DAU
3	2	0	2.		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,000	
3	2	0	2.	0	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	1,000	DAU
3	2	0	2.		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	10,094,100	
3	2	0	2.	0	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	10,094,100	DAU
3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100,000,000	
3	2	0	2.		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100,000,000	
3	2	0	2.	0	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100,000,000	DAU
3	2	0			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	315,001,205	
3	2	0	2.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	315,001,205	
3	2	0	2.	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	150,000,000	DAU
3	2	0	2.	0	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	165,000,205	DAU
3	2	0	2.	0	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	1,000	DAU
TOTAL						14,644,476,000	

BAB V

PENUTUP

5.4 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2023 merupakan landasan fundamental dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD. Selain itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2023 merupakan pengendali dan pengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian dan Perikanan tahun lalu dan sebagai acuan untuk kegiatan yang akan datang.

Undang-undang jangka Panjang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang- undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon harus selalu menjaga kualitas kinerja, karena hal tersebut akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah di Kota Tomohon. Dengan terselesainya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2023 ini, semoga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya masyarakat petani Kota Tomohon.

Ada Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan dan keterbatasan anggaran, adalah sebagai berikut:

- Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran “Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian,” adalah program yang ditujukan untuk mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan dengan cara memberi bantuan langsung kepada petani. Program tersebut adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Program-program tersebut merupakan program yang ditujukan untuk memberikan bantuan benih pertanian kepada petani, memberikan bantuan pinjam pakai alat pertanian kepada petani (alat yang digunakan sendiri atau alat yang dijalankan oleh operator dinas), Penyediaan bantuan pupuk kepada petani, tersedianya dokumen perda LP2B untuk membuka jalan tersedianya kembali Dana DAK pertanian di Kota Tomohon sesuai Visi dan Misi Walikota dan Wakil

Walikota Tomohon, khususnya Misi Ke Empat, yaitu: “Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan”.

- Adanya keterbatasan atau ketidak tersediaan anggaran untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, maka akan sangat berpengaruh langsung dalam proses penuntasan kemiskinan yang ada di Kota Tomohon
- Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja 2023 Dinas Pertanian dan Perikanan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.

5.5 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

- Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
- Dalam melaksanakan Rencana Kerja perlu adanya upaya keterlibatan masyarakat, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan

5.6 Rencana Tindak Lanjut

- Sehubungan dengan sebagian dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, diusulkan untuk dibiayai oleh Pemerintah Pusat dalam Dana Tugas Pembantuan (TP-APBN), maka perlu ditunjang dengan kesiapan proposal dan konsultasi untuk menindaklanjuti usulan pembiayaan melalui TP dan DAK tersebut.
- Dalam penyusunan KUA-PPAS sampai dalam APBD harus mengacu pada Rencana Kerja ini agar terciptanya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi serta capaian kinerja Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana dalam Prioritas Unggulan Walikota dan wakil Walikota Tomohon yang akan dituangkan dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021- 2026.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS PARIWISATA DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2023 merupakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Tomohon maupun dengan partisipasi masyarakat Kota Tomohon. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Tomohon.

Proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Tomohon ini didasarkan pada penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Perencanaan Pembangunan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan dengan memerhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pariwisata pada tahun sebelumnya. Rencana Kerja ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memerhatikan dan memuat prioritas pembangunan Kota Tomohon tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2023 dibahas dalam Forum Lintas Perangkat Daerah (FLPD) yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2023 merupakan perubahan dokumen rencana pembangunan tahun berjalan, yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2021-2026 sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kota Tomohon tahun 2021-2026. Rencana Kerja ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memerhatikan dan memuat prioritas daerah kota Tomohon tahun 2023 yang dirumuskan kedalam prioritas pembangunan kota Tomohon tahun 2023 dan pagu indikatif belanja pada Rencana Kerja tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA), yang disusun dengan pendekatan teknokratik dan partisipatif yang memerhatikan kepentingan yang terkait dalam pengembangan pariwisata di kota Tomohon.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Rencana Kerja, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon;
21. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon.
24. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang pariwisata, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Tomohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Tujuan:

1. Sebagai acuan Dinas Pariwisata Kota Tomohon dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tomohon tahun 2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Tomohon;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pariwisata Kota Tomohon selama tahun 2023;
3. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang pariwisata tahun 2023;
4. Untuk memadukan gerak antara pemerintah, pelaku pariwisata serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan di kota Tomohon.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2023 disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Standard Development Goals*). Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasannya. Memuat catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya adanya rumusan program dan kegiatan baru serta besaran pagu anggaran yang berbeda yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana program kegiatan serta pendanaan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Rencana Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon 2023.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pariwisata Kota Tomohon merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon, dilatarbelakangi oleh besarnya potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah baik melalui pengembangan infrastruktur serta sektor formal dan informal pendukung kepariwisataan di kota Tomohon. Kota Tomohon secara geografis dan sosiologis memiliki daya tarik pariwisata dengan karakter dan keunikan tersendiri dibandingkan kota lain di Indonesia. Kota Tomohon memiliki segenap potensi yang baik untuk dijadikan kota tujuan wisata. Walaupun tidak memiliki daya tarik wisata budaya yang menonjol seperti wilayah lain, namun kota ini mempunyai banyak keunggulan tersendiri, dengan kondisi lingkungan yang nyaman untuk berlibur, serta ketersediaan banyak fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan. Hal tersebut semakin menambah daya tarik Kota Tomohon sebagai destinasi wisata selain faktor-faktor yang telah terkenal dari dulu seperti kesejukan udara, ramah tamah penduduk, seni dan budaya yang menarik serta banyaknya tempat-tempat bersejarah. Potensi yang dimiliki Kota Tomohon seperti tersebut diatas akan memberikan nilai jual pariwisata yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menyelenggarakan program dan kegiatan juga mencakup pengembangan kepariwisataan baik obyek wisata alam, obyek wisata budaya, obyek wisata buatan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021, adalah seperti terdapat pada Tabel 2.1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah seperti terlihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Renja dan Renstra s/d tahun 2021 Dinas Pariwisata Kota Tomohon

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	15
			Target	Satuan		Jumlah		Target	Rp	Jumlah	Satuan	Rp	Jumlah	Satuan	Rp			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.857.266.505		1.777.704.864	100%	3.629.275.093	86%		3.117.699.388	101%		4.895.404.252	101%		Dinas Pariwisata Daerah
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				64.915.827		8.052.950	100%	6.274.600	73%		4.610.000	20%		12.662.950	20%		Dinas Pariwisata Daerah
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja perangkat daerah, Tersedianya dokumen Renstra	20	dokumen	36.138.805		2.188.200	100%	5.175.600	89%	dokumen	4.610.000	19%	dokumen	6.798.200	19%		Dinas Pariwisata Daerah
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LKIP	5	dokumen	7.749.410		1.487.250	100%	565.600	0%	dokumen	-	19%	dokumen	1.487.250	19%		Dinas Pariwisata Daerah
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi rencana kerja perangkat daerah. Tersedianya dokumen evaluasi renstra	45	dokumen	21.027.612		4.377.500	100%	533.400	0%	dokumen	-	21%	dokumen	4.377.500	21%		Dinas Pariwisata Daerah
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				581.400.352		238.258.250	100%	2.559.048.475	93%		2.390.328.373	452%		2.628.586.623	452%		Dinas Pariwisata Daerah
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS						100%	2.546.579.645	91%		2.315.178.373	0%		2.315.178.373	0%		Dinas Pariwisata Daerah
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen keuangan	5	dokumen	7.749.411		1.487.250	100%	1.696.100	0%	dokumen	-	19%	dokumen	1.487.250	19%		Dinas Pariwisata Daerah
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya jasa pengelola keuangan	65	orang	573.650.941		236.771.000	100%	10.772.730	698%	orang	75.150.000	54%	orang	311.921.000	54%		Dinas Pariwisata Daerah
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		-	100%	120.369.670	96%		115.650.000	#DIV/0!		115.650.000	0%		Dinas Pariwisata Daerah
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya seragam	40	pasang				100%	117.224.600	97%	pasang	113.770.000	0%	pasang	113.770.000	0%		Dinas Pariwisata Daerah
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti diklat	2	orang				100%	-	0%	orang	-	0%	orang	-	0%		Dinas Pariwisata Daerah
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	2	orang				100%	3.145.070	60%	orang	1.880.000	0%	orang	1.880.000	0%		Dinas Pariwisata

14	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.997.908.446	586.878.820	100%	215.440.500	55%		117.476.550	35%		704.355.370	35%		Daerah
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan	25	item	16.540.789	3.987.500	100%	-	0%	item	-	24%	item	3.987.500	24%		Dinas Pariwisata Daerah
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	45	unit	159.535.222	8.380.000	100%	-	0%	unit	-	5%	unit	8.380.000	5%		Dinas Pariwisata Daerah
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	125	unit	250.129.786	78.863.450	100%	54.467.500	74%	unit	40.115.550	48%	unit	118.979.000	48%		Dinas Pariwisata Daerah
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	50	bahan cetakan	249.123.610	110.861.750	100%	69.125.000	53%	bahan cetakan	36.300.000	59%	bahan cetakan	147.161.750	59%		Dinas Pariwisata Daerah
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	7200	eksemplar	20.951.835,00	7.200.000	100%	3.705.000	73%	eksemplar	2.700.000	47%	eksemplar	9.900.000	47%		Dinas Pariwisata Daerah
20	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	9800	orang	179.516.554	95.025.000	100%	48.553.000	52%	orang	25.039.400	67%	orang	120.064.400	67%		Dinas Pariwisata Daerah
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	288	kali	1.122.110.650	282.561.120	100%	39.590.000	34%	kali	13.321.600	26%	kali	295.882.720	26%		Dinas Pariwisata Daerah
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90.244.484	44.000.000	100%	23.697.700	100%		23.640.000	75%		67.640.000	75%		Dinas Pariwisata Daerah
23	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur	104	unit	90.244.484	44.000.000	100%	23.697.700	100%	unit	23.640.000	75%	unit	67.640.000	75%		Dinas Pariwisata Daerah
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.134.744.823	551.940.197	100%	494.751.348	68%		338.791.435	78%		890.731.632	78%		Dinas Pariwisata Daerah
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya surat menyurat dan benda pos lainnya	7200	surat	870.630.431	443.415.182	100%	451.500.000	73%	surat	330.427.285	89%	surat	773.842.467	89%		Dinas Pariwisata Daerah
26	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening	180	rekening	121.294.360	25.959.615	100%	17.172.928	49%	rekening	8.364.150	28%	rekening	34.323.765	28%		Dinas Pariwisata Daerah
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jaminan kecelakaan kerja dan JKM. Tersedianya jasa tenaga kebersihan	15	orang	142.820.032	82.565.400	100%	26.078.420	0%	orang	-	58%	orang	82.565.400	58%		Dinas Pariwisata Daerah
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				988.052.573	348.574.647	100%	209.692.800	61%		127.203.030	48%		475.777.677	48%		Dinas Pariwisata Daerah
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan perijinannya	36	unit	523.680.488	175.527.249	100%	116.490.000	69%	unit	80.561.030	49%	unit	256.088.279	49%		Dinas Pariwisata Daerah
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	50	unit	17.684.756	6.888.999	100%	1.385.800	58%	unit	800.000	43%	unit	7.688.999	43%		Dinas Pariwisata Daerah
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	5	rehab kantor	446.687.329	166.158.399	100%	91.817.000	50%	rehab kantor	45.842.000	47%	rehab kantor	212.000.399	47%		Dinas Pariwisata Daerah
32	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				13.210.215.715	8.344.528.278	100%	15.314.007.163	2%		312.997.937	66%		8.657.526.215	66%		Dinas Pariwisata

																	Daerah
33	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				128.079.800		21.315.500	100%	18.101.900	93%		16.850.000	30%		38.165.500	30%	Dinas Pariwisata Daerah
34	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi	4	dokumen	128.079.800		21.315.500	100%	18.101.900	93%	dokumen	16.850.000	30%	dokumen	38.165.500	30%	Dinas Pariwisata Daerah
35	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3.904.443.656		2.091.903.525	100%	1.080.812.888	15%		160.410.000	58%		2.252.313.525	58%	Dinas Pariwisata Daerah
36	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	18	sarana dan prasarana	3.904.443.656		2.091.903.525	100%	1.080.812.888	15%	sarana dan prasarana	160.410.000	58%	sarana dan prasarana	2.252.313.525	58%	Dinas Pariwisata Daerah
37	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				9.177.692.259		6.231.309.253	100%	14.215.092.375	1%		135.737.937	69%		6.367.047.190	69%	Dinas Pariwisata Daerah
38	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata yang dikelola	21	objek	8.767.036.793		5.957.434.253	100%	14.215.092.375	1%	objek	135.737.937	70%	objek	6.093.172.190	70%	Dinas Pariwisata Daerah
39	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan pengelolaan destinasi pariwisata	45, 60	Hotel, Rumah Makan	410.655.466		273.875.000	100%	-	0%	Hotel, Rumah Makan	-	67%	Hotel, Rumah Makan	273.875.000	67%	Dinas Pariwisata Daerah
40	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				20.617.112.289		3.582.068.353	100%	490.546.900	13%		61.522.000	18%		3.643.590.353	18%	Dinas Pariwisata Daerah
41	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				20.617.112.289		3.582.068.353	100%	490.546.900	13%		61.522.000	18%		3.643.590.353	18%	Dinas Pariwisata Daerah
42	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya	22	kegiatan	5.586.053.572		878.173.703	100%	151.500.000	0%	kegiatan	-	16%	kegiatan	878.173.703	16%	Dinas Pariwisata Daerah
43	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan HUT Kota, HUT Provinsi dan Hari Kemerdekaan RI, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam kegiatan Christmas for All, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam pelaksanaan Pameran TIFF, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam Pemilihan Kontes Ratu Bunga, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam Pemilihan Nyong Noni SULUT, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam Pemilihan Putra Putri Tomohon, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam Tournament of Flower, Terlaksananya promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri.	45,20,150	pasang, kegiatan, stand	15.031.058.717		2.703.894.650	100%	339.046.900	18%	pasang, kegiatan, stand	61.522.000	18%	pasang, kegiatan, stand	2.765.416.650	18%	Dinas Pariwisata Daerah
44	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				655.631.338		319.308.000	100%	9.470.000	36%		3.450.000	49%		322.758.000	49%	Dinas Pariwisata Daerah
45	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				655.631.338		319.308.000	100%	9.470.000	36%		3.450.000	49%		322.758.000	49%	Dinas Pariwisata Daerah
46	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	1 kegiatan pelatihan	470	pelaku pariwisata	238.667.036		155.885.000	100%	-	0%	pelaku pariwisata	-	65%	pelaku pariwisata	155.885.000	65%	Dinas Pariwisata

	Dasar																Daerah
47	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	2 kegiatan	5	kegiatan	180.000.000		114.874.000	100%	8.450.000	41%	kegiatan	3.450.000	66%	kegiatan	118.324.000	66%	Dinas Pariwisata Daerah
48	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		5	dokumen	236.964.302		48.549.000	100%	1.020.000	0%	dokumen	-	20%	dokumen	48.549.000	20%	

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.467.500,00	0,28	98,52	53.664.100,00	98,52	0,27	0,27	803.400,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.125.000,00	0,35	92,70	64.079.050,00	92,70	0,33	0,33	5.045.950,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.705.000,00	0,02	97,17	3.600.000,00	97,17	0,02	0,02	105.000,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.553.000,00	0,25	99,95	48.529.000,00	99,95	0,25	0,25	24.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.590.000,00	0,20	98,13	38.851.600,00	98,13	0,20	0,20	738.400,00
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.697.700,00	0,12	99,76	23.640.000,00	99,76	0,12	0,12	57.700,00
1	Pengadaan Mebel	23.697.700,00	0,12	99,76	23.640.000,00	99,76	0,12	0,12	57.700,00
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.751.348,00	2,53	79,10	411.328.485,00	83,14	2,11	2,11	83.422.863,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	451.500.000,00	2,31	83,34	376.273.285,00	83,34	1,93	1,93	75.226.715,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	17.172.928,00	0,09	57,20	9.822.700,00	57,20	0,05	0,05	7.350.228,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.078.420,00	0,13	96,76	25.232.500,00	96,76	0,13	0,13	845.920,00
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.692.800,00	1,07	97,72	202.243.030,00	96,45	1,04	1,04	7.449.770,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.490.000,00	0,60	93,72	109.179.030,00	93,72	0,56	0,56	7.310.970,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.385.800,00	0,01	99,58	1.380.000,00	99,58	0,01	0,01	5.800,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.817.000,00	0,47	99,86	91.684.000,00	99,86	0,47	0,47	133.000,00
II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	15.314.007.163,00	78,37	52,91	1.328.681.228,00	8,68	6,80	6,80	13.985.325.935,00
A	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	18.101.900,00	0,09	98,66	17.860.000,00	98,66	0,09	0,09	241.900,00
1	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	18.101.900,00	0,09	98,66	17.860.000,00	98,66	0,09	0,09	241.900,00
B	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.080.812.888,00	5,53	57,64	622.946.053,00	57,64	3,19	3,19	457.866.835,00
1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.080.812.888,00	5,53	57,64	622.946.053,00	57,64	3,19	3,19	457.866.835,00

C	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	14.215.092.375,00	72,75	2,42	687.875.175,00	4,84	3,52	3,52	13.527.217.200,00
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	14.215.092.375,00	72,75	4,84	687.875.175,00	4,84	3,52	3,52	13.527.217.200,00
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	490.546.900,00	2,51	99,70	484.322.000,00	98,73	2,48	2,48	6.224.900,00
A	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	490.546.900,00	2,51	99,70	484.322.000,00	98,73	2,48	2,48	6.224.900,00
1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	151.500.000,00	0,78	99,70	151.049.000,00	99,70	0,77	0,77	451.000,00
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	339.046.900,00	1,74	98,30	333.273.000,00	98,30	1,71	1,71	5.773.900,00
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	9.470.000,00	0,05	0,00	8.450.000,00	89,23	0,04	0,04	1.020.000,00
A	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	9.470.000,00	0,05	0,00	8.450.000,00	89,23	0,04	0,04	1.020.000,00
1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	8.450.000,00	0,04	100,00	8.450.000,00	100,00	0,04	0,04	0,00
3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	1.020.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Total		19.540.251.156,00	100,00	27,05	5.286.565.566,00	27,05	27,05	27,05	14.253.685.590,00

Berdasarkan capaian diatas dapat dilihat bahwa diakhir tahun 2021, ada anggaran yang tersisa yaitu sebesar Rp.14.253.685.590,-. Itu dikarenakan capaian pelaksanaan kegiatan untuk dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum terlaksana secara menyeluruh. Dari 9 kegiatan yang direncanakan, baru terlaksana 3 kegiatan. Namun hal tersebut tidak secara langsung mengurangi tingkat keberhasilan pencapaian kinerja ditahun 2021, karena pelaksanaan PEN berlaku tahun jamak dan akan diselesaikan ditahun selanjutnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kota Tomohon sudah baik, meskipun terlihat capaian kinerja keberhasilan hanya 27,05% dikarenakan pemanfaatan dana PEN yang belum selesai. Namun pada pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencananya.

B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

- a) *Pandemic Covid-19* yang berdampak pada menurunnya tingkat kunjungan wisatawan;
- b) Jumlah dan kompetensi SDM yang belum sesuai dengan analisa kebutuhan jabatan yang ada;
- c) Masih banyak daya tarik wisata dan fasilitas pendukung yang belum berkualitas/berstandar pelayanan prima;
- d) Kuantitas sarana prasarana (parkiran, toilet, pedestrian, dll) pendukung pariwisata yang belum tersedia atau belum memadai;
- e) Belum optimalnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun luar negeri;
- f) Terbatasnya promosi dan pemasaran pariwisata ke daerah/negara yang potensial bagi kunjungan wisatawan ke Kota Tomohon;
- g) Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai media promosi dan informasi pariwisata, sebagai salah satu strategi pemasaran pariwisata Kota Tomohon;
- h) Belum memadainya kualitas (profesionalisme) SDM pengelola daya tarik wisata, sarana pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya;
- i) Kelembagaan pariwisata yang terkelola dengan baik dan berkelanjutan belum optimal, terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatan;
- j) Belum optimalnya sinergi antar instansi (PD) yang menangani sektor pariwisata secara holistik di Kota Tomohon;
- k) Belum optimalnya relasi/kerjasama antar pelaku ekonomi kreatif (komunitas/masyarakat) di wilayah dengan para pelaku jasa usaha pariwisata (hotel, restoran, dsb.) yang ada di Kota Tomohon, sehingga peningkatan perekonomian sebagai dampak berkembangnya sektor pariwisata belum dirasakan sepenuhnya oleh warga Kota Tomohon;

C. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Visi Walikota dan Wakil Walikota adalah:

“Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera”

Dengan Misi:

1. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor;
3. Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia;

4. Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan;
5. Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih, efektif dan berintegritas.

Dinas Pariwisata Kota Tomohon dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon adalah dengan melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan sistem dan prosedur, sarana prasarana, profesionalisme serta melakukan inovasi-inovasi baru dalam rangka memperkuat dan mengembangkan keterpaduan Kota Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia.

Adapun bentuk konkrit yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan promosi dan pemasaran bersama *stakeholder* pariwisata Kota Tomohon;
2. Menjalin kerjasama saling menguntungkan di sektor pariwisata dengan daerah-daerah potensial di luar Kota Tomohon;
3. Meningkatkan kualitas layanan usaha jasa dan SDM pariwisata yang tersertifikasi;
4. Mengembangkan dan meningkatkan sadar wisata baik pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata dan masyarakat;
5. Mengembangkan dan menyelenggarakan *event-event* atraksi pariwisata berbasis budaya;
6. Menumbuhkembangkan potensi pelaku ekonomi kreatif guna mendukung sektor pariwisata;
7. Melakukan pengelolaan dan pengembangan destinasi dan *event* wisata unggulan di Kota Tomohon.

D. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

a. Tantangan

- i. Kuantitas dan kualitas SDM kedinasan yang kurang sesuai dengan *load factor activity*, mengakibatkan kurang optimalnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;
- ii. Perangkat regulasi teknis yang komprehensif terkait dengan pengawasan dan pembinaan usaha kepariwisataan;
- iii. Sadar wisata di lingkungan aparatur pemerintah kota, pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata dan masyarakat perlu diperkuat;
- iv. *Database* pariwisata belum diperbaharui secara optimal serta memanfaatkan sistem/teknologi informasi yang mendukung aktualisasi data dan pengambilan keputusan/kebijakan;
- v. Belum optimalnya *Tourist Information Center* (TIC) di Kota Tomohon.
- vi. Bahan promosi yang terbatas, dan kurang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat/wisatawan;
- vii. Belum maksimalnya kualitas layanan akomodasi hotel (khususnya non bintang) di Kota Tomohon.
- viii. *Website* (situs) Dinas Pariwisata belum terkelola dengan optimal sebagai media informasi dan promosi pariwisata yang terpercaya;
- ix. Belum dikembangkannya *special interest tourism* secara maksimal, dan mengintegrasikannya dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis budaya.

- x. Membangun dan mempertahankan citra Kota Tomohon sebagai Kota Pariwisata yang nyaman dan aman bagi wisatawan.
- b. Peluang
 - i. Kota Tomohon telah dikenal sebagai Kota Pariwisata di level nasional dan internasional;
 - ii. Adanya otonomi daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan kreasi di bidang pariwisata;
 - iii. Suasana yang relatif kondusif jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di tanah air;
 - iv. Berkembang beberapa program informasi promosi wisata di televisi maupun media cetak lainnya, seperti koran dan tabloid.
 - v. Masuknya Tomohon dalam *directory* pariwisata di level internasional sebagai salah satu daerah yang layak dikunjungi;
 - vi. Kebijakan pariwisata dilevel nasional yang mendorong pengembangan potensi wisata budaya;
 - vii. Pengembangan daya tarik baru pariwisata di Kota Tomohon bagian Selatan dan Timur, sehingga bisa mengangkat potensi pariwisata dan perekonomian di wilayah tersebut.
 - viii. Fasilitas dan amenities pariwisata yang tersedia di Kota Tomohon sudah cukup memadai bagi para wisatawan.
- E. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

 - 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - 2. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - 3. Program pemasaran pariwisata;
 - 4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2023 yang disampaikan, telah dicermati oleh Dinas Pariwisata khususnya BAB IV dan BAB V yang menjelaskan keterkaitan sasaran dinas dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan pendanaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan. Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 seperti terdapat dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal dan Proyeksi Maju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								7,718,648,000				8,941,500,000	
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,393,648,008				4,996,500,000	
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								30,800,000				24,000,000	
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen		22,042,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,000,000
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan		4,457,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan		4,300,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,710,727,848				3,183,000,000	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	an	2,583,890,548	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,050,000,000

3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan		1,733,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,000,000
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD				12 Laporan		125,104,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				130,000,000
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								99,231,300					80,000,000
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket		77,481,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,000,000
3	26	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				2 Orang		21,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								360,391,900					449,500,000
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8 buah		104,845,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,000,000
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				20 buah		38,643,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000

3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket		72,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				85,000,000
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan				1440 eksemplar		8,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,500,000
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan		31,012,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				65,000,000
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan		105,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,108,179,360					1,150,000,000
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		17,178,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		1,091,000,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,100,000,000
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								84,317,600					110,000,000
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit		79,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000

3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit		5,117,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								999,999,992					1,175,000,000
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								12,203,500					15,000,000
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi				12 dokumen		12,203,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								372,176,300					1,010,000,000
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Unit		372,176,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,010,000,000
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								615,620,192					150,000,000
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi		562,593,442	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,000,000
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah pelatihan pengelolaan destinasi pariwisata				1 Pelatihan		53,026,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								2,000,000,000					2,610,000,000
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								2,000,000,000					2,610,000,000
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah materi promosi yang tersedia				2 materi		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000

3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Laporan		1,965,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,500,000,000
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								325,000,000					160,000,000
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								325,000,000					160,000,000
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				50 Orang		125,081,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				50 Orang		90,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				50 Orang		109,352,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
TOTAL													7,718,648,000					8,941,500,000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kita ketahui bahwa sektor pariwisata adalah salah satu penyumbang devisa terbesar negara ini. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan untuk menggerakkan ekonomi seluruh masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan yang berkesinambungan. Selain daripada itu, prioritas nasional yang tertuang dalam nawacita khususnya cita ke-7 “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, sejalan dengan prioritas Kota Tomohon yakni mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan pariwisata menjadi instrumen penting dalam pencapaian salah satu prioritas kebijakan nasional.

Dinas Pariwisata Kota Tomohon sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, menjalankan program dan kegiatan guna mengembangkan pariwisata Kota Tomohon untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA

3.2.1. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata tahun 2023 adalah untuk:

- a. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2021-2026;
- b. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Tomohon;
- c. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program/kegiatan Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2023.

3.2.2. Sasaran

Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Tomohon untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata yang didukung sarana dan prasarana pariwisata yang aman dan nyaman dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan, juga sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Pariwisata.

3.3. Program dan Kegiatan

- A. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dengan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, terfokus pada misi ke tiga, yaitu: **“Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia”**.
- Target pencapaian SDGs, Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan untuk Mempromosikan Pariwisata Berkelanjutan yang Menciptakan Lapangan Kerja dan Mempromosikan Budaya dan Produk Lokal.
- Pengembangan Tomohon sebagai Kota Bunga secara progresif yang berorientasi pada pengembangan Kota Hijau yang natural, pengembangan aktivitas agrikultur dan agroindustri yang bernilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan, dan pembangunan dan pengembangan ekowisata di Kota Tomohon yang berbasis masyarakat dan keunggulan budaya lokal yang telah dikenal dan melekat dengan Kota Tomohon. Penyelenggaraan pembangunan Kota Tomohon dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Tomohon akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada.

B. Uraian

Sebagaimana telah dirumuskan, terdapat 4 Program, 11 Kegiatan, dan 27 Sub Kegiatan, yang diuraikan dibawah ini :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah:
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - d) Administasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata :
- a) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - 1) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Kabupaten/Kota;
 - b) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 1) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - c) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
 - 1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
3. Program pemasaran pariwisata :
- a) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
 - 1) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;
 - 2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota;
4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif:
- a) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
 - 1) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
 - 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
 - 3) Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar.

3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	27 Orang/bul	an ³ Sub Kegiatan	2,583,890,548	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	1 Laporan	3 Sub Kegiatan	1,733,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	anTerlaksananya kegiatan andministrasi keuangan perangkat daerah ran		100 %	18 Laporan	3 Sub Kegiatan	125,104,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								99,231,300	
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 % 2 kegiatan 3 kegiatan	40 Paket	2 Sub kegiatan	77,481,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	26	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 % 2 kegiatan 3 kegiatan	2 Orang	2 Sub kegiatan	21,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								360,391,900	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100 % 7 kegiatan 9 kegiatan	1 Paket	6 Sub kegiatan	104,845,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100 % 7 kegiatan 9 kegiatan	1 Paket	6 Sub kegiatan	38,643,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100 % 7 kegiatan 9 kegiatan	1 Paket	6 Sub kegiatan	72,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100 % 7 kegiatan 9 kegiatan	1440 Dokume	n6 Sub kegiatan	8,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100 % 7 kegiatan 9 kegiatan	12 Laporan	6 Sub kegiatan	31,012,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100 % 7 kegiatan 9 kegiatan	24 Laporan	6 Sub kegiatan	105,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,108,179,360	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan penyediaan jasa penjunagan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 % 2 kegiatan	12 Laporan	2 Sub kegiatan	17,178,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan penyediaan jasa penjunangan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 % 2 kegiatan	12 Laporan	2 Sub kegiatan	1,091,000,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								84,317,600	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 % 2 kegiatan	7 Unit	2 Sub kegiatan	79,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 % 2 kegiatan	5 Unit	2 Sub kegiatan	5,117,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								1,299,999,992	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								12,203,500	
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	Terlaksananya pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota		12 dokumen 3 obyek	12 dokumen	1 Sub kegiatan	12,203,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								672,176,300	
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota		3 obyek	5 Unit	1 Sub kegiatan	672,176,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								615,620,192	

3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tercapainya jumlah obyek yang dikelola dan tercapainya jumlah pelatihan pengelolaan destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		3 obyek 2 kegiatan	1 Lokasi	3 kegiatan	562,593,442	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tercapainya jumlah obyek yang dikelola dan tercapainya jumlah pelatihan pengelolaan destinasi pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		3 obyek 2 kegiatan	1 Laporan	3 kegiatan	53,026,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								2,000,000,000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								2,000,000,000	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dan terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		92 % 2 kegiatan	2 Dokumen	680583 wisat	awan 35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dan terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		92 % 2 kegiatan	1 Laporan	680583 wisat	awan 1,965,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								325,000,000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								325,000,000	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Persentase tenaga kerja disektor pariwisata yang disertifikasi		100 %	50 Orang	100 %	125,081,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase tenaga kerja disektor pariwisata yang disertifikasi		100 %	50 Orang	100 %	90,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Persentase tenaga kerja disektor pariwisata yang disertifikasi		100 %	50 Orang	100 %	109,352,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL													8,018,648,000	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang telah dirumuskan Dinas Pariwisata dituangkan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Renja dan Anggaran 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023	
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8,018,648,000	
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,393,648,008	
3	26	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,800,000	
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,042,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,457,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,300,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,710,727,848	
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,583,890,548	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,733,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	125,104,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,231,300	
3	26	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	77,481,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	360,391,900	

3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104,845,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,643,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	8,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31,012,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,108,179,360	
3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,178,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,091,000,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84,317,600	
3	26	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,117,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,299,999,992	
3	26	2	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12,203,500	
3	26	2	2.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12,203,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	2	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	672,176,300	
3	26	2	2.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	672,176,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	615,620,192	
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	562,593,442	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	53,026,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2,000,000,000	
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2,000,000,000	
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	awan 35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	awan 1,965,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	325,000,000	
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	325,000,000	
3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	125,081,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	90,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	5	2.01	3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	109,352,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL						8,018,648,000	

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja tahun 2023 ini memuat kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun lebih rinci dan telah disesuaikan pada peraturan yang berlaku, agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan serta tepat guna dimasa pandemi ini. Dengan adanya keterbatasan anggaran, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat secara maksimal dilaksanakan, sehingga diharapkan kedepannya bisa terakomodir sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2023, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Tomohon. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kota Tomohon.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Pariwisata tahun 2023 harus dapat berfungsi sebagai;

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2023 baik dalam lingkup program maupun kegiatan;
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Pariwisata untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama;
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

5.3 Rencana Tindaklanjut

Dengan adanya Rencana Kerja ini, Dinas Pariwisata akan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan penganggaran yang ada.

Selain itu, peran serta maksimal dari seluruh *stakeholder* pariwisata dalam rangka penyusunan rencana kerja ini, tetap mutlak diperlukan sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon 2023 disusun dengan tetap merujuk kepada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon selaku unit kerja yang bertanggung jawab dalam pembinaan Sektor Perdagangan dan Industri, menyusun Renja Tahunan yang proporsional dan terukur, dengan menentukan jenjang tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi; mulai dari pelaksana dan eselon IV yang bertanggung jawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III yang bertanggung jawab pada program, serta eselon II yang bertanggung jawab pada kebijakan strategis lembaga yang dipimpinnya, yang telah melalui Proses Perencanaan baik di Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian dan Sekretariat, melalui rapat rapat internal bidang dan Rapat Dinas dan telah melalui Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

1. penyusunan rancangan
2. rancangan akhir; dan
3. penetapan.

Komponen Renja Tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun, disamping sebagai wujud implementasi dari

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan juga untuk menunjang Visi – Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon “**TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA**” pada Tahun Anggaran 2022 ini, lebih menitik beratkan pada pemulihan Ekonomi, dan juga telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Kementerian Perdagangan dengan visi “**Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”, Serta misi Kementerian Perindustrian yakni “**Meningkatnya Peran Sektor Industri Dalam Perekonomian Nasional**”, tak lupa juga untuk menopang Visi Provinsi Sulawesi Utara yaitu “**Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik**”, yang pada umumnya, menitik beratkan pada Pemulihan Ekonomi Nasional setelah Pandemi Covid-19 terutama bagi masyarakat Kota Tomohon. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2108 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
- l. Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Perdagangan RI. Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;
- r. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- s. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27);
- t. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menyusun RKA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon.

Adapun Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program/kegiatan /Sub Kegiatan pada tahun 2023;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon Tahun 2023, dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menyusun RKA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon pada Tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program/kegiatan /Sub Kegiatan pada tahun 2023;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
KOTA TOMOHON TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon
- 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
KOTA TOMOHON TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Dinas

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja .

Indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri dari:

- **Urusan Perdagangan:**
 1. Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai dengan ketentuan (IUP/SIUP pusat perbelanjaan DAN IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan);
 2. Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya;
 3. Koefisien Variasi Harga Bapok Antar Waktu;
 4. Cakupan Pengembangan Ekspor;
 5. Persentase UTTP Bertanda Tera Sah dan Berlaku;
 6. Cakupan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 7. CAKUPAN PENUNJANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
- **Urusan Perindustrian:**
 1. Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP;
 2. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait;
 3. Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon di Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut:

- 1. *Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)***
 - a. Target capaian Indikator Tahun 2021 ditetapkan 50,7 % sedangkan capaian realisasi adalah sebesar 77,50%. Dari capaian realisasi target yang ada dapat dihitung bahwa kinerja realisasi sebesar 152,86%. Realisasi terhadap indikator diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{c} \text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin} \\ \text{Sesuai ketentuan} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota} \end{array}} \times 100\%$$
$$\frac{31}{40} \times 100\% = 77,50\%$$

Di Kota Tomohon terdapat 40 Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan yang tersebar di setiap Kecamatan. Dari data yang ada hanya terdapat 31 Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan yang memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku. Data ini diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- b. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir, tidak bisa ditemukan data pembanding disebabkan karena program perizinan dan pendaftaran perusahaan merupakan program baru yang baru muncul pada program kegiatan sejak tahun 2021.
- c. Bila melihat realisasi kinerja tahun 2021 mencapai 77,50% dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 80%, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon cukup yakin bahwa target tersebut akan tercapai.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Alternatif yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Target ini dapat tercapai karena didukung oleh program dan kegiatan yang menopang pencapaian target yang ditetapkan, melalui Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dimana telah diikuti oleh pelaku usaha yang bertanggung jawab atas 30 Toko Swalayan di Kota Tomohon, juga melalui Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang yang diikuti oleh pemilik/penanggung jawab 5 Gudang yang ada di Kota Tomohon. Ditopang juga semua perizinan di bidang perdagangan sudah terintegrasi melalui OSS RBA sehingga lebih memudahkan pelaku usaha untuk melakukan pengurusan perijinan dibidang perdagangan.

Pada prakteknya OSS Berbasis Risiko yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP Kota Tomohon masih memiliki kendala terhadap penerbitan Tanda Daftar Gudang, sesuai dengan penyampaian pemilik gudang yang melakukan pendaftaran TDG dan juga hasil koordinasi/klarifikasi dengan DPMPSTSP Kota Tomohon bahwa ketika mengakses OSS RBA hanya akan sampai pada tahapan penerbitan NIB karena usaha tersebut memiliki resiko rendah. Hal ini tentu saja agak bertentangan dengan apa yang disampaikan Direktur Sarana Distribusi Dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan telah mengirimkan surat nomor 815/PDN.3/SD/11/2021, tertanggal 16 November 2021 tentang Informasi Terkait Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG).

Semoga kendala yang timbul dalam Penerbitan Tanda Daftar Gudang melalui OSS RBA akan segera teratasi sambil menunggu pemilik gudang menyiapkan dua persyaratan yang seringkali belum dimiliki dalam penerbitan TDG seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF). Sebagai solusi awal pemilik gudang mengurus penerbitan NIB dengan KBLI pergudangan (contoh terlampir) melalui OSS RBA.

Dengan tersosialisasinya regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang yang mengatur penerbitan Tanda Daftar Gudang dan Sanksinya maka pemilik gudang sudah mengetahui hak dan kewajiban pemilik gudang dalam menjalankan usahanya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon telah siap memfasilitasi pemenuhan persyaratan/komitmen bagi pemilik gudang yang berada di Kota Tomohon melalui akun tim teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon pada aplikasi OSS Berbasis Risiko (OSS RBA).

Pada Bulan Januari 2022 telah ditemukan solusi atas kendala penerbitan TDG melalui OSS RBA yaitu setelah pelaku usaha mendaftarkan usaha melalui OSS RBA untuk memperoleh NIB harus dilanjutkan melalui menu PBUMKU dalam aplikasi OSS RBA untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang.



Gambar 1. Sosialisasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan



Gambar 2. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

2. **Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya.**

- d. Target capaian Indikator Tahun 2021 ditetapkan 100% sedangkan capaian realisasi adalah sebesar 100%. Dari capaian realisasi target yang ada dapat dihitung bahwa kinerja realisasi sebesar 100%. Realisasi terhadap indikator diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$K = (a+b) \times 100\%$$

K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya

a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0,5)

b = Sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0,5)

$$K = (0,5+0,5) \times 100\%$$

$$K = 100\%$$

Persentase tersebut dapat diperoleh karena pengelolaan Pasar Beriman Wilken Tomohon berada dalam kendali PD Pasar yang selalu berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Tomohon.

- a. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir, capaian selalu 100% dikarenakan hanya ada satu pasar yang berperan sebagai Pasar Induk Di Kota Tomohon yaitu Pasar Beriman Wilken.
- b. Bila melihat realisasi kinerja tahun 2021 mencapai 100% dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100%, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon yakin bahwa target tersebut akan tercapai.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Alternatif yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Target capaian Indikator Tahun 2021 ditetapkan 100 % dapat tercapai karena hanya ada satu pasar yang berperan sebagai Pasar Induk Di Kota Tomohon yaitu Pasar Beriman Wilken dan pengelolaan Pasar Beriman Wilken Tomohon berada dalam tanggung jawab PD Pasar yang selalu berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Tomohon. Hambatan yang sering ditemui dalam pengembangan dan pengelolaan pasar adalah masalah pendanaan yang selalu bergantung pada dana APBN melalui dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan, dana tugas pembantuan hanya diperuntukkan bagi pembangunan Pasar Baru ataupun Revitalisasi Pasar, sedangkan salah satu hal yang dibutuhkan adalah biaya perawatan atas fasilitas bangunan pasar.

Sebagai solusi awal untuk maintenance/perawatan bangunan pasar adalah anggaran pengecatan Bangunan pasar yang sudah tertata dalam APBD 2022 melalui DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon.

3. Koefisien variasi harga BAPOK antar waktu.

- e. Target capaian Indikator Tahun 2021 ditetapkan 8,43 % sedangkan capaian realisasi adalah sebesar 6,90%. Capaian ini diperoleh dari penjumlahan KV beras sebesar 1,80%, KV Gula Kristal Putih 2,63%, KV Telur 10,35 %, KV Minyak Goreng 12,83% kemudian dibagi empat memperoleh hasil sebesar 6,90%. Dari capaian realisasi target yang ada dapat dihitung bahwa kinerja realisasi sebesar 122,17%. Realisasi terhadap indikator diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$KV = \frac{S}{X} \times 100\%$$

KV = Koefisien variasi harga bapak antar waktu

S = Standar deviasi harga bapak

X = Harga rata-rata bapak

$$\begin{aligned} KV \text{ Beras} &= \frac{21.2.862}{11.854,58} \times 100\% \\ &= 1,80\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} KV \text{ Gula Kristal Putih} &= \frac{358.097}{13.601,33} \times 100\% \\ &= 2,63\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} KV \text{ Minyak Goreng} &= \frac{2.055.957}{16.028,42} \times 100\% \\ &= 12,83\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} KV \text{ Telur} &= \frac{190,54}{1.841,75} \times 100\% \\ &= 10,35\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} KV \text{ rata-rata Bapak} &= \frac{1,80+2,63+12,83+1,35}{4} \\ &= 6,903\% \end{aligned}$$

Data tersebut berdasarkan data olahan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon. Semakin kecil nilai koefisien variasi dari target yang ditetapkan berarti tujuan yang diinginkan tercapai yaitu terjaganya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Karena apabila angka realisasi yang dicapai melebihi nilai target yang ditetapkan berarti terjadi gejolak harga yang cukup fluktuatif. Bisa diambil kesimpulan bahwa semakin besar nilai koefisien variasi harga BAPOK antar waktu maka semakin besar fluktuasi harga dalam artian harga tidak stabil, semakin kecil nilai koefisien harga berarti semakin stabil harga BAPOK.

- a. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir, tidak bisa ditemukan data pembanding disebabkan karena indikator variasi harga bapak antar waktu merupakan indikator yang baru mulai dihitung sejak tahun 2021. Tetapi untuk capaian tahun 2020 dapat dihitung melalui

data harga Bapok tahun 2020 yang ada di dapati hasil sebesar 8,43. Hal ini menunjukkan capaian 6,90% lebih kecil dari capaian tahun 2020 yaitu sebesar 8,43%.

- b. Bila melihat realisasi kinerja tahun 2021 mencapai 6,90% dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 7,80%, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon cukup yakin bahwa target tersebut akan tercapai.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Alternatif yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Target capaian Indikator Tahun 2021 ditetapkan 8,43 % sedangkan capaian realisasi adalah sebesar 6,90%. Hal itu dapat tercapai karena selang Bulan Januari hingga Desember 2021, secara kontinu pada setiap hari kerja minggu berjalan dilakukan monitoring harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting). Hal ini maksudkan agar apabila terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan/dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat maka pemerintah dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan yang tepat untuk mengatasi hal dimaksud seperti operasi pasar dalam bentuk pasar murah atau kebijakan intervensi pasar lainnya. Lonjakan harga yang terjadi khususnya komoditi minyak goreng dapat distabilisasi melalui kegiatan pasar murah yang dilaksanakan di tiga titik lokasi di Kota Tomohon.

Pencapaian target ini ditunjang oleh Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota. Kegiatan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah sebuah bukti akan keseriusan Pemerintah Kota Tomohon khususnya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon untuk mengawasi pergerakan arus perdagangan komoditas strategis di Kota Tomohon, Kegiatan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) bertujuan untuk :

1. Menyediakan informasi yang akurat dan reliabel tentang komoditi bahan pokok yang menjadi fokus monitoring untuk dianalisis lebih lanjut menjadi rekomendasi pengambilan keputusan bagi para pembuat kebijakan. Informasi yang akurat dan reliabel terutama pada data primer harga. Informasi harga akan disediakan adalah dalam periode harian untuk level konsumen, dimana proses updating harga tersebut dilakukan di Pasar Beriman Kota Tomohon dan tempat usaha lainnya di Kota Tomohon oleh Petugas Pemantau Harga.
2. Memberikan notifikasi (alert) kepada pemangku kepentingan, jika terdeteksi perilaku data yang dapat mengindikasikan terjadinya ketidakstabilan/lonjakan harga dan peningkatan disparitas harga bahan pokok antar wilayah, kelangkaan pasokan, atau kekurangan stok. Pengembangan aplikasi pemantauan harga pasar akan dilakukan dengan

membangun suatu model deteksi dini terhadap perkembangan harga tingkat Kota (pembuatan aplikasi sementara dikoordinasikan dengan Diskominfo Kota Tomohon), serta titik-titik sumber permasalahan. Hasil deteksi dini ini akan disampaikan kepada pengambil kebijakan melalui notifikasi (alert) kepada pengambil keputusan.

3. Menyediakan alternatif skenario penyelesaian masalah yang dapat diimplementasikan di lapangan jika terjadi krisis/masalah bahan pokok. Selain menyediakan model deteksi dini, pekerjaan ini juga akan membangun model-model analisis sistem (logistik dan distribusi). Model-model analisis sistem ini akan memberikan saran-saran intervensi bagi pengambil kebijakan harga. Namun demikian analisis yang lebih mendalam dilakukan oleh analis-analis harga, di luar model atau sistem yang dibangun.



Gambar 3. Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

4. **Cakupan Pengembangan Ekspor**

- a. Target capaian Indikator Tahun 2021 ditetapkan 1 produk sedangkan capaian realisasi adalah 1 produk yaitu Rumah Panggung. Dari capaian realisasi target yang ada dapat dihitung bahwa kinerja realisasi sebesar 100%. Realisasi terhadap indikator diperoleh dengan melihat **Jumlah Produk Potensi Ekspor yang dikembangkan**. Di Kota Tomohon terdapat 1 produk ekspor yaitu Rumah Panggung. Sehingga dari target 1 produk maka dapat terealisasi 100%
- b. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir, bisa dikatakan karena produk unggulan ekspor Kota Tomohon adalah Rumah Panggung sebagai komoditas prioritas maka capaian setiap tahun adalah 100% karena pada tahun-tahun sebelumnya produk rumah panggung selalu diikuti dalam pameran nasional yang para buyers berasal dari luar negeri. Begitupun dengan berbagai kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan serta promosi yang ada setiap tahunnya melibatkan pengusaha rumah panggung.
- c. Bila melihat realisasi kinerja tahun 2021 adalah satu produk dan kondisi akhir RPJMD adalah satu produk maka dipastikan target yang di tetapkan dapat tercapai.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Alternatif yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Target capaian Indikator Tahun 2021 ditetapkan 1 produk sedangkan capaian realisasi adalah 1 produk yaitu Rumah Panggung. Dari capaian realisasi target yang ada dapat dihitung bahwa kinerja realisasi sebesar 100%, bisa dikatakan karena produk unggulan ekspor Kota Tomohon adalah Rumah Panggung sebagai komoditas prioritas maka capaian setiap tahun adalah 100% karena pada tahun-tahun sebelumnya produk rumah panggung selalu diikutkan dalam pameran nasional yang para buyers berasal dari luar negeri. Begitupun dengan berbagai kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan serta promosi yang ada setiap tahunnya melibatkan pengusaha rumah panggung.. yang menjadi hambatan di tahun 2021 adalah pendanaan untuk kprogram kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja mengalami efisiensi anggaran. Sehingga sebagai solusi pada setiap tahun berjalan untuk dianggarkan pendanaan untuk program kegiatan yang menopang pencapaian target ini. Terlebih khusus kegiatan Trade Expo Indonesia sebagai ajang promosi produk ekspor Kota Tomohon yang mempertemukan langsung calon pembeli yang berasal dari luar negeri dengan pelaku usaha di Kota Tomohon.

Sebagai solusi pada tahun 2022 telah dianggarkan kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha rumah panggung sebagai komoditi unggulan produk ekspor Kota Tomohon. Pencapaian target indikator ditopang melalui Program Pengembangan Ekspor, Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5. Persentase UTTP bertanda tera sah dan berlaku

- a. Target capaian Indikator Tahun 2021 ditetapkan 7,14 % sedangkan capaian realisasi adalah sebesar 7,53 %. Dari capaian realisasi target yang ada dapat dihitung kinerja realisasi Tahun 2021 sebesar 105,5 %. Realisasi terhadap indikator diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah total UTTP yang ditera ulang pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib di tera}} \times 100\%$$

$$\frac{194}{2567} \times 100\% = 7,53\%$$

Data tersebut diperoleh dari hasil pengawasan dan penyuluhan dari petugas meterologi dari 2576 potensi UTTP di wilayah Kota Tomohon yang diawasi sebanyak 194 unit yang terdiri dari : SPBU sebanyak 57 Nosel, SPBG sebanyak 12 Unit, Timbangan Pegas sebanyak 115 Unit dan Timbangan Digital sebanyak 10 Unit.

- b. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 realisasi 100% jadi ada kenaikan realisasi target sebesar 5,5 %. Dan untuk pembandingan tahun- tahun sebelumnya tidak ada karena program pengawasan/penyuluhan UTPP belum ada/ baru muncul tahun 2021.
- c. Melihat realisasi kinerja tahun 2021 mencapai 7,53% dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 15 %, oleh sebab itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon cukup yakin target tersebut dapat tercapai.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Alternatif yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Target ini dapat dicapai oleh karena didukung oleh program dan kegiatan yang menopang pencapaian target yang ditetapkan melalui program dan kegiatan pengawasan / penyuluhan UTPP dimana masyarakat dan pemilik UTPP telah mendapatkan edukasi tentang pentingnya Tera/ Tera Ulang Alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya untuk memastikan kebenaran dalam pengukuran sehingga tercipta budaya jujur dan adil dalam bertransaksi.
- b. Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target UTPP yang bertanda Tera Sah dan berlaku ditemui kendala antara lain tenaga teknis Penera yang belum memiliki sertifikat Kompetensi untuk melakukan Tera /Tera Ulang UTPP serta Dana yang cukup di dalam menunjang fasilitas sarana prasarana yang ada di UPTD untuk mencapai syarat yang dibutuhkan dalam rangka operasionalisasi.
- c. Saat ini strategi yang diambil antara lain lebih ditingkatkan secara masif pengawasan / edukasi kemasyarakat dan Pengusaha/pemilik UTPP bahwa Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTPP) yang ditambahkan atau dikurangi komponennya maka ada kosekuensi hukum berdasar Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk efisiensi sumber daya kami masih membutuhkan Dana yang lebih dalam rangka pengawasan /edukasi kepada masyarakat dan Pemilk UTPP agar lebih bisa mencakup wilayah seperti Pasar, Pertokoan dan Warung/Toko yang menggunakan UTPP yang ada di 44 kelurahan dan mencapai target sesuai Potensi yang ada di Kota Tomohon.
- e. Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator yang ada, dilakukan oleh Instansi UPTD Metrologi Kota Manado yang memfasilitasi Pelayanan Tera / Tera Ulang UTPP bagi pengusaha / pemilik UTPP.



Gambar 4. Pengawasan/Penyuluhan UTTP Bahan Bakar minyak

6. Cakupan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- a. Target capaian Indikator Tahun 2021 ditetapkan adalah tidak ada karena program ini mengalami efisiensi anggaran. Namun terealisasi sebesar 81% dikarenakan sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri khususnya pasal 2 ayat 1 bahwa peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilakukan keberpihakan melalui : promosi, sosialisasi, pemasaran dan/atau penerapan kewajiban menggunakan produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perdagangan. Lebih lanjut dalam pasal 6 huruf c disampaikan peningkatan penyediaan barang paling sedikit 80% dari jumlah jenis yang diperdagangkan ditingkat eceran. Dengan demikian seluruh toko swalayan sudah diwajibkan untuk memperdagangkan 80% produk dalam negeri dari seluruh total dagangannya. Ditambah lagi dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 24 tahun 2020 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Realisasi terhadap indikator diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{c} \text{Jumlah produk dalam negeri yang dipasarkan} \\ \text{Di toko swalayan} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Jumlah total produk yang di pasarkan} \\ \text{Di Toko Swalayan} \end{array}} \times 100\%$$

Metode pengambilan data dengan melakukan sampling terhadap produk yang diperdagangkan di ritel modern. Pengamatan dilakukan terhadap jumlah produk buatan Indonesia dibandingkan total produk buatan luar negeri ditambah produk dalam negeri. Dari sampling total 100 produk dipantau/diamati, terdapat 81 produk bauatan dalam negeri sedangkan sisanya yang berjumlah 19 produk merupakan buatan luar negeri. Dengan demikian dapat dihitung bahwa :

$$\frac{81}{100} \times 100\% = 81\%$$

- b. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir, tidak bisa ditemukan data pembanding disebabkan karena program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri merupakan program baru yang baru muncul pada program kegiatan sejak tahun 2021.

- c. Bila melihat realisasi kinerja tahun 2021 adalah tidak ada target dan dibandingkan dengan kondisi akhir Renstra dan RPJMD yang ditargetkan sebesar 70% dapat tercapai karena target ini didukung oleh program kegiatan berupa sosialisasi maupun pembinaan dan pengawasan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Alternatif yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Indikator ini tidak ditetapkan target disebabkan sub kegiatan utama yang mendukung pencapaian realisasi target indikator yaitu Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota mengalami efisiensi anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan, yang tersisa adalah sub kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan, dalam bentuk kegiatan pendataan dengan hasil kegiatan berupa Buku Profil Perdagangan. Sebagai solusi pada tahun 2022 telah dianggarkan Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Pencapaian target indikator didukung melalui Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.

7. Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah

- a. Target capaian Indikator Tahun 2021 tidak ditetapkan sedangkan capaian realisasi adalah 100% dimana program kegiatan dan sub kegiatan penunjang terlaksana dengan baik. Dari capaian realisasi target yang ada dapat dihitung bahwa kinerja realisasi sebesar 100%. Realisasi terhadap indikator diperoleh dengan melihat **Presentase capaian pelaksanaan program penunjang pelayanan perangkat daerah** dalam Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 dimana semua sub kegiatan menunjang indikator ini dari segi fisik semua dapat terealisasi.
- b. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir, indikator kinerja cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah secara merata dari tahun ke tahun terealisasi 100%. Hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran serta kebutuhan-kebutuhan kantor lainnya.
- c. Bila melihat realisasi kinerja tahun 2021 adalah 100% maka dibandingkan dengan kondisi akhir Renstra dan RPJMD yang ditargetkan sebesar 100% dapat tercapai karena target ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- d. Tidak ada standar nasional yang mengatur

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Alternatif yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendukung keberhasilan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 7 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan yang secara keseluruhan dapat dilaksanakan, dengan mengacu pada rencana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tepat sasaran, dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

b. Hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam upaya mencapai target yang ditetapkan hambatan dan kendala yang dihadapi diantaranya : masalah ketepatan waktu pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan, yang bisa saja mempengaruhi program dan kegiatan serta sub kegiatan lainnya.

c. Strategi/ solusi pemecahan masalah yang telah dilakukan.

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi maka dilakukan monitoring serta evaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka percepatan pelaksanaan yang di dalamnya juga mempercepat penyerapan anggaran.

d. Analisa atas efisiensi sumber daya

Dalam beberapa kegiatan telah dilakukan efisiensi baik terhadap anggaran maupun operasional penunjang administrasi namun target yang ditetapkan tetap harus terealisasi.

e. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian dari tiap indikator.

Dalam menunjang indikator cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah di dukung dengan 1 Program 7 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan

8. *Persentase sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP.*

a. Adapun target tahun 2021 yaitu tidak ditentukan dan untuk realisasinya 5% sehingga capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar 100%. Adapun program dan kegiatan penunjang indikator kinerja masih berupa sosialisasi bagi pelaku usaha industry. Adapun regulasi yang digunakan dalam menentukan realisasi terhadap indikator adalah sebagai berikut :

Jika terdapat N indikator pembangunan dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$

Untuk masing-masing penilaian indikator adalah presentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$

Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut.

Capaian target tahapan penyelesaian RPIK

- Tersusunnya naskah akademik (30%)
- Tersusunnya Draft Ranperda RPIK (20%)
- Draft Ranperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)
- Persetujuan Draft RaRaperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)
- Penetapan Perda RPIK (10%)

Penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK

Realisasi ditetapkan sebesar 5% karena belum pada tahapan tersusunnya naskah akademik. Program kegiatan yang dilaksanakan masih berupa sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan pelaku usaha dalam rangka penyusunan naskah akademik RPIK tersebut.

- a. Realisasi kinerja Tahun 2021 merupakan kondisi awal RPJMD (Tahun 0) yang akan dibandingkan tahun ini (2022)
- b. Realisasi kinerja tahun 2021 merupakan kondisi awal RPJMD (Tahun 0)
- c. Tidak ada standar nasional yang mengatur.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Alternatif yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor pendukung keberhasilan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan rencana pembangunan industry Provinsi dan rencana pembangunan industry kabupaten/kota. Ini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan industry. Dukungan dana dalam APBD

- b. Hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan rencana pembangunan industry Provinsi dan rencana pembangunan industry kabupaten/kota. Pasal 5 Rencana Pembangunan industry kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan :

- a. Rencana induk pembangunan industry nasional dan kebijakan industry nasional;
- b. Rencana pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/kota dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
- c. Potensi sumberdaya industry daerah;
- d. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan social ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industry.

Adapun kendala yang dihadapi pembangunan industri kota Tomohon beberapa hal diatas.

- c. Strategi/ solusi pemecahan masalah yang telah dilakukan.

- Penyesuaian dengan rencana pembangunan daerah.
- Penyesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
- Penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
- Pembuatan peta panduan pengembangan kompetensi inti industry kabupaten/kota baik dalam bentuk kajian maupun yang sudah ditetapkan dalam peraturan Menteri, maka peta panduan tersebut

diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan industry kabupaten/kota.

- Rancangan naskah akademik RPIK
- Draft perda RPIK
- Rencana pembangunan industry kabupaten/kota dituangkan dalam rancangan peraturan daerah kabupaten/ kota.

d. Analisa atas efisiensi sumber daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yakni “Meningkatnya daya saing dan kemandirian industry” namun terjadi efisiensi penggunaan dana dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga dana untuk kegiatan belum teranggarkan.

e. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian dari tiap indicator.

Program perencanaan dan pembangunan industry.

Kegiatan penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industry kabupaten/kota

f. Dokumentasi pelaksanaan indikator.



Gambar 5. Kegiatan penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industry kabupaten/kota



Gambar 6. Kegiatan penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industry kabupaten/kota



Gambar 7. Kegiatan penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industry kabupaten/kota

9. *Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry(IUI) kecil dan industry menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.*

- a. Membandingkan antara target dan realisasi per indikator
- Adapun target tahun 2021 masih awal yaitu tidak ditentukan untuk realisasi adalah sebesar 271%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi terhadap indikator diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :
- Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pantauan
-----x
100%
- Jumlah izin yang dikeluarkan
- Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan adalah berjumlah 38 usaha industry, sedangkan jumlah izin yang dikeluarkan sebanyak 14 IUI, sehingga perhitungannya sebagai berikut :
- 38
---- x 100% = 271%
14
- Data Izin Usaha Industri (IUI) ini diperoleh berdasarkan hasil koordinasi dengan DPMPTSP dan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan lapangan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- b. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Realisasi kinerja Tahun 2021 merupakan kondisi awal RPJMD (Tahun 0) yang akan dibandingkan tahun ini (tahun 2022)
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- Realisasi kinerja tahun 2021 merupakan kondisi awal RPJMD (Tahun 0)
- d. Tidak ada standar nasional yang mengatur

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Alternatif yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor pendukung keberhasilan
- Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2021 tentang Pedoman dan tatacara pengawasan dan pengendalian industri. Ini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pembangunan industry.
- Dukungan dana dalam APBD
- b. Hambatan/ permasalahan yang dihadapi.
- Kekurangan SDM di bidang Industri dalam rangka pengawasan langsung di lapangan.
 - Koordinasi dengan instansi terkait.

- Minimnya dana untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Strategi/ solusi pemecahan masalah yang telah dilakukan.
 - Penambahan SDM terlatih di bidang industri
 - Penambahan dana untuk kegiatan..
 - Koordinasi lintas sector.

d. Analisa atas efisiensi sumber daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yakni “Meningkatnya daya saing dan kemandirian industry” namun terjadi efisiensi penggunaan dana dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga dana untuk kegiatan masih kecil yang di anggarkan.

- e. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian dari tiap indicator.

Program pengendalian izin usaha industri

Kegiatan Penerbitan izin usaha industry(IUI), Izin Usaha Perluasan industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industry (IPKI) kewenangan kabupaten/kota berbasis sistim informasi industry nasional(SIINas)

- f. Dokumentasi pelaksanaan indikator.



Gambar 8. Pemantauan dan Pengawasan Usaha Industri



Gambar 9. Pemantauan dan Pengawasan Usaha Industri



Gambar 10. Pemantauan dan Pengawasan Usaha Industri

10. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

a. Membandingkan antara target dan realisasi per indikator

Adapun target tahun 2021 tidak ditentukan yang terealisasi 95% dengan capaian kinerja adalah sebesar 100%. Realisasi terhadap indikator ini diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Keterkinian informasi industry :

- Tersedianya informasi industry dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)
- Tersedianya informasi industry dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)
- Tidak menyampaikn informasi industry (0%)

2. Kelengkapan informasi industry meliputi :

- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)
- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)

Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industry (1+2)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon setiap tahun secara rutin melaksanakan kegiatan pendataan terhadap usaha-usaha industry yang ada di Kota Tomohon sehingga persentase yang ditetapkan baik dalam batas waktu 0-6 bulan maupun 7-12 bulan dapat terpenuhi dengan total 75%. Sementara kelengkapan informasi lainnya berupa informasi produksi, kapasitas produksi, informasi bahan baku, dan bahan penolong semuanya dapat dipenuhi sehingga total 20%. Berdasarkan formulasi yang ada maka nilai akhir merupakan akumulasi dari persentase-persentase tersebut sehingga hasilnya adalah :

$$(50\%+25\%) + (10\%+10\%) = 95\%$$

b. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja Tahun 2021 merupakan kondisi awal RPJMD (Tahun 0) yang akan dibandingkan tahun ini (tahun 2022)

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Realisasi kinerja tahun 2021 merupakan kondisi awal RPJMD (Tahun 0)

- e. Tidak ada standar nasional yang mengatur

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Alternatif yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor pendukung keberhasilan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang tatacara penyampaian data industry, data kawasan industry, data lain, informasi industry dan informasi lain melalui sistim informasi industry nasional.

Dukungan dana dalam APBD

- b. Hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

- Kekurangan SDM di bidang Industri dalam rangka pendataan langsung di lapangan.
- Koordinasi dengan instansi terkait.
- Minimnya dana untuk pelaksanaan kegiatan.

- c. Strategi/ solusi pemecahan masalah yang telah dilakukan.

- Penambahan SDM terlatih di bidang industri
- Penambahan dana untuk kegiatan..
- Koordinasi lintas sector.

- d. Analisa atas efisiensi sumber daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yakni “Meningkatnya daya saing dan kemandirian industry” namun terjadi efisiensi penggunaan dana dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga dana untuk kegiatan masih kecil yang di anggarkan.

- e. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian dari tiap indikator.

Program pengelolaan sistim informasi industrti nasional

Kegiatan Penyediaan informasi industry untuk informasi untuk IUI,IPUI,,IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota.

- f. Dokumentasi pelaksanaan indikator

		presentase barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi															0
2	Meningkatnya daya saing industry kecil	Presentase pertumbuhan industri	NA	4,21	-	2,5	62,02	1430	2	15,21	507	2,5	10,61	424,4	5	12,30	246
		Cakupan bina kelompok pengrajin	NA	56,25	-	55	50	31,25	5	6,49	129,8	6	18,10	301,67	70	0	0

B. REALISASI ANGGARAN

Pada bagian ini diuraikan tentang sumber dana bagi pembiayaan atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun 2021. Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran pada tahun 2021 lewat APBD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon adalah sebesar Rp. 3.001.945.673,- , berupa anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 2.923. 485.673,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 78.460.000,- dari keseluruhan plafond anggaran sebesar Rp. 3.331.675.649,- dari data tersebut dapat dikatakan presentase realisasi anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 sebesar 90,10%. Realisasi Anggaran Tahun 2021 berdasarkan Program yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 dapat di lihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon
Sampai Dengan Tahun 2021

No	Sa sar an	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Keg iatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100		15
3		PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Peningkatan Mutu Dokumen Perencanaa n dan Evauasi Perangkat Daerah	100 %	18,964,35 3,840	100%	12,433,865, 996	100%	3,076,96 4,399	10.799 97562	332,311, 405	22.571 96945	694,531, 464	37.0 0502 132	1,138,63 1,332	0	0	70.376 96639	2,165,47 4,201	71	14,599,3 40,197	7137 .696 639	76.983 06159	Disperdagin
3		Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Mutu Dokumen Perencanaa n dan Evauasi Perangkat Daerah	100 %	104,261,3 59	100%	41,471,880	100%	10,367,9 70		0	0	0	26.0 5138 711	2,701,00 0	0	0	26.051 38711	2,701,000	27	44,172,8 80	2705 .138 711	42.367 45082	Disperdagin
3		Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra	10	56,424,46 8	8	14,789,600	2	3,697,400									0	0	8	14,789,6 00	80	26.211 32378	Disperdagin

3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5	24,994,400	4	11,902,280	1	2,975,570						2,701,000			0	2,701,000	4	14,603,280	80	58.42620747	Disperdagin
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	22,842,491	4	14,780,000	1	3,695,000									0	0	4	14,780,000	80	64.70397646	Disperdagin
3		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	11,979,873,236	100%	9,781,434,180	100%	2,445,358,545		320,311,405		694,531,464		892,398,214		0	0	1,907,241,083	1	11,688,675,263	100	97.56927334	Disperdagin
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	60	10,387,559,725	48	8,310,047,780	12	2,077,511,945	3	320,311,405	3	694,531,464	3	694,551,464			9	1,709,394,333	57	10,019,442,113	95	96.45616852	Disperdagin
3		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan	60	1,573,534,860.00	48	1,455,576,000	12	363,894,000					9	197,846,750			9	197,846,750	57	1,653,422,750	95	105.0769698	Disperdagin
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan	5	18,778,651	4	15,810,400	1	3,952,600									0	0	4	15,810,400	80	84.1934812	Disperdagin
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	504,112,702	100%	282,263,960	100%	70,565,990		0		0	30	32,463,200		0	30	32,463,200	31	314,727,160	3100	62.43190436	Disperdagin
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	300	504,112,702	93	282,263,960	60	70,565,990					30	32,463,200			30	32,463,200	123	314,727,160	41	62.43190436	Disperdagin
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2,658,592,612	100%	1,187,425,580	100%	290,441,720		8,000,000		0		56,690,500		0	0	64,690,500	1	1,252,116,080	100	47.09695176	Disperdagin

3		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	150	15,104,510	48	12,707,000	30	3,176,750				9	947,600			9	947,600	57	13,654,600	38	90.40081406	Disperdagin	
3		Penyediaan Peralatan dan Perlengkap- an Kantor	Jumlah Jenis Peralatan	50	438,933,350	9	25,658,700	10	0								0	0	9	25,658,700	18	5.845693885	Disperdagin	
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkap- an Kantor	30	53,222,289	1225	63,226,040	6	15,806,510				3	8,397,500			3	8,397,500	1,228	71,623,540	4093.333333	134.5743322	Disperdagin	
3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpakai	225	184,839,657	448	145,114,640	45	36,278,660				22	16,903,500			22	16,903,500	470	162,018,140	208.8888889	87.65334378	Disperdagin	
3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Jenis Cetak/Gandaan	63200	85,616,707	36	69,903,200	12640	17,475,800				12,984	10,470,700			12984	10,470,700	13,020	80,373,900	20.60126582	93.87642064	Disperdagin	
3		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang tersedia	1560	34,856,922	1248	31,454,000	312	7,863,500				243	5,400,000			243	5,400,000	1,491	36,854,000	95.57692308	105.7293584	Disperdagin	
3		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman yang tersedia	650	104,923,492	36	33,630,000	130	8,407,500				7	400,000			7	400,000	43	34,030,000	6.615384615	32.43315615	Disperdagin	
3		Penyeleng- garan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah yang mengikuti Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	390	1,741,095,685	234	805,732,000	78	201,433,000	3.971543888	8,000,000	0	0	7.035192843	14,171,200	0	0	11.00673673	22,171,200	245	827,903,200	62.82224019	47.55070081	Disperdagin
3		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	413,458,256	100%	100,349,700	100%	0		0	0	0	0	0	0	0	1	100,349,700	100	24.2708178	Disperdagin		

3		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur	30	413,458,256	27	100,349,700	5	0								0	0	27	100,349,700	90	24.2708178	Disperdagin	
3		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	172,935,738	100%	335,093,256	100%	83,773,314		4,000,000		0		35,097,071		0	0	39,097,071	1	374,190,327	100	216.3753608	Disperdagin
3		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lembar surat yang terpakai	3250	15,555,869	21	48,000,000	650	12,000,000				338	6,200,000			338	6,200,000	359	54,200,000	11.04615385	348.4215507	Disperdagin	
3		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	116,555,869	13	111,032,000	12	27,758,000				9	9,169,627			9	9,169,627	22	120,201,627	36.6666667	103.127906	Disperdagin	
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	40,824,000	48	176,061,256	12	44,015,314	3	4,000,000		9	19,727,444				23,727,444	48	199,788,700	80	489.3903096	Disperdagin	
3		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,131,119,937	100%	705,827,440	100%	176,456,860		0		0		119,281,347		0	107	119,281,347	108	825,108,787	10815.548	26.3518742	Disperdagin
3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dirawat atau Kendaraan Dinas Jabatan	35	698,491,799	28	543,947,360	7	135,986,840				7	105,479,543			7	105,479,543	35	649,426,903	100	92.97559455	Disperdagin	
3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60	33,628,138	48	54,088,000	12	13,522,000		0		0	11	13,407,804		0	99.15547996	13,407,804	147	67,495,804	245.2591333	200.7122845	Disperdagin
3		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dirawat	40	2,399,000,000	32	107,792,080	8	26,948,020				1	394,000			1	394,000	33	108,186,080	82.5	4.509632347	Disperdagin	

3		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN WAJIB PERIZINAN	300	112,142,722	119	2,191,064,276	50	89,148,615		0		0		0		0		0	119	2,191,064,276	39.6666667	1953.817632	Disperdagin
3		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	100%	55,068,002,000	100%	76,267,544	30	29,955,545		0		0		0		0		0	1	76,267,544	100	0.138497024	Disperdagin
3		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Pemenuhan Komitmen	150	55,068,002,000	120	76,267,544	30	29,955,545									0	120	76,267,544	80	0.138497024	Disperdagin	
3		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah TDG yang diterbitkan	18	119,238,474	10	2,110,732,892	15	29,749,375		0		0		0		0		0	10	2,110,732,892	55.5555556	1770.177713	Disperdagin
3		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah TDG yang diterbitkan	75	61,554,869	60	2,110,732,892	15	29,749,375		0		0		0		0		0	60	2,110,732,892	80	3429.026698	Disperdagin

3		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	40	24,994,400	80	4,063,840	20	29,443,695	0	0	0	0	0	0	80	4,063,840	200	16.25900202	Disperdagin	
3		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP MB Gol B dan C	40	4,063,840	80	4,063,840	20	29,443,695						0	0	80	4,063,840	200	100	Disperdagin
3		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	CAKUPAN STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	5	18,778,651	3	2,102,605,212	12	74,812,390	0	0	0	0	0	0	3	2,102,605,212	60	11196.78518	Disperdagin	
3		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	60	56,424,468	48	14,544,040	12	35,739,495	0	0	0	0	0	0	48	14,544,040	80	25.77612251	Disperdagin	
3		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Bapokting di Pasar Rakyat	60	26,480,081	48	14,544,040	12	35,739,495						0	0	48	14,544,040	80	54.92445435	Disperdagin

3		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	8	22,210,315	6	2,088,061,172	12	39,072,895		0		0		0		0	0	6	2,088,061,172	75	9401.312732	Disperdagin
3		Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	60	7,734,072	48	7,734,072	12	13,001,795							0	0	48	7,734,072	80	100	Disperdagin	
3		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	60	638,228,657	48	2,080,327,100	12	26,071,100								0	48	2,080,327,100	80	325.9532578	Disperdagin	
3		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	CAKUPAN PENGEMBANGAN EKSPOR	15	285,101,736	6	973,341,220	50%	243,335,305		0		0		0		0	0	6	973,341,220	40	341.4013656	Disperdagin
3		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5	307,267,320	2	973,341,220	3	243,335,305		-		-		-		0	0	2	973,341,220	40	316.7734271	Disperdagin
3		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembinaan Dan Pengembangan an Usaha Produk Ekspor	5	45,859,601	4	133,644,660	1	33,411,165								0	4	133,644,660	80	291.4213318	Disperdagin	
3		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional	5	723,606,023	4	656,415,360	1	164,103,840								0	4	656,415,360	80	90.7144688	Disperdagin	

3		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal	10	610,510,000	8	183,281,200	2	45,820,300								0	0	8	183,281,200	80	30.02099884	Disperdagin
3		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		70%	353,315,868	40%	34,112,540	30%	8,528,135	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	34,112,540	57.14285714	9.6549697	Disperdagin
3		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	60	353,315,868	48	34,112,540	12	8,528,135	-	-	-	-	-	-	0	0	48	34,112,540	80	9.6549697	Disperdagin	
3		Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	60	353,315,868	48	34,112,540	12	8,528,135								0	48	34,112,540	80	9.6549697	Disperdagin	
3		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	CAKUPAN PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	75%	428,235,798	25%	263,334,180	50%	65,833,545	-	-	-	4,614,500	-	-	0	4,614,500	0	267,948,680	33.3333333	62.57035989	Disperdagin	
3		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5	122,102,000	4	263,334,180	1	65,833,545	-	-	-	4,614,500	-	-	0	4,614,500	4	267,948,680	80	219.4465938	Disperdagin	
3		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5	122,102,000	4	263,334,180	1	65,833,545				1	4,614,500			4,614,500	4	267,948,680	80	219.4465938	Disperdagin	
3		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	JUMLAH PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9%	315,000,000	0	810,372,000	2%	202,593,000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	810,372,000	0	257.2609524	Disperdagin	
3		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri		300	103,661,475	100	810,372,000		202,593,000	-	-	-	-	-	-	0	0	100	810,372,000	33.3333333	781.748475	Disperdagin	

		Kabupaten/ Kota																					
3		Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan industri	10	121,128,116	8	300,000,000	2	75,000,000								0	8	300,000,000	80	247.6716471	Disperdagin	
3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	25	645,103,039	20	510,372,000	5	127,593,000								0	20	510,372,000	80	79.11480324	Disperdagin	
3		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	90	121,128,113	50	217,352,400	40%	54,338,100	-	-	-	-	-	-	0	0	50	217,352,400	55.5555556	179.4400941	Disperdagin	
3		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah izin yang di fasilitasi kota, dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	50	664,713,485	40	217,352,400	10	54,338,100	-	-	-	-	-	0	0	40	217,352,400	80	32.69865963	Disperdagin		

3		Fasilitasi Pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah izin yang di fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan (IUI) kewenangan kota, dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	300	334,661,033	144	168,831,400	36	42,207,850								0	0	144	168,831,400	48	50.44847871	Disperdagin
3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah koordinasi dan sinkronisasi i pengawasan pelaksanaan pemberian izin IUI	180	310,442,006	144	48,521,000	36	12,130,250								0	0	144	48,521,000	80	15.62965033	Disperdagin
3		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE PENGELOLAAN SISTIM INFORMASI INDUSTRI	94%	255,000,000	80%	107,853,751	50%	34,458,550	-	-	-	-	-	-	0	0	1	107,853,751	85.10638298	42.29558863	Disperdagin	
3		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah informasi industri	210	255,000,000	50	107,853,751	50	34,458,550	-	-	-	-	-	-	0	0	50	107,853,751	23.80952381	42.29558863	Disperdagin	

3		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	jumlah buku data industri	210	255,000,000	110	107,853,751	50	34,458,550							0	0	110	107,853,751	52.38095238	42.29558863	Disperdagin				
Rata-rata capaian kinerja (%)																										
Predikat Kinerja																										
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : Adanya Refocusing Anggaran karena Pandemi Covid-19																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan Kegiatan dengan mengikuti Prokes																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																								

2.2. Analisis Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon

a. Sektor Perdagangan

□ Permasalahan

Beberapa permasalahan dalam Perdagangan diantaranya, masih adanya peredaran barang impor yang tidak sesuai ketentuan dan standar dan masih adanya pakaian bekas impor yang masuk ke wilayah Kota Tomohon, pengiriman bahan hortikultura yang sering terhambat dipelabuhan Bitung, rendahnya kesadaran para pedagang, penertiban dan penataan PKL yang sangat mengganggu para pedagang tetap dalam pasar, Sumber Daya Manusia pengelolaan pasar utamanya manajemen pengelolaan pasar yang belum optimal, belum optimalnya pelaku usaha eksportir/importir dalam memberikan laporan terkait realisasi ekspor/import, masih ada pelaku usaha / pedagang pemilik alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang tidak mentera ulang. Tuntutan masyarakat terhadap mutu barang yang beredar, tuntutan adanya persaingan yang semakin tajam., dan belum optimalnya perlindungan konsumen

□ Solusi

Solusi untuk memperlancar distribusi pengiriman barang untuk segera sampai ke pelabuhan melalui jalan alternatif yang ada sehingga bisa memperlancar pengiriman barang untuk sampai kepada user (pengguna). Untuk mengatasi permasalahan di pasar dengan cara mensosialisasikan kepada para pedagang tentang ketertiban, kebersihan dan kerapian untuk mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah dan aman sehingga para pedagang yang beraktifitas di pasar memiliki budaya bersih, mengadakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar sehingga dapat mewujudkan kenyamanan bagi para pelaku pasar, diperlukan pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam manajemen pengelolaan pasar agar dapat bekerja secara optimal, serta meningkatkan mutu makanan dan minuman dengan melakukan pengawasan internal mau pun eksternal sehingga makanan dan minuman yang diproduksi betul-betul memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu meningkatkan pengawasan di bidang metrologi khususnya terhadap alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) dengan harapan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk menggunakan alat ukur yang benar dan sah secara legal, dan juga melakukan pengawasan serta mengendalikan masuknya produk-produk impor yang akan berdampak pada meningkatnya produk-produk dalam negeri yang diimbangi dengan peningkatan mutu, harga bersaing di pasaran.

b. Sektor Perindustrian

□ Permasalahan

Beberapa masalah dalam pembangunan Industri diantaranya keterkaitan sektor industri dan sektor ekonomi lainnya belum mantap, keterbatasan dalam kemampuan teknologi, keterbatasan dalam kemampuan manajemen produksi dan manajemen pemasaran produk yang dihasilkan disamping masalah permodalan, belum optimalnya pemanfaatan hasil kekayaan sumber daya alam yang ada terutama hasil pertanian, serta iklim usaha yang belum kondusif. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dalam memfasilitasi para pelaku usaha industri dalam meningkatkan kualitas teknologi industri baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, pendampingan, maupun fasilitasi dalam bentuk bantuan baik peralatan maupun bahan baku industri.

□ Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah yaitu pengembangan IKM yang sudah ada dengan memberikan berbagai pelatihan, pembinaan serta terus menerus dan berkelanjutan dan pemberian peralatan serta fasilitasi permodalan dan informasi pasar yang harus didukung dengan ketersediaan anggaran dalam rangka fasilitasi. Hal lainnya dilakukan dengan menumbuhkan jumlah wirausaha baru, peningkatan keterkaitan IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya, fasilitasi permasalahan (klinik bisnis) serta mendukung menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon dalam melaksanakan program kegiatannya memiliki beberapa masalah dalam pembangunan Industri dan Perdagangan. Ditunjang oleh beberapa faktor pendukung agar kinerja dinas berjalan dengan baik dan sempurna. Namun untuk menuju kepada kinerja baik, harus ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang baik dan bertanggung jawab. Untuk Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon sangat kurang atau masih membutuhkan penambahan beberapa Sumber Daya Manusia lagi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 30 orang terdiri dari 21 orang berstatus pegawai negeri sipil, 9 orang berstatus sebagai tenaga kontrak/non PNS. Meski memiliki keterbatasan dan banyak sekali kekurangan dalam Sumber Daya Manusia, program kegiatan harus tetap dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Karena setiap Sumber Daya Manusia yang ada harus paham dan mengetahui apa dan bagaimana tupoksi yang menjadi tanggung jawab masing-masing staf sedangkan strukturalnya sebagai konseptor harus bisa memahami lebih jauh tentang tupoksi tugasnya serta inovasi terhadap setiap tugas kerja yang diberikan oleh kepala dinas.

Untuk mencapai kinerja yang baik juga harus didukung oleh sarana prasarana yang baik pula, sedangkan untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk sarana prasarana masih cukup baik walaupun belum berbentuk bangunan permanen

karena lebih mengutamakan kearifan lokal dan potensi daerah yaitu dalam bentuk rumah panggung yang dimodifikasi menjadi bangunan semi permanen dan juga adanya adanya gedung Metrologi melalui DAK Tahun 2016. Selain gedung masih banyak lagi sarana penunjang yang masih dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang baik. Meski kondisi yang ada untuk sarana prasarana seperti itu tidak membuat kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon harus menurunkan kinerja yang harus di capai.

Selain Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasana penunjang untuk mencapai kinerja yang baik, faktor pendanaan juga menjadi penunjang tercapainya kinerja yang baik pula. Dengan anggaran Tahun 2021 untuk belanja langsung Rp. 4.192.221.390 dalam realisasi penggunaan anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian bisa mencapai Rp. 4.058.518.536 atau 96,81%.dari total anggaran yang ada. Selain itu dari target yang ada di indikator Kinerja Utama antara target dan realisasi juga menunjukkan nilai yang signifikan. Dengan begitu kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon bisa melaksanakan program kegiatan dengan maksimal meski di dukung dengan sarana prasarana yang cukup walaupun belum dikategorikan baik juga sumber daya manusia yang di nilai masih kurang dari ideal.

Bila dilihat dari Indikator Kinerja Utama yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon, keseluruhan indikator yang ditetapkan dapat tercapai kecuali pada kegiatan-kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam APBD Perubahan yang secara otomatis merubah target kinerja yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Pembinaan disektor industri terus berkelanjutan berupa kegiatan monitoring dan pembinaan industri kecil menengah untuk menumbuhkan industri nonformal berupa pelatihan ketrampilan dan bantuan mesin/peralatan industri kecil sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi. Begitu juga dengan keseluruhan program kegiatan disektor perdagangan, dengan adanya perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan dengan memberikan bantuan Gedung Metrologi pada Tahun 2016.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon

1. Kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi personilnya dan interaksinya dengan proses serta tujuan dari organisasi tersebut. Personil atau pegawai di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon berkembang sesuai dengan kondisi serta ruang lingkup kewenangan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Tomohon. Ketika Otonomi Daerah diimplementasikan sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan Kota Tomohon menjadi lebih luas dengan beberapa penyerahan baik dari Pemerintah Pusat secara

langsung, maupun yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kota Tomohon bertambah dari tahun ke tahun.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon senantiasa mengupayakan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan sasaran-sasaran seperti siapnya aparatur yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai PNS, terbangunnya kompetensi aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tomohon secara efektif dan efisien, serta tercapainya peningkatan kualitas, wawasan serta kapabilitas teknis aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang dihadapi saat ini.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana yang telah diuraikan pada evaluasi kinerja di atas merupakan tolok ukur peningkatan kinerja aparatur yang diarahkan pada terciptanya Sumber Daya Aparatur yang disiplin, efisien dan efektif dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan yang memadai secara umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon telah berjalan sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan sesuai mekanisme serta prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari sisi pelayanan teknis Administrasi baik kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan strategi yang secara rutin dilaksanakan pada setiap tahun sehingga berjalan dengan baik.

Secara obyektif masih terdapat berbagai kelemahan-kelemahan kinerja organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terutama menyangkut masalah koordinasi baik dengan instansi terkait maupun Pemerintah Kota Tomohon. Unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini membawa implikasi terhadap kinerja pelayanan kurang maksimal bagi masyarakat dimana belum seluruh wilayah di Kota Tomohon tersentuh dengan pelayanan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon.

7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan :
 - e. Terbatasnya penerapan nilai-nilai positif budaya organisasi secara efektif pada lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon.
 - f. Terbatasnya Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon
 - g. Terbatasnya Sarana dan Prasarana operasional penunjang pelaksanaan kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon.
 - h. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan terhadap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah di Kota Tomohon

- i. Belum Efektifnya kinerja staf yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah kota Tomohon
 - j. Belum maksimalnya koordinasi baik instansi vertikal maupun instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat
8. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi.
- Kelemahan-kelemahan kinerja organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Tomohon terutama menyangkut masalah koordinasi baik dengan instansi terkait maupun Pemerintah Kota Tomohon serta unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang belum sesuai dengan yang diharapkan akan membawa dampak atau implikasi terhadap kinerja pelayanan kurang maksimal bagi masyarakat dimana belum seluruh wilayah di Kota Tomohon tersentuh dengan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon sehingga dapat menghambat pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
9. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah adalah Keterbatasan dana operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta belum memadainya sarana dan prasarana kerja dalam pelaksanaan program menjadi tantangan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
- Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon senantiasa mengupayakan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan sasaran-sasaran seperti siapnya aparatur yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai PNS dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga terbangunnya kompetensi aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon secara efektif dan efisien, serta tercapainya peningkatan kualitas, wawasan serta kapabilitas teknis aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Tomohon sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang dihadapi saat ini.
10. Catatan strategis untuk ditindaklanjuti demi penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Tomohon

Analisa Isu-Isu Strategis:

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tomohon periode 2021 – 2026 maka perlu diantisipasi dampak negatif yang juga menjadi isu strategis yang ada di Kota Tomohon berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia. Adapun isu-isu strategis aktual pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon, adalah sebagai berikut:

b. Internal

- 7) Terbatasnya penerapan nilai-nilai positif budaya organisasi secara efektif pada lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon.
- 8) Terbatasnya kompetensi aparatur.
- 9) Lemahnya kepedulian dari instansi terkait secara internal.
- 10) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional.
- 11) Belum efektifnya kinerja pelayanan di berbagai lapisan masyarakat.
- 12) Terbatasnya anggaran untuk kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon.

d. Eksternal

- 3) Kurangnya peran kesadaran masyarakat dalam pengurusan surat-surat SIUP, TDP, MIKOL
- 4) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon.
- 5) Belum optimalnya pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon.

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	
				(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PERDAGANGAN										
8	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		Persentase terselesaikan nya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan nya menjadi PERDA	N/A	25	25	N/A	25	25	
9	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	N/A	5	5	N/A	5	5	
10	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/K ota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/K ota	N/A	14	14	N/A	14	14	

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon dalam melaksanakan program kegiatannya memiliki beberapa masalah dalam pembangunan Industri dan Perdagangan. Ditunjang oleh beberapa faktor pendukung agar kinerja dinas berjalan dengan baik dan sempurna. Namun untuk menuju kepada kinerja baik, harus ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang baik dan bertanggung jawab. Untuk Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon sangat kurang atau masih membutuhkan penambahan beberapa Sumber Daya Manusia lagi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 30 orang terdiri dari 21 orang berstatus pegawai negeri sipil, dan 9 orang berstatus sebagai tenaga kontrak/non PNS. Meski memiliki keterbatasan dan banyak sekali kekurangan dalam Sumber Daya Manusia, program kegiatan harus tetap dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Karena setiap Sumber Daya Manusia yang ada harus paham dan mengetahui apa dan bagaimana tupoksi yang menjadi tanggung jawab masing-masing staf sedangkan strukturalnya sebagai konseptor harus bisa memahami lebih jauh tentang tupoksi tugasnya serta inovasi terhadap setiap tugas kerja yang diberikan oleh kepala dinas.

Untuk mencapai kinerja yang baik juga harus didukung oleh sarana prasarana yang baik pula, sedangkan untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah untuk sarana prasarana masih cukup baik walaupun belum berbentuk bangunan permanen karena lebih mengutamakan kearifan lokal dan potensi daerah yaitu dalam bentuk rumah panggung yang dimodifikasi menjadi bangunan semi permanen dan juga adanya adanya gedung Metrologi melalui DAK Tahun 2016, akan tetapi belum lengkapnya peralatan untuk menunjang pengoperasian UPTD Metrologi Legal, Selain gedung masih banyak lagi sarana penunjang yang masih dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang baik. Meski kondisi yang ada untuk sarana prasarana seperti itu tidak membuat kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon harus menurunkan kinerja yang harus di capai.

Bila dilihat dari Indikator Kinerja Utama yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon, keseluruhan indikator yang ditetapkan dapat tercapai kecuali pada kegiatan-kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam APBD Perubahan yang secara otomatis merubah target kinerja yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Pembinaan disektor industri terus berkelanjutan berupa kegiatan monitoring dan pembinaan industri kecil menengah dan kegiatan untuk menumbuhkan industri nonformal berupa pelatihan ketrampilan dan bantuan mesin/peralatan industri kecil sehingga mampu meningkatkan

kualitas dan kapasitas produksi, identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan :

- k. Terbatasnya penerapan nilai-nilai positif budaya organisasi secara efektif pada lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon.
- l. Terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Daerah Tomohon
- m. Terbatasnya Sarana dan Prasarana operasional penunjang pelaksanaan kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon.
- n. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan terhadap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah di Kota Tomohon
- o. Belum maksimalnya koordinasi baik instansi vertikal maupun instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.

Kelemahan-kelemahan kinerja organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Tomohon terutama menyangkut masalah koordinasi baik dengan instansi terkait maupun Pemerintah Kota Tomohon serta unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang belum sesuai dengan yang diharapkan akan membawa dampak atau implikasi terhadap kinerja pelayanan kurang maksimal bagi masyarakat dimana belum seluruh wilayah di Kota Tomohon tersentuh dengan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah sehingga dapat menghambat pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah adalah Keterbatasan dana operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta belum memadainya sarana dan prasarana kerja dalam pelaksanaan program menjadi tantangan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon senantiasa mengupayakan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan sasaran-sasaran seperti siapnya aparatur yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai PNS dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga terbangunnya kompetensi aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon secara efektif dan efisien, serta tercapainya peningkatan kualitas, wawasan serta kapabilitas teknis aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang dihadapi saat ini.

Tantangan :

Urusan Perdagangan :

- a. Belum tersedianya regulasi tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. Belum adanya IPAL dalam pengelolaan limbah pasar rakyat.
- c. Pasar rakyat hanya terpusat pada pasar beriman Wilken yang berfungsi sebagai pasar induk.
- d. UPTD meteorologi legal belum bisa melakukan pelayanan tera / tera ulang dikarenakan peralatan standar pelayanan tera / tera ulang belum terpenuhi.

Urusan Perindustrian :

- a. Belum adanya dokumen rencana pembangunan industri kota (RPIK) yang menjadi persyaratan utama pembentukan sentra dan kawasan industri
- b. Ketersediaan bahan baku lokal yang masih rendah;
- c. Pelaku usaha industri belum tersebar.
- d. Belum adanya lokasi persiapan untuk sentra industri.
- e. Inovasi produk masih rendah;
- f. Penguasaan teknologi yang masih rendah;
- g. Masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- h. Belum tersedia/terfasilitasinya ruang pameran hasil produksi.

Peluang :

- a. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan pengalihan kewenangan urusan Pemerintah Daerah ke Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat lebih khusus kewenangan pengawasan barang beredar yang beralih provinsi sedangkan pelayanan tera/tera ulang beralih ke kabupaten/kota memberikan peluang kepada Kota Tomohon untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang yang memberikan Kotribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian memberikan amanat kepada setiap Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda), memberikan peluang untuk Kota Tomohon memiliki Road Map dibidang Perindustrian;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bertujuan dapat untuk menjaga sektor perdagangan nasional agar dapat memberikan daya dorong dan nilai tambah bagi perekonomian nasional, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, perlindungan konsumen, menjamin kelancaran/ketersediaan barang dan jasa, penguatan UMKM.
- d. Pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 dan perubahannya mengatur tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko. mewajibkann Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri

paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan dengan demikian memberikan peluang bagi produk asli Kota Tomohon untuk diperdagangkan langsung di Pusat Perbelanjaan dan toko Modern, serta kewajiban melakukan kemitraan dengan UMKM sehingga membuka peluang pengembangan, pemberdayaan dan pemasaran produk UMKM Kota Tomohon.

- e. Dengan Pasar rakyat hanya terpusat pada pasar beriman Wilken yang berfungsi sebagai pasar induk, memberikan peluang untuk membangun pasar baru di setiap kecamatan untuk menopang ekonomi kerakyatan;
- f. Terbukanya peluang aparatur untuk meningkatkan kompetensinya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan bagi ASN.

Dengan memperhatikan hasil analisa tantangan dan peluang serta identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon, maka ada beberapa catatan strategis untuk ditindaklanjuti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon, dapat dirumuskan/ditentukan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. Kesiapan sektor perdagangan dan perindustrian dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
- c. Peningkatan pemberdayaan konsumen, standarisasi, tertib ukur, seerta pengawasan dan pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen.
- d. Penguatan pasokan dan jaringan distribusi dalam menjaga ketersediaan kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya;
- e. Belum optimalnya pengelolaan kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan dalam meningkatkan nilai tambah dan peningkatan kontribusi terhadap PDRB.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Dengan mempertimbangkan akan penyesuaian Pagu Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah serta melihat akan kebutuhan pendanaan untuk penyesuaian Gaji ASN dan Tenaga Kontrak, maka dianggap perlu untuk melakukan beberapa penyesuaian rincian kegiatan dengan semaksimal mungkin tidak akan mempengaruhi pencapaian Target dan Indikator yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon Pada Tahun 2022.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					TOTAL				4,432,361,000			4,387,251,426	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Tomohon	100%	3,342,459,332			100%	3,554,605,265
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tomohon	100%	10,732,680	APBD		100%	11,805,948
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tomohon	2 Dokumen	3,596,840	APBD		2 Dokumen	3,956,524
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Dokumen Laporan	Tomohon	1 Laporan	3,366,740	APBD		1 Laporan	3,703,414

X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tomohon	1 Laporan	3,769,100	APBD		1 Laporan	4,146,010
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tomohon	100%	2,369,564,795	APBD		100%	2,606,521,275
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tomohon	21 Orang/Bulan	2,217,528,895	APBD		21 Orang/Bulan	2,439,281,785
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tomohon	1 Dokumen	148,192,400	APBD		12 Dokumen	163,011,640
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tomohon	1 Laporan	3,843,500	APBD		1 Laporan	4,227,850
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tomohon	100%	23,017,863	APBD		100%	25,319,649
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tomohon	43 Paket	23,017,863	APBD		43 Paket	25,319,649
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	259,052,123	APBD		100%	284,957,335
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tomohon	1 Paket	3,491,575	APBD		30 Paket	3,840,733

X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tomohon	1 Paket	70,148,670	APBD		10 Paket	77,163,537
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tomohon	1 Paket	28,258,800	APBD		25 Paket	31,084,680
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tomohon	1 Paket	25,629,678	APBD		45 Paket	28,192,646
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tomohon	1 Paket	13,575,400	APBD		15000 Paket	14,932,940
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tomohon	520 Dokumen	5,813,000	APBD		520 Dokumen	6,394,300
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tomohon	130 Laporan	5,185,000	APBD		130 Laporan	5,703,500
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	78 Laporan	106,950,000	APBD		78 Laporan	117,645,000
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tomohon	100%	27,314,700	APBD		100%	30,046,170
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tomohon	5 unit	27,314,700	APBD		5 unit	30,046,170
X	XX	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tomohon	100%	335,268,388	APBD		100%	368,795,227

3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (IUPP/SIUP PUSAT PERBELANJAAN DAN IUTM/IUTS/SIUP TOKO SWALAYAN)	Tomohon	68%	0	APBD		70%	0
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Pemenuhan Komitmen	Tomohon	20 Ijin	0	APBD		20 Ijin	0
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Tomohon	20 Dokumen		APBD		20 Dokumen	0
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tomohon	5 TDG	0	APBD		5 TDG	0
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG	Tomohon	5 Dokumen		APBD		5 Dokumen	0
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	Tomohon	20 SIUP MB	0	APBD		20 SIUP MB	0

3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tomohon	20 Dokumen		APBD		20 Dokumen	0
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DI WILAYAH KERJANYA	Tomohon	1 Unit	190,618,363	APBD			209,680,199
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tomohon	1 unit	152,914,813	APBD			168,206,294
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Tomohon	1 unit	50,459,497	APBD		1 unit	55,505,447
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tomohon	1 Unit	102,455,316	APBD		1 Unit	112,700,848
3	30	03	2.02		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Tomohon	1 Kali	37,703,550	APBD		1 Kali	41,473,905
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tomohon	1 Dokumen	37,703,550	APBD		1 Dokumen	41,473,905

3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU	Tomohon	12 Bulan	125,994,950	APBD		12 Bulan	138,594,445
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemantauan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tomohon	12 Bulan	40,906,550	APBD		12 Bulan	44,997,205
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tomohon	1 Laporan	40,906,550	APBD		1 Laporan	44,997,205
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Tomohon	12 Bulan	44,155,750	APBD		12 Bulan	48,571,325
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tomohon	12 Laporan	44,155,750	APBD		12 Laporan	48,571,325

3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Persentase Realisasi Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan	Tomohon	12 Bulan	40,932,650	APBD		12 Bulan	45,025,915
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Tomohon	12 Dokumen	12,486,550	APBD		12 Dokumen	13,735,205
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Tomohon	12 Laporan	28,446,100	APBD		12 Laporan	31,290,710
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	CAKUPAN PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	Tomohon	1 Produk	93,853,677	APBD		1 Produk	103,239,045
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kota	Dalam dan Luar Daerah	4 Pameran	93,853,677	APBD		4 Pameran	103,239,045
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Dalam dan Luar Daerah	1 Pelaku Usaha	35,282,450	APBD		1 Pelaku Usaha	38,810,695
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Dalam dan Luar Daerah	2 Pelaku Usaha		APBD		2 Pelaku Usaha	0
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Dalam dan Luar Daerah	2 Pelaku Usaha	58,571,227	APBD		2 Pelaku Usaha	64,428,350

3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU	Tomohon	12 Bulan	122,746,960	APBD		12 Bulan	135,021,656
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera,/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan	Tomohon	12 Bulan	122,746,960	APBD		12 Bulan	135,021,656
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Tomohon	12 Orang	36,449,660	APBD		12 Bulan	40,094,626
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Tomohon	100	86,297,300	APBD		12 Bulan	94,927,030
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	CAKUPAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Tomohon	70%	106,652,580	APBD		70%	117,317,838
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tomohon	1 Kali	106,652,580	APBD		1 Kali	117,317,838
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Tomohon	1 UMKM	45,761,450	APBD		1 UMKM	50,337,595
3	30	06	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tomohon	1 Dokumen	60,891,130	APBD		1 Dokumen	66,980,243
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								

3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP	Tomohon	5%	380,304,738	APBD		6%	418,335,212
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Sentra Industri, Persentase Tereleaksikannya Dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya Perda	Tomohon dan luar daerah	3 dokumen	380,304,738	APBD		3 dokumen	418,335,212
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Tomohon	1 dokumen	9,725,968	APBD		1 dokumen	10,698,565
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	155,850,476	APBD		1 Dokumen	171,435,524
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	54,990,794	APBD		1 Dokumen	60,489,873
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Luar Daerah	1 Dokumen	159,737,500	APBD		1 Dokumen	175,711,250

3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT	Tomohon	5%	42,395,150	APBD		6%	46,634,665
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah izin usaha industri, Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan Uasha Industri IUI Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan	Tomohon	2 dokumen	42,395,150	APBD		2 dokumen	46,634,665
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Tomohon	20 dokumen	27,717,750	APBD		20 dokumen	30,489,525

3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Tomohon	20 dokumen	14,677,400	APBD		20 dokumen	16,145,140
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	TERSEDIAANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI	Tomohon	10%	27,335,250	APBD		15%	30,068,775
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Industri, Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupate/Kota yang masuk dalam SIInas terhadap Totalm Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan kawasan Industri di Kabupaten/Kota	Tomohon	1 Dokumen	27,335,250	APBD		1 Dokumen	30,068,775

3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tomohon	1 Dokumen	27,335,250	APBD		1 Dokumen	30,068,775
---	----	----	------	----	---	--	---------	-----------	------------	------	--	-----------	------------

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2022 ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon, untuk saat ini Tidak ada Usulan dari Pemangku Kepentingan, baik Pokir Dewan maupun Usulan Masyarakat.

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.4. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon juga dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tomohon serta Program Unggulan Pembangunan Kota Tomohon utamanya menyangkut :

1. PENATAAN PASAR TOMOHON MENJADI PASAR TRADISIONAL MODERN ;
2. MEMBUKA AKSES EKONOMI DAN PARIWISATA MELIPUTI KAYAWU-KOHA-AGOTEY SEBAGAI PENYANGGA “KEK “ LIKUPANG, MENINGAT TOMOHON MERUPAKAN DAERAH TERDEKAT IBUKOTA PROVINSI, SEHINGGA MENJADI SALAH SATU DAERAH BERPOTENSI PENYANGGA EKONOMI dan
3. TOMOHON SMART CITY.

Kaitan dengan itu maka salah satu tujuan penyusunan program kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon adalah terwujudnya program dan kegiatan. Berkaitan dengan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon merumuskan berbagai program sebagai upaya dalam melaksanakan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah secara maksimal sesuai aturan yang berlaku, dan juga dalam rangka untuk menunjang kebijakan nasional baik di Bidang Perdagangan dan Perindustrian maka Pencapaian dari masing masing sasaran strategis tersebut dapat diukur dengan adanya indikator yang telah disusun. Dalam mencapai sasaran strategis tersebut Kementerian Perdagangan melaksanakan program yang merupakan penjabaran dan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Lingkup dari program yang dilaksanakan mencakup berbagai kegiatan dalam upaya mendukung perdagangan sebagai penggerak penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta penciptaan kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Keberhasilan dalam menjadikan perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta menciptakan kemakmuran rakyat yang berkeadilan, secara keseluruhan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Artinya keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dari Kementerian Perdagangan itu sendiri. Untuk itu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon terutama di sektor Perdagangan memegang peranan penting dalam menjaga ketersediaan dan distribusi serta stabilisasi harga barang pokok dan barang penting, mewujudkan pelaku usaha yang bertanggung jawab dan konsumen yang berdaya, meningkatkan nilai dan volume ekspor komoditi non-migas, sedangkan disektor Industri

Apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri Tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang berkompeten dengan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA

Tujuan Renja Disperdagin Tahun 2023 disusun agar dapat dijadikan landasan dan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan juga kebijakan dalam mengembangkan serta membangun Perdagangan dan Perindustrian di Kota Tomohon Tahun 2023 untuk mencapai Tujuan **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas, Adil dan Merata”**

Sedangkan Sasaran dan Indikator Kinerja adalah dengan ditetapkannya tujuan yang hendak dicapai, maka ditetapkan pula sasaran **“Meningkatnya Perekonomian Kota Tomohon”**.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas SMART (*Specific, Measureable, Acceptable, Result, Time Lines*). Sasaran bersifat spesifik dan terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam waktu tertentu baik tahunan, sementara, triwulan atau bulanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon telah menetapkan sasaran Rencana Kerja sebagai berikut :

- Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan.
- Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)
- Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Tekendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Meningkatnya mutu Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
- Terselesainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Terselesainya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Tersedianya dokumen perencanaan dan pembangunan industri
- Terfasilitasinya pemberian izin usaha kepada pelaku usaha di bidang industri .
- Tersedianya informasi industri yang menjadi kewenangan kab/kota

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:

- **Visi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon periode 2021 – 2024**
“ TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA “
- **Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon periode 2021 – 2024**
 - **Menjaga dan Melestarikan Tomohon Sebagai Kota Religius**
 - **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Berbagai Sektor**
 - **Memajukan Sistem Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan**
 - **Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berintegritas**
- Program Unggulan Pemerintah Kota Tomohon di Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian yang dirumuskan dari Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon ;

1. PENATAAN PASAR TOMOHON MENJADI PASAR TRADISIONAL MODERN ;

2. MEMBUKA AKSES EKONOMI DAN PARIWISATA MELIPUTI KAYAWU-KOHA-AGOTEY SEBAGAI PENYANGGA “KEK “ LIKUPANG, MENINGAT TOMOHON MERUPAKAN DAERAH TERDEKAT IBUKOTA PROVINSI, SEHINGGA MENJADI SALAH SATU DAERAH BERPOTENSI PENYANGGA EKONOMI dan

3. TOMOHON SMART CITY.

- Program Unggulan Pemerintah Kota Tomohon di Bidang Perdagangan
Adapun program unggulan Bidang Perdagangan adalah sebagai berikut:
 - Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat
 - Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Aku Cinta Produk Indonesia) yang merupakan Program Nasional
 - Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- Program Unggulan Pemerintah Kota Tomohon di Bidang Perindustrian
 - Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 - Program Pembangunan Industri Kecil dan Menengah
 - Program Pembinaan Pengawetan sektor Industri
 - Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - Pengembangan Industri Kecil Menengah.

Untuk Pencapaian Visi - Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah dan Pengembangan Daerah Terisolir terutama di Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang saat ini berfokus pada Pemulihan Ekonomi, dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target Rencana Kerja Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon pada Tahun 2023.

Dalam menunjang pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon, dijabarkan dalam 10 Program dan 22 Kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.
 - Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN.
 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN.
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING.
 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR.
 - Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

6. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.
 - Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
7. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI.
 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
8. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.
 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
9. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI.
 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
10. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Semua Program dan Kegiatan dimaksud, akan dilaksanakan di Kota Tomohon dengan memerlukan pagu Anggaran sebesar Rp 4.432,361,000,- yang kesemuanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun program dan kegiatan perubahan Renja Tahun 2023 beserta indikator capaiannya dapat dilihat ditabel berikut ini.

Tabel 3.1
Rumusa Rencana Program dan Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJM D	Real isasi Capa ian RKP D Tahu n 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3,982,325,862							6,842,105,406	
3	30	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Perse n		Persen	100 Persen	3,342,459,332						100 Persen	4,756,388,359	
3	30	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perse n		Persen	100 Persen	10,732,680						100 Persen	11,816,384	
3	30	001	2	00 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3,596,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	2 Dokumen	3,744,994	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
													03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas						
3	30	001	2	##	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3,366,740	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Laporan	3,600,440	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

3	30	001	2	##	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3,769,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Laporan	4,470,950	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Person		Persen	100 Persen	2,369,564,795							100 Persen	3,076,783,659	
						Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Person		Persen	100 Persen								100 Persen		
3	30	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2,217,528,895	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	23 Orang/bulan	2,592,100,493	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	2	##	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	148,192,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Dokumen	479,900,520	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	2	##	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,843,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Laporan	4,782,646	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
3	30	001	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Person		Persen	100 Persen	23,017,863							100 Persen	97,484,848	
3	30	001	2	##	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	23,017,863	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	32 Paket	97,484,848	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	

3	30	001	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perse n		Persen	100 Persen	259,052,123						100 Persen	786,063,061	
3	30	001	2	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,491,575	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Paket	3,843,868	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	001	2	##	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	70,148,670	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	10 Paket	84,700,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	001	2	##	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	28,258,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Paket	30,250,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	001	2	##	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,629,678	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Paket	43,897,179	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	001	2	##	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13,575,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Paket	23,591,854	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	001	2	##	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				520 Dokumen	5,813,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	520 Dokumen	175,716,917	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	001	2	##	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				130 Laporan	5,185,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	130 Laporan	17,309,050	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	001	2	##	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78 Laporan	106,950,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	78 Laporan	406,754,193	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

3	30	001	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perse n		Persen	100 Persen	27,314,700						100 Persen	76,243,153	
3	30	001	2	##	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	27,314,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	5 Unit	76,243,153	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	001	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perse n		Persen	100 Persen	335,268,388						100 Persen	124,648,530	
3	30	001	2	00 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	13,200,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	12 Laporan	14,520,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	001	2	##	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30,472,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	12 Laporan	54,450,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	001	2	##	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	291,596,388	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1 Laporan	55,678,530	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	001	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perse n		Persen	100 Persen	317,508,783						100 Persen	583,348,724	
3	30	001	2	00 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	185,267,600	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	7 Unit	314,600,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	001	2	##	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	14,729,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	12 Unit	16,361,620	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

3	30	001	2	##	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	6,511,483	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	8 Unit	32,607,104	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	001	2	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	111,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Unit	219,780,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	002			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (IUPP/SIUP PUSAT PERBELANJAAN DAN IUTM/IUTS/SIUP TOKO SWALAYAN)	Perse n		Persen	68 Persen	11,205,000						68 Persen	111,016,744	
3	30	002	2		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Ijin Usaha yang difasilitasi	Ijin		Ijin	20 Ijin	4,800,000						20 Ijin	37,510,000	
3	30	002	2	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	4,800,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	20 Dokumen	37,510,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	002	2		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Doku men		Dokumen	5 Dokumen	3,330,000						5 Dokumen	35,996,744	
						Persentase Penerbitan TDG	Perse n		Persen	70 Persen							70 Persen		
3	30	002	2	001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				5 Dokumen	3,330,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	5 Dokumen	35,996,744	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

3	30	002	2		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	SIUP MB		SIUP MB	20 SIUP MB	3,075,000						20 SIUP MB	37,510,000	
3	30	002	2	001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	3,075,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	20 Dokumen	37,510,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	003			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DIWILAYAH KERJANYA.	Person		Persen	100 Persen	190,618,363						100 Persen	1,180,960,000	
3	30	003	2		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit		unit	1 unit	152,914,813						1 unit	1,139,930,000	
3	30	003	2	001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	50,459,497	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Unit	1,100,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	003	2	##	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	102,455,316	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Unit	39,930,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	003	2		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kali		Kali	1 Kali	37,703,550						1 Kali	41,030,000	

						Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	Perse n		Persen	100 Persen							100 Persen		
3	30	003	2	00 1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	37,703,550	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Dokumen	41,030,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	004			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU.	Perse n		Persen	8.1 Persen	125,994,950						8.1 Persen	134,445,994	
3	30	004	2		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemantauan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	40,906,550						12 Bulan	43,923,000	
3	30	004	2	00 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	40,906,550	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	12 Laporan	43,923,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	004	2		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	44,155,750						12 Bulan	43,244,790	
						Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Perse n		Persen	8.1 Persen							8.1 Persen		
3	30	004	2	##	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	44,155,750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	12 Laporan	43,244,790	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	004	2		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	40,932,650						12 Bulan	47,278,204	

						Persentase Realisasi Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	Perse n		Persen	90 Persen							90 Persen		
3	30	004	2	00 1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				12 Dokumen	12,486,550	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	12 Dokumen	15,732,173	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	004	2	##	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	28,446,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	12 Laporan	31,546,031	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	005			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	CAKUPAN PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	Produ k		Produk	1 Produk	100,513,677						1 Produk	324,435,719	
3	30	005	2		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kota	Pamer an		Pameran	4 Pameran	100,513,677						4 Pameran	324,435,719	
3	30	005	2	00 1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				1 Pelaku Usaha	35,282,450	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Pelaku Usaha	70,427,510	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	005	2	##	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				2 Pelaku Usaha	6,660,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	2 Pelaku Usaha	198,565,646	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	005	2	##	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				2 Pelaku Usaha	58,571,227	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	2 Pelaku Usaha	55,442,563	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

3	30	006			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE UTPP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU.	Perse n		Persen	30 Persen	122,746,960						30 Persen	140,250,000	
3	30	006	2		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Bulan		Bulan	12 Bulan	122,746,960						12 Bulan	140,250,000	
3	30	006	2	00 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				200 Unit	86,297,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	200 Unit	110,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	006	2	##	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				20 Orang	36,449,660	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	20 Orang	30,250,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	30	007			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	CAKUPAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Perse n		Persen	70 Persen	88,787,580						70 Persen	194,608,590	
3	30	007	2		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kali		Kali	1 Kali	88,787,580						1 Kali	194,608,590	
3	30	007	2	00 1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				1 UMKM	27,896,450	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 UMKM	114,950,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

3	30	007	2	##	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				1 Dokumen	60,891,130	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Dokumen	79,658,590	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						450,035,138							756,223,948	
3	31	002			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIIP	Person		Persen	5 Persen	380,304,738						5 Persen	637,780,000	
3	31	002	2		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Sentra Industri	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	380,304,738						3 Dokumen	637,780,000	
						Persentase terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan PERDA	Person		Persen	85 Persen							85 Persen		
3	31	002	2	001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	9,725,968	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Dokumen	306,240,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	31	002	2	##	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	155,850,476	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Dokumen	55,660,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

3	31	002	2	##	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	54,990,794	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Dokumen	55,660,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	31	002	2	##	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	159,737,500	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	1 Dokumen	220,220,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3	31	003			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT	Person		Persen	5 Persen	42,395,150						5 Persen	65,749,102	
3	31	003	2		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Industri	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	42,395,150						2 Dokumen	65,749,102	
						Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan Usaha industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan	Person		Persen	100 Persen							100 Persen		
3	31	003	2	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				20 Dokumen	27,717,750	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	MASYARAKAT	20 Dokumen	51,071,499	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon adalah untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi. Disisi lainnya pelaksanaan Program dan Kegiatan harus sejalan denganPrioritas Pembangunan Daerah ataupun Program Prioritas Kepala Daerah. Secara rinci Rencana Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	TOTAL				4,432,361,000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Tomohon	100%	3,342,459,332	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tomohon	100%	10,732,680	APBD
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tomohon	2 Dokumen	3,596,840	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Dokumen Laporan	Tomohon	1 Laporan	3,366,740	APBD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tomohon	1 Laporan	3,769,100	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tomohon	100%	2,369,564,795	APBD
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tomohon	21 Orang/Bulan	2,217,528,895	APBD

2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tomohon	1 Dokumen	148,192,400	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tomohon	1 Laporan	3,843,500	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tomohon	100%	23,017,863	APBD
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tomohon	43 Paket	23,017,863	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	259,052,123	APBD
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tomohon	1 Paket	3,491,575	APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tomohon	1 Paket	70,148,670	APBD
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tomohon	1 Paket	28,258,800	APBD
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tomohon	1 Paket	25,629,678	APBD
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tomohon	1 Paket	13,575,400	APBD
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tomohon	520 Dokumen	5,813,000	APBD
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tomohon	130 Laporan	5,185,000	APBD
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	78 Laporan	106,950,000	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tomohon	100%	27,314,700	APBD
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tomohon	5 unit	27,314,700	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tomohon	100%	335,268,388	APBD

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tomohon	12 Laporan	13,200,000	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tomohon	12 Laporan	30,472,000	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tomohon	1 Laporan	291,596,388	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tomohon	100%	317,508,783	APBD
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tomohon	7 Unit	185,267,600	APBD
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tomohon	12 Unit	14,729,700	APBD
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Tomohon	8 Unit	6,511,483	APBD
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tomohon	1 Unit	111,000,000	APBD
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN						
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (IUPP/SIUP PUSAT PERBELANJAAN DAN IUTM/IUTS/SIUP TOKO SWALAYAN)	Tomohon	68%	0	APBD
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Pemenuhan Komitmen	Tomohon	20 Ijin	0	APBD
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Tomohon	20 Dokumen		APBD
2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tomohon	5 TDG	0	APBD
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG	Tomohon	5 Dokumen		APBD

3	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	Tomohon	20 SIUP MB	0	APBD
1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tomohon	20 Dokumen		APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DI WILAYAH KERJANYA	Tomohon	1 Unit	190,618,363	APBD
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tomohon	1 unit	152,914,813	APBD
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Tomohon	1 unit	50,459,497	APBD
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tomohon	1 Unit	102,455,316	APBD
3	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Tomohon	1 Kali	37,703,550	APBD
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tomohon	1 Dokumen	37,703,550	APBD
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU	Tomohon	12 Bulan	125,994,950	APBD
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemantauan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tomohon	12 Bulan	40,906,550	APBD
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tomohon	1 Laporan	40,906,550	APBD

2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Tomohon	12 Bulan	44,155,750	APBD
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tomohon	12 Laporan	44,155,750	APBD
3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Persentase Realisasi Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan	Tomohon	12 Bulan	40,932,650	APBD
1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Tomohon	12 Dokumen	12,486,550	APBD
2	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Tomohon	12 Laporan	28,446,100	APBD
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	CAKUPAN PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	Tomohon	1 Produk	93,853,677	APBD
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kota	Dalam dan Luar Daerah	4 Pameran	93,853,677	APBD
1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Dalam dan Luar Daerah	1 Pelaku Usaha	35,282,450	APBD
2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Dalam dan Luar Daerah	2 Pelaku Usaha		APBD
3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Dalam dan Luar Daerah	2 Pelaku Usaha	58,571,227	APBD
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU	Tomohon	12 Bulan	122,746,960	APBD
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera,/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan	Tomohon	12 Bulan	122,746,960	APBD
1	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Tomohon	12 Orang	36,449,660	APBD

2	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Tomohon	100	86,297,300	APBD
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	CAKUPAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Tomohon	70%	106,652,580	APBD
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tomohon	1 Kali	106,652,580	APBD
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Tomohon	1 UMKM	45,761,450	APBD
2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tomohon	1 Dokumen	60,891,130	APBD
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP	Tomohon	5%	380,304,738	APBD
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Sentra Industri, Persentase terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya Perda	Tomohon dan luar daerah	3 dokumen	380,304,738	APBD
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Tomohon	1 dokumen	9,725,968	APBD
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	155,850,476	APBD
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	54,990,794	APBD
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Luar Daerah	1 Dokumen	159,737,500	APBD

9	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT	Tomohon	5%	42,395,150	APBD
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah izin usaha industri, Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan Uasha Industri IUI Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan	Tomohon	2 dokumen	42,395,150	APBD
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Tomohon	20 dokumen	27,717,750	APBD
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Tomohon	20 dokumen	14,677,400	APBD
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI	Tomohon	10%	27,335,250	APBD
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Industri, Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupate/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap Totalm Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan kawasan Industri di Kabupaten/Kota	Tomohon	1 Dokumen	27,335,250	APBD

1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tomohon	1 Dokumen	27,335,250	APBD
---	---	--	---------	-----------	------------	------

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan.

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan dan keterbatasan anggaran, adalah sebagai berikut:

- Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran **“Meningkatnya Perekonomian Kota Tomohon”**, Program tersebut adalah Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program-program tersebut merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga membutuhkan dana yang cukup.
- Jika keterbatasan atau ketidak tersediaan anggaran untuk Program Program tersebut maka akan berpengaruh langsung untuk pencapaian Program Nasional dalam rangka pemulihan Ekonomi.
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, masih memerlukan peralatan yang cukup, dalam rangka pengoperasian UPTD Metrologi Legal Daerah, sehingga dalam pelaksanaannya harus mendapat alokasi anggaran yang cukup.
- Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

- Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang
- Dalam melaksanakan Rencana kerja perlu adanya upaya keterlibatan masyarakat, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam penyusunan KUA-PPAS sampai dalam ABPD harus mengacu pada Rencana Kerja ini agar terciptanya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi serta capaian kinerja Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana dalam Prioritas Unggulan

Walikota dan wakil Walikota Tomohon yang dituangkan dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021- 2026.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.” Dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Tomohon sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Bapelitbang Kota Tomohon, yang berpedoman pada Renstra Bapelitbang Kota Tomohon. Terkait belum ditetapkannya Renstra Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2021-2026 pada saat penyusunan Renja Bapelitbang Tahun 2023, maka Renja disusun dengan berpedoman pada RKPD Kota Tomohon Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 tersebut mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025 periode keempat, serta memperhatikan Visi, Misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Renja Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2023.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27);
- n. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026;

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Bapelitbang Kota Tomohon di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbang Kota Tomohon secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Bapelitbang Kota Tomohon pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Tomohon Tahun 2023;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbang Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2023.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bapelitbang Kota Tomohon, analisis kinerja pelayanan Bapelitbang Kota Tomohon, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbang, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Bapelitbang Kota Tomohon.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPELITBANG KOTA TOMOHON TAHUN LALU.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANG KOTA TOMOHON TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPELITBANG KOTA TOMOHON.

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan Tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Bapelitbangda Kota Tomohon Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Bapelitbang Kota Tomohon sampai dengan tahun 2022.

Pada tahun 2021 Bapelitbang Kota Tomohon melaksanakan 4 (empat) program dan 16 (enam belas) kegiatan dengan 63 (enam puluh tiga) Sub kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
5	01				Bidang Urusan Perencanaan								
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	100		100	100	100	100	100
5	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan	10	2	2	100	2	4	40
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	2	2	100	2	4	40
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen	5	1	1	100	1	2	40
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen	5	1	1	100	1	2	40

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	5		1	1	100	1	2	40	
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	1		1	1	100	1	2	40	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	10		2	2	100	2	4	40	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	20		4	4	100	4	8	40	
5	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji ASN Bapelitbangda	1000		200	200	100	203	403	40	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	175		35	35	100	35	70	40	
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	1000		200	200	100	200	400	40	
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan	5		1	1	100	1	2	40	
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen	25		5	5	100	5	10	40	
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Jumlah laporan	90		18	18	100	18	36	40	
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan	10		2	2	100	2	4	40	
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan	130		26	26	100	26	52	40	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen	10			2	2	100	2	4	40
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan	60			12	12	100	12	24	40
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen	60			12	12	100	12	24	40
5	01	02	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	15			3	3	100	3	6	40
5	01	02	2.03	01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah pasang pakaian	126			-	-	-	42	-	0
5	01	02	2.03	03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen	5			1	1	100	1	2	40
5	01	02	2.03	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang							25		
5	01	02	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan umum (Tahun)	100			100	100	100	1	100	100
5	01	02	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen	50			5	5	100	10	15	30
5	01	02	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK (item)	500			50	50	100	100	150	30
5	01	02	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar	400			50	50	100	50	100	20
5	01	02	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksemplar	1000			240	240	100	240	480	45
5	01	02	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang	500			60	60	100	100	160	30

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	02	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang	100		20	20	100	20	40	40	
5	01	02	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tahun	5		1	1	100	1	2	40	
5	01	02	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan	35		7	7	100	7	14	40	
5	01	02	2.08	01	Penediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	1000		200	200	100	200	400	40	
5	01	02	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi. Sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening	20		4	4	100	4	8	40	
5	01	02	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang	100		20	20	100	20	40	40	
5	01	02	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang	35		7	7	100	7	14	100	
5	01	02	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit yg dipelihara	25		5	5	100	5	10	40	
5	01	02	2.08	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit	5		1	1	100	1	2	40	
5	01	02	2.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan	30		6	6	100	6	12	40	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
5	01	02	2.08	5		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
5	01	02	2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan									
5	01	02	2.01	02		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah									
5	01	02	2.01	02		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah kegiatan	5		1	1	100	1	2	40
5	01	02	2.01	03		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah kegiatan	5		1	1	100	1	2	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					Jumlah kegiatan	5		1	1	100	1	2	40
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah kegiatan	10		2	2	100	2	4	40
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					Jumlah dokumen	10		2	2	100	2	4	100
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	40
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD					Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	40
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	40
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah													
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan					Jumlah dokumen	55		11	11	100	11	22	40

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan	15		3	3	100	3	6	40
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program RPJMD / RKPD ke dalam Renstra / Renja	100		100	100	100	100	100	100
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	20		4	4	100	4	8	400
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
5	01	03	2.01	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.01	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.01	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen	30		6	6	100	6	12	40
5	01	03	2.02	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	8		2	2	100	2	4	40

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						(RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	5			1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	5			1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	5			1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen	5			1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen	5			1	1	100	1	2	400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen	30		6	6	100	6	12	40
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Kewilayahan									
5	01	03	2.03	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi daerah						10		
5	05	02	2.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kajian / penelitian	15		3	3	100	3	6	40
5	05	02	2.01	01		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen kajian / penelitian	5		1	1	100	1	2	400
5	05	02	2.01	04		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan									

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Reformasi Birokrasi									
5	05	02	2.01	12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen data kelitbangan dan peraturan	5		1	1	100	1	2	400
5	05	02	2.02			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan									
						Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga									
						Penelitian dan Pengembangan Kesehatan									
5	05	02	2.03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kajian / penelitian	10		2	2	100	2	4	40
5	05	02	2.03	02		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
5	05	02	2.03	04		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen kajian / penelitian	5		1	1	100	1	2	40

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bapelitbang Kota Tomohon melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Tomohon maupun dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bapelitbang Kota Tomohon adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Tomohon, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;
6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Upaya Bapelitbang Kota Tomohon dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- 3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan Forum Lintas Perangkat Daerah;
- 4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- 5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kota oleh Bapelitbangda dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- 2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
- 3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholder di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- 4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;

5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 Bapelitbangda Kota Tomohon melaksanakan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bapelitbangda Kota Tomohon Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan PD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Bapelitbangda Kota Tomohon terdapat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPELITBANGDA
KOTA TOMOHON

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan				92	94	96	90	92	94	96	
2	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan				100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase implementasi rencana kelitbangan				50	70	80	50	50	70	80	
4	Persentase Pemanfaatan hasil Kelitbangan				10	20	30	NA	20	20	30	
5	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah				10	20	30	NA	20	20	30	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbang Kota Tomohon tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan

pelayanan Bappeda Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Secara umum kinerja pelayanan Bapelitbang Kota Tomohon terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2023 maupun Renstra Tahun 2016-2021 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui.
- Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang. Selain itu juga perlu diupayakan secara bertahap agar kegiatan-kegiatan pada Bappeda memperhatikan kaum perempuan serta kaum marginal lainnya (penduduk miskin, anak, lansia, difabel), dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender.
- Beberapa indikator kinerja daerah yang bersifat makro belum dapat mencapai target. Bapelitbang perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan peran Bapelitbang sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

- a. Permasalahan terkait kebijakan penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) serta penyesuaian dengan nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - 1) Perlu dilakukan mapping nomenklatur program dan kegiatan berikut indikator kinerjanya ke dalam nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai jembatan penghubung antara perencanaan dengan penganggaran tahun 2021;
 - 2) Menu – menu dalam SIPD masih dalam tahap pengembangan, sehingga dalam perjalanannya terdapat pemutakhiran - pemutakhiran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan dinamika regulasi yang ada;
 - 3) SIPD dapat diterapkan pada tahap perencanaan dan penganggaran, namun pada tahapan penatausahaan keuangan masih terdapat kendala.
- b. Masih perlu dimaksimalkannya ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dalam berbagai sektor untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Permasalahan lain terkait perencanaan pembangunan daerah diantaranya :
 - 1) Perlu lebih diintensifkan dan dioptimalkannya koordinasi antar perangkat daerah dan dengan berbagai stakeholder terkait pelaksanaan berbagai kebijakan serta penyusunan dokumen perencanaan;

- 2) Terdapat regulasi terkait periodisasi perencanaan jangka menengah, yang berbeda dengan periodisasi pada beberapa dokumen kajian atau dokumen perencanaan lainnya yang telah disusun, sehingga diperlukan penyesuaian.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bapelitbangda Kota Tomohon, khususnya di tahun tahun mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- 2) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaian serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
- 3) Perencanaan dan penganggaran dengan “e-performance based budgeting”. Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut “e-performance based budgeting” sehingga sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
- 4) Perkembangan Kota Tomohon beserta Seluruh Permasalahannya. Sebagai sebuah kota yang berkembang Kota Tomohon memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

b. Peluang

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur. Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bapelitbangda Kota Tomohon, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota.

Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tomohon beserta indikator dan targetnya. Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota juga dilengkapi serangkaian program dan kegiatan prioritas.

Dalam hal ini, sebagai koordinator perencanaan pembangunan, salah satu fungsi Bapelitbangda Kota Tomohon adalah perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, Bapelitbangda Kota Tomohon perlu memiliki komitmen kuat dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

- b. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota terjabarkan dalam perencanaan perangkat daerah, perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, dan memastikan bahwa perencanaan akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan); serta terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan. Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Kota Tomohon.

- c. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

- d. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Tomohon terkait Perencanaan Pembangunan Daerah
- e. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bapelitbangda.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelitbangda Kota Tomohon perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Renja Bapelitbangda Kota Tomohon Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Bapelitbangda Kota Tomohon, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah: Bapelitbangda Kota Tomohon

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CatatanPenting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Tomohon	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	100	3.306.609	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Tomohon	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	100	4.000.00	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen	2	2.359.385	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen	2	3.000.000	Perlu dianggarkan berdasarkan kebutuhan terutama pelaksanaan konsultasi public dan Musrenbang
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kota Tomohon	Persentase Pemanfaatan	5	419.399	Program Penelitian dan	Kota Tomohon	Persentase Pemanfaatan	5	1.000.000	Anggaran kelibangan perlu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CatatanPenting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			hasil kelitbangan			Pengembangan Daerah		hasil kelitbangan			menyesuaikan dengan Mandatory
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan	3	399.000	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan	3	6.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Bapelitbangda Kota Tomohon memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Bapelitbangda Kota Tomohon, telah terjaring aspirasi berupa usulan kegiatan. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Bapelitbangda Kota Tomohon beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Tomohon

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				
1.1.1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan Konsultasi Publik	1	Usulan untuk pelaksanaan konsultasi public agar melibatkan lebih banyak stakeholder khususnya Akademisi dan Praktis
1.1.2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan Musrenban g	5	Usulan dalam musrenbang untuk dijabarkan dalam program yang ada pada Perangkat daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka menengah. RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dari tahapan RPJPN 2005-2025 yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Kementerian

PPN/Bappenas merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional berkewajiban untuk mengawal tercapainya sasaran dan target kedua hal tersebut.

Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dapat tercapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Setiap Agenda Pembangunan memiliki sasaran, indikator dan target pembangunan sampai dengan akhir tahun 2024. Dalam melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024 ditetapkan pula 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Major Project merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, maka Kementerian PPN/Bappenas penetapan dukungan pengarusutamaan (mainstreaming) di dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri atas 4 (empat) pengarusutamaan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yang sekaligus menjiwai seluruh pembangunan sektor dan wilayah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Keempat pengarusutamaan tersebut adalah:

1. Pembangunan Berkelanjutan, yang menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Gender, yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Modal Sosial dan Budaya, yang dimaksudkan sebagai strategi internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.
4. Transformasi Digital, yang terus mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu penyesuaian dengan pembangunan nasional.

Di sisi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan terhadap pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka disusunlah perencanaan pembangunan tahunan atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi atas prioritas-prioritas setiap tahunnya, termasuk pelaksanaan Major Project. Major Project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Bapelitbangda Kota Tomohon Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari

Renstra Bapelitbangda Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Bapelitbangda Kota Tomohon Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 dan Renstra Bapelitbangda Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bapelitbangda Kota Tomohon Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bapelitbangda Kota Tomohon Tahun 2022, yaitu:

“Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien”

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu ***“Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”***.

Tabel 3.1

Target Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda Kota Tomohon Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	92 %
			Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	100%
			Persentase implementasi rencana kelitbangan	50 %
			Persentase Pemanfaatan hasil Kelitbangan	10%
			Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	10%

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan Bapelitbangda Kota Tomohon mempunyai 4 (empat) rumusan program, 16 (enam belas) kegiatan dan 64 (enam puluh

empat) sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d) Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - f) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan perencanaan kebutuhan barang Milik Daerah SKPD
 - b) Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD
 - c) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
 - b) Penyediaan bahan logistic kantor
 - c) Penyediaan bahan cetakan dan pengandaan
 - d) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - e) Fasilitasi kunjungan tamu
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - g) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - a) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - b) Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - c) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - d) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - e) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b) Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD
 - c) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - b) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah

c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b) Assistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan
 - c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan.
 - d) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - e) Assistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia
 - f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya

Alam)

- a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian.
 - d) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - e) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
 - b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur
 - d) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
 - e) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan
 - f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan

d. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - a) Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi
 - b) Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan
- 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - a) Penelitian dan Pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan
- 3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - a) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01				PERENCANAAN								9,041,060,500				12,532,648,616	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,564,051,920				8,681,241,720	
5	01	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								55,640,400				62,663,687	
5	01	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	85 Persen	0 Dokumen 1 Dokumen	9 Dokumen	9,525,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	85 Persen	10,556,150
5	01	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	85 Persen	1 Dokumen	9 Dokumen	8,383,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	85 Persen	9,454,058
5	01	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	85 Persen	1 Dokumen	9 Dokumen	8,383,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	85 Persen	9,454,058

5	01	01	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	85 Persen	1 Dokumen	9 Dokumen	9,324,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	85 Persen	10,499,228
5	01	01	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	85 Persen	1 Dokumen	9 Dokumen	9,324,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	85 Persen	10,499,228
5	01	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	85 Persen	2 Laporan	9 Dokumen	4,875,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	85 Persen	5,609,215
5	01	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	85 Persen	4 Laporan	9 Dokumen	5,824,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	85 Persen	6,591,750
5	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,906,465,455					6,132,805,897
5	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pelayanan Keuangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	35 Orang/bu 1	an100 Persen	4,735,729,555	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Keuangan	100 Persen	5,890,788,297

5	01	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelayanan Keuangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	200 Dokumen	100 Persen	145,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Keuangan	100 Persen	207,345,600
5	01	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Pelayanan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelayanan Keuangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Keuangan	100 Persen	5,610,000
5	01	01	2.0 2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Cakupan Pelayanan Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pelayanan Keuangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	5 Dokumen	100 Persen	4,856,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Keuangan	100 Persen	5,500,000
5	01	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan Pelayanan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semeste SKPD	an aPelayanan Keuangan ran	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	18 Laporan	100 Persen	10,105,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Keuangan	100 Persen	17,952,000
5	01	01	2.0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan Pelayanan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelayanan Keuangan		100 Persen	0 Dokumen 2 Dokumen	100 Persen	5,134,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Keuangan	100 Persen	5,610,000
5	01	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								36,228,900					56,788,460

5	01	01	2.0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan Pelayanan BMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan		100 Persen	12 Dokumen	26 Dokumen	1,273,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan BMD	100 Persen	5,303,470
5	01	01	2.0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pelayanan BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan		100 Persen	12 Laporan	26 Dokumen	4,715,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan BMD	100 Persen	5,303,470
5	01	01	2.0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pelayanan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	26 Dokumen	30,240,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan BMD	100 Persen	46,181,520
5	01	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								250,287,600					486,571,189
5	01	01	2.0 5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pelayanan Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	42 Unit	100 Persen	62,557,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Kepegawai an	100 Persen	64,624,566
5	01	01	2.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	Cakupan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pelayanan Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	42 Paket	100 Persen	31,250,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Kepegawai an	100 Persen	49,207,678
5	01	01	2.0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pelayanan Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	3,420,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Kepegawai an	100 Persen	3,892,005

5	01	01	2.0 5	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pelayanan Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	16,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Kepegawai an	100 Persen	30,596,940
5	01	01	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelayanan Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	25 Orang	100 Persen	136,659,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Kepegawai an	100 Persen	338,250,000
5	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								467,533,805				962,976,275	
5	01	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	10 Paket	100 Persen	9,998,325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Umum	100 Persen	11,219,061
5	01	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	10 Paket	100 Persen	81,594,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Umum	100 Persen	418,459,191
5	01	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	100 Paket	100 Persen	93,526,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Umum	100 Persen	112,422,471
5	01	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	50 Paket	100 Persen	46,781,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Umum	100 Persen	65,075,888

5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	240 Dokumen	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Umum	100 Persen	11,220,000
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	100 Laporan	100 Persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Umum	100 Persen	32,538,000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	20 Laporan	100 Persen	210,278,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Umum	100 Persen	311,642,232
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	356,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Umum	100 Persen	399,432
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								610,114,660					597,040,322
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	200 Laporan	245 Dokumen	20,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan jasa Penunjang	100 Persen	30,294,000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	245 Dokumen	118,143,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan jasa Penunjang	100 Persen	173,381,228

5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	20 Laporan	245 Dokumen	16,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan jasa Penunjang	100 Persen	22,440,000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	7 Laporan	245 Dokumen	455,481,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan jasa Penunjang	100 Persen	370,925,094
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								237,781,100				382,395,890	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Pemeliharaa n BMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	8 Unit	64,597,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Pemelihara an BMD	100 Persen	83,424,740
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Pemeliharaa n BMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	6 Unit	8 Unit	64,847,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Pemelihara an BMD	100 Persen	97,919,970
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Pemeliharaa n BMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Jumlah Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	8 Unit	108,336,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Pemelihara an BMD	100 Persen	201,051,180
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								1,968,756,670				1,812,438,648	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								896,356,500				1,422,438,648	

5	01	02	2.0 1	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan oleh PERDA/PER KADA	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan PERDA/PER WAKO tepat waktu		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	50,441,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan oleh PERDA/PER KADA	100 Persen	55,985,485
5	01	02	2.0 1	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan oleh PERDA/PER KADA	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan PERDA/PER WAKO tepat waktu	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Berita Acara	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan oleh PERDA/PER KADA	100 Persen	158,774,171
5	01	02	2.0 1	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan oleh PERDA/PER KADA	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan PERDA/PER WAKO tepat waktu	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Berita Acara	100 Persen	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan oleh PERDA/PER KADA	100 Persen	224,678,992
5	01	02	2.0 1	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan oleh PERDA/PER KADA	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan PERDA/PER WAKO tepat waktu	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	132 Usulan	100 Persen	25,000,000			Jumlah Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan oleh PERDA/PER KADA	100 Persen	33,000,000

5	01	02	2.0 1	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan oleh PERDA/PER KADA	Jumlah Dokumen Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJP D/RPJMD/RK	Persentase ketersediaan andokumen perencanaan pembanguna n daerah yang ditetapkan dengan PPDE)RDA/ PERWAKO tepat waktu	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	590,914,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencana an yang Ditetapkan oleh PERDA/PE RKADA	100 Persen	950,000,000
5	01	02	2.0 2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								65,568,050				240,000,000	
5	01	02	2.0 2	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data yang terinput di E- Database (SIPD)	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	4 masukan	2 Dokumen	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data yang terinput di E- Database (SIPD)	100 Persen	120,000,000
5	01	02	2.0 2	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Data yang terinput di E- Database (SIPD)	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	50 Orang	2 Dokumen	10,390,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data yang terinput di E- Database (SIPD)	100 Persen	0
5	01	02	2.0 2	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Data yang terinput di E- Database (SIPD)	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	1 Buku	2 Dokumen	35,178,050	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Data yang terinput di E- Database (SIPD)	100 Persen	120,000,000
5	01	02	2.0 3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								953,775,600				150,000,000	
5	01	02	2.0 3	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan provinsi dan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	100 persen	90,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Bidang Perencana an Pembangu nan Daerah	100 Persen	150,000,000

								pusat										
5	01	02	2.0 3	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan provinsi dan pusat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 persen	863,775,600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	0
5	01	02	2.0 4		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								53,056,520					0
5	01	02	2.0 4	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplem entasi SIPD bidang pembanguan daerah		100 Persen	1 Dokumen	100 persen	17,814,120	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Pemerinta han dan Pembangu nan Manusia	100 Persen	0
5	01	02	2.0 4	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplem entasi SIPD bidang pembanguan daerah		100 Persen	1 Dokumen	100 persen	17,740,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Pemerinta han dan Pembangu nan Manusia	100 Persen	0

5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplem entasi SIPD bidang pembanguna n daerah		100 Persen	1 Dokumen	100 persen	17,501,900	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Pemerinta han dan Pembangu nan Manusia	100 Persen	0
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								508,251,910				2,038,968,248	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								283,053,700				985,101,800	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintaha n dan Pembanguna n Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Pemerinta han dan Pembangu nan Manusia	100 Persen	163,200,000
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintaha n dan Pembanguna n Manusia	jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	7 Perangkat Daerah	2 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Pemerinta han dan Pembangu nan Manusia	100 Persen	163,200,000
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintaha n dan Pembanguna n Manusia	jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	2 Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Pemerinta han dan Pembangu	100 Persen	152,796,000

																nan Manusia		
5	01	03	2.0 1	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	2 Dokumen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	0
5	01	03	2.0 1	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	180,438,000
5	01	03	2.0 1	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan renstra/ renja bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	185,330,000

5	01	03	2.0 1	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang pembangunan manusia	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	10 Perangkat Daerah	2 Dokumen	136,053,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencana an Pembangunan Daerah Bidang Pemerinta han dan Pembangu nan Manusia	100 Persen	140,137,800
5	01	03	2.0 1	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah		100 Persen	1 Laporan	2 Dokumen	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencana an Pembangunan Daerah Bidang Pemerinta han dan Pembangu nan Manusia	100 Persen	0
5	01	03	2.0 2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								92,141,700	306,000,000				
5	01	03	2.0 2	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomia n dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	18,301,700	PENDAPAT AN TRANSFER		0Jumlah Dokumen Perencana an Pembangunan Daerah Bidang Perekonom ian dan SDA	100 Persen	40,000,000
5	01	03	2.0 2	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomia n dan SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan renstra/ renja bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	5 Perangkat Daerah	2 Dokumen	13,775,600	PENDAPAT AN TRANSFER		0Jumlah Dokumen Perencana an Pembangunan Daerah Bidang Perekonom ian dan SDA	100 Persen	42,000,000

5	01	03	2.0 2	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang perekonomian	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan 5 Perangkat Daerah	2 Dokumen	9,678,700			0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	40,000,000
5	01	03	2.0 2	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	2 Dokumen	8,569,500	PENDAPATAN TRANSFER		0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	40,000,000
5	01	03	2.0 2	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	12,060,000	PENDAPATAN TRANSFER		0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	30,000,000
5	01	03	2.0 2	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan renstra/ renja bidang SDA	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Perangkat Daerah	2 Dokumen	11,186,100	PENDAPATAN TRANSFER		0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan	100 Persen	24,000,000

																SDA		
5	01	03	2.0 2	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang SDA	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	3 Perangkat Daerah	2 Dokumen	9,717,900	PENDAPATAN TRANSFER		0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	45,000,000
5	01	03	2.0 2	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	2 Dokumen	8,852,200	PENDAPATAN TRANSFER		0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	45,000,000
5	01	03	2.0 3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								133,056,510					747,866,448
5	01	03	2.0 3	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	22,323,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastrukt ur dan Kewilayah an	100 Persen	100,000,000

5	01	03	2.0 3	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan renstra/ renja bidang infrastruktur	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	4 Perangkat Daerah	2 Dokumen	9,845,930	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0Jumlah Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Infrastrukt ur dan Kewilayah an	100 Persen	124,644,408
5	01	03	2.0 3	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang infrastruktur	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	4 Perangkat Daerah	2 Dokumen	6,813,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0Jumlah Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Infrastrukt ur dan Kewilayah an	100 Persen	62,322,204
5	01	03	2.0 3	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	2 Dokumen	6,110,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0Jumlah Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Infrastrukt ur dan Kewilayah an	100 Persen	86,966,612
5	01	03	2.0 3	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	49,399,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0Jumlah Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Infrastrukt ur dan Kewilayah an	100 Persen	100,000,000

5	01	03	2.0 3	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0Jumlah Dokumen Perencanaan n Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang kewilayahan	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	5 Perangkat Daerah	2 Dokumen	22,131,280	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0Jumlah Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Infrastrukt ur dan Kewilayah an	100 Persen	124,644,408
5	01	03	2.0 3	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang kewilayahan	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	5 Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,871,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0Jumlah Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Infrastrukt ur dan Kewilayah an	100 Persen	62,322,204
5	01	03	2.0 3	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	0Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan si Renstra/ReHasil Sinkronisanja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen, Laporan dan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	2 Dokumen	8,560,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0Jumlah Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Infrastrukt ur dan Kewilayah an	100 Persen	86,966,612
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								648,056,500					1,370,000,000
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								648,056,500					1,370,000,000
5	05	02	2.0 1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								53,000,000					105,000,000
5	05	02	2.0 1	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Cakupan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	70 persen	1 Laporan	100 %	53,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase implement asi rencana kelitbanga n	70 persen	105,000,000
5	05	02	2.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								130,000,000					265,000,000

5	05	02	2.0 2	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Cakupan penelitian / kajian bidang pendidikan dan kebudayaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	265,000,000
5	05	02	2.0 4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								465,056,500					1,000,000,000
5	05	02	2.0 4	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Cakupan pengembangan inovasi dan teknologi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 %	245,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Inovasi dan Teknologi	100 Persen	265,000,000
5	05	02	2.0 4	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Cakupan pengembangan inovasi dan teknologi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 %	190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Inovasi dan Teknologi	100 Persen	625,000,000
5	05	02	2.0 4	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Cakupan pengembangan inovasi dan teknologi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 %	30,056,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Inovasi dan Teknologi	100 Persen	110,000,000
TOTAL													9,689,117,000					13,902,648,616

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Tomohon Tahun 2023, dimana RKPD Tahun 2023 yang mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025, serta memperhatikan visi, misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Bapelitbang bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota. Namun secara khusus, Bapelitbang memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas ”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Tomohon;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bapelitbang Kota Tomohon

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bapelitbang Kota Tomohon pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 3 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelitbang;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bapelitbang Kota Tomohon pada tahun 2023 adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 10 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelitbang;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bapelitbang Kota Tomohon pada tahun 2023 adalah sebanyak 64 kegiatan, yang terdiri dari 32 kegiatan penunjang, dan 32 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelitbang;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2023 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada table berikut.

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegi	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	01				PERENCANAAN	9,041,060,500	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,564,051,920	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,640,400	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,525,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8,383,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	8,383,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	9,324,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9,324,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,875,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,824,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,906,465,455	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,735,729,555	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	145,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4,856,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10,105,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,134,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36,228,900	

5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,273,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,715,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250,287,600	
5	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	62,557,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3,420,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	136,659,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	467,533,805	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,998,325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81,594,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93,526,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46,781,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210,278,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	356,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	610,114,660	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118,143,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455,481,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237,781,100	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64,597,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64,847,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108,336,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,968,756,670	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	896,356,500	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	50,441,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	25,000,000	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	590,914,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	65,568,050	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	10,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	35,178,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	953,775,600	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	863,775,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	53,056,520	

5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	17,814,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	17,740,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	17,501,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	508,251,910	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	283,053,700	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	136,053,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	92,141,700	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18,301,700	PENDAPATAN TRANSFER
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	13,775,600	PENDAPATAN TRANSFER

					Perekonomian		
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9,678,700	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	8,569,500	PENDAPATAN TRANSFER
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12,060,000	PENDAPATAN TRANSFER
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11,186,100	PENDAPATAN TRANSFER
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	9,717,900	PENDAPATAN TRANSFER
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	8,852,200	PENDAPATAN TRANSFER
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	133,056,510	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22,323,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9,845,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6,813,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	6,110,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49,399,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	22,131,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7,871,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	8,560,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

					Daerah Bidang Kewilayahan		
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	648,056,500	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	648,056,500	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	53,000,000	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	53,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	130,000,000	
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	465,056,500	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	245,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	30,056,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL						9,689,117,000	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bapelitbang Kota Tomohon di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bapelitbang Kota Tomohon pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Tomohon;
2. Pada saat penyusunan Renja Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2023, dokumen Renstra Tahun 2021-2026 belum ditetapkan. Maka Perubahan Renja disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2023, yang mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025 periode keempat, serta memperhatikan visi, misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tahun 2021-2026. Meskipun demikian, Renja Bapelitbang Tahun 2023 akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Bapelitbang Tahun 2021-2026.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Bapelitbang Kota Tomohon Tahun 2023, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bapelitbang Kota Tomohon secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a) melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b) menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- 2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

5.3. Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga salah satu keluaran dari perencanaan adalah tersedianya dokumen perencanaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah.

Rencana Kerja Tahunan (RENJA) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan disusun berdasarkan / berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang memuat kebijakan Pemerintah Kota Tomohon, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rencana kerja ini dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Penyusunan Ranwal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 disamping sebagai wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Ranwal Rencana Kerja ini sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk menentukan target keberhasilan dan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025
15. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

16. Peraturan Daerah 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 Nomor 38)
17. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini disusun dengan maksud memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pembangunan.

Tujuan penyusunan Ranwal rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk menentukan target capaian keberhasilan juga sebagai bahan evaluasi dalam menyusun program dan kegiatan prioritas perencanaan pembangunan daerah yang transparan, efektif dan akuntabel, yang akan menjadi pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RANWAL RENJA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

Pencapaian Kinerja dari Perangkat Daerah melalui Program dan Kegiatan yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 diukur melalui persandingan dari target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2022, dengan demikian dapat dievaluasi sejauh mana pencapaian kinerja perangkat daerah terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun capaian realisasi program/kegiatan baik yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran maupun yang melampaui yang direncanakan tergambar pada tabel dibawah ini

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah KotaTomohon

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
1		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										31,952,497,640.00			43,678,065,296.00	
2		KEUANGAN					100	0		100	0	31,952,497,640.00			43,678,065,296.00	
3		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100	0		100	0	16,007,968,920.00			16,999,982,398.00	
4		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100	0		100	0	71,355,145.00			58,348,420.00	
5		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok. RENJA, Dok. RKPD	5	Dok	21,749,300	2	Dok	21,749,300	2	Dok	30,029,330.00	2.00	Dok	23,231,830.00	0
6		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok.RKA-SKPD	10	Dok	51,077,250	1	Dok	51,077,250.	1	Dok	9,002,565.00	1	Dok	7,633,340.00	0

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
									00							
7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok. LKIP	1	Dok	1,831,003,190	1	Dok	100,650,900.00	1	Dok	32,323,250.00	1	Dok	27,483,250.00	0
8		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100	0		100	0	9,093,155,351.00			10,546,152,666.00	
9		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi nya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bln	1,122,712,552	12	Bln	1,122,712,552.00	12	Bln	9,021,008,601.00	12.00	Bln	10,495,536,081.00	0
10		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok. LK-SKPD,Dok.L PPD	2	dok	256,180,146	2	dok	112,024,600.00	2	dok	29,147,600.00	2.00	dok	24,792,260.00	0
11		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dok.RFK,La p. Keu Semesteran	2	dok	250,495,476	2	dok	141,639,000.00	1	dok	42,999,150.00	1.00	dok	25,824,325.00	0
12		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100	0		100	0	129,150,000.00			4,780,000.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
13		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengembangan SDM ASN	25	Keg	3,538,239,863	100	Keg	138,188,730.00	100	Keg	129,150,000.00	100	Keg	4,780,000.00	0
14		Administrasi Umum Perangkat Daerah					100	0		100	0	1,971,567,341.00			1,594,861,186.00	
15		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Thn	60	Bulan	353,637,896.56	12	Bulan	223,312,100	12	Bulan	327,120,275.00	12	Bulan	90,975,775.00	
16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor selama 1 Thn	60	Bulan	-	12	Bulan	-	12	Bulan	192,501,341.00	12	Bulan	279,619,961.00	
17		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Thn	60	Bulan	627,735,921.52	12	Bulan	1,088,064,150	12	Bulan	240,065,900.00	12	Bulan	232,798,900.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
18		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Thn	60	Bulan	80,908,575.00	12	Bulan	61,000,000.00	12	Bulan	14,658,400.00	12	Bulan	12,152,400.00	
19		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi selama 1 Thn	60	Bulan	3,473,297,246	12	Bulan	2,142,669,027.00	12	Bulan	353,044,000.00	12	Bulan	233,450,000.00	
20		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terciptanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60	Bulan	2,359,833,438	12	Bulan	-	12	Bulan	844,177,425.00	12	Bulan	745,864,150.00	
21		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100	0		100	0	40,576,140.00			31,559,220.00	
22		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Sarana dan Prasarana Kantor yang	100	%	337,119,06	100	%	413,716,500	100	%	40,576,140.00	100	%	31,559,220.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
		Lainnya	Memadai			2.50			.00							
23		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100	0		100	0	2,840,178,663.00			3,123,563,306.00	
24		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat SKPD selama 1 Thn	60	Bulan	138,218,815.63	12	Bulan	305,753,500.00	12	Bulan	87,198,000.00	12	Bulan	180,740,000.00	
25		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik selama 1 Thn	60	Bulan	675,586,601.25	12	Bulan	239,764,154.00	12	Bulan	88,289,548.00	12	Bulan	87,249,036.00	
26		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terawat dan	60	Bulan	353,637,896.56	12	Bulan	-	12	Bulan	30,190,000.00	12	Bulan	49,700,000.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
			memadai													
27		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggara nya Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 1 Thn	60	Bulan	2,950,508,168	12	Bulan	3,266,511,507.00	12	Bula n	2,634,501,115.00	12	Bula n	2,805,874,270.00	
28		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100	0		100	0	1,861,986,280.00			1,640,717,600.00	
29		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksanan ya Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	60	Bulan	566,360,025.00	12	Bulan	355,617,106.00	12	Bula n	780,036,800.00	12	Bula n	808,867,600.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
			Jabatan selama 1 Thn													
30		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya di SKPD	60	Bulan	2,496,687,500.00	12	Bulan	16,200,000.00	12	Bulan	91,769,480.00	12	Bulan	21,900,000.00	
31		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di SKPD	100	%	6,742,381,250.00	100	%	3,878,549,220.00	100	%	934,260,000.00	100	%	742,860,000.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
32		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di SKPD	100	%	353,637,896.56	100	%	-	100	%	20,530,000.00	100	%	32,090,000.00	
33		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di SKPD	100	%	-	100	%	-	100	%	35,390,000.00	100	%	35,000,000.00	
34		PROGRAM PENGELOLAAN	Opini BPK Thd Lap.									12,207,783,8			23,122,030,	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
		KEUANGAN DAERAH	Keuangan:									17.00			168.00	
			Prosentase SILPA Thd. APBD :				1	0		1	0					
			Persentase Program/Kegiatan yng tdk terlaksana				1	0		1	0					
			Persentase Belanja Pendidikan :				20	0		20	0					
			Persentase Belanja Kesehatan :				10	0		10	0					
			Penetapan APBD :													
40		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					100	0		100	0	2,375,485,890.00			2,475,503,200.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
41		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi KUA dan PPAS dan Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS, (1 Buku/Dok KUA, 1 Buku/Dok PPAS)	2	Doku men	1,269,987,739	2	Doku men	1,269,987,739	2	Dok ume n	291,940,690.00	2.00	Dok ume n	325,989,190.00	
42		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (1 Buku/Dok Perubahan KUA, 1 Buku/Dok Perubahan	2	Dok	1,546,467,961	2	Dok	1,018,360,865.00	2	Dok	244,666,620.00	2.00	Dok	191,599,800.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
			PPAS)													
43		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terselenggaraanya Keg. Koordinasi, Tersusunnya 34 RKA-SKPD dan Terlaksananya Verifikasi34 RKA-SKPD	34	Dokumen	2,266,003,088.83	34	Dokumen	1,223,531,184.00	34	Dokumen	86,126,800.00	34	Dokumen	63,701,800.00	
44		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terselenggaraanya Keg. Koordinasi, Tersusunnya 34 Perubahan RKA-SKPD dan Terlaksananya Verifikasi 34 Perubahan RKA-SKPD	34	Dokumen	1,532,174,112.75	34	Dokumen	1,250,806,545.00	34	Dokumen	39,163,100.00	34	Dokumen	39,163,100.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETEKERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
45		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terselenggaraanya Keg. Koordinasi, Tersusunnya 34 DPA-SKPD dan Terlaksananya Verifikasi 34 DPA-SKPD	34	Dokumen	3,320,959,884.69	34	Dokumen	442,961,450.00	34	Dokumen	40,904,600.00	34	Dokumen	36,904,600.00	
46		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terselenggaraanya Keg. Koordinasi, Tersusunnya 34 Perubahan DPA-SKPD dan Terlaksananya Verifikasi 34 Perubahan DPA-SKPD	34	Dokumen	2,278,744,504	34	Dokumen	1,014,943,959.00	34	Dokumen	40,445,700.00	34.00	Dokumen	82,479,900.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
47		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (1 Perda APBD, 1 Perwako APBD)	5	Perda	2,266,003,088.83	2	Perda	1,223,531,184.00	2	Perda	454,085,500.00	2	Perda	291,665,500.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
48		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD(1 Perda) dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (1 Perwako)	5	Perda	1,546,467,961.00	2	Perda	1,018,360,865.00	2	Perda	654,419,700.00	2	Perda	877,284,400.00	
49		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (1	1	Perwako	625,030,541.04	1	Perwako	186,807,100.00	1	Perwako	145,852,800.00	1	Perwako	278,846,800.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Target	Satuan	Total	Jumlah	Satuan	Total	Target	Satuan		Jumlah	Satuan	Total	
			Perwako Bid. Anggaran)													
50		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (3 Laporan)	0	Kegiatan	-	3	Kegiatan	-	3	Kegiatan	24,295,600.00	3	Kegiatan	0	
51		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terselenggaranya 12 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (12 Laporan)	60	Dokumen	769,584,666.65	12	Dokumen	769,584,679	12	Dokumen	118,572,800.00	12.00	Dokumen	204,786,600.00	
52		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Keg. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	3	Dokumen	135,303,480.00	3.00	Dokumen	7,477,010.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETEKERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
			(3 Laporan)													
53		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Keg. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (1 Laporan)	1	Kegiat an	2,058,706,049	1	Kegia tan	1,748,938,130.00	1	Kegi atan	99,708,500.00	1	Kegi atan	75,602,500.00	
54		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					100	0		100	0	1,893,556,600.00	#REF!	#DIV/0!	5,821,915,469.00	
55		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya 1200 Dokumen Laporan Pengelolaan kas	240	Doku men	605,118,266.50	240	Doku men	184,367,550.00	240	Dok ume n	374,000,000.00	240.00	Dok ume n	263,531,370.00	
56		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Diterbitkannya 850 dokumen Anggaran Kas dan	5	Doku men	1,484,316,690.64	34	Doku men	34,740,625.00	34	Dok ume n	378,791,300.00	34	Dok ume n	370,664,750.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
			SPD													
57		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya penambahan dana penyiwaan modal baik di Bank SulutGo atau Perusahaan Daerah	1	Kegiat an	944,643,482.59	1	Kegiat an	396,891,200.00	1	Kegiat an	25,498,950.00	1	Kegiat an	4,366,942,199.00	
58		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersedianya 250 Dokumen laporan penggunaan pengelolaan dana perimbangan dan dan transfer lainnya	50	Kegiat an	748,657,158.05	50	Kegiat an	157,786,250.00	50	Kegiat an	176,500,000.00	50	Kegiat an	83,916,800.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
59		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tersedianya dan terdistribusi nya 55000 dokumen SP2D	110 00	SP2D	611,871,09 8.44	11000	SP2D	54,105,000. 00	110 00	SP2 D	75,250,000.00	110 00	SP2 D	37,537,200. 00	
60		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersusunnya 1200 dokumen laporan realisasi penerimaan dan pemungutan PFK	0	0	-	240	0	-	240	Dok ume n	78,749,600.00	240	Dok ume n	73,869,600. 00	
61		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Tersusunnya 20 dokumen laporan koordinasi hutang dan piutang daerah	60	Kegiat an	1,299,450, 710.34	4	Kegia tan	1,094,042,6 78.00	4	Kegi atan	27,499,800.00	4	Kegi atan	27,499,800. 00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
62		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tersedianya 60 Dokumen rekonsiliasi penerimaan, pengeluaran dan potongan fihak ketiga	12	Kegiat an	1,595,198,521.49	12	Kegiat an	446,977,700.00	12	Kegiat an	135,250,000.00	12	Kegiat an	72,382,000.00	
63		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terverifikasi nya 55500 Dokumen SPM Perangkat Daerah dan diterbitkann ya 5000 Dokumen SKPP	11100	Doku men	4,125,363,961.13	11100	Doku men	881,186,500.00	11100	Dok ume n	75,744,700.00	111000	Dok ume n	103,144,700.00	
64		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya 5 dokumen teknis administrasi keuangan	1	Kegiat an	2,227,156,859.26	1	Kegiat an	784,329,588.00	1	Kegiat an	546,272,250.00	1	Kegiat an	422,427,050.00	
65		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan					100	0		100	0	1,602,579,73			1,174,677,475.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
		Keuangan Daerah										5.00				
66		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersedianya Laporan	0	Kegiat an	-	12	Kegia tan	-	12	Kegi atan	142,341,500.00	-12	Kegi atan	44,841,500.00	
67		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tersedianya Dokumen Laporan Pertanggung jawaban Keuangan	0	Kegiat an	-	1	Kegia tan	-	1	Kegi atan	405,738,400.00	1	Kegi atan	372,661,400.00	
68		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban	0	Kegiat an	-	15	Kegia tan	-	15	Kegi atan	167,692,500.00	15	Kegi atan	313,901,340.00	
69		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	0	Kegiat an	-	1	Kegia tan	-	1	Kegi atan	252,415,900.00	1	Kegi atan	99,039,900.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
70		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya a Perda dan Perwako Pertanggung jawaban	2	Perda	1,789,626,884	2	Perda	321,725,900.00	2	Perda	233,489,595.00	2	Perda	113,821,035.00	
71		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Tindak Lanjut LHP BPK	5	Laporan	553,423,080.98	1	Laporan	220,643,757.00	1	Laporan	23,336,200.00	1	Laporan	0	
72		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Pertanggung jawaban	1	Dokumen	553,423,080.98	1	Dokumen	1,055,826,667.00	1	Dokumen	88,735,800.00	1.00	Dokumen	84,198,600.00	0
73		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya a Kebijakan Akuntansi	0	Dokumen	-	1	Dokumen	124,513,500.00	1	Dokumen	145,944,000.00	1	Dokumen	83,730,100.00	
74		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya a Sistem dan Prosedur	2	Dokumen	353,899,163.84	1	Dokumen	1,478,264,533.00	1	Dokumen	65,939,600.00	1	Dokumen	62,483,600.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
			Akuntansi													
75		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	5	Kegiat an	236,474,694.78	1	Kegiat an	571,648,000.00	1	Kegi atan	76,946,240.00	1	Kegi atan	0	
76		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					100	0		100	0	5,712,845,192.00			13,362,699,224.00	
77		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terselurnya Bantuan kepada Masyarakat	0	0	-	12	0	-	12	Bln	5,712,845,192.00	12	Bln	13,362,699,224.00	0
78		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					100	0		100	0	623,316,400.00			287,234,800.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
79		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksannya Pelatihan/Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota untuk SKPD	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	623,316,400.00	1.00	Kegiatan	287,234,800.00	0
80		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Luas Lahan Bersertifikat:				10.89	0		10.89	0	1,204,509,400.00			908,930,430.00	
			Penyelesaian Kasus Tanah Negara :				0	0		0	0					
82		Pengelolaan Barang Milik Daerah					100	0		100	0	1,204,509,400.00			908,930,430.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
83		Penyusunan Standar Harga	Dokumen Standar Satuan Harga	10	Doku men Stand ar Satua n Harga	920,099,057.28	1	Doku men Stand ar Satua n Harga	583,246,700	2	Dok ume n Stan dar Satu an Harg a	151,245,300.00	2.00	Dok ume n Stan dar Satu an Harg a	213,370,260.00	0
84		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Standar Barang dan Standar Kebutuhan	5	Doku men Stand ar Baran g dan Stand ar Kebut uhan	675,000,000.00	1	Doku men Stand ar Baran g dan Stand ar Kebut uhan	38,369,400.00	1	Dok ume n Stan dar Bara ng dan Stan dar Kebu tuhan	17,233,100.00	1	Dok ume n Stan dar Bar ang dan Stan dar Kebut uhan	3,191,280.00	
85		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKBMD	20	Doku men RKB MD	550,000,000.00	1	Doku men RKB MD	41,441,000	1	Dok ume n RKB MD	19,784,100.00	1	Dok ume n RKB MD	16,498,480.00	0

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
86		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Peraturan Perundang-undangan BMD	5	Doku men Perat uran Perun dang- unda ngan BMD	342,175,848.44	1	Doku men Perat uran Perun dang- unda ngan BMD	267,518,200	1	Dok ume n Perat uran Peru ndan g- unda ngan BMD	16,350,100.00	1	Dok ume n Pera tura n Peru nda ng- und ang an BM D	15,591,850.00	0
87		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen LBPS	0	Doku men LBPS	-	1	Doku men LBPS	-	1	Dok ume n LBP S	69,219,900.00	1	Dok ume n LBP S	49,684,070.00	0
88		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Dokumen Berita Acara Inventarisasi	0	Doku men Berita Acara Invent arisas i	-	1	Doku men Berita Acara Inven tarisa si	-	1	Dok ume n Berit a Acar a Inve ntari	54,136,200.00	1	Dok ume n Berit a Acar a Inve ntar	50,090,350.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
											sasi			isasi		
89		Pengamanan Barang Milik Daerah	Sertifikat & BPKB	44	Sertifi kat & BPKB	1,685,595,312.50	110	Sertifi kat & BPKB	332,306,380.00	110	Serti fikat & BPK B	239,966,200.00	110	Serti fikat & BPK B	122,999,960.00	0
90		Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian BMD	10	Doku men Penila ian BMD	841,166,158.75	1	Doku men Penila ian BMD	130,380,900.00	1	Dok ume n Penil aian BMD	131,246,200.00	1.00	Dok ume n Peni laia n BM D	100,885,390.00	0

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
91		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Kegiat an Pengawas an dan Penge ndalia n Penge lolaan Baran g Milik Daera h	335,355,929.80	1	Kegia tan Pengawas an dan Penge ndali an Penge lolaan Baran g Milik Daera h	78,519,500.00	1	Kegi atan Pengawas an dan Peng enda lian Peng elola an Bara ng Milik Daer ah	49,974,100.00	1.00	Kegi atan Pengawas an dan Peng endali an Pen gelolaan Bar ang Mili k Dae rah	18,831,590.00	0
92		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen Penggunaan , Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	40	Doku men Pengg unaa n, Pema nfaat an, Pemin	3,131,170,262.16	1	Doku men Pengg unaa n, Pema nfaat an, Pemi	470,303,029.80	1	Dok ume n Peng guna an, Pem anfa atan,	148,981,600.00	1	Dok ume n Pengg uana n, Pem anfa	39,924,260.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
			Penghapusan Barang Milik Daerah		daht angana n, Pemu snahan, dan Pengh apusa n Baran g Milik Daera h			ndaht angana n, Pemu snahan, dan Pengh apusa n Baran g Milik Daera h			Pemi ndah tang anan , Pem usnahan, dan Peng hapu san Bara ng Milik Daer ah		atan , Pem inda htan gan an, Pem usnaha n, dan Pen gha pus an Bar ang Mili k Dae rah			
93		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	0	Doku men Berita Acara Rekon siliasi	-	12	Doku men Berita Acara Rekon silia	-	12	Dok ume n Berit a Acara	45,082,700.00	12.00	Dok ume n Berit a Acara	81,194,340.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
								si			Reko nsili asi			Rek onsi liasi		
94		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	10	Doku men Lapo ran Baran g Milik Daera h	675,000,000.00	1	Doku men Lapo ran Baran g Milik Daera h	536,522,112	1	Dok ume n Lapo ran Bara ng Milik Daer ah	131,092,200.00	1.00	Dok ume n Lapo ran Bar ang Mili k Dae rah	129,292,200.00	0
95		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kegiatan Sosialisasi	5	Kegiat an Sosial isasi	1,509,885,486	1	Kegia tan Sosial isasi	319,605,194.00	1	Kegi atan Sosi alisa si	130,197,700.00	1	Kegi atan Sosi alisa si	67,406,400.00	
96		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan				7.53	0		7.53	0	2,532,235,503.00			2,647,122,300.00	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
			:													
97		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					#DIV/0!	#DIV/0!		100	0	2,532,235,503.00			2,647,122,300.00	
98		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	produk regulasi di bidang Pajak	4	Perwako	1,198,243,745.58	1	Perwako	1,198,243,747	1	Perwako	615,340,870.00	1.00	Perwako	749,310575.00	0
99		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	pengembangan sistem pelayanan	5	Kegiatan	595,183,704.84	1	Kegiatan	595,183,706	1	Kegiatan	496,385,140.00	1	Kegiatan	542,600,500.00	0
100		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Subjek dan Objek Pajak, NPWPD	42,500	Subjek dan Objek Pajak	708,164,776.09	42,500	Subjek dan Objek Pajak	836,556,599.00	12	Subjek dan Objek Pajak	90,139,960.00	12.00	Subjek dan Objek Pajak	382,575,600.00	0
101		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	penilaian subjek dan objek pbb	1300	Objek dan Subjek Pajak	505,678,593.75	1300	Objek dan Subjek Pajak	150,797,900.00	50000	Objek dan Subjek Pajak	450,882,100.00	50000	Objek dan Subjek Pajak	339,882,100.00	0

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021			KETERANGAN
				Targ et	Satua n	Total	Jumlah	Satua n	Total	Targ et	Satu an		Jum lah	Satu an	Total	
											k			k		
102		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	penyelesaia n pengaduan pajak	100	Perse n	555,209,812.01	12	Perse n	555,209,824	12	Pers en	259,219,483.00	12.00	Pers en	218,140,475.00	0
103		Penagihan Pajak Daerah	jumlah objek pajak	12	Bulan	1,291,098,585.56	12	Bulan	134,619,550.00	12	Bula n	363,498,870.00	12.00	Bula n	184,522,120.00	0
104		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	keg Pengendalia n, Pemeriksaa n dan Pengawasan Pajak Daerah	10	Subje k dan Objek Pajak	362,655,831.48	12	Subje k dan Objek Pajak	838,737,100.00	12	Subj ek dan Obje k Paja k	256,769,080.00	12.00	Subj ek dan Obje k Paja k	230,090,930.00	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, sebagai instansi yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggung jawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administratif, kegiatan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon selanjutnya diterbitkannya Peraturan Walikota Tomohon Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon adalah Sebagai berikut :

Tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; dan

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon juga tergambar dalam **Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.**

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

KotaTomohon

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targ et SPM	Targe t IKK	Targ et Indik ator Lain nya (IKU)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2016	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah				100%	100%	100%	100 %	100%	98.59%	91.83%	74.67 %	57.79 %	74.69	113%	98.59 %	91.83 %	74.67%	57.79%	74.69	113%
2	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah		√																		
	Jumlah dan macam pajak daerah		11		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah dan macam Objek retribusi daerah		4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Ketepatan waktu penyusunan APBD				Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Presentase aparatur yang terlatih dalam pengelolaan keuangan				60%	70%	80%	90%	100%	60%	70%	80%	90%	100%	100	60%	70%	80%	90%	100%	100%
5	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Tanah Milik Daerah yang disertifikasi				45	105	155	185	197	13	-	-	-	22	9,78 %	29%	-	-	-	12 %	9,78 %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka penyusunan Rancangan awal rencana kerja perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Adapun Isu-Isu strategis antara lain:

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
2. Adanya pembentukan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dengan sistem pengelolaan keuangan Propinsi;
3. Perkembangan Perekonomian Kota Tomohon yang pesat ditandai dengan menjamurnya Dunia Usaha seperti Pertokoan dan Rumah Makan namun belum diimbangi dengan Peningkatan Pendapatan bagi Kota Tomohon;
4. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Peraturan Pemerintah ini dalam Bab V mengenai Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Dan Sistem Informasi Manajemen Karier, Pasal 162, Pasal 203, Pasal 210 dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS.

TANTANGAN

1. Belum optimalnya sistem pengawasan pendapatan, kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relative rendah;
2. Identifikasi, mengkaji, monitoring potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan transaksi non tunai;
4. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan;
5. Masih adanya pengelolaan BMD Perangkat Daerah yang belum optimal;
6. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan;
7. Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan, BMD, Pendapatan, dalam
rangka mendukung system satu data nasional;
8. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance.

PELUANG

1. Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersedia;

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pelaksanaan percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD);
3. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
4. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bias dikembangkan;
5. Koordinasi, klarifikasi dan inventarisasi terhadap penggunaan barang milik daerah;

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		TOMOHON									
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	19.088.012.510	19.088.012.510		
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase Kegiatan Perencanaan Penyelenggara, dan Evaluasi Kinerja PD	100%	100%	100%	57.000.000	57.000.000		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok. RENJA, Dok. RKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	25.000.000		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA		TARGET			PAGU			Keterangan
						RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		DAERAH										
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dok.RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000	17.000.000		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dok. LKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000		
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Prosentase Kegiatan Adm. Keuangan	100%	100%	100%	12.984.827.000	12.984.827.000		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12.944.827.000	12.944.827.000		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok. LK-SKPD,Dok.LPPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	25.000.000		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dok.RFK,Lap. Keu Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000		
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	100%	100%	100%				

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengembangan SDM ASN	100%	100%	100%	-	-		
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prosentase Administrasi Umum Daerah	100%	100%	100%	1.197.609.750	1.197.609.750		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Thn	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	30.609.750	30.609.750		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor selama 1 Thn	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	100.000.000		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Thn	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	125.000.000	125.000.000		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Thn	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi selama 1 Thn	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	130.000.000	130.000.000		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan Perundang undangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	250.000.000	250.000.000		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terciptanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	550.000.000	550.000.000		
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	100%	100%	-	-		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai	100%	100%	100%	-	-		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		DAERAH									
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	4.103.575.760	4.103.575.760		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat SKPD selama 1 Thn	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	40.000.000		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik selama 1 Thn	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	60.000.000		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terawat dan memadai	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 1 Thn	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3.983.575.760	3.983.575.760		
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	5 Sub Kegiatan Pemeliharaan 1 Thn	100%	100%	100%	745.000.000	745.000.000		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	595.000.000	595.000.000		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
			Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan selama 1 Thn							
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya di SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di SKPD	100%	100%	100%	120.000.000	120.000.000		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	100%	5.000.000	5.000.000		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
				atau Bangunan Lainnya di SKPD							
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di SKPD	100%	100%	100%	5.000.000	5.000.000		
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Thd Lap. Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
				Prosentase SILPA Thd. APBD	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
				Persentase Program/Kegiatan yang tdk terlaksana	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%		
				Persentase Belanja Pendidikan	20%	20%	20%	20%	20%		
				Persentase Belanja Kesehatan	10%	10%	10%	10%	10%		
				Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Jumlah Dokumen 161	100%	100%	100%	2.930.703.653			
		PENGELOLAAN KEUANGAN	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan	TERSUSUNNYA DOKUMEN KUA	2 DOKUM	2 DOK	2 DOKU	335.768.865	335.768.865		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		DAERAH	PPAS		PPAS TH. 2022	EN	UMEN	MEN			
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		TERSUSUNNYA DOKUMEN KUA PPAS PERUBAHAN	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	197.347.794	197.347.794	
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		TERSUSUNNYA RKA SKPD 2022	34 DOKUMEN	34 DOKUMEN	34 DOKUMEN	86.126.800	86.126.800	
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		TERSEDIAANYA DOKUMEN EVALUASI	34 DOKUMEN	34 DOKUMEN	34 DOKUMEN	39.163.100	39.163.100	
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		TERSUSUNNYA DPA SKPD	34 DOKUMEN	34 DOKUMEN	34 DOKUMEN	42.949.830	42.949.830	

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	TERSUSUNNYA DPA PERUBAHAN	34 DOKUMEN	34 DOKUMEN	34 DOKUMEN	86.603.895	86.603.895		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	TERSUSUNNYA PERDA APBD DAN PERWAKO APBD 2022	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	467.708.065	467.708.065		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	TERSUSUNNYA PERDA PERUBAHAN APBD	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	903.602.932	903.602.932		
		PENGELOLAAN KEUANGAN	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi	TERSOSIALISASI DAN TERSUSUN	1DOKUMEN	1 DOK	1 DOKU	292.789.140	292.789.140		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		DAERAH	serta Kebijakan Bidang Anggaran	REGULASI BIDANG ANGGARAN		UMEN	MEN				
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	TERSUSUNNYA PENDAPATAN DAERAH	1 DOKUMEN			24.295.600	24.295.600		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	TERSUSUNNYA DOKUMEN DAERAH DAN PENGENDALIAN ANGGARAN	12 DOKUMEN	12 DOKUMEN	12 DOKUMEN	210.932.258	210.932.258		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	TERSUSUNNYA DOKUMEN ANGGARAN PEMBIYAAAN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	140.715.619	140.715.619		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	TERSUSUNNYA PERWAKO TTG PENJABARAN	2 DOKUMEN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	102.699.755	102.699.755		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		DAERAH									
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	Jumlah Dokumen 11099 Dokumen	100%	100%	100%	15.812.462.718	15.812.462.718		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	TERSEDIAANYA DOKUMEN SPD	12 DOKUMEN	68 DOKUMEN	68 DOKUMEN	94.891.500	94.891.500		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Kas	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	206.264.218	206.264.218		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.736.765.000	14.736.765.000		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		DAERAH									
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Laporan Dana Perimbangan	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	122.370.000	122.370.000		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen SP2D	11000 Dokumen	11000 Dokumen	11000 Dokumen	71.250.000	71.250.000		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pemungutan RFK	240 Dokumen	240 Dokumen	240 Dokumen	73.875.000	73.875.000		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Tersusunnya laporan koordinasi hutang dan piutang daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	26.250.000	26.250.000		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Potongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tersedianya data rekonsiliasi penerimaan, pengeluaran kas dan potongan fihak ketiga	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	126.796.500	126.796.500		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terverifikasinya spm perangkat daerah dan terbitnya SKPP	11100 Dokumen	11100 Dokumen	10 Dokumen	71.250.000	71.250.000		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan bagi Pengelola	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	253.200.000	253.200.000		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		DAERAH		Keuangan SKPD							
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyusunan Ranperda Dana Cadangan	Terlaksananya Penyusunan Ranperda Dana Cadangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.550.500	29.550.500		
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Dokumen 15,Kegiatan 1,Perkada 4	100%	100%	100%	960.586.250	960.586.250		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Tersedianya Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.379.895	25.379.895		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		DAERAH	Daerah								
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	107.366.492	107.366.492		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	313.210.295	313.210.295		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	159.788.933	159.788.933		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		A ANGGARAN DAERAH	Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	n	men	men				
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda, 1 Perkada	1 Perda, 1 Perkada	1 Perda, 1 Perkada	81.178.545	81.178.545		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 LHP	1 LHP	-	100.438.295	100.438.295		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.723.795	45.723.795		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Perkada	1 Perkada	1 Perkada, 1 Perda	127.500.000	127.500.000		
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyaluran Bantuan untuk Masyarakat	100%	100%	100%	9.860.919.177	9.860.919.177		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersalurnya Bantuan kepada Masyarakat 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	9.860.919.177	9.860.919.177		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Bimtek Pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%	211.579.716	211.579.716		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	JUMLAH PESERTA KEGIATAN YANG TERLATIH	102 ORANG	102 ORANG	102 ORANG	211.579.716	211.579.716		
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	10.89 %	10.89 %	10.89 %		9.860.919.177		
				Penyelesaian Kasus Tanah Negara	-	-	-		-		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Sub Kegiatan 13, Jumlah Dokumen 16	100%	100%	100%	709.366.203	709.366.203		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	85.263.560	85.263.560		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1.573.770	1.573.770		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	19.580.070	19.580.070		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA		TARGET			PAGU			Keterangan
						RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		DAERAH	Milik Daerah		Daerah		N					
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	25.425.330	25.425.330		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	36.612.200	36.612.200		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	52.108.300	52.108.300		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA		TARGET			PAGU			Keterangan
						RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Pengamanan Barang Milik Daerah		Pengamanan Barang Milik Daerah	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	133.324.940	133.324.940		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penilaian Barang Milik Daerah		Penilaian Barang Milik Daerah	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	70.600.510	70.600.510		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	54.884.720	54.884.720		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	43.618.280	43.618.280		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	45.615.053	45.615.053		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	138.784.200	138.784.200		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	1.975.270	1.975.270		
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan	7.53 %	7.53 %	7.53 %				
	KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Prosentase Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	2.904.747.260	2.904.747.260		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	138.910.000	138.910.000		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	416.657.540	416.657.540		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	128.737.760	128.737.760		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	392.082.500	392.082.500		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
				(BPHTB)							
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen 3) 2 Kegiatan	1) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen 3) 2 Kegiatan	1) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen 3) 2 Kegiatan	226.121.680	226.121.680		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	1) 1 Dokumen 2) 12 Kegiatan	1) 1 Dokumen 2) 12 Kegiatan	1) 1 Dokumen 2) 12 Kegiatan	497.764.200	497.764.200		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/RENCANA ANGGARAN DAERAH	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	227.621.080	227.621.080		
								122.000.000	122.000.000		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				160.000.000	160.000.000		
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				85.140.000	85.140.000		

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) SEMULA	TARGET			PAGU			Keterangan
					RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023		
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah				201.312.500	201.312.500		
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				80.000.000	80.000.000		
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				228.400.000	228.400.000		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- Penelaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, dengan mempedomani dari prioritas dan sasaran pembangunan demi Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis Ekonomi Domestik. Yang selanjutnya dijabarkan pada Tujuan dan Sasaran pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, seperti pada Tabel berikut ;

Tabel 3.1

Tujuan dan sasaran Kementerian Keuangan RI

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan	1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2. Penerimaan negara yang optimal.	2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.	3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali	4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah: a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
	<p>pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;</p> <p>b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan</p> <p>c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.</p>
<p>5. Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i>, efektif, dan efisien.</p>	<p>5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i>, efektif, dan efisien adalah:</p> <p>a. Organisasi dan SDM yang optimal;</p> <p>b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;</p> <p>c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan</p> <p>d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.</p>

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dalam Pelaksanaannya sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang keuangan untuk dapat menjawab tuntutan Pemerintah Kota Tomohon dalam Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien

Dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dengan memperhatikan Permasalahan Pembangunan dan isu strategis daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon memiliki tujuan dan sasaran :

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon adalah sebagai berikut: **Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien** dengan mengedepankan prinsip ;

- **Akuntabel**
Dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah

- **Transparan**

Ketersediaan data Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik daerah yang dapat diakses oleh seluruh stakeholders untuk mendukung keterbukaan informasi bagi public dalam rangka peningkatan pelayanan public.

- **Profesional**

Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan, pendapatan daerah dan barang milik daerah dan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah.

Mengacu pada tujuan diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dalam penjabaran untuk mencapai sasaran **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik** demi mencapai indikator sasaran:

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan;
2. Persentase SILPA terhadap APBD;
3. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana;
4. Persentase belanja pendidikan (20%);
5. Persentase belanja kesehatan (10%);
6. Penetapan APBD;
7. Persentase PAD terhadap Pendapatan;
8. Persentase Luas Lahan Bersertifikat;

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon menjalankan program dan kegiatan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, selanjutnya tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023

Kota Tomohon

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode					Uraian	Sumber Dana	ANGGARAN TAHUN 2022	ANGGARAN TAHUN 2023	KETERANGAN
							ANGGARAN PERGESERAN 2022	PLAFOND RENJA 2023	
							40,530,795,532	51,568,511,177	-
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5	2				KEUANGAN		40,530,795,532	51,568,511,177	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		15,397,419,464	18,879,960,978	
5	2	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		149,987,100	70,000,000	
5	2	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		57,750,000	25,000,000	

5	2	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		44,870,000	20,000,000	
5	2	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		47,367,100	25,000,000	
5	2	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10,037,793,122	13,021,827,000	
5	2	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9,957,780,222	12,944,827,000	
5	2	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		36,909,300	35,000,000.00	
5	2	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		43,103,600	42,000,000.00	
5	2	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,531,208,002	1,319,609,750	
5	2	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		131,333,925	30,609,750	
5	2	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		154,142,752	100,000,000	
5	2	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		214,370,900	125,000,000	
5	2	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		14,658,400		

					Perundang-undangan			12,000,000	
5	2	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		140,896,000	130,000,000	
5	2	1	2		Bimbingan Teknis Peraturan Perundang undangan			250,000,000	
5	2	1	2	##	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		875,806,025	672,000,000	
5	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,727,031,760	3,525,134,228	
5	2	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		87,198,000	75,000,000.00	
5	2	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		88,302,760	208,000,000.00	
5	2	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		30,190,000	25,000,000.00	
5	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2,521,341,000	3,217,134,228	
5	2	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		951,399,480	943,390,000	

5	2	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		584,610,000	723,000,000	
5	2	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		63,369,480	40,000,000	
5	2	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		247,500,000	135,000,000	
5	2	1	2	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20,530,000	10,000,000.00	
5	2	1	2	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		35,390,000	35,390,000.00	
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		21,344,070,918	29,377,436,796	
5	2	2	2		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1,731,535,680	2,508,703,653	
5	2	2	2	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	215,039,910	335,768,865	
5	2	2	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	125,960,620	197,347,794	

5	2	2	2	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12,271,600	50,126,800	
5	2	2	2	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	9,422,500	39,163,100	
5	2	2	2	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		54,904,000	42,949,830	
5	2	2	2	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	34,826,900	50,603,895	
5	2	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	374,239,000	467,708,065	
5	2	2	2	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	555,470,900	753,602,932	
5	2	2	2	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	259,682,800	292,789,140	
5	2	2	2	##	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9,805,750	24,295,600	
5	2	2	2	##	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16,062,200		

					Daerah	(PAD)		126,647,877	
5	2	2	2	##	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7,671,400	25,000,000	
5	2	2	2	##	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56,178,100	102,699,755	
5	2	2	2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		8,839,528,038	15,835,648,000	
5	2	2	2	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	126,522,000	94,891,500	
5	2	2	2	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	169,883,780	109,000,000	
5	2	2	2	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7,549,800,258	14,736,765,000	
5	2	2	2	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	163,160,000	122,370,000	

5	2	2	2	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	95,000,000	71,250,000	
5	2	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	98,500,000	73,875,000	
5	2	2	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35,000,000	26,250,000	
5	2	2	2	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	169,062,000	126,796,500	
5	2	2	2	##	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	95,000,000	71,250,000	
5	2	2	2	##	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	337,600,000	253,200,000	
5	2	2	2	##	Penyusunan Ranperda Dana Cadangan	Dana Transfer Umum-Dana		150,000,000	

						Alokasi Umum			
5	2	2	2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1,117,590,000	960,586,250	
5	2	2	2	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29,858,700	25,379,895	
5	2	2	2	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126,313,520	107,366,492	
5	2	2	2	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	368,482,700	313,210,295	
5	2	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	187,986,980	159,788,933	
5	2	2	2	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	82,992,700	81,178,545	
5	2	2	2	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	PENDAPATAN TRANSFER	118,162,700	100,438,295	

5	2	2	2	##	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	PENDAPATAN TRANSFER	53,792,700	45,723,795	
5	2	2	2	##	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150,000,000	127,500,000	
5	2	2	2		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		9,450,000,000	9,860,919,177	
5	2	2	2	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9,450,000,000	9,860,919,177	
5	2	2	2		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		205,417,200	211,579,716	
5	2	2	2	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	205,417,200	211,579,716	
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		830,075,750	709,366,203	
5	2	3	2		Pengelolaan Barang Milik Daerah		830,075,750	709,366,203	
5	2	3	2	1	Penyusunan Standar Harga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	117,686,720	85,263,560	
5	2	3	2	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik	Dana Transfer Umum-Dana	24,922,300	1,573,770	

					Daerah	Alokasi Umum			
5	2	3	2	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27,473,330	19,580,070	
5	2	3	2	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2,076,800	25,425,330	
5	2	3	2	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	57,112,200	36,612,200	
5	2	3	2	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	61,828,300	52,108,300	
5	2	3	2	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	164,740,940	133,324,940	
5	2	3	2	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72,800,510	70,600,510	
5	2	3	2	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	57,666,400	54,884,720	
5	2	3	2	##	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50,233,780	43,618,280	

5	2	3	2	##	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	52,775,000	45,615,053	
5	2	3	2	##	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	138,784,200	138,784,200	
5	2	3	2	##	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,975,270	1,975,270	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		2,959,229,400	2,601,747,200	
5	2	4	2		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		2,959,229,400	2,601,747,200	
5	2	4	2	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	942,326,180	138,910,000	
5	2	4	2	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	460,077,440	416,657,540	
5	2	4	2	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200,287,760	126,497,700	
5	2	4	2	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	544,991,060	192,082,500	

					(BPHTB)				
5	2	4	2	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	225,121,680	226,121,680	
5	2	4	2	##	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	258,804,200	497,764,200	
5	2	4	2	##	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	327,621,080	175,111,080	
5	2	4	2		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		115,750,000	
5	2	4	2		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		115,000,000	
5	2	4	2		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85,140,000	
5	2	4	2		Penetapan Wajib Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		214,312,500	
5	2	4	2		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak	PENDAPATAN ASLI DAERAH		72,000,000	

					Daerah dan Retribusi Daerah	(PAD)			
5	2	4	2		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		226,400,000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dapat dilihat dari table 4.1 dibawah ini:

Kode					Uraian		Sumber Dana	ANGGARAN TAHUN 2023
								PLAFOND RENJA 2023
								51,568,511,177
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	2				KEUANGAN			51,568,511,177
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18,879,960,978
5	2	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70,000,000
5	2	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		APBD Tahun 2023	25,000,000
5	2	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		APBD Tahun 2023	20,000,000
5	2	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		APBD Tahun 2023	25,000,000
5	2	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13,021,827,000
5	2	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		APBD Tahun 2023	12,944,827,000
5	2	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		APBD Tahun 2023	35,000,000.00
5	2	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		APBD Tahun 2023	42,000,000.00
5	2	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,319,609,750
5	2	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		APBD Tahun 2023	30,609,750
5	2	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		APBD Tahun 2023	100,000,000
5	2	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		APBD Tahun 2023	125,000,000

5	2	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	APBD Tahun 2023	12,000,000
5	2	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD Tahun 2023	130,000,000
5	2	1	2		Bimbingan Teknis Peraturan Perundang undangan	APBD Tahun 2023	250,000,000
5	2	1	2	##	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	APBD Tahun 2023	672,000,000
5	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,525,134,228
5	2	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD Tahun 2023	75,000,000.00
5	2	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD Tahun 2023	208,000,000.00
5	2	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD Tahun 2023	25,000,000.00
5	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD Tahun 2023	3,217,134,228
5	2	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		943,390,000
5	2	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD Tahun 2023	723,000,000
5	2	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD Tahun 2023	40,000,000
5	2	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD Tahun 2023	135,000,000
5	2	1	2	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	APBD Tahun 2023	10,000,000.00
5	2	1	2	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	APBD Tahun 2023	35,390,000.00
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		29,377,436,796
5	2	2	2		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		2,508,703,653
5	2	2	2	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	APBD Tahun 2023	335,768,865
5	2	2	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	APBD Tahun 2023	197,347,794
5	2	2	2	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	APBD Tahun 2023	50,126,800
5	2	2	2	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	APBD Tahun 2023	39,163,100

5	2	2	2	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	APBD Tahun 2023	42,949,830
5	2	2	2	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	APBD Tahun 2023	50,603,895
5	2	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	APBD Tahun 2023	467,708,065
5	2	2	2	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	APBD Tahun 2023	753,602,932
5	2	2	2	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	APBD Tahun 2023	292,789,140
5	2	2	2	##	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	APBD Tahun 2023	24,295,600
5	2	2	2	##	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	APBD Tahun 2023	126,647,877
5	2	2	2	##	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	APBD Tahun 2023	25,000,000
5	2	2	2	##	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	APBD Tahun 2023	102,699,755
5	2	2	2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		15,835,648,000
5	2	2	2	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	APBD Tahun 2023	94,891,500
5	2	2	2	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	APBD Tahun 2023	109,000,000
5	2	2	2	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	APBD Tahun 2023	14,736,765,000
5	2	2	2	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	APBD Tahun 2023	122,370,000
5	2	2	2	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	APBD Tahun 2023	71,250,000
5	2	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	APBD Tahun 2023	73,875,000

5	2	2	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	APBD Tahun 2023	26,250,000
5	2	2	2	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	APBD Tahun 2023	126,796,500
5	2	2	2	##	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	APBD Tahun 2023	71,250,000
5	2	2	2	##	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	APBD Tahun 2023	253,200,000
5	2	2	2	##	Penyusunan Ranperda Dana Cadangan	APBD Tahun 2023	150,000,000
5	2	2	2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		960,586,250
5	2	2	2	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	APBD Tahun 2023	25,379,895
5	2	2	2	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	APBD Tahun 2023	107,366,492
5	2	2	2	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	APBD Tahun 2023	313,210,295
5	2	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	APBD Tahun 2023	159,788,933
5	2	2	2	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	APBD Tahun 2023	81,178,545
5	2	2	2	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	APBD Tahun 2023	100,438,295
5	2	2	2	##	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	APBD Tahun 2023	45,723,795
5	2	2	2	##	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	APBD Tahun 2023	127,500,000
5	2	2	2		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan		

					Daerah		9,860,919,177
5	2	2	2	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	APBD Tahun 2023	9,860,919,177
5	2	2	2		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		211,579,716
5	2	2	2	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	APBD Tahun 2023	211,579,716
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		709,366,203
5	2	3	2		Pengelolaan Barang Milik Daerah		709,366,203
5	2	3	2	1	Penyusunan Standar Harga	APBD Tahun 2023	85,263,560
5	2	3	2	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	APBD Tahun 2023	1,573,770
5	2	3	2	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	APBD Tahun 2023	19,580,070
5	2	3	2	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	APBD Tahun 2023	25,425,330
5	2	3	2	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	APBD Tahun 2023	36,612,200
5	2	3	2	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	APBD Tahun 2023	52,108,300
5	2	3	2	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	APBD Tahun 2023	133,324,940
5	2	3	2	8	Penilaian Barang Milik Daerah	APBD Tahun 2023	70,600,510
5	2	3	2	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	APBD Tahun 2023	54,884,720
5	2	3	2	##	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	APBD Tahun 2023	43,618,280
5	2	3	2	##	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	APBD Tahun 2023	45,615,053
5	2	3	2	##	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	APBD Tahun 2023	138,784,200
5	2	3	2	##	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	APBD Tahun 2023	1,975,270
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		2,601,747,200
5	2	4	2		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		2,601,747,200

5	2	4	2	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	APBD Tahun 2023	138,910,000
5	2	4	2	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	APBD Tahun 2023	416,657,540
5	2	4	2	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	APBD Tahun 2023	126,497,700
5	2	4	2	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	APBD Tahun 2023	192,082,500
5	2	4	2	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	APBD Tahun 2023	226,121,680
5	2	4	2	##	Penagihan Pajak Daerah	APBD Tahun 2023	497,764,200
5	2	4	2	##	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	APBD Tahun 2023	175,111,080
5	2	4	2		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	APBD Tahun 2023	115,750,000
5	2	4	2		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	APBD Tahun 2023	115,000,000
5	2	4	2		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	APBD Tahun 2023	85,140,000
5	2	4	2		Penetapan Wajib Pajak Daerah	APBD Tahun 2023	214,312,500
5	2	4	2		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	APBD Tahun 2023	72,000,000
5	2	4	2		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	APBD Tahun 2023	226,400,000

BAB V

PENUTUP

Rancangan awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kota Tomohon serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

Ranwal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu.

Dengan adanya Rancangan awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA TOMOHON

BAB I

PENDHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahka

perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah , evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Selanjutnya Renja Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 berdasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendageri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Tomohon tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah bertujuan :

- Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2023.
- Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
- Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon, proses

penyusunan Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon, keterkaitan antara Renja Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenanga Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahunberjalan (tahun n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon Tahun Lalu dan Renstra Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDMD TAHUN 2022 SEMESTER I DAN CAPAIAN RENSTRA

Tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon telah melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2022. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 berjalan dengan baik dan mengacu pada dokumen-dokumen yang telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon telah melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja maupun dokumen penting lainnya dengan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon.

Berdasarkan dokumen rencana kerja tahun 2022, program dan kegiatan serta hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah:
 - 1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:
Target : 12 bulan

Capaian : 6 bulan (50%)
 - 1.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
Target : 13 PNS/12 Bulan

Capaian : 13 PNS/ 6 Bulan (50%)
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Target : 18 Dokumen

Capaian : 7 Dokumen (50%)
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - 2.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
Target : 7 Item

Capaian : 7 Item (100%)

- 2.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Target : 1 Kegiatan
 - Capaian : 0 Kegiatan (30%)
- 2.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Target : 1 Kegiatan
 - Capaian : 0 Kegiatan (50%)
- 2.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Target : 2 Kegiatan
 - Capaian : 1 Kegiatan (50%)
- 2.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Target : 10000 Map
 - Capaian : 750 Map (25%)
- 2.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Target : 60 Surat Kabar
 - Capaian : 60 Surat Kabar (100%)
- 2.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Target : 95 Kali
 - Capaian : 72 Kali (81%)
- 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Target : 8 Unit
 - Capaian : 9 Unit (100%)
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Target : 1000 Lembar
 - Capaian : 250 Lembar (25%)
 - 4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Target : 12 Bulan/Rekening
 - Capaian : 6 Bulan/Rekening (50%)
 - 4.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Target : 12 Kali
 - Capaian : 6 Kali (50%)

- 4.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Target : 19 Orang/12 bulan
 - Capaian : 19 Orang/6 bulan (50%)
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Target : 8 Unit
 - Capaian : 3 Unit (45%)
 - 5.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Target : 1 Paket (Front Office)
 - Capaian : 0 Paket (0%)

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

- 6. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 6.1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 - Target : 1 kegiatan
 - Capaian : 0 kegiatan (0%)
 - 6.2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 - Target : 1 kegiatan
 - Capaian : 0 kegiatan (0%)
- 7. Mutasi dan Promosi ASN;
 - 7.1. Pengelolaan Mutasi ASN
 - Target : 2 periode
 - Capaian : 1 periode (50%)
 - 7.2. Pengelolaan Promosi ASN
 - Target : 6 Kegiatan
 - Capaian : 0 Kegiatan (0%)
- 8. Pengembangan Kompetensi ASN;
 - 8.1. Pengelolaan Assesment Center
 - Target : 1 Kegiatan
 - Capaian : 1 Kegiatan (100%)
 - 8.2. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
 - Target : 6 Kegiatan
 - Capaian : 0 Kegiatan (0%)

9. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

9.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Target : 12 bulan

Capaian : 6 bulan (50%)

9.2. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Target : 2 Kegiatan

Capaian : 1 Kegiatan (50%)

C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

10. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manejerial dan Fungsional

10.1. Penyelenggaraan pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, kepemimpinan dan Prajabatan;

Target : 1 kegiatan

Capaian : 1 kegiatan (100%)

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya kinerja pelayanan sesuai dengan target perencanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon, sebagai berikut :

6. Adanya perencanaan yang matang terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang dalam menjabarkan dan mengimplementasi antara kegiatan dan pelaksanaan fisik.
7. Perencanaan Akhir yang dipersiapkan oleh masing-masing bidang dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi pada pihak-pihak terkait.
8. Memaksimalkan kerja tim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketersediaan anggaran pembiayaan kegiatan.
9. Fungsi pengawasan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dari aspek kuantitas dan kualitas pekerjaan sesuai bidang tugas dilaksanakan oleh masing-masing kepala bidang.
10. Monitoring dan evaluasi PD ditangani langsung oleh Kepala Badan sebagai penanggungjawab administrasi dan Pengguna Anggaran sebagaimana aturan dan mekanisme yang harus dilaksanakan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tomohon s/d Tahun 2022 Kota Tomohon disajikan dalam tabel sebagai berikut : (lembaran berikut)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan

Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022

Kota Tomohon

No	Program / Keg	Indikator Kinerja Program (Outcome) Keg/ Keg (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Persentase merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDMD 2. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/Dasar tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	30	%	100	%	80	%	18	%	2	%	20	%	120	%	400%	74%	BKPSDM
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDMD	100	%	98	%	100	%	0	%	50	%	50	%	148	%	148%	98%	BKPSDM
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Keg	1	Keg	2	Keg	1	Keg	0	Keg	0	Keg		Keg		Keg		98%	BKPSDM

	Facilitasi Lembaga Profesi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/Dasar tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	2	Keg	3	Keg	1	Keg	0	Keg	1	Keg	1	Keg	4	Keg	200%	99%	BKPSDM
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDMD	100	%	80	%	100	%	0	%	30	%	30	%	110	%	110%	54%	BKPSDM
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Keg Ujian Dinas	1	Keg	1	Keg	1	Keg	0	Keg	1	Keg	1	Keg	2	Keg	200%	100%	BKPSDM
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Keg	12	Keg	4	Keg Seleksi	6	Keg	0	Keg	0	Keg		Keg		Keg		41%	BKPSDM
	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDMD	100	%	80	%	100	%	0	%		%		%		%		0%	BKPSDM
	Pengelolaan Assesment Center	Persentase PNS yang mengikuti Talent Poll	100	%	100	%	100	%	0	%	0	%		%		%		99%	BKPSDM
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Asn	Jumlah Keg Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Asn	0	Keg	0	Keg	1	Keg	0	Keg	0	Keg		Keg		Keg			BKPSDM
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDMD	100	%	100	%	100	%	0	%		%		%		%		100%	BKPSDM

	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Keg Rapat Tim Manajemen Kinerja ASN	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	3	Bulan	2	Bulan	5	Bulan	17	Bulan	142%	100%	BKPSDM
	Pengelolaan Peenyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Keg Pengelolaan Peenyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0	Keg	0	Keg	2	Keg	0	Keg	0	Keg		Keg		Keg			BKPSDM
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan Tenaga Kesehatan 2. Rasio Pegawai Fungsional (%) PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan	100	%	53.4	%	100	%	0	%		%		%		%		53%	BKPSDM
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDMD	100	%	53.4	%	100	%	0	%		%		%		%		53%	BKPSDM
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	18	%		%	18	%	97	%	97%	144%	BKPSDM

	DAERAH																		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Keg adminisitrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	25	%		%	25	%	125	%	125%	147%	BKPSDM
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan Gaji dan Jumlah PNS yang mendapatkan Tunjangan ASN	12	PNS/ Bln	12	PNS/ Bln	12	PNS/ Bln	3	PNS/ Bln	2	PNS/ Bln	5	PNS/ Bln	17	PNS/ Bln	142%	148%	BKPSDM
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	13	PNS/ Bln	13	PNS/ Bln	13	PNS/ Bln	3	PNS/ Bln	2	PNS/ Bln	5	PNS/ Bln	18	PNS/ Bln	138%	129%	BKPSDM
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Keg administrasi umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	25	%	10	%	35	%	105	%	105%	117%	BKPSDM
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18	item	18	item	8	item	2	item	0	item	2	item	20	item	111%	100%	BKPSDM
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Keg	1	kegiatan	3	Keg	0	Keg	0	Keg		Keg		Keg		100%	BKPSDM
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	0	item	0	item	5	item	0	item	0	item		item		item			BKPSDM

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	2	Keg	2	item	3	Keg	1	Keg	0	Keg	1	Keg	3	Keg	150%	110%	BKPSDM
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1200	map	1200	map	750	map	150	map	50	map	200	map	1400	map	117%	100%	BKPSDM
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24	surat kabar	24	surat kabar	60	surat kabar	15	surat kabar	15	surat kabar	30	surat kabar	54	surat kabar	225%	100%	BKPSDM
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95	kali	95	kali	80	kali	20	kali	20	kali	40	kali	135	kali	142%	140%	BKPSDM
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	kegiaan	3	kegiaan	1	kegiaan	1	kegiaan	0	kegiaan	1	kegiaan	4	kegiaan	133%	85%	BKPSDM
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kenadaraan Dinas/Operasional	8	unit	8	unit	8	unit	2	unit	0	unit	2	unit	10	unit	125%	85%	BKPSDM
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Keg	4	Keg	4	Keg	1	Keg	1	Keg	2	Keg	6	Keg	150%	205%	BKPSDM
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai	1000	lembar	1000	lembar	1000	lembar	0	lembar	400	lembar	400	lembar	1400	lembar	140%	100%	BKPSDM

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan / rekening	12	bulan/rekening	12	bulan/rekening	3	bulan/rekening	5	bulan / rekening	8	bulan/rekening	20	bulan/rekening	167%	124%	BKPSDM
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	60	unit	60	unit	60	unit	15	unit	0	unit	15	unit	75	unit	125%	100%	BKPSDM
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang	2	orang	2	orang	19	orang	17	orang	0	orang	17	orang	19	orang	950%	302%	BKPSDM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	71.5	%	100	%	10	%	10	%	20	%	92	%	92%	103%	BKPSDM
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	8	unit	8	unit	8	unit	2	unit	1	unit	3	unit	11	unit	138%	108%	BKPSDM
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kedung Kantor	2	gedung	2	gedung	2	gedung	0	gedung	0	gedung		gedung		gedung		99%	BKPSDM

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BKPSDMD KOTA TOMOHON

Analisis kinerja pelayanan telah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tomohon berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja. Adapun Indikator Kinerja yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Terwujudnya Penempatan PNS sesuai dengan standar kompetensi
 - 1.1. Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir
- 1.2. Persentase seleksi terbuka untuk jabatan structural
3. Tersedianya ASN yang memenuhi kebutuhan PD
 - 3.1. Persentase ASN yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formasi dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya
4. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian
 - 4.1. Persentase kegiatan kenaikan pangkat
 - 4.2. Persentase PNS yang memasukan LHKPN
5. Meningkatnya disiplin, kinerja dan kesejahteraan ASN
 - 5.1. Persentase kegiatan Penilaian Kinerja PNS

Berdasarkan target indikator kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa semua kegiatan terlaksana dengan baik, namun secara obyektif masih terdapat berbagai kelemahan kinerja organisasi dimana pencapaian target sebagaimana yang tertuang dalam renstra belum terlaksana secara optimal, hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk pengendalian Covid-19 hal ini terlihat dari hasil evaluasi realisasi pencapaian program dan kegiatan.

*Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon, disajikan dalam table sebagai berikut :
(lembaran berikut)*

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Tomohon

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasiona l	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021 (tahun n)	Tahun 2022 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n+2)	Tahun 2024 (tahun n+3)	Tahun 2025 (tahun n+4)	Tahun 2026 (tahun n+5)	Tahun 2021 (tahun n)	Tahun 2022 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n+2)	Tahun 2024 (tahun n+3)	Tahun 2025 (tahun n+4)	Tahun 2026 (tahun n+5)	Tahun 2022 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)					(11)	(13)
1.	Persentase merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDMD		Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN, Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, Pengelolaan Promosi ASN Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, Pengelolaan Assesment Center, Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, Fasilitasi Pengembangan Karir ASN dalam Jabatan Fungsional Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi, Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai, Pembinaan Disiplin ASN, Penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	30	80	100	100	100	100	30	50					80	

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional 1	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021 (tahun n)	Tahun 2022 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n+2)	Tahun 2024 (tahun n+3)	Tahun 2025 (tahun n+4)	Tahun 2026 (tahun n+5)	Tahun 2021 (tahun n)	Tahun 2022 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n+2)	Tahun 2024 (tahun n+3)	Tahun 2025 (tahun n+4)	Tahun 2026 (tahun n+5)	Tahun 2022 tahun n+1)	
2.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (tidak termasuk guru dan kesehatan)		kegiatan fasilitasi KORPRI Pembuatan ID Card ASN yang mengikuti Bimtek pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian rekonsiliasi data dengan PD	80	100	100	100	100	100	100	50					100	
3.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	60	90	100	100	100	100	75	50					90	
4.	Rasio pegawai fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Persentase pegawai fungsional diluar tenaga guru dan kesehatan yang bersertifikat	20	90	100	100	100	100	100	50					90	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap diperhatikan. Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional dan daerah adalah:

1. Adanya regulasi baru untuk mendukung Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik maka dituntut penataan aparatur sesuai kompetensinya;
2. Tuntutan aparatur yang berkualitas sesuai capaian kinerja;
3. Rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi;

Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon adalah:

1. Tuntutan dalam pengelolaan data yang akurat dan akuntabel;
2. Tuntutan dalam pelayanan yang berbasis aplikasi;
3. Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur yang belum terintegrasi dengan sistem pengembangan karier.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan umum dalam menyelenggarakan reformasi birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Isu-isu Pelayanan Kepegawaian tahun depan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian dimana peraturan tersebut akan merubah tata kelola kepegawaian mulai dari proses rekrutmen hingga pensiun. Isu berskala Regional Kota Tomohon adalah Peningkatan kualitas pelayanan Kepegawaian dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia dan Peningkatan Pelayanan Publik di daerah.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Tomohon adalah:

1. Penataan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil yang berkompetensi, Profesional dan Proporsional;
2. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur dan mengoptimalkan pelayanan publik melalui sosialisasi Peraturan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional serta peningkatan pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi untuk meningkatkan pelayanan;
3. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dibangun melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara elektronik,

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan pada Tahun 2023 sebagai berikut: Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023

Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	03				KEPEGAWAIAN					6,585,026,000	KEPEGAWAIAN					6,585,026,000
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,122,174,685	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,122,174,685
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					200,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					200,000
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.17 %	2 Doku men	100,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.17 %	2 Doku men	100,000

5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.17 %	1 Dokumen	100,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.17 %	1 Dokumen	100,000
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,126,159,510	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,126,159,510
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55.17 %	41 Orang /bul	3,955,899,510	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55.17 %	41 Orang /bul	3,955,899,510
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.17 %	12 Dokumen	170,160,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	55.17 %	12 Dokumen	170,160,000
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest SKPD	55.17 %	18 Laporan	100,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semest SKPD	55.17 %	18 Laporan	100,000
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					200,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					200,000

5	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	55.17 %	1 Doku men	100,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	55.17 %	1 Doku men	100,000
5	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	55.17 %	12 Lapor an	100,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	55.17 %	12 Lapor an	100,000
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					400,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					400,000
5	03	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	55.17 %	2 Unit	100,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	55.17 %	2 Unit	100,000
5	03	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	55.17 %	2 Doku men	100,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	55.17 %	2 Doku men	100,000
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55.17 %	15 Orang	100,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55.17 %	15 Oran g	100,000

5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55.17 %	5 Orang	100,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55.17 %	5 Orang	100,000
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					291,358,250	Administrasi Umum Perangkat Daerah					291,358,250
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	55.17 %	1 Paket	7,248,950	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	55.17 %	1 Paket	7,248,950
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Belanja ATK dan Belanja Modal Scener, Printer, LCD)	55.17 %	1 Paket	100,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Belanja ATK dan Belanja Modal Scener, Printer, LCD)	55.17 %	1 Paket	100,000
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	55.17 %	1 Paket	100,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	55.17 %	1 Paket	100,000
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK, Makan Minum Rapat dan Jamuan Tamu)	55.17 %	1 Paket	110,876,800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK, Makan Minum Rapat dan Jamuan Tamu)	55.17 %	1 Paket	110,876,800
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan	Kota Tomohon,	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	55.17	1	30,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan	Kota Tomohon,	Jumlah Paket Barang Cetak dan	55.17	1	30,000,000

					Penggandaan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	yang Disediakan (Belanja ATK, dan Belanja Cetak/Penggandaan)	%	Paket		dan Penggandaan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penggandaan yang Disediakan (Belanja ATK, dan Belanja Cetak/Penggandaan)	%	Paket	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	55.17 %	1095 Doku me	7,236,500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	55.17 %	1095 Doku me	7,236,500
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.17 %	95 Lapo ran	130,348,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.17 %	95 Lapo ran	130,348,000
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	55.17 %	1 Doku men	448,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	55.17 %	1 Doku men	448,000
5	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	55.17 %	1 Doku men	5,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	55.17 %	1 Doku men	5,000,000
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					93,103,900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					93,103,900

5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan beroda empat yang Disediakan	55.17 %	1 Unit	1,900,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan beroda empat yang Disediakan	55.17 %	1 Unit	1,900,000
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan beroda dua yang disediakan	55.17 %	4 Unit	1,474,800	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan beroda dua yang disediakan	55.17 %	4 Unit	1,474,800
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Kursi Tamu, Kursi Rapat, Mimbar, Meja Kerja)	55.17 %	11 Unit	100,000	Pengadaan Mebel	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Kursi Tamu, Kursi Rapat, Mimbar, Meja Kerja)	55.17 %	11 Unit	100,000
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55.17 %	6 Unit	80,797,100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55.17 %	6 Unit	80,797,100
5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	55.17 %	2 Unit	5,430,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	55.17 %	2 Unit	5,430,000
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.17 %	2 Unit	3,302,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.17 %	2 Unit	3,302,000

					Lainnya	Semua Kelurahan	yang Disediakan				atau Bangunan Lainnya	Semua Kelurahan	yang Disediakan			
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	55.17 %	2 Unit	100,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	55.17 %	2 Unit	100,000
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					539,713,025	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					539,713,025
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55.17 %	12 Laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55.17 %	12 Laporan	10,000,000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	55.17 %	12 Laporan	81,814,009	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	55.17 %	12 Laporan	81,814,009
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55.17 %	12 Laporan	20,530,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55.17 %	12 Laporan	20,530,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	55.17 %	1 Laporan	427,369,016	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	55.17 %	1 Laporan	427,369,016

						Kelurahan							Kelurahan	Disediakan			
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					71,040,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					71,040,000	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55.17 %	11 Unit	71,040,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55.17 %	11 Unit	71,040,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1,462,851,315	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1,462,851,315	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					331,593,100	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					331,593,100	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100 % 100 %	2 Dokumen	30,487,800	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100 % 100 %	2 Dokumen	30,487,800	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	100 % 100 %	2 Dokumen	193,888,000	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	100 % 100 %	2 Dokumen	193,888,000	

5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100 % 100 %	2 Doku men	80,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100 % 100 %	2 Doku men	80,000,000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	100 % 100 %	1 Lemb aga	10,165,900	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	100 % 100 %	1 Lemb aga	10,165,900
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bimtek Sistem Informasi Kepegawaian (SARIP) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 % 100 %	1 Kegiat an 200 Doku men	14,000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bimtek Sistem Informasi Kepegawaian (SARIP) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 % 100 %	1 Kegiat an 200 Doku men	14,000,000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	100 % 100 %	12 Doku men	3,051,400	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	100 % 100 %	12 Doku men	3,051,400
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN					718,881,515	Mutasi dan Promosi ASN					718,881,515
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100 %	4 Doku men	167,574,000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN	100 %	4 Doku men	167,574,000

													antar Daerah			
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100 %	2 Dokumen	35,215,000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100 %	2 Dokumen	35,215,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100 %	34 Dokumen	516,092,515	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100 %	34 Dokumen	516,092,515
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN					330,288,800	Pengembangan Kompetensi ASN					330,288,800
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 %	34 Orang	15,938,800	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 %	34 Orang	15,938,800
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Assessment Center	100 %	1 Dokumen	309,250,000	Pengelolaan Assessment Center	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Assessment Center	100 %	1 Dokumen	309,250,000
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100 %	1 Dokumen	5,000,000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan	100 %	1 Dokumen	5,000,000

						Semua Kelurahan					Sertifikasi ASN	Semua Kelurahan	dan Sertifikasi ASN			
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 %	10 Orang	100,000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 %	10 Orang	100,000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					82,087,900	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					82,087,900
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	1 Dokumen	1,578,400	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	1 Dokumen	1,578,400
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja AparaturJumlah Kegiatan Rapat Tim Penilaian Kinerja Daerah	100 %	12 Dokumen 12 Bulan	77,510,000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja AparaturJumlah Kegiatan Rapat Tim Penilaian Kinerja Daerah	100 %	12 Dokumen 12 Bulan	77,510,000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 %	100 Orang	999,500	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 %	100 Orang	999,500
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 %	5 Orang	1,000,000	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 %	5 Orang	1,000,000

						Kelurahan						Kelurahan				
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100 %	1 Lapor an	1,000,000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100 %	1 Lapor an	1,000,000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					54,570,000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					54,570,000
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					54,570,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					54,570,000
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis					30,000,000	Pengembangan Kompetensi Teknis					30,000,000
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 % 100 %	20 Orang	30,000,000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 % 100 %	20 Oran g	30,000,000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					24,570,000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					24,570,000

5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100 % 100 %	1 Lapor an	24,570,000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100 % 100 %	1 Lapor an	24,570,000
TOTAL										6,639,596,000	6,639,596,000					

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan, antara rencana kerja (RENJA) dengan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Tahun 2022 beberapa kegiatan dari target kinerja yang terdapat dalam Dokumen RKPD belum dapat dilaksanakan, adapun target kinerja yang belum dapat dilaksanakan, adalah:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1.1. Kegiatan Diklat Kepemimpinan

Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan Tahun Anggaran 2022 terjadi efisiensi akibat refocusing anggaran, dan akan di anggarkan untuk tahun 2023

1.2. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Semester II

1.3. Diklat teknis Tugas dan Fungsi

Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan Tahun Anggaran 2022 terjadi efisiensi akibat refocusing anggaran, dan akan di anggarkan untuk tahun 2023

1.4. Bimtek Peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Semester II

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Kebijakan Nasional terkait dengan manajemen kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan arah kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Pada prinsipnya pengelolaan manajemen kepegawaian di Kota Tomohon dilaksanakan dan berpedoman pada norma, kaidah dan aturan yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kota Tomohon. Kebijakan nasional terkait pengelolaan manajemen kepegawaian mengalami perubahan atau dinamika sesuai dengan perkembangan zaman dan setiap perubahan tersebut secara proaktif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon melakukan penyesuaian dan inovasi demi terciptanya pelayanan manajemen kepegawaian yang prima.

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara 2019-2024 yaitu:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas,
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN),
4. Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN,
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah: Terwujudnya Birokrasi yang berkualitas dan Kapabel dan berdaya saing, melalui Terwujudnya lembaga yang sederhana responsive, adaptif dan kolaboratif, terwujudnya ASN yang professional berintegritas dan sejahtera, Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif dan efisien dan akuntabel, Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas, terwujudnya kualitas pelayanan public dan prima, Peningkatan efektivitas reformasi birokrasi nasional.

Sampai saat ini semua kebijakan nasional mampu diimplementasikan melalui berbagai kegiatan terkait pengelolaan kepegawaian dan kediklatan sehingga berbagai terobosan telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon dengan tujuan peningkatan pelayanan kepegawaian yang baik dan peningkatan kompetensi serta kapasitas sumber daya aparatur. Kebijakan nasional dalam bidang manajemen kepegawaian berdampak positif terhadap perubahan sikap dan pola pikir PNS Kota Tomohon.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Terpilih Periode 2021 – 2024 adalah sebagai berikut:

Visi :

Tomohon Maju Berdaya Saing dan Sejahtera.

Misi :

1. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota religius ;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diberbagai sektor;
3. Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia;
4. Memajukan system opertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan;
5. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif dan berintegritas;

TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon, maka tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon yaitu:

“Terlaksananya Reformasi Birokrasi efektif dan Efisien”

SASARAN

Berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon, maka Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon, yaitu :

1. Terwujudnya Pelayanananan Administrasi Kepegawaian yang baik
2. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya ASN.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran terkait dengan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tomohon Tahun 2022 terkait dengan sasaran strategis yaitu:

1. Program Kepegawaian Daerah
 - 1.1. Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN,
 - 1.2. Jumlah Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - 1.3. Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1.4. Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2. Program pengembangan Sumber Daya manusia
 - 2.1. Jumlah Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan, Kompetensi manejerial dan fungsiona

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
											Tolok Ukur	Target				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	03				KEPEGAWAIAN					6,585,026,000			12,080,125,654			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,122,174,685			9,211,459,139			
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					200,000			5,000,000			
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	2 Dokumen	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	2,500,000	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	1 Dokumen	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	2,500,000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,126,159,510			5,357,435,000			

5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	41 Orang/ bul	3,955,899,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	5,081,494,000
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	12 Dokumen	170,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	275,000,000
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	18 Laporan	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	941,000
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					200,000					3,500,000
5	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	1 Dokumen	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	1,000,000
5	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	12 Laporan	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	2,500,000
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					400,000					335,000,000
5	03	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	2 Unit	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	25,000,000

							Kelurahan				Umum				
5	03	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	2 Dokumen	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	2,000,000
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	15 Orang	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	220,000,000
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	5 Orang	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	88,000,000
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					291,358,250					981,500,000
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	1 Paket	7,248,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	88,000,000
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Belanja ATK dan Belanja Modal Scener, Printer, LCD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	1 Paket	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	330,000,000
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	55.17 %	1 Paket	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	33,000,000

							Kelurahan				Umum				
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK, Makan Minum Rapat dan Jamuan Tamu)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	1 Paket	110,876,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	121,000,000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Belanja ATK, dan Belanja Cetak/Penggandaan)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	1 Paket	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	55,000,000
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	1095 Dokume	7,236,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	8,800,000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	95 Laporan	130,348,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	300,000,000
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	1 Dokumen	448,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	40,700,000
5	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	1 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	5,000,000

5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					93,103,900					1,930,024,139
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan beroda empat yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	1 Unit	1,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	115,500,000
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan beroda dua yang disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	4 Unit	1,474,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	462,000,000
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Kursi Tamu, Kursi Rapat, Mimbar, Meja Kerja)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	11 Unit	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	82,500,000
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	6 Unit	80,797,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	264,000,000
5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	2 Unit	5,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	706,024,139
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	2 Unit	3,302,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	200,000,000

5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	2 Unit	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	100,000,000
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					539,713,025					374,000,000
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	12 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	11,000,000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	12 Laporan	81,814,009	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	88,000,000
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	12 Laporan	20,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	165,000,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	1 Laporan	427,369,016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	110,000,000
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					71,040,000					225,000,000
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17 %	11 Unit	71,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55.17 %	225,000,000

													guru dan tenaga kesehatan)		
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Lembaga	10,165,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 % 100 %	88,000,000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bimtek Sistem Informasi Kepegawaian (SARIP) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Kegiatan 200 Dokumen	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 % 100 %	150,000,000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Dokumen	3,051,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 % 100 %	88,000,000

5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN					718,881,515					744,166,515
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	167,574,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan BKPSDM	100 %	516,092,515
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	35,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan BKPSDM	100 %	60,500,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	34 Dokumen	516,092,515	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan BKPSDM	100 %	167,574,000
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN					330,288,800					1,196,000,000
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	34 Orang	15,938,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan BKPSDM	100 %	55,000,000
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Assessment Center	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	309,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan BKPSDM	100 %	330,000,000
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan BKPSDM	100 %	800,000,000

							Kelurahan				Umum				
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan BKPSDM	100 %	11,000,000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					82,087,900					270,000,000
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1,578,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan BKPSDM	100 %	50,000,000
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Kegiatan Rapat Tim Penilaian Kinerja Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen 12 Bulan	77,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan BKPSDM	100 %	200,000,000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	999,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan BKPSDM	100 %	5,000,000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan BKPSDM	100 %	5,000,000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase penerapan Sistem Merit yang menjadi Kewenangan	100 %	10,000,000

							Kelurahan				Umum		BKPSDM		
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					54,570,000					2,080,000,000
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					54,570,000					2,080,000,000
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis					30,000,000					1,100,000,000
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	20 Orang	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 % 100 %	1,100,000,000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					24,570,000					980,000,000
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Laporan	24,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 % 100 %	980,000,000
TOTAL										6,639,596,000					14,160,125,654

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon disusun berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan Program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya serta dinamika pemerintahan, pembangunan dan kondisi sosial masyarakat. Rencana kerja Tahun 2023 diprioritaskan untuk program dan kegiatan yang dapat terealisasi serta memiliki manfaat bagi organisasi, ASN dan peningkatan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek norma, kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan anggaran yang terdapat dalam rencana kerja didasarkan pada masukan dari setiap bidang sesuai dengan kondisi riil keuangan dan standar biaya umum yang ditetapkan. Rencana kerja ini akan menjadi acuan penyusunan anggaran Tahun 2023 melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon.

Pendanaan Perangkat Daerah yang dijabarkan melalui program dan kegiatan diakumulasikan pada rencana kerja sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku. Pendanaan untuk perangkat daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan publik organisasi serta mempercepat terwujudnya tujuan organisasi. Pendanaan perangkat daerah melalui rencana kerja Tahun 2023 telah melalui kajian berdasarkan kondisi riil organisasi dan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 4.1

Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan BKPSDMD

Kota Tomohon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5	3				KEPEGAWAIAN				6,585,026,000
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,122,174,685
5	3	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200,000
5	3	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	2 Dokumen 100,000

5	3	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	1 Dokumen	100,000
5	3	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,126,159,510
5	3	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	41 Orang/bul	3,955,899,510
5	3	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	12 Dokumen	170,160,000

5	3	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	18 Laporan	100,000
5	3	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					200,000
5	3	1	2	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	1 Dokumen	100,000
5	3	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	12 Laporan	100,000
5	3	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					400,000

5	3	1	2.1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	2 Unit	100,000
5	3	1	2.1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	2 Dokumen	100,000
5	3	1	2.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	15 Orang	100,000
5	3	1	2.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	5 Orang	100,000
5	3	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah					291,358,250

5	3	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	1 Paket	7,248,950
5	3	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Belanja ATK dan Belanja Modal Scener, Printer, LCD)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	1 Paket	100,000
5	3	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	1 Paket	100,000

5	3	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK, Makan Minum Rapat dan Jamuan Tamu)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	1 Paket	110,876,800
5	3	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Belanja ATK, dan Belanja Cetak/Penggandaan)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	1 Paket	30,000,000
5	3	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	1095 Dokume	7,236,500

5	3	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	95 Laporan	130,348,000
5	3	1	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	1 Dokumen	448,000
5	3	1	2.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	1 Dokumen	5,000,000
5	3	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					93,103,900
5	3	1	2.1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan beroda empat yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	1 Unit	1,900,000

5	3	1	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan beroda dua yang disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	4 Unit	1,474,800
5	3	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Kursi Tamu, Kursi Rapat, Mimbar, Meja Kerja)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	11 Unit	100,000
5	3	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	6 Unit	80,797,100
5	3	1	2.1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	2 Unit	5,430,000
5	3	1	2.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	2 Unit	3,302,000

5	3	1	2.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	2 Unit	100,000
5	3	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					539,713,025
5	3	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	12 Laporan	10,000,000
5	3	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	12 Laporan	81,814,009
5	3	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	12 Laporan	20,530,000

5	3	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	1 Laporan	427,369,016
5	3	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					71,040,000
5	3	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.17%	11 Unit	71,040,000
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1,462,851,315
5	3	2	2		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					331,593,100
5	3	2	2	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100%	2 Dokumen	30,487,800
5	3	2	2	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100%	2 Dokumen	193,888,000
5	3	2	2	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	100%	2	80,000,000

					Pemberhentian	kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kelurahan	100%	Dokumen	
5	3	2	2	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100%	1 Lembaga	10,165,900
5	3	2	2	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bimtek Sistem Informasi Kepegawaian (SARIP) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100%	1 Kegiatan 200 Dokumen	14,000,000
5	3	2	2	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100%	12 Dokumen	3,051,400
5	3	2	2		Mutasi dan Promosi ASN					718,881,515
5	3	2	2	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	167,574,000

5	3	2	2	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	35,215,000
5	3	2	2	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	34 Dokumen	516,092,515
5	3	2	2		Pengembangan Kompetensi ASN					330,288,800
5	3	2	2	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	34 Orang	15,938,800
5	3	2	2	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Assessment Center	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	309,250,000
5	3	2	2	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	5,000,000
5	3	2	2	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Orang	100,000

5	3	2	2		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					82,087,900
5	3	2	2	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	1,578,400
5	3	2	2	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Kegiatan Rapat Tim Penilaian Kinerja Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen 12 Bulan	77,510,000
5	3	2	2	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 Orang	999,500
5	3	2	2	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Orang	1,000,000

5	3	2	2	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	1,000,000
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					54,570,000
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					54,570,000
5	4	2	2		Pengembangan Kompetensi Teknis					30,000,000
5	4	2	2	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100%	20 Orang	30,000,000
5	4	2	2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					24,570,000
5	4	2	2	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100%	1 Laporan	24,570,000

							Prajabatan					
											TOTAL	6,639,596,000

BAB V

P E N U T U P

Rencana kerja (renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon tahun 2023 memuat berbagai program dan kegiatan, indicator, target pencapaian kinerja dan kebutuhan anggaran tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon. Rancangan Rencana kerja ini akan menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 serta tolok ukur keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon.

Diharapkan dengan tersusunnya rancangan rencana kerja ini dapat memberikan arah yang jelas dalam mengelola manajemen kepegawaian dan diklat demi terciptanya pelayanan prima dan *good governance*. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang baik terhadap masyarakat Kota Tomohon.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi Rancangan RENJA Badan Kepegawaian Semoga Rancangan RENJA tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada Rancangan rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon,

sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada Rancangan rencana kerja 2023 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah. antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2018, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Propinsi Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota , RKPD Kota Tomohon dan Renstra Dinas).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- A. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- B. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
- C. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- D. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- E. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

INSPEKTORAT DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Inspektorat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Inspektorat Daerah

Selanjutnya Renja Inspektorat Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum

ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 didasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah bertujuan :

Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Inspektorat Daerah tahun 2023.

Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.

Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat Daerah Kota Tomohon, proses penyusunan Inspektorat Daerah Kota Tomohon, keterkaitan antara Renja Inspektorat Daerah Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat Daerah Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah Kota Tomohon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Tomohon.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Tomohon Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kota Tomohon Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahunberjalan (tahun n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Tomohon Tahun Lalu dan Renstra Dinas/Badan Inspektorat Daerah Kota Tomohon
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Tomohon.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Tomohon
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Tomohon

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Tomohon.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Tomohon
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Tomohon
- 3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan pencapaian kinerja Renstra Inspektorat ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat Kota Tomohon sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Inspektorat, serta hambatan dan permasalahannya yang dihadapi untuk dipakai sebagai bahan perencanaan pengawasan tahun berikutnya.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang direncanakan tahun 2021

Program dan kegiatan Inspektorat Kota Tomohon yang termuat dalam Renja 2023 sebanyak 3 (tiga) program dengan 11 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan.

Berdasarkan capaian kinerja diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat mencapai 91,65 %, kondisi ini memberi gambaran bahwa efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pemanfaatan dana sudah sangat tinggi.
- Masih adanya bencana non alam pandemi COVID-19 terjadi pada tahun 2021 membuat segala kegiatan pemerintahan terjadi perubahan, dilaksanakan Refocusing Anggaran.
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD tetap dilaksanakan akan tetapi untuk realisasi keuangannya tidak di laksanakan.

2.1.2 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat

Adapun mengenai keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan tahun ini dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategi Inspektorat Kota Tomohon selama 5 (lima) tahun bahwa kegiatan dan program yang telah dilaksanakan merupakan bagian perencanaan tahunan pertama dari renstra yang ditetapkan.

Adanya perubahan nomenklatur Program serta Kegiatan menurut Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka perencanaan program kegiatan Inspektorat Kota Tomohon telah disusun dan disesuaikan dengan perubahan tersebut dan atas program dan kegiatan menurut peraturan yang lama telah dipetakan sehingga sasaran dan tujuan Inspektorat Kota Tomohon dapat dicapai. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja yang ditetapkan.

Evaluasi RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Evaluasi RKPD Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi		Tingkat Capaian Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				6,775,655,089		7,533,221,791				
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%		100%	5,221,329,734		6,209,841,300		118.93%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42 Sub Kegiatan		7 Sub Kegiatan	3,500,000		-		0.00%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 Dokumen	500,000	8 Dokumen			0.00%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	500,000	1 Dokumen			0.00%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	500,000	1 Dokumen			0.00%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	500,000	1 Dokumen			0.00%	INSPEKTORAT DAERAH

6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	500,000	1 Dokumen			0.00%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Dokumen	500,000	1 Dokumen			0.00%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Dokumen	500,000	4 Dokumen			0.00%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Sub Kegiatan		20 Sub Kegiatan	4,227,036,416		4,016,884,791		95.03%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan			12 Bulan	4,098,326,416	12 Bulan	3,906,334,791		95.32%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Bulan	127,710,000	12 Bulan	110,550,000		86.56%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Bulan	500,000				0.00%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Kegiatan	500,000				0.00%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18 Sub Kegiatan		1 Sub Kegiatan	500,000		-		0.00%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD			12 laporan	500,000		-		0.00%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Sub Kegiatan		2 Sub Kegiatan	128,805,800		125,815,981		97.68%	INSPEKTORAT DAERAH

6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			100 pasang	90,285,800	98 Pasang	90,090,000		99.78%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			5 pns	38,520,000	5 PNS	35,725,981		92.75%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	54 Sub Kegiatan		8 Sub Kegiatan	242,308,854		198,754,500		82.03%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10 item	4,677,970	5 item	981,000		20.97%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5 unit	48,062,500	5 unit	46,859,000		97.50%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item bahan logistik Kantor			30 item	45,817,834	30	41,383,500		90.32%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			4000 penggandaan 500 cetakan	8,912,550	3000 penggandaan 20 cetakan	4,602,000		51.64%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bukti pembayaran surat kabar per bulan			12 Bukti Bayar	5,130,000	600 Eksemplas	4,660,000		90.84%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu			20 kali	5,000,000	9 Kali	1,518,700		30.37%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			20 Laporan	111,708,000	15 Laporan	96,675,300		86.54%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 kegiatan	13,000,000	1 kegiatan	2,075,000		15.96%	INSPEKTORAT DAERAH

6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54 Sub Kegiatan		4 Sub Kegiatan	308,994,064	4 Sub Kegiatan	261,366,914		84.59%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang digunakan			1500 Buah	15,000,000	1130 Buah	11,300,000		75.33%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon/listrik/internet			36 rekening	21,050,964	36 rekening	17,832,500		84.71%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor			3 unit	6,006,000	3 unit	5,800,000		96.57%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor			36 Laporan	266,937,100	36 Laporan	226,434,414		84.83%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	6 Sub Kegiatan		1 Sub Kegiatan	310,184,600	1 Sub Kegiatan	283,638,623		91.44%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			11 unit	310,184,600	11 unit	283,638,623		91.44%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Tindak Lanjut Temuan	80%		77%	1,190,561,200		997,295,391		83.77%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah sub kegiatan pengawasan Internal	36 Sub Kegiatan		5 Sub Kegiatan	1,095,336,200	5 Sub Kegiatan	917,108,391		83.73%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			10 Kegiatan	587,975,000	9 Kegiatan	532,109,000		90.50%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			20 Kegiatan	323,383,700	17 Kegiatan	293,185,000		90.66%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Kegiatan Reviu Laporan Keuangan			1 Kegiatan	81,069,500	1 kegiatan	78,500,391		96.83%	INSPEKTORAT DAERAH

6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal			1 Kegiatan	72,400,000	0	0		0.00%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			10 Kegiatan	30,508,000	8 Kegiatan	13,314,000		43.64%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12 Sub Kegiatan		2 Sub Kegiatan	95,225,000	2 Sub Kegiatan	80,187,000		84.21%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			2 Kegiatan	55,000,000	2 Kegiatan	40,537,000		73.70%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			5 Kegiatan	40,225,000	5 Kegiatan	39,650,000		98.57%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Maturitas SPIP Tingkat PK APIP	Level 3 Level 3		Level 3 Level 3	363,764,155	Level 3 Level 3	326,085,100		89.64%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6 Sub Kegiatan		1 Sub Kegiatan		0			0.00%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6 Sub Kegiatan		0			0		0.00%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	24 Sub Kegiatan		2 Sub Kegiatan	363,764,155	2 Sub Kegiatan	326,085,100		89.64%	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			2 Kegiatan	15,312,500	0	0		0.00%	INSPEKTORAT DAERAH

6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			8 Kegiatan	348,451,655	7 Kegiatan	326,085,100		93.58%	INSPEKTORAT DAERAH
---	----	----	------	----	---	---	--	--	------------	-------------	------------	-------------	--	--------	--------------------

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Tomohon

Analisis kinerja Pelayanan SKPD dapat dikategorikan baik dimana program kerja pengawasan telah berjalan sebagaimana apa yang ditetapkan dalam PKPT (program kerja pengawasan tahunan) dan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kota Tomohon

NO	Indikator	Target Renstra						Realisasi Capaian	Proyeksi				Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	77	78	79	80	80	80	79.38	79	79	80		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Tomohon

Sejauh mana tingkat pelayanan Inspektorat Kota Tomohon dapat dilihat dari capaian kinerja tahun 2021. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan.

Keberhasilan melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat, antara lain:

1. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal belum sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat dalam menindaklanjuti hasil temuan;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia/Aparat Pengawas yang memiliki kualifikasi, baik segi kuantitas maupun kualitas;
3. Padatnya tugas Inspektorat, sehingga Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH tidak semua direalisasikan;
4. Adanya tugas-tugas tambahan dari Kepala Daerah serta instansi vertikal lainnya dalam rangka pengawasan penanganan Pandemi Covid-19.

Tantangan yang dihadapi Inspektorat Kota Tomohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibedakan atas faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal :

- Masih kurangnya kualitas APIP bersertifikat di Inspektorat Kota Tomohon

Faktor Eksternal :

- Belum padunya penafsiran aturan dan perundang-undangan antara sesama APIP dan Auditor Eksternal sehingga menimbulkan keresahan pada objek pemeriksaan
- Kurangnya perhatian dari obyek pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan

Peluang pengembangan pelayanan Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan di Kota Tomohon antara lain :

- Tuntutan masyarakat tentang akuntabilitas pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan hasil sehingga tujuan yang diharapkan tercapai
- Layanan konsultasi
- Asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran
- Asistensi LKIP
- Reviu Laporan Keuangan SKPD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD 2022

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	INSPEKTORAT				9,565,678,477					8,317,731,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	7,781,478,477	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	7,265,568,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	3,850,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	3,500,000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan	4 Sub Kegiatan	5,056,869,758	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan	4 Sub Kegiatan	6,185,643,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	770,550,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	30,500,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Sub Kegiatan	709,335,022	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Sub Kegiatan	227,905,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	541,200,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	209,352,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sub kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub Kegiatan	314,673,698	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sub kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub Kegiatan	408,668,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Sub Kegiatan	385,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Sub Kegiatan	200,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase tindak lanjut temuan	79 Persen	1,028,500,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase tindak lanjut temuan	79 Persen	751,000,000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sub kegiatan pengawasan Internal	5 Sub Kegiatan	924,000,000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sub kegiatan pengawasan Internal	5 Sub Kegiatan	671,000,000	

	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Sub Kegiatan	104,500,000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Sub Kegiatan	80,000,000	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 Level 3	755,700,000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 Level 3	301,163,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1 Sub Kegiatan	46,200,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1 Sub Kegiatan	18,942,000	

[illegible]

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan RPJM Nasional adalah di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada tata kelola pemerintahan yang baik.

- ❖ Arah dan kebijakan dalam rangka penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah:
 1. Penegakan hukum yang kuat dan dipercaya
 2. Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara
 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
- ❖ Upaya pemberantasan korupsi bersifat pencegahan dilakukan melalui :
 1. Konsultasi dan kampanye publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi;
 2. Penataan sistem dan penguatan kelembagaan pengawasan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Kota Tomohon

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kota Tomohon dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta tidak lepas dari Rencana Strategi 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai tahun 2023 adalah:

- Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien
- Sasaran yang ingin dicapai adalah :
- Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Inspektorat Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dirumuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :

- ❖ Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ❖ Selaras dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional
- ❖ Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon
- ❖ Berpedoman pada Renstra Inspektorat tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026
- ❖ Tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam menentukan kebijakan di bidang pengawasan pelaksanaan pembangunan Kota Tomohon

Secara garis besar, program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat Kota Tomohon adalah Pengawasan Urusan Pemerintahan.

Sebaran lokasi kegiatan Inspektorat Kota Tomohon pada tahun 2023 sebagian besar dilaksanakan di Kota Tomohon, selebihnya di luar daerah yang bersifat koordinasi baik di tingkat provinsi dan nasional.

Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan Inspektoran Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01				INSPEKTORAT DAERAH								8,317,731,000				10,538,731,000	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7,265,568,000				8,148,731,000	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,500,000				9,000,000	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	1,000,000
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	600,000
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	600,000

							SKPD											
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	600,000
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	600,000
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	600,000
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	5,000,000
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,185,643,000						6,168,731,000
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	38 Orang/bu	100 %	6,131,911,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	6,131,731,000

6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	52,732,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	35,000,000
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	1,000,000
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	1,000,000
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								30,500,000				35,000,000	
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	30,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	35,000,000
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								227,905,000				750,000,000	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	38 Paket	100 %	32,016,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	250,000,000
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Orang	100 %	174,168,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	300,000,000

6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	38 Orang	100 %	21,721,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	200,000,000
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								209,352,000				351,000,000
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	6,000,000
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Paket	100 %	50,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	150,000,000
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Paket	100 %	57,502,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	65,000,000
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Paket	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	10,000,000
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	700 Dokumen	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	10,000,000
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	10,000,000

						Daerah			Daerah					Umum					
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan PEnunjan g Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Perse n	20 Laporan	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	100,000,000	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								408,668,000				435,000,000		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Perse n	12 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	15,000,000	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Perse n	24 Laporan	100 %	20,808,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	10,000,000	
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Perse n	1 Laporan	100 %	5,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	10,000,000	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Perse n	12 Laporan	100 %	372,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	400,000,000	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								200,000,000				400,000,000		
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Perse n	11 Unit	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	400,000,000	

					Lapangan													
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								751,000,000					1,260,000,000
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								671,000,000					1,130,000,000
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Temuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Persen	40 Laporan	100 %	236,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Temuan	79 Persen	350,000,000
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Temuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Persen	30 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Temuan	79 Persen	300,000,000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Tindak Temuan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Persen	30 Laporan	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Temuan	79 Persen	350,000,000
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Tindak Temuan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Persen	1 Laporan	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Temuan	79 Persen	100,000,000
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Tindak Temuan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Persen	15 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Temuan	79 Persen	30,000,000
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								80,000,000					130,000,000

6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentasi Tindak Lanjut Temuan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Perse n	5 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentasi Tindak Lanjut Temuan	79 Persen	80,000,000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentasi Tindak Lanjut Temuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Perse n	5 Laporan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentasi Tindak Lanjut Temuan	79 Persen	50,000,000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								301,163,000				1,130,000,000	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								18,942,000				30,000,000	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tingkat Kapabilita s APIP Tingkat Maturitas SPIP	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Cakupan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasn dan Fasilitasi Pengawasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Level 3 Level	1 Rekomend	asli 00 %	18,942,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Maturitas SPIP	3 Level 3 Level	30,000,000
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi								282,221,000				1,100,000,000	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapabilita s APIP Tingkat Maturitas SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Level 3 Level	34 perangkat daerah	100 %	62,221,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Maturitas SPIP	3 Level 3 Level	500,000,000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tingkat Kapabilita s APIP Tingkat Maturitas SPIP	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Cakupan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Level 3 Level	20 Kegiatan	100 %	220,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Maturitas SPIP	3 Level 3 Level	600,000,000
TOTAL													8,317,731,000				10,538,731,000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Tomohon dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023	
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01				INSPEKTORAT DAERAH	8,317,731,000	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,265,568,000	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,500,000	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,185,643,000	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,131,911,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52,732,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30,500,000	
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	227,905,000	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32,016,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	174,168,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21,721,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	209,352,000	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57,502,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408,668,000	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,808,000	Dana Transfer Umum-Dana

							Alokasi Umum
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200,000,000	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	751,000,000	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	671,000,000	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	236,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	80,000,000	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	301,163,000	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	18,942,000	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	18,942,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Tomohon Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa tidak semua kegiatan dapat berhasil, namun masih ada kegagalan dan hambatan/kendala sebagaimana diuraikan dalam BAB II sehingga pada tahun Anggaran 2023, Inspektorat Kota Tomohon akan berupaya untuk:

1. Pemberian rekomendasi yang disampaikan oleh auditor kepada auditan ditujukan untuk menghilangkan penyebab terjadinya kondisi/temuan sehingga rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak auditan secara tepat waktu, sehingga peran Aparatur Pengawasan Intern dalam setiap temuan/kekeliruan dalam pelaksanaan program/kegiatan organisasi adalah:
 - a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
 - b. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.
2. Mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan substantif lainnya baik yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan maupun yang dilaksanakan secara internal oleh Inspektorat dengan fasilitator dari lembaga yang berkompeten;
3. Mengusulkan penambahan alokasi anggaran, untuk Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan guna memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, terutama terkait dengan adanya tuntutan profesionalisme APIP, memerlukan tanda-tanda yang menunjukkan terbangunnya profesionalisme yang kuat bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sebagai berikut:
 - a) Pengawasan Internal yang berbedauntutannya sesuai perkembangan zaman, yakni selain pengetahuan *auditing*/akuntansi juga diperlukan wawasan *governance*, *internal control*, dan *risk management*;
 - b) Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Auditor;
 - c) Keberadaan dan penegakan Kode Etik Profesi Auditor;
 - d) Terkait dengan tingkat kesulitan sebagai pengawas intern yang lebih tinggi dan kompleks, karena mencakup data masa lalu, masa kini dan proyeksi di masa datang;
 - e) Adanya kualitas pengendalian yang memadai untuk menjaga mutu layanannya;
 - f) Adanya penilaian kepatuhan dan kendali mutu oleh APIP.
4. Menetapkan jabatan fungsional pejabat pengawas pemerintah sebagai jabatan fungsional yang memiliki spesialisasi dalam bidang SDM, Tupoksi, sarana prasarana dan keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan di Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kota Tomohon Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021 - 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun kedepan.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA TOMOHON

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja 2023 mengikuti perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Utara Tahun 2023 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Renstra Kecamatan Tomohon Utara Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

1. penyusunan rancangan awal
2. rancangan
3. rancangan akhir; dan
4. penetapan.

Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon sebagai perangkat daerah menyusun Renja Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Tahun 2021-2026, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyusun Renja Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap RKPD Kota Tomohon Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Renja Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja

Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renja Tahun 2023 Kecamatan Tomohon Utara Tahun 2023 Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
- B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- E. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
- H. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2108 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
- I. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- J. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- K. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
- L. Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- P. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Q. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27);
- R. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
- S. Peraturan Walikota Tomohon Nomor tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Tomohon Utara dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menyusun RKA Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- d. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
- e. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program/kegiatan /Sub Kegiatan pada tahun 2023;
- f. Memberikan pedoman dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN TOMOHON UTARA TAHUN 2021

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 Sampai dengan Triwulan IV dan capaian Renstra Kecamatan Tomohon Utara, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tomohon Utara, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Utara, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 sampai dengan triwulan IV dan Capaian Renstra Kecamatan Tomohon Utara.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Utara

2.4 Review terhadap RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TOMOHON UTARA

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tomohon Utara

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Kecamatan Tomohon Utara

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Badan/Dinas/Kecamatan.....

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan Kecamatan Tomohon Utara pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Utara tahun 2023

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN IV TAHUN 2021

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Kecamatan Tomohon Utara tahun 2021 didasarkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Tomohon Utara Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Sampai Triwulan IV dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dari Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tomohon Utara Tahun 2021 hingga triwulan IV secara umum semua Sub kegiatan telah mencapai target, hanya ada satu sub kegiatan yang tidak mencapai target. Hal ini karena pelaksanaan untuk semua Program, Kegiatan dan sub Kegiatan sudah dilaksanakan.

Untuk sub kegiatan yang tidak mencapai target 100% sampai triwulan IV yaitu Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Karena adanya kendala data dalam merealisasikan sub kegiatan tersebut.

Sub kegiatan yang lain sudah memenuhi target karena sudah terlaksana semua.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tahun 2021 secara lengkap, tercantum dalam Tabel 2.1 berikut.

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Renstra SKPD pada tahun 2016-2021(periode Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
														I		II		III		IV											
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										K
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 =12/7*100		14 = 6+12		15 =14/5*100		16	17
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	0	0	0	0	4	482.749.100	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0	0	0	0	3	97.612.386	3	4.000.000	3	15.600.000	3	23.880.000	3	32.364.900	3	75.852.900	3	75.852.900	3	75.852.900	3	75.852.900		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	0	0	0	0	3	47.964.800	3	4.000.000	3	9.000.000	3	11.000.000	3	18.459.500	3	42.459.500	3	42.459.500	3	42.459.500	3	42.459.500		
						PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	0	0	0	0	11	3.608.692.054	0	-	0	0	21,95	99.200.000		1.480.792.000	59,59	2.479.992.000	59,59	2.479.992.000	59,59	2.479.992.000	59,59	2.479.992.000		
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan	0	0	0	0	32	3.710.539.100	0	-	0	0	11	99.200.000	11	1.480.792.000	11	2.479.992.000	11	2.479.992.000	11	2.479.992.000	11	2.479.992.000		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Renstra SKPD pada tahun 2016-2021(periode Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
														I				II		III											IV	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										K	Rp.(000)
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 =12/7*100		14 = 6+12		15 =14/5*100		16	17	
						di Tingkat Kecamatan	n di tingkat kecamatan											0								00						
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Saranan dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	3	2.708.207.195	0	-	4	54.229.500	16,47	197,484	0	0	4	251.658.284	4	251.658.284	4	251.658.284	4	251.658.284			
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	0	0	0	0	3	2.708.207.195	0	-	4	54.229.500	16,47	197,484	0	0	4	251.658.284	4	251.658.284	4	251.658.284	4	251.658.284			
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0	0	0	0	11	2.402.629.600	0	-	81.72	1.963.617.610	81,72	42.967.450	81.72	2.006.585.060	81.72	2.006.585.060	81.72	2.006.585.060	81.72	2.006.585.060	81.72	2.006.585.060			
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman	Jumlah Kegiatan	0	0	0	0	11	2.402.629.600	0	-	81.72	1.963.617.610	81,72	42.967.450	81.72	2.006.585.060	81.72	2.006.585.060	81.72	2.006.585.060	81.72	2.006.585.060	81.72	2.006.585.060			

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Tomohon Utara dilakukan terhadap penilaian capaian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kecamatan Tomohon Utara.

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara diukur dari Indeks kepuasan Masyarakat, Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan), dan Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Adapun hasil Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tomohon Utara sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah Kecamatan
Tomohon Utara

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan Masyarakat			81,25	81,25	81,25	81,25		NA	81,25	81,25	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat			100	100	100	100		80	100	100	
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)			100	100	100	100		NA	100	100	
4	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			100	100	100	100		NA	100	100	

Pelaksanaan survei Indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan cara Melaksanakan penyebaran kuisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan. Dengan Rumus Jumlah angket IKM yang menyatakan baik dibagi Jumlah angket IKM yang dibagikan dan dikalikan 100. Adapun capaian sampai dengan akhith tahun 2021 adalah

Untuk Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat capaian sampai dengan Tahun 2021 sebesar 100%.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) diukur dengan membandingkan jumlah penyelesaian pelanggaran atas K3 dengan jumlah pelanggaran K3 yang ada. Dalam merealisasikan capaian indikator ini dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dimana adanya pos penjagaan di tiap lingkungan.

Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum capaiannya mencapai 100%. Untuk merealisasikan kegiatan ini dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu kesejahteraan perangkat di 11 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon Utara serta terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah umum dimana terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor Kecamatan Tomohon Utara.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tomohon Utara dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta indikator yang terdapat dalam RPJMD Kota Tomoho Tahun 2021-2026 yang menjadi target dari Kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Utara

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD yang berisikan uraian sebagai berikut:

- Tingkat Kinerja pelayanan kecamatan, tidak akan optimal tanpa diimbangi dengan peningkatan kewenangan, SDM dan sarana prasarana yang memadai.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Antara lain, pelimpahan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh tingkat kecamatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih adanya tumpang tindih atau tarik ulur dengan OPD/dinas teknis tingkat Kota yang selama ini melaksanakan dibidang kegiatan tersebut.
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); Terdapat keraguan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada kegiatan yang dilimpahkan ke tingkat

kecamatan, sehingga dapat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, Kecamatan adalah merupakan OPD yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, sehingga aparatur dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan pelayanan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Peluang yang ada di wilayah Kecamatan Tomohon Utara yang mempunyai potensi dalam wilayah Agribisnis, Desa wilayah Industri dan Desa Wisata sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan asli daerah Kota Tomohon.

- Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:
 - Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dari Perangkat Daerah tingkat Kota yang seyogyanya dilaksanakan oleh kecamatan, agar sepenuhnya dilimpahkan ke kecamatan. Sehingga kecamatan tidak akan ragu lagi dalam pelayanan kepada masyarakat. Keraguan dalam pelayanan terhadap masyarakat akan berdampak pada keterlambatan penyelesaian pelayanan, sehingga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan kecamatan.
 - Untuk mencapai visi misi kepala daerah Kota Tomohon, dituntut agar adanya sinergitas di semua OPD terkait serta ditunjang oleh profesionalisme aparatur dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.
 - Untuk meningkatkan PAD Kota Tomohon, potensi di wilayah Kecamatan Kecamatan Tomohon Utara khususnya dibidang sektor agribisnis dan pariwisata perlu dikembangkan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Dalam rancangan RKPD Kota Tomohon Tahun 2022 belum termuat program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Tomohon Utara dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tomohon Utara. Program dan kegiatan berdasarkan usulan analisis tersebut disampaikan pada rancangan RKPD 2023.

Review terhadap rancangan RKP terjadi karena adanya penyesuaian indikator dan penyesuaian pagu anggaran.

1. Dalam Program dan Kegiatan sebagai upaya untuk pencapaian target terhadap indikator indeks kepuasan masyarakat pagu indikatifnya belum sesuai dengan

analisis kebutuhan dana yang akan memenuhi operasional kelurahan demi memperlancar pelayanan kepada masyarakat.

2. Untuk pemenuhan target terhadap Indikator Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat juga pagu belum mencukupi dengan kebutuhan dana yang diperlukan.
3. Pencapaian target untuk Indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) dalam rancangan RKPD tidak dianggarkan tapi sebenarnya itu membutuhkan anggaran untuk menunjang/memperlancar pelayanan di bidang Trantib.
4. Indikator persentase tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dalam rancangan RKPD juga tidak dianggarkan dan untuk pencapaian indikator ini membutuhkan anggaran untuk menunjang/ meperlancar pelayanan di bidang pemerintahan.

TABEL 2.3

**Review terhadap Rancangan RKPD tahun
Kota Tomohon**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tomohon Utara

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %	3.362.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %	3.710.539.100	Untuk memenuhi oprasional kelurahan demi memperlajar pelayanan kepada masyarakat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80 %	2.256.978.400	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan	80 %	6.080.000.000	Untuk melengkapi dana mandatori 5%

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								masyarakat			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	85 %	275.000.000	Untuk memperlanc ar pelayanan di bidang Trantib
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Umum	85 %	60.000.000	Untuk memperlanc ar pelayanan di bidang pemerintah an

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kota yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Tomohon Utara maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Kecamatan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota di rangkum dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Semua Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat		Tidak semua usulan dapat di tampung di Tahun 2023
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan		
	Sub Kegiatan	Semua Kelurahan			
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Semua Kelurahan	1. Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 2. Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun 3. Jumlah pokmas dan ormas yang yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Tomohon Utara sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.

Selain itu terkait dengan kebijakan nasional lainnya, Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;
3. Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal's (MDG's)
4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
5. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Kecamatan Tomohon Utara tidak terlepas dari Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Dalam menetapkan Tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023 juga mempertimbangkan visi, misi pembangunan kepala daerah. Visi dan Misi Walikota Tomohon adalah:

“Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

- 11. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius
- 12. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector
- 13. Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia
- 14. Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan
- 15. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religious yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi
Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota tomohon
		Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan masyarakat kota Tomohon
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon
		Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya kualitas dan prestasi Generasi Muda

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
		Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata domestic maupun mancanegara melalui pengelolaan pariwisata yang produktif, profesional dan berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tomohon
		Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan budaya local
Misi 4 Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian
		Meningkatnya ketahanan pangan
	Terwujudnya pembangunan kota Tomohon yang asri dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan kota yang nyaman asri dan berkelanjutan
Misi 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas	Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Tomohon Utara adalah tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi 5. Tujuan yang hendak di capai adalah tujuan Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 berpedoman pada RKPD Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Tomohon Utara Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomohon Utara, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan serta sub kegiatan dimaksud adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 1.1.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.1.3 Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum PD
 - 1.1.1 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 - 1.1.2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 1.1.3 Fasilitas kunjungan tamu
 - 1.1.4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 1.5 Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1.1 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 1.1.2 Pengadaan mebel
 - 1.1.3 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 1.1.4 Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 1.1.5 Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
 - 1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 1.1.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 1.7 Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 1.1.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 1.1.3 Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

- 2.1.1 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan
 - 3.1 Kegiatan pemberdayaan kelurahan
 - 3.1.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
 - 3.1.2 Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan
 - 3.1.3 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
- 4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
 - 4.1 Di wilayah kecamatanKoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - 4.1.1 Sinergitas dengan kepolisian negara RI, TNI dan instansi vertical di wilayah kecamatan
 - 4.1.2 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- 5. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan umum
 - 5.1 Penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasasn kepala darah
 - 5.1.1 Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang belum merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical
 - 5.1.2 Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan dan kecamatan

Adapun factor-faktor yang menjadi pertimbangan perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini adalah:

- k) Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon
- l) Pencapaian SDGs
- m) Pengentasan Kemiskinan
- n) Pencapaian NSPK
- o) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tahun 2023 dan prakiraan tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan pendanaan kecamatan tomohon utara mengacu pada anggaran APBD. Rencana kerja Kecamatan Tomohon Utara bertujuan untuk mencapai kinerja program yang telah diprogramkan sesuai kerangka pendanaan APBD Kota Tomohon. Adapun Kinerja program yang tertuang dalam APBD yaitu :

7	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		2 dokumen	5,000,000							100 %	3,575,000		
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	3,500,000			Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemertanian pendidikan, kesehatan dan penangan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	8 dokumen	2,475,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA

7	01	001	2.001	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	1 Laporan	1,500,000			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemeraaan pendidikan, kesehatan dan penangan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	4 dokumen	1,100,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	01	001	2.002		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JUMLAH KEGIATAN	100 %	4 Kegiatan	8,779,727,271								100 %	7,880,831,142	

7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia nya gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	90 Orang/bulan	7,273,211,571			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN dan SKPD	14 bulan	7,207,051,160	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	01	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29 orang/bulan	12 Dokumen	1,503,515,700			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN dan SKPD	29 orang/bulan	672,779,982	KECAMATAN TOMOHON UTARA

7	01	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 Laporan	1,500,500				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN dan SKPD	1 dokumen	500	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	01	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 dokumen	18 Laporan	1,500,000			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN dan SKPD	2 dokumen	500	KECAMATAN TOMOHON UTARA

7	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	100 %	4 Kegiatan	55,200,000								100 %	56,641,600	
7	01	001	2.05	002	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah mesin sidik yang diadakan	Jumlah mesin sidik yang diadakan	55 mesin sidik	55 mesin sidik	55,000,000			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemera taan pendidikan, kesehatan dan penangan an kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN	25 pasang	16,665,600	KECAMATAN TOMOHON UTARA

7	01	001	2.005	009	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 pasang	130 Paket				Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN	5 orang	19,988,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	01	001	2.005	011	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN peserta diklat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	1 Orang				Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN	5 orang	19,988,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA

7	01	001	2.006		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan	100 %	4 Kegiatan	114,774,000								100 %	96,311,900	
7	01	001	2.006	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetajan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15200 lembar	1 Paket	5,500,000			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penangan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN dan SKPD	15200 lembar	4,499,900	KECAMATAN TOMOHON UTARA

7	01	001	206	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	800 exemplar	3 Dokumen	3,420,000			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penangan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN dan SKPD	800 exemplar	2,508,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	01	001	206	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat dan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	840 orang	12 Laporan	22,000,000			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penangan kesejahteraan	ASN dan SKPD	840 orang	18,040,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA

															sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif					
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang mengiku ti rakor dan konsulta si dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 kegiatan	12 Laporan	83,854,000			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penangan an kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN dan SKPD	30 kegiatan	71,264,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA

7	01	001	2.007		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	100 %	21 Paket		25,854,741							100 %	535,679,090		
7	01	001	2.007	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang diadakan	Jumlah kendaraan yang diadakan	2 unit			0			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemertaan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	2 unit	100,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA

7	01	001	2.007	005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 item	15 Paket	853,900				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penangan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	14 item	11,158,510	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	01	001	2.007	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 item	8 Unit	24,800,841			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penangan kesejahteraan	SKPD	6 item	18,258,580	KECAMATAN TOMOHON UTARA

7	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 cctv	1 Unit	100,000			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penangan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	10 cctv	6,262,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	3 Jasa Penunjang	162,190,488								100 %	119,307,633	

7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 item	12 Laporan				Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	48 item		32,049,078		KEC AM ATAN TO MO HO N UTA RA
						Jumlah surat terkirim		1750 lembar											1750 lembar			

7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 rekening/bulan	12 Laporan	3,523,200			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penangan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	3 rekening/bulan	12,577,832	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa jaminan kesehatan dan tenaga kebersihan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 orang	1 Laporan	128,444,788			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penangan kesejahteraan	SKPD	20 orang	74,680,723	KECAMATAN TOMOHON UTARA

																sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif					
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	100 %	2 unit	65,400,100								100 %	89,314,300		
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 Unit	28,000,000			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik	SKPD	2 unit	29,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA	

																dan tata kelola pemer intahan yang efektif				
7	01	001	2.009	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2 Unit	37,400,100			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penangan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	2 unit	20,314,300	KECAMATAN TOMOHON UTARA

7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 gedung kantor	1 Unit	0			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penangan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD	1 gedung kantor	40,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat		81,25 persen	3,105,133,500									3,674,103,654	

7	01	002	2.001		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	80 Persen	3,105,133,500								100 %	3,674,103,654	
7	01	002	2.001	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11 kegiatan	1 Dokumen	3,105,133,500				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemeraaan pendidikan, kesehatan dan penangan kesejahteraan teraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan SKPD	11 kegiatan	3,674,103,654	KECAMATAN TOMOHON UTARA

7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat		85 persen		2,469,108,900								6,114,000,000	
7	01	003	2.002		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberd ayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	100 %	4 Kegiat an		2,469,108,900							100 %	6,114,000,000	
7	01	003	2.002	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Musrenbang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 kegiatan	1 LAPORAN		60,000,000		Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penangan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola	Masyarakat dan Perangkat Daerah	11 kegiatan	80,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA

															pemerintahan yang efektif					
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 kelurahan	3 Unit	1,500,000,000			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat dan Perangkat Daerah	10 kelurahan	3,468,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 kelurahan	1 Pokmas / Ormas	909,108,900			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat dan Perangkat Daerah	10 kelurahan	2,556,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA

						Jumlah Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10 kelurahan	2 Laporan			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penangan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan Perangkat Daerah	10 kelurahan	10,000,000	KECAMATAN TOMOHON UTARA
7	01	003	2.02	004	Evaluasi Kelurahan				0	-	-								
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)		85 persen	1,100,000	-	-						2,045,315,350	

7	01	004	2.001		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,100,000	-							2 Kegiatan	2,045,315,350	
7	01	004	2.001	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 kegiatan	12 Laporan	1,100,000			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemera taan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejah teraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan PD	11 kegiatan	275,119,600	KECAMATAN TOMOHON UTARA

[illegible]

7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum	100 %	85 Persen	100,000	-							100 %	54,247,330	
7	01	005	2.01	007	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 kegiatan	1 Dokumen	50,000			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan SKPD	1 kegiatan	27,123,665	KECAMATAN TOMOHON UTARA

7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 kegiatan	12 Dokumen	50,000			Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemera taan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan SKPD	1 kegiatan	27,123,665	KECAMATAN TOMOHON UTARA
---	----	-----	------	-----	--	-----------------	---	------------	------------	--------	--	--	--	--------------------------------------	---	---------------------	------------	------------	-------------------------

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Utara tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Kecamatan Kecamatan Tomohon Utara, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Kecamatan Tomohon Utara. sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Kecamatan Tomohon Utara. Semoga RENJA tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada Rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Utara, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada Rencana kerja 2023 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kecamatan Tomohon Utara Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kecamatan Tomohon Utara, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah. antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2018 , maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1 Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Utara Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Propinsi Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota , RKPD Kota Tomohon dan Renstra Dinas).

5.2 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
- c. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KECAMATAN TOMOHON TIMUR KOTA TOMOHON

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Timur Tahun 2023 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Renstra Kecamatan Tomohon Timur Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

Tahapan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

1. penyusunan rancangan
2. rancangan akhir; dan
3. penetapan.

Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon sebagai perangkat daerah menyusun Renja Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Tahun 2021-2026, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk membuat Renja Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap RKPD Kota Tomohon Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Renja Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renja Tahun 2023 Kecamatan Tomohon Timur Tahun 2023 Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2108 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
12. Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 12 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2022.

1.5 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Tomohon Timur dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menyusun RKA Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Tomohon Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program/kegiatan /Sub Kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA TOMOHON TAHUN 2023

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 Sampai dengan Triwulan IV dan capaian Renstra Kecamatan Tomohon Timur, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tomohon Timur, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Timur, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TOMOHON TIMUR

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tomohon Timur

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TOMOHON TIMUR

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan Kecamatan Tomohon Timur pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Timur tahun 2023

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN IV TAHUN 2023

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Kecamatan Tomohon Timur tahun 2023 didasarkan pada Renstra Kecamatan Tomohon Timur Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan IV dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tomohon Timur Tahun 2021 hingga triwulan IV secara umum yang sudah mencapai target yang ditentukan sebanyak 3 Sub kegiatan. Sub kegiatan yang sudah mencapai target yang ditetapkan adalah :

Sub kegiatan yang sudah mencapai target yang ditetapkan adalah :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Untuk sub kegiatan yang telah mencapai target adalah sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Hasil evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan hingga Triwulan IV secara lengkap, tercantum dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tomohon Timur dan Pencapaian Renstra SKPD Triwulan IV Tahun 2021

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/ Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/ Kota Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2021				Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2021 (%)				Pera ngkat Daerah Pen ang gun g Jaw ab	Fakt or Pen dorong Keb erha silan Kine rja	Fakt or Pen gha mba t Pen ca paian Kine rja
											I				II				III																	
3	4	5			6			7			8			9			10			11			12= 8 + 9 + 10 + 11			13 = 6 + 12			14 = 13/5 * 100%		15	16	17			
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp						
		Ta rg et	Sa tu an		Ju ml ah	Sa tu an		Ta rg et	Sa tu an		Ju ml ah	Sa tu an		Ju ml ah	Sa tu an		J m l	Sa tu an		J m l	Sa tu an		Ju ml ah	Sa tu an		Ju ml ah	Sa tu an									
PROGR AM PENUN JANG URUSA N PEMER INTAH AN DAERA H KABUP ATEN/ KOTA				5,10 8,53 2,94 0			-			4,56 9,74 8,41 3			841, 432, 330			2,31 2,05 0,59 1			3,59 9,43 4,87 4			3,89 2,74 3,59 8			10,64 5,661 ,393	12 5 %	10,64 5,661 ,393	0%	Kec ama tan Tom oho n Tim ur							

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,25 4,26 8					-			-			-			-			-			0 %	-		0%	Kecamatan Tomohon Timur				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,72 8,71 5,80 9					4,24 1,36 1,62 3			833, 432, 330			2,24 5,34 3,34 1			3,44 4,13 9,72 4			3,73 0,64 0,19 8			10,25 3,555 ,593		23 8 %	10,25 3,555 ,593		0%	Kecamatan Tomohon Timur		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							1 2	bulan	3,85 4,92 2,49 7	3	bulan	754, 962, 330			2,04 2,96 6,38 5			3,14 1,40 2,76 8			3409 0632 42			9,348 ,394, 725		24 3 %	9,348 ,394, 725			Kecamatan Tomohon Timur		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							1 2	bulan	386, 439, 126	3	bulan	78,4 70,0 00			202, 376, 956			302, 736, 956			3215 7695 6			905,1 60,86 8		23 4 %	905,1 60,86 8			Kecamatan Tomohon Timur		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				74,3 82,6 56					61,2 16,5 80			-			-			35,2 50,0 00			35,2 50,0 00			70,50 0,000		90 %	70,50 0,000		0%	Kecamatan Tomohon Timur		

Pengad aan Pakaia n Dinas Besert a Atribut Keleng kapann ya							6 0	pas ang	39,2 78,5 80			-			-			35,2 50,0 00		3525 0000			70,50 0,000		17 9 %	70,50 0,000			Kec ama tan Tom oho n Tim ur		
Bimbin gan Teknis Imple mentas i Peratur an Perund ang- Undan gan							2 0	pes ert a	21,9 38,0 00			-			-			-		0			-		0 %	-			Kec ama tan Tom oho n Tim ur		
Admini strasi Umum Perang kat Daerah				74,0 80,4 70			-		60,7 85,1 70			-			22,2 18,5 00			41,0 62,3 00		41,0 62,3 00			104,3 43,10 0		16 5 %	104,3 43,10 0		0%	Kec ama tan Tom oho n Tim ur		
Penyed iaan Kompo nen Instala si Listrik/ Penera ngan Bangu nan Kantor	Jlh komponen alat listrik						7 5	ite m	2,01 8,50 0			-			1,00 0,00 0			1,69 9,00 0		1699 000			4,398 ,000		21 8 %	4,398 ,000			Kec ama tan Tom oho n Tim ur		
Penyed iaan Bahan Logisti	jumlah ATK						1 4 5 0	Bua h	18,6 63,2 70			-			6,87 8,50 0			14,2 73,3 00		1427 3300			35,42 5,100		19 0 %	35,42 5,100			Kec ama tan Tom		

k Kantor																															o n Tim ur		
Penyed iaan Barang Cetaka n dan Pengga ndaan							2 5 0 0	lem bar	2,77 8,90 0			-			2,00 0,00 0			2,00 0,00 0			2000 000			6,000 ,000		21 6 %	6,000 ,000				Kec ama tan Tom oho n Tim ur		
Penyed iaan Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang- Undan gan							2 4	eks em plar	1,79 5,50 0			-			-			-			0			-		0 %	-				Kec ama tan Tom oho n Tim ur		
Fasilita si Kunjun gan Tamu							5 0 0	pes erta	25,0 25,0 00			-			4,37 5,00 0			15,1 25,0 00			1512 5000			34,62 5,000		13 8 %	34,62 5,000				Kec ama tan Tom oho n Tim ur		
Penyel enggar aan Rapat Koordi nasi dan Konsult asi SKPD							1 0	keg iata n	10,5 04,0 00			-			7,96 5,00 0			7,96 5,00 0			7965 000			23,89 5,000		22 7 %	23,89 5,000				Kec ama tan Tom oho n Tim ur		
Penga daan Barang Milik Daerah				100, 058, 498			-		89,7 46,2 00			-			-			-			-			-		0 %	-		0%		Kec ama tan Tom oho		

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																														n Tim ur		
Pengad aan Peralat an dan Mesin Lainny a							6	uni t	89,7 46,2 00			-			-			-			0			-		0 %	-		0%	Kec ama tan Tom oho n Tim ur		
Penye diaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				37,0 35,8 54			-		33,2 18,8 40			4,00 0,00 0			15,8 70,5 50			25,6 49,5 50			30,4 57,8 00			75,97 7,900		21 1 %	75,97 7,900		0%	Kec ama tan Tom oho n Tim ur		
Penyed iaan Jasa Surat Menyu rat	jumlah materai						5 0 0	lem bar	3,13 0,00 0			-			1,99 6,00 0			2,59 6,00 0			5096 000			9,688 ,000		31 0 %	9,688 ,000			Kec ama tan Tom oho n Tim ur		
Penyed iaan Jasa Komun ikasi Sumbe r Daya Air dan Listrik	jumlah rek air, listrik						2 4	rek	2,39 6,94 0			-			102, 750			102, 750			4110 00			616,5 00		26 %	616,5 00			Kec ama tan Tom oho n Tim ur		
Penyed iaan Jasa Peralat an dan Perlen	jumlah jasa peralatan						4	uni t	2,84 0,00 0			-			2,60 0,00 0			2,60 0,00 0			2600 000			7,800 ,000		27 5 %	7,800 ,000			Kec ama tan Tom oho n		

gkapan Kantor																															Tim ur		
Penyed iaan Jasa Pelaya nan Umum	jumlah petugas kebersihan						1	ora ng	24,8 51,9 00	2	bu la n	4,00 0,00 0			11,1 71,8 00			20,3 50,8 00			2235 0800			57,87 3,400		23 3 %	57,87 3,400				Kec ama tan Tom oho n Tim ur		
Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer ntahan Daerah				93,0 05,3 85			-		83,4 20,0 00			4,00 0,00 0			28,6 18,2 00			53,3 33,3 00			5533 3300			141,2 84,80 0		16 9 %	141,2 84,80 0		0%	Kec ama tan Tom oho n Tim ur			
Penyed iaan Jasa Pemeli haraan , Biaya Pemeli haraan dan Pajak Kendar aan Perora ngan Dinas atau Kendar aan Dinas Jabata n	Jumlah kendis						4	uni t	45,2 58,0 00			-			17,3 20,0 00			31,6 60,0 00			3166 0000			80,64 0,000		17 8 %	80,64 0,000				Kec ama tan Tom oho n Tim ur		

Penyed iaan Jasa Pemeli haraan , Biaya Pemeli haraan , Pajak, dan Perizin an Kendar aan Dinas Operas ional atau Lapang an	Jumlah kendis							4	uni t	38,1 62,0 00	2	bu la n	4,00 0,00 0			11,2 98,2 00		21,6 73,3 00		2367 3300			60,64 4,800		15 9 %	60,64 4,800			Kec ama tan Tom oho n Tim ur		
Progra m Penyel enggar aan Pemer intahan dan Pelaya nan Publik										1,21 0,71 3,41 0			-			397, 730, 000		696, 800, 000		710, 300, 000			1,804 ,830, 000		14 9 %	1,804 ,830, 000		0%	Kec ama tan Tom oho n Tim ur		
Koordi nasi Penyel enggar aan Kegiat an Pemer intahan di Tingka t Kecam atan										1,21 0,71 3,41 0						397, 730, 000		696, 800, 000		710, 300, 000			1,804 ,830, 000		14 9 %	1,804 ,830, 000		0%	Kec ama tan Tom oho n Tim ur		

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									1,210,713,410						397,730,000			696,800,000			710300000			1,804,830,000	149%	1,804,830,000	0%	Kecamatan Tomohon Timur		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									2,049,561,817			-			244,575,000			512,880,760			532,790,200			1,290,245,960	61%	1,290,245,960	0%	Kecamatan Tomohon Timur		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									2,049,561,817						244,575,000			512,880,760			532,790,200			1,290,245,960	61%	1,290,245,960	0%	Kecamatan Tomohon Timur		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									310,659,117						-			-			0			-	0%	-		Kecamatan Tomohon Timur		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									1,069,776,910						-			94,160,760			105070200			199,230,960	19%	199,230,960		Kecamatan Tomohon Tim		

																															ur		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Kelurahan									669,125,790						244,575,000			418,720,000			427720000			1,091,015,000		163%	1,091,015,000				Kecamatan Tomohon Timur		
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum									1,264,486,600					-		-		864,813,770			971,757,970			1,836,571,740		141%	1,836,571,740		0%		Kecamatan Tomohon Timur		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									1,264,486,600					-			864,813,770			971,757,970			1,836,571,740		141%	1,836,571,740		0%		Kecamatan Tomohon Timur			
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh									1,114,410,000					-			778,164,080			856068280			1,634,232,360		147%	1,634,232,360				Kecamatan Tomohon Timur			

Masyarakat																																			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									150,076,600						-				86,649,690			115689690			202,339,380		135%	202,339,380				Kecamatan Tomohon Timur			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									56,530,000			-		-				-		-			-			0%	-		0%		Kecamatan Tomohon Timur				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									56,530,000			-		-				-		-			-			0%	-		0%		Kecamatan Tomohon Timur				

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional										56,5 30,0 00						-		-						-		0 %		-		0%	Kecamatan Tomohon Timur		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--------	--	---	--	----	-------------------------------	--	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tomohon Timur
Kota Tomohon

NO	Indikator	SPM/ stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan			100%	100%	100%	85%	100%	100%	
2.	Indeks kepuasan masyarakat			B	B	B	81.25%	B		
3.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman dan Ketertiban,Keindahan)			100%	100%	100%	85%	100%	100%	
4.	Presentase tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum			100%	100%	100%	85%	100%	100%	

Kinerja pelayanan Kecamatan Tomohon Timur menunjukkan tingkat capaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan berdasarkan sasaran/ target Rencana Strategis periode 2021 – 2026. Pencapaian Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tomohon Timur ada 4 Indikator Kinerja yaitu :

1. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan adalah terlaksananya 5 kegiatan musrenbang yaitu musrenbang Kecamatan Tomohon Timur serta 5 Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Paslaten Satu, Kelurahan Paslaten Dua, Kelurahan Rurukan, Kelurahan Rurukan satu dan Kelurahan Kumelembuai , terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di 5 Kelurahan dan terlaksananya pemberdayaan masyarakat di 5 kelurahan. Dari 3 sub kegiatan yang ada semuanya terlaksana dengan baik.
2. Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yaitu kesejahtraan perangkat di 5 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon Timur terealisasi dengan baik
3. Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dimana adanya koordinasi dengan masyarakat dengan adanya Pos kamling kelurahan untuk KAMTIBMAS.
4. Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan dengan Fasilitasi Sosialisasi serta Bimtek dan Rapat untuk pelaksanaan tugas di Kecamatan Tomohon Timur.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tomohon Timur dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta indicator yang terdapat dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yang menjadi target dari Kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Timur

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD yang berisikan uraian sebagai berikut:

- Tingkat Kinerja pelayanan kecamatan, tidak akan optimal tanpa diimbangi dengan peningkatan kewenangan, SDM dan sarana prasarana yang memadai.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Antara lain, pelimpahan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh tingkat kecamatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih adanya tumpang tindih atau tarik ulur dengan OPD/dinas teknis tingkat Kota yang selama ini melaksanakan dibidang kegiatan tersebut.
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium

Developmnet Goals); Terdapat keraguan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada kegiatan yang dilimpahkan ke tingkat kecamatan, sehingga dapat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, Kecamatan adalah merupakan OPD yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, sehingga aparatur dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan pelayanan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Peluang yang ada di wilayah Kecamatan Tomohon Timur yang mempunyai potensi dalam wilayah Agribisnis, Desa wilayah Industri dan Desa Wisata sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan asli daerah Kota Tomohon.

- Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:
 - Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dari Perangkat Daerah tingkat Kota yang seyogyanya dilaksanakan oleh kecamatan, agar sepenuhnya dilimpahkan ke kecamatan. Sehingga kecamatan tidak akan ragu lagi dalam pelayanan kepada masyarakat. Keraguan dalam pelayanan terhadap masyarakat akan berdampak pada keterlambatan penyelesaian pelayanan, sehingga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan kecamatan.
 - Untuk mencapai visi misi kepala daerah Kota Tomohon, dituntut agar adanya sinergitas di semua OPD terkait serta ditunjang oleh profesionalisme aparatur dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.
 - Untuk meningkatkan PAD Kota Tomohon, potensi di wilayah Kecamatan Tomohon Timur khususnya dibidang sektor agribisnis dan pariwisata perlu dikembangkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 belum termuat program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Tomohon Timur dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tomohon Timur Program dan kegiatan berdasarkan usulan analisis tersebut disampaikan pada rancangan akhir RKPD.

Tabel 2.3

Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2023 Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Tomohon Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CatatanPenting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tomohon Timur	<i>Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat</i>	85%	1.294.715.871	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tomohon Timur	<i>Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat</i>	85%	1.294.715.871	Kekurangan dana untuk melengkapi dana kelurahan
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah Laporan	1 Laporan	45.000.000	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	45.000.000	
1.2	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	3 unit	749.715.871	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	3 unit	749.715.871	
1.3	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemb.masyara	1 pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	500.000.000	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	500.000.000	

			kat dikelurahan	dikelurahan							
2.	Program Ketentraman dan Ketertiban		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman dan Ketertiban,Keindahan)		2.900.000	Program Ketentraman dan Ketertiban	Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman dan Ketertiban,Keindahan)			2.900.000	
2.1	Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia,tentara nasional indonesia dan instansi Vertikal diwilayah kecamatan	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan POLRI,TNI dan instansi vertikal diwilayah Kecamatan	12 laporan	1.450.000	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan POLRI,TNI dan instansi vertikal diwilayah Kecamatan	12 laporan	1.450.000	
2.2	Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh masyarakat	1 laporan	1.450.000	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh masyarakat	1 laporan	1.450.000	
3.	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Tomohon Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintah umum		2.420.000	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Tomohon Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintah umum		2.420.000	
3.1	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah orang	8 orang	2.220.000	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah orang	8 orang	2.220.000	
3.2	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah dokumen	1 dokumen	100.000	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah dokumen	1 dokumen	100.000	

3.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan kecamatan	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	100.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan kecamatan	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	100.000	
-----	---	-------------------------	---	------------	---------	---	-------------------------	---	------------	---------	--

Review terhadap rancangan RKPD tahun 2023 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Berdasarkan hasil rumusan kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kota Tomohon yaitu :

1. Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan yang terdiri 3 sub kegiatan yaitu :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan
2. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
3. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

Dalam Program kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pelaksanaan MUSRENBANG Kelurahan dan Kecamatan dimana ditampung usulan setiap kelurahan untuk diusulkan dalam Rancangan Renja tetapi dalam pelaksanaannya banyak kegiatan yang tidak dapat diusulkan karena keterbatasan dana.

2. Program Ketentraman dan Ketertiban yang terdiri dari 2 sub kegiatan :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan instansi Vertikal
2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

Dalam Program kegiatan Ketentraman dan ketertiban dengan pelaksanaan sinergitas dengan Kepolisian serta TNI serta harmonisasi dilakukan untuk kegiatan keamanan dan kegiatan Penanggulangan Covid 19 di Kota Tomohon tetapi dalam pelaksanaan sudah tidak ada lagi POSKO Penanganan Covid 19 di tiap kelurahan.

3. Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dari 3 sub kegiatan :

1. Fasilitasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
3. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan Kecamatan

Dalam Program kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan anggaran

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kota yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Tomohon Timur maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Kecamatan Tomohon Timur dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota di rangkum dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tomohon Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Tomohon Timur	Cakupan Sarana dan Prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik pasca program		Tidak semua usulan dapat ditampung ditahun 2023
1.1	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah kegiatan		
1.1.1	Peningkatan partisipasi mayarakat dalam forum musyawarah dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		
1.1.2	Pembangunan sarana dan prasarana	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
1.1.3	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tomohon Timur	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayan masyarakat di kelurahan		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Tomohon Timur tidak terlepas dari Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Dalam menetapkan Tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023 juga mempertimbangkan visi, misi pembangunan kepala daerah. Visi dan Misi Walikota Tomohon adalah:

“Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

- 16. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius
- 17. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector
- 18. Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia
- 19. Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan
- 20. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religious yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi
Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota tomohon
		Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan masyarakat kota Tomohon
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon
		Menurunnya jumlah penduduk miskin

		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya kualitas dan prestasi Generasi Muda
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
		Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata domestic maupun mancanegara melalui pengelolaan pariwisata yang produktif, professional dan berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tomohon
		Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan budaya local
Misi 4 Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian
		Meningkatnya ketahanan pangan
	Terwujudnya pembangunan kota Tomohon yang asri dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan kota yang nyaman asri dan berkelanjutan
Misi 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas	Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Tomohon Timur adalah tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi 2 dan 5. Tujuan yang hendak di capai adalah Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata dengan sasaran Meningkatkan infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas serta tujuan Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 berpedoman pada RKPD Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Tomohon Timur Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomohon Timur, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan serta sub kegiatan dimaksud adalah :

6. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah

6.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

6.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

6.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

6.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

6.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

6.3.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

6.3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

6.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

6.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

6.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor

6.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

6.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6.4.6 Fasilitasi Kunjungan tamu

6.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

6.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

6.5.3 Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

6.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat

6.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

6.6.3 Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

6.6.4 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

6.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

6.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

6.7.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

6.7.3 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

7.1 Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan

- 7.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan

8. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan

8.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- 8.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perncanaan pembangunan di Kelurahan
- 8.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
- 8.1.3 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

9. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

9.1 Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- 9.1.1 Sub Kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal diwilayah Kecamatan
- 9.1.2 Sub Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat

10. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah

10.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 10.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (BIMTEK,Sosialisasi,Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- 10.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
- 10.1.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan

Adapun factor-faktor yang menjadi pertimbangan perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini adalah:

- p) Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon
- q) Pencapaian SDGs
- r) Pengentasan Kemiskinan
- s) Pencapaian NSPK
- t) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tahun 2023 dan prakiraan tahun 2023 sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tomohon Timur

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				7.902.763.000				8.693.039.300
4									
4.1									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang pelayanan Perangkat Daerah		100%	5.058.929.589			100%	5.564.822.547
	Perencanaan,Penganggaran,dan evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	Tomohon Timur	2 kegiatan	2.000.000	Tomohon Timur		2 kegiatan	2.200.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Tomohon Timur	4 Dokumen	1.000.000	Tomohon Timur		4 Dokumen	1.100.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Tomohon Timur	4 Dokumen	1.000.000	Tomohon Timur		4 Dokumen	1.100.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	2 kegiatan	4.708.336.769	Tomohon Timur		2 kegiatan	5.179.170.445
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Tomohon Timur	12 bulan	4.002.563.013	Tomohon Timur		12 bulan	4.402.819.314
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang	Tomohon Timur	21 orang	705.773.756	Tomohon Timur		21 orang	776.351.131
		Jumlah orang	Tomohon Timur	11 orang		Tomohon Timur		11 orang	
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	3 kegiatan	39.500.000	Tomohon Timur		3 kegiatan	43.450.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut	Jumlah pakaian batik	Tomohon Timur	63 pasang	19.500.000	Tomohon Timur		63 pasang	21.450.000
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah ASN peserta pendidikan dan pelatihan	Tomohon Timur	1 orang	10.000.000	Tomohon Timur		1 orang	11.000.000

	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN peserta bimtek	Tomohon Timur	4 orang	10.000.000	Tomohon Timur		4 orang	11.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	7 kegiatan	124.833.940	Tomohon Timur		7 kegiatan	137.317.334
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah barang	Tomohon Timur	75 item	2.318.500	Tomohon Timur		barang	2.550.350
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Tomohon Timur	1 tahun	3.266.000	Tomohon Timur		meter/lembar	3.592.600
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan	Tomohon Timur	1450 bahan	20.970.360	Tomohon Timur		bahan	23.067.396
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tomohon Timur	315 eksemplar	1.795.500	Tomohon Timur		315 eksemplar	1.975.050
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah orang	Tomohon Timur	200 orang	37.489.580	Tomohon Timur		145 orang	41.239.538
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti rakor dan konsultasi dalam dan luar daerah	Tomohon Timur	10 orang	56.994.000	Tomohon Timur		5 kali	62.693.400
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah PC	Tomohon Timur	1 unit PC	2.000.000	Tomohon Timur		1 unit PC	2.200.000
		Jumlah printer	Tomohon Timur	2 buah printer		Tomohon Timur		2 buah printer	
		Jumlah horden	Tomohon Timur	23 potong horden		Tomohon Timur		23 potong horden	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	Tomohon Timur	3 kegiatan	12.397.400	Tomohon Timur		3 kegiatan	13.637.140
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Tomohon Timur	1 unit laptop	10.646.400	Tomohon Timur		1 unit laptop	11.711.040
	Pengadaan mebel	Jumlah lemari arsip	Tomohon Timur	2 buah	1.651.000	Tomohon Timur		2 buah	1.816.100
	Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah paving	Tomohon Timur	1 paket	100.000	Tomohon Timur		1 paket	110.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Tomohon Timur	4 kegiatan	44.108.980	Tomohon Timur		4 kegiatan	49.519.879
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah ATK, jumlah surat menyurat dan benda pos lainnya	Tomohon Timur	500 lembar	6.130.000	Tomohon Timur		400 lembar	6.743.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa kebersihan kantor dan jumlah alat-alat kebersihan kantor	Tomohon Timur	12 rekening	4.689.780	Tomohon Timur		12 rekening	5.158.758
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor	Tomohon Timur	202 unit	4.300.000	Tomohon Timur		6 unit	4.730.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor dan jumlah alat-alat kebersihan kantor	Tomohon Timur	1 Orang	28.989.200	Tomohon Timur		1 Orang	31.888.120

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Tomohon Timur	3 kegiatan	127.752.500	<i>Tomohon Timur</i>		3 kegiatan	140.527.750
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah BBM dan suku cadang	Tomohon Timur	12 bulan	17.012.500	<i>Tomohon Timur</i>		12 bulan	18.713.750
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	Tomohon Timur	12 bulan	110.240.000	<i>Tomohon Timur</i>		12 bulan	121.264.000
		Jumlah Unit	Tomohon Timur	2 unit roda 2 2 unit roda 4		<i>Tomohon Timur</i>		2 unit roda 2 2 unit roda 4	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit	Tomohon Timur	1 unit	500.000	<i>Tomohon Timur</i>		1 unit	550.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%	30.000.000	<i>Tomohon Timur</i>		100%	33.000.000
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	3 kegiatan	30.000.000	<i>Tomohon Timur</i>		3 kegiatan	33.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana dan Prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik pasca program		100%	20.000.000	<i>Tomohon Timur</i>		100%	22.000.000
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	20.000.000	<i>Tomohon Timur</i>		1 kegiatan	22.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN			100%	400.000	<i>Tomohon Timur</i>		100%	440.000
	Sinergitas dengan POLRI dan TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	200.000	<i>Tomohon Timur</i>		1 kegiatan	220.000
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	200.000	<i>Tomohon Timur</i>		1 kegiatan	220.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Presentase Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		100%	2.420.000	<i>Tomohon Timur</i>		100%	2.662.000
	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	100.000	<i>Tomohon Timur</i>		1 kegiatan	110.00
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	100.000	<i>Tomohon Timur</i>		1 kegiatan	110.00
	Fasilitasi,koordinasi,dan pembinaan (BIMTEK, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah orang	Tomohon Timur	8 Peserta	2.220.000	<i>Tomohon Timur</i>		8 Peserta	2.442.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PASLATEN SATU	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%	250.917.380	<i>Tomohon Timur</i>		100%	276.009.119
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah opsional Kelurahan	Tomohon Timur	1 Tahun	250.917.380	<i>Tomohon Timur</i>		1 Tahun	276.009.118
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PASLATEN SATU	Cakupan Sarana dan Prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan		100%	254.715.895	<i>Tomohon Timur</i>		100%	257.263.053

		yang baik pasca program							
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	12 bulan	5.000.000	Tomohon Timur		12 bulan	5.500.000
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 Paket	149.715.895	Tomohon Timur		1 Paket	164.687.494
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	100.000.000	Tomohon Timur		1 kegiatan	20.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman,Ketertiban,Keindahan)		100%	500.000	Tomohon Timur		100%	550.00
	Sinergitas dengan POLRI dan TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 unit	250.000	Tomohon Timur		1 unit	275
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 unit	250.000	Tomohon Timur		1 unit	275
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PASLATEN DUA	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%	394.917.380	Tomohon Timur		100%	434.409.118
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah operasional Kelurahan	Tomohon Timur	12 bulan	394.917.380	Tomohon Timur		12 bulan	434.409.118
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana dan Prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik pasca program		100%	254.999.995	Tomohon Timur		100%	290.499.994
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	5.000.000	Tomohon Timur		1 kegiatan	5.500.000
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Pos Kamling	Tomohon Timur	1 unit	149.999.995	Tomohon Timur		1 unit	164.999.994
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	3 kegiatan	100.000.000	Tomohon Timur		3 kegiatan	20.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman,Ketertiban,Keindahan)		100%	500.000	Tomohon Timur		100%	550.00
	Sinergitas dengan POLRI dan TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	250.000	Tomohon Timur		1 kegiatan	275.000
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	250.000	Tomohon Timur		1 kegiatan	275.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN RURUKAN	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%	337.317.380	Tomohon Timur		100%	371.049.118
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah opsional Kelurahan	Tomohon Timur	12 bulan	337.317.380	Tomohon Timur		12 bulan	371.049.118

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana dan Prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik pasca program		100%	254.999.994	<i>Tomohon Timur</i>		100%	280.499.993
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	12 bulan	5.000.000	<i>Tomohon Timur</i>		12 bulan	5.500.000
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 Paket	149.999.994	<i>Tomohon Timur</i>		1 Paket	164.999.993
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	100.000.000	<i>Tomohon Timur</i>		1 kegiatan	110.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman,Ketertiban,Keindahan)		100%	500.000	<i>Tomohon Timur</i>		100%	550.000
	Sinergitas dengan POLRI dan TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	250.000	<i>Tomohon Timur</i>		1 kegiatan	275.000
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	250.000	<i>Tomohon Timur</i>		1 kegiatan	275.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN RURUKAN SATU	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%	279.717.380	<i>Tomohon Timur</i>		100%	279.717.380
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah opsional Kelurahan	Tomohon Timur	12 bulan	279.717.380	<i>Tomohon Timur</i>		12 bulan	279.717.380
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN RURUKAN SATU	Cakupan Sarana dan Prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik pasca program		100%	254.999.994	<i>Tomohon Timur</i>		100%	280.499.993
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	12 bulan	5.000.000	<i>Tomohon Timur</i>		12 bulan	5.500.000
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 Paket	149.999.994	<i>Tomohon Timur</i>		1 Paket	164.999.993
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	100.000.000	<i>Tomohon Timur</i>		1 kegiatan	110.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman,Ketertiban,Keindahan)		100%	500.000	<i>Tomohon Timur</i>		100%	550.000
	Sinergitas dengan POLRI dan TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	250.000	<i>Tomohon Timur</i>		1 kegiatan	275.000
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	250.000	<i>Tomohon Timur</i>		1 kegiatan	275.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KUMELEMBUAI	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%	250.928.020	<i>Tomohon Timur</i>		100%	275.020.022

	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah opsional Kelurahan	Tomohon Timur	12 bulan	250.928.020	Tomohon Timur		12 bulan	275.020.022
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana dan Prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik pasca program		100%	254.999.993	Tomohon Timur		100%	280.499.992
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	12 bulan	5.000.000	Tomohon Timur		12 bulan	5.500.000
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 Paket	149.999.993	Tomohon Timur		1 Paket	151.499.992
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	100.000.000	Tomohon Timur		1 kegiatan	110.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman,Ketertiban,Keindahan)		100%	500.000	Tomohon Timur		100%	550.000
	Sinergitas dengan POLRI dan TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	250.000	Tomohon Timur		1 kegiatan	275.000
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan	Tomohon Timur	1 kegiatan	250.000	Tomohon Timur		1 kegiatan	275.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TOMOHON TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	7.902.763.000	APBD
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.039.366.100	APBD
					Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Perangkat Daerah	2.000.000	APBD
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	APBD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	APBD
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.708.336.769	APBD
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.002.563.013	APBD
7	01	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	705.773.756	APBD
7	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.500.000	APBD

7	01	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.000.500	APBD
7	01	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	APBD
7	01	001	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	APBD
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.833.940	APBD
7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.318.500	APBD
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	APBD
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.970.360	APBD
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.266.000	APBD
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.795.500	APBD
7	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.489.580	APBD
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.994.000	APBD
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.397.400	APBD
7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	1.651.000	APBD

7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.646.400	APBD
7	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000	APBD
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.108.980	APBD
7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.130.000	APBD
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.689.780	APBD
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.300.000	APBD
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.989.200	APBD
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.752.500	APBD
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	110.240.000	APBD
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	500.000	APBD
7	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.012.500	APBD
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000	APBD
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000	APBD

7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000	APBD
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.294.715.871	APBD
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.294.715.871	APBD
7	01	003	2.02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45.000.000	APBD
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	749.715.871	APBD
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	500.000.000	APBD
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.900.000	APBD
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.900.000	APBD
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.450.000	APBD
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.450.000	APBD
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.420.000	APBD

7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.420.000	APBD
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.220.000	APBD
7	01	005	2.01	007	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100.000	APBD
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000	APBD

BAB V

PENUTUP

Rencana Kecamatan Tomohon Timur tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Kecamatan Tomohon Timur, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Kecamatan Tomohon Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Kecamatan Tomohon Timur. Semoga RENJA tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomohon Timur.

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Timur, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada Perubahan rencana kerja 2023 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategi Kecamatan Tomohon Timur Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tomohon Timur, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang

melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah. antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2018 , maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Timur Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Propinsi Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota , RKPD Kota Tomohon dan Renstra Kecamatan Tomohon Timur).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
- c. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KECAMATAN TOMOHON TENGAH KOTA TOMOHON

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Tomohon Tengah, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tomohon Tengah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Tomohon Tengah

Selanjutnya Renja Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Tengah bertujuan :

- Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Tomohon Tengah tahun 2023.
- Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
- Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, proses penyusunan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, keterkaitan antara Renja Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenanga Kecamatan

Tomohon Tengah Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahunberjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Tahun Lalu dan Renstra Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon

2.4. .Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TOMOHON TENGAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Kecamatan Tomohon Tengah tahun 2023 didasarkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Tomohon Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Tahun lalu dan Renstra Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tomohon Tengah

Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten /Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2021		Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /Kota s/d Tahun 2021 (%)		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	Faktor Pendor ong Keber hasila n Kinerj a	Faktor Pengha mbat Pencap aian Kinerja							
								I			II			III			IV																		
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 * 100%		15	16	17											
		K		R p	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		R p	K		R p	K					Rp	K	Rp								
		T ar g et	Sat uan		J u m la h	Sat uan		T ar g et	Sat uan		J u m la h	Sa tu an		J u m la h	Sa tu an		J m l	S at u a n		J m l	S at u a n					J u m la h	Satuan		J u m la h	S at u a n					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat DAerah	0	-		0	0	-	15	0	6.9 23.46 8.0 80	15	0	1.03 2.94 7.87 2			2.42 0.37 1.86 4							15	dokume n/kegiat an/item	3.45 3.31 9.73 6	15	15 .0 9 %	3.45 3.31 9.73 6		0%	Kecama tan Tomoho n Tengah				

Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja PD	0	dokumen	-	0	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	-																		Kecamatan Tomohon Tengah				
Administrsasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	2	kegiatan	6.4 15.62 3.442	2	kegiatan	1.03 2.94 7.872	2	kegiatan	2.33 0.13 8.364									2	kegiatan	3.36 3.08 6.236	2	52 %	3.36 3.08 6.236					Kecamatan Tomohon Tengah			
Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	1	kegiatan	-	1	kegiatan	-	1	kegiatan	-									1		-	1		-					Kecamatan Tomohon Tengah			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	5	kegiatan	14 9.882. 700	5	kegiatan	-	5	kegiatan	28.0 15.000									5	kegiatan	28.0 15.000	5	19 %	28.0 15.000						Kecamatan Tomohon Tengah		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	0	pengadaan	-	0	pengadaan	-	2	pengadaan	10 8.214. 500	2	kegiatan	-	2	kegiatan	Rp -									2	item	-	2	0 %	-						Kecamatan Tomohon Tengah		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0	jasa	-	0	jasa	-	3	jasa	15 7.5 20.43 8	3	kegit an	-	3	kegia tan	35.4 38.5 00							3	kegiatan	35.4 38.5 00	3	22 %	35.4 38.5 00			Kecama tan Tomoho n Tengah		
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaaan BMD	0	pemeli haraa n	-	0	pemeli haraa n	-	2	pemeli haraa n	92.22 7.000	2	kegit an	-	2	kegit an	26.7 80.0 00							2	kegiatan	26.7 80.0 00	2	29 %	26.7 80.0 00			Kecama tan Tomoho n Tengah		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	kegi atan	-	0	kegi atan	-	1	kegi atan	2.3 81.72 0.004	1	kegia tan	0	1	kegia tan	548.596. 900							1	kegiatan	548.596. 900	1	0 %	548.596. 900		0%	Kecama tan Tomoho n Tengah		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	0	kegi atan	-	0	kegi atan	-	1	kegi atan	2.3 81.720 .004	1	kegi atan	0	1	kegi atan	548.596. 900							1	kegiatan	548.596. 900	1	0 %	548.596. 900		0%	Kecama tan Tomoho n Tengah		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program Pemberdayaan Masyarakat	0	kegi atan	-	0	kegi atan	-	3	kegi atan	2.2 97.65 5.200	3	kegia tan	0	3	kegia tan	30.8 44.6 00							3	kegiatan	30.8 44.6 00	3	1 %	30.8 44.6 00		0%	Kecama tan Tomoho n Tengah		

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	0	kegi atan	-	0	kegi atan	-	3	kegi atan	2.2 97. 655 .20 0	3	keg iat an	0	3	keg iat an	30.8 44.6 00						3	kegiatan	30.8 44.6 00	3	1 %	30.8 44.6 00		0%	Kecama tan Tomoho n Tengah		
PROGRAM PENYELNGGA RAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM		0	kegi atan	-	0	kegi atan	-	2	kegi atan	20. 00 0.0 00	2	ke gia ta n	-		ke gia ta n	-						2	kegiatan	-	2	0 %	-		0%	Kecama tan Tomoho n Tengah		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Tomohon Tengah
Kota Tomohon

NO	Indikator	SPM/s tan dar nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Real isasi Cap aian	Proyeksi		Catat an Analisis
				Tahu n 202 1 (thn n-1)	Tahu n 202 2 (tnn n)	Tahu n 202 3 (thn n+1)		Tahu n 202 2 (tnn n)	Tahu n 202 3 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Cakupan penunjang Pelayanan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Indeks Kepuasan Masyarakat			81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	
	Cakupan Sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tingkat penyelesaian pelanggaran (ketentraman, ketertiban keindahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tomohon Tengah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta indikator yang terdapat dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yang menjadi target dari Kecamatan Tomohon Tengah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Tengah sebagaimana berikut:

- Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyak pengaduan dan keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca, maupun media pengaduan yang lainnya, serta menyangkut prosedur yang belum efektif, fasilitas yang belum memadai, dan belum ada aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengurus surat menyurat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama – sama dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tepat , cepat, mudah terbuka.
- Untuk mengatur kinerja aparatur di Kantor Kecamatan Tomohon Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendengarkan dan menyerap aspira masyarakat maka diadakan “SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT”.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3

Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2023 Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Tomohon Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					C P
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Kebutu han Dana (Rp.00 0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah		7.976.146.375	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan dan 12 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat		2.811.093.130	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan dan 12 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan dan 12 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan		3.356.364.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan dan 12 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran			

	dam Kelurahan		yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat			dam Kelurahan		Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat			
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan dan 12 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)		1.769.761.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan dan 12 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan dan 12 Kelurahan	Presentase Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintah umum		20.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan dan 12 Kelurahan	Presentase Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintah umum			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kota yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Tomohon Tengah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Kecamatan Tomohon Tengah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota di rangkum dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tomohon Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat		
	<i>KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN</i>	Kelurahan	Jumlah Kegiatan		
	Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan	Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		Tidak semua usulan dapat di tamping/dilaksana kan di tahun 2022
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Tidak semua usulan dapat di tamping/dilaksana kan di tahun 2022

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TOMOHON TENGAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Tomohon Tengah tidak terlepas dari Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Dalam menetapkan Tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023 juga mempertimbangkan visi, misi pembangunan kepala daerah. Visi dan Misi Walikota Tomohon adalah:

“Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

- Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector
- Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia
- Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan
- Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religious yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi
Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota tomohon Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan masyarakat kota Tomohon

Masyarakat di berbagai sector		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon
		Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya kualitas dan prestasi Generasi Muda
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
		Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata domestic maupun mancanegara melalui pengelolaan pariwisata yang produktif, professional dan berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tomohon
		Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan budaya local
Misi 4 Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian
		Meningkatnya ketahanan pangan
	Terwujudnya pembangunan kota Tomohon yang asri dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan kota yang nyaman asri dan berkelanjutan
Misi 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas	Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Tomohon Tengah adalah tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi 2 dan 5. Tujuan yang hendak di capai adalah Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata dengan sasaran Meningkatkan infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas serta tujuan Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Tomohon Tengah Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomohon Tengah, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan serta sub kegiatan dimaksud adalah :

11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

11.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

11.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

11.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

11.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

11.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD

11.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

11.2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

11.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

11.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

11.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan

11.3.4 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

11.3.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

11.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

11.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

11.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

11.4.3 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

11.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

11.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

11.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

11.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

11.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

11.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas /Jabatan

- 11.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
- 11.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 12.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
 - 12.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 13.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 13.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pemabangunan di Kelurahan
 - 13.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 13.1.3 Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
 - 13.1.4 Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan

14. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 14.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 14.1.1 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tantara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
 - 14.1.2 Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

15. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 15.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 15.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal
 - 15.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan

Adapun factor-faktor yang menjadi pertimbangan perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini adalah:

- Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon
- Pencapaian SDGs
- Pengentasan Kemiskinan
- Pencapaian NSPK
- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tahun 2022 dan prakiraan tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tomohon Tengah Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif								Target	Pagu Indikatif	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RKPD 2022								
7						UNSUR KEWILAYAHAN															
7	0	1				KECAMATAN					15,933,364, 505	11.622.843. 284	12.174.574.8 54						16,658,691,731		
7	0	1	#	#		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah		85 perse n	7,976,146,3 75	6.923.468.0 80	7.475.199.65 0						8,418,161,101		
7	0	1	#	#	2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		JUMLAH KEGIATAN		4 Kegiat an	7,008,691,4 87	6.415.623.4 42	6.967.355.01 2						7,709,560,635		

7	01	#	2.02	#	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pegawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang	90 Orang/bulan	6,252,956,687	5611245642	5.918.477.212	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	perangkat daerah	63 orang	6,878,252,355	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#	2.02	#	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah pegawai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 tahun	12 Dokumen	753,736,600	802379600	1.046.879.600	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	perangkat daerah	1 tahun	829,110,260	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#	2.02	#	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 tahun	1 Laporan	999,1	999100	999.100	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	perangkat daerah	1 tahun	1,099,010	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#	2.02	#	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 tahun	18 Laporan	999,1	999100	999.100	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	perangkat daerah	1 tahun	1,099,010	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

7	01	#	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kegiatan	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	4 Kegiatan	225,999,100	-	-					4 kegiatan	222,999,100		
7	01	#	2.05	#	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 tahun	130 Paket	225,999,100	0	-	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		perangkat daerah	1 tahun	222,999,100	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan		4 Kegiatan	99,711,700	149.882.700	149.882.700						109,682,870		
7	01	#	2.06	#	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah tabung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tabung	1 Paket	2,173,700	2173700	2.173.700	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		perangkat daerah	1 tabung	2,391,070	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

7	01	#	2.06	#	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun	1 Paket	4,398,300	33369300	33.369.300	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	perangkat daerah	1 tahun	4,838,130	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#	2.06	#	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 tahun	3 Dokumen	2,399,700	2399700	2.399.700	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	perangkat daerah	1 tahun	2,639,670	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#	2.06	#	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 tahun	12 Laporan	21,000,000	26000000	26.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	perangkat daerah	1 tahun	23,100,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#	2.06	#	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rakor dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	12 Laporan	69,740,000	85940000	85.940.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	perangkat daerah	1 tahun	76,714,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

7	01	#	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan BMD	21 Paket		412,500,000	108.214.500	108.214.500						123,750,000	
7	01	#	2.07	#	Pengadaan Mebel	jumlah kursi kerja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	15 Paket	27,500,000	23214500	23.214.500	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		perangkat daerah	25 unit	30,250,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#	2.07	#	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	8 Unit	85,000,000	85000000	85.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		perangkat daerah	10 unit	93,500,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#	2.07	#	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah balai pertemuan kesenian dan olahraga	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 tahun	1 Unit	300,000,000	0	-	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		perangkat daerah	1 tahun	0	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

7	01	#	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah		3 Jasa Penunjang	137,017,088	157.520.438	157.520.438							150,718,796	
7	01	#	2.08	#	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah benda pos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	12 Laporan	30,830,000	51333350	51.333.350	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	1 tahun	33,913,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#	2.08	#	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun	12 Laporan	14,758,980	14758980	14.758.980	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	1 tahun	16,234,878	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

7	01	##	2.08	##	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 Laporan	91,428,108	91428108	91.428.108	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	perangkat daerah	1 tahun	100,570,918	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	##	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan BMD		2 unit	92,227,000	92.227.000	92.227.000							101,449,700	
7	01	##	2.09	##	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 tahun	2 Unit	29,000,000	29000000	29.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	1 tahun	31,900,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

7	01	#	2.09	#	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun	1 Unit	10,000,000	10000000	10.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	1 tahun	11,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#	2.09	#	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah kendaraan dinas operasional	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun	2 Unit	53,227,000	53227000	53.227.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	1 tahun	58,549,700	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat		81,25 persen	2,811,093,130	2.381.720.004	2.381.720.004							2,811,093,130	
7	01	#	2.01		Koordinasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		80 Persen	2,811,093,130	2.381.720.004	2.381.720.004							2,811,093,130	

7	01	#	2.01	#	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 tahun	1 Dokumen	2,811,093,130	2381720004	2.381.720.004	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	masyarakat	1 tahun	2,811,093,130	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat		85 persen	3,356,364,000	2.297.655.200	2.297.655.200						3,460,700,400	
7	01	#	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan	Jumlah Kegiatan	9 kelurahan	4 Kegiatan	3,356,364,000	2.297.655.200	2.297.655.200					9 kelurahan	3,460,700,400	

7	01	#	2.02	#	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 tahun	1 LAPORAN	36,125,000	37655200	37.655.200	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	masyarakat	1 tahun	39,737,500	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#	2.02	#	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 tahun	3 Unit	997,239,000	1350000000	1.350.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		masyarakat	1 tahun	1,096,962,900	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#	2.02	#	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 tahun	1 Pokmas / Ormas	2,313,000,000	900000000	900.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		masyarakat	1 tahun	2,313,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

7	01	#	2.02	#	Evaluasi Kelurahan	jumlah kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 tahun	2 Laporan	10,000,000	10000000	10.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	masyarakat	1 tahun	11,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)		85 persen	1,769,761,000	-	-							1,946,737,100	
7	01	#	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah kegiatan	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	2 Kegiatan	1,769,761,000	-	-						1 kegiatan	1,946,737,100	

[illegible]

7	01	#	2.01		Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintah umum		85 Perse n	20,000,000	20.000.000	20.000.000							22,000,000	
7	01	#	2.01	#	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	jumlah kegiatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 tahun	1 Doku men	10,000,000	10000000	10.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Keluraha n	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		01. Meningka tkan SDM yg berkualita s melalui pemerataa n pendidika n, kesehatan dan penangan an kesejahter aan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerinta han yang efektif	masyarak at	1 tahun	11,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH
7	01	#	2.01	#	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah kegiatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 tahun	12 Doku men	10,000,000	10000000	10.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Keluraha n	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		01. Meningka tkan SDM yg berkualita s melalui pemerataa n pendidika n, kesehatan dan penangan an kesejahter aan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerinta han yang efektif	masyarak at	1 tahun	11,000,000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TOMOHON TENGAH

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tomohon Tengah

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU-RKPD 2023
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	12.174.574.854
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.475.199.650
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.967.355.012
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.918.477.212
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.046.879.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	999.100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.882.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.173.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.369.300
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.399.700
Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.940.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.214.500
Pengadaan Mebel	23.214.500

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.520.438
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.333.350
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.758.980
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.428.108
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.227.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.227.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.381.720.004
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.381.720.004
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.381.720.004
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.297.655.200
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.297.655.200
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	37.655.200
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.350.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	900.000.000
Evaluasi Kelurahan	10.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10.000.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Di Kecamatan Tomohon Tengah tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Kecamatan Tomohon Tengah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Kecamatan Tomohon Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Kecamatan Tomohon Tengah Semoga RENJA tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Di Kecamatan Tomohon Tengah

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Tengah, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2023 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Tomohon Tengah Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tomohon Tengah, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu

instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah. antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2018 , maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Tengah Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Rencana Kerja Kecamatan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Propinsi Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota , RKPD Kota Tomohon dan Renstra).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
- c. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KECAMATAN TOMOHON BARAT KOTA TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Tomohon Barat, evaluasi pelaksanaan Kecamatan Tomohon Barat tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Tomohon Barat.

Selanjutnya Renja Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Tahun

2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon yang

akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Barat bertujuan :

- Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Tomohon Barat tahun 2023.
- Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
- Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon, proses penyusunan Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon, keterkaitan antara Renja Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahunberjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Tahun Lalu dan Renstra Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon

2.4. .Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Kecamatan Tomohon Barat tahun 2022 didasarkan pada Perubahan Renstra Badan/Dinas/Kecamatan Tahun2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota a sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota a Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2021			Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /Kota s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Faktor Pendoring Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				
											I			II			III													IV			
3	4	5			6			7			8			9			10			11			12= 8 + 9 + 10 + 11			13 = 6 + 12			14 = 13/5 * 100%		15	16	17
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp				
		TARGET	Satuan		Jumlah	Satuan		TARGET	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat DAerah	0		-	0	0	-	13	0	5.45 3.80 4.33 6	13	0	1.08 4.85 5.60 1	12	0	1.51 2.05 2.98 3	12	dokumen/kegiatan/item	1.20 1.07 9.55 7	12	dokumen/kegiatan/item	1.41 5.03 7.14 0	12	dokumen/kegiatan/item	5.21 3.02 5.28 1	12	62%	5.21 3.02 5.28 1		0%	Kecamatan Tomohon Barat		

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja PD	0	dokumen	-	0	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	0	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Tomohon Barat		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	2	kegiatan	4.88 9.35 6.71 0	2	kegiatan	1.07 6.85 5.60 1	2	kegiatan	1.45 5.81 0.74 3	2	Kegiatan	1.16 3.96 6.04 7	2	kegiatan	1.06 6.02 6.84 0	2	kegiatan	4.76 2.65 9.23 1	5	9 7 %	4.76 2.65 9.23 1		Kecamatan Tomohon Barat		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	-	kegiatan	0	-	kegiatan	-	0	kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	kegiatan	0		-			-			Kecamatan Tomohon Barat		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	5	kegiatan	173. 578. 100	0	kegiatan	-	5	kegiatan	11.9 15.9 90	5	Kegiatan	295. 010	5	kegiatan	133. 330. 000	5	kegiatan	145. 541. 000	5	8 4 %	145. 541. 000		Kecamatan Tomohon Barat		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	0	pengadaan	-	0	pengadaan	-	1	pengadaan	195. 601. 800	0	pengadaan	-	0	item	0	0	item	-		item	122. 628. 000		item	122. 628. 000		6 3 %	122. 628. 000		Kecamatan Tomohon Barat		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0	jasa	-	0	jasa	-	3	jasa	86.287.426	3	jasa	4.000.000	3	kegiatan	20.112.750	3	Kegiatan	16.968.500	3	kegiatan	43.126.800	3	kegiatan	84.208.050	6	98%	84.208.050			Kecamatan Tomohon Barat		
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD	0	pemeliharaan	-	0	pemeliharaan	-	2	pemeliharaan	108.980.300	2	pemeliharaan	4.000.000	2	kegiatan	24.213.500	2	Kegiatan	19.850.000	2	kegiatan	49.925.500	2	kegiatan	97.989.000	4	90%	97.989.000			Kecamatan Tomohon Barat		
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	1	kegiatan	3.238.589.387	1	kegiatan	0	1	kegiatan	958.115.600	1	Kegiatan	397.126.850	1	kegiatan	1.490.289.650	2	kegiatan	2.845.532.100	2	88%	2.845.532.100		0%	Kecamatan Tomohon Barat		
Koordinasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	1	kegiatan	3.238.589.387	1	kegiatan	0	1	kegiatan	958.115.600	1	Kegiatan	397.126.850	1	kegiatan	1.490.289.650	2	kegiatan	2.845.532.100	100%	88%	2.845.532.100		0%	Kecamatan Tomohon Barat		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan yang baik dan pemeliharaan Pasca program Pemberdaya	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	1	kegiatan	1.582.570.450	3	kegiatan	-	3	kegiatan	34.900.000	3	Kegiatan	191.555.560	3	kegiatan	146.252.760	2	kegiatan	372.708.320	2	24%	372.708.320		0%	Kecamatan Tomohon Barat		

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan tuntutan paradigma *good governance* yang menghendaki dipenuhinya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan partisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maka kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perlu dilakukan. Kegiatan utama dalam penyusunan IKM ini adalah survey masyarakat pengguna jasa layanan untuk memperoleh informasi nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa yang telah mereka terima. Pada bab ini akan dipaparkan hasil survey IKM terhadap 150 responden yang meliputi karakteristik responden dan nilai rata-rata unsur pelayanan.

Survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Kantor Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon

NO	Indikator	SPM/sta ndar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Cakupan penunjang perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	
	Indeks Kepuasan Masyarakat			81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	
	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat			100	100	100	100	100	100	
	Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraa			100	100	100	100	100	100	

n K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)									
Presentasi Tingkat Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum			100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tomohon Barat dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta indicator yang terdapat dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yang menjadi target dari Kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Barat sebagaimana berikut:
- Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya, serta menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurang transparan, kurang informatif, kurang konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.
 - Untuk mengukur kinerja aparatur di Kantor Kecamatan Tomohon Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (*stakeholder*) perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakanlah “SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT”.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Lampiran IV)

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisa efisiensi dengan cara membandingkan antara input, output dan outcome baik untuk rencana kegiatan maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi Kecamatan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tomohon 2023

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tomohon Barat

No.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat	81.25%	2.549.775.025	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat	81.25%	2.549.775.025	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Persentasi Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2.549.775.025	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Persentasi Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2.549.775.025	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	2.549.775.025	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	1 dokumen	2.549.775.025	Untuk memenuhi Oprasional Kelurahan

								Kecamatan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat		2.036.644.882	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah an Kelurahan yang baik dan Pemeliharaa n Pasca Program Pemberdaya an Masyarakat			2.036.644.882	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2.036.644.882	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2.036.644.882	Melengkap ai dana mandatori 5%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana ysng terbangun	3 unit	1.198.346.082	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana ysng terbangun	3 unit	1.198.346.082	Melengkap ai dana mandatori 5%

Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan	8 kegiatan	799.898.200	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan	8 kegiatan	799.898.200	Melengkap ai dana mandatori 5%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)		-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)		-	
Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan			-	Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan			-	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 laporan	-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	12 laporan	-	

		Kecamatan					dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	1 laporan	-	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pelaksanaa n harmonisas i Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	1 laporan	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan				

Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal	1 Dokumen	2.475.000	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal	1 Dokumen	2.475.000	
Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	2.750.000	Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	2.750.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kota yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Tomohon Barat maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Kecamatan Tomohon Barat dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota di rangkum dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Kota Tomohon

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana ysng terbangun		Tidak semua usulan dapat ditampung/ dilaksanakan di tahun 2023
	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan		Tidak semua usulan dapat ditampung/ dilaksanakan di tahun 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Tomohon Barat tidak terlepas dari Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Dalam menetapkan Tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Kecamatan Tomohonn Barat Tahun 2022 juga mempertimbangkan visi, misi pembangunan kepala daerah. Visi dan Misi Walikota Tomohon adalah:

“Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

- 21. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius
- 22. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector
- 23. Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia
- 24. Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan
- 25. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religious yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi
Misi 2 Peningkatan	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang	Meningkatnya perekonomian kota tomohon Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan

Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector	berkualitas adil dan merata	masyarakat kota Tomohon
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon
		Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya kualitas dan prestasi Generasi Muda
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
		Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata domestic maupun mancanegara melalui pengelolaan pariwisata yang produktif, professional dan berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tomohon
		Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan budaya local
Misi 4 Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian
		Meningkatnya ketahanan pangan
	Terwujudnya pembangunan kota Tomohon yang asri dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan kota yang nyaman asri dan berkelanjutan
Misi 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas	Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Tomohon Barat adalah tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi 2 dan 5. Tujuan yang hendak di capai adalah Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata dengan sasaran Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas serta tujuan Terlaksananya

reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Tomohon Barat Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomohon Barat, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan serta sub kegiatan dimaksud adalah :

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan daerah
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perunda-undangan
- Administrasi umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perunda-undangan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
 - Pengadaan saran dan prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

3.3.2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

3.3.3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
 - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
 - Pemberdayaan masyarakat di kelurahan

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
 - Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
 - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini adalah:

- u) Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon
- v) Pencapaian SDGs
- w) Pengentasan Kemiskinan
- x) Pencapaian NSPK
- y) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tahun 2022 dan prakiraan tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.2 berikut

Tabel. 3.2
Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tomohon Barat Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				10.125.011.000,00				13.335.034.429,00
4									
4,1									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang pelayanan Perangkat Daerah		100%	5.791.276.100,00			100,00	6.445.777.785,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	Tomohon Barat	8 dokumen	3.000.000,00			8 dokumen	3.300.000,00
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Tomohon Barat	4 dok	2.000.000,00			4 dok	2.200.000,00
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi keinerja PD	Tomohon Barat	4 dok	1.000.000,00			4 dok	1.100.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	Tomohon Barat	4 kegiatan	5.469.371.000,00			4 kegiatan	6.020.911.728,00
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Tomohon Barat	12 bulan	4.748.011.000,00			12 bulan	5.222.812.100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang	Tomohon Barat	24 orang	576.000.000,00			17 orang	579.700.000,00
		Jumlah orang	Tomohon Barat	33 orang	144.360.000,00			31 orang	217.299.628,00
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen	Tomohon Barat	1 dok	500.000,00			1 dok	550.000,00
	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen	Tomohon Barat	2 dok	500.000,00			2 dok	550.000,00

[illegible]

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	Tomohon Barat		25.000.000,00				27.500.000,00
	Pengadaan mebel								
	Pengadaaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah balai pertemuan kesenian dan olahraga	Tomohon Barat	1 gedung					
	Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah paving	Tomohon Barat	1 paket	25.000.000,00			1 paket	27.500.000,00
		Jumlah kendaraan roda dua	Tomohon Barat	2 unit					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tomohon Barat		72.624.500,00				79.868.657,00
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah ATK, jumlah surat menyurat dan benda pos lainnya	Tomohon Barat	12 paket	28.274.500,00			12 paket	31.103.903,00
				900 eksemplar				900 eksemplar	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening	Tomohon Barat	12 rekening	9.150.000,00			12 rekening	10.064.754,00
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor dan jumlah alat-alat kebersihan kantor	Tomohon Barat	12 bulan	35.200.000,00			1 Orang	38.700.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Tomohon Barat		99.500.000,00				167.038.740,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas	Tomohon Barat	2 unit	27.000.000,00			2 unit	33.000.000,00
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah BBM dan suku cadang	Tomohon Barat	12 bulan	70.000.000,00			12 bulan	57.038.740,00
		Jumlah peralatan kantor lainnya	Tomohon Barat	5 unit	2.500.000,00			13 unit	77.000.000,00
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya								

[illegible]

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Tomohon Barat mengacu pada anggaran APBD. Perubahan Rencana kerja Kecamatan Tomohon Barat bertujuan untuk mencapai kinerja program yang telah diprogramkan sesuai kerangka pendanaan APBD Kota Tomohon. Adapun Kinerja program yang tertuang dalam APBD yaitu :

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Kerja Sesuai Pendanaan APBD Kota Tomohon

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU RKPD 2023
	KECAMATAN TOMOHON BARAT	
	BELANJA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.791.276.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.469.371.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.748.011.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	720.360.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	500.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.780.600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.957.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.778.400
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.044.700
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000
	Pengadaan Mebel	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.624.500
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.274.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.150.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.200.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	99.500.000

Daerah	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.268.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.268.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.268.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.044.734.900
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.044.734.900
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	44.734.900
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.200.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	800.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.500.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.500.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.000.000
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.000.000

BAB V

PENUTUP

Proses demokrasi pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proses pembangunan, sedang peran pemerintah lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma pembangunan tersebut mengubah peran masyarakat dalam proses pembangunan dan yang bersifat partisipasi masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian, Kecamatan Tomohon Barat sebagai ujung tombak pemerintahan di Daerah merupakan posisi yang sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat di bidang pembangunan secara berkelanjutan.

Rencana Program di Kecamatan Tomohon Barat ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tomohon Barat pada periode tahun 2022. Rencana program ini hanya merupakan program pemberdayaan masyarakat, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Tomohon. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, dan berhasil guna serta sesuai dengan Visi dan Misi Kota Tomohon yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah, untuk itu Kecamatan Tomohon Barat perlu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat dan mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, instansi pemerintah dan bukan pemerintah yang berperan utama dalam proses pemberdayaan masyarakat ini, maka diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Kecamatan Tomohon Barat dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses pemberdayaan masyarakat, serta keberanian untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat agar lebih meningkat, berimbang, demokratis dan adil. Demikian Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Barat tahun 2018 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan Tomohon Barat.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KECAMATAN TOMOHON SELATAN KOTA TOMOHON

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Tomohon Selatan, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tomohon Selatan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Tomohon Selatan

Selanjutnya Renja Kecamatan Tomohon Selatan Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- 1) Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 berdasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara
- 8) Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025;
- 11) Peraturan Daerah Kota Tomohon Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 12) Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Selatan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Selatan bertujuan :

Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Tomohon Selatan tahun 2023.

Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tomohon Selatan secara sistematis dan terorganisir.

Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tomohon Selatan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tomohon Selatan Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Selatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Selatan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Tomohon Selatan, proses penyusunan Kecamatan Tomohon Selatan, keterkaitan antara Renja Kecamatan Tomohon Selatan dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Tomohon Selatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Tomohon Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tomohon Selatan Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Tomohon Selatan Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tomohon Selatan Tahun Lalu dan Renstra Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tomohon Selatan
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tomohon Selatan

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomohon Selatan.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tomohon Selatan
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Selatan
- 3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN IV TAHUN 2021

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Kecamatan Tomohon Selatan Tahun 2023 didasarkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Tomohon Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026, untuk mengetahui :

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan IV Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dari Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tomohon Selatan Tahun 2023 hingga Triwulan IV secara umum semua Sub Kegiatan telah mencapai target. Hanya ada satu kegiatan yang mencapai target. Hal ini karena pelaksanaan untuk semua program, kegiatan dan Sub kegiatan sudah dilaksanakan.

Untuk Sub Kegiatan yang tidak mencapai target 100% sampai Triwulan IV yaitu Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Karena adanya kendala dana dalam merealisasikan Sub Kegiatan tersebut.

sub kegiatan yang lain sudah mencapai target karena pelaksanaannya sudah terlaksana.

Adapun Hasil Evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan hingga Triwulan II secara lengkap, tercantum dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan IV dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

No	Sasaran	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan/Kegiatan (Output))	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja										
				5			6			7			8				9														10				11				12	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K			Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
				Target	Satuan		Jumlah	Satuan		Target	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah			Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan			
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang pelayanan perangkat daerah	0	Persen	-	0	Persen	-	100	Persen	8.897.574.789,00	12	Persen	1.589.232.554,00	16	Persen	3.896.828.480	27	Persen	680.512.588		Persen	1.594.349.378	55	Persen	7.760.923.000,00	55	Persen	7.760.923.000,00										
2		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	0	dokumen	-	0	dokumen	-	8	dokumen	1.500.000,00	0	dokumen	-	0	dokumen	-	8	dokumen	1.500.000				8	dokumen	1.500.000,00	8	dokumen	1.500.000,00					belum ada realisasi					
3		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	12	kegiatan	7.179.131.243,00	3	kegiatan	1.551.403.754,00	3	kegiatan	3.809.186.980	3	kegiatan	166.820.000	3	kegiatan	1.425.323.887	12	kegiatan	6.952.734.621,00	12	kegiatan	6.952.734.621,00										
4		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	127	kegiatan	81.453.400,00	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	127	kegiatan	74.110.243	127	kegiatan	74.110.243,00	127	kegiatan	74.110.243,00					anggaran telah direfokusing					
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	12	kegiatan	119.776.050,00	0	kegiatan	-	3	kegiatan	19.070.000	6	kegiatan	48.270.700	3	kegiatan	41.934.200	12	kegiatan	109.274.900,00	12	kegiatan	109.274.900,00										
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	0	item	-	0	item	-	2	item	345.147.870,00	0	item	-	1	item	10.168.500	1	item	6.489.500				2	item	16.658.000,00	2	item	16.658.000,00										
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	24	kegiatan	168.993.526,00	6	kegiatan	26.390.000,00	6	kegiatan	37.485.000	6	kegiatan	36.210.000	6	kegiatan	52.981.048	24	kegiatan	153.066.048,00	24	kegiatan	153.066.048,00										
8		Pemeliharaan Barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	12	kegiatan	959.507.800,00	3	kegiatan	11.438.800,00	3	kegiatan	20.918.000	3	kegiatan	421.222.388	3			12	kegiatan	453.579.188,00	12	kegiatan	453.579.188,00										
9		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	0	kelurahan/kecamatan	-	0	kelurahan/kecamatan	-	13	kelurahan/kecamatan	42.064.900,00	0	kelurahan/kecamatan	-	13	kelurahan/kecamatan	38.510.000	0	kelurahan/kecamatan	-			13	kelurahan/kecamatan	38.510.000,00	13	kelurahan/kecamatan	38.510.000,00											
10		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	0	Persen	-	0	Persen	-	100	Persen	25.033.600,00	0	Persen	-	4	Persen	25.033.600,00						4	Persen	25.033.600,00	4	Persen	25.033.600,00											
11		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteritban Umum	Jumlah Kegiatan	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	25.033.600,00	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	25.033.600,00	0	Kegiatan	-			1	Kegiatan	25.033.600,00	1	Kegiatan	25.033.600,00											

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Tomohon Selatan dilakukan terhadap penilaian capaian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kecamatan Tomohon Selatan.

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan diukur dari Indeks kepuasan Masyarakat, Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan), dan Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Adapun hasil Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tomohon Selatan sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah Kecamatan
Tomohon Selatan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan Masyarakat			81,25	81,25	81,25	81,25		NA	81,25	81,25	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat			100	100	100	100		80	100	100	
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)			100	100	100	100		NA	100	100	
4	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			100	100	100	100		NA	100	100	

Pelaksanaan survei Indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan cara Melaksanakan penyebaran kuisisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan. Dengan Rumus Jumlah angket IKM yang menyatakan “Sangat baik” (135 Responden) dibagi Jumlah angket IKM yang dibagikan (140 Angket) dan dikalikan 100. Adapun capaian sampai dengan akhith tahun 2021 adalah 96,42 %

Untuk Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat capaian sampai dengan Tahun 2021 sebesar 91,55%. Tidak tercapainya target dari indikator ini karena dari 15 kegiatan yang direncanakan hanya 12 kegiatan yang terlaksana. Pada Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberdayaan kelurahan adalah terlaksananya 13 kegiatan musrenbang yaitu musrenbang Kecamatan Tomohon Selatan serta 12 Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Walian, Kelurahan Walian Satu, Walian Dua, Uluindano, Kelurahan Lansot, Kelurahan Tumatangtang, Kelurahan Tumatangtang Satu, Kampung Jawa, Pangolombian, Tondangow, Lahendong dan Pinaras, terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di 12 Kelurahan dan terlaksananya pemberdayaan masyarakat di 12 kelurahan. Dari 3 sub kegiatan yang ada baru 1 kegiatan yang terlaksana dengan baik, dan untuk 2 sub kegiatan belum dilaksanakan.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) diukur dengan membandingkan jumlah penyelesaian pelanggaran atas K3 dengan jumlah pelanggaran K3 yang ada. Dalam merealisasikan capaian indikator ini dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dimana adanya pos penjagaan di tiap lingkungan

Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum capaiannya mencapai 100%. Untuk merealisasikan kegiatan ini dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu kesejahteraan perangkat di 12 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon serta terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah umum dimana terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor Kecamatan Tomohon Selatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta indikator yang terdapat dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yang menjadi target dari Kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Selatan

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD yang berisikan uraian sebagai berikut :

- Tingkat Kinerja pelayanan kecamatan, tidak akan optimal tanpa diimbangi dengan peningkatan kewenangan, SDM dan sarana prasarana yang memadai.
 - Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Antara lain, pelimpahan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh tingkat kecamatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih adanya tumpang tindih atau tarik ulur dengan OPD/dinas teknis tingkat Kota yang selama ini melaksanakan dibidang kegiatan tersebut.
 - Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); Terdapat keraguan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada kegiatan yang dilimpahkan ke tingkat kecamatan, sehingga dapat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.
 - Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, Kecamatan adalah merupakan OPD yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, sehingga aparatur dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan pelayanan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- Peluang yang ada di wilayah Kecamatan Tomohon Selatan yang mempunyai potensi dalam wilayah Agribisnis, Desa wilayah Industri dan Desa Wisata sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan asli daerah Kota Tomohon.
- Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :
 - Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dari Perangkat Daerah tingkat Kota yang seyogyanya dilaksanakan oleh kecamatan, agar sepenuhnya dilimpahkan ke kecamatan. Sehingga kecamatan tidak akan ragu lagi dalam pelayanan kepada masyarakat. Keraguan dalam pelayanan terhadap masyarakat akan berdampak pada keterlambatan penyelesaian pelayanan, sehingga akan menurunkan tigkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan kecamatan.
 - Untuk mencapai visi misi kepala daerah Kota Tomohon, dituntut agar adanya sinergitas di semua OPD terkait serta ditunjang oleh profesionalisme aparatur dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.
 - Untuk meningkatkan PAD Kota Tomohon, potensi di wilayah Kecamatan Tomohon Selatan khususnya dibidang sektor agribisnis dan pariwisata perlu dikembangkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Kota Tomohon Tahun 2023 belum termuat program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Tomohon Selatan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tomohon Selatan Program dan kegiatan berdasarkan usulan analisis tersebut disampaikan pada rancangan akhir RKPD 2023.

Review terhadap rancangan RKP terjadi karena adanya penyesuaian indikator dan penyesuaian pagu anggaran.

5. Dalam Program dan Kegiatan sebagai upaya untuk pencapaian target terhadap indikator indeks kepuasan masyarakat pagu indikatifnya belum sesuai dengan analisis kebutuhan dana yang akan memenuhi operasional kelurahan demi memperlajar pelayanan kepada masyarakat.
6. Untuk pemenuhan target terhadap Indikator Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat juga pagu belum mencukupi dengan kebutuhan dana yang diperlukan.
7. Pencapaian target untuk Indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) dalam rancangan RKPD tidak dianggarkan tapi sebenarnya itu membutuhkan anggaran untuk menunjang/memperlancar pelayanan di bidang Trantib.
8. Indikator persentase tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dalam rancangan RKPD juga tidak dianggarkan dan untuk pencapaian indikator ini membutuhkan anggaran untuk menunjang/ meperlancar pelayanan di bidang pemerintahan.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan RKPD tahun
Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tomohon Selatan

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %	3.193.200.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan dan 12 Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	81,25 %	3.310.500.000	Untuk memenuhi oprasional keluraha demi memperlancar pelayanan kepada masyarakat

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintaha n Kelurahan yang baik dan Pemeliharaa an pasca program pemberdayaa n masyarakat	80 %	5.980.688.794	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80 %	6.120.000.000	Untuk melengkapi dana mandatori 5%

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kota yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Tomohon Selatan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Kecamatan Tomohon Selatan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota di rangkum dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tomohon Selatan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Semua Kelurahan	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat		Tidak semua usulan dapat di tampung di Tahun 2023
	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan		
	Sub Kegiatan	Semua Kelurahan			
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan 2. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan 3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Semua Kelurahan	1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

7. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;
8. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPMdi daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;
9. Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal's (MDG's)
10. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
11. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
12. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Tomohon Selatan tidak terlepas dari Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Dalam menetapkan Tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023 juga mempertimbangkan visi, misi pembangunan kepala daerah. Visi dan Misi Walikota Tomohon adalah :

“Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

26. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius
27. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sektor

- 28. Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia
 - 29. Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan
 - 30. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas
- Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religious yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi
Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sektor	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota tomohon
		Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan masyarakat kota Tomohon
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon
		Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya kualitas dan prestasi Generasi Muda
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
		Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata domestic maupun mancanegara melalui pengelolaan pariwisata yang produktif, professional	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tomohon
		Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan budaya local

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
	dan berdaya saing	
Misi 4 Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian
		Meningkatnya ketahanan pangan
	Terwujudnya pembangunan kota Tomohon yang asri dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan kota yang nyaman asri dan berkelanjutan
Misi 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas	Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Tomohon Selatan adalah tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi 5. Tujuan yang hendak di capai adalah tujuan Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 berpedoman pada RKPD Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Kecamatan Tomohon Selatan Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kecamatan Tomohon Selatan maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan serta sub kegiatan dimaksud adalah :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- 1.4 **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5.2
- 1.6 **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
 - 2.1 **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
 - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
 - 3.1 **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
 - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 3.1.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 3.1.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 4. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
 - 4.1 **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
 - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 4.2 **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - 4.2.1 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
 - 5.1 **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- 5.1.1 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- 5.1.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini adalah :

- z) Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon
 - aa) Pencapaian SDGs
 - bb) Pengentasan Kemiskinan
 - cc) Pencapaian NSPK
 - dd) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tahun 2023 dan prakiraan tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.2 berikut

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan pendanaan kecamatan Tomohon Selatan mengacu pada anggaran RKPD Kota Tomohon Tahun 2023. Rencana kerja Kecamatan Tomohon Selatan bertujuan untuk mencapai kinerja program yang telah diprogramkan sesuai kerangka pendanaan untuk penyusunan APBD Kota Tomohon Tahun 2023.

Adapun Kinerja program yang tertuang dalam Renja sebagaimana dalam Tabel 4.1:

TABEL 4. 1
Rencana Kerja Program Kegiatan Kecamatan Tomohon Selatan Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Kencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023		Pagu Indikatif							Target	Pagu Indikatif	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			RKPD 2023	APBD 2023				
7					UNSUR KEWILAYAHAN		0		0										
7	01				KECAMATAN		0		0	22,344,383,642	14.784.876.000						22,344,383,642		
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah		85 persen	13,716,337,911	8.451.769.600						13,716,337,911		
7	01	001	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Jumlah Dokumen	10 dokumen	2 dokumen	3.300.000	3.000.000						10 dokumen	3,515,820,000	
7	01	001	2.0 1	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JUMLAH DOKUMEN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 DOKUMEN	2 Dokumen	1.100.000	1.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			perangkat daerah	2 DOKUMEN	3,300,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
						JUMLAH EVALUASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH		4 DOKUMEN		1.100.000	1.000.000						4 DOKUMEN		
						JUMLA RENJA PERANGKAT DAERAH		4 DOKUMEN		1.100.000	1.000.000						4 DOKUMEN		
7	01	001	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan dan Tenaga kontrak	JUMLAH KEGIATAN	12 Bulan	4 Kegiatan	8,696,074,041	7.991.390.000						12 Bulan	8,696,074,041	
7	01	001	2.0 2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 ORANG	90 Orang/bul an	7,783,854,986	4.827.078.139	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	77 ORANG	7,783,854,986	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
						TAMBAHAN PENGHASILAN ASN		77 ORANG			2.010.397.861						77 ORANG		
7	01	001	2.0 2	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 BULAN	12 Dokumen	912,219,055	145.914.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	12 BULAN	912,219,055	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
						JUMLAH JASA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN TENAGA KONTRAK		22 ORANG			1.008.000.000						22 ORANG		
7	01	001	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	4 Kegiatan	128,012,500	-						1 kegiatan	128,012,500	
7	01	001	2.0 5	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT PERLENGKAPANNYA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	112 PASANG	130 Paket	96,250,000		Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	112 PASANG	96,250,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN

7	01	001	2.0 5	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	JUMLAH APARATUR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 ORANG	1 Orang	26,262,500		Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	1 ORANG	26,262,500	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	01	001	2.0 5	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	JUMLAH APARATUR YANG MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 ORANG	10 Orang	5,500,000		Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	2 ORANG	5,500,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	01	001	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan (surat kabar) dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan	480 Exemplar	4 Kegiatan	222,263,800	151.230.100						480 Exemplar	222,263,800	
7	01	001	2.0 6	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Gedung dan Halaman Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	37 BUAH	1 Paket	1,092,300	3.154.500	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perangkat Daerah	37 BUAH	1,092,300	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	01	001	2.0 6	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 PAKET	1 Paket	13,040,500	10.550.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perangkat Daerah	1 PAKET	13,040,500	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	01	001	2.0 6	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17096 EKSEMPLE AR	1 Paket	14,665,200	20.204.600	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perangkat Daerah	17096 EKSEMPLE AR	14,665,200	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	01	001	2.0 6	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan (surat kabar) dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	480 EKSEMPLE AR	3 Dokumen	3,385,800	3.078.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perangkat Daerah	480 EKSEMPLE AR	3,385,800	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	01	001	2.0 6	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	740 ORANG	12 Laporan	25,080,000	48.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	740 ORANG	25,080,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	01	001	2.0 6	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JUMLAH RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 KEGIATAN	12 Laporan	165,000,000	28.766.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	14 KEGIATAN	165,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
						JUMLAH RAPAT KOORDINASI KELUAR DAERAH		21 KEGIATAN			37.477.000						21 KEGIATAN		
7	01	001	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan BMD		21 Paket	52,447,670	64.225.600							52,447,670	
7	01	001	2.0 7	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 LAPTOP	8 Unit	52,447,670	64.225.600	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	2 LAPTOP	52,447,670	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
								2 PRINTER									2 PRINTER		
						JUMLAH PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR		1 PC									1 PC		
7	01	001	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah		3 Jasa Penunjang	214,094,920	181.543.100							214,094,920	
7	01	001	2.0 8	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JUMLAH ALAT TULIS KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1053 BUAH	12 Laporan	62,802,520	45.429.760	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			perangkat daerah	1053 BUAH	62,802,520	KECAMATAN TOMOHON SELATAN

						JUMLAH MATERAI		1200 LEMBAR			12.000.000					1200 LEMBAR		
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JUMLAH REKENING AIR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 BULAN	12 Laporan	26,567,310	3.126.600	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		perangkat daerah	12 BULAN	26,567,310	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
						JUMLAH REKENING LISTRIK		12 BULAN			3.292.280					12 BULAN		
						JUMLAH REKENING JARINGAN INTERNET(INDIHOME)		12 BULAN			11.310.000					12 BULAN		
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 BULAN	1 Laporan	124,725,090	10.872.800	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		perangkat daerah	12 BULAN	124,725,090	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
						JUMLAH JASA KEBERSIHAN KANTOR		3 ORANG			24.000.000					3 ORANG		
						JUMLAH JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN		22 ORANG			71.511.660					22 ORANG		
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kegiatan	Jumlah Pemeliharaan BMD	3 kegiatan	2 unit	887,624,980	60.380.800					3 kegiatan	887,624,980	
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUMLAH HONORARIUM SOPIR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 ORANG	2 Unit	29,700,000	24.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		perangkat daerah	1 ORANG	29,700,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
						JUMLAH PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN DINAS		1 R4			2.000.000					1 R4		
7	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JUMLAH PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 BULAN	2 Unit	31,412,480	34.380.800	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		perangkat daerah	12 BULAN	31,412,480	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	JUMLAH PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 UNIT	1 Unit	826,512,500		Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		perangkat daerah	5 UNIT	826,512,500	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
						JUMLAH REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR		2 UNIT								2 UNIT		
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat		81,25 persen	2,005,288,058	3.271.010.200						2,005,288,058	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	80 Persen	2,005,288,058	3.271.010.200					1 kegiatan	2,005,288,058	
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH OPERASIONAL KELURAHAN	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 KELURAHAN	1 Dokumen	2,005,288,058	3.271.010.200	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		masyarakat	12 KELURAHAN	2,005,288,058	KECAMATAN TOMOHON SELATAN

7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	jumlah kegiatan	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	3 kegiatan	85 persen	6,578,757,673	3.060.469.800						3 kegiatan	6,578,757,673	
7	01	003	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	4 Kegiatan	6,578,757,673	3.060.469.800						3 kegiatan	6,578,757,673	
7	01	003	2.0 2	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	JUMLAH KEGIATAN FORUM MUSRENBANG DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 KEGIATAN	1 LAPORAN	46,271,390	60.469.800	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1 KEGIATAN	46,271,390	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	01	003	2.0 2	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA TERBANGUN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 KELURAHAN	3 Unit	1,872,416,253	1.800.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	12 KELURAHAN	1,872,416,253	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	01	003	2.0 2	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	JUMLAH CAKUPAN PENINGKATAN FASILITAS/PEMBERDAYAAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 KELURAHAN	1 Pokmas / Ormas	4,638,070,030	1.200.000.000	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	12 KELURAHAN	4,638,070,030	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	jumlah kegiatan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentrman, Ketertiban, Keindahan)	2 Kegiatan	85 persen	22,000,000	1.626.400						2 Kegiatan	22,000,000	
7	01	004	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah kegiatan	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	2 Kegiatan	11,000,000	813.200						2 kegiatan	11,000,000	
7	01	004	2.0 1	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	JUMLAH KEGIATAN	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 KEGIATAN	12 Laporan	11,000,000	813.200	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	masyarakat dan Perangkat Daerah	1 KEGIATAN	11,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	01	004	2.0 3		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah kegiatan		1 kegiatan		11,000,000	813.200						1 kegiatan	11,000,000	
7	01	004	2.0 3	002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	JUMLAH KEGIATAN		1 KEGIATAN		11,000,000	813.200	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			masyarakat dan Perangkat daerah	1 KEGIATAN	11,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		85 persen	22,000,000	-							22,000,000	
7	01	005	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintah umum		85 Persen	22,000,000	-							22,000,000	
7	01	005	2.0 1	007	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	JUMLAH KEGIATAN	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 KEGIATAN	1 Dokumen	11,000,000	-	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Perangkat daerah	1 KEGIATAN	11,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN
7	01	005	2.0 1	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	JUMLAH KEGIATAN	Jumlah Dokumen Tugas forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 KEGIATAN	12 Dokumen	11,000,000	-	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Perangkat daerah	1 KEGIATAN	11,000,000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Selatan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 di lingkup Kecamatan Tomohon Selatan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Kecamatan Tomohon Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Kecamatan Tomohon Selatan Semoga RENJA tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon Tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomohon Selatan

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Selatan, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada Rencana Kerja 2023 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Tomohon Selatan Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tomohon Selatan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada

masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah. antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2018, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Tomohon Selatan Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Rencana Kerja Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Propinsi Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota , RKPD Kota Tomohon dan Renstra Dinas).

5.2. Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
- b. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

SEKRETARIAT DPRD KOTA TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat DPRD Kota Tomohon evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Tomohon tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Tomohon.

Selanjutnya Renja Sekretariat DPRD Kota Tomohon Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 didasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
- 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025;
- 10 Peraturan Daerah Kota Tomohon Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 11 Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat

DPRD Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Tomohon bertujuan :

- Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD Kota Tomohon tahun 2023.
- Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
- Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Sekretariat DPRD Kota Tomohon, proses penyusunan Sekretariat DPRD Kota Tomohon, keterkaitan antara Renja Sekretariat DPRD Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Sekretariat DPRD Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kota Tomohon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Tomohon.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Tomohon Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kota Tomohon Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Kota Tomohon Tahun Lalu dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Tomohon.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Tomohon.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Tomohon
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Tomohon

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Tomohon.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Tomohon

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Tomohon.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA TOMOHON TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA

Secara Umum, Realisasi atas Program-program Rencana Kerja dari unit kerja Sekretariat DPRD Kota Tomohon yang merupakan perangkat Organisasi dalam bidang umum Pemerintahan Kota Tomohon telah dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan, sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021.

Sekretariat DPRD Kota Tomohon telah melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 melalui Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 berjalan dengan baik dan mengacu pada dokumen-dokumen yang telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sekretariat DPRD Kota Tomohon telah melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja maupun dokumen penting lainnya dengan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya kinerja pelayanan sesuai dengan target perencanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Tomohon, sebagai berikut :

- a. Adanya perencanaan yang matang terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam menjabarkan dan mengimplementasi antara kegiatan dan pelaksanaan fisik.
- b. Perencanaan awal yang bersifat proses administrasi kegiatan dipersiapkan dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi pada pihak-pihak terkait.
- c. Memaksimalkan kerja tim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketersediaan anggaran pembiayaan kegiatan.
- d. Fungsi pengawasan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dari aspek kuantitas dan kualitas pekerjaan sesuai bidang tugas dilaksanakan oleh masing-masing kepala bagian.
- e. Monitoring dan evaluasi PD ditangani langsung oleh Sekretaris DPRD sebagai penanggungjawab administrasi dan Pengguna Anggaran sebagaimana aturan dan mekanisme yang harus dilaksanakan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Tomohon dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Tomohon s/d Tahun 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan

Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2021

Kota Tomohon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target kinerja capaian program (Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program tahun 2021	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Tahun 2021	(tahun n-3)	(tahun lalu /n-2)	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	82,25 %
	Perencanaan, Penganggaran dan	Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah, Pelaporan kinerja dan Dokumen	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	70,05 %

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkatg Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	80,56 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	77,46 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15,04 %
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	17,71 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	48,10 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan serta Honorarium bagi ASN dan Non ASN dan tersedianya Dokumen Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	95,10 %

		Keuangan				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	95,31 %
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan yang Menerima Honorarium	12 bulan	12 bulan	12 bulan	93,58 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	92,31 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan RKBMD,Laporan BMD serta Penatausahaan BMD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	82,70 %
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 %
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	0 %
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga Pengelola Barang Milik Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	85,18 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi ASN, Tersosialisasinya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	93,45 %

		Perda sertab Tersedianya ASN yang Berkompoten				
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN yang menerima Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	49 Orang	49 Orang	49 Orang	99,98 %
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang Menerima Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23 Orang	23 Orang	23 Orang	99,33 %
	Sosialisasi Perda	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	92,43 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang Dikuti ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	78,35 %
	Penyelenggaraan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di adakan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	99,48 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	1 Paket	99,92 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	79,94 %
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,94 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	300 Buku	300 Buku	300 Buku	80,82 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98,75 %

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	52,36 %
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	52,72 %
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	79,45 %
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair yang Diadakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	93,33 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin dan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	93,63 %
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bngunan Lainnya yang Diadakan/Direhab	1 Unit	1 Unit	1 Unit	52,38 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	8,49 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	82,46 %
	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Benda Pos dan Gaji Nakon	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	78,82 % -

	Menyurat	serta surat menyurat				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	74,90 % -
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang menerima Honorarium dan jasa layanan umum lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	93,07 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	91,93 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	82,35 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	89,35 %
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang terpelihara	-	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,11 %

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara secara berkala	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	97,03 %	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Halaman gedung kantor/bangunan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	32,10 %	-
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD dalam Hal pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	97,16%	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima gaji dan Tunjangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	98,61 %	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia	60 Orang	60 Orang	60 Orang	83,51 %	
	Pelaksanaan MedikalCheck Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medichal chek UP	20 Orang	20 Orang	20 Orang	6,91 %	
	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Fasilitas Untuk Fraksi dan Rapat Rapat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	76,19 %	

		Koordinasi				
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah kebutuhan ATK dan makan minum Rapat fraksi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	82,62 %
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Rapat	100 Rapat	100 Rapat	100 Rapat	78,03 %
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, fungsi Pembentukan Perda dan fungsi Anggaran dala Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)</i>	100 %	100 %	100 %	98,15 %
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	100 %	100 %	44,97 %
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang Terlaksana	4 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0 %
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang Terlaksana	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	47,92 %
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Jasa Tenaga Ahli Kajian Perundang-Undangan	9 Orang	9 Orang	9 Orang	33,33 %

	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Tim Jasa Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik	3 Tim	3 Tim	3 Tim	0 %
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terfasilitasinya Pembahasan mengenai Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	100 %	59,49 %
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	54,91 %
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	25,19 %
	Pembahasan APBD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	84,49 %
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	87,21 %
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	83,03 %
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terfasilitasinya Kegiatan DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan di Bidang Pemerintahan Hukum, Infrastruktur, Kesra, Perekonomian, SDA, dan Pengawasan terhadap tindak	100 %	100 %	100 %	55,41 %

			Lanjut BPK				
	Pengawasan Pemerintahan Pemerintahan dan Hukum	Urusan Bidang	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	59,36 %
	Pengawasan Pemerintahan Infrastruktur	Urusan Bidang	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	63,98 %
	Pengawasan Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	Urusan Bidang	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	33,27 %
	Pengawasan Pemerintahan Perekonomian	Urusan Bidang	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	48,39 %
	Pengawasan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Urusan	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	14,01 %
	Pengawasan Anggaran	Penggunaan	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	61,09 %

	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	85,42 %
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %	100 %	59,91 %
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah BimbinganTeknis yang diikuti DPRD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	32,43 %
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Media Massa, Elektronik dan Online yang Mempublikasikan dan Mendokumentasikan Kegiatan DPRD	30 Media	30 Media	30 Media	70,04 %
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Honorarium Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang terbayarkan	3 Tim	3 Tim	3 Tim	75 %
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Honorarium Tenaga Ahli Fraksi yang terbayarkan	3 Orang	3 Orang	3 Orang	100 %
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Hubungan Masyarakat	-	-	-	-
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	51,95 %

	Penyerapan dan Penghimpunan Masyarakat Aspirasi	Terfasilitasinya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	100 %	100 %	126,37 %
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam daerah	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	0 %
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	97,32 %
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Anggota DPRD yang Melaksanakan Reses	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	50,56 %
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	100 %	100 %	0 %
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 %
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	0 %
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terfasilitasinya Pembahasan Kerja Sama Daerah	100 %	100 %	100 %	0 %
	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Negeri yang terlaksana	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	0 %

	Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	100 %	100 %	100 %	53,10 %
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	48,09 %
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen LKIP DPRD yang tersusun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Kegiatan Banmus	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	93,11 %
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	78,14 %

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA TOMOHON

Berdasarkan hasil evaluasi capaian target kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kota Tomohon dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja kategori baik, terlihat dari hasil evaluasi realisasi pencapaian program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.

Secara obyektif masih terdapat berbagai kelemahan kinerja organisasi terutama menyangkut masalah koordinasi baik dengan instansi vertikal terkait dan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tomohon belum sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini membawa implikasi terhadap kinerja pelayanan menjadi kurang maksimal.

Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tomohon dapat dilihat dari keberhasilan secara administrasi perencanaan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang tergambar pada dokumen perencanaan ; RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA, dan RTRW, termasuk kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan seperti kegiatan Musrenbang Kota Tomohon dan kegiatan penelitian dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan.

Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam Eksistensi dan Kapasitasnya untuk membangun dan mewujudkan Visi, misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah di Kota Tomohon melalui program dan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup dan bidang tugasnya, senantiasa diperhadapkan pada kondisi lingkungan riil sekitarnya dengan dinamika dan tuntutan perkembangan yang semakin kompleks. Olehnya secara Organisatoris dalam suatu kerangka sub system daripada system Pemerintahan Kota Tomohon, Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan melakukan pendekatan secara komprehensif dengan menggunakan system Analisa Strength, Weakness, Opportunity, Threat terhadap kondisi Lingkungan kerja, baik secara internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Analisa Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

- Adanya dukungan Legalitas (PERDA dan Perangkat aturan lainnya)
- Kedudukan yang sejajar antara eksekutif dan DPRD

b. Kelemahan (Weakness)

- Kualitas Sumber Daya Manusia belum memadai
- Disiplin, Loyalitas, dan Etos / Profesionalisme kerja belum optimal
- Sarana dan Prasarana penunjang masih terbatas

2. Analisa Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

- Otonomisasi Daerah dan Pengembangan kehidupan demokrasi yang sehat
- Tuntutan Peningkatan Good Governance
- Pelayanan Administrasi yang prima bagi legislatif (DPRD)

b. . Ancaman (Treath)

- Adanya Potensi konflik politik dalam penyampaian aspirasi oleh pengunjuk rasa yang anarkis
- Intervensi kepentingan politik terhadap tupoksi

3. Analisa Lingkungan Strategis

Sebagaimana Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal tersebut diatas, maka diperoleh Analisa Lingkungan Strategis, Sebagai berikut :

a. Strategi Kekuatan (Srength) dan Peluang (Opportunity)

- Didukung dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal Legalitas, sejalan dengan upaya pengembangan kehidupan democrat yang sehat, maka tugas dan fungsi organisasi dapat dijabarkan dengan jelas dan pasti (Good Governance) melalui pelayanan Administrasi yang prima.

b. Strategi Kekuatan (Strength) dan Ancaman (Threath)

- Meminimalisir potensi-potensi penyaluran aspirasi yang anarkis dari intervensi kepentingan politik melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasive serta pelaksanaan tupoksi dengan koordinasi dan sinkronisasi, sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

c. Strategi Kelemahan (Weakness dan Peluang (Opportunity)

- Kualitas Sumber daya manusia yang belum memadai dan disiplin , loyalitas, dan etos / profesionalisme kerja yang belum optimal, terbatasnya sarana dan prasarana serta jumlah personil, secara bertahap dan berjenjang dalam pemahaman tugas dan tanggungjawab pelayanan administrasi akan meningkat seiring dengan tuntutan perkembangan kehidupan demokrasi yang lebih sehat dan peningkatan Good Governance dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD sebagai lembaga Legislatif.

d. Strategi Kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threath)

- Memberdayakan semaksimal mungkin personil serta sarana dan prasarana penunjang yang ada, sejalan dengan peningkatan kualitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diminimalisir potensi konflik maupun interfensi kepentingan dari pihak yang lain

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Tomohon, disajikan dalam table sebagai berikut :

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dari Analisa atas kondisi internal dan Eksternal dan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran unit Kerja Sekretariat DPRD Kota Tomohon maka dapatlah dinyatakan kondisi dan isu-isu strategis sekretariat DPRD Kota Tomohon sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas kelembagaan dalam merespon kehidupan / kesadaran berpolitik masyarakat yang penuh dinamika yang diupayakan melalui kajian-kajian secara komprehensif atas daya dukung / perangkat organisasi.
2. Sekretariat DPRD sesuai dengan bidang tugasnya dalam fungsi koordinasi diharapkan dapat membina hubungan komunikasi / kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kota Tomohon, antara eksekutif dan Legislatif dalam suasana yang harmonis dan kondusif.
3. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara kualitatif dan kuantitatif bagi pelaksanaan organisasi dalam pemahaman dan peningkatan pengetahuan atas pelaksanaan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan secara bertahap, terstruktur dan berkesinambungan, baik melalui Diklat Fungsional / Struktural, bahkan Pendidikan formal.
4. Perlunya pembenahan Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas secara berdayaguna, dengan prioritas program dan kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan kerja dan aset daerah.
5. Personil Sekretariat DPRD diharapkan dapat menjadi salah satu barometer sekaligus panutan dalam peningkatan kualitas disiplin yang berbasis kinerja bagi unit / pemerintahan Daerah Kota Tomohon

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan pada Tahun 2023 sebagai berikut : Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Tomohon merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6	-2	-9	-6
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4,02	SEKRETARIAT DPRD				SEKRETARIAT DPRD		

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur , ASN yang dikenai hukuman disiplin, sumber daya yang memiliki kompetensi, ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan, ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah		20.115.280.900,00	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur , ASN yang dikenai hukuman disiplin, sumber daya yang memiliki kompetensi, ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan, ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah	20.115.280.900,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Tersedianya Dokumen Perencanaan perangkat Daerah, Pelaporan Kinerja dan Dokumen penganggaran	100%	110.635.400,00	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	110.635.400,00
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	43.497.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	43.497.100
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Dokumen RKA	6 Dokumen	2.285.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	2.285.000,00
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	22.612.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	22.612.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	8.975.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.975.000,00
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	9.175.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.175.000,00
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4.676.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4.676.300,00
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	19.415.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	19.415.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan serta Honorarium bagi ASN dan non ASN dan Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	100%	3.266.230.094,00	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	3.266.230.094,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	12 Bulan	2.928.628.094,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.928.628.094,00
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga pengelola Keuangan Yang menerima Honorarium	12 Bulan	332.602.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	332.602.000,00
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	-

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen	2.400.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2.400.000,00
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	12 Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12 Dokumen	-
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan	12 Dokumen	2.600.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	12 Dokumen	2.600.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan RKBMD,Laporan BMD serta penatausahaan BMD	100%	71.244.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	71.244.000,00
4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan	2 Dokumen	1.600.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.600.000,00
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	12 Bulan	1.600.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	1.600.000,00
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	68.044.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	68.044.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan prasarana Bagi ASN, Tersosialisasikan nya Perda serta Tersedianya ASN yang kompeten	100%	1.539.871.900,00	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	1.539.871.900,00
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN yang menerima pakaian Khusus hari hari tertentu	57 Orang	289.817.400,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	57 Orang	289.817.400,00
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan Nakon yang menerima Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	57 Orang	149.366.500,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57 Orang	149.366.500,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	sosialisasi Perda	Jumlah Kegiatan Sosialisasi PERDA	100 Kegiatan	953.600.000,00	sosialisasi Perda	100 Kegiatan	953.600.000,00
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti ASN	12 Bulan	147.088.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	147.088.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Umum	100%	991.086.625,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	991.086.625,00
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang diadakan	12 Bulan	35.965.175,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	35.965.175,00
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	30.930.500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	30.930.500,00
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	12 Bulan	527.813.700,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	527.813.700,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	12 Bulan	118.337.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	118.337.000,00
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Buku Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	300 Buku	22.112.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	300 Buku	22.112.000,00
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	12 Bulan	7.500.000,00	Penyediaan Bahan/Material		7.500.000,00
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu	12 Bulan	90.549.500,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	90.549.500,00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	146.180.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	146.180.000,00
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Kegiatan Penatausahaan	12 Bulan	11.698.750,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	11.698.750,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	SKPD	Arsip Dinamis					
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.146.162.750,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.146.162.750,00
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	-
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas operational atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operational Roda Dua	6 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas operational	6 unit	-
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		10 unit	62.086.600,00	Pengadaan Mebel	10 unit	62.086.600,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Mebelair yang diadakan					
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	242.755.350,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	242.755.350,00
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan/direhab	1 unit	393.080.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	393.080.000,00
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	448.240.800,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	448.240.800,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kantor atau Bangunan Lainnya						
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Administrasi Umum	100%	2.073.821.756,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.073.821.756,00
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos dan Gaji Nakon serta surat menyurat	12 Bulan	1.059.875.200,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.059.875.200,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	181.456.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	181.456.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang menerima Honorarium dan jasa layanan umum lainnya	12 Bulan	832.490.556,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	832.490.556,00
4.02.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	1.356.474.200,00	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	1.356.474.200,00
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	4 Unit	652.385.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	652.385.500,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22 Unit	598.584.400,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22 Unit	598.584.400,00
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang terpelihara	1 Tahun	-	Pemeliharaan Mebel	1 Tahun	-
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	63.940.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	63.940.000,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara secara berkala	12 Bulan	41.564.300,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	41.564.300,00
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Halaman gedung kantor/bangunan gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 tahun	-

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Bulan	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	-
4.02.02.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD dalam Hal pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	8.745.634.225,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	8.745.634.225,00
4.02.02.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima gaji dan Tunjangan	12 Bulan	8.042.228.225,00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12 Bulan	8.042.228.225,00
4.02.02.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia	80 Pasang	603.406.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	80 Pasang	603.406.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medichal chek UP	20 Orang	100.000.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	20 Orang	100.000.000,00
4.02.02.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Fasilitas Untuk Fraksi dan Rapat Rapat Koordinasi	100%	814.119.950	Layanan Administrasi DPRD	100%	814.119.950
4.02.02.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah kebutuhan ATK dan makan minum Rapat fraksi	12 Bulan	17.518.700,00	Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Bulan	17.518.700,00
4.02.02.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Rapat	100 Rapat	796.601.250,00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 Rapat	796.601.250,00
4.02.02.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang tersedia	12 bulan	-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 bulan	-

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, fungsi Pembentukan Perda dan fungsi Anggaran dala Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		16.874.771.100,00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		16.874.771.100,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100%	2.476.809.900	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	2.476.809.900
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8 Kegiatan	4.074.900,00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Kegiatan	4.074.900,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8 Kegiatan	1.382.928.500,00	Pembahasan Rancangan Perda	8 Kegiatan	1.382.928.500,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Jasa tenaga ahli kajian perundang undangan	9 Orang	78.000.000,00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9 Orang	78.000.000,00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterang an Naskah Akademik	Jumlah Tim Jasa tenaga ahli Penyusun naskah akademik	3 Tim	78.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	3 Tim	78.000.000,00
4.02.02.2.01.01	Penyusunan tata tertib dprd	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	933.806.500,00	Penyusunan tata tertib dprd	1 dokumen	933.806.500,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terfasilitasinya Pembahasan mengenai Kebijakan Anggaran	100%	2.972.208.200,00	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	2.972.208.200,00
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8 Kegiatan	568.940.000,00	Pembahasan KUA dan PPAS	8 Kegiatan	568.940.000,00
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8 Kegiatan	800.267.000,00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	8 Kegiatan	800.267.000,00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8 Kegiatan	271.757.500,00	Pembahasan APBD	8 Kegiatan	271.757.500,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8 Kegiatan	497.560.200,00	Pembahasan APBD Perubahan	8 Kegiatan	497.560.200,00
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	20 Kegiatan	-	Pembahasan Laporan Semester	20 Kegiatan	-
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8 Kegiatan	833.683.500,00	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	8 Kegiatan	833.683.500,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terfasilitasinya Kegiatan DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan di Bidang Pemerintahan Hukum, Infrastruktur,Kes ra, Perekonomian,S DA, dan Pengawasan terhadap tindak Lanjut BPK	100%	3.063.886.700,00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	3.063.886.700,00
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	16 Kegiatan rapat	585.809.400,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	16 Kegiatan rapat	585.809.400,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	16 Kegiatan	694.953.400,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16 Kegiatan	694.953.400,00
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	4 Kegiatan	294.303.400,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Kegiatan	294.303.400,00
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	4 Kegiatan	276.303.400,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Kegiatan	276.303.400,00
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	302.263.400,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	4 Kegiatan	302.263.400,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Daya Alam	Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana			Sumber Daya Alam		
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	4 Kegiatan	-	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 Kegiatan	-
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	4 Kegiatan	151.460.200,00	Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Kegiatan	151.460.200,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	5 Kegiatan	758.793.500,00	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 Kegiatan	758.793.500,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	1.966.686.750,00	Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	1.966.686.750,00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti anggota DPRD	3 Kegiatan	518.600.000,00	Pendalaman Tugas DPRD	3 Kegiatan	518.600.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah media massa, elektronik dan online yang mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan DPRD	125 media	59.800.000,00	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	125 media	59.800.000,00
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Honorarium Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang terbayarkan	12 Bulan	210.000.000,00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Bulan	210.000.000,00
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah HonorariumTenaga Ahli Fraksi yan	12 Bulan	150.000.000,00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	12 Bulan	150.000.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		terbayarkan					
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah kegiatan hubungan masyarakat	5 kegiatan	46.172.250,00	Pelaksanaan Kegiatan	5 kegiatan	46.172.250,00
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	12 Kegiatan	982.114.500,00	Penyusunan Program Kerja DPRD	12 Kegiatan	982.114.500,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	100%	1.872.486.900,00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	1.872.486.900,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Masyarakat					
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjunga Kerja dalam daerah	50 Kegiatan	63.000.000,00	Kunjungan Kerja dalam Daerah	50 Kegiatan	63.000.000,00
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	1 Kegiatan	660.678.900,00	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Kegiatan	660.678.900,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan	60 kegiatan	1.148.808.000,00	Pelaksanaan Reses	60 kegiatan	1.148.808.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Reses					
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	985.144.400,00	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	985.144.400,00
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	1 kegiatan	913.646.500,00	Penyusunan Kode Etik DPRD	1 kegiatan	913.646.500,00
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Tahun	71.497.900,00	Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Tahun	71.497.900,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kerja sama	100%	369.120.000,00	Pembahasan Kerja Sama Daerah	100%	369.120.000,00
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar negeri yang terlaksana	1 Tahun	369.120.000,00	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	1 Tahun	369.120.000,00
4.02.02.2.07.01	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah rapat dalam penyusunan bahan publikasi dan dokumentasi	12 Kegiatan	-	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	12 Kegiatan	-

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	100%	3.168.428.250,00	Fasilitasi Tugas DPRD	100%	3.168.428.250,00
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan DPRD	12 Kegiatan	2.162.860.000,00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Kegiatan	2.162.860.000,00
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen LKIP DPRD yang tersusun	1 Dokumen	16.000.000,00	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1 Dokumen	16.000.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Kegiatan Banmus	12 kegiatan	176.562.250,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 kegiatan	176.562.250,00
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	12 Kegiatan	813.006.000,00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Kegiatan	813.006.000,00
				36.990.052.000,00			36.990.052.000,00

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.4 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sekretariat DPRD sebagai penyedia fasilitas DPRD dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sebagai lembaga Legislatif terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, sehingga peranan DPRD menjadi sangat luas dan penting bagi pembangunan daerah khususnya di Kota Tomohon.

3.5 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Terpilih Periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

Tomohon Maju, Berdaya Saing & Sejahtera

Misi :

6. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor
8. Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata Dunia
9. Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan
10. Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih, efektif dan berintegritas.

Tujuan :

1. 1 Mewujudkan pemerintahan dan kemasyarakatan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi public
2. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan Aparatur serta peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

3.6 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan kegiatan ini adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui

capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Renja Sekretariat DPRD Kota Tomohon Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang terimplementasikan melalui program dan kegiatan, indicator kinerja, pendanaan yang direncanakan untuk Tahun 2023 dan prakiraan di tahun 2023, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4,02	SEKRETARIAT DPRD								
4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur , ASN yang dikenai hukuman disiplin, sumber daya yang memiliki kompetensi, ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan, ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah			20.115.280.900,00				20.115.280.900,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan perangkat Daerah,Pelaporan Kinerja dan Dokumen penganggaran		100%	110.635.400,00	DAU		100%	110.635.400,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	43.497.100,00	DAU		4 Dokumen	43.497.100,00
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Dokumen RKA		6 Dokumen	2.285.000,00	DAU		6 Dokumen	2.285.000,00
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA		1 Dokumen	22.612.000,00	DAU		1 Dokumen	22.612.000,00
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	8.975.000,00	DAU		1 Dokumen	8.975.000,00
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	9.175.000,00	DAU		1 Dokumen	9.175.000,00
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	4.676.300,00	DAU		1 Dokumen	4.676.300,00
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Bulan	19.415.000,00	DAU		12 Bulan	19.415.000,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan serta Honorarium bagi ASN dan non ASN dan Tersedianya Dokumen Laporan		100%	3.266.230.094,00	DAU		100%	3.266.230.094,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Keuangan							
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan		12 Bulan	2.928.628.094,00	DAU		12 Bulan	2.928.628.094,00
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga pengelola Keuangan Yang menerima Honorarium		12 Bulan	332.602.000,00	DAU		12 Bulan	332.602.000,00
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan		1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan		1 Buku	2.400.000,00	DAU		1 Buku	2.400.000,00
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Dokumen	-	DAU		12 Dokumen	-
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan		12 Dokumen	2.600.000,00	DAU		12 Dokumen	2.600.000,00
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan RKBMD,Laporan BMD serta penatausahaan BMD		100%	71.244.000,00	DAU		100%	71.244.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan		2 Dokumen	1.600.000,00	DAU		2 Dokumen	1.600.000,00
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD		12 Bulan	1.600.000,00	DAU		12 Bulan	1.600.000,00
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Bulan	68.044.000,00	DAU		12 Bulan	68.044.000,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan prasarana Bagi ASN, Tersosialisasikannya Perda serta Tersedianya ASN yang kompeten		100%	1.539.871.900,00	DAU		100%	1.539.871.900,00
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN yang menerima pakaian Khusus hari hari tertentu		75 Orang	289.817.400,00	DAU		75 Orang	289.817.400,00
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan Nakon yang menerima Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		75 Orang	149.366.500,00	DAU		75 Orang	149.366.500,00
	sosialisasi Perda	Jumlah Kegiatan Sosialisasi PERDA		40 Kegiatan	953.600.000,00	DAU		40 Kegiatan	953.600.000,00
4.02.01.2.05.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Bimtek yang diikuti		12 Bulan	147.088.000,00	DAU		12 Bulan	147.088.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
11	Perundang-Undangan	ASN							
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Umum		100%	991.086.625,00	DAU		100%	991.086.625,00
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan		12 bulan	35.965.175,00	DAU		12 bulan	35.965.175,00
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		1 Paket	30.930.500,00	DAU		1 Paket	30.930.500,00
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia		12 Bulan	527.813.700,00	DAU		12 Bulan	527.813.700,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia		12 Bulan	118.337.000,00	DAU		12 Bulan	118.337.000,00
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		200 Buku	22.112.000,00	DAU		200 Buku	22.112.000,00
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan		12 bulan	7.500.000,00	DAU		12 bulan	7.500.000,00
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu		12 Bulan	90.549.500,00	DAU		12 Bulan	90.549.500,00
4.02.01.2.06.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat Koordinasi dan		12 bulan	146.180.000,00	DAU		12 bulan	146.180.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
09	SKPD	Konsultasi SKPD							
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis		12 Bulan	11.698.750,00	DAU		12 Bulan	11.698.750,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1.146.162.750,00	DAU		100%	1.146.162.750,00
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan		-	-	DAU		-	-
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat yang diadakan		-	-	DAU		-	-
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair yang diadakan		3 unit	62.086.600,00	DAU		3 unit	62.086.600,00
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		12 Bulan	242.755.350,00	DAU		12 Bulan	242.755.350,00
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan/direhab		2 unit	393.080.000,00	DAU		2 unit	393.080.000,00
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		12 Bulan	448.240.800,00	DAU		12 Bulan	448.240.800,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Bangunan Lainnya							
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Administrasi Umum		100%	2.073.821.756,00	DAU		100%	2.073.821.756,00
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos dan Gaji Nakon serta surat menyurat		12 Bulan	1.059.875.200,00	DAU		12 Bulan	1.059.875.200,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	181.456.000,00	DAU		12 Bulan	181.456.000,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang menerima Honorarium dan jasa layanan umum lainnya		12 Bulan	832.490.556,00	DAU		12 Bulan	832.490.556,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1.356.474.200,00	DAU		100%	1.356.474.200,00
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara		4 Unit	652.385.500,00	DAU		4 Unit	652.385.500,00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		22 Unit	598.584.400,00	DAU		22 Unit	598.584.400,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang terpelihara		1 Tahun	-	DAU		1 Tahun	-
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		12 Bulan	63.940.000,00	DAU		12 Bulan	63.940.000,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara secara berkala		12 Bulan	41.564.300,00	DAU		12 Bulan	41.564.300,00
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Halaman gedung kantor/bangunan gedung kantor yang dipelihara		1 tahun	-	DAU		1 tahun	-
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		12 Bulan	-	DAU		12 Bulan	-
4.02.02.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD dalam Hal pembayaran Gaji dan Tunjangan		100%	8.745.634.225,00	DAU		100%	8.745.634.225,00
4.02.02.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima gaji dan Tunjangan		12 Bulan	8.042.228.225,00	DAU		12 Bulan	8.042.228.225,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4.02.02.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia		80 Pasang	603.406.000,00	DAU		80 Pasang	603.406.000,00
4.02.02.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical check UP		20 Orang	100.000.000,00	DAU		20 Orang	100.000.000,00
4.02.02.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Fasilitas Untuk Fraksi dan Rapat Rapat Koordinasi		100%	814.119.950,00	DAU		100%	814.119.950,00
4.02.02.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah kebutuhan ATK dan makan minum Rapat fraksi		12 Bulan	17.518.700,00	DAU		12 Bulan	17.518.700,00
4.02.02.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Rapat		100 Rapat	796.601.250,00	DAU		100 Rapat	796.601.250,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, fungsi Pembentukan Perda dan fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)			16.874.771.100,00	DAU			16.874.771.100,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan		100%	2.476.809.900,00	DAU		100%	2.476.809.900,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		DPRD							
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		8 Kegiatan	4.074.900,00	DAU		8 Kegiatan	4.074.900,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		8 Kegiatan	1.382.928.500,00	DAU		8 Kegiatan	1.382.928.500,00
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Jasa tenaga ahli kajian perundang undangan		9 Orang	78.000.000,00	DAU		9 Orang	78.000.000,00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Tim Jasa tenaga ahli Penyusun naskah akademik		3 Tim	78.000.000,00	DAU		3 Tim	78.000.000,00
4.02.02.2.01.06	Penyusunan Tata tertib DPRD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan		1 Dokumen	933.806.500,00	DAU		1 Dokumen	933.806.500,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terfasilitasinya Pembahasan mengenai Kebijakan Anggaran		100%	2.972.208.200,00	DAU		100%	2.972.208.200,00
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		8 Kegiatan	568.940.000,00	DAU		8 Kegiatan	568.940.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		8 Kegiatan	800.267.000,00	DAU		8 Kegiatan	800.267.000,00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		8 Kegiatan	271.757.500,00	DAU		8 Kegiatan	271.757.500,00
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		8 Kegiatan	497.560.200,00	DAU		8 Kegiatan	497.560.200,00
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		20 Kegiatan	-	DAU		20 Kegiatan	-
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		8 Kegiatan	833.683.500,00	DAU		8 Kegiatan	833.683.500,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terfasilitasinya Kegiatan DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan di Bidang Pemerintahan Hukum, Infrastruktur, Kesra, Perekonomian, SDA, dan Pengawasan terhadap tindak Lanjut BPK		100%	3.063.886.700,00	DAU		100%	3.063.886.700,00
4.02.02.2.03.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang		16 Kegiatan	585.809.400,00	DAU		16 Kegiatan	585.809.400,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
01	Pemerintahan dan Hukum	terlaksana		rapat				rapat	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		16 Kegiatan	694.953.400,00	DAU		16 Kegiatan	694.953.400,00
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		4 Kegiatan	294.303.400,00	DAU		4 Kegiatan	294.303.400,00
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		4 Kegiatan	276.303.400,00	DAU		4 Kegiatan	276.303.400,00
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		4 Kegiatan	302.263.400,00	DAU		4 Kegiatan	302.263.400,00
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		4 Kegiatan	-	DAU		4 Kegiatan	-
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		4 Kegiatan	151.460.200,00	DAU		4 Kegiatan	151.460.200,00
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		5 Kegiatan	758.793.500,00	DAU		5 Kegiatan	758.793.500,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	1.966.686.750,00	DAU		100%	1.966.686.750,00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti anggota DPRD		3 Kegiatan	518.600.000,00	DAU		3 Kegiatan	518.600.000,00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah media massa, elektronik dan online yang mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan DPRD		8 media	59.800.000,00	DAU		8 media	59.800.000,00
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Honorarium Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang terbayarkan		12 Bulan	210.000.000,00	DAU		12 Bulan	210.000.000,00
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Honorarium Tenaga Ahli Fraksi yang terbayarkan		12 Bulan	150.000.000,00	DAU		12 Bulan	150.000.000,00
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah kegiatan hubungan masyarakat		1 kegiatan	46.172.250,00	DAU		1 kegiatan	46.172.250,00
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		12 Kegiatan	982.114.500,00	DAU		12 Kegiatan	982.114.500,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100%	1.872.486.900,00	DAU		100%	1.872.486.900,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjunga Kerja dalam daerah		20 Kegiatan	63.000.000,00	DAU		20 Kegiatan	63.000.000,00
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		1 Kegiatan	660.678.900,00	DAU		1 Kegiatan	660.678.900,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Reses		60 kegiatan	1.148.808.000,00	DAU		60 kegiatan	1.148.808.000,00
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD		100%	985.144.400,00	DAU		100%	985.144.400,00
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD		1 kegiatan	913.646.500,00	DAU		1 kegiatan	913.646.500,00
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD		1 Tahun	71.497.900,00	DAU		1 Tahun	71.497.900,00
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kerja sama		100%	369.120.000,00	DAU		100%	369.120.000,00
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar negeri yang terlaksana		1 Tahun	369.120.000,00	DAU		1 Tahun	369.120.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4.02.02.2.07.01	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah rapat dalam penyusunan bahan publikasi dan dokumentasi		12 Kegiatan	-	DAU		12 Kegiatan	-
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD		100%	3.168.428.250,00	DAU		100%	3.168.428.250,00
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan DPRD		12 Kegiatan	2.162.860.000,00	DAU		12 Kegiatan	2.162.860.000,00
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen LKIP DPRD yang tersusun		1 Dokumen	16.000.000,00	DAU		1 Dokumen	16.000.000,00
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Kegiatan Banmus		10 Kegiatan	176.562.250,00	DAU		10 Kegiatan	176.562.250,00
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana		12 Kegiatan	813.006.000,00	DAU		12 Kegiatan	813.006.000,00
					36.990.052.000,00				36.990.052.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Tomohon disusun berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan Program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya serta dinamika pemerintahan, pembangunan dan kondisi sosial masyarakat. Rencana kerja Tahun 2023 diprioritaskan untuk program dan kegiatan yang dapat terealisasi serta memiliki manfaat bagi organisasi, ASN dan peningkatan pelayanan publik khususnya dalam memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Tomohon dengan memperhatikan aspek norma, kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan anggaran yang tetuang dalam rencana kerja didasarkan pada masukan dari setiap bidang sesuai dengan kondisi riil keuangan dan standar biaya umum yang ditetapkan. Rencana kerja ini akan menjadi acuan penyusunan anggaran Tahun 2023 melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Tomohon.

Pendanaan Perangkat Daerah yang dijabarkan melalui program dan kegiatan diakumulasikan pada rencana kerja sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku. Pendanaan untuk perangkat daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan publik organisasi serta mempercepat terwujudkan tujuan organisasi. Pendanaan perangkat daerah melalui rencana kerja Tahun 2023 telah melalui kajian berdasarkan kondisi riil organisasi dan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4,02	SEKRETARIAT DPRD			

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA A	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur , ASN yang dikenai hukuman disiplin, sumber daya yang memiliki kompetensi, ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan, ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah		20.115.280.900,00
4.02.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Tersedianya Dokumen Perencanaan perangkat Daerah,Pelaporan Kinerja dan Dokumen penganggaran	100%	110.635.400,00
4.02.01.2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	43.497.100
4.02.01.2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Dokumen RKA	6 Dokumen	2.285.000,00
4.02.01.2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	22.612.000,00

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
	SKPD	RKA		
4.02.01.2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	8.975.000,00
4.02.01.2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	9.175.000,00
4.02.01.2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4.676.300,00
4.02.01.2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	19.415.000,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan serta Honorarium bagi ASN dan non ASN dan Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	100%	3.266.230.094,00
4.02.01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	12 Bulan	2.928.628.094,00

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
4.02.01.2.02.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga pengelola Keuangan Yang menerima Honorarium	12 Bulan	332.602.000,00
4.02.01.2.02.0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan	1 Dokumen	-
4.02.01.2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	1 Buku	2.400.000,00
4.02.01.2.02.0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Dokumen	-
4.02.01.2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan	12 Dokumen	2.600.000,00
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan RKBMD,Laporan BMD serta penatausahaan BMD	100%	71.244.000,00
4.02.01.2.03.0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan	2 Dokumen	1.600.000,00
4.02.01.2.03.0	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi dan	12 Bulan	1.600.000,00

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
5	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan BMD		
4.02.01.2.03.0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	68.044.000,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan prasarana Bagi ASN, Tersosialisasikanny a Perda serta Tersedianya ASN yang kompeten	100%	1.539.871.900,00
4.02.01.2.05.0 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN yang menerima pakaian Khusus hari hari tertentu	57 Orang	289.817.400,00
4.02.01.2.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan Nakon yang menerima Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	57 Orang	149.366.500,00
	sosialisasi Perda	Jumlah Kegiatan Sosialisasi PERDA	100 Kegiatan	953.600.000,00
4.02.01.2.05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah Bimtek yang diikuti ASN	12 Bulan	147.088.000,00

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
	Undangan			
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Umum	100%	991.086.625,00
4.02.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	12 bulan	35.965.175,00
4.02.01.2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	30.930.500,00
4.02.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	12 Bulan	527.813.700,00
4.02.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	12 Bulan	118.337.000,00
4.02.01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Buku Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	300 Buku	22.112.000,00

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
4.02.01.2.06.0 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	12 Bulan	7.500.000,00
4.02.01.2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu	12 Bulan	90.549.500,00
4.02.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	146.180.000,00
4.02.01.2.06.1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis	12 Bulan	11.698.750,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.146.162.750,00
4.02.01.2.07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 Unit	-

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
4.02.01.2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas operational atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operational Roda Dua	6 Unit	-
4.02.01.2.07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair yang diadakan	10 unit	62.086.600,00
4.02.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	242.755.350,00
4.02.01.2.07.0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan/direhab	1 unit	393.080.000,00
4.02.01.2.07.1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	448.240.800,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Administrasi Umum	100%	2.073.821.756,00
4.02.01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos dan Gaji Nakon serta surat menyurat	12 Bulan	1.059.875.200,00
4.02.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	181.456.000,00

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
4.02.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang menerima Honorarium dan jasa layanan umum lainnya	12 Bulan	832.490.556,00
4.02.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.356.474.200,00
4.02.01.2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	4 Unit	652.385.500,00
4.02.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22 Unit	598.584.400,00
4.02.01.2.09.0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang terpelihara	1 Tahun	-
4.02.01.2.09.0		Jumlah Peralatan	12 Bulan	63.940.000,00

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya		
4.02.01.2.09.0 9	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara secara berkala	12 Bulan	41.564.300,00
4.02.01.2.09.1 0	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Halaman gedung kantor/bangunan gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	-
4.02.01.2.09.1 1	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	1 tahun	-
4.02.02.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD dalam Hal pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	8.745.634.225,00
4.02.02.2.15.0 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima gaji dan Tunjangan	12 Bulan	8.042.228.225,00

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
4.02.02.2.15.0 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia	20 Pasang	603.406.000,00
4.02.02.2.15.0 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medichal chek UP	20 Orang	100.000.000,00
4.02.02.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Fasilitas Untuk Fraksi dan Rapat Rapat Koordinasi	100%	814.119.950,00
4.02.02.2.16.0 2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah kebutuhan ATK dan makan minum Rapat fraksi	12 Bulan	17.518.700,00
4.02.02.2.16.0 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Rapat	100 Rapat	796.601.250,00
4.02.02.2.16.0 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang tersedia	12 bulan	-

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, fungsi Pembentukan Perda dan fungsi Anggaran dala Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		16.874.771.100,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100%	2.476.809.900,00
4.02.02.2.01.0 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8 Kegiatan	4.074.900,00
4.02.02.2.01.0 2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8 Kegiatan	1.382.928.500,00
4.02.02.2.01.0 3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Jasa tenaga ahli kajian perundang undangan	9 Orang	78.000.000,00

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
4.02.02.2.01.0 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan Naskah Akademik	Jumlah Tim Jasa tenaga ahli Penyusun naskah akademik	3 Tim	78.000.000,00
4.02.02.2.01.0 1	Penyusunan tata tertib DPRD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	933.806.500,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terfasilitasinya Pembahasan mengenai Kebijakan Anggaran	100%	2.972.208.200,00
4.02.02.2.02.0 1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8 Kegiatan	568.940.000,00
4.02.02.2.02.0 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8 Kegiatan	800.267.000,00
4.02.02.2.02.0 3	Pembahasan APBD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8 Kegiatan	271.757.500,00
4.02.02.2.02.0 4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Kegiatan Rapat dan	8 Kegiatan	497.560.200,00

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
		Perjalanan Dinas yang terlaksana		
4.02.02.2.02.0 5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	20 Kegiatan	-
4.02.02.2.02.0 6	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	8 Kegiatan	833.683.500,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terfasilitasinya Kegiatan DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan di Bidang Pemerintahan Hukum, Infrastruktur,Kesra, Perekonomian,SDA, dan Pengawasan terhadap tindak Lanjut BPK	100%	3.063.886.700,00
4.02.02.2.03.0 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	16 Kegiatan rapat	585.809.400,00
4.02.02.2.03.0	Pengawasan Urusan	Jumlah Kegiatan Rapat dan	16	694.953.400,00

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
2	Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Perjalanan Dinas yang terlaksana	Kegiatan	
4.02.02.2.03.0 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	4 Kegiatan	294.303.400,00
4.02.02.2.03.0 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	4 Kegiatan rapat	276.303.400,00
4.02.02.2.03.0 5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	4 Kegiatan rapat	302.263.400,00
4.02.02.2.03.0 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	4 Kegiatan	-
4.02.02.2.03.0 7	Pengawasan	Jumlah Kegiatan Rapat dan	4 Kegiatan	151.460.200,00

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
	Penggunaan Anggaran	Perjalanan Dinas yang terlaksana		
4.02.02.2.03.0 8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	5 Kegiatan	758.793.500,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	1.966.686.750,00
4.02.02.2.04.0 2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti anggota DPRD	3 Kegiatan	518.600.000,00
4.02.02.2.04.0 3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah media massa, elektronik dan online yang mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan DPRD	125 media	59.800.000,00
4.02.02.2.04.0 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Honorarium Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang terbayarkan	12 Bulan	210.000.000,00
4.02.02.2.04.0 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah HonorariumTenaga	12 Bulan	150.000.000,00

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
		Ahli Fraksi yang terbayarkan		
4.02.02.2.04.0 6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah kegiatan hubungan masyarakat	5 kegiatan	46.172.250,00
4.02.02.2.04.0 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	12 Kegiatan	982.114.500,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	1.148.808.000,00
4.02.02.2.05.0 1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjunga Kerja dalam daerah	50 Kegiatan	63.000.000,00
4.02.02.2.05.0 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	1 Kegiatan	660.678.900,00
4.02.02.2.05.0 3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Reses	60 kegiatan	1.148.808.000,00
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengawasan Kode	100%	985.144.400,00

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
		Etik DPRD		
4.02.02.2.06.0 1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	1 kegiatan	913.646.500,00
4.02.02.2.06.0 2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Tahun	71.497.900,00
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kerja sama	100%	369.120.000,00
4.02.02.2.07.0 1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar negeri yang terlaksana	1 Tahun	369.120.000.000,0 0
4.02.02.2.07.0 1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah rapat dalam penyusunan bahan publikasi dan dokumentasi	12 Kegiatan	-
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	100%	3.168.428.250,00
4.02.02.2.08.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan DPRD	12 Kegiatan	2.162.860.000,00

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-5	-6
4.02.02.2.08.0 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen LKIP DPRD yang tersusun	1 Dokumen	16.000.000,00
4.02.02.2.08.0 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Kegiatan Banmus	12 Kegiatan	176.562.250,00
4.02.02.2.08.0 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	12 Kegiatan	813.006.000,00
				36.990.052.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Sekretariat DPRD guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Sekretariat DPRD. Semoga RENJA tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Tomohon.

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada Rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada Rencana kerja 2023 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan

tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2018 , maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tomohon Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tomohon Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Propinsi Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota , RKPD Kota Tomohon dan Renstra Dinas).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
- c. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian rencana kerja ini dibuat sebagai acuan penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat Kota Tomohon khususnya DPRD Kota Tomohon.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan visi dan misi serta program Pemerintah Kota Tomohon, Sekretariat Daerah Kota Tomohon menyusun Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) SKPD untuk pelaksanaan kinerja Tahun 2023 mendatang.

Dalam tahapan penyusunan Rancangan Renja T.A 2023 kerangka acuan yang semestinya digunakan adalah RKPD kota Tomohon yang didasarkan pula pada RPJMD kota Tomohon. Namun demikian penyusunan Rancangan Renja T.A 2023 harus mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Periode tahun ke IV (2021-2025) yang juga tahun terakhir periode RPJPD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Rancangan Renja Sekretariat Daerah Kota Tomohon tahun 2023 memiliki Landasan Hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tomohon Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon tahun 2022-2026.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Surat Edaran Nomor : 27. 1 /WKT/II-2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rancangan Renja Sekretariat Daerah Kota Tomohon dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Tomohon. Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Renja Sekretariat Daerah Kota Tomohon tahun 2023 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Tomohon dengan Sekretariat Daerah Kota Tomohon, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kota Tomohon.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tomohon dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Tomohon,

sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tomohon dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tomohon untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Tomohon disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, susunannya adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENCANA KERJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. P E N U T U P

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan penyusunan RENCANA KERJA Sekretariat Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dilakukan mengikuti Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Landasan hukum yang di gunakan dalam pengelolaan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Tomohon tahun 2021 terlampir dalam tabel.

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan	1
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	1
4.01.01.2.03	Administrasi Barang MIK Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penatausahaan Laporan Barang MIK Daerah	120 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	1 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	72 Laporan	1
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang MIK Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD yang Valid	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	1
	Penatausahaan Barang MIK Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	1
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	625 Paket	120 Paket	125 Paket	125 Paket	120 Paket	120 paket	1 Paket	125 Paket	125 Paket	365 Paket	1
	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	625 Paket	120 Paket	125 Paket	125 Paket	120 Paket	120 paket	1 Paket	125 Paket	125 Paket	365 Paket	1
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawain (Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain, Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi, Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai)	180 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	1 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	108 Dokumen	1
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Administrasi Pegawai (Data Akurat mengenai Kepegawain)	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen	1
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen	1
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Pegawai	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen	1
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	0 orang	2 orang	2 orang	0 orang	0 orang	0 orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	4 orang	0 orang	1 orang	1 orang	0 orang	0 orang	0 orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	2 orang	0 orang	1 orang	1 orang	0 orang	0 orang	0 orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	45000 Paket	9.000 Paket	9.000 Paket	9.000 Paket	9.000 Paket	9.000 Paket	1 Paket	9.000 Paket	9.000 Paket	27.000 Paket	1
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	625 Paket	125 Paket	125 Paket	125 Paket	125 Paket	125 Paket	1 Paket	125 Paket	125 Paket	375 Paket	1
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan (ATK)	125 Paket	125 Paket	125 Paket	125 Paket	125 Paket	125 Paket	1 Paket	0 Paket	0 Paket	250 Paket	2
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	43750 Paket	8.750 Paket	8.750 Paket	8.750 Paket	8.750 Paket	8.750 Paket	1 Paket	8.750 Paket	8.750 Paket	26.250 Paket	1
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	500 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	#DIV/0!	125 Paket	125 Paket	125 Paket	0
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	1 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	72 Laporan	1

	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang difasilitasi	60 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	1	12	Laporan	36	1
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan K	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi	60 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	1	12	Laporan	36	1
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (Kendaraan, Mebel, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Pendukung	905 Unit	148	Unit	181	Unit	148	Unit	1	181	Unit	477	1
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	10 Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	1	2	Unit	6	1
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	700 Unit	132	Unit	165	Unit	132	Unit	1	165	Unit	429	1
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180 Unit	13	Unit	15	Unit	13	Unit	1	15	Unit	41	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Kantor Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Kantor Lainnya	15 Unit	1	Unit	3	Unit	1	Unit	0	3	Unit	5	0
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan)	240 Laporan	48	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	1	48	Laporan	144	1
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	1	12	Laporan	36	1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	1	12	Laporan	36	1
	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	1	12	Laporan	36	1
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	1	12	Laporan	36	1
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Lainnya)	515 Unit	103	Unit	103	Unit	103	Unit	1	103	Unit	309	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dipelihara	90 Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	1	18	Unit	54	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	315 Unit	63	Unit	63	Unit	63	Unit	1	63	Unit	189	1
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	85 Unit	17	Unit	17	Unit	17	Unit	1	17	Unit	51	1
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan dan Taman yang dipelihara	25 Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	1	5	Unit	15	1
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan, Medical Check Up, dan Dana Penunjang Operasional	30 Orang	6	Orang	6	Orang	6	Orang	1	6	Orang	18	1

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	10 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	1	2 Orang	6	1
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Medical Check Up	10 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	1	2 Orang	6	1
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasional	10 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	1	2 Orang	6	1
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	1	50 Paket	150	1
	Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakalan Dinas Serta Atribut Kelengkapannya untuk KDH dan WKDH	250 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	1	50 Paket	150	1
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah	180 Paket/Bulan	36 Paket/Bulan	36 Paket/Bulan	36 Paket/Bulan	36 Paket/Bulan	1	36 Paket/Bulan	108	1
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga KDH	66 Paket/Bulan	12 Paket/Bulan	12 Paket/Bulan	12 Paket/Bulan	12 Paket/Bulan	1	12 Paket/Bulan	36	1
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	66 Paket/Bulan	12 Paket/Bulan	12 Paket/Bulan	12 Paket/Bulan	12 Paket/Bulan	1	12 Paket/Bulan	36	1
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Setda	48 Paket/Bulan	12 Paket/Bulan	12 Paket/Bulan	12 Paket/Bulan	12 Paket/Bulan	1	12 Paket/Bulan	36	1

Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan: Penataan Organisasi	Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang	52 Kegiatan	Rp 4.579.954.632	10 Kegiatan	Rp 355.153.643	0,08	8 Kegiatan	4 Kegiatan	1,00
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	61 Dokumen		7 Dokumen			11 Dokumen	5 Dokumen	0,08
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Kegiatan	Rp 1.622.196.932	1 Kegiatan	Rp 122.020.014	0,08	1 Kegiatan	-	0,00
		Terlaksananya kegiatan/dokumen monitoring dan evaluasi kelembagaan	24 Dokumen		2 Dokumen			6 Dokumen	-	0,00
		Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan anjab dan abk	4 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen	-	0,00
		Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan anjab dan abk	16 Dokumen		1 Dokumen			3 Dokumen	-	0,00
		Terlaksananya kegiatan pembekalan dan penilaian kinerja individu tenaga kontrak	6 Kegiatan		1 Kegiatan			1 Kegiatan	-	0,00
		Jumlah dokumen SKJ	1 Dokumen					1 Dokumen	-	0,00
		Jumlah dokumen TUPOKSI Jabatan OPD	3 Dokumen					1 Dokumen	-	0,00
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	35 Kegiatan	Rp 1.064.904.178	8 Kegiatan	Rp 76.112.328	0,07	6 Kegiatan	4 Kegiatan	0,11
			3 Dokumen							

01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah kegiatan sosialisasi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Kegiatan					1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,00
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Tata Laksana	12 Kegiatan		2 Kegiatan			2 Kegiatan	1 Kegiatan	0,08
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Publik	20 Kegiatan		5 Kegiatan			3 Kegiatan	2 Kegiatan	0,10
		Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis SOP	1 Kegiatan		1 Kegiatan					0,00
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Pelayanan Publik	1 Kegiatan							0,00
		Jumlah Dokumen pedoman Tata Naskah Dinas	1 Dokumen							0,00
		Jumlah Dokumen Pedoman Pakelan Dinas	1 Dokumen							0,00
		Jumlah Dokumen Pedoman Jam Kerja	1 Dokumen							0,00
01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6 Kegiatan	Rp 439.934.869	1 Kegiatan	Rp 28.434.859	0,06	1 Kegiatan	-	0
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi	6 Kegiatan		1 Kegiatan			1 Kegiatan	-	0,00
01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik	4 Dokumen	Rp 133.113.022	1 Dokumen	Rp 76.112.328	0,57	6 Kegiatan	4 Kegiatan	0,11
		Jumlah Dokumen monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen		1 Dokumen					0,00
01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	30 Dokumen	Rp 1.319.804.608	5 Dokumen	Rp 85.304.250	0,06	5 Dokumen	5 Dokumen	0,17
		Jumlah Dokumen LKIP Kota Tomohon Dan LKIP SETDA	12 Dokumen		2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	0,17
		Jumlah Dokumen PK perangkat Daerah	12 Dokumen		2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	0,17
		Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)	6 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	0,17

Bagian Prokopim

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)

4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase cakupan perumusan kebijakan bahan koordinasi	20 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	4	4 laporan		
4.01.01.2.14	Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2	1 laporan	3	1
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	2	2 laporan	5	1
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5 laporan	1 laporan	0 laporan	0	0	0	1 laporan	2

Bagian Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan		Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian	
			Tahun 2021-		Tahun 2021-		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6			7		8=(7/6)	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan barang dan jasa; Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja terkait Perekonomian; Jumlah dokumen evaluasi capaian pengadaan barang/jasa yang terselesaikan; Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja terkait Sumber Daya Alam	45	Rapat/ Rakor/ Laporan	9	Rapat/ Rakor/ Laporan	9	Rapat/ Rakor/ Laporan	100%	9	Rapat/ Rakor/ Laporan	27	240%
	KEGIATAN : PELAKSANAAN KEBIJAKAN	Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja terkait perekonomian	35	Rapat/ Rakor/ Laporan	7	Rapat/ Rakor/ Laporan	7	Rapat/ Rakor/ Laporan	100%	7	Rapat/ Rakor/ Laporan	21	120%
	Sub Kegiatan : Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan rapat Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	25	Rapat	5	Rapat	5	Rapat	100%	5	Rapat	15	60%
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah rapat koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10	Rakor	2	Rakor	2	Rakor	100%	2	Rakor	6	60%
	KEGIATAN : PEMANTAUAN KEBIJAKAN	Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja terkait Sumber Daya Alam	10	laporan	2	laporan	2	laporan	100%	2	laporan	6	120%
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah pemantauan dan evaluasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	5	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	3	60%
	Sub Kegiatan :Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Pertambangan dan Lingkungan Hidup	5	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	3	60%

Bagian Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan		Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian	
			Tahun 2021-		Tahun 2021-		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6			7		8=(7/6)	

		Jumlah kegiatan sosialisasi/workshop pengembangan dan pembinaan SDM pengelola barang dan jasa	6 kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
--	--	---	------------	------------	------------	------------	-----	--	--	--

Bagian Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi d/bidang administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat								
	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan									
	Sub Kegiatan 1 : Penataan Administrasi	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi	36 dokumen							
		Jumlah rapat koordinasi lingkup keasistenan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		2 Rakor	2 Rakor	2 Rakor	100	2 Rakor	6	
		Jumlah lomba administrasi antar kecamatan/kelurahan								
		Jumlah pelatihan dan peningkatan staf kelurahan dan lembaga kemasyarakatan (SDM)								
	Sub kegiatan 2 : Pengelolaan Administrasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi	24 dokumen							
		Jumlah fasilitasi penataan batas wilayah								
		Jumlah rapat penyelesaian masalah batas antar wilayah/daerah		1 Rapat	1 rapat	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	3	
		Jumlah peta batas wilayah secara kartometrik								
		Jumlah pemekaran kecamatan/kelurahan								
	Sub kegiatan 3 : Fasilitasi pelaksanaan koordinasi	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan koordinasi	24 dokumen							
		Jumlah rapat koordinasi penyusunan LPPD		1 Rakor	1 rakor	1 Rakor	100	1 kegiatan	3	
		Jumlah kegiatan evaluasi LPPD		1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	100	1 kegiatan	3	
		Jumlah rapat koordinasi penyusunan LKPI						1 kegiatan		
		Jumlah rapat koordinasi penyusunan SPM						1 kegiatan		
	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah									
	Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi kerjasama daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama daerah	36 dokumen							
		Jumlah penandatanganan kerjasama (MOU)		5 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	15	
		Jumlah fasilitasi/pembentukan, penguatan kerjasama antar daerah		1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	3	
	Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi kerjasama luar daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar daerah	18 dokumen							
		Jumlah fasilitasi pengurusan (jin keluar negeri (KDH/WKDH)		1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3	
		Jumlah fasilitasi kerjasama dengan pihak luar negeri (MOU Luar Negeri)						2 dokumen		
	Sub kegiatan 3 : Evaluasi pelaksanaan kerjasama	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama	4 laporan					1 laporan		

Bagian Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)

	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
	Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Pelaksanaan Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Facilitasi Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum								
	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah kegiatan penandatanganan pakta integritas	3 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan		
		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah	3 Dokumen	5 Ranperda	3 Ranperda	5 Ranperda	100%	6 Ranperda		
		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah	3 Dokumen							
		Jumlah Dokumen Rancangan Surat Keputusan	3 Dokumen							
	Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penanganan Perkara	3 Dokumen	2 Penanganan Perkara	1 Penanganan Perkara	2 Penanganan Perkara	100%	1 Perkara		
		Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Bantuan Hukum	3 Dokumen							
		Jumlah Dokumen Sosialisasi RANHAM	3 Dokumen					1 Kegiatan		
		Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Kabupaten Kota Peduli HAM	3 Dokumen							
		Jumlah Dokumen Kerjasama Bidang Hukum	3 Dokumen							
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah (Perda, Perwako, SK)	13 Dokumen	358 Produk Hukum	268 Produk Hukum	358 Produk Hukum	100%	268 Produk Hukum		
		Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Dokumen					2 Kegiatan		
		Jumlah Dokumen Penyuluhan Hukum SITAHI	3 Dokumen					2 Kegiatan		
		Jumlah Dokumen pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3 Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	Cakupan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Administrasi Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan Masyarakat	16 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	16 Dokumen	-	-
	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Sosial	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	10 Dokumen	-	-
	Sub Kegiatan 1 : Fasilitas Bina Mental dan Sosial	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
		Jumlah tokoh agama penerima honorarium	1 Dokumen					1 Dokumen	-	-
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Safari Natal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Safari Ramadhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Hari Paskah	1 Dokumen					1 Dokumen	-	-
		Jumlah hewan kurban	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan Bagi Tokoh-Tokoh Agama	1 Dokumen					1 Dokumen	-	-
		Jumlah Hibah lembaga Keagamaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
		Jumlah Sosialisasi Kepada Calon Penerima Hibah	1 Dokumen					1 Dokumen	-	-
		Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kepada Penerima Hibah	1 Dokumen					1 Dokumen	-	-
	Sub Kegiatan 2 :Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan ,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan Sosial,transmigrasi, kesehatan,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengelolaan Penduduk dan KB	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	-	-
		Jumlah Rakor Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
		Jumlah Rakor Pemantapan Usaha Kesehatan Sekolah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-

		Jumlah Rapat Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas di bidang pengendalian penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Sipil	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
	Sub Kegiatan 3 :Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kemudaraan dan Olahraga,Pariwisata,Pendidikan,Kebudayaan, Perpustakaan ,Kearsipan , Trantibum Linmas	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	-	-
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
		Jumlah Penyuluhan Narkoba bagi Pemuda	1 Dokumen					1 Dokumen	-	-
		Jumlah Kegiatan Kegiatan olahraga kebugaran di lingkup Setda	1 Dokumen					1 Dokumen	-	-

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian dalam lingkungan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah kota Tomohon tentunya mengacu pada program dan kegiatan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah dengan tolak ukur kinerja pada masing-masing sub bagian yang menyajikan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan memperhatikan fungsi koordinasi terhadap perumusan kebijakan di masing-masing Perangkat Daerah sebagai mitra kerja selang tahun pelaksanaan Renstra.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Sekretariat Daerah Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

2.3 ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Tomohon menghadapi permasalahan dan kendala-kendala melakukan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi antara lain :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang masih belum memadai,
2. Etos kerja yang belum profesional,
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral,
4. Penegakkan hukum yang belum optimal

Hal ini tentu berdampak pada tidak terlaksananya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah secara maksimal. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala tersebut, Sekretariat Daerah Kota Tomohon terus melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dengan memberikan *reward* kepada yang berprestasi dan *punishment* yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Menggalang koordinasi dengan baik dan seoptimal mungkin dengan instansi maupun aparat terkait.
- d. Penerapan sanksi hukum secara tegas sesuai aturan peundang-undangan yang berlaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.2

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Tomohon

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif (Rp.000)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indonesia	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Setda				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indonesia	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Setda				
L1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	6	Dokumen	158.180.099	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	6	Dokumen	77.920.600	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	Jumlah dokumen RKA SKPD	2	Dokumen	41.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	Jumlah dokumen RKA SKPD	2	Dokumen	19.275.200	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	35.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	18.331.900	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	Jumlah Dokumen DPA SKPD	2	Dokumen	41.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	Jumlah Dokumen DPA SKPD	2	Dokumen	18.200.200	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dokumen	41.180.099	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dokumen	22.113.300	
L2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	orang	22.488.819.656	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	orang	15.923.703.814	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	orang	22.488.819.656	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	orang	15.923.703.814	
L2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Umum, Keuangan,Manado	Jumlah Dokumen Keuangan(Admin Pelaksanaan Tugas ASN, SPI, SPP, SPM, Tanggapan Pemeriksaan)	5515	Dokumen	174.659.795	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Umum, Keuangan,Manado	Jumlah Dokumen Keuangan(Admin Pelaksanaan Tugas ASN, SPI, SPP, SPM, Tanggapan Pemeriksaan)	5515	Dokumen	119.756.000	
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	0	Dokumen	0	sub kegiatan direncanakan tidak akan digunakan
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Keuangan (SPI, SPP, SPM) Yang terverifikasi	5467	Dokumen	172.159.795	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Keuangan (SPI, SPP, SPM) Yang terverifikasi	5515	Dokumen	119.756.000	

3	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Keuangan Tanggapan Pemeriksaan	0	Dokumen	2.500.000	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Keuangan Tanggapan Pemeriksaan	0	Dokumen	0	sub kegiatan direncanakan tidak akan digunakan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen Pelaporan Akhir Tahun, Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran)	16	Laporan	52.500.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen Pelaporan Akhir Tahun, Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran)		Laporan	37.171.900	
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akuntansi	12	Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akuntansi	0	Laporan	0	sub kegiatan direncanakan tidak akan digunakan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	22.925.800	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2	Laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2	Laporan	9.684.600	
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	15.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran	2	Laporan	4.561.500	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Penatausahaan Laporan Barang Milik Daerah	24	Laporan	128.435.268	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Penatausahaan Laporan Barang Milik Daerah	24	Laporan	36.783.500	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan BMD yang Valid	12	Laporan	38.435.268	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan BMD yang Valid	12	Laporan	14.340.500	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	12	Laporan	90.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	12	Laporan	22.443.000	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	125	Paket	136.199.838	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	125	Paket	134.916.200	
1	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	125	Paket	136.199.838	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	125	Paket	134.916.200	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi, Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai)	36	Dokumen	85.124.899	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi, Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai)	36	Dokumen	84.730.000	

1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan		Jumlah Dokumen Administrasi Pegawai (Data Akurat mengenai Kepegawalan)	12	Dokumen	29.350.500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan		Jumlah Dokumen Administrasi Pegawai (Data Akurat mengenai Kepegawalan)	12	Dokumen	29.350.000	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	12	Dokumen	35.050.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	12	Dokumen	34.780.000	
3	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	20.724.399	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	20.720.000	
L4	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	119.174.858	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			121.044.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	1	Orang	119.174.858	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	1	Orang	121.044.000	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	1	Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek				
L5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik, Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9000	Paket	1.004.059.447	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik, Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9000	Paket	1.004.058.453	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	125	Paket	158.475.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	125	Paket	158.475.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan (ATK)	0	Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan (ATK)	0	Paket	0	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	8750	Paket	353.400.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	8750	Paket	353.399.580	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik	125	Paket	492.184.447	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik	125	Paket	492.183.873	
L5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	6.012.178.340	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	6.907.785.500	
1	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12	Laporan	1.012.178.340	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12	Laporan	1.012.177.000	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi	12	Laporan	2.000.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi	12	Laporan	5.895.608.500	

1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (Kendaraan, Mebel, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Pendukung)	181	Unit	3.157.832.634	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (Kendaraan, Mebel, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Pendukung)	181	Unit	2.354.718.300
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2	Unit	1.590.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2	Unit	1.516.960.600
	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	165	Unit	250.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel	50	Unit	463.868.500
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15	Unit	567.832.634	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50	Unit	172.258.600
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Kantor Lainnya	3	Unit	750.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Kantor Lainnya	79	Unit	221.630.600
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan)	48	Laporan	11.620.748.121	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan)	48	Laporan	11.620.730.945
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	150.000.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	400.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	399.995.416
	3	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	425.000.000	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	425.000.000
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	10.645.748.121	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	10.645.734.529
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional, Peralatan dan Mesin/Gedung dan Bangunan Lainnya)	105	Unit	5.037.023.875	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional, Peralatan dan Mesin/Gedung dan Bangunan Lainnya)	105	Unit	3.302.962.200

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Yang Dipelihara	18	Unit	900.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Yang Dipelihara	18	Unit	1.279.715.200
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertolakan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	63	Unit	1.500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertolakan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	63	Unit	1.539.097.000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	17	Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	17	Unit	57.350.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Bangunan dan Taman yang dipelihara	5	Unit	2.537.033.875	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Bangunan dan Taman yang dipelihara	5	Unit	427.900.000
1.9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan, Medical Check Up, dan Dana Penunjang Operasional	6	Orang	963.739.441	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan, Medical Check Up, dan Dana Penunjang Operasional	6	Orang	581.739.583
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	2	Orang	463.739.441	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	2	Orang	581.739.583
2	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang Yang Mendapatkan Medical Check Up	2	Orang	100.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang Yang Mendapatkan Medical Check Up	2	Orang	100.000.000
3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasional	2	Orang	400.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasional	2	Orang	400.000.000
1.9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50	Paket	820.000.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50	Paket	335.359.200
1	Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakalan Dinas Serta Atribut Kelengkapannya untuk KDH dan WKDH	50	Paket	820.000.000	Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakalan Dinas Serta Atribut Kelengkapannya untuk KDH dan WKDH	50	Paket	335.359.200
1.10	Facilitasi Kemahasiswaan Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah	36	Paket/Bulan	3.248.906.432	Facilitasi Kemahasiswaan Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah	36	Paket/Bulan	3.049.789.405
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga KDH	12	Paket/Bulan	1.600.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga KDH	12	Paket/Bulan	1.414.485.110
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	12	Paket/Bulan	1.000.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	12	Paket/Bulan	986.499.795
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Setda	12	Paket/Bulan	648.906.432	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Setda	12	Paket/Bulan	648.904.500

Bagian Organisasi											
NO	Rancangan Awal RKPD				Pagu indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	Kegiatan: Penataan Organisasi	Tomohon, Provinsi,Luar	Cakupan Pelaksanaan	11 Dokumen 2 Laporan	324.921.400	Kegiatan: Penataan Organisasi	Tomohon, Provinsi,Luar	Cakupan Pelaksanaan	11 Dokumen 2 Laporan	324.921.400	
2	Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Tomohon, Provinsi,Luar Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan anjab,ABK dan Evajab, kegiatan pembekalan dan penilaian kinerja individu tenaga kontrak).	3 Dokumen	70.648.920	Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Tomohon, Provinsi,Luar Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan anjab,ABK dan Evajab, kegiatan pembekalan dan penilaian kinerja individu tenaga kontrak).	3 Dokumen	70.648.920	
3	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tomohon, Provinsi,Luar Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Standart Pelayanan Publik).	2 Laporan	62.493.470	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tomohon, Provinsi,Luar Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Standart Pelayanan Publik).	2 Laporan	62.493.470	
4	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tomohon, Provinsi,Luar Daerah	Terlaksananya Peningkatan Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	1 Dokumen 1 Dokumen	79.197.200	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tomohon, Provinsi,Luar Daerah	Terlaksananya Peningkatan Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	1 Dokumen 1 Dokumen	79.197.200	
5	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tomohon, Provinsi,Luar Daerah	Terlaksananya Monitoring, Jumlah Dokumen monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen 2 Dokumen	17.822.800	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tomohon, Provinsi,Luar Daerah	Terlaksananya Monitoring, Jumlah Dokumen monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen 2 Dokumen	17.822.800	

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tomohon, Provinsi, Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan	5 Dokumen	48.292.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tomohon, Provinsi, Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan	5 Dokumen	48.292.400	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Jumlah Dokumen LKIP Kota Tomohon Dan LKIP SETDA, PK perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU))	3 Dokumen				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Jumlah Dokumen LKIP Kota Tomohon Dan LKIP SETDA, PK perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU))	3 Dokumen		
7	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tomohon, Provinsi, Luar Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	46.464.610	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tomohon, Provinsi, Luar Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	46.464.610	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		

Bagian Prokopim

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase cakupan penusunan kebijakan bahan koordinasi	3 laporan	319.952.150	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tomohon	Presentase cakupan penusunan kebijakan bahan koordinasi	4 laporan	1.512.392.150	
	Kegiatan Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					
1	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitas Keprotokolan	1 laporan	119.632.300	Fasilitas Keprotokolan	Tomohon	Jumlah Laporan Fasilitas Keprotokolan	1 laporan	182.072.300	HIT 3 hari 2 malam Selon 3 kebawah : @737.000 x 40 org = Rp.29.480.000 Kepala Daerah/Eselon 1 3 hari 2 malam @870.000 x 2 org = Rp. 3.480.000
2	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 laporan	141.488.150	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Tomohon	Jumlah berita sosialisasi kegiatan pimpinan/ pemerintah kota tomohon	2 laporan	1.271.488.150	Incentif wartawan 540.000.000 SPPD wartawan 590.000.000
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 laporan	58.831.700	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tomohon	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 laporan	58.831.700	

Bagian Perekonomian

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				475.270.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				475.270.800	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TOMOHOH	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	43.944.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TOMOHOH	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	43.944.000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
	PELAKSANAAN KEBUAKAN PEREKONOMIAN					PELAKSANAAN KEBUAKAN PEREKONOMIAN					
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	TOMOHOH	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 dokumen	75.840.800	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	TOMOHOH	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 dokumen	75.840.800	
	Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	TOMOHOH	Jumlah laporan hasil pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 laporan	142.862.360	Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	TOMOHOH	Jumlah laporan hasil pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 laporan	142.862.360	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	TOMOHOH	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 dokumen	17.933.900	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	TOMOHOH	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 dokumen	17.933.900	

	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Pertambangan dan Lingkungan Hidup	TOMOHOH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 dokumen		34.470.640		Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Pertambangan dan Lingkungan Hidup	TOMOHOH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 dokumen	34.470.640	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	TOMOHOH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.	1 dokumen		11.229.200		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	TOMOHOH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.	1 dokumen	11.229.200	

Bagian Pembangunan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	tomohon				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	tomohon				
	Perencanaan, Penganggaran,	tomohon				Perencanaan, Penganggaran,	tomohon				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tomohon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	30.133.510	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tomohon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	28.503.250	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tomohon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	31.457.635	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tomohon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	23.216.900	
	PROGRAM PEREKONOMIAN	tomohon				PROGRAM PEREKONOMIAN	tomohon				

	Belaksanaan Administrasi Pembangunan	tomohon						Belaksanaan Administrasi	tomohon			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (dokumen Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Program Pembangunan Daerah, dokumen kegiatan Forum Perangkat Daerah)							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (dokumen Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Program Pembangunan Daerah, dokumen kegiatan Forum Perangkat Daerah)		
	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	tomohon		2 dokumen		93.638.259		Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	tomohon		2 dokumen	31.243.450
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (laporan bahan pemantauan, laporan bahan perumusan, laporan Kegiatan sulut expo, laporan kegiatan pembinaan dan fasilitas)							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (laporan bahan pemantauan, laporan bahan perumusan, laporan Kegiatan sulut expo, laporan kegiatan pembinaan dan fasilitas)		
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	tomohon		7 laporan		209.763.433		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	tomohon		7 laporan	126.967.100

			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan RPK, Laporan, Laporan Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kegiatan Rakor pembangunan daerah, laporan eprs)	13 laporan	153.897.149			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan RPK, Laporan, Laporan Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kegiatan Rakor pembangunan daerah, laporan eprs)	13 laporan	333.510.150	
	Bengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	tomohon					Bengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	tomohon			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	35.000.000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	131.269.000	
	Benyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Benyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

Sajian PBJ

Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan
---------------------	--	--------------------------

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
1	Pengelolaan Pengadaan Barang						Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa					
1	an pengelolaan pengadaan barang	Bagian PBJ	Jumlah dokumen hasil pengadaan barang dan jasa	12 dokumen	272.000		Sub kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Bagian PBJ	Jumlah dokumen hasil pengadaan barang dan jasa	12 dokumen	300.000	
2	in pengelolaan pengadaan secara	Bagian PBJ	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	12 dokumen	677.204		Sub kegiatan pengelolaan pengadaan secara elektronik	Bagian PBJ	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	12 dokumen	720.000	
3	pembinaan dan advokasi pengadaan	Bagian PBJ	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	80 orang	90.140		Sub kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Bagian PBJ	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	80 orang	100.000	

Bagian Pemerintahan

Rancangan Awal RKPD												
NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian Pemerintahan	Cakupan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi dibidang administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		1.477.093.029		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian Pemerintahan	Cakupan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi dibidang administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		550.257.000	
	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan				999.069.450		Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan				428.938.300	
	Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi Pemerintahan	4 dokumen	242.458.820		Sub Kegiatan : Penataan A	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen	4 dokumen	62.350.638	
			Jumlah rapat koordinasi lingkup keasistenan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat						Jumlah rapat koordinasi lingkup keasistenan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			

				Jumlah lomba administrasi antar kecamatan/kelurahan						Jumlah lomba administrasi antar kecamatan/kelurahan				
				Jumlah pelatihan dan peningkatan staf kelurahan dan lembaga kemasyarakatan (SDM)						Jumlah pelatihan dan peningkatan staf kelurahan dan lembaga kemasyarakatan (SDM)				
		Sub kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	4 dokumen		370.820.880		Sub kegiatan : Pengelolaan	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	4 dokumen		117.997.377
				Jumlah fasilitasi penataan batas wilayah							Jumlah fasilitasi penataan batas wilayah			
				Jumlah rapat penyelesaian masalah batas antar wilayah/daerah							Jumlah rapat penyelesaian masalah batas antar wilayah/daerah			
				Jumlah peta batas wilayah secara kartometrik							Jumlah peta batas wilayah secara kartometrik			
				Jumlah pemekaran kecamatan/kelurahan/lingkungan							Jumlah pemekaran kecamatan/kelurahan			
		Sub kegiatan : Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	4 dokumen		383.789.750		Sub kegiatan : Fasilitasi pe	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen	4 dokumen		248.390.285
				Jumlah rapat koordinasi penyusunan LPPD							Jumlah rapat koordinasi penyusunan LPPD			
				Jumlah kegiatan evaluasi LPPD							Jumlah kegiatan evaluasi LPPD			
				Jumlah rapat koordinasi penyusunan UKPJ							Jumlah rapat koordinasi penyusunan UKPJ			
				Jumlah rapat koordinasi penyusunan SPM							Jumlah rapat koordinasi penyusunan SPM			
		Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah					478.023.579		Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah					121.318.700
		Sub Kegiatan : Fasilitasi kerjasama dalam negeri	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	6 dokumen		366.944.633		Sub Kegiatan : Fasilitasi ke	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen	6 dokumen		117.738.700

				Jumlah penandatanganan kerjasama (MOU)						Jumlah penandatanganan kerjasama (MOU)			
				Jumlah fasilitasi/pembentukan, penguatan kerjasama antar daerah						Jumlah fasilitasi/pembentukan, penguatan kerjasama antar daerah			
		Sub Kegiatan : Fasilitasi kerjasama luar negeri	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar negeri	3 dokumen		111.078.946		Sub Kegiatan : Fasilitasi kerjasama	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar negeri	3 dokumen	1.080.000
				Jumlah fasilitasi pengurusan ijin keluar negeri (KDH/WKDH)							Jumlah fasilitasi pengurusan ijin keluar negeri (KDH/WKDH)		
				Jumlah fasilitasi kerjasama dengan pihak luar negeri (MOU Luar Negeri)							Jumlah fasilitasi kerjasama dengan pihak luar negeri (MOU Luar Negeri)		
		Sub kegiatan : Evaluasi pelaksanaan Kerjasama	Bagian Pemerintahan	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama	1 laporan				Sub kegiatan : Evaluasi pelaksanaan kerjasama	Bagian Pemerintahan	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama	1 laporan	2.300.000
				Jumlah evaluasi pelaksanaan kerjasama							Jumlah evaluasi pelaksanaan kerjasama		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	PROGRAM PENUNJANG	Bagian Hukum				PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Bagian Hukum				
	Administrasi Umum					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Hukum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	152.091.250	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Hukum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	152.091.250	
	PROGRAM	Bagian Hukum				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Bagian Hukum				
	Fasilitasi dan Koordinasi					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					

		Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Dokumen Penanganan Perkara, Dokumen Rapat Koordinasi Bantuan Hukum, Dokumen Sosialisasi RANHAM, Dokumen Rapat Koordinasi Kabupaten Kota Peduli HAM, Dokumen Kerjasama Bidang Hukum	4 Dokumen	31.791.150			Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Dokumen Penanganan Perkara, Dokumen Rapat Koordinasi Bantuan Hukum, Dokumen Sosialisasi RANHAM, Dokumen Rapat Koordinasi Kabupaten Kota Peduli HAM, Dokumen Kerjasama Bidang Hukum	4 Dokumen	88.212.450	
		Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen rancangan Peraturan Daerah, dokumen rancangan Peraturan Kepala Daerah, dokumen rancangan Surat Keputusan, dokumen penandatanganan pakta integritas)	3 Dokumen	33.024.100			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen rancangan Peraturan Daerah, dokumen rancangan Peraturan Kepala Daerah, dokumen rancangan Surat Keputusan, dokumen penandatanganan pakta integritas)	3 Dokumen	116.911.300	

		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen Peraturan Daerah, dokumen Peraturan Kepala Daerah, dokumen Surat Keputusan, dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dokumen Penyuluhan Hukum SITAHTU, dokumen pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	6 Dokumen	118.057.200			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen Peraturan Daerah, dokumen Peraturan Kepala Daerah, dokumen Surat Keputusan, dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dokumen Penyuluhan Hukum SITAHTU, dokumen pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	6 Dokumen	147.748.700	
--	--	--	--------------	---	-----------	-------------	--	--	--	--------------	---	-----------	-------------	--

Bagian Kesra

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif (Rp.000)	
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			16 Dokumen		8.201.842.330	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Cakupan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Administrasi Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan Masyarakat	16 Dokumen		7.621.720.000	
	Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	TOMOHOH	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen		7.696.427.805	Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	TOMOHOH	Presentasi Dibidang Kesejahteraan Rakyat Yang Difasilitasi dan di Koordinasikan	10 Dokumen		7.621.720.000	

		Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Bina Mental dan Spritual	TOMOHON	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama	1 Dokumen	603.995.388		Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Bina Mental dan Spritual	TOMOHON	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	1 Dokumen	7.467.750.000	
			TOMOHON	Jumlah tokoh agama penerima honararium	1 Dokumen	2.160.000.000			TOMOHON	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama	1 Dokumen	429.250.000	
			TOMOHON	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Safari Natal	1 Dokumen	137.500.000			TOMOHON	Jumlah tokoh agama penerima honararium	1 Dokumen	1.396.000.000	
			TOMOHON	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Safari Ramadhan	1 Dokumen	32.432.417			TOMOHON	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Safari Natal	1 Dokumen	35.000.000	
			TOMOHON	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Hari Paskah	1 Dokumen	137.500.000			TOMOHON	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Safari Ramadhan	1 Dokumen	15.000.000	
			TOMOHON	Jumlah hewan Kurban	1 Dokumen	60.000.000			TOMOHON	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Hari Paskah	1 Dokumen	35.000.000	
			TOMOHON	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan Bagi Tokoh-Tokoh Agama	1 Dokumen	82.500.000			TOMOHON	Jumlah hewan Kurban	1 Dokumen	35.000.000	
			TOMOHON	Jumlah Hibah Jembaga Keagamaan	1 Dokumen	4.345.000.000			TOMOHON	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan Bagi Tokoh-Tokoh Agama	1 Dokumen	15.000.000	
			TOMOHON	Jumlah Sosialisasi Kepada Calon Penerima Hibah	1 Dokumen	82.500.000			TOMOHON	Jumlah Hibah Jembaga Keagamaan	1 Dokumen	5.483.000.000	
			TOMOHON	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kepada Penerima Hibah	1 Dokumen	55.000.000			TOMOHON	Jumlah Sosialisasi Kepada Calon Penerima Hibah	1 Dokumen	15.000.000	

		Sub Kegiatan 2 :Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan „Evaluasi dan Capain Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan Sosial,transmigra si, kesehatan,pembe rdayaan perempuan dan perlindungan anak,administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil,Pemberdaya an Masyarakat dan Desa, Pengelolaan Penduduk dan KB	3 Dokumen		338.214.525		Sub Kegiatan 2 :Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kepada Penerima Hibah	3 Dokumen		7.500.000	
				Jumlah Rakor Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan	1 Dokumen		176.471.350				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan „Evaluasi dan Capain Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan Sosial,transmigra si, kesehatan,pembe rdayaan perempuan dan perlindungan anak,administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil,Pemberdaya an Masyarakat dan Desa, Pengelolaan Penduduk dan KB	1 Dokumen		88.000.000	

			TOMOHON	Jumlah Rakor Pemantapan Usaha Kesehatan Sekolah	1 Dokumen	84.743.175			TOMOHON	Jumlah Rakor Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan	1 Dokumen	35.000.000		
			TOMOHON	Jumlah Rapat Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas di bidang pengendalian penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Sipil	1 Dokumen	77.000.000			TOMOHON	Jumlah Rakor Pemantapan Usaha Kesehatan Sekolah	1 Dokumen	28.000.000		
		Sub Kegiatan 3 :Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Terkait Kesejahteraan Masyarakat	TOMOHON	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,Pariwisata,Pendidikan,Kebudayaan, Perpustakaan ,Kebersihan ,Tertibum Linmas	3 Dokumen	167.200.000		Sub Kegiatan 3 :Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Terkait Kesejahteraan Masyarakat	TOMOHON	Jumlah Rapat Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas di bidang pengendalian penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Sipil	3 Dokumen	25.000.000		
			TOMOHON	Jumlah Kegiatan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi	1 Dokumen	44.000.000			TOMOHON	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,Pariwisata,Pendidikan,Kebudayaan, Perpustakaan ,Kebersihan ,Tertibum Linmas	3 Dokumen	66.000.000		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Tomohon

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah
: Sekretariat Daerah

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tomohon, Provinsi,Luar Daerah	Pemberian Sarana KeagamaanPemberian Sarana Keagamaan Bantuan Sosial untuk Gereja		
2.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tomohon, Provinsi,Luar Daerah	Pemekaran Lingkungan		
3.	Pendokumentasian Produk hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tomohon, Provinsi,Luar Daerah	Pembinaan Hukum dan Ham		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan pada rencana kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Tomohon memuat hubungan antara Visi, misi, Tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan pada peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota Tomohon tahun 2015-2025. Serta Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2022-2026 yang menitik beratkan pada arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dan RPJMD.

Rancangan RENJA tahun 2023 ini berpedoman pada arah kebijakan RPJPD periode tahun ke IV (2022-2026) RPJPD Kota Tomohon tahun 2005-2025.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

A. TUJUAN

Penetapan tujuan pada umumnya di dasarkan pada faktor- faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan dicapai dalam jangka waktu 1 tahun.

Adapun bentuk tujuan yang akan dicapai Tahun 2023 yakni berjalannya Misi guna mewujudkan Visi, sesuai penjabaran RPJMD periode ke IV (2005-2025) adalah sebagai berikut :

- **Mewujudkan Kota Tomohon Yang Asri dan lestari**

B. SASARAN

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Tomohon telah menetapkan 5 (Lima) sasaran yang hendak dicapai, terdiri dari :

- 1 Tercapainya hasil-hasil dari penyelenggaraan Pemerintah .
- 2 Meningkatnya Kualitas Dokumen Pemerintahan Daerah.
- 3 Meningkatnya Kualitas pelayanan teknis administrasi perangkat daerah.

- 4 Terwujudnya peraturan Aparatur yang mencerminkan nilai-nilai good governance dalam memberikan pelayanan Publik.
- 5 Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan layanan e-government yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam penjabaran program dan kegiatan tahun 2023 nanti mengacu pada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan mempertimbangkan pencapaian SDGs, termasuk program dan kegiatan yang mendukung program pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan potensi ekonomi yang mempertimbangkan pendistribusian program dan kegiatan di sejumlah lokasi sesuai dengan kebutuhan danaa/pagu indikatif yang bersumber dari dana APBD kota Tomohon. Dalam penjabaran program dan kegiatan ini, ada beberapa diantaranya merupakan rumusan yang tidak sesuai dengan rancangan Awal Renja tahun sebelumnya karena kegiatan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Adapun tabel rencana program dan kegiatan perangkat daerah Sekretariat Daerah Kota Tomohon tahun 2023 dan prakiraan maju rencana tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pagu Indikatif	
----------------	--

Kode				Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maje Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
													Nasional	Daerah						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						16,855,443,697								16,595,400,185	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	16,855,443,697						100 Persen	16,595,400,185		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Menetima Gaji dan Tunjangan	Orang		Orang	125 Orang	16,073,703,814						125 Orang	15,645,286,800		
4	01	01	2.02	01	Perryediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menetima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/bulan	16,073,703,814	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	ASN Sekretariat Daerah Kota Tomohon	125 Orang/bulan	15,645,286,800	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menetima Dana Operasional Jumlah Orang Yang Menetima Gaji dan Tunjangan	Orang Orang		Orang Orang	2 Orang 2 Orang	781,739,883						2 Orang 2 Orang	950,113,385		
4	01	01	2.11	01	Perryediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menetima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	381,739,883	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	510,113,385	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.11	04	Perryediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menetima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	440,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						475,270,800								358,752,058	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	43,944,000						100 Persen	50,208,400		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	43,944,000						1 Laporan	50,208,400		
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	43,944,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	1 Laporan	50,208,400	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perkeonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa	persen		persen	100 persen	431,326,800						100 persen	308,543,650		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Laporan	352,390,660						1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Laporan	251,454,500	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	75,840,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	1 Dokumen	58,077,250	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	142,952,360	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	5 Laporan	84,657,540	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	17,933,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	1 Dokumen	20,719,710	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen	58,090,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	1 Dokumen	44,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah/ Pemangku Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD					1 Dokumen	57,663,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	44,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen Dokumen			Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	78,936,140					1 Dokumen 1 Dokumen	57,089,150		
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja					1 Dokumen	33,236,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	04. Meningkatkan kedarifatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian,perikanan peternakan) dan pemberdayaan UMKM	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	21,934,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian					1 Dokumen	34,470,640		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana 05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	22,575,440	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan					1 Dokumen	11,229,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana 05. Pelestarian SDA lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	12,579,710	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							585,933,000							1,481,577,733	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
4 01 01	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%			%	100 %	21,676,000						100 %	56,775,400		
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	laporan			laporan	2 laporan	21,676,000					2 laporan	56,775,400		
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	21,676,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial,	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	1 Laporan	56,775,400	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah			
											pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif			
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama pemerintah daerah dan kesejahteraan rakyat	%		%	100 %	544,257,000					100 %	1,624,802,333	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen	4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen	428,938,390					4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen	1,098,976,395	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				6 Dokumen	62,550,638	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	6 Dokumen	266,704,702	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	117,997,377	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	3 Dokumen	407,902,968	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	248,390,285	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	4 Dokumen	424,368,725	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar negeri Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama	dokumen dokumen laporan		dokumen dokumen laporan	6 dokumen 3 dokumen 1 laporan	115,318,700					6 dokumen 3 dokumen 1 laporan	525,825,938	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				6 Dokumen	111,738,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	6 Dokumen	403,630,097	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				3 Dokumen	1,080,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk	3 Dokumen	91,936,841	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan		Berdaya Saling	pertumbuhan ekonomi yang berkualitas				
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	2,500,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	03. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	SKPD	1 Laporan	30,250,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						7,921,750,000							9,072,026,564	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	73,327,800						100 Persen	50,000,000	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	laporan		laporan	1 laporan	73,327,800						1 laporan	50,000,000	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	73,327,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemetaan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	12 Laporan	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase dibidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi dan di koordinasikan	%		%	100 %	7,848,422,200						100 %	9,022,026,564	
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan bina mental Spiritual Jumlah Dokumen hasil kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat Jumlah Dokumen hasil kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen	10 dokumen 3 dokumen 3 dokumen	7,848,422,200						10 dokumen 3 dokumen 3 dokumen	9,022,026,564	
4 01 02 2.02 01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Kegiatan Pelaksanaan BKSAJJA, Tokoh Agama Penerima Honorarium, Kegiatan Pelaksanaan Safari Natal, Safari Ramadhan, Penyelenggaraan Hari Pesak, Hewan Kurban, Kegiatan Pembinaan Keagamaan bagi Tokoh Agama, Hibah Lembaga Keagamaan, Sosialisasi kepada Calon Penerima Hibah, Monitoring dan Evaluasi Kepada Penerima Hibah				0 Dokumen 10 Dokumen	7,705,005,414	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemetaan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan Tokoh agama	0 Dokumen 10 Dokumen	8,466,070,586	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pembendayaan Penempuan dan Perfindungan Anak,				0 Dokumen 3 Dokumen	80,973,386	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemetaan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola	Masyarakat dan Tokoh agama	0 Dokumen 3 Dokumen	372,035,978	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Pemanggunng Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Raker Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Raker Pemantapan UKS, Rapat Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas di bidang pengendalian penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Capil								pemerintahan yang efektif					
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Melalui Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Keamipin, Transibum Linmas Kegiatan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gunung, Penyuluhan Narkoba Bagi Pemuda, Kegiatan Olahraga Kebugaran di Lingkup Senda				0 Dokumen 3 Dokumen	62,443,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Masyarakat dan Tokoh agama	0 Dokumen 3 Dokumen	183,920,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						528,317,200							1,192,779,269	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	50,000,000						100 Persen	49,500,000	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	12 Laporan	50,000,000						12 Laporan	49,500,000	
4 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	15,635,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN dan Kelompok Masyarakat	12 Laporan	22,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	34,365,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN dan Kelompok Masyarakat	12 Laporan	27,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa	Persen		Persen	100 Persen	478,317,200						100 Persen	1,143,279,269	
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Dokumen Dokumen Orang		Dokumen Dokumen Orang	12 Dokumen 12 Dokumen 80 Orang	478,317,200						12 Dokumen 12 Dokumen 80 Orang	1,143,279,269	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Pemanggang Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Barang dan Jasa													
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	45,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN dan Kelompok Masyarakat	12 Dokumen	299,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	403,317,200	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN dan Kelompok Masyarakat	12 Dokumen	744,925,269	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				80 Orang	30,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	ASN dan Kelompok Masyarakat	80 Orang	99,154,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						569,952,150						380,314,100		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	jumlah laporan	laporan		laporan	12 laporan	569,952,150						12 laporan	380,314,100	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan		laporan	12 laporan	4,440,000						12 laporan	4,440,000	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	sekretariat daerah kota tomohon	1 Laporan	4,440,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	laporan laporan laporan		laporan laporan laporan	1 laporan 2 laporan 1 laporan	565,512,150						1 laporan 2 laporan 1 laporan	375,874,100	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	jumlah laporan fasilitasi keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 laporan 0 Laporan	115,192,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	perangkat daerah dan stakeholder terkait	1 laporan 0 Laporan	119,632,300	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	391,488,150	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	perangkat daerah dan stakeholder terkait	1 Laporan	141,488,150	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Tomohon

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Pemanggang Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	58,831,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	perangkat daerah dan stakeholder terkait	1 Laporan	114,753,650	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						504,963,700		854,566,009						
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	152,091,250						100 Persen	315,722,209	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	12 Laporan	152,091,250						12 Laporan	315,722,209	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	152,091,250	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Politik/hukum Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	12 Laporan	315,722,209	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Administrasi Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	352,872,450						100 Persen	538,843,800	
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	5 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen	352,872,450						5 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen	538,843,800	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.03 01	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen Penandatanganan Pakta Integritas Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Surat Keputusan Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	88,212,450	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Politik/hukum Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	130,936,135	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.03 02	Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Kerjasama Bidang Hukum Jumlah Dokumen Penanganan Perkara Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Bantuan hukum Jumlah Dokumen Rapat koordinasi Kabupaten Kota Peduli HAM Jumlah Dokumen Sosialisasi RANHAM Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Kasus	116,911,300	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Politik/hukum Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Kasus	145,950,475	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jumlah Dokumen Penyuluhan Hukum SITAHU Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Surat Keputusan Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	147,748,700	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Politik/hukum Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	261,957,190	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						29,487,726,203						40,465,970,598		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	29,487,726,203					100 Persen	40,465,970,598		
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	77,920,600					6 Dokumen	173,996,109		
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	19,275,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan	Dokumen Perencanaan (RKA/DPA)	3 Dokumen	45,100,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											tata kelola pemerintahan yang efektif				
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	18,331,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahnteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dokumen Perencanaan (RKA/DPA)	1 Dokumen	38,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	18,200,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahnteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dokumen Perencanaan (RKA/DPA)	1 Dokumen	45,100,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	22,113,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahnteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Dokumen Perencanaan (RKA/DPA)	1 Dokumen	45,298,109	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	6 Laporan	156,927,900						6 Laporan	249,875,775	
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5015 Dokumen	119,756,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahnteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	5015 Dokumen	189,375,775	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	22,925,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahnteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	2 Laporan	22,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	9,684,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahnteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	2 Laporan	8,250,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	4,561,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan	Bagian Umum Setda Kota Tomohon	2 Dokumen	16,500,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Saasan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah			
								Kelurahan		Kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif				
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	24 Laporan	36,783,500					24 Laporan	141,278,795	
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	14,340,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemetaan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	12 Laporan	42,278,795	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	22,443,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemetaan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	12 Laporan	99,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Jumlah Pakai Dinas serta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dan Simbak	Dokumen Paket Orang		Dokumen Paket Orang	36 Dokumen 125 Paket 2 Orang	340,690,200					36 Dokumen 125 Paket 2 Orang	374,549,555	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				125 Paket	134,916,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemetaan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	125 Paket	149,819,822	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	29,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemetaan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	12 Dokumen	32,285,550	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	34,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemetaan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	12 Dokumen	38,555,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	20,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemetaan pendidikan, kesehatan	12 Dokumen	22,796,839	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			dan penanganan kejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif				
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	121,044,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	1 Orang	131,092,344	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Komponen Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Tamu Jumlah Logistik	Paket Paket Laporan Laporan Paket		Paket Paket Laporan Laporan Paket	8700 Paket 150 Paket 12 Laporan 12 Laporan 150 Paket	8,111,843,953						8700 Paket 150 Paket 12 Laporan 12 Laporan 150 Paket	8,554,465,392	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				250 Paket	158,475,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	250 Paket	174,322,500	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				600 Paket	492,183,873	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	600 Paket	541,402,892	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8150 Paket	353,399,580	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	8150 Paket	388,740,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	1,212,177,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	12 Laporan	1,550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5,895,608,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan	Sekretariat Daerah	12 Laporan	5,900,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan		kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif					
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kantor	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	2 Unit 50 Unit 50 Unit 79 Unit	2,354,718,300					2 Unit 50 Unit 50 Unit 79 Unit	3,473,615,897		
4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	1,516,960,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	2 Unit	1,749,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	443,868,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	50 Unit	275,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	172,258,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	50 Unit	624,615,897	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				79 Unit	221,630,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	79 Unit	825,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Benda Pos yang disediakan Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perengkapan dalam seliap acara kantor Jumlah Laporan Jasa (Tenaga Kontrak, Kebersihan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan)	Laporan Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	11,620,730,945					12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	16,812,500,000		
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Sunat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sunat Menyurat				12 Laporan	150,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	165,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan		dan penanganan kejahateanan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif					
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	399,996,415	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kejahateanan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	440,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	425,000,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kejahateanan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	467,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10,645,734,529	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kejahateanan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	15,740,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Kantor Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	5 Unit 20 Unit 35 Unit 43 Unit	3,302,962,200						5 Unit 20 Unit 35 Unit 43 Unit	6,100,000,000	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	1,278,715,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kejahateanan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	20 Unit	990,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	1,539,097,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kejahateanan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	35 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 Unit	57,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	43 Unit	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif				
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	427,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	5 Unit	5,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Medical Check UP Jumlah Pakaii Dinas serta atribut Kelengkapannya	Orang Paket		Orang Paket	2 Orang 50 Paket	435,359,200						2 Orang 50 Paket	1,012,000,000	
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaii Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaii Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				50 Paket	335,359,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50 Paket	902,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				14 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Paket/Bulan paket/bulan paket/bulan		Paket/Bulan paket/bulan paket/bulan	12 Paket/Bulan 12 paket/bulan 12 paket/bulan	3,049,789,405						12 Paket/Bulan 12 paket/bulan 12 paket/bulan	3,573,687,075	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	1,414,485,110	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah	12 Paket	1,750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	986,499,795	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah	12 Paket	1,100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	648,804,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah	12 Paket	713,687,075	SEKRETARIAT DAERAH	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						374,921,400								1,647,648,378	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	374,921,400						100 Persen	1,647,648,378		
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	80,424,710						1 Laporan	276,026,886		
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	80,424,710	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah	1 Laporan	276,026,886	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Pembekalan dan Evaluasi Tenaga Kontrak, Dokumen ANUAR, ABK dan EVAJAB) Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Tata Laksana, Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik)	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan	5 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan	294,496,690						5 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan	1,371,621,492		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
										Nasional	Daerah						
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	70,648,920	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD Kota Tomohon	4 Dokumen	275,026,886	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	62,495,470	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif 01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD Kota Tomohon	2 Laporan	270,196,740	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	95,237,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	SKPD Kota Tomohon	1 Dokumen	264,090,726	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	17,822,800	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	SKPD Kota Tomohon	2 Dokumen	297,216,414	SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Dokumen	48,292,400	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	06. Pengembangan kota menuju smart city	SKPD Kota Tomohon	5 Dokumen	264,090,726	SEKRETARIAT DAERAH		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						676,709,850								553,889,988		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	184,969,150									100 Persen	96,591,145
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	dokumen		dokumen	5 dokumen	53,720,150									5 dokumen	61,591,145

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	28,503,250	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Bagian-bagian Sekretariat Daerah Kota Tomohon	1 Dokumen	30,133,510	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	25,216,900	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Bagian-bagian Sekretariat Daerah Kota Tomohon	4 Laporan	31,457,635	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	12 Laporan	131,269,000						12 Laporan	35,000,000	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	131,269,000	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	01. Meningkatkan SDM yg berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Sekretariat Daerah Kota Tomohon	12 Laporan	35,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa	persen		persen	100 persen	491,720,700						100 persen	457,298,843	
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen Laporan Laporan		Dokumen Laporan Laporan	2 Dokumen 13 Laporan 7 Laporan	491,720,700						2 Dokumen 13 Laporan 7 Laporan	457,298,843	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (dokumen Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Program Pembangunan Daerah, dokumen kegiatan Forum Perangkat Daerah)				0 Dokumen 2 dokumen	31,243,450	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan Infrastruktur berkelanjutan	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	0 Dokumen 2 dokumen	93,638,259	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (laporan bahan				0 Laporan 7 laporan	126,967,100	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan Infrastruktur berkelanjutan	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	0 Laporan 7 laporan	209,763,435	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tomohon
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RUPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah/ Pemangung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		penyusunan laporan bahan penunsaan, laporan Kegiatan sulut expo, laporan kegiatan pembinaan dan fasilitasi)													
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan R/K, laporan, Laporan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kegiatan Raker pembangunan daerah, laporan epra)				0 Laporan 13 laporan	333,510,150	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	07. Penguatan infrastruktur berkelanjutan	Seluruh Perangkat Daerah dan Stakholder Terkait	0 Laporan 13 laporan	153,897,149	SEKRETARIAT DAERAH
TOTAL							57,960,968,000							72,802,924,874	

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Tomohon Tahun 2023, disusun setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Tomohon sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Tomohon untuk lima tahun kedepan.

Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rancangan Renja Sekretariat Daerah Kota Tomohon ini dapat menjadi suatu dokumen sebagai acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua *stakeholders* yang terkait didalam pengelolaan pendapatan asli daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan Rancangan Renja Tahun 2023 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tomohon dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tomohon.

Disadari bahwa penyusunan Rancangan Renja Tahun 2023 ini masih perlu penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam mengemban misi ini.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KOTA TOMOHON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politikn Daerah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon evaluasi pelaksanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon

Selanjutnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud

untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon bertujuan :

- Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon tahun 2023.
- Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
- Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon, proses penyusunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon, keterkaitan antara Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahunberjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Tahun Lalu dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon

2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon

3.2. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Berikut ini tabel evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah:

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kota Tomohon

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				98,54	6.375.397.890	5.713.732.977	91,71	6.744.670.042	6.744.670.042	100
				86.88	2.577.086.138	2.701.401.079	86.88			#DIV/0!
				95.69	12.094.400	11.573.000	95.69			

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	1 dok evaluasi Renja 1 dok Renja 1 dok Rancangan Renja 1 dok Renja perubahan 1 Keg Forum							
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.494.017.358	2.359.375.029				#DIV/0!
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		95.00	2.215.387.858	2.121.803.779	95.78	2.185.748.676	2.185.748.676	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	1 PPK 1 Bendahara 1 Opr. SIPD	85.26	278.629.500	237.571.250	85.26	302.132.169	302.132.169	

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	27 PDH	70.00	116.940.600	28.127.800	24.05			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			99,97						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis. 20bh/unit	100	6.353.600	6.353.600	100	6.981.900	6.981.900	100
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 jenis, 15 bh/unit	35.50	139.427.100	49.500.000	35.50	350.000	350.000	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6 jenis, 20bh/unit, 12 bulan	82,23	45.606.051	37.500.000	82,23	24.846.680	24.846.680	

				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20.000 lbr	70.00	19.558.200	15.429.400	78.89	15.041.800	15.041.800	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 exemplar, 12 bulan	80	5.130.000	4.550.000	88,69	5.130.000	5.130.000	100
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12 bln	60	22.700.000	15.340.000	67,58	24.000.000	24.000.000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	100	32.350.000	32.238.100	99,65			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65,38						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	12 bln	80.00	9.600.000	6.975.000	72,66	7.750.000	7.750.000	100

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa sumberdaya air dan listrik	12 bln	65	17.160.740	9.109.250	53,08	17.209.184	17.209.184	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bln	70	49.478.600	31.555.800	63,78	37.750.400	37.750.400	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			97,97						
				Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 orang, 12 bln	80.00	139.015.900	93.774.100	67,46	129.322.300	129.322.300	

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau			-	-	-	-	
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		100	123.750.000	121.950.200	98,55	250000000 -	250000000 -	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika								

				dan Sejarah Kebangsaan								
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			90	245.220.125	204.295.325	83,31	424.321.786	424.321.786
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								

			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			100	38.769.600	38.488.900	99,28	41.659.500	41.659.500	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			100	606.700.366	579.345.123	95,49	602.950.366	602.950.366	

			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			100	20.577.750	20.404.350	99,16			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									
			Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			60	108.048.400	95.306.100	88,21	54.031.100	54.031.100	

			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			95	905.517.000	831.561.300	91,83	474.882.350	474.882.350	
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			85	322.168.600	236.905.000	73,53	1.474.170.131	1.474.170.131	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- A. Issu – Issu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan perangkat daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon.
- B. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Beberapa faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Tabel 2.2

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Kepala Dinas Tugas: Membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik di Kota Tomohon	

<p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasioanal, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri;b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Penaganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri;c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Politik dalam Negeri.	
<p>Sekretaris</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan</p>	

<p>Kesatuan Bangsa dan Politik Kota</p> <p>Tomohon</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan badan dan kesekretariatan;b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan badan yang meliputi penyusunan program yang meliputi program dan anggaran, penyelenggaraan ketatausahaan meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat, penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan Perlengkapan ;c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang pada badan. <p>Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrasi kegiatan kesekretariatan dan badan;</p>	
--	--

<p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas badan, penataan kearsipan badan, penyelenggaraan kerumahtanggaan badan, pengelolaan administrasi perjalanan badan;b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan pengumpulan, penyiapan dan pengelolaan data pegawai, mutasi, disiplin, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai badan;c. Pelaksanaan administrasi umum dan ketatausahaan	<p>3) Kurangnya ASN</p> <p>4) Kurangya sarana dan prasarana penunjang</p>
<p>Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perencanaan dan program Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.b. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa .c. Pemetaan kondisi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.d. Pelaksanaan dan	

<p>pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.</p> <p>e. Pelaksanaan Pemantapan dan Peningkatan Bela Negara dan cinta tanah air.</p> <p>f. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa.</p> <p>g. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional.</p> <p>h. Penanaman dan pengamalan nilai – nilai pancasila.</p> <p>i. Revitalisasi dan Aktualisasi nilai – nilai Pancasila.</p> <p>j. Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.</p> <p>k. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.</p> <p>l. Pemahaman Sejarah Kebangsaan dan Nilai – nilai Perjuangan Kebangsaan.</p> <p>m. Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik</p>	
---	--

<p>Indonesia Tahun 1945.</p> <p>n. Pelaksanaan dan Pembinaan Pembauran Bangsa di Wilayah Kota Tomohon.</p> <p>o. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika.</p> <p>p. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme.</p> <p>q. Pelaksanaan Pembinaan dan Pemeliharaan Integrasi Bangsa.</p> <p>r. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan.</p> <p>s. Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan lingkup kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Bangsa dan Karakter Bangsa.</p> <p>t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
<p>Kepala Bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional</p> <p>Tugas:</p> <p>melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Kewaspadaan Nasional</p> <p>Fungsi:</p> <p>a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang kewaspadaan nasional & penanganan</p>	

<p>konflik.</p> <p>b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri,dampak teknologi dan informasi,kondisi perbatasan antar negara,serta keberadaan dan aktifitas orang asing serta pemetaan konflik.</p> <p>c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri.</p> <p>d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen.</p> <p>e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik.</p> <p>f. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik.</p> <p>g. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik.</p> <p>h. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik.</p> <p>i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan.</p> <p>j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan</p>	
---	--

<p>teknologi dan informasi.</p> <p>k. Pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat.</p> <p>l. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara.</p> <p>m. Pemantauan,evaluasi,dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing.</p> <p>n. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing.</p> <p>o. Pelaksanaan koordinasi,monitoring ,dan evaluasi pencegahan konflik,dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>p. Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan lingkup kegiatan Bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.</p> <p>q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
<p>Kepala Bidang Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatanmempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan</p>	<p>Terhambatnya advokasi dan pergerakan akibat kurangnya tenaga lapangan</p>

<p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan.b. Pemetaan Ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan.c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam.d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam.e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitasi pemerintahan dalam negeri.f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri.g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional.h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan.i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak stabilitas pemerintahan dalam negeri.j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan	
--	--

<p>sosial.</p> <p>k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.</p> <p>l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa.</p> <p>m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme.</p> <p>n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya.</p> <p>o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan.</p> <p>p. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan.</p> <p>q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.</p> <p>r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>	
<p>Kepala Bidang Politik Dalam Negeri</p> <p>Tugas</p> <p>melaksanakan sebagian tugas badan</p>	

<p>dibidang politik dalam negeri</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perencanaan dan Penyusunan Program bidang politik dalam negeri;b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang politik dalam negeri.c. Penyelenggaraan urusan peningkatan pendidikan politik masyarakat.d. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri.e. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri.f. Peningkatan kapasitas kelembagaan politik.g. Pemantauan perkembangan politik di daerah;h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan politik dalam negeri;i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
---	--

Tabel 2.3.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Kurangnya pemahaman Masyarakat Akan Wawasan Kebangsaan	Kurangnya Pemahaman	Kurangnya Pemahaman
2	Meningkatnya Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Masih kurangnnya Peran Partai politik ataupun Lembaga pendidikan	Belum optimalnya fasilitasi

Tabel 2.4
Faktor yang mempengaruhi permasalahan

No	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi	
		Faktor penghambat	Faktor pendorong
1	Kesadaran Hukum dan Politik	Rendahnya pemahaman	- Adanya kelembagaan yang kuat
2	Kurangnya pemahaman Wawasan Kebangsaan	Kurangnya sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Adanya dukungan dari Sekolah / Masyarakat dan pemerintah melalui sosialisasi

3	Masih kurangnnya Pembinaan ketahanan Ekonomi social budaya dan ormas		
		- Keterbatasan Petugas di lapangan	Bantuan Pemerintah terhadap Ormas - ormas

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut ini tabel review terhadap rancangan awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tomohon 2023

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon

No.	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA				7,677,161,466	BELANJA				7,677,161,466	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,228,696,933	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,228,696,933	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12,094,400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12,094,400	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen perencanaan	1 dok evaluasi Renja 1 dok Renja 1 dok Rancangan Renja 1 dok Renja perubahan 1 Keg Forum	12,094,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen perencanaan	1 dok evaluasi Renja 1 dok Renja 1 dok Rancangan Renja 1 dok Renja perubahan 1 Keg Forum	12,094,400	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,487,880,845.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,487,880,845.00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		2,337,077,676	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		2,337,077,676	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya jasa penatausahaan dan pengujian/verifik asi keuangan	1 PPK 1 Bendahara 1 Opr. SIPD 1 Opr. E- monev 4 pengelola DAK 1 verifikator (12 bulan)	534,622,320	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya jasa penatausahaan dan pengujian/verifik asi keuangan	1 PPK 1 Bendahara 1 Opr. SIPD 1 Opr. E-monev 4 pengelola DAK 1 verifikator (12 bulan)	534,622,320	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					

2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tomohon	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	27 PDH		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tomohon	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	27 PDH	-	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				76,350,380.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				76,350,380.00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kota Tomohon	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis, 20bh/unit	6,862,300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kota Tomohon	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis, 20bh/unit	6,862,300	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis, 15 bh/unit	2,382,900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis, 15 bh/unit	350,000.00	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Bahan logistik kantor	6 jenis, 20 bh/unit, 12 bulan	25,098,353	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tomohon	Tersedianya peralatan rumah tangga	6 jenis, 20 bh/unit, 12 bulan	25,098,353	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tomohon	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20.000 lbr	15,041,800.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tomohon	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20.000 lbr	15,041,800.00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 exemplar, 12 bulan	5,130,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 exemplar, 12 bulan	5,130,000.00	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12 bln	24,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12 bln	24,000,000.00	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	43,510,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	43,510,000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau lainnya	3 jenis, 6 bh/unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kota Tomohon	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	3 jenis, 6 bh/unit	-	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				62,709,584	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	Tersedianya materai	12 bln	8.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	Tersedianya materai	12 bln	7,750,000.00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	Tersedianya jasa sumberdaya air dan listrik	12 bln	23,081,184 17,209,184.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	Tersedianya jasa sumberdaya air dan listrik	12 bln	23,081,184 17,209,184.00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Penunjang Untuk Urusan Pemerintahan Daerah	12 bln	56,850,400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Penunjang Untuk Urusan Pemerintahan Daerah	12 bln	56,850,400	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129,322,300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129,322,300	

1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 orang, 12 bln	129,322,300.00	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 orang, 12 bln	129,322,300.00	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Tomohon	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 unit bangunan	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Tomohon	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 unit bangunan	-	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN				733,722,186	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN				733,722,186	
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				733,722,186	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				733,722,186	
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tomohon			23,493,800	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tomohon			23,493,800	
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tomohon			249,933,600	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				249,933,600	
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tomohon			460,294,786	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				460,294,786	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Tomohon			806,014,466	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				806,014,466	

11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				806,014,466	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				806,014,466	
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Tomohon			41,634,600	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Tomohon			41,634,600	
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Tomohon			595,379,866	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah				595,379,866	
3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Tomohon			169,000,000-	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				169,000,000-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Kota Tomohon			74,006,500	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI				74,006,500	

	KEMASYARAKATAN					KEMASYARAKATAN					
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan				74,006,500	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan				74,006,500	
15	Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		54,006,500	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		54,006,500	
2	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		20,000,000	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		20,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Tomohon			664,280,700	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				664,280,700	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan				664,280,700	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan				664,280,700	
15	Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					

9	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di		54,280,700	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		54,280,700	
10	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan diDaerah		610,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan diDaerah		610,000,000	
13	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Tomohon			2,170,440,681	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Tomohon			2,170,440,681	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan				2,170,440,681	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan				2,170,440,681	
16	Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					

1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		504,970,150	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tomohon			504,970,150	
2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1,665,470,531	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon			1,665,470,531	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Tomohon

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Tomohon sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam RENSTRA Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tomohon sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2023–2026.

Visi Pembangunan Kota Tomohon:

“TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

Misi Pembangunan Kota Tomohon:

1. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota religius
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor
3. Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia
4. Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan
5. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas

Program Unggulan Pembangunan Kota Tomohon:

1. Pelayanan prima kepada masyarakat dari lahir sampai meninggal
2. Penyediaan akses air bersih kepada masyarakat secara merata
3. Penyediaan rumah sederhana layak huni
4. Penataan pasar Tomohon menjadi pasar tradisional modern
5. Peningkatan insentif bagi perangkat dan ASN
6. Insentif untuk rohaniawan
7. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan
8. Bantuan sosial bagi lansia
9. Peningkatan santunan duka
10. Memberikan beasiswa bagi siswa dan tenaga pendidik
11. Penyediaan sarana kesenian dan olahraga di setiap kecamatan
12. Membuka akses ekonomi dan pariwisata meliputi Kayawu-Koha-Agotey sebagai penyangga KEK Likupang, mengingat Tomohon merupakan daerah terdekat ibukota Provinsi sehingga menjadi salah satu daerah berpotensi penyangga ekonomi
13. Pembuatan taman bunga Kota Tomohon
14. Pembuatan wisata air panas Lahendong
15. Pembuatan starting point wisata alam pegunungan
16. Melaksanakan event – event pariwisata lokal, regional, nasional dan internasional
17. Pembangunan akses perkebunan dan pariwisata
18. Mekanisasi alat – alat pertanian, penyediaan bibit dan pupuk yang terjangkau bagi petani

- 19. Tomohon Smart City
- 20. Sinergitas dengan Provinsi dan Pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Visi Pembangunan Kota Tomohon, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon menitik beratkan pada isu "Peningkatan kesejahteraan masyarakat", dengan program pembangunan **“PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN, KUALITAS SDM SERTA PEMULIHAN EKONOMI”**.

Telaahan RENSTRA Nasional Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon Merupakan Unsur pendukung Tugas Pemerintah Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kesatuan

3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran

N O	TUJUAN	SASARAN
1	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan Kualitas kerukunan antar umat beragama dan wawasan kebangsaan- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi Politik Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat agar terpeliharanya stabilitas keamanan daerah yang aman dan kondusif- Terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan meningkatkan wawasan kebangsaan- Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat Terwujudnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan- Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

3.4. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membidangi urusan Pemerintahan Umum .

Rekapitulasi program dan kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
 - Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan.
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyaraktan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik

Tabel 3.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluar an Sub	Hasil Kegiatan						
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							7,677,161,466				10,897,514,918		
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,228,696,933				4,641,786,762		
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							12,094,400				13,303,840		
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen	6 Dokume n	100 Persen	12,094,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya Perencanaa n Penganggar an dan Evaluasi KinerjaPeran gkat Daerah	6 Dokumen	13,303,840
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,871,699,996				3,330,194,902		
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya dana administrasi Keuangan	Kota Tomohon, Tomohon Barat Woloan Satu	100 Persen	40 Orang/bul	an100 Persen	2,337,077,676	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksanan ya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	2,957,580,692

8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya dana administrasi Keuangan		100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	534,622,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	372,614,210
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5,123,300					75,000,000
8	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	40 Paket	100 Persen	5,123,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	75,000,000
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								122,025,353					453,731,316
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Adminisitrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Paket	100 Persen	6,862,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	7,100,000
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Adminisitrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 Persen	2,382,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	175,000,000
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Adminisitrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Paket	100 Persen	25,098,353	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	38,331,316

8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Adminisitrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 Persen	15,041,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	16,000,000
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5,123,300					75,000,000
8	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	40 Paket	100 Persen	5,123,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	75,000,000
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							122,025,353						453,731,316
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Adminisitrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Paket	100 Persen	6,862,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	7,100,000
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Adminisitrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 Persen	2,382,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	175,000,000
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Adminisitrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Paket	100 Persen	25,098,353	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	38,331,316
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Adminisitrasi Umum Perangkat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	100 Persen	12 Paket	100 Persen	15,041,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang	100 Persen	16,000,000

						Urusan Pemerintah	yang Disediakan	Daerah	Semua Kelurahan							Urusan Pemerintah		
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Adminisitrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	5,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	6,300,000
8	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Adminisitrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	26,000,000
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Adminisitrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 Persen	25 Laporan	100 Persen	43,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	185,000,000
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								88,431,584					117,202,354
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah materai	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 Persen	850 Materai	100 Persen	8,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	9,300,000
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	23,081,184	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	29,876,814

8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	56,850,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	7 8,025,540
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								129,322,300				352 ,354,350	
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100 Persen	15 Unit	100 Persen	129,322,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	152, 354,350
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								733,722,186				1,265, 939,728	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								733,722,186				1,265, 939,728	
8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0Terlaksananya Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Nilai luhur Budaya Bangsa	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokume n	100 Persen	23, 493,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0Terlaksana nya Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 Persen	350, 000,000

							Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun											
8	1	2	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0Terlaksananya Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Nilai luhur Budaya Bangsa		100 Persen	5 Dokumen	100 Persen	249,933,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0Terlaksananya Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 Persen	345,939,728
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0Terlaksananya Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Nilai luhur Budaya Bangsa	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 Orang	100 Persen	460,294,786	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0Terlaksananya Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 Persen	570,000,000
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							806,014,466						778,324,928

8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								806,014,466					778,324,928
8	1	3	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Cakupan Meningkatnya Peran Partai Politik Lembaga PendidikanPolitik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	41,634,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Meningkatnya Peran Partai Politik Lembaga PendidikanPolitik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	4 5,646,500
8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Cakupan Meningkatnya Peran Partai Politik Lembaga PendidikanPolitik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	595,379,866	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Meningkatnya Peran Partai Politik Lembaga PendidikanPolitik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	674, 370,403

					Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun											
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Cakupan Meningkatnya Peran Partai Politik Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	450 Orang	100 Persen	169,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Meningkatnya Peran Partai Politik Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	25,635,525
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								74,006,500					364,000,000

8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								74,006,500					364,000,000
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Ormas dan Hibah Ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Ormas dan Hibah Ormas	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	150 Orang	100 Persen	54,006,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksanan ya Sosialisasi Ormas dan Hibah Ormas	100 Persen	64,000,000
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Ormas dan Hibah Ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Ormas dan Hibah Ormas	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	30 Orang	100 Persen	20,000,000			Terlaksanan ya Sosialisasi Ormas dan Hibah Ormas	100 Persen	300,000,000
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								664,280,700					1,708,463,500
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								664,280,700					1,708,463,500

8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Tokoh Tokoh Agama dan Hibah FKUB		100 Persen	150 Orang	100 Persen	54,280,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	958,463,500
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Tokoh Tokoh Agama dan Hibah FKUB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Orang	100 Persen	610,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	750,000,000
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								2,170,440,681					2,139,000,000

8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								2,170,440,681					2,139,000,000
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Cakupan Peningkatan Pemeliharaan Keamanan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya Kewaspadaan Dini di Masyarakat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	504,970,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Peningkatan Pemeliharaa n Keamanan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 Persen	565,000,000
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pemeliharaan Keamanan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kewaspadaan Dini di Masyarakat		100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	1,665,470,531	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Peningkatan Pemeliharaa n Keamanan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 Persen	1,574,000,000
TOTAL													7,677,161,466					10,897,514,918

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon.

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7,677,161,466	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,228,696,933	
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,094,400	
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,094,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,871,699,996	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,337,077,676	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	534,622,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,123,300	
8	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5,123,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	122,025,353	
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,862,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,382,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,098,353	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,041,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,123,300	
8	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5,123,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	122,025,353	
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,862,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,382,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,098,353	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,041,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,431,584	
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,081,184	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56,850,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129,322,300	
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129,322,300	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	733,722,186	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	733,722,186	
8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	23,493,800	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI
8	1	2	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	249,933,600	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	460,294,786	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	806,014,466	
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	806,014,466	
8	1	3	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	41,634,600	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI

8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	595,379,866	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	169,000,000	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	74,006,500		
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	74,006,500		
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	54,006,500	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20,000,000		
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	664,280,700		
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	664,280,700		
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	54,280,700	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI

8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	610,000,000	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2,170,440,681		
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2,170,440,681		
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	504,970,150	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1,665,470,531	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI
TOTAL						7,677,161,466		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon. Semoga RENJA tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2022 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi

pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah. antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2018 , maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Di dalam Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Propinsi Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota , RKPD Kota Tomohon dan Renstra Dinas).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
- c. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002